



We are **on the right track**

Laporan Tahunan | Annual Report 2015

PENJELASAN TEMA

Theme Explanation

We are **on the right track**

“Di Jalur yang Tepat”

Pasca momentum *groundbreaking* pada konstruksi bawah tanah proyek MRT Jakarta, pembangunan proyek pionir ini telah mengalami kemajuan berarti. Pengoperasian *Tunnel Boring Machine* (TBM) yang dinamai Antareja—tokoh wayang yang memiliki kesaktian mampu berjalan di dalam bumi—memberikan *signal* yang kuat atas kemajuan tersebut. Demikian juga dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. IP-569 dan IP-571 antara *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk pembiayaan lanjutan proyek, yang memberikan kepastian akan perjalanan proyek hingga beroperasi nanti.

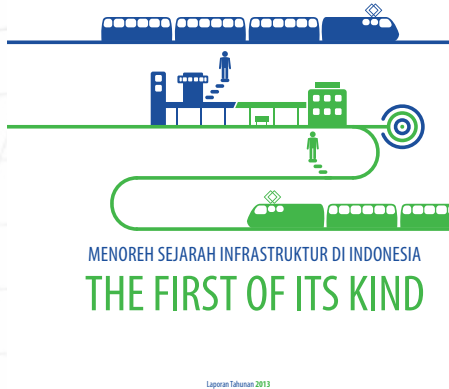
Tema “*On The Right Track*”, atau “Di Jalur yang Tepat” pada laporan tahunan PT MRT Jakarta tahun 2015 menggambarkan *progress* atau kemajuan yang telah sesuai dengan kalkulasi, tahapan dan perencanaan yang telah bergulir sejak momentum *groundbreaking*. Tema ini juga memberikan gambaran akan kepastian proyek ini hingga saat beroperasinya nanti, dimana manajemen menyambutnya dengan berbagai persiapan terkait Operasional dan Pemeliharaan yang akan berfungsi saat moda transportasi MRT Jakarta beroperasi secara penuh.

Berkat komitmen semua pihak, seluruh perencanaan, eksekusi, dan kepastian telah ditangan. Sisanya adalah kesinambungan yang harmonis, agar “Jalur yang Tepat” yang telah lama dinanti-nanti ini dapat terwujud demi memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat Jakarta.

Since the momentum of its underground construction *groundbreaking*, the MRT Jakarta project construction pioneer has borne witness to significant progress. The Operation of the *Tunnel Boring Machines* (TBM) named Antareja – Javanese puppet character who has supernatural powers capable of walking under the ground – has indicated a strong signal on that progress. Likewise, the signing of IP-569 and IP-571 Loan Agreements between Japan International Cooperation Agency (JICA) and the Government of the Republic of Indonesia for the financing the project continuation also provides the confirmation on the project continuity until the operational commencement.

The theme “*On the Right Track*” of this 2015 annual report of PT MRT Jakarta depicts the progress that has been realized in accordance with the calculations, phases and planning since the *groundbreaking* momentum. This theme also gives an overview of the project’s certainty until its later operation, for which the Management has made various preparations related to Operations and Maintenance functioning when MRT Jakarta transportation mode fully operates.

Thanks to the commitment of all parties, all the planning, execution, and confirmation are already in our hands. One thing that remains is a harmonious continuity, so that “the Right track” which has been long awaited can be realized in order to provide optimal public services to the citizens of Jakarta.



2013

“Menoreh Sejarah Infrastruktur Indonesia; *The First of Its Kind*”

10 Oktober 2013, proyek MRT Jakarta resmi bergulir melalui momentum *groundbreaking* pada konstruksi bawah tanah. Melalui momentum ini, dimulailah babak baru atas wajah infrastruktur transportasi Indonesia, khususnya model transportasi darat. Terutama ketika MRT Jakarta dibangun untuk menjawab persoalan kemacetan yang terus melanda ibukota. *The First of Its Kind* layak untuk disematkan pada MRT Jakarta sebagai proyek yang telah lama dinanti-nanti banyak pihak.

“Writing the History of Indonesia’s Infrastructure; *The First of Its Kind*”

On 10 October 2013, MRT Jakarta project officially commenced with the groundbreaking of its underground construction. This momentum indicated the beginning of the new face of Indonesia’s transportation infrastructure, particularly land transportation model. Most notably, MRT Jakarta is built to address the bottlenecks that continue to engulf the capital. The MRT Jakarta deserves to be predicated “The First of Its Kind”, as it is a project that has been long-awaited by many parties.

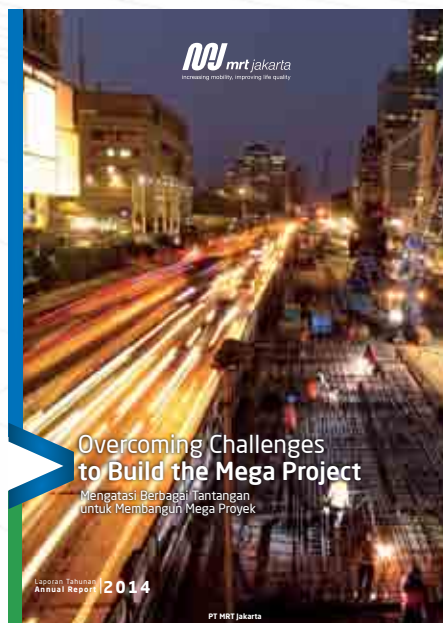
2014

Overcoming Challenges to Build the Mega Project” “Mengatasi Berbagai Tantangan untuk Membangun Mega Proyek”

Pasca *groundbreaking* di tahun 2013, proses berikutnya justru menjadi tantangan untuk membuktikan keseriusan pembangunan mega proyek MRT Jakarta. Tahapan persiapan pekerjaan telah mulai dijalankan, dengan serangkaian kendala yang mulai ditemui. Komitmen dan kerjasama seluruh pihak—baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan—memiliki peran penting untuk menjawab dan mengatasi kendala-kendala tersebut, yang tentunya akan menjadi modal bagi keberlanjutan MRT Jakarta pada proses dan tahapan pembangunan beberapa tahun ke depan.

“Overcoming Challenges to Build the Mega Project”

The next process after the 2013 groundbreaking was definitely a challenge to prove the seriousness of MRT Jakarta mega project. Work preparation phase commenced with a series of challenges. The commitment and cooperation of all parties—both shareholders and stakeholders play an important role to address and overcome these challenges, which would certainly be beneficial for the MRT Jakarta’s sustainability for the next development process and phases in the coming years.



antareja,

si sakti yang berbakti

Antareja, the Devoted Superpower

Sangat cocok kiranya jika kedua *Tunnel Boring Machine* (TBM) yang digunakan untuk pengeboran bawah tanah pada struktur Konstruksi Bawah Tanah pekerjaan *Contract Package* (CP) 104 dan CP 105 di jalur Sudirman hingga Setiabudi diberi nama "Antareja". Tokoh pewayangan asli Jawa ini punya berbagai kesaktian yang selalu berhubungan dengan tanah dan bumi. Membunuh tokoh lain dengan cara menjilat bekas tapak kakinya; menghidupkan tokoh yang sudah mati selama masih menyentuh bumi atau tanah; dan bahkan mampu hidup dan berjalan di bawah bumi.

Antareja adalah putra dari Bima, si mahasakti dari keluarga Pandawa yang biasa dikenal dengan sebutan "Lima Pandawa". Ibunya, Dewi Nagagini, berasal dari bangsa dewa ular yang masih termasuk bangsa dewa-dewi. Antareja dibesarkan oleh ibu dan kakeknya, Hyang Anantaboga, raja di Kerajaan Saptapatala yang berada di lapis ketujuh di dasar bumi. Kelak, sang kakek dan ibunya mewarisi Antareja ajian Upasanta dan cincin Mustikabumi; dua kesaktian unggul yang membuat Antareja dianggap dapat merusak skenario perang besar Baratayuda, perang paling fenomenal di Kurusetra yang melibatkan seluruh kekuatan Kerajaan Pandawa dan Kurawa.

Betapa tidak. Antareja, bersama kedua putra Bima lainnya: Antasena dan Gatotkaca, memiliki kesaktian yang dapat menghancurkan Kerajaan Kurawa dalam sekejap. Para dewa, khususnya Sri Kresna, tidak setuju dengan peperangan kilat, karena justru akan menghilangkan saripati dari kisah antara yang baik dan yang buruk. Bagi para dewa, yang mungkin menjadi warisan dari leluhur kita, proses jauh lebih penting daripada sekedar kemenangan mutlak sesaat. Kesaktian tidak membuat Antareja pongah dan sombong. Atas permintaan Bima sang ayah, Antareja menjilat telapak kakinya sendiri, kemudian gugur sebelum perang besar Baratayuda digelar; perang yang kemudian memberikan banyak kisah inspiratif tentang arti dan makna kehidupan.

Antareja mungkin bukan pahlawan di medan perang Baratayuda. Namun, kesaktiannya berjalan di bawah tanah, dan kecintaannya pada keluarga dan bangsanya, membuat ia menjadi salah satu tokoh penting dalam kisah wayang yang berkembang di Jawa. Tidak heran kiranya jika Presiden Joko Widodo melekatkan nama tokoh ini untuk dua mesin TBM yang digunakan dalam proyek MRT Jakarta. Tentu, dengan harapan agar kedua mesin ini mampu menjadi seperti Antareja, si sakti yang sangat berbakti.

It is presumably appropriate to give the name "Antareja" to the two Tunnel Boring Machine (TBM) units used for underground drilling in the Underground Structure Construction of the Contract Package (CP) 104 and CP 105 in the Sudirman-Setiabudi lane. This original Javanese puppet character had a full range of supernatural powers that were always associated with soil and earth. He kills characters by licking their footprints, revived perished characters as long as they still touched the earth or soil; and even he was able to live and walk under the ground.

Antareja was the son of Bima, one of the superpowerful sons from the Pandava family collectively known as "the Five Pandavas". His mother was Dewi Nagagini, daughter of the snake god. Antareja was raised by his mother and grandfather, Hyang Anantaboga, the King of Saptapatala Kingdom resided on the seventh layer of the ground. Later, his grandfather and mother bequeathed "Upasanta" spell and "Mustikabumi" ring to him; two superior powers that made Antareja was considered potential to affect the scenario of the great war Baratayuda, the most phenomenal war in Kurukshetra involving the whole forces of the Pandavas Kingdom and Kauravas Kingdom.

It was not surprising. Antareja and two other sons of Bima, namely Antasena and Gatotkaca, possessed supernatural powers that could destroy Kauravas Kingdoms in seconds. The gods and goddesses, especially Sri Kresna, did not agree with a superfast war because it would eliminate the essence of the story between the good and the bad. For the gods and goddesses, who might be a legacy from our ancestors, the process was much more important than an absolute victory that would not last long. Possessing supernatural power did not make Antareja smug and arrogant. At the request of his father Bima, Antareja licked the soles of his own feet, then died before the event of the great war Baratayuda, a war which then gives a lot of inspiring stories about the meaning and significance of life.

Antareja was probably not a hero in the Baratayuda battlefield. However, his walking underground power and his great love for his family and nation have made him one of the key figures in the Javanese puppet story. Therefore, it was reasonable if the President Joko Widodo attached the name of this character for two TBM machines used in Jakarta MRT project. The hope is to have the two machines capable of being like Antareja, the devoted superpower.





Owner
Consultant
SHIMIZU-OBAYASHI
JAYA KONSTRUKSI
Manufacturer

DAFTAR ISI

Table of Contents



08

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

41

Proyek MRT Jakarta
MRT Jakarta Project



Penjelasan Tema Theme Explanation	44	Sekilas Tentang MRT Jakarta Brief History of MRT Jakarta
Antareja, Si Sakti Yang Berbakti Antareja, the Devoted Superpower	48	Jejak Langkah Milestones
Daftar Isi Table of Content	54	Visi dan Misi Vision and Mission
KINERJA 2015 2015 Performance	55	Nilai Perusahaan Company Values
02 Kemajuan Proyek Progress Project	56	Kegiatan Usaha Business Activities
04 Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	57	Cakupan Proyek Scope of Projects
06 Peristiwa Penting Important Events	58	Wilayah Operasional Operational Areas
09 Penghargaan dan Sertifikasi Reward and Certification	60	Struktur Organisasi PT MRT Jakarta Tahun 2015 Organization Structure of PT MRT Jakarta 2015
11 LAPORAN MANAJEMEN Management Report	68	Pejabat Eksekutif Executive Officials
14 Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	74	Kepemilikan Saham dan Informasi Saham Share Ownership and Share Information
18 Profil Dewan Komisaris Profile of Board of Commissioners	75	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institution and Profession
24 Laporan Direksi Report from the Board of Directors	77	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis
36 Profil Direksi Profile of Board of Directors	78	Tinjauan Umum General Overview
41 PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	82	Tinjauan Operasional Operational Overview
42 Informasi Umum General Information		



98
Manajemen Risiko
Risk Management



166
Tata Kelola
Perusahaan
Good Corporate
Governance

254
Laporan Keuangan
Financial Statement



97	Tinjauan Keuangan Financial Review	215	Penilaian Tata Kelola Perusahaan Assessment of Corporate Governance
109	Rencana Pengembangan Usaha Business Development Plan	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
116	Sumber Daya Manusia Human Resources	219	Corporate Social Responsibility
130	Teknologi Informasi Information Technology	220	Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Basic Principles Of Corporate Social Responsibility
137	TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance	223	Komitmen untuk Lingkungan Hidup Yang Harmoni Commitment for Harmonious Environment
138	Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan Basic Principles Of Good Corporate Governance	240	Tanggung Jawab Sosial Atas Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Social Responsibility on Employment, Occupational Health And Safety
142	Struktur Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Structure	247	Pengembangan Sosial Masyarakat Social Community Development
192	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	248	Komitmen Atas Produk, Layanan Dan Pelanggan Commitment To Product, Service And Customers
195	Tata Kelola Keterbukaan Informasi The Governance Of Information Transparency	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
205	Kode Etik Dan Penerapannya Code Of Conduct and its Implementation	251	Letter of Statement of Members of Board of Commissioners and Directors
210	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	255	Laporan Keuangan Financial Statements
211	Perkara Penting Dan Permasalahan Hukum Important Case And Legal Issues		
212	Transparansi Informasi Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya Transparency of Information Which Has Not Disclosed In Other Reports		

We are **on the right track**



KINERJA 2015

2015 PERFORMANCE

- 002 Progress Project
Progress Project
- 004 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
- 006 Peristiwa penting
Important Event
- 009 Penghargaan dan sertifikasi
Reward and Certification

KEMAJUAN PROYEK

Progress Project



Bendungan Hilir 2015
Januari/January



Bendungan Hilir 2015
Desember/December



Blok M 2015
Mei/May



Blok M 2015
Desember/December



Bundaran HI 2015
Mei/May



Bundaran HI 2015
Desember/December



Fatmawati 2015
Mei/May



Fatmawati 2015
Desember/December



Istora 2015
Januari/January



Istora 2015
Desember/December



Lebak Bulus 2015
Mei/May



Lebak Bulus 2015
Desember/December

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Laba Rugi				Income Statement
(dalam jutaan Rupiah)	2015	2014*	2013	(in million rupiah)
Beban Usaha	(63.667)	(55.721)	(33.718)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain	909	23.966	(2.356)	Other Income
Rugi Tahun Berjalan	(62.757)	(31.754)	(35.872)	Loss of the Year
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(62.196)	(32.141)	(35.872)	Comprehensive Loss of the Year

*) Disajikan kembali atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)

*Restated for the implementation of PSAK No. 24 (Revised 2013)

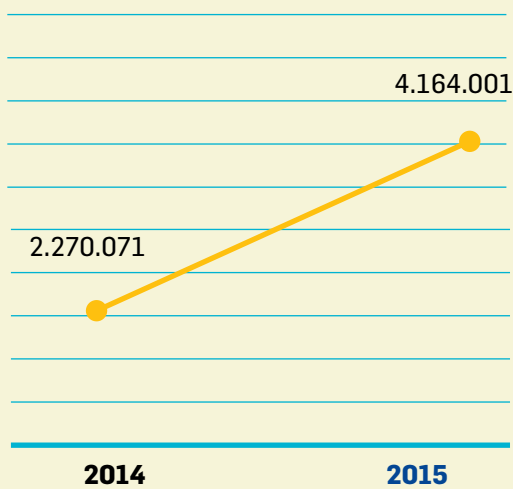
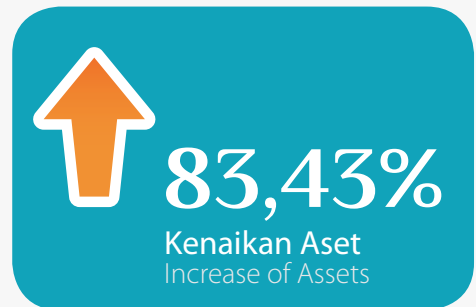
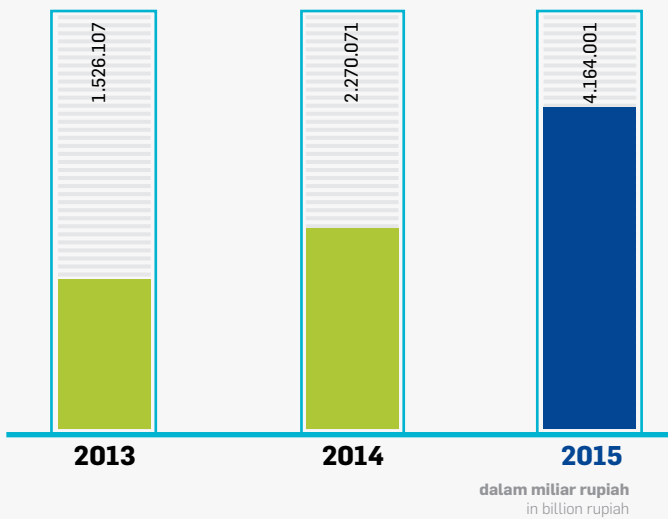
Laporan Posisi Keuangan				Statement of Financial Position
(dalam jutaan Rupiah)	2015	2014*	2013	(in million rupiah)
Aset Lancar	395.308	299.642	219.283	Current Assets
Aset Tidak Lancar	3.768.693	1.970.429	1.306.284	Non-Current Assets
Jumlah Aset	4.164.001	2.270.071	1.526.107	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	201.743	423.393	131.999	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	201.997	41.554	16.734	Noncurrent Liabilities
Jumlah Liabilitas	403.740	464.947	148.733	Total Liabilities
Ekuitas Bersih	3.759.441	1.808.150	1.377.374	Net Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	4.164.001	2.270.071	1.526.107	Total Liabilities and Equity

*) Disajikan kembali atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)

*Restated for the implementation of PSAK No. 24 (Revised 2013)

Rasio-rasio Keuangan				Financial Ratios
(dalam persen)	2015	2014	2013	(in percent)
Rasio Lancar	195,95%	71,04%	166,12%	Current Ratio
Rasio Solvabilitas	10,31%	4,90%	10,26%	Solvability Ratio
Rasio Kas	194,19%	70,06%	162,73%	Cash Ratio
Quick Ratio	195,95%	71,04%	166,12%	Quick Ratio
Total Liabilitas Terhadap Ekuitas	10,74%	25,61%	10,80%	Total Debt to Equity Ratio
Hutang Jangka Pendek untuk Ekuitas	5,37%	23,34%	9,58%	Short Term Debt To Equity
Hutang Jangka Panjang untuk Ekuitas	5,37%	2,27%	1,21%	Long Term Debt To Equity
Hutang Aset	9,70%	20,39%	9,75%	Debt To Asset

ASET/ ASSETS



PERISTIWA PENTING

Important Events

JANUARI/JANUARY

Persiapan Pekerjaan Pondasi Stasiun Layang Sisingamangaraja

Pembangunan Stasiun Layang Sisingamangaraja telah memasuki pekerjaan pembangunan pondasi stasiun.

Preparation of Foundation Work of Sisingamangaraja Elevated Station

Construction of Sisingamangaraja Elevated Station has entered the construction of station foundation work.

FEBRUARI/FEBRUARY

Proyek Pembangunan Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta Masuki Pekerjaan Penggalian Stasiun Senayan

Pekerjaan pembuatan *d-wall* atau pembangunan dinding stasiun di setiap titik konstruksi stasiun bawah tanah proyek MRT Jakarta hampir rampung dikerjakan. Selanjutnya, akan dilakukan pekerjaan penggalian Stasiun Bawah Tanah di titik Senayan.

MRT Jakarta Underground Construction Project has entered Excavation Work of Senayan Station

D-Wall construction or construction of station wall in every construction point of MRT Jakarta underground project was almost finished. Then, excavation work of Senayan underground station would be started.



MARET/MARCH

Kontrak *Rolling Stock* Proyek MRT Jakarta Ditandatangani

Manajemen PT MRT Jakarta mengumumkan pemenang tender CP-108 berupa *Rolling Stock* MRT Jakarta. Setelah diselesaikannya proses lelang yang dilakukan sejak Februari 2014 lalu untuk rangkaian kereta rel listrik MRT Jakarta tersebut, manajemen PT MRT Jakarta melakukan penandatanganan kontrak dengan kontraktor Sumitomo Corporation bertempat di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

The Signing of Rolling Stock Contract of MRT Jakarta Project

PT MRT Jakarta management announced the winner of CP-108 which is the tender for Rolling Stock MRT Jakarta. After the completion of the tender process carried out since February 2014 and for the electric trains of MRT Jakarta, PT MRT Jakarta management signed a contract with Sumitomo Corporation contractor held at City Hall, DKI Jakarta Province.



APRIL/APRIL

Kontrak *Railway Systems and Trackwork* Proyek MRT Jakarta Ditandatangani

Manajemen PT MRT Jakarta mengumumkan pemenang tender CP-107, yaitu pengadaan *Railway Systems and Trackwork* untuk proyek MRT Jakarta. Setelah melalui proses lelang sejak Februari 2014, manajemen PT MRT Jakarta melakukan penandatanganan kontrak dengan *Metro One Consortium* bertempat di Hotel Pullman Jakarta.

The Signing of Contract of Railway Systems and Trackwork of MRT Jakarta Project

PT MRT Jakarta Management announced the winner of CP-107 which is the tender of the Railway System and Trackwork procurement for MRT Jakarta Project. After the completion of the tender process carried out since February 2014, PT MRT Jakarta Management signed a contract with Metro One Consortium at Hotel Pullman Jakarta.

MEI/MAY

Kedatangan Mesin TBM I di Pelabuhan Tanjung Priok

TBM atau *Tunnel Boring Machine* adalah mesin bor bawah tanah yang akan digunakan untuk pembuatan jalur bawah tanah di sepanjang Senayan hingga Bundaran HI. Mesin bor bawah tanah dengan diameter 6,7 m ini didatangkan langsung dari Jepang. Mesin bor pertama dari total 4 (empat) mesin bor yang akan digunakan pada proyek MRT Jakarta ini memiliki berat bersih hampir 274 ton. Mesin ini di buat oleh *Japan Tunnel System Corporation (JTSC)* dan di desain khusus untuk menggali tanah di sepanjang Sudirman–Thamrin.

Arrival of TBM I Machine at Tanjung Priok Port

Tunnel Boring Machine (TBM) is tunnel boring machine that will be used for the construction of underground track from Senayan to Bundaran HI. This 6.7 m diameter tunnel boring machine is imported directly from Japan. This first tunnel boring machine from the total of 4 (four) which will be used at MRT Jakarta Project has total net weight of almost 274 tons. These Machines are made by Japan Tunnel System Corporation (JTSC) and specially designed for excavation work along Sudirman – Thamrin Street.



JUNI/JUNE

Dimulainya Pekerjaan Pengecoran Atap Stasiun Istora Proyek MRT Jakarta

Perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta, khususnya pekerjaan konstruksi stasiun bawah tanah terus berlanjut. Kali ini pekerjaan pembangunan Stasiun Istora memasuki tahapan pengecoran atap stasiun (*roof slab*).

Commencement of Roof Slab of Istora Station, MRT Jakarta Project

MRT Jakarta Project continue to progress, particularly the construction of underground station. To this date, construction work of Istora station has entered roof slab stage.

JULI/JULY

Perkembangan pekerjaan jalur layang MRT Jakarta telah memasuki tahapan pengangkatan *Gantry Crane* di titik Sisingamangaraja. *Gantry Crane* digunakan untuk pemasangan *Box Girder* atau Gelagar Jalur Layang.

MRT Jakarta elevated development has entered the Gantry Crane lifting step in Sisingamangaraja point. Gantry Crane is used to Box Girder or *Gelagar* elevated installation.

AGUSTUS/AUGUST

Penurunan Mata Bor Mesin Bor Bawah Tanah Proyek MRT Jakarta

Patung Pemuda Membangun menjadi lokasi perdana pengoperasian mesin bor bawah tanah proyek MRT Jakarta. Saat itu, sedang dilakukan perakitan *Tunnel Boring Machine (TBM)* pertama di lokasi tersebut. Pada 11 Agustus 2015, di lokasi Patung Pemuda Membangun diturunkan salah satu komponen penting dalam rangkaian mesin bor yang dikenal dengan sebutan TBM, yaitu komponen mata bor (*cutterhead*). Proses penurunan *cutterhead* yang berbobot ± 34 ton ini disaksikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta.

Lowering Cutterhead of Tunnel Boring Machine, MRT Jakarta Project

Pemuda Membangun Statue is the first location for the operation of the tunnel boring machine of MRT Jakarta project. Currently, the assembly of Tunnel Boring Machine (TBM) 1 is conducted at this location. On August 11, 2015, in this location one of important component of TBM (series of tunnel boring machine), known as *Cutterhead* is lowered. The lowering of *Cutterhead* weighing of ± 34 tons was witnessed by the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta.



PERISTIWA PENTING

Important Events



SEPTEMBER/SEPTEMBER

Dimulainya Pengoperasian Mesin Bor Bawah Tanah Proyek MRT Jakarta

Pekerjaan konstruksi bawah tanah proyek MRT Jakarta akan menggunakan salah satu mesin bor yang biasa disebut dengan *Tunnel Boring Machine* (TBM). TBM yang pertama, mulai beroperasi dari titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan dan akan melakukan pekerjaan penggalian serta konstruksi terowongan jalur bawah tanah MRT Jakarta ke arah utara menuju titik Setiabudi. Mesin bor bawah tanah pertama proyek MRT Jakarta yang bernama "Antareja" mulai beroperasi dari titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan. Acara pengoperasian perdana mesin bor bawah tanah yang dilakukan pada 21 September 2015 ini dihadiri dan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.

The commencement of the operation of Tunnel Boring Machine of MRT Jakarta Project

MRT Jakarta Project's underground construction work will use one drilling machine commonly called the Tunnel Boring Machine (TBM). The first TBM began operating from MRT Project's Patung Pemuda Senayan point to do the excavation work and construction of MRT Jakarta's underground lane tunnel to the north towards the Setiabudi point. The first underground drilling machine of MRT Jakarta Project named "Antareja" began operating from the MRT Jakarta Project's Patung Pemuda Senayan point. The initial operation of the underground drilling machine was inaugurated on 21 September 2015 by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo.

OKTOBER/OCTOBER

Pekerjaan Embankment dan Pembongkaran Stadion Lebak Bulus

Konstruksi Depo di Lebak Bulus memasuki tahapan pekerjaan *Embankment* atau penimbunan tanah.

Embankment Work and Dismantle of Lebak Bulus Stadium

The construction of Depo at Lebak bulus was in Embankment work stage or Land Filling.



NOVEMBER/NOVEMBER

Setelah sebelumnya mesin bor bawah tanah pertama proyek MRT Jakarta yang bernama "Antareja" diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada 21 September 2015. Mesin bor bawah tanah kedua yang diberi nama "Antareja II", mulai beroperasi dari titik yang sama dengan titik dimulainya pengoperasian mesin bor pertama sebelumnya, yaitu di Patung Pemuda Senayan. Kedua mesin bor ini akan bergerak melakukan penggalian untuk membuat terowongan jalur bawah tanah MRT Jakarta ke arah utara hingga titik Setiabudi.

Tunnel Boring Machine "Antareja II" started to operate

After previously the first tunnel boring machine of MRT Jakarta project named "Antareja" inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, on September 21, 2015. The second tunnel boring machine named "Antareja II", started to operate at the same point with the operation of first tunnel boring machine, which is Patung Pemuda Senayan. Both tunnel boring machines will dig to the north to make underground tunnels of MRT Jakarta up to Setiabudi point.



DESEMBER/DECEMBER

Bor Antareja Tiba di Stasiun MRT Senayan

Mesin bor bawah tanah pertama yang bernama "Antareja" mulai beroperasi sejak bulan September dari titik Patung Pemuda Senayan ke arah Utara menuju Stasiun Senayan. Kini Bor Antareja telah sampai di titik Stasiun Senayan. Mesin bor bawah tanah pertama proyek MRT Jakarta yang bernama "Bor Antareja" mulai menembus bakal Stasiun MRT Senayan (depan Ratu Plaza).

Antareja Tunnel Boring Machine arrived at MRT Station Senayan

The first tunnel boring machine "Antareja" started its operation since last September from Patung Pemuda Senayan heading north to Senayan Station. This Antareja Tunnel Boring Machine started to emerged to the designated MRT Senayan Station (in front of Ratu Plaza).



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Reward and Certification

PT MRT Jakarta dinobatkan sebagai penerima desain terbaik *Autodesk Building Information Modelling (BIM) Awards 2015* – Hongkong, Macau, and Taiwan oleh *Autodesk, Inc.* Penghargaan diberikan untuk Konstruksi Bawah Tanah CP 106 jalur Dukuh Atas-Bundaran Hotel Indonesia. *Building Information Modelling (BIM)* merupakan pendekatan informasi berbasis teknologi *digital* yang memungkinkan siapapun untuk menelusuri dan mengeksplorasi sebuah bangunan serta konstruksinya secara keseluruhan. BIM membantu pengguna untuk merencanakan proyek secara keseluruhan; baik konstruksi dan perhitungannya, penempatan utilitas, hingga proyeksi kalkulatif atas efek yang terjadi secara menyeluruh jika terjadi perubahan desain.

PT MRT Jakarta was named as the Best Designs in the *Autodesk Building Information Modeling (BIM) Awards 2015* - Hong Kong, Macau, and Taiwan by *Autodesk, Inc.* The award was given for Underground Construction CP 106 Dukuh Atas – Bundaran Hotel Indonesia track. *Building Information Modelling (BIM)* is an information-based approach to digital technology that allows anyone to discover and explore a building and construction as a whole. BIM helps users to plan for the overall project; from construction, calculation, placement of utilities, to calculative projection on the whole effects when change of design happened.



MRT Jakarta dinobatkan oleh KPMG *Infrastructure 100 World Markets Report* sebagai salah satu dari 100 proyek infrastruktur terbaik dunia.

MRT Jakarta crowned by KPMG *Infrastructure 100 world markets report* as one of best 100 infrastructure projects in the world.



We are **on the right track**





LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

- 014 **LAPORAN DEWAN KOMISARIS**
Report from the Board of Commissioners
- 018 **PROFIL DEWAN KOMISARIS**
Profile of Board of Commissioners
- 024 **LAPORAN DIREKSI**
Report from the Board of Directors
- 036 **PROFIL DIREKSI**
Profile of Board of Directors







LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen

President Commissioner and Independent Commissioner

“Menanti Transportasi Kota Terpadu”

Pembangunan MRT Jakarta bukan hanya milik Jakarta. Mega proyek ini akan memicu pembangunan infrastruktur kota di Indonesia untuk mengedepankan tata ruang dan konsep mobilitas warga secara terpadu.

“Looking Forward to Integrated Urban Transport”

Jakarta MRT construction is not only the asset of Jakarta. This mega project will trigger the construction of infrastructure in Indonesia to promote the city spatial and concept and rooms for integrated mobility for citizens.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Di luar telah majunya penerapan infrastruktur dan teknologi transportasi di negara-negara lain, proyek MRT Jakarta akan memberikan perspektif baru tentang pengelolaan model perkotaan di Indonesia. Pendekatan transportasi terpadu dengan tata ruang dan fungsi lahan akan mendorong sejumlah perubahan mendasar budaya mobilitas manusia Indonesia. Inilah arti dari perubahan budaya tentang ruang publik di Indonesia akan memberikan makna baru tentang hubungan antar warga, dan bagaimana peran pemerintah yang sesungguhnya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman.

To the honorable shareholders and stakeholders,

Beside the advanced implementation of infrastructure and transportation technologies in other countries, the MRT Jakarta project will provide a new perspective of urban model management in Indonesia. Integrated transportation approach with spatial planning and land function will encourage fundamental change of culture of Indonesian people. This is the meaning of “New Civilization”, in which the changed culture on public space in Indonesia will give a new meaning of the relationship between citizens, and the real role of government in creating a public space that is safe and comfortable.

Konsep ini sesungguhnya sejalan dengan salah satu konsep negara modern, yakni keteraturan sosial yang mampu membentuk hubungan sosial bermartabat.

Hal inilah yang mendasari mega proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta yang telah digagas cukup lama dan diinisiasi sejak tahun 2013. Berdiri di atas jalur terpadat di Jakarta—bahkan mungkin di Indonesia, proyek MRT Jakarta dibangun dengan 2 (dua) konstruksi utama: konstruksi Layang dan konstruksi Bawah Tanah. Model konstruksi layang telah dikenal sistem transportasi Indonesia—khususnya perkeretaapian—sejak jaman kolonial dulu, dimana beberapa jalur yang melintasi daerah perbukitan dan lembah dibangun dengan model konstruksi seperti ini. Namun, konstruksi bawah tanah merupakan hal yang baru di Indonesia. Terutama dengan pembangunan di tengah kota Jakarta yang membutuhkan begitu banyak observasi; baik observasi atas kandungan tanah, maupun investigasi atas berbagai utilitas yang telah ada sebelumnya.

Tantangan lain proyek ini adalah ketersediaan lahan. Namun, kerjasama seluruh pihak akan sangat menentukan agar pembangunan infrastruktur kota dapat berjalan sebagaimana mestinya; baik pemilik lahan dan utilitas, maupun pihak lain yang mempunyai kepedulian dan rasa memiliki atas pengembangan kota dengan infrastruktur transportasi terpadu ini.

Dewan Komisaris, atas nama para pemegang saham, menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pencapaian kinerja PT MRT Jakarta. Manajemen proyek yang terukur telah dilaksanakan dengan baik, berbagai kendala dan tantangan baik teknis maupun non-teknis mampu dijawab dengan kerjasama antara manajemen PT MRT Jakarta dengan seluruh konsultan dan kontraktor. Beroperasinya 2 (dua) *Tunnel Boring Machine* (TBM) dengan nama “Antareja” dan “Antareja II”, tokoh wayang yang memiliki kesaktian mampu berjalan di dalam bumi pada tahun 2015, menjadi bukti keberhasilan pasca proses *groundbreaking* pada tahun 2013.

Selain itu, pembenahan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi fokus PT MRT Jakarta untuk membentuk badan usaha yang menganut tata cara pengelolaan yang baik. PT MRT Jakarta wajib mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik perizinan proyek yang telah dipenuhi tahapan pra-konstruksi, maupun peraturan terkait pengelolaan organisasi yang akuntabel dan transparan.

Self Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah dilakukan di penghujung tahun 2015 memberikan beberapa rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti antara lain melalui pembentukan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi pada awal tahun 2016. Komite-komite ini

This concept fits with one of the modern country concept, where social order is the key to be able to establish a healthy relationship.

This is the fundamental reason of the Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mega project, which has been initiated for long and started since 2013. Standing on the most dense path in Jakarta, even possibly in Indonesia, the Jakarta MRT project is built with two (2) major constructions: elevated construction and underground construction. Elevated Construction Model has been known in Indonesian transport system—especially the railways—since the colonial era, where several paths crossing the hills and valleys were built with construction model like this. However, the underground construction is new in Indonesia. Especially, since this is executed in the center of Jakarta, making many observations are required on both soil investigation and investigation of various underground utilities existed before.

Another challenge of this project is the availability of land. However, the cooperation of all parties will be the main factor for the infrastructure construction to be implemented as intended; the landowners and utilities owners, as well as other parties who have the sense of belonging over the city development with integrated transportation infrastructure.

The Board of Commissioner on behalf of the shareholders, thaking the performance of specifically appreciates PT MRT Jakarta for all of these achievements. Measurable project management is already carried out properly, where various obstacles and challenges have been answered with the cooperation of PT MRT Jakarta Management and all contractors and consultant. By 2015 operation of two (2) Tunnel Boring Machines (TBM) named “Antareja” and “Antareja II”, a Javanese puppet character with supernatural power of capable of walking on underground, is testament to the success post the 2013 groundbreaking process.

In addition, Corporate Governance Good (GCG) improvement has become a focus of PT MRT Jakarta to establish a business entity with a good governance aspect. Being a Regional Government Owned Enterprise (BUMD), PT MRT Jakarta has an obligation to comply with the applicable laws and regulations, both in terms of the project licenses/permits for the pre-construction phase, as well as regulations related to an accountable and transparent organizational management.

GCG Self Assessment carried out in the late 2015 have made several recommendations, which have been followed by the establishment of the Audit Committee, Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee in early 2016. These committees function under the Board of

akan bekerja di bawah kendali Dewan Komisaris untuk dapat melakukan pengawasan secara lebih komprehensif terhadap proses pengelolaan PT MRT Jakarta.

Dengan kepastian pendanaan dan pembenahan internal organisasi, PT MRT Jakarta akan memiliki fondasi yang kuat untuk terus melanjutkan pembangunan proyek dan mempersiapkan diri dalam aspek Operasi dan Pemeliharaan saat MRT Jakarta beroperasi kelak.

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah turut memberikan andil dalam pembangunan MRT Jakarta ini dan pula kepada para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaannya, di samping kepada segenap jajaran Direksi dan karyawan PT MRT Jakarta yang telah bahu-membahu bekerja keras selama ini.

Semoga, proyek MRT Jakarta ini dapat berjalan dengan sukses hingga tahapan pengoperasiannya dengan pendekatan rasional sesuai dengan kaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan mudah-mudahan mampu menjadi contoh yang baik bagi pengembangan transportasi perkotaan di Indonesia pada masa yang akan datang.

Commissioners to help the Board perform more comprehensive supervision of the management process of PT MRT Jakarta.

With an assurance in funding and internal organizational improvement, PT MRT Jakarta will have a strong foundation to be able to continue the project development and prepare for the aspects of future Operation and Maintenance of the MRT Jakarta.

The Board of Commissioners would like to express gratitude to all the stakeholders who have taken part in the construction of MRT Jakarta. Also, the Board extends the gratitude to the shareholders for their continued trust and to the Board of Directors and all of the employees of PT MRT Jakarta, who have put in their hard work to build the organization.

Hopefully, MRT Jakarta project will run successfully until the operation stage, where it would be a pilot project for the development of urban transportation in Indonesia in the future.



ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen

President Commissioner and Independent Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of Board of Commissioner



Erry Riyana Hardjapamekas

Komisaris Utama dan Komisaris Independen

President Commissioner and Independent Commissioners

Erry Riyana Hardjapamekas, Warga Negara Indonesia, umur 66 tahun, kelahiran Bandung, 5 September 1949, berdomisili di Jakarta. Beliau memiliki pengalaman di bidang manajemen, selama lebih dari 30 tahun; termasuk empat tahun sebagai Direktur Keuangan PT Timah Tbk sebelum ia dipercaya menjadi Direktur Utama (1994-2002). Ia juga sempat menjabat Komisaris Utama PT Bank BNI Tbk (2008-2009); hingga Komisaris Utama BEJ (1998-2001). Pemegang gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung (1978) dan Financial Management Course, Harvard Business School, Amerika Serikat (1992) ini pernah menjadi Komisioner/Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2003-2007); Ketua Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI (2008-2009); dan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi (2010-2014). Ia juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Weda Bay Nickel, PT ABM Investama Tbk (s/d Juni 2015), PT Trakindo Utama (sejak July 2015), PT Hero Supermarket Tbk, PT Tirta Investama/Danone Aqua, Maybank Berhad (s/d Juni 2015), PT Maxpower Group (sejak Desember 2015), dan Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara.

Erry Riyana Hardjapamekas ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sejak 25 April 2013.

Erry Riyana Hardjapamekas, Indonesian citizen, age 66, born in Bandung, 5 September 1949, domiciled in Jakarta. He is an experiences in management for more than 30 years; including four years as the Finance Director of PT Timah Tbk before appointed as the President Director (1994-2002). He also briefly served as the President Commissioner of PT Bank BNI Tbk (2008-2009); and as the President Commissioner of Jakarta Stock Exchange (1998-2001). Holder of a Bachelor of Economics from Faculty of Economics of Padjadjaran University, Bandung and Financial Management Course, Harvard Business School, United States was once the Commissioner/Deputy Chairman of Corruption Eradication Commission (2003- 2007); The Chairman of National Team of Military Business Transfer (2008- 2009); and the Chairman of Independent Team of National Bureaucratic Reforms (2010-2011). He also serves as Independent Commissioner of PT Weda Bay Nickel, PT ABM Investama Tbk (till June 2015), PT Trakindo Utama (since July 2015), PT Hero Supermarket Tbk, PT Tirta Investama/ Danone Aqua, Maybank Berhad (till June 2015), PT Maxpower Group (since December 2015), and President Commissioner of PT Pasifik Satelit Nusantara (since June 2015).

Erry Riyana Hardjapamekas was appointed to be President Commissioner of PT MRT Jakarta in 25 April 2013 based on the Deed No. 43 dated 15 July 2013.

Sarwo Handhayani

Komisaris

Commissioner

Sarwo Handhayani, Warga Negara Indonesia, umur 61 tahun, kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1954, berdomisili di Jakarta. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam perencanaan dan pembangunan daerah sebagai birokrat di Provinsi DKI Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (1979) dan Magister Administrasi Pembangunan dari Universitas Indonesia (2002), kemudian aktif bekerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta (1980) hingga menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan (1988-2001). Beliau kemudian dipercaya menjadi Kepala Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta (2003-2008), Asisten Sekda Bidang Pembangunan & Lingkungan Hidup (2008-2011), Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2011-2013) hingga akhirnya dipercaya untuk menjabat Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (2013-2014).

Beliau ditunjuk sebagai Komisaris PT MRT Jakarta sejak 25 April 2013 berdasarkan Akta No. 43 Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn.

Sarwo Handhayani. Indonesian citizen, aged 61, born in Jakarta, 1 October 1954, domiciled in Jakarta. She has long experience in regional planning and development as a bureaucrat in the DKI Jakarta Province. She holds a Bachelor's degree in Architecture Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) (1979) and Master of Development Administration from the University of Indonesia (2002). She joined the Regional Planning and Development Agency or Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) of DKI Jakarta Province in 1980 and was subsequently entrusted as Head of Garden Department of DKI Jakarta Province (2003-2008), Assistant to Regional Secretary for Development and Environment (2008-2011), Head of Regional Planning Agency (2011-2013) prior to being appointed as Deputy Governor of DKI Jakarta Province for Spatial and Environment. (2013-2014).

She has been serving as the Commissioner of PT MRT Jakarta since 25 April 2013 pursuant to the Deed No. 43 dated 15 July 2013 made and passed before Notary Aryanti Artisari, SH, MKn.



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of Board of Commissioners



Hermanto Dwiatmoko

Komisaris

Commissioner

Hermanto Dwiatmoko, Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun, kelahiran Surabaya, 7 Mei 1956, berdomisili di Jakarta. Beliau mendedikasikan karirnya di bidang transportasi dan perkeretaapian Indonesia. Lulusan Sarjana Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (1980) ini juga berhasil menyelesaikan studi S2 nya di tempat yang sama dengan disiplin ilmu Transportasi (1991). Beliau juga sedang menyelesaikan program Doktor (S3) dari Universitas Padjadjaran, Bandung, jurusan Doktoral Ekonomi Terapan.

Memulai karirnya di dunia perkeretaapian (1981) di Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), yang sekarang dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia, atau PT KAI. Beliau kemudian ditugaskan di Kementerian Perhubungan (1987) dan dipercaya menjabat Direktur Teknik Prasarana Direktorat Jenderal Kereta Api (2005-2009), Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana Ditjen Perkeretaapian (2009-2010), Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian (2010-2014), hingga akhirnya dipercaya menjabat sebagai Direktur Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2014) hingga saat ini. Sepanjang karirnya, beliau telah memiliki berbagai sertifikasi keahlian, diantaranya Penguji sarana Perkeretaapian tingkat Madya, Inspektur Sarana Perkeretaapian Tingkat Utama (2011), Auditor Perkeretaapian Tingkat Utama (2011) yang ketiganya diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan diri. Pada tahun 2015 telah mendapatkan predikat Insinyur Profesional Utama (IPU) dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Beliau resmi menjabat sebagai Komisaris PT MRT Jakarta sejak 12 Agustus 2014 berdasarkan Akta No. 32 Tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Handi Putranto Wilamarta, SH, MH, BA, MBA.

Hermanto Dwiatmoko, Indonesian citizen, aged 59, born in Surabaya, 7 May 1956, domiciled in Jakarta. He dedicated his career in Indonesia's transportation and railways. He earned his Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1980 and his Master's degree in Transportation from the same Institute in 1991. At present, he is completing his Doctorate program study from Padjadjaran University, Bandung, majoring in Applied Economics.

He started his career in railways in 1981 at Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), now PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI). He was then assigned in the Ministry of Perhubungan in 1987 and then entrusted as Director of Facilities Engineering of Railways Directorate General (2005-2009), Director of Safety and Facility Engineering of Railways Directorate General (2009-2010), Director of Railways Safety of Railways Directorate General (2010-2014) prior to being entrusted as Railways Directorate General of Ministry of Transport (2014 – present). Along his career, he has obtained various expertise certifications, including Railways Infrastructure Examiner of Middle Level, Supreme Inspector of Railways Infrastructure (2011), Supreme Auditor of Railways (2011). The three certificates were issued by the Ministry of Transport. He also attended several self-development trainings. In 2015, he obtained Professional Supreme Engineer (Insinyur Profesional Utama, IPU) from Indonesian Engineers Association (PII).

He has formally served as a Commissioner of PT MRT Jakarta since 12 August 2014 based on the Deed 32 on 12 August 2014 made by and in the presence of Notary Handi Putranto Wilamarta, SH, MH, BA, MBA.

Rukijo

Komisaris

Commissioner

Rukijo, Warga Negara Indonesia, umur 49 tahun, kelahiran Kota Metro, Lampung, 10 Februari 1967, berdomisili di Jakarta. Beliau memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang keuangan negara dan daerah. Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Lampung, ini berhasil menyelesaikan studi Magister Manajemennya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karirnya sebagian besar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dimana beliau sempat dipercaya menjadi Kepala Bagian Kepegawaian (2008), Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II (2009), Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2013), hingga akhirnya dipercaya untuk menjabat Direktur Dana Perimbangan (2014) hingga saat ini.

Beliau resmi menjabat sebagai Komisaris PT MRT Jakarta sejak 10 Agustus 2015 berdasarkan Akta No. 1 Tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Miki Tanumiharja, SH.

Rukijo, Indonesian citizen, age 49, born in Kota Metro, Lampung, 10 February 1967, domiciled in Jakarta. He has long experience in the state and local government finances. This Graduate of Bachelor of Economics, University of Lampung, has successfully completed his Master of Management at the University of Muhammadiyah Jakarta. His career is mostly in the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, where he served as Head of Human Resources (2008), Head of Sub Implementation Transfer II (2009), Director of Regional Tax and Retribution (2013), until he was finally entrusted to serve as Director of Matching Funds (2014-present).

He has formally been serving as Commissioner of PT MRT Jakarta since 10 August 2015 based on Deed No 1 on 19 August 2015 made by and in the presence of Notary Miki Tanumiharja, SH.







LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors



DONO BOESTAMI

Direktur Utama
President Director

“Kepastian”

Berjalan tanpa kepastian seperti meraba dalam kegelapan. MRT Jakarta telah menjadi sebuah kepastian, yang akan menjadi *milestone* bagi sejarah transportasi publik di Indonesia.

“Certainty”

The lack of certainty is like walking in the darkness. MRT Jakarta has become a certainty, which will be a milestone in the Indonesian public transportation history.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Sesuai statusnya sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), Jakarta tampil sebagai salah satu kota metropolitan dengan kesibukan dan kepadatan yang luar biasa. Kota yang disebut-sebut menjadi salah satu kota terbesar di dunia dalam hal populasi ini menjadi pusat pemerintahan negara sekaligus pusat aktivitas bisnis. Hampir seluruh pelaku bisnis di Indonesia memiliki kantor di Jakarta, baik itu kantor pusat maupun kantor pemasaran dan kantor perwakilan. Lapangan usaha begitu luas, dengan Upah Minimum Provinsi-nya yang terbilang cukup tinggi. Praktis, daya beli masyarakat perkotaan semacam ini akan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sejalan dengan gaya hidup urban yang memang menjadi imbas dari pertumbuhan kota metropolitan. Kepadatan penduduk kemudian tercipta, yang justru menghasilkan kemacetan luar biasa.

Kemacetan menjadi sesuatu yang banal di Jakarta. Menempuh perjalanan dari wilayah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang dengan memakan waktu lebih dari 2 (dua) jam adalah hal yang lumrah—kalau tak mau disebut diwajarkan. Dari kemacetan inilah, kita bisa memperluas kajian yang lebih dalam tentang banyak hal; mulai dari beban biaya yang jauh lebih besar, beban waktu yang kemudian membuat hilangnya waktu dalam rumah tangga; hingga kesadaran akan kualitas hidup yang menjadi begitu merosot.

To honorable shareholders and stakeholders,

Befitting its status as Special Capital Region (DKI), Jakarta has appeared as one of the metropolitan cities with great activity hustle bustle and density. The city so-called to be one of the largest cities in the world in terms of population is the center of state government and business activities. Almost all businesses in Indonesia have its offices in Jakarta: headquarters, sales offices and representative offices. The extensive business fields make the minimum wage of this province quite high. Practically, the purchasing power of this city's urban community will experience significant increase every year, corresponding with the urban lifestyle that becomes the impact of this metropolitan city's growth. The population density is getting higher, resulting in increased traffic congestion.

Traffic jam becomes something common in Jakarta. Travelling from buffer areas such as Bekasi or Tangerang for more than two (2) hours is usual – if we want to avoid to the term “to be made common”. From these bottlenecks, we can extend a deeper study about many things; ranging from higher costs, more time spent making a loss of time value for the household; and loss of awareness of the quality of life.

Upaya pemerintah untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan infrastruktur di segala bidang bisa menjadi salah satu solusi atas persoalan tersebut. Pada infrastruktur transportasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai inisiasi; salah satunya adalah moda transportasi publik *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta yang telah mulai dibangun sejak tahun 2013. Proyek kereta layang dan kereta bawah tanah dalam kota ini dibangun di atas jalur paling padat di ibukota: Fatmawati – Blok M – Sudirman – Thamrin – Kota Tua dan wilayah Utara Jakarta yang akan ditentukan kemudian.

Sebagai pelaksana pembangunan proyek, PT MRT Jakarta berupaya untuk bekerja dengan perencanaan dan perhitungan yang matang. Fase tahap I sepanjang 15,7 kilometer yang membentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) telah mendapatkan begitu banyak kemajuan pembangunan yang akan memberikan optimisme kepada kita semua tentang moda transportasi yang baik untuk Jakarta.

KEMAJUAN PROYEK MRT JAKARTA TAHUN 2015

Setelah tahun 2014, proyek MRT Jakarta dapat menyelesaikan pra-konstruksi dan proses lanjutan *groundbreaking*, tahun 2015 ditandai dengan momentum besar atas beroperasinya 2 (dua) *Tunnel Boring Machine* (TBM) yang dinamai "Antareja" dan "Antareja II", tokoh wayang yang memiliki kesaktian mampu berjalan di dalam bumi. TBM ini difungsikan untuk melakukan pengeboran bawah tanah pada struktur Konstruksi Bawah Tanah pekerjaan *Contract Package* (CP) 104 dan CP 105 yang berada di jalur Sudirman hingga Setiabudi.

Di jalur Transisi – Istora Senayan, TBM "Antareja" berhasil menyelesaikan pengeboran bawah tanah hingga ke Stasiun Senayan. Sementara TBM "Antareja II" telah berhasil melakukan pengeboran sepanjang 277,5 meter dari lokasi Patung Pemuda, Bundaran Senayan. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang terbilang mudah, mengingat jenis tanah Jakarta merupakan tanah lempung, sementara sebagian besar kereta bawah tanah di beberapa negara lain dibangun dengan jenis tanah keras seperti *limestone*. Penggalian vertikal dan horisontal dengan kedalaman mencapai lebih kurang 20 meter di bawah tanah memerlukan teknik dan perhitungan yang khusus, agar tanah lempung dengan kandungan air yang cukup banyak tidak menimbulkan permasalahan pada saat proses pengeboran dan penggalian.

Di samping kesuksesan pengoperasian TBM, pada jalur CP 104 pengecoran *concourse slab* di area Stasiun Istora telah seluruhnya selesai dilakukan. Demikian pula CP 105 dengan jalur Bendungan Hilir – Setiabudi. Pengecoran *concourse slab* area Stasiun Bendungan Hilir dan penggalian *level base area* Stasiun Setiabudi telah sepenuhnya dilakukan. Sementara pengecoran kolom stasiun di *level concourse* dan penggalian *level base* Stasiun

The government's effort to accelerate infrastructure development in all fields could be one solution to the problems. DKI Jakarta Provincial Government has been continuously making various initiatives on transportation infrastructure; one of which is the MRT Jakarta transportation mode, which has commenced on 2013. The elevated and underground railways project is built on the densest areas in the city: Fatmawati - Blok M - Sudirman - Thamrin - Kota Tua and the northern area of Jakarta which will be determined later.

As the project implementer, PT MRT Jakarta seeks to work with a careful planning and calculation. The Phase I of 15.7 kilometers that stretches from Lebak Bulus to Bundaran Hotel Indonesia (HI) has made much construction progress that will provide all of us with the optimism about good transportation modes for Jakarta.

THE 2015 MRT JAKARTA PROJECT PROGRESS

Having succeeded in finishing pre-construction and continued process of *groundbreaking* in 2014, 2015 was marked by a great momentum of the operation of two (2) Tunnel Boring Machines (TBM) named "Antareja" and "Antareja II", a Javanese puppet character with a supernatural power to walk under the ground. This TBM is used to perform underground boring on the Underground Construction structure of the Contract Package (CP) 104 and CP 105 on Setiabudi-Sudirman lane.

On the transition lane Istora Senayan, "Antareja" TBM has successfully completed underground boring up to Senayan Station; While "Antareja II" TBM has successfully drilled 277.5 meters from Patung Pemuda, Bundaran Senayan. These were not easy jobs, considering the kind of Jakarta's soil that consists of silty clay, while most of the subways in several other countries built on hard soil type such as limestone. Vertical and horizontal excavation with an approximately 20-meter depth below the ground requires special techniques and calculations to avoid the occurrence of problems during the process of boring and excavation on the water-contained silty clay.

In addition to the successful operation of the TBMs, the CP 104 *concourse slab* casting at Istora Station area was entirely completed. Similarly, the CP 105's Bendungan Hilir-Setiabudi lane was also completed. The *concourse slab* casting at Bendungan Hilir Station area and base level excavation of Setiabudi station were fully completed. While station column casting in the *concourse level* and excavation of base level of Bendungan Hilir

Bendungan Hilir, serta pengecoran *base slab* pada area Stasiun Setiabudi masih terus berjalan. Di CP 106 dengan jalur Setiabudi – Bundaran HI, pengecoran *second concourse slab* area Stasiun Dukuh Atas telah sepenuhnya dilakukan. TBM ketiga sendiri telah selesai dilakukan instalasi untuk kemudian dapat dioperasikan di lokasi Stasiun Bundaran HI.

Untuk Konstruksi Layang yaitu CP 101, CP 102 dan CP 103 terbentang dari Lebak Bulus hingga ke Sisingamangaraja. Pada area Stasiun Lebak Bulus, telah diselesaikan pekerjaan 66 titik *bore pile* dari 93 titik yang dibutuhkan. Pekerjaan *Embankment* pada area Depo Lebak Bulus telah mencapai 143.131 m³ dari jumlah keseluruhan 379.400 m³. Sementara pekerjaan di *Admin Building* telah menyelesaikan seluruh 23 titik pekerjaan *Bore Pile*.

Pada CP 102 dengan jalur Fatmawati - Cipete Raya, PT MRT Jakarta melakukan pekerjaan pelebaran jalan serta *drainase* di area Jalan TB. Simatupang. Untuk Stasiun Fatmawati telah diselesaikan *bore pile* 54 titik dari 83 titik, dan *area Special Bridge* telah menyelesaikan *bore pile* sebanyak 28 titik dari 40 titik. Pekerjaan struktur *viaduct* di Stasiun Cipete Raya telah menyelesaikan *bore pile* dengan jumlah keseluruhan 112 titik; demikian pula dengan pemasangan *gantry crane* di Jalan Fatmawati.

CP 103 dengan jalur Cipete Raya–Sisingamangaraja telah menyelesaikan beberapa pekerjaan besar. Di area Transisi hingga Stasiun Blok A telah menyelesaikan 426 titik *bore pile* dari jumlah keseluruhan 496 titik. Pada lokasi Stasiun Blok M, pekerjaan kolom *line B* telah selesai, demikian pula pekerjaan *bore pile* di *line B* dan sisi timur Stasiun Blok A. Pada lokasi Stasiun Sisingamangaraja, pekerjaan *bore pile* telah seluruhnya selesai, begitu juga dengan pekerjaan pemasangan *gantry crane*.

Pada bagian prasarana dan sarana perkeretaapian, terdapat pekerjaan yang terbagi menjadi 2 (dua) paket, yaitu CP 107 berupa paket pekerjaan *railway system*, yang termasuk di dalamnya sistem persinyalan kereta dan *trackwork*; serta CP 108 yang berupa paket pekerjaan *rolling stock* atau kereta. Sistem perkeretaapian MRT Jakarta sendiri akan menggunakan sistem persinyalan terbaru di Indonesia—dan salah satu yang terdepan di dunia—melalui sistem persinyalan *Communication Based Train Control* (CBTC) dan menerapkan sistem *moving block* untuk pengaturan perjalanan kereta. Sistem ini memungkinkan pengoperasian kereta api secara otomatis tanpa masinis, yang dapat mengurangi faktor *human error* dan mengatur penjadwalan kereta dengan lebih terorganisir dan kerapatan *head way* yang lebih kecil sehingga frekuensi layanan kereta akan menjadi lebih tinggi.

Tahun 2015 juga menjadi tahun momentum, dimana pekerjaan *railway system* telah mulai dilakukan pasca ditandatanganinya kontrak CP 107 dengan *Metro One Consortium*. Demikian pula dengan CP 108, dimana telah ditandatanganinya kontrak dengan *Sumitomo Corporation* untuk pengadaan 16 rangkaian kereta dengan total keseluruhan kereta berjumlah 96.

stations as well as the base slab casting in Setiabudi Station were still ongoing. In the CP 106's Setiabudi – Bundaran HI, the casting of second concourse slab of Dukuh Atas station was fully completed. The third TBM was already installed for operation in Bundaran HI station area.

The Elevated Construction which are in CP 101, CP 102 and CP 103 ranges from Lebak Bulus to Sisingamangaraja. At Lebak Bulus station area (CP 101), 66 out of 93 bore piles points were already completed. Embankment work on the Lebak Bulus Depo area has reached at 143,131 m³ of the total 379,400 m³. While for the Admin Building, all the 23 bore pile were already completed.

On the CP 102's Fatmawati-Cipete Raya lane, PT MRT Jakarta was working on road and drainage widening in Jalan TB. Simatupang area. For Fatmawati station, 54 out of 83 bore pile points were completed, and 28 out of 40 Bore Pile points were also completed in Special Bridge area. For viaduct structure in Cipete Raya Station, the total of 112 bore piles points were completed, and the gantry crane in Jalan Fatmawati was already installed.

The CP 103's Cipete Raya-Sisingamangaraja lane has reached the completion of several heavy works. From the transition area to Blok A station, 426 out of 496 bore piles points were accomplished. In Blok M Station, Line B column, bore pile in Line B and the east side of Blok A Station were also completed. At Sisingamangaraja station, the bore pile and gantry crane installation were already completed.

In the railways facilities and infrastructure, the work is divided into two (2) packages, namely CP 107 for railway system work including the train signaling system and trackwork; and CP 108 consisting of rolling stock or train work. MRT Jakarta railway system will use the latest signaling system in Indonesia, and one of the world's leading systems, through Communication-based Train Control (CBTC) signaling system and the implementation of moving block system for train travel arrangements. This system allows automatic train operation without drivers, which can reduce the human error factor and adjust train scheduling in a more organized way and smaller head way to increase the railway service frequency.

The year 2015 was also a year full of momentums, where the work for railway system has commenced after the signing the CP 107 contract with Metro One Consortium. Similarly, there was also a signing of the CP 108 contract with Sumitomo Corporation for the procurement of 16 series of trains with a total of 96 trains.

PT MRT Jakarta juga telah melakukan berbagai persiapan untuk bidang pengoperasian dan pemeliharaan. Proses ini dilakukan semenjak dini, agar saat MRT Jakarta beroperasi, seluruh sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jasa konsultansi *Operation and Maintenance Consulting Services* (OMCS) untuk fase I Lebak Bulus – Bundaran HI sendiri telah memasuki tahapan negosiasi kontrak, yang diharapkan dapat melakukan penandatanganan kontrak pada April 2016. Jasa konsultansi OMCS ini meliputi penyusunan sistem operasi dan pemeliharaan; mempersiapkan regulasi, manual dan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan; rancangan struktur organisasi dan kebutuhan personil untuk operasi dan pemeliharaan serta pendampingan dalam perekrutan dan pelatihan; perhitungan estimasi biaya operasi dan pemeliharaan; serta pendampingan selama 6 (enam) bulan pertama setelah operasi komersial MRT Jakarta dimulai.

Selain sistem perkeretaapian, PT MRT Jakarta juga melakukan persiapan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengoperasikan MRT Jakarta. Inisiasi kerjasama dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dalam hal pendidikan, rekrutmen dan sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian telah dilakukan. PT MRT Jakarta berkomitmen untuk menghadirkan SDM yang bermutu dan berintegritas, dengan standar kualifikasi yang dapat menunjang teknologi modern dari MRT Jakarta.

Faktor regulasi juga menjadi bagian penting dari persiapan pengoperasian MRT Jakarta. Bersama regulator—dalam hal ini Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berbagai regulasi terkait Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api terus dikembangkan agar dapat memberikan landasan hukum bagi proses beroperasinya MRT Jakarta. PT MRT Jakarta juga terus meninjau keseluruhan aspek hukum atas pengoperasian MRT Jakarta yang terhitung memiliki teknologi dan standar keselamatan yang berbeda dari sistem transportasi yang telah ada saat ini, khususnya perkeretaapian yang ada di Indonesia.

Selain keberhasilan TBM Antareja, momentum besar bagi MRT Jakarta pada tahun 2015 adalah penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. IP-569 dan IP-571 pada 4 Desember 2015 antara *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dengan Pemerintah Republik Indonesia guna pembiayaan lanjutan proyek pembangunan MRT Jakarta. IP-569 merupakan perjanjian *Engineering Services Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I* dengan jumlah pinjaman sebesar ¥1,919 juta, yang akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desain dasar MRT Jakarta koridor Timur-Barat sepanjang lebih kurang 27 km dari total keseluruhan 87 km yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2024-2027. Sementara IP-571 merupakan perjanjian *Construction Jakarta Mass Rapid Transit Phase I Stage 2* dengan jumlah pinjaman sebesar ¥75,218 miliar sebagai pembiayaan

PT MRT Jakarta has also undertaken various preparations for the operation and maintenance scope. The process has been carried out since the early stage, in order when the MRT Jakarta operates, the entire system, both hardware and software can run as expected. Operation and Maintenance Consulting Services (OMCS) for phase I of Lebak Bulus – Bundaran HI has entered the stage of contract negotiations, which is expected for contract signing in April 2016. This OMCS consulting services includes the preparation of operation and maintenance system; preparing the applicable regulations, manuals and Standard Operating Procedure (SOP) for operations and maintenance; design of organizational structure and personnel requirements for operation and maintenance as well as assistance in the recruitment and training; calculation of estimated operating and maintenance costs; as well as supports for 6 (six) months after the commencement of MRT Jakarta commercial operations.

In addition to the railway system, PT MRT Jakarta has also made preparations on the aspect of Human Resources (HR) to operate MRT Jakarta. Cooperation with the Academy of Indonesia Railways Academy (API) Madiun and School of Land Transport (STTD) Bekasi in terms of education, recruitment and certification of railways crews. PT MRT Jakarta is committed to deliver quality and integrity human resources, with the qualification standards able to support modern technology of MRT Jakarta.

The regulatory factor is also the important part in the preparation of MRT Jakarta operation. Together with the regulator, in this case the Directorate General of Railways of the Indonesian Ministry of Transport, various regulations related to Railway Crew Skill Certificate and Railway Controller Skill Certificate, continue to be developed in order to provide legal basis for the operation of MRT Jakarta. PT MRT Jakarta also continues to review all legal aspects in the operation of MRT Jakarta which comparatively has different technology and safety standards from the existing transportation systems, especially the railway system in Indonesia.

In addition to the success of the TBM Antareja, the major momentum for MRT Jakarta in year 2015 was the signing of the Loan Agreement No. IP-569 and IP-571 on 4 December 2015 between Jakarta International Cooperation Agency (JICA) with the Government of Indonesia to further finance the construction of MRT Jakarta project. IP-569 is an agreement on the Engineering Services of MRT Jakarta East-West Line Project Phase I with the total loan amount of ¥1,919 million, which will be used to finance the basic design of MRT Jakarta East-West corridor of approximately 27 km out of the total 87 km, expected to commence operation in year 2024-2027. While IP-571 is an agreement on the Construction of MRT Jakarta Phase I Stage 2 with the total loan amount of ¥75,218 billion to finance the continuation of construction of the MRT corridor North-South

lanjutan pembangunan konstruksi MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan direncanakan dapat operasional di awal tahun 2019.

Dengan ditandatanganinya kedua perjanjian pinjaman ini memberikan jaminan kepastian keberadaan kedua fase proyek MRT Jakarta. Kini, menjadi tugas dan tantangan PT MRT Jakarta untuk dapat menuntaskan mega proyek yang telah lama dinanti-nanti oleh seluruh kalangan di Indonesia.

PENCAPAIAN, KENDALA DAN TANTANGAN

Hingga akhir tahun 2015, PT MRT Jakarta telah menyelesaikan 26,59% dari keseluruhan proyek fase tahapan I. Pencapaian ini sedikit di bawah target yang sebesar 35,06%. Adanya deviasi antara rencana dan aktualisasi disebabkan beberapa hal seperti pembebasan lahan dan relokasi utilitas yang memberikan kendala pada proses pembangunan proyek MRT Jakarta di beberapa lokasi, terutama untuk bagian konstruksi layang.

Manajemen PT MRT Jakarta telah mengupayakan berbagai bentuk komunikasi, peninjauan sudut pandang hukum, hingga kalkulasi ulang atas biaya pembangunan untuk kemungkinan melakukan perubahan desain sebagai pilihan alternatif atas kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Manajemen justru melihat kendala ini sebagai tantangan untuk dapat terus melakukan berbagai upaya secara optimis agar proyek MRT Jakarta dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak pihak.

ASPEK KEUANGAN

Pendekatan yang digunakan dalam Manajemen Proyek dan pelaksanaan konstruksi pembangunan MRT Jakarta ini adalah Kontrak Rancang Bangun, atau dikenal dengan *Design and Build Contract*. Pendekatan ini memberikan tanggung jawab kepada kontraktor untuk melakukan *Detailed Engineering Design* dan konstruksi fisik dalam kontrak *lump sump fixed-price*. Keuntungan dari pendekatan ini adalah penyelesaian proyek dapat menghemat waktu antara proses desain dan pelaksanaan proses konstruksi, dimana kedua tahapan ini dilakukan oleh entitas yang sama. Di samping itu, pendekatan ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap biaya konstruksi karena kepastian bahwa desain yang dibuat adalah desain yang dapat dikonstruksi atau dibangun. Penggunaan pendekatan *Design and Build Contract* untuk pembangunan infrastruktur sistem perkeretaapian perkotaan (sistem MRT) merupakan yang pertama kali di Indonesia. Awalnya pendekatan ini banyak digunakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dimana banyak peralatan pembangkit listrik yang akan diinstal atau dipasang telah memiliki bentuk khusus sehingga konstruksi sipil yang dibangun harus disesuaikan untuk mengakomodir kekhususan tersebut.

Phase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) which was currently under construction and planned to be operated in early 2019.

The signing of the two loan agreements will provide a certainty on the existence of the second phase of MRT Jakarta project. Now, the duty and the challenge of PT MRT Jakarta are to complete the mega project that has been long-awaited by all parties in Indonesia.

ACHIEVEMENTS, CONSTRAINTS AND CHALLENGES

By the end of 2015, PT MRT Jakarta has completed 26.59% of the project phase I. This result is slightly below the 35.06% target. The deviation between plan and actualization was caused by several factors such as constraints in the land and utilities relocation in some project locations, especially for the elevated construction.

PT MRT Jakarta management has sought various forms of communication, reviews from the legal point of view, and recalculated construction costs to make possible changes to the design as an alternative option for the constraints encountered in the field. The Management considers these obstacles as challenges to continue making optimistic efforts that will enable the smooth running of MRT Jakarta project as expected by many parties.

FINANCIAL ASPECT

The approach used in the Project Management and implementation of MRT Jakarta construction is the Design and Build Contract. This approach gives responsibility to the contractor to perform the Detailed Engineering Design and Fisk construction in a lump sump fixed-price contract. The advantage of this approach is to save time of designing process and construction implementation process, as the two processes are conducted by the same entity. In addition, this approach allows a better control of construction cost due to the certainty that the design can be constructed. The approach of Design and Build Contract for the construction of urban railway system (MRT System) is the first applied in Indonesia. Initially this approach is widely used by the State Electricity Company (PLN) where the sizeable power generation equipment to be installed or already installed are specifically designed so that civil construction to be built should accommodate its specificity.

Demikian pula dengan kontrak proyek MRT Jakarta yang menggunakan *FIDIC Yellow Book* untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi (CP 101 – CP 106) dan *FIDIC Silver Book* untuk paket pekerjaan *Railway System* dan *Rolling Stock* (CP 107 dan CP 108). Bentuk kontrak dengan FIDIC juga merupakan hal yang pertama kali dilakukan dalam proses pembangunan infrastruktur sistem kereta api perkotaan.

Mengingat perjalanan pembangunan proyek ini berlangsung dalam *multiyears*, biaya pelaksanaan proyek pun perlu mengalami penyesuaian. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan proyek terkait pembebasan lahan, relokasi utilitas dan perubahan-perubahan regulasi yang harus diadopsi untuk menjaga kualitas struktur, perubahan teknologi dan kapasitas operasi, dapat menimbulkan *Variations* atau perubahan *Employer's Requirements*.

Sepanjang proses penyelesaian *Detailed Engineering Design*, PT MRT Jakarta telah mengidentifikasi beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan *Employer's Requirement*, yaitu implementasi SNI 1726:2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan bukan Gedung, dan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan dan Penertiban Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta tentang pelarangan penggunaan baja mutu tinggi melalui Surat Edaran Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta No. 06/SE/2013. Kendala penyediaan lahan terutama untuk pembangunan *cooling tower* dan *ventilation tower* juga berkontribusi terhadap perlu dilakukannya perubahan atas *employer's requirement*.

Penyesuaian nilai kontrak juga perlu dilakukan untuk kontrak yang berlangsung *multiyears*, mengingat beberapa asumsi awal biaya berupa *labor cost* dan *overhead cost* mengalami kenaikan signifikan dengan regulasi pemerintah melalui penerapan BPJS Kesehatan, kenaikan Upah Minimum Regional serta kenaikan harga bahan bakar minyak.

Kepastian sumber pembiayaan untuk penyelesaian pelaksanaan konstruksi ini perlu disikapi dengan bijak dan dipahami secara utuh oleh seluruh pemangku kepentingan demi tidak terjadinya kesalahpahaman pemaknaan dalam bentuk *cost overrun*. Kontrak pekerjaan MRT Jakarta berbasis FIDIC yang baru pertama kali dilakukan pada pembangunan infrastruktur sistem kereta api perkotaan sangat berbeda dengan model pengerjaan kebanyakan kontrak konstruksi di Indonesia yang berdasar hukum pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Faktor regulasi—seperti yang telah disebutkan di atas—juga perlu ditinjau dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara para pemangku kepentingan dan seluruh pihak yang telah menanti-nanti beroperasinya mega proyek ini.

Likewise, the FIDIC Yellow Book used as the general condition of contract on the execution of CP101-CP106 construction works and the FIDIC Silver Book for the CP 107 and CP108's Rolling Stock Railway System are also used for the first time in the process of infrastructure construction of urban railways system.

Considering that the journey of this project will take multi-years, the project implementation cost has also undergone some adjustments. Obstacles encountered in the implementation of projects related to land acquisition, utilities relocation and changes to applicable regulations to maintain the quality of structure, changes in technology and operating capacity, may cause variations or changes in Employer's Requirements.

During the process of Detailed Engineering Design completion, PT MRT Jakarta has identified several causes of changes to the Employer's Requirements, such as the implementation of SNI 1726:2012 on the Procedures of Earthquake Resilience Planning for Structural Building and Non-Building, and the regulations issued by the Department of Building Planning and Control (P2B) of DKI Jakarta on the Prohibition of the Use of High Strength Steels with the Circular Letter of DKI Jakarta P2B Department No. 06/SE/2013. The constraint in land acquisition mainly for the construction of Cooling Tower and Ventilation Tower has also contributed to the need for changes to the Employer's Requirements.

Price adjustment also needs to be done for the multi-year contracts, given initial assumptions of several costs, such as labor cost and overhead cost, have increased significantly with the government regulation on the implementation of BPJS Kesehatan and increased in Minimum Wage and fuel prices.

The certainty in the source of finance for the project completion needs to be wisely addressed and fully understood by all stakeholders in order not to raise any misunderstandings in the form of cost overrun. The FIDIC-based contracts for MRT Jakarta which were first applied in urban railway system infrastructure are very different from the model of mostly construction contracts in Indonesia which are based on the 2010 Presidential Regulation No. 54 concerning Procurement of Government Goods and Services. The regulatory factor -as previously mentioned - also needs to be prudently reviewed in order to avoid differences in views among stakeholders and all parties looking forward to the operation of this mega project.

Sebagai bentuk kehati-hatian dalam hal penyediaan ketercukupan dana untuk penyelesaian proyek akibat adanya *variations* dan *price adjustment* tersebut, PT MRT Jakarta telah menempuh proses Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak bulan September 2015. Proses evaluasi oleh BPKP ini telah diselesaikan pada akhir Desember 2015 dengan penyempurnaan pelaporan yang masih berlangsung hingga Februari 2016. Proses evaluasi yang dilakukan BPKP tersebut meliputi pengujian hal-hal yang berpotensi menjadi *Variations*, klaim maupun *Price Adjustment*. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP melakukan analisa atas berbagai dokumen terkait kontrak dan pelaksanaan pembayaran proyek, observasi lapangan, wawancara dengan konsultan maupun kontraktor serta *stakeholder* yang relevan. Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dari BPKP ini akan menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham untuk menindaklanjuti melalui prosedur pembiayaan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun JICA.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PT MRT Jakarta menaruh perhatian besar terhadap Sumber Daya Manusia (SDM). Pembentukan aspek manajerial dan aspek operasional pada SDM terus dilakukan untuk dapat mempersiapkan landasan yang utuh saat MRT Jakarta mulai beroperasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, PT MRT Jakarta telah melakukan berbagai inisiasi kerjasama dengan pemangku kepentingan perkeretaapian di Indonesia agar dapat membentuk SDM operasional yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terbaik.

Sistem pengelolaan SDM juga terus diperbaiki. Selain struktur organisasi yang mengalami perubahan agar dapat mewartakan kebutuhan pengembangan PT MRT Jakarta, sistem remunerasi sebagai imbalan kerja juga diperbaiki. Demikian pula dengan pembenahan pada model penilaian yang diharapkan dapat menciptakan konsistensi antara teknologi modern yang dimiliki sistem perkeretaapian MRT Jakarta dengan kapabilitas SDM yang ada.

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan program pelatihan juga dilakukan. MRT *Development Program* atau MDP, merupakan salah satu strategi untuk memberikan program pengembangan kompetensi di bidang perkeretaapian kepada SDM yang dimiliki. Di samping itu, program *Management Trainee* juga dilakukan untuk memberikan pandangan secara makro terkait pengelolaan organisasi PT MRT Jakarta.

As a form of prudence in terms of the fund adequacy for the project completion due to the said variations and price adjustment, PT MRT Jakarta embarked on an evaluation of Construction Constraints Evaluation conducted by the State Audit Agency (BPKP) in September 2015. The evaluation process by BPKP was completed in late December 2015 with ongoing reporting improvement until February 2016. This evaluation included testing things that could potentially become variations, claims and price adjustment. In performing its duties, BPKP analyzed various documents related to the contracts and project payments, field observations, interviews with consultants and contractors as well as the relevant stakeholders. Results of this Construction Constraints Evaluation from BPKP will be a reference for DKI Jakarta Provincial Government as shareholder to follow-up through the financing procedure and coordinate with the Central Government and JICA.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

PT MRT Jakarta pays a great attention to Human Resources (HR). Formation of HR managerial and operational aspects continues to be carried out to prepare a solid foundation for the commencement of MRT Jakarta operations. As described above, PT MRT Jakarta has initiated various commitments with stakeholders of railways in Indonesia in order to establish operational human resources who have the best qualifications and competencies.

HR management system continues to be improved. In addition to the changes to the organizational structure to accommodate the needs of PT MRT Jakarta development, remuneration system as employee benefits shall also be improved. Similarly, the improved evaluation model is expected to create consistency between modern technologies of railway system of MRT Jakarta and the capabilities of existing human resources.

Competence development through education and training programs were also conducted. MRT Development Program or MDP is one of strategies to deliver competency development program in railways to the human resources. In addition, the Management Trainee program was also conducted to give a macro view of the management of PT MRT Jakarta organization.

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi yang akuntabel, PT MRT Jakarta terus berupaya mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan di seluruh aspek yang ada. Tahun 2015 menjadi tahun dimana PT MRT Jakarta melakukan pembenahan secara serius pada Tata Kelola Perusahaan. Proses *self assessment* dilakukan agar PT MRT Jakarta dapat melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap struktur dan organ Tata Kelola Perusahaan yang dimilikinya. Proses penilaian ini dilakukan oleh Divisi Internal Audit and Compliance, dengan penggunaan alat ukur sesuai *scorecard* yang digunakan dalam penilaian implementasi Tata Kelola Perusahaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan *self assessment* yang dilakukan sejak September 2015, PT MRT Jakarta melakukan fokus pembenahan pada kelengkapan organ Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. PT MRT Jakarta telah menetapkan menggunakan ISO 31000 sebagai basis pengembangan Sistem Manajemen Risiko Korporasi, yang diawali dengan pengesahan Traktat Komitmen Direksi serta Pedoman Kebijakan manajemen risiko sebagai perwujudan mandat dan komitmen dalam penerapan ISO 31000. Pengembangan kerangka manajemen risiko dilanjutkan dengan pengintegrasian Sistem Manajemen Risiko ke dalam proses perencanaan strategis Perusahaan, proses perencanaan dan penganggaran, proses manajemen proyek, proses manajemen kinerja, dan proses internal audit. Implementasi proses Manajemen Risiko dilakukan dengan penetapan *Risk Officers* di tiap unit kerja dan Kepala Divisi serta Kepala Departemen selaku *Risk Taking Unit* untuk melaksanakan proses identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko serta implementasi rencana mitigasi. *Output* dari implementasi proses Manajemen Risiko ini berupa *Risk Register* dari unit kerja beserta pemantauan atas implementasi rencana mitigasi, *Corporate Risk Profile* sudah dapat diwujudkan. Sosialisasi Sistem Manajemen Risiko kepada kontraktor dan seluruh konsultan juga dilakukan sebagai bentuk integrasi *Project Risk Management* yang berbasis *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)* ke dalam sistem ISO 31000.

Untuk melengkapi kerangka Manajemen Risiko, telah ditetapkan Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi serta Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris. Inisiatif pembentukan Komite Pemantau Risiko ini dimulai di akhir tahun 2015 disertai pelaksanaan *Executive Briefing* bagi jajaran Direksi, Dewan Komisaris serta *workshop Enterprise Risk Management Fundamental* bagi seluruh Kepala Divisi. Di akhir tahun 2015 telah dilaksanakan sertifikasi bagi 13 orang *Risk Officers* untuk ISO 31000 *Fundamental, Enterprise Risk Management*. Di sepanjang

CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Being a Regional-Government Owned Enterprise (BUMD) responsible for an accountable management of the organization, PT MRT Jakarta continues to implement Corporate Governance in all aspects. 2015 was the year when PT MRT Jakarta seriously made improvement on Corporate Governance. Self assessment was conducted for PT MRT Jakarta to evaluate and improve its Corporate Governance structure and organs. The assessment process is carried out by the Internal Audit and Compliance Divisions, with the use of measuring instruments in accordance with scorecard used in the Good Corporate Governance (GCG) assessment in State-Owned Enterprises (SOEs).

Based on the self-assessment conducted in September 2015, PT MRT Jakarta focuses on the improvement of the completeness of GCG organ and Risk Management. PT MRT Jakarta has established to use ISO 31000 as the basis for Enterprise Risk Management System, initialed with the ratification of the Treaty of Commitment of the Board of Directors and the risk management Policy Guidelines as an embodiment of the mandate and commitment in the implementation of ISO 31000. The improvement in risk management framework is followed by the integration of Risk Management System into the Company's strategic planning process, budgeting, project management process, performance management, and internal audit process. Risk management is implemented by allocating Risk Officers in each unit and Head of Division and Head of the Department as Risk Taking Unit to carry out the identification, measurement and evaluation of risks and the implementation of the mitigation plan. The outputs of the Risk Management implementation covering the Risk Register of the unit along with the implementation monitoring of the mitigation plan and the Corporate Risk Profile are already realized. Socialization of Risk Management System to contractors and all consultants is also conducted as a form of integration of Project Management Body of Knowledge (PMBOK) based Project Risk Management into the ISO 31000 system.

To complete Risk Management framework, Risk Management Committee is established at the level of Board of Directors and the Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level. The Risk Monitoring Committee formation initialed in late 2015 with the implementation of Executive Briefing for the Board of Directors, Board of Commissioners as well as workshop on the Enterprise Risk Management Fundamentals for all Division Heads. At the end of 2015, there are 13 Risk Officers certified for ISO 31000 Fundamental, Enterprise Risk Management. Throughout

tahun 2015 PT MRT Jakarta telah berhasil meletakkan *platform* dasar yang lengkap untuk membangun Budaya Sadar Risiko yang akan dilanjutkan dengan proses-proses pengembangan selanjutnya di tahun 2016.

Pada tanggung jawab sosial, PT MRT Jakarta melaksanakan seluruh aspek fundamental. Kebijakan *paperless* melalui penguatan Teknologi Informasi (TI), aspek kesehatan kerja dan program asuransi dengan menggunakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pemantauan secara periodik atas sarana keselamatan kerja di area kantor pusat. Kepada seluruh kontraktor, PT MRT Jakarta menekankan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) khususnya bagi pekerja proyek di lapangan; di samping tentunya kewajiban untuk memenuhi program asuransi keselamatan kerja bagi para pekerja.

Pada aspek lingkungan hidup, PT MRT Jakarta telah memenuhi seluruh ijin penggalian, dan telah melakukan *Soil Investigation* terhadap tanah yang akan digali. Proses ini telah berjalan di sepanjang tahun 2013 dan tahun 2014, dan terus dilakukan selama proses penggalian dan pengeboran dilakukan. PT MRT Jakarta juga mengupayakan relokasi pepohonan di sepanjang jalur dimana proyek MRT Jakarta berjalan.

Tanggung Jawab Sosial terhadap masyarakat pengguna jalan juga diwujudkan dengan komitmen PT MRT Jakarta dalam melakukan rekayasa lalu lintas bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminimalisir dampak kemacetan akibat proyek pembangunan MRT Jakarta. Kampanye keselamatan melalui rambu-rambu di sepanjang proyek MRT Jakarta juga dilakukan, agar para pengguna jalan tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi proyek.

PROYEKSI 2016 DAN RENCANA PENGEMBANGAN

Tahun 2016 merupakan proses kelanjutan dari beberapa proyek yang telah berjalan. Pada CP 106 dengan jalur Dukuh Atas – Bundaran HI, akan dioperasikan TBM ketiga yang akan dinamai "Mustikabumi I" dan beroperasi di lokasi Stasiun Bundaran HI. PT MRT Jakarta berharap kesuksesan pada TBM "Antareja" dan TBM "Antareja II" akan dapat berulang pada TBM "Mustikabumi I" ini.

Untuk operasi dan pemeliharaan, jasa konsultansi OMCS telah memasuki tahap negosiasi kontrak, dan diharapkan dapat melakukan penandatanganan kontrak pada April 2016. Proses OMCS ini penting, mengingat persiapan pengoperasian dan pemeliharaan akan sangat menentukan bagi PT MRT Jakarta dalam menyambut beroperasinya MRT Jakarta yang ditargetkan di awal tahun 2019. Di samping itu, jasa konsultansi OMCS berperan

2015, PT MRT Jakarta has successfully laid the foundation platform to build Risk Conscious Culture which will be continued in the further development processes in 2016.

With regard to social responsibility, PT MRT Jakarta has implemented all the fundamental aspects. Paperless policy by strengthening the Information Technology (IT), aspects of occupational health and insurance programs by using BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan, and periodic monitoring on safety devices in the headquarters area. To all contractors, PT MRT Jakarta always stresses the importance of Occupational Health and Safety (K3), especially for field workers, in addition to the obligation to meet safety insurance program for workers.

On the environmental aspect, PT MRT Jakarta has met all permits for excavation, and completed Soil Investigation for the soil to be excavated. This process was carried out throughout 2013 and 2014, and continued during the excavation and boring process. PT MRT Jakarta sought to relocate the trees along the MRT Jakarta project lanes.

Social Responsibility for the road users is also realized with the PT MRT Jakarta's commitment to traffic management in collaboration with Jakarta Police Department to minimize traffic congestion due to construction of MRT Jakarta project. Safety campaign through signs along the Jakarta MRT project was also implemented so the road users will remain cautious when crossing the project areas.

2016 PROJECTIONS AND DEVELOPMENT PLANS

The year 2016 is the continuation of several projects that have been running. At CP 106's Dukuh Atas-Bundaran HI lane, the 3rd TBM named Mustikabumi I will be operated on Bundaran HI station Area. PT MRT Jakarta wishes the success of TBM "Antareja" and TBM "Antareja II" will be repeated with TBM "Mustikabumi".

In terms of operation and maintenance, OMCS consulting services have entered the stage of contract negotiations, and are expected to be signed in April 2016. OMCS process is important, given the operation and maintenance preparation is the main factor for PT MRT Jakarta in the early 2019 targeted operation of MRT Jakarta. In addition, OMCS consulting service has a role in pushing regulations that will be the base and legal certainty

dalam mendorong regulasi yang akan menjadi landasan serta kepastian hukum bagi pengoperasian MRT Jakarta; utamanya pada aspek keselamatan. Sebagai pionir, landasan hukum MRT Jakarta tentu akan sangat bermakna bagi perkembangan transportasi di Indonesia, khususnya perkeretaapian.

Rencana pengembangan usaha dari MRT Jakarta juga telah mulai dipersiapkan. Lingkup perencanaan ini tidak hanya mencakup pengembangan usaha yang akan menunjang pendapatan bagi PT MRT Jakarta, namun juga pengembangan kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD). Pengelolaan kawasan TOD diharapkan dapat menunjang pengembangan kawasan transportasi terpadu dengan memperhitungkan *Urban Design Guideline* (UDGL) perkotaan Jakarta dan fungsi-fungsi lahan di sekitarnya.

Budaya manusia kota Jakarta juga akan menjadi bagian dari perhatian PT MRT Jakarta. Pengoperasian dan pemeliharaan dengan teknologi yang *sophisticated* tentu tak akan dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif dari pengguna MRT Jakarta—dalam hal ini warga kota Jakarta. Edukasi terkait penggunaan teknologi tiket, hingga keterlibatan aktif para pengguna MRT Jakarta dalam menjaga kebersihan telah menjadi bagian dari perencanaan manajemen sebelum MRT Jakarta beroperasi.

Dalam hal pengelolaan organisasi, PT MRT Jakarta akan terus mengarahkan model pengelolaan organisasi dengan menggunakan standarisasi struktur organ Tata Kelola Perusahaan pada perusahaan publik. Konsep ini sesungguhnya memiliki tata kelola yang baik, dimana aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan utamanya. Selain akan menciptakan pengelolaan organisasi yang akuntabel, tata kelola organisasi berbasis perusahaan publik akan mampu menciptakan *Corporate Image* yang akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, di samping tentunya akan memberikan aspek kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan kepada seluruh elemen—tanpa terkecuali—yang terlibat dalam aktivitas PT MRT Jakarta.

for the operation of MRT Jakarta; most notably on safety. As the pioneer, the legal basis for MRT Jakarta would be very meaningful to the development of transportation in Indonesia, particularly railways.

Preparations MRT Jakarta's business development is already started as well. The scope of this planning includes not only business development that will support PT MRT Jakarta's revenues, but also the Transit Oriented Development (TOD) of the area. TOD area management is expected to support the development of an integrated transportation area by taking into account of the Urban Design Guideline (UDGL) of Jakarta and the functions of surrounding lands.

PT MRT Jakarta also pays attention to the culture of DKI Jakarta's residents. Operation and maintenance of the sophisticated technology certainly will not run optimally without the active involvement of the MRT Jakarta users, in this case the city residents. Education related to the use of fare technology and active involvement of MRT Jakarta users in maintaining the cleanliness have been part of the management plan prior to the operation of MRT Jakarta.

In terms of organizational management, PT MRT Jakarta will continue to direct the organizational management model by using standardization of GCG structure of publicly listed companies. This is actually a proper good governance concept, where accountability and transparency are the main principles. Besides establishing an accountable management of organization, public company-based organizational governance will create Corporate Image to provide added value for shareholders; and will certainly provide the regulatory and compliance with the laws without exception of all parties involved in PT MRT Jakarta activities.

AKHIR KATA

Sebagai bagian dari masyarakat Jakarta, izinkan Direksi menyampaikan rasa bangga atas dukungan dan komitmen yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan impian seluruh pihak atas terlaksananya proyek MRT Jakarta ini. Dengan dukungan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah pusat, legislator DKI Jakarta, dan seluruh pihak, Direksi memiliki optimisme yang tinggi akan beroperasinya MRT Jakarta untuk menjawab persoalan kemacetan di kota Jakarta.

Atas mandat yang telah diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham sekaligus representasi pemangku kepentingan publik, Direksi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kepada Dewan Komisaris, Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kemitraan pengawasan dan arahan yang telah diberikan. Tak lupa kepada seluruh karyawan PT MRT Jakarta, Direksi menyampaikan rasa hormat atas dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh kontraktor dan konsultan yang telah menunjukkan kerja keras, komitmen dan standar kerja yang tinggi dalam proses pembangunan proyek. Semoga optimisme yang telah terbangun ini akan dapat benar-benar terlaksana demi memberikan moda transportasi yang nyaman dan aman bagi warga kota Jakarta.

CLOSING REMARKS

As part of the people of Jakarta, allow us the Board of Directors to express a sense of pride for the support and commitment that has been given by DKI Jakarta Provincial Government to realize the dream of all parties in this Jakarta MRT project. With the support of the central government, legislators of DKI Jakarta, and all parties, the Board of Directors is highly optimistic with the realized operation of MRT Jakarta to address the traffic problem in the city.

On the mandate given by DKI Jakarta Provincial Government as Shareholders as well as representative of public stakeholder, the Board of Directors would like to send out our gratitude. To the Board of Commissioners, the Board of Directors would also like to thank for their supervision and guidance. Not to forget, our respect also goes to all employees of PT MRT Jakarta for the dedication they have demonstrated so far.

We also extend our gratitude to all the contractors and consultant who have demonstrated hard work, commitment and high labor standards in the project construction process. Hopefully our optimism will be completely realized in order to provide convenient and secure transportation modes for the residents of Jakarta.



DONO BOESTAMI

Direktur Utama
President Director

PROFIL DIREKSI

Profile of Board of Directors



Dono Boestami

Direktur Utama

President Director

Dono Boestami, Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, kelahiran Surabaya, 13 Januari 1963, berdomisili di Jakarta. Memiliki banyak pengalaman di dunia finansial dan pasar modal. Beliau menyelesaikan kuliahnya dengan bantuan beasiswa untuk *international student* di University of Wisconsin-Platteville, Amerika Serikat dan memperoleh gelar *Bachelor of Science Civil Engineering* (1985). Beliau memilih terjun ke dunia perbankan dan sekuritas setelah meraih gelar *Master of Science Project & Construction Management* dari Golden Gate University, Amerika Serikat (1989).

Beberapa perusahaan mempercayakan posisi Direksi padanya: beliau terakhir menjabat sebagai Direktur *Investment Banking* pada PT Danareksa (Persero) (2001); Direktur Utama PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Direktur PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011), dan Direktur Keuangan PT Atlas Resources Tbk (2012). Selain itu, Beliau juga sempat mengenyam pengalaman sebagai anggota Komite Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) (2008-2011).

Dono Boestami ditunjuk sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta sejak 22 Maret 2013.

Dono Boestami, Indonesian citizen, age 53, born in Surabaya on 13 January 1963, domiciled in Jakarta. He has plenty of experience in the financial and capital markets. He completed his studies with scholarships for international students at the University of Wisconsin-Platteville, the United States and earned his Bachelor of Science in Civil Engineering (1985). He chose to involve in banking and securities after earning Master of Science in Project & Construction Management from Golden Gate University, USA (1989).

He was entrusted Director position by several companies: Director of Investment Banking in PT Danareksa (Persero) (2001); President Director of PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Director of Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Finance Director of PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011), and Finance Director of PT Atlas Resources Tbk (2012). In addition, he also had an experience as member of the Stock Listing Committee of the Indonesian Stock Exchange (BEI) (2008-2011).

Dono Boestami has been serving as the President Director of PT MRT Jakarta since 22 March 2013.

M. Nasyir

Direktur Konstruksi

Construction Director

Mohamad Nasyir, Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, kelahiran Riau, 17 Desember 1964, berdomisili di Bandung. Memiliki pengalaman 20 tahun dalam dunia perkeretaapian. Karir lulusan Insinyur Teknik dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) (1993) ini tumbuh dan besar di PT Kereta Api Indonesia (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola transportasi kereta api di seluruh Indonesia. Nasyir menjabat sebagai *Vice President Divisi Regional I Sumatera Utara*, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dimana beliau bertanggung jawab untuk menyelesaikan konstruksi jalur kereta api Kuala Namu, Medan.

Mohamad Nasyir ditunjuk sebagai Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta pada 22 Maret 2013

Mohamad Nasyir, Indonesian citizen, age 51, born in Riau on 17 December 1964, domiciled in Bandung. He has 20 years of experience in the railways world. The career of this graduate from Mechanical Engineer from the National Institute of Science and Technology (1993) is grown and raised in PT Kereta Api Indonesia (Persero), the State-Owned Enterprises (SOE) managing rail transportation throughout Indonesia. Nasyir served as Vice President of North Sumatra Regional I Division, of PT Kereta Api Indonesia (Persero), where he was responsible for completing the construction of the railway line Kuala Namu, Medan.

Mohamad Nasyir has been serving as Director Construction of PT MRT Jakarta since 22 March 2013.





Alberth Tarra

Direktur Operasi dan Pemeliharaan

Director of Operations and Maintenance

Alberth Tarra, Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun, kelahiran Palu, 31 Oktober 1958, berdomisili di Bandung. Beliau merupakan lulusan Sarjana Elektro Universitas Hasanuddin Makassar (1986). Karirnya di dunia perkeretaapian dimulai dari pelaksana pada kantor Daerah Operasi (DAOP) I PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang saat itu masih berstatus Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) (1989). Setelah 26 tahun meniti jenjang karirnya, ia dipercaya untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* di Balai Yasa (2012) beliau bertanggung jawab pada seluruh sarana PT KAI.

Sejak 22 Maret 2013, Alberth ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta.

Alberth Tarra, Indonesian citizen, age 57, born in Palu on 31 October 1958, domiciled in Bandung. He graduated with Bachelor's degree in Electrical Engineering from the Hasanuddin University (1986). His career in railways started from the Regional Operations Office (DAOP) I of PT Kereta Api Indonesia (Persero) which at that time was still a Railway Bureau Company (PJKA) (1989). After 26 years of making career, he was entrusted to serve as an Executive Vice President at Balai Yasa (2012) and was responsible for all facilities of PT KAI.

Since 22 March 2013, Alberth has been serving as Director of Operation and Maintenance of PT MRT Jakarta.

Tuhyat

Direktur Keuangan dan Administrasi

Director of Finance and Administration

Tuhyat, Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun, kelahiran Serang, 2 Februari 1966, berdomisili di Tangerang Selatan. Berpengalaman dalam dunia audit dan keuangan. Selama lebih kurang 15 tahun, pemegang gelar Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1994) dan Master Management Universitas Krisnadwipayana (2000) ini berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku (1987 – 2001). Pada tahun 2001 PT Antam (Persero) Tbk kemudian mempercayakan jabatan Senior Auditor kepada dirinya hingga ia kemudian menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury, Tax and Insurance (2008) dimana beliau memiliki tanggungjawab untuk pengelolaan Keuangan Perseroan termasuk hutang-hutang luar negeri.

Tuhyat ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta sejak 22 Maret 2013.

Tuhyat, Indonesian citizen, age 50, born in Serang, on 2 February 1966, domiciled in South Tangerang. Experienced in audit and finance. For approximately 15 years, this Bachelor's degree holder from Indonesian State College of Accountancy (STAN) (1994) and Master of Management from the Krisnadwipayana University (2000), has made his career in Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), a non-ministerial government institution assuming government duties in financial and development supervision, including audit, consulting, assistance, evaluation, eradication-Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and Education and Training supervision in accordance with applicable regulations (1987-2001). PT Antam (Persero) Tbk then entrusted to him the positions of Senior Auditor (2001) prior to serving as Chief of the Division of Treasury, Tax and Insurance (2008) where he assumed responsibility for the company's financial management including foreign debts.

Tuhyat has been serving as Director of Finance and Administration of PT MRT Jakarta since 22 March 2013.



We are **on the right track**





PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

42	Informasi Umum General Information	57	Cakupan Proyek Scope of Projects
44	Sekilas Tentang MRT Jakarta Brief History of MRT Jakarta	58	Wilayah Operasional Operational Areas
48	Jejak Langkah Milestones	60	Struktur Organisasi PT MRT Jakarta Tahun 2015 Organization Structure PT MRT Jakarta 2015
54	Visi dan Misi Vision and Mission	68	Pejabat Eksekutif Executive Officials
55	Nilai Perusahaan Company Values	74	Kepemilikan Saham dan Informasi Saham Share Ownership and Share Information
56	Kegiatan Usaha Business Activities	75	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institution and Profession

INFORMASI UMUM

General Information

NAMA PERUSAHAAN

Perseroan Terbatas (PT)
PT Mass Rapid Transit Jakarta

LINGKUP USAHA

- Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana MRT;
- Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana MRT;
- Pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya serta depo dan kawasan sekitarnya.

STATUS PERUSAHAAN

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

KEPEMILIKAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

TANGGAL PENDIRIAN

17 Juni 2008

DASAR HUKUM PENDIRIAN

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta disingkat MRT Jakarta Nomor 140 Tanggal 17 Juni 2008

MODAL DASAR

Rp5.500.000.000.000,-
(lima triliun lima ratus milyar Rupiah)

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Rp1.943.285.000.000,-
(satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah)

JENIS USAHA

Transportasi

CAKUPAN PROYEK

*Elevated Structure, Underground Structure,
Railway System & Trackwork and Rolling stock*

KANTOR PUSAT

Wisma Nusantara, Lantai 21
Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta-Indonesia
Tlp : (62-21) 390 6454, (62-21) 310 3629
Fax : (62-21) 315 5846
Website : www.jakartamrt.com
Email : info@jakartamrt.com
Twitter : @mrtjakarta
Facebook : www.facebook.com/jakartamrt
Instagram : @mrtjakarta

KANTOR PROYEK

Jl. Johar No.20, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Tlp : (6221) 391 2168, (6221) 391 2169
Fax : (6221) 391 2167

NAME

Limited Liability Company (Ltd., Inc.)
PT Mass Rapid Transit Jakarta

SCOPE OF WORKS

- Implementation of Urban Public Railway Infrastructure which includes Infrastructure Developments, Infrastructure Operations, Infrastructure Maintenances and MRT's Infrastructure Concessions;
- Implementation of Urban Public Railway Modes which includes Modes Development, Modes Operation, Modes Maintenance, and MRT's Modes Concessions ;
- Development and property/business management in the station and its surrounding area as well as its depo and surrounding area.

CORPORATE STATUS

Regional Owned Enterprises (ROE)

OWNERSHIP

Provincial Government of DKI Jakarta

DATE OF ESTABLISHMENT

June, 17th 2008

ESTABLISHMENT OF LEGAL BASIS

The Deed of Establishment of Limited Liability Company, PT Mass Rapid Transit Jakarta, abbreviated MRT Jakarta No. 140 Dated June, 17th 2008

AUTHORIZED CAPITAL

Rp5.500.000.000.000,-
(five trillion five hundred billion Rupiah)

ISSUED AND FULLY PAID CAPITAL

Rp1.943.285.000.000,-
(one trillion nine hundred and fourty three billion
two hundred and eighty five million Rupiah)

TYPE OF BUSINESS

Transportation

SCOPE OF PROJECTS

*Elevated Structure, Underground Structure, Railway
System & Trackwork and Rolling Stock*

HEAD OFFICE

Wisma Nusantara, Lantai 21
Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta-Indonesia
Tlp : (62-21) 390 6454, (62-21) 310 3629
Fax : (62-21) 315 5846
Website : www.jakartamrt.com
Email : info@jakartamrt.com
Twitter : @mrtjakarta
Facebook : www.facebook.com/jakartamrt
Instagram : @mrtjakarta

PROJECT OFFICE

Jl. Johar No.20, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Phone : (6221) 391 2165, (6221) 391 2166
Fax : (6221) 391 2167





SEKILAS TENTANG MRT JAKARTA

Brief History of MRT Jakarta



“ Sesungguhnya rencana pembangunan MRT di Jakarta sudah dirintis sejak tahun 1985. Namun saat itu Proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Pada tahun 2005, Presiden RI menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional.

As a matter of fact, the plan to develop MRT in Jakarta was first initiated in 1985. However, at that moment, MRT Project was not declared as a national project yet. Later in 2005, President RI confirmed that MRT Jakarta Project was a national project.

”



PT Mass Rapid Transit Jakarta—disebut sebagai “PT MRT”, “MRTJ” atau “Perusahaan”—berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri pada tanggal 17 Juni 2008, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan *operation and maintenance* (O&M) prasarana dan sarana MRT serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

PT MRT Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

Sesungguhnya rencana pembangunan MRT di Jakarta sudah dirintis sejak tahun 1985. Namun saat itu Proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia pada saat itu menegaskan bahwa Proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional.

Berangkat dari kejelasan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian dana pinjaman disambut oleh Pemerintah Jepang yang bersedia memberikan dana pinjaman.

Pada 28 November 2006, penandatanganan persetujuan pembiayaan proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar. JBIC pun mendesain dan

PT Mass Rapid Transit Jakarta – referred to “PT MRT”, “MRTJ” or “the Company” - is a legal entity in form of Limited Liability Company of which majority shares owned by DKI Jakarta Provincial Government. Established on 17 June 2008, PT MRT Jakarta’s scope of activities covers concessions and development of MRT infrastructures and modes, operation and maintenance (O&M) of MRT infrastructures and modes, as well as the development and management property/business at the station and its surrounding areas, as well as its Depo and surrounding areas.

PT MRT Jakarta was established by the 2008 DKI Jakarta Provincial Regulation No. 3 on the Establishment of Regional-Government Owned Enterprise Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta as amended by the 2013 Regional Regulation No. 7 on the Amendment to the 2008 Regional Regulation No. 3 on the Establishment of Regional-Government Owned Enterprise Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta and the 2008 Regional Regulation No. 4 on Equity Capital Investment of Regional Government in the Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta as amended by the 2013 Regional Regulation No. 8 on the Amendment to the 2008 Regional Regulation No. 4 on Equity Capital Investment of Regional Government of Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta.

As a matter of fact, the plan to develop MRT in Jakarta was first initiated in 1985. However, at that moment, MRT Project was not declared as a national project yet. In 2005, President of the Republic of Indonesia at that time confirmed that MRT Jakarta Project was a national project.

Departing from such clarity, the Central Government and the DKI Jakarta Provincial then started to take actions and share the responsibility. The effort to seek financing was welcomed by the Japanese government’s willingness to provide loan funds.

On 28 November 2006, the signing of financing agreement of Jakarta MRT project was conducted by the Governor of Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Kyosuke Shinozawa and Indonesian Ambassador for Japan, Yusuf Anwar. JBIC also designed

memberikan rekomendasi studi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Telah disetujui pula kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini.

JBIC kemudian melakukan *merger* dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). JICA bertindak sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman. Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan tahun 2008-2009. Tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009-2010. Pekerjaan konstruksi dimulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Uji coba operasional dimulai tahun 2014. Namun jadwal tersebut akhirnya mundur. Desain proyek dilakukan mulai 2008 - 2009, tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013 dan direncanakan selesai akhir 2018.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 3 (tiga) jenis badan usaha yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu Badan Pengelola (BP), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah (BUMD/PD) dan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (BUMD/PT). Ditinjau dari perspektif manajemen, baik BP maupun BUMD/PD tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk alih daya (*outsource*) maupun bekerjasama dengan sektor swasta, sehingga beresiko terjadinya in-efisiensi karena terbatasnya pendanaan dari Pemerintah Daerah. Sementara BUMD/PT memiliki fungsi yang sama dengan sektor swasta sehingga mampu memanfaatkan sumber daya eksternal secara maksimal. Berdasarkan hal inilah maka kemudian dibentuk PT MRT Jakarta.

Adapun struktur kepemilikan PT MRT Jakarta, yakni sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta: 99,97%
- PD Pasar Jaya: 0,03%

Proyek MRT Jakarta akan dimulai dengan pembangunan jalur MRT tahap I sepanjang ±15,7 km kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut 1 Depo. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik tahap I, selain menggandeng Konsultan Manajemen Lalu Lintas, PT MRT Jakarta juga memastikan telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Pengoperasian Tahap I akan dimulai pada tahun 2019.

Pembangunan Jalur MRT Tahap I ini akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang. Pengembangan selanjutnya adalah meneruskan jalur Sudirman menuju Kampung Bandan yang akan disebut jalur Utara-Selatan serta pengembangan jalur Timur-Barat.

the study and provided recommendations to the DKI Jakarta Provincial Government. In addition, there was also an agreement between JBIC and the Indonesian Government, to appoint an institution became a one door service for organizing this MRT Jakarta project accomplishment.

JBIC then merged with Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA acted as an assessment team from JBIC as a lender. In a schedule made by JICA and MRT Jakarta, technical design and land acquisition were conducted in 2008-2009. Bidding processes for construction and electrical and mechanical equipment took place in 2009-2010. Construction phase began in 2010 until 2014. Operational trials started in 2014. But at the end the schedule was postponed. The design project was conducted in 2008 - 2009, construction phase commenced in October 2013 and was targeted for completion in late 2018.

Based on applicable regulation, there are 3 (three) types of business entities that may be established by the Local Government: Governing Body (BP), Regional/Local Government-Owned Enterprise (BUMD/PD) and, Regional/Local-owned limited liability company (BUMD/PT). In terms of management perspective, both BP and BUMD/PD do not have enough flexibility to outsource or cooperate with private sectors, so there is a risk of inefficiency due to limited funding from Local Government. On the other hand, BUMD/PT has the same function with the private sectors so it can utilize external resources optimally. Based on these considerations, PT MRT Jakarta was established.

PT MRT Jakarta's ownership structure is as follows:

- DKI Jakarta Provincial Government: 99,97%
- PD Pasar Jaya: 0.03%

MRT Project begins with the construction of MRT Lane Phase I with ±15,7 km length from Terminal of Lebak Bulus to Bundaran Hotel Indonesia that has 13 stations include 1 Depo. To minimize the physical construction impact of Phase I, in addition to collaborating with Traffic Management Consultants, PT MRT Jakarta also ensured that it already has environmental impact analysis (EIA). Phase I Operation will begin on 2019.

The construction of Phase I MRT Line will be the beginning of the Milestones of MRT System's integrated network, which will become part of DKI Jakarta's future mass transport system. Further development is to connect Sudirman lane with Kampung Bandan which will be called as North-South lane and East-West lane development.



Dalam struktur tugasnya, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan mulai dari tahap *Engineering Service*, Konstruksi hingga Operasi dan Pemeliharaan. Adapun penjabarannya:

- Dalam tahap *Engineering Service*, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap proses prakualifikasi dan pelelangan kontraktor.
- Dalam tahap konstruksi, PT MRT Jakarta sebagai atribusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, dan konsultan yang membantu proses pelelangan kontraktor, serta konsultan manajemen dan operasional.
- Dalam tahap operasi dan pemeliharaan, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan, termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan *revenue* yang layak bagi Perusahaan.

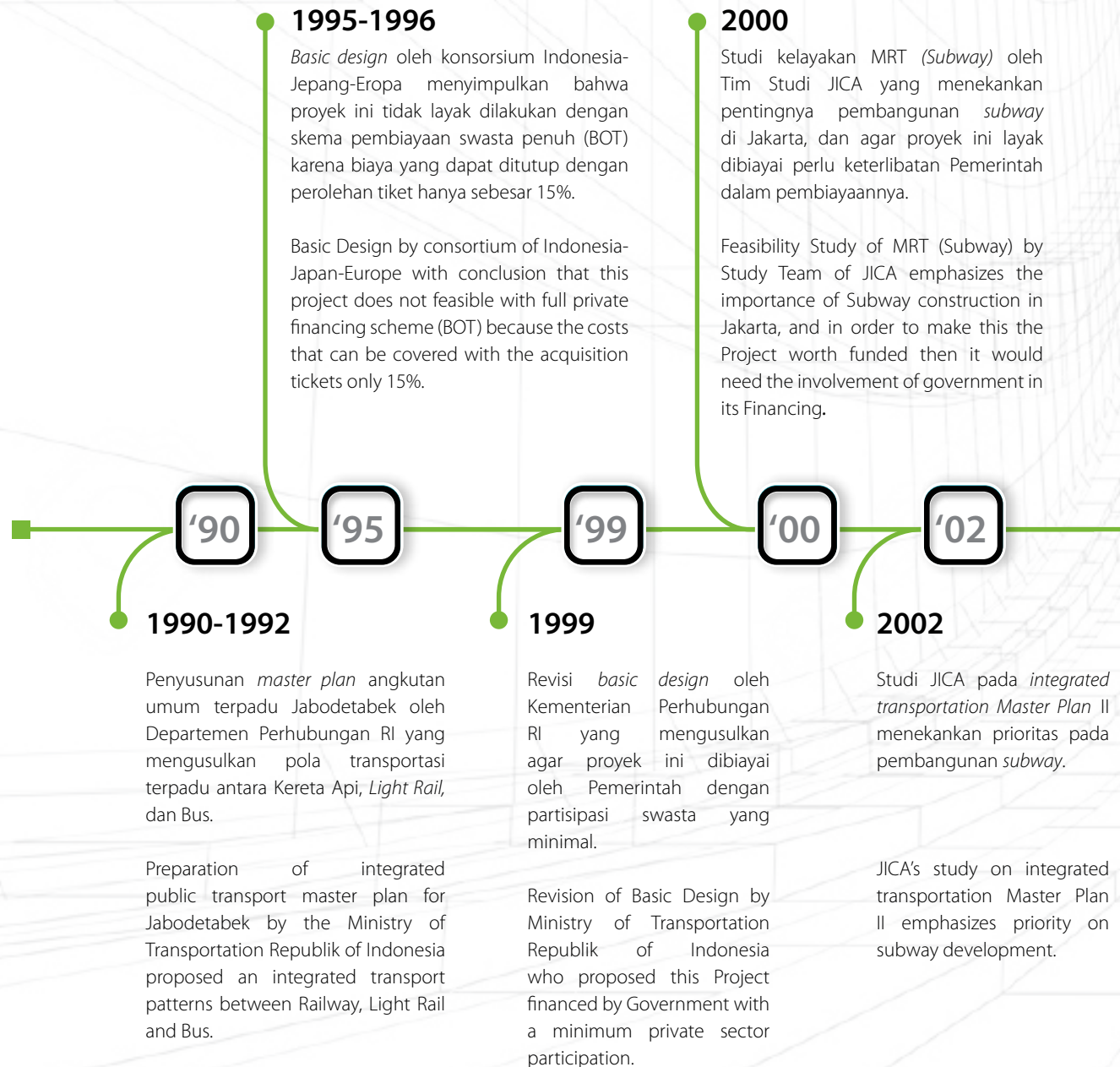
Pelaksanaan pembangunan MRT melibatkan beberapa instansi, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT MRT Jakarta sendiri. Oleh karena itu, dokumen anggaran yang diperlukan juga melibatkan lembaga-lembaga tersebut dengan nama program dan kegiatan berbeda namun dengan satu *output* yang sama, pembangunan MRT.

In its structural duties, PT MRT Jakarta is responsible for all the whole activities, starting from the *Engineering Services*, Construction to Operation and Maintenance, with descriptions are as follows:

- In the stage of *Engineering Service*, PT MRT Jakarta is responsible for prequalification and tender of contractor.
- In construction phase, PT MRT Jakarta acting as an attribute to DKI Jakarta Provincial Government signed a contract with managing contractor and tender assistance consultants as well as management and operational consultants.
- In Operation and Maintenance phases, PT MRT Jakarta is responsible for the operation and maintenance, including ensuring the achievement in adequate number of passengers to provide decent revenue for the Company.

MRT development involves several institutions, both at the level of Central Government, DKI Jakarta Provincial Government and PT MRT Jakarta. Therefore, budget document required and involved these institutions with different programs and activities, but with same outputs, namely MRT construction.

JEJAK LANGKAH Milestones



2004

- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pola Transportasi Makro (PTM) yang merupakan *master plan* penanganan masalah transportasi di Jakarta, dengan membangun sarana transportasi massal yang prima dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Sarana transportasi massal yang dimaksud adalah *Mass Rapid Transit* (MRT).
- 2 Maret 2004, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan MRT dengan prioritas koridor Lebak Bulus- Fatmawati-Blok M-Monas-Kota.
- Juli 2004, Kementerian Perhubungan RI mengeluarkan *study implementation program* for Jakarta MRT system (Lebak Bulus-Dukuh Atas).
- The Governor of DKI Jakarta Province's Decision No. 84 Year of 2004 regarding Macro Transportation Pattern (MTP) which is a masterplan in handling transportation problems in Jakarta, by building excellent mass transportation and integrated with other transportation modes. The mode of mass transportation was referred as Mass Rapid Transit (MRT).
- 2 March 2004, Provincial Governor of DKI Jakarta signed a Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Transportation Republic of Indonesia and Provincial Government of DKI Jakarta on MRT Development with priority corridors from Lebak Bulus-Fatmawati-Blok M-Monas-Kota.
- July 2004, Ministry of Transportation Republic of Indonesia issued implementation program study for Jakarta MRT system (Lebak Bulus-Dukuh Atas).

'04

'05

2005

- Studi pada tahun 2004 direvisi pada bulan Maret 2005 menjadi *Revised Implementation Program (Revised IP) for Jakarta MRT system* (Lebak Bulus-Dukuh Atas) dan digunakan Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan kepada Pemerintah Jepang untuk membiayai proyek pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta.
- Studi oleh Tim *Special Assistance for Project Formation* (SAPROF) dari JBIC untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara Pemangku Kepentingan atas proyek ini di Indonesia.
- Desember 2005, diperoleh beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam *Minutes of Discussion* (MoD) yang ditandatangani oleh JBIC, Bappenas, Departemen Perhubungan RI serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Agustus 2005, sub-komite MRT dibentuk di bawah Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk mengimplementasikan proses-proses yang diperlukan dalam mendirikan perusahaan operator MRT (MRTC).
- The study on year 2004 revised on March 2005 into Revised Implementation Program (Revised IP) for Jakarta MRT system (Lebak Bulus-Dukuh Atas) and used by Government of Republic of Indonesia to propose request to Government of Japan in order to finance MRT's development project in the Province of DKI Jakarta.
- A Study by Team of Special Assistance for Project Formation (SAPROF) from JBIC to facilitate agreement creation among Stakeholders for this project in Indonesia.
- December 2005, several agreements was stated in Minutes of Discussion (MoD) signed by JBIC, Bappenas, Ministry of Transportation RI, and Provincial Government of DKI Jakarta.
- August 2005, Sub-Committee of MRT formed under Committee for the Acceleration of Infrastructure Provision to implement required processes in establishing MRT operators company (MRTC).

2007

- Revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007, yang mengatur kewenangan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian yang sedianya dikuasai oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- Kajian SAPI (*Special Assistance For Project Implementation*) dan SAPMAN (*Special Assistance for Procurement Management*) dilakukan oleh JBIC untuk membantu Kementerian Perhubungan RI dan Pemprov DKI Jakarta.
- Revision of Act No. 13 Year of 1992 regarding Railways into Act No. 23 Year of 2007, which regulates the authority of implementation on infrastructure railways which previously controlled by the Central Government through State Owned Enterprises (SOE), now is able to be organized by Business Entity established by the Local Government.
- Study of SAPI (*Special Assistance For Project Implementation*) and SAPMAN (*Special Assistance for Procurement Management*) conducted by JBIC to help the Ministry of Transportation Republic of Indonesia and Provincial Government of DKI Jakarta.

'06

'07

2006

- 18 Oktober 2006, *Memorandum on Engineering Services* (MoES) ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan JBIC sebagai dasar persetujuan pinjaman.
- 28 November 2006, *Loan Agreement* Tahap 1 (IP-536) ditandatangani berdasarkan syarat-syarat yang sebelumnya telah disepakati dalam *Minutes of Discussion* (MoD) dan *Memorandum on Engineering Services* (MoES) mengenai pinjaman sebesar ¥1,869 Milyar yang dipergunakan untuk pembiayaan:
 1. Konsultasi penyusunan *Basic Design* (*Engineering Services*)
 2. Konsultasi Manajemen, untuk membentuk dan mengembangkan PT MRT Jakarta
 3. Konsultasi pengadaan, untuk membantu PT MRT Jakarta melelang Proyek sebagai implementasi dari *basic design* yang dihasilkan kegiatan pada butir 1 (satu) di atas.
- 18 October 2006, *Memorandum on Engineering Services* (MOES) signed between the Government of Indonesia and JBIC as the basis of loan approval.
- 28 November 2006, Phase I *Loan Agreement* (IP-536) signed based on terms previously agreed in the *Minutes of Discussion* (MoD) and the *Memorandum on Engineering Services* (MoES) regarding a loan of ¥ 1.869 billion which will be used in financing:
 1. Consultation for Basic Design Preparation (*Engineering Services*)
 2. Management Consulting to establish and develop PT MRT Jakarta
 3. Procurement consulting, to help PT MRT Jakarta in Project auctioning as implementation of basic design activity resulted in point 1 (one) above.

2009

- 19 Februari 2009, Pengangkatan Direksi MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
- 25 Maret 2009, Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 1 antara Pemerintah RI dengan Pemprov DKI, yang menghibahkan sebagian porsi (LA IP-536) kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk pengadaan Konsultan Pendampingan Tender dan Konsultan Manajemen.
- 31 Maret 2009, Loan Agreement Tahap 2 (L/A 2) untuk pinjaman tahap konstruksi senilai ¥48,15 milyar sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk Proyek MRT (L/A 2).
- 24 Juli 2009, Penandatanganan NPPH 2 yang menghibahkan seluruh porsi (L/A 2) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk konstruksi MRT.
- 23 November 2009, *Basic Design Engineering* mulai dilaksanakan di Kementerian Perhubungan.
- February 19, 2009, Appointment of Board of Directors of PT MRT Jakarta by the Governor of DKI Jakarta Fauzi Bowo.
- 25 March 2009, the signing of Granting Succession Agreement Manuscript (GSAM) 1 between the Government of Republic Indonesia with Provincial Government of DKI Jakarta that grant-proceeded some portions (LA IP-536) to Provincial Government of DKI Jakarta which is intended to the procurement of Tender Assistance Consulting and Management Consulting.
- 31 March 2009, Loan Agreement Phase 2 (L/A 2) for the construction phase loans worth of 48.15 billion Japanese Yen as the second part of total loans for MRT Project (L / A 2).
- 24 July 2009, the signing of Granting Succession Agreement Manuscript (GSAM) 2 that grant-proceeded all portions (L / A 2) to Provincial Government of DKI Jakarta which is intended for MRT construction.
- 23 November 2009, Basic Design Engineering began to be conducted in Ministry of Transportation.

'08

'09

2008

- 17 Juni 2008, PT MRT Jakarta berdiri, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.
- 28 November 2008, penandatanganan Minutes of Discussion (MOD 2008) sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk tahap konstruksi MRT.
- 5 Desember 2008, penandatanganan Aide Memoir antara JICA dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan *prepatory study for extention* Dukuh Atas – Kota – Kampung Bandan, yang ditindaklanjuti oleh JICA dengan mengirimkan tim untuk melaksanakan *feasibility study* koridor Selatan- Utara tahap II, Dukuh Atas – Kota, wilayah utara Jakarta yang akan ditentukan kemudian, dan *prefeasibility study* jalur Timur-Barat.
- 17 June 2008, PT MRT Jakarta was established, after prior approval from Jakarta Provincial Council through the 2008 Regional Regulation No. 3 regarding the Establishment of ROE of PT MRT Jakarta and the 2008 Regional Regulation No. 4 regarding Regional Participation Capital in PT MRT Jakarta.
- 28 November 2008, the signing of Minutes of Discussion (MOD 2008) as the basis for signing Loan Agreement for MRT's construction phase.
- On 5 December 2008, JICA and the Provincial Government of DKI Jakarta signed the Aide Memoir for the implementation of the prepatory study for extention of Dukuh Atas - Kota - Kampung Bandan, which followed-up by JICA by sending a team to carry out a feasibility study in the South-North Phase II, Dukuh Atas – Kota - northern Jakarta (to be determined later) corridor, and a prefeasibility study in the East-West Lane.

2011

- Pelaksanaan kegiatan lelang fisik Proyek MRT khususnya dilaksanakan karena telah mempunyai payung hukum. Payung hukum tersebut telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan seluruh kegiatan MRT, termasuk proses tender, diberikan kewenangannya kepada PT MRT Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan Proyek MRT meliputi Jasa Konsultasi *Basic Engineering Design* (BED), Jasa Konsultasi Manajemen (MCS), Jasa Konsultasi Pengadaan (TAS), Pekerjaan Sipil dan Peralatan, Jasa Konsultasi Manajemen Operasional (OMCS), dan Jasa Konsultasi Pengelola (CMCS)/Pengawas Pembangunan telah dijelaskan dalam Loan Agreement (L/A 1) dan (L/A 2) serta Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).
- Desember 2011, sepuluh Konsorsium Kontraktor dinyatakan lolos dalam proses Prakualifikasi Pengadaan fisik untuk Pembangunan Tahap I (Lebak Bulus- Bundaran HI).
- Terbitnya No Objection Letter (NOL) dari JICA atas daftar pendek para Calon Kontraktor Pekerjaan Sipil MRT Jakarta Tahap I pada 7 Desember 2011 yang lolos prakualifikasi.
- The implementation of physical Tender of Project MRT was particularly executed because there is already a legal protection, which is issued by Central Government and Provincial Government of DKI Jakarta who declared the entire MRT activities, including tender process, granted their authority to PT MRT Jakarta.
- The implementation of MRT Project activities including Consulting Services of Basic Engineering Design (BED), Management Consulting Services (MCS), Tender Assistance Services (TAS), Civil Works and Equipment Tender, Operation and Maintenance Consulting Services (OMCS), and Construction Management Consulting Services (CMCS) has been described in Loan Agreement (L / A 1) and (L / A 2) and Granting Succession Agreement Manuscript (GSAM) as well.
- December 2011, ten consortium of contractors passed in Physical prequalification tender process for Phase I construction (Lebak Bulus-Bundaran HI).
- Publication of No Objection Letter (NOL) from JICA on a shortlist of Contractor Candidates in Civil Works of MRT Jakarta Phase I on 7 December 2011 who passed in prequalification.

'10

'11

2010

8 Juli 2010, Minutes of Discussion (MoD) telah ditandatangani antara JICA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. MOD ini membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan – Utara Tahap I dari Lebak Bulus- Dukuh Atas, menjadi Lebak Bulus – Bundaran HI. Perpanjangan ini dilakukan dengan menarik stasiun Bundaran HI yang semula berada di MRT koridor Selatan – Utara tahap II menjadi tahap I. Perubahan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak lalu lintas pada Masa Konstruksi dan mengakomodir kebutuhan *turnback facility* MRT koridor Selatan – Utara tahap I.

8 July 2010, Minutes of Discussion (MoD) was signed between JICA and Provincial Government of DKI Jakarta, Bappenas, Directorate General of Railways in Ministry of Transportation. This MOD discussed the route extension of South - North Phase I MRT corridors from Lebak Bulus-Dukuh Atas, to Lebak Bulus -Bundaran HI. This extension performed by pulling Bundaran HI station which formerly located in MRT corridor South – North Phase II to be included in the Phase I. These changes were conducted to minimize the impact of traffic on Construction Period and to accommodate the needs of turnback facility in MRT corridor South - North Phase I.

2012

- 31 Januari 2012, PT MRT Jakarta menggelar rapat penjelasan pelaksanaan lelang (*aanwijzing*) di kantor PT MRT Jakarta, yang dihadiri jajaran Panitia Pengadaan Konstruksi Sipil MRT, KPK, LKPP dan jajaran Direksi PT MRT Jakarta serta para Calon Kontraktor Sipil.
- PT MRT Jakarta membuat pakta integritas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Etika Perilaku (*Code of Conduct*) PT MRT Jakarta, sebagai komitmen menjalankan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
- 27 September 2012, dilakukan sosialisasi MRT Jakarta melalui pameran di 7 (tujuh) pusat perbelanjaan di Jakarta.
- 28 September 2012, diumumkan nama-nama nominasi konsorsium pemenang lelang 3 (tiga) Paket Bawah Tanah. Sebagai Konsorsium pertama yang mengerjakan Paket CP-104, dan CP-105 adalah Shimizu Obayashi sebagai *leader*-nya dengan anggota Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi *Joint Venture*. Sedangkan untuk CP-106 nominasinya adalah Konsorsium *Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)* bersama *Hutama Karya Joint Operation*.
- 31 January 2012, PT MRT Jakarta held an tender explanation meeting (*aanwijzing*) in its office, attended by MRT Civil Construction tender Committee, KPK, LKPP and Board of Directors of PT MRT Jakarta, as well as Civil Contractor Candidates.
- PT MRT Jakarta prepared integrity pact on procurement of goods and services in accordance with Code of Conduct of PT MRT Jakarta, as a commitment to carrying out the tender process in accordance with applicable regulations and not violated any rules, therefore, the tender process can run smoothly and on time.
- 27 September 2012, the socialization of MRT Jakarta was conducted through exhibitions in 7 (seven) shopping centers in Jakarta.
- 28 September 2012, announcement of the names of the winning tenderer consortium nominations of 3 (three) Underground Packages. The first consortium working on Package CP-104 and CP-105 is Shimizu Obayashi as a leader with member consisted of Wijaya Karya, and Jaya Konstruksi *Joint Venture*. While for CP-106 the nominees are consortium of Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) together with *Hutama Karya Joint Operation*.

'12

'13

'14

'15

2013

- Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
- Proyek MRT Jakarta memasuki tahap konstruksi (*groundbreaking*).
- Appointment of the new Board of Commissioners and Board of Directors of PT MRT Jakarta by the Governor of DKI Jakarta Joko Widodo.
- MRT Project entered the construction phase (*groundbreaking*).

2014

Proyek MRT Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu proyek dari 20 proyek infrastruktur terbaik di dunia.

Jakarta MRT Project gained international recognition as one of the 20 best infrastructure projects in the world.

2015

- Beroperasinya Tunnel Boring Machines (TBM) Antareja untuk konstruksi bawah tanah, dengan peresmian pengoperasian TBM oleh Presiden Joko Widodo.
- 4 Desember 2015, penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. IP-569 dan IP-571 antara JICA dengan Pemerintah Republik Indonesia guna pembiayaan lanjutan proyek pembangunan MRT Jakarta.
- The operation of Antareja Tunnel Boring Machines (TBM) for underground construction was inaugurated by President Joko Widodo.
- 4 December 2015, the signing of Loan Agreement No. IP-569 and IP-571 between JICA and the Government of the Republic of Indonesia to finance MRT Jakarta project further development.

VISI

VISION

Untuk menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan dan pengembangan sistem transit perkotaan.

To become the leading public transportation provider, committed to stimulating economic growth through mobility improvement, traffic reduction and development of urban transit system.

MISI

Mission

Untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua hal yang kami lakukan melalui:

- ▶ Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya dan nyaman;
- ▶ Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama; dan,
- ▶ Membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan, menginspirasi dan memotivasi tenaga kerja kami.

To strive for excellence in sustainable way in all our undertakings through the following:

- ▶ *Development and operation of safe, trusted and comfortable public transportation network;*
- ▶ *Rejuvenation of urban environment through prominent urban transit development; and,*
- ▶ *Building reputation as the preferable company by involving, inspiring and motivating our manpower.*



NILAI PERUSAHAAN Company Values

Nilai-nilai Organisasi yang menjadi acuan dalam berperilaku di MRT Jakarta tertuang dalam *Code of Conduct* yang diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi No. 40 Tahun 2009. Nilai – nilai tersebut adalah **PRIDE AT**, yaitu:

Organizational Values referred as the code of conduct at MRT Jakarta are stipulated in the Code of Conduct in the Board of Director's Decision Letter - (SK Direksi) No. 40 of 2009. These values are **PRIDE AT**, which are:

Respect

Perusahaan menghormati dan menghargai keragaman serta keunikan setiap insan Perusahaan di dalam memberikan kontribusi pada Perusahaan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya dengan berdasarkan pada kompetensinya.

Respect

The Company embraces the variety and uniqueness that every individual can contribute and offers them all the same level of opportunity based on their competencies.

Dignity & Ownership

Setiap insan di Perusahaan akan memiliki kebanggaan dengan bekerja di MRT Jakarta. Dengan rasa kepemilikan yang tinggi ini, Perusahaan akan dapat terus berkembang dan menjadi acuan bagi Provinsi dan Pemerintah Daerah lain dalam mengimplementasikan standar pelayanan kelas dunia.

Dignity & Ownership

Each individual within the Company will have pride in working for the Company. Through this high sense of ownership, the Company can further grow and become the single benchmark for other Provinces and Regional Governments in implementing world class service standard.

Accountability

Insan MRT Jakarta akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diberikan kepada mereka, memiliki akuntabilitas dan kebanggaan tersendiri terhadap hasil pekerjaan mereka.

Accountability

Individuals of MRT Jakarta will take full responsibility of the work assigned to them, have accountability and pride towards the achievement of their work.



Perseverance

Insan MRT Jakarta harus ulet dan mempertahankan fokus jangka panjang dalam mewujudkan tujuan strategis Perusahaan-menciptakan sistem mass rapid transit bukan pekerjaan yang bisa segera terlihat hasilnya-harus selalu berjuang keras merealisasikannya.

Perseverance

The individuals of MRT Jakarta have to be tenacious and maintain long-term focus in realizing the Company strategic objectives-to create a mass rapid transit system not as instant job with immediate visible results-always have to strive on realizing it.



Integrity

Insan MRT Jakarta harus memiliki kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang sama dan konsisten, bersih dan menunjukkan profesionalisme dalam melakukan kewajiban hariannya.

Integrity

The individual of MRT Jakarta shall have a common, consistent, clean mindset and actions and show professionalism in the way they carry out their daily duties.



Excellence

MRT Jakarta akan mendukung lingkungan yang berorientasikan hasil yang memberdayakan Insan dalam Perusahaan dan memotivasi mereka dalam penyampaian visi dan misi Perusahaan.

Excellence

MRT Jakarta will cultivate a result orientated environment that empowers its Employees and motivates them to excel in delivering the Company's vision and mission.



Teamwork

Insan MRT Jakarta akan bekerja secara bersama-sama dan bersatu untuk mencapai visi dan misi Perusahaan yang didasarkan kepada komitmen bersama

Teamwork

Individuals of MRT Jakarta will work together and be united to achieve the vision and mission of the Company based on mutual commitment.

PRIDE AT

KEGIATAN USAHA

Business Activities



Berdasarkan pasal 3 dari Anggaran Dasar PT MRT Jakarta, ruang lingkup kegiatan Perusahaan mencakup:

1. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana.
2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana.
3. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.

Pursuant to the article 3 of the PT MRT Jakarta's Articles of Association, the Company's business activities include:

1. Implementation of Urban Public Railway Infrastructure which includes Infrastructure Developments, Infrastructure Operations, Infrastructure Maintenances and Infrastructure Concessions;
2. Implementation of Urban Public Railway Modes which includes Modes Development, Modes Operation, Modes Maintenance, and Modes Concessions;
3. Development and property / business management in the station and its surrounding area as well as its depo and surrounding area.

CAKUPAN PROYEK Scope of Projects

KONSTRUKSI LAYANG

Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang yang membentang ± 10 km; dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 stasiun layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja. Sementara depo kereta api di bangun di area Lebak Bulus, berdekatan dengan stasiun awal/akhir Lebak Bulus. Seluruh stasiun penumpang dan lintasan dibangun dengan struktur layang yang berada di atas permukaan tanah, sementara depo kereta api dibangun di permukaan tanah (*on ground*).

Tipe struktur layang yang akan digunakan adalah tiang tunggal (*single pier*) pada bagian bawah serta gelagar beton pracetak (*precast concrete box girder*) pada bagian atas. Ketinggian gelagar dari permukaan jalan telah memperhitungkan persyaratan minimal jarak bebas vertikal 5,0 meter sesuai peraturan yang berlaku untuk jalan perkotaan.

Pekerjaan konstruksi layang MRT Jakarta terdiri dari tiga paket, yaitu *Contract Package* (CP) 101, CP 102 dan CP 103.

KONSTRUKSI BAWAH TANAH

Konstruksi bawah tanah (*underground*) MRT Jakarta membentang ± 6 km, yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT bawah tanah, yang terdiri dari Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia.

Metode pengerjaan konstruksi bawah tanah menggunakan TBM (*Tunnel Boring Machine*) tipe EPB (*Earth Pressure Balance Machine*), dengan pembagian koridor paket pengerjaan terbagi menjadi tiga: CP 104, CP 105 dan CP 106.

RAILWAY SYSTEMS & TRACKWORK DAN ROLLING STOCK

Railway System merupakan prasarana penunjang sistem perkeretaapian yang terdiri dari 10 *subsystem*, antara lain *substation system*, *overhead contact system*, *power distribution system*, *signaling system*, *telecommunication system*, *facility scada*, *automatic fare collection system*, *platform screen doors*, *escalator & elevator*, dan *trackwork*. Sistem perkeretaapian MRT Jakarta akan menggunakan sistem persinyalan terbaru di Indonesia dengan memperkenalkan sistem persinyalan CBTC (*Communication Based Train Control*) dan menerapkan sistem *moving block* untuk pengaturan perjalanan kereta.

Pekerjaan *Railway Systems & Trackwork* dan *Rolling stock* MRT Jakarta terdiri dari dua paket, yaitu CP 107 dan CP 108.

ELEVATED SECTION

Most of MRT's construction lines are Elevated Structures which extends along ± 10 miles; from Lebak Bulus to Sisingamangaraja areas. From these routes, there are 7 (seven) Elevated Station, namely Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M and Sisingamangaraja. While train depo will be built in Lebak Bulus area, adjacent to the beginning/end of Lebak Bulus station. All station and tracks built with elevated structures which is above the ground, while the train depo built on the ground surfaces.

Type of elevated structures that will be used is single pier on the bottom and precast concrete box girder on the top. Girder height from street level has calculated the minimum of vertical clearances requirement for 5.0 meters in accordance with applicable rules for urban street.

Elevated construction work of MRT Jakarta consists of the three packages, namely *Contract Package* (CP) 101, CP 102 and CP 103.

UNDERGROUND CONSTRUCTION

Underground construction of MRT Jakarta extends along ± 6 km, consisted of MRT underground tunnels and six underground MRT Stations, which consists of Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia stations.

Underground construction working methods is using TBM (*Tunnel Boring Machine*) type of EPB (*Earth Pressure Balance Machine*), with distribution of processing packages divided into three corridors: CP 104, CP 105 and CP 106.

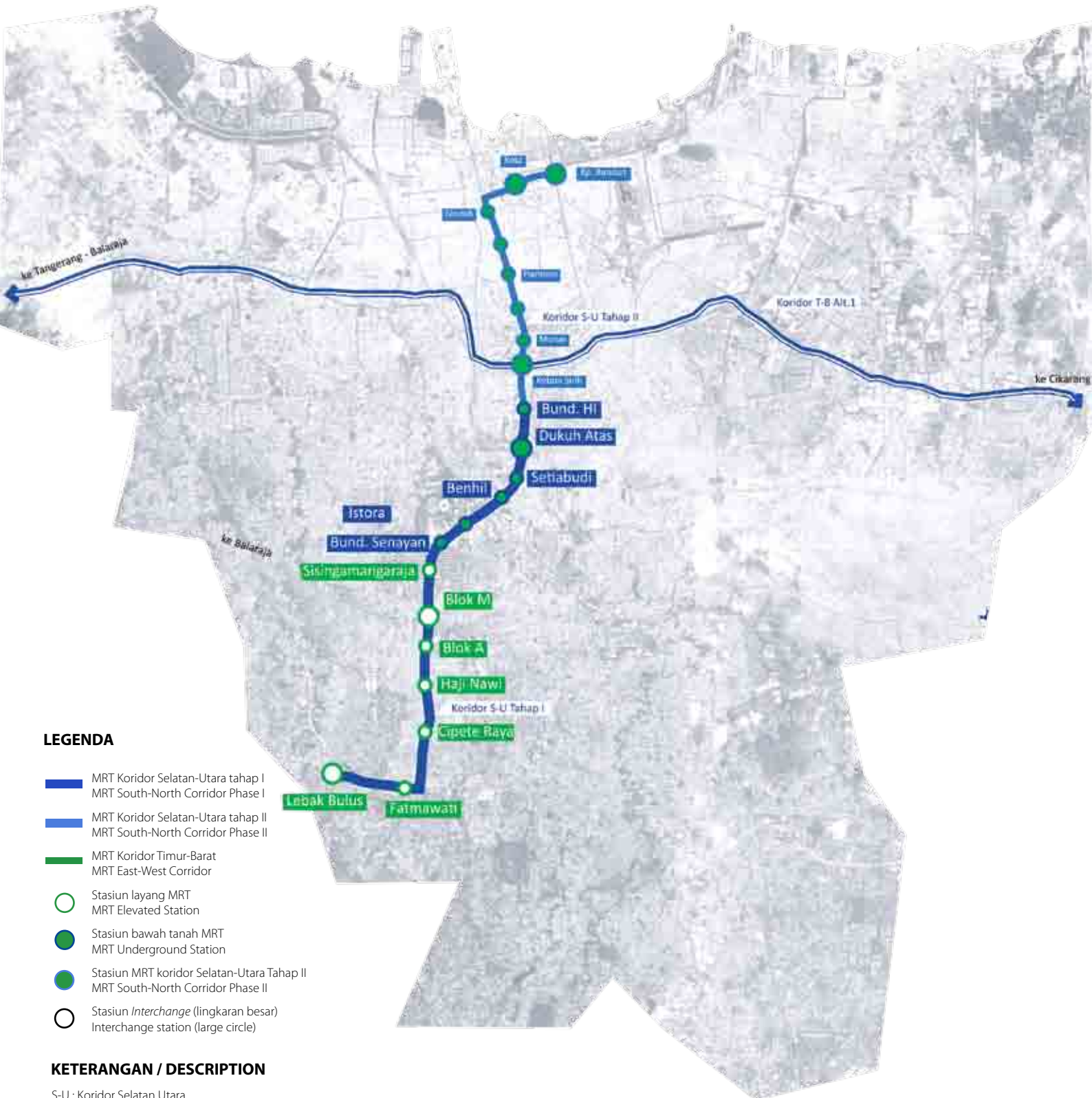
RAILWAY SYSTEMS & TRACKWORK AND ROLLING STOCK

Railway System is the supporting infrastructure system consisted of 10 *subsystems*, including *substation system*, *overhead contact system*, *power distribution system*, *signaling system*, *telecommunication system*, *facility scada*, *automatic fare collection system*, *platform screen doors*, *escalator & elevator*, dan *trackwork*. *Railways system* of MRT Jakarta will use the latest signaling system in Indonesia by introducing CBTC (*Communication Based Train Control*) signaling system and applying the *moving block* system for train travel arrangements.

Railways Systems & Trackwork and *Rolling Stock* of MRT Jakarta consisted of two packages, which is CP 107 dan CP 108.

WILAYAH OPERASIONAL

Operational Areas



LEGENDA

- MRT Koridor Selatan-Utara tahap I
MRT South-North Corridor Phase I
- MRT Koridor Selatan-Utara tahap II
MRT South-North Corridor Phase II
- MRT Koridor Timur-Barat
MRT East-West Corridor
- Stasiun layang MRT
MRT Elevated Station
- Stasiun bawah tanah MRT
MRT Underground Station
- Stasiun MRT koridor Selatan-Utara Tahap II
MRT South-North Corridor Phase II
- Stasiun *Interchange* (lingkaran besar)
Interchange station (large circle)

KETERANGAN / DESCRIPTION

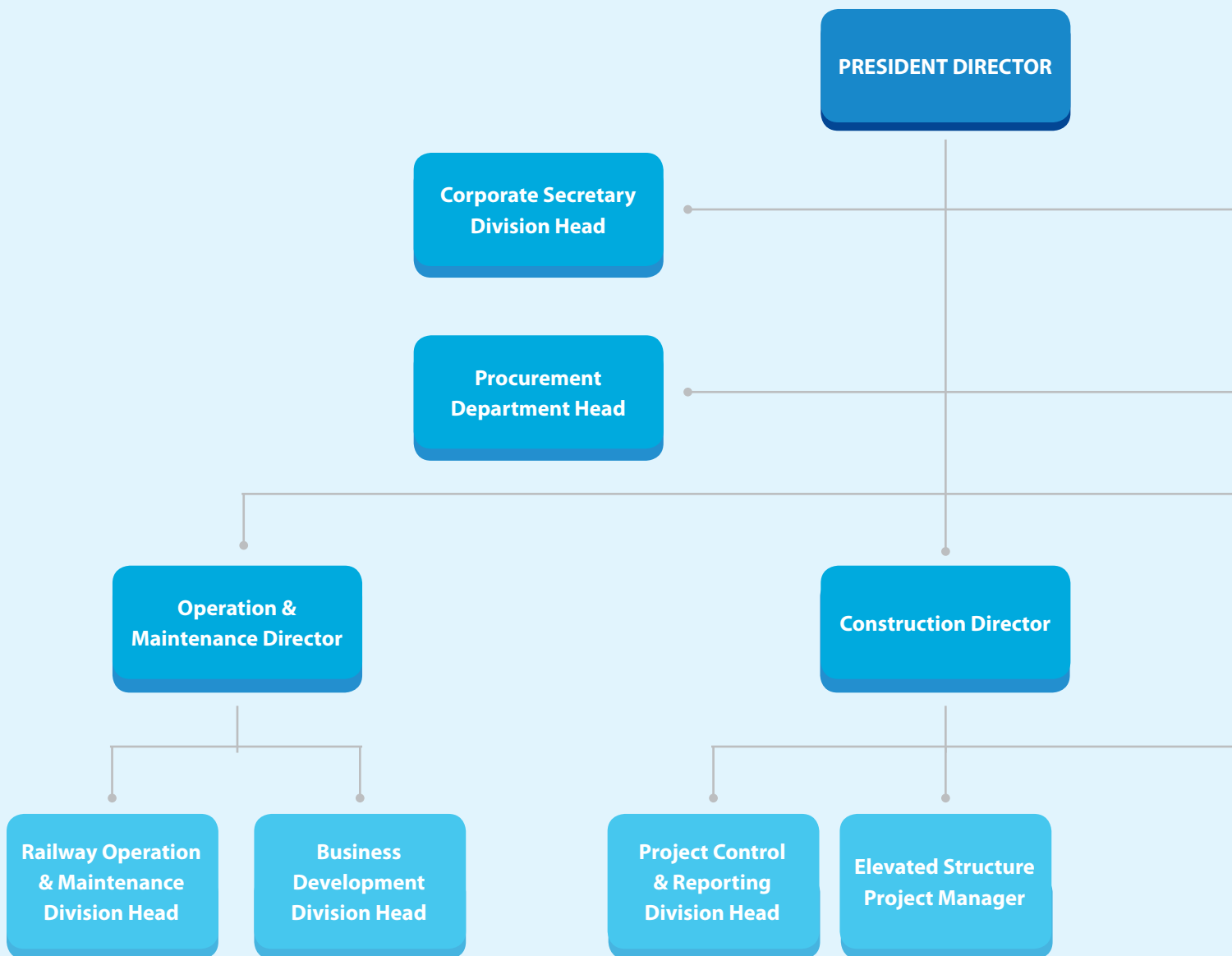
S-U : Koridor Selatan Utara
S-N : South-North Corridor

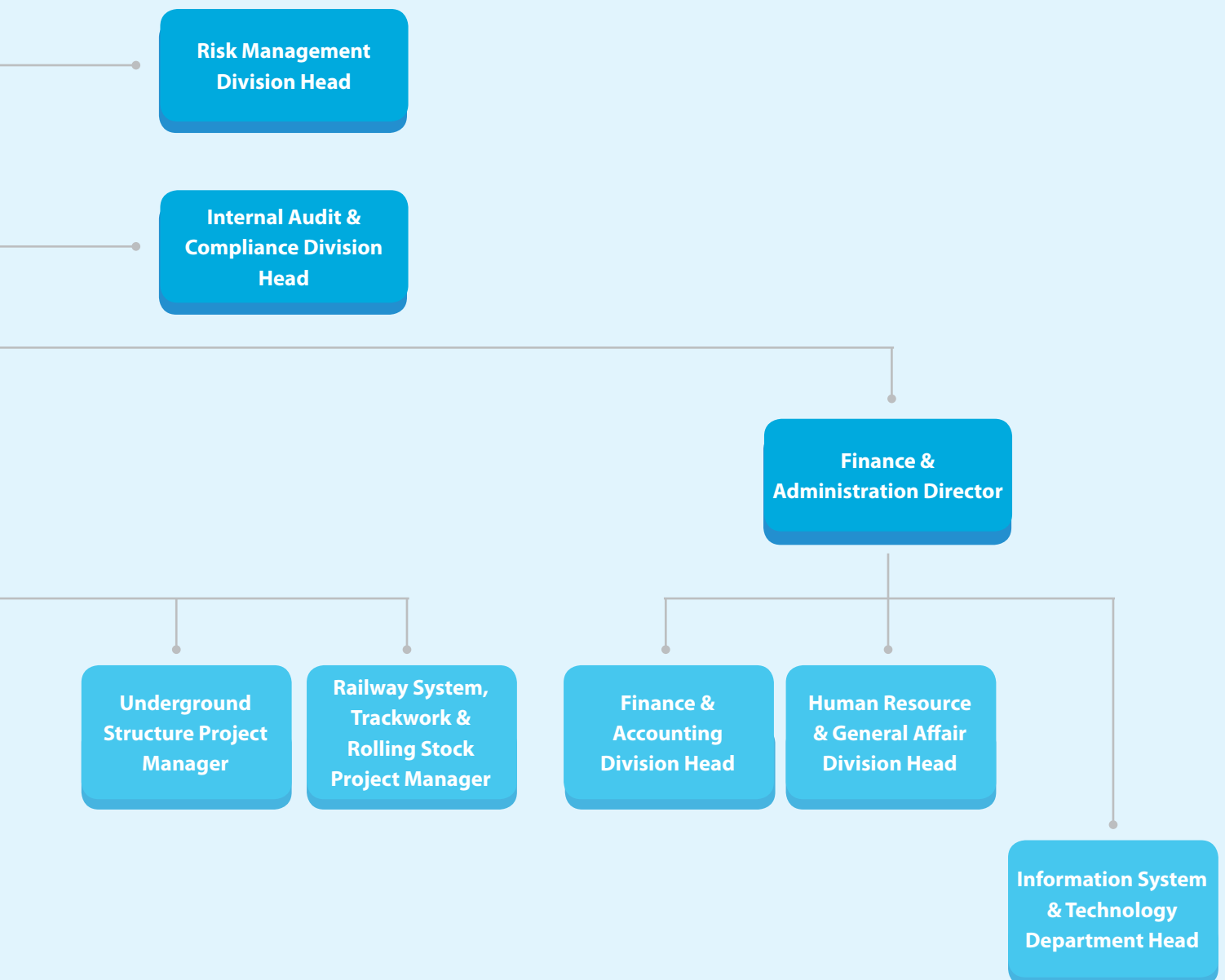
T-B : Koridor Timur-Barat
E-W : East-West Corridor



STRUKTUR ORGANISASI PT MRT JAKARTA TAHUN 2015

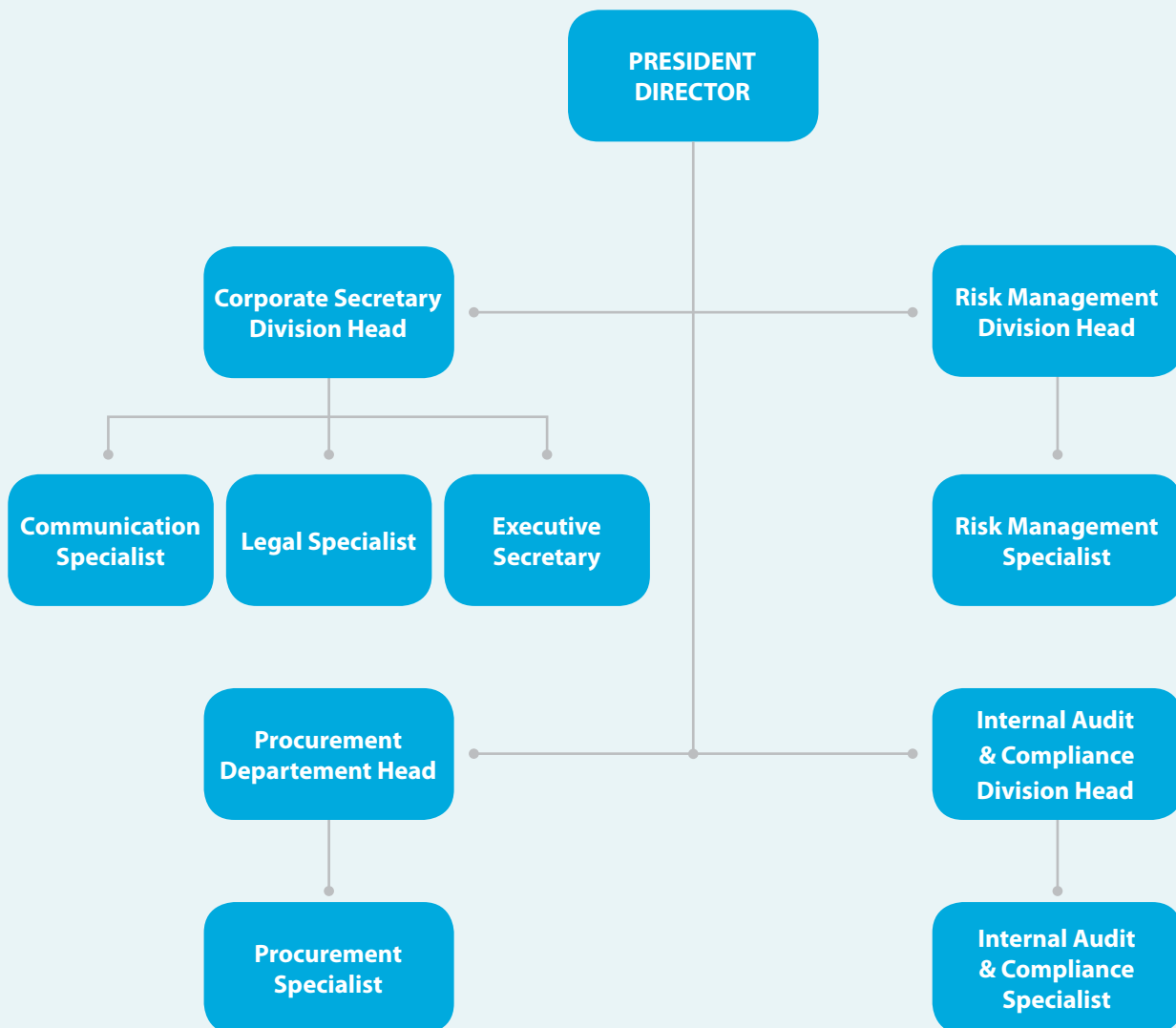
Organization Structure PT MRT Jakarta 2015

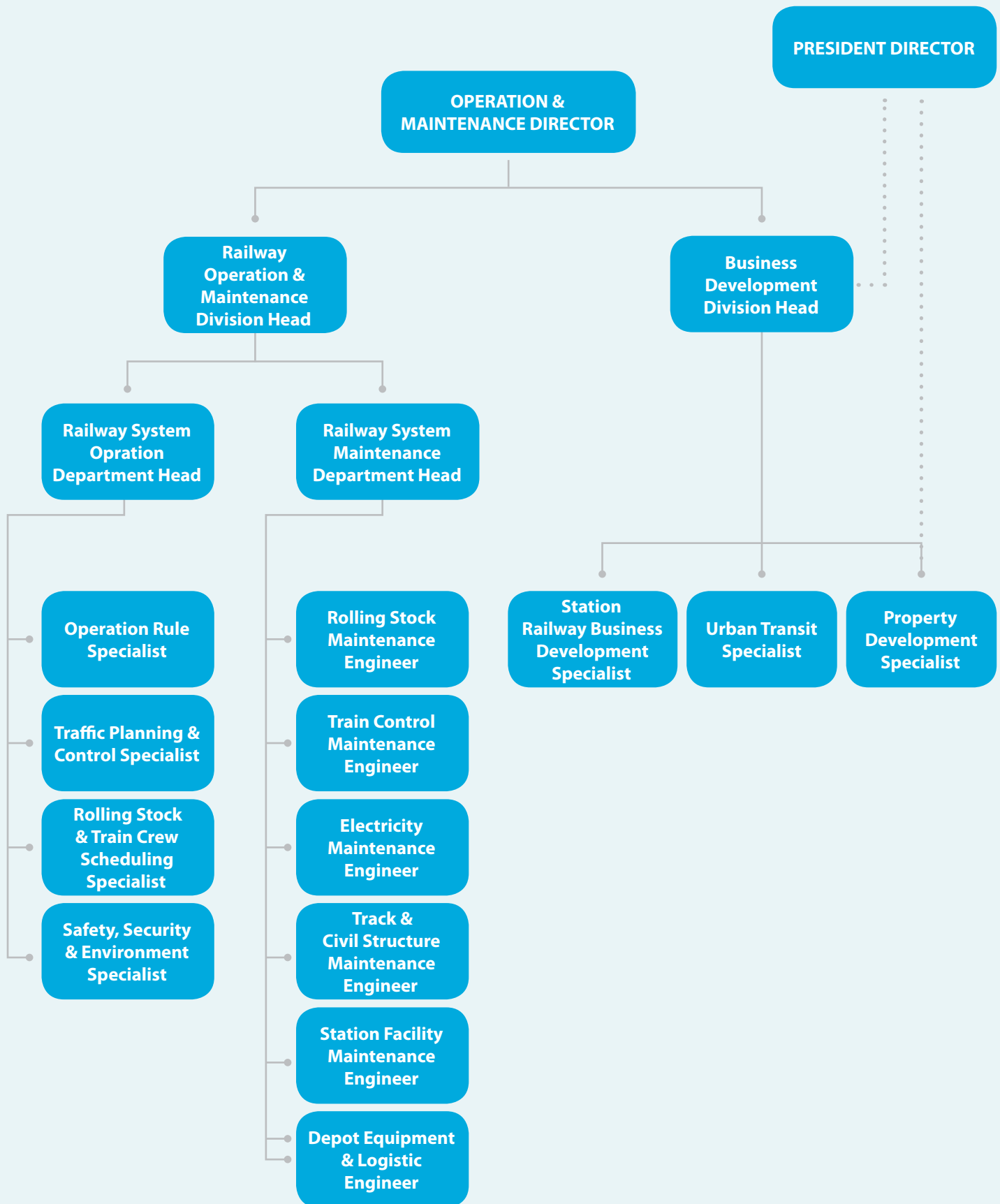




STRUKTUR ORGANISASI PT MRT JAKARTA TAHUN 2015

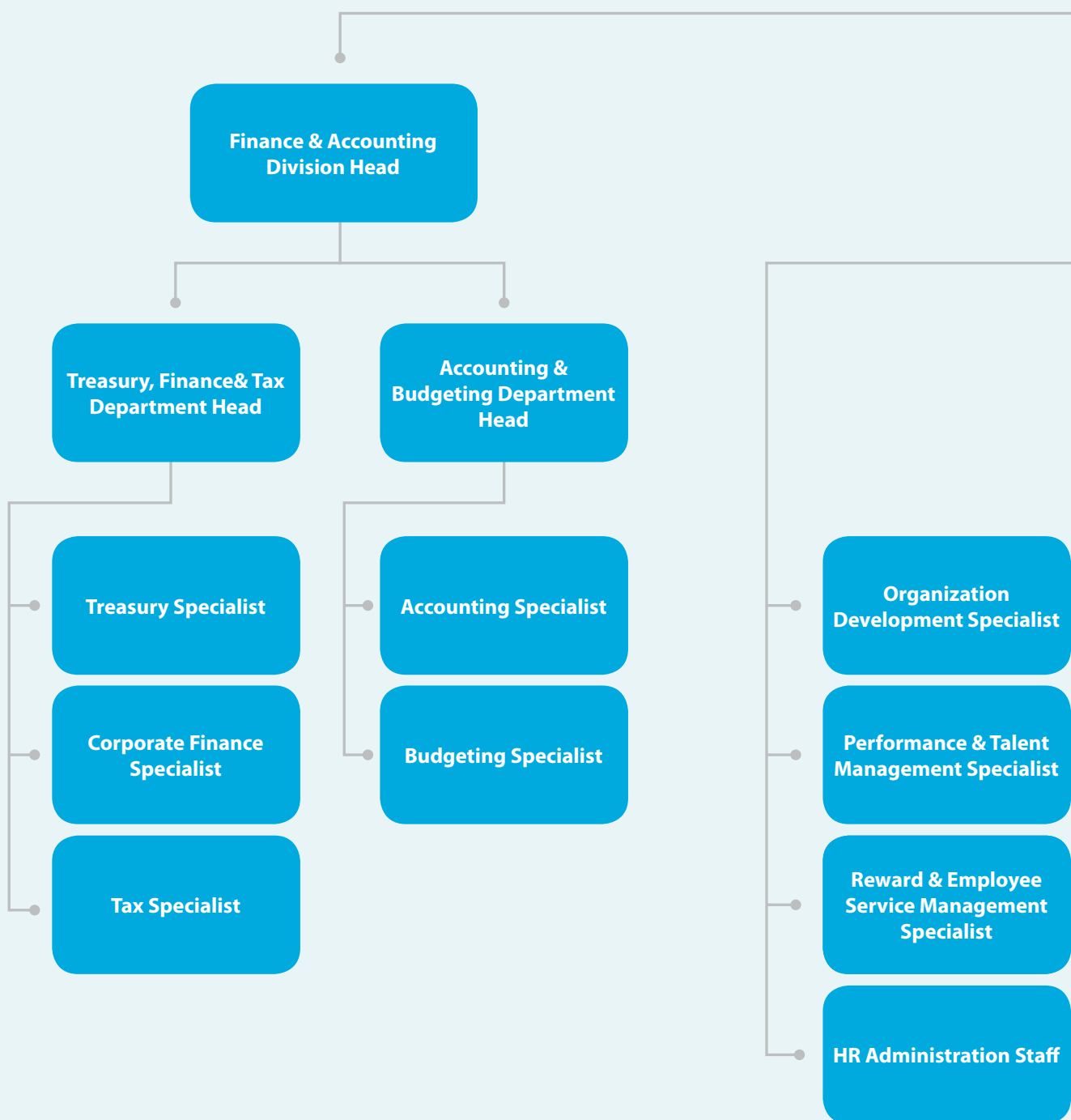
Organization Structure PT MRT Jakarta 2015

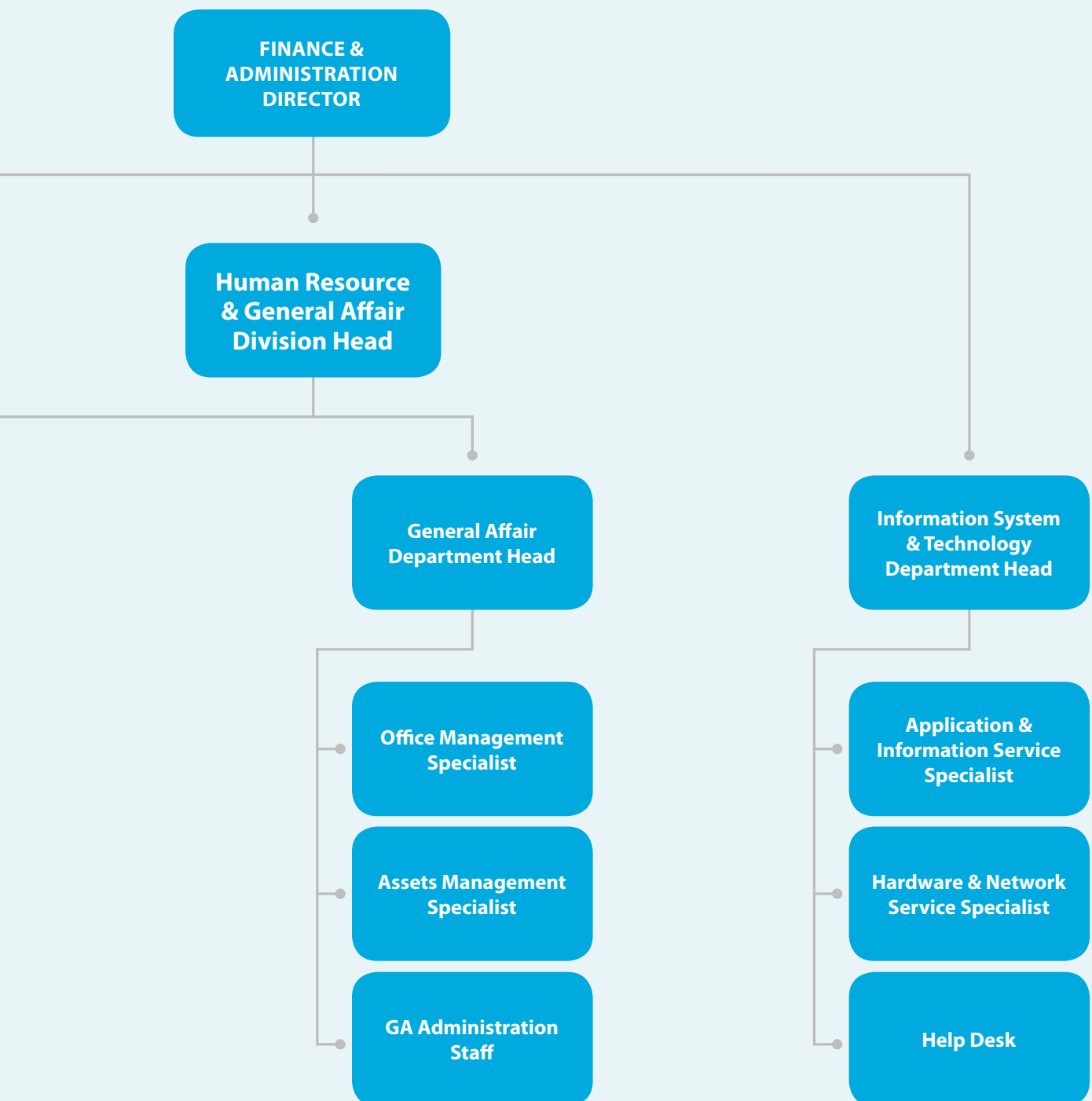




STRUKTUR ORGANISASI PT MRT JAKARTA TAHUN 2015

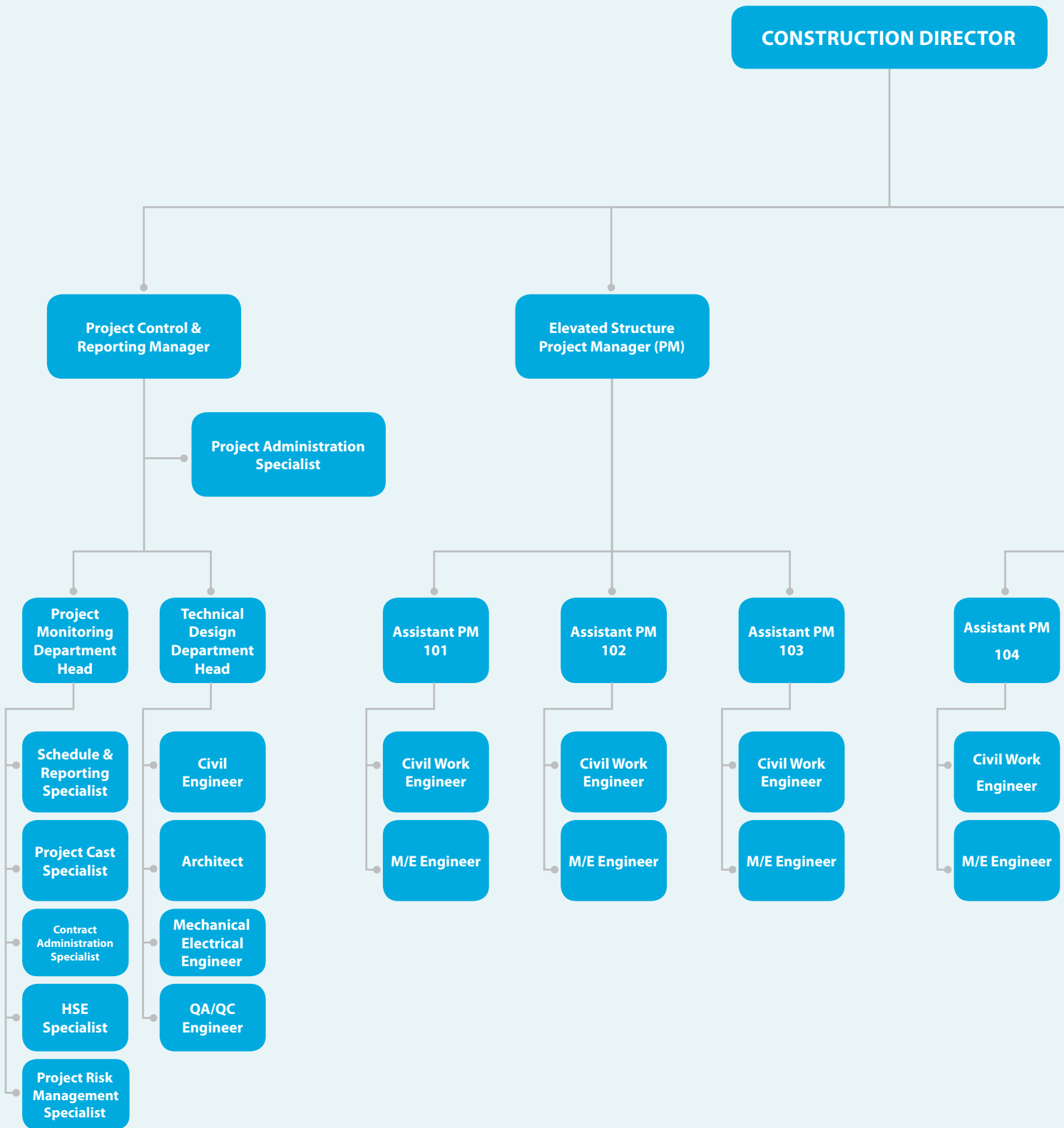
Organization Structure PT MRT Jakarta 2015

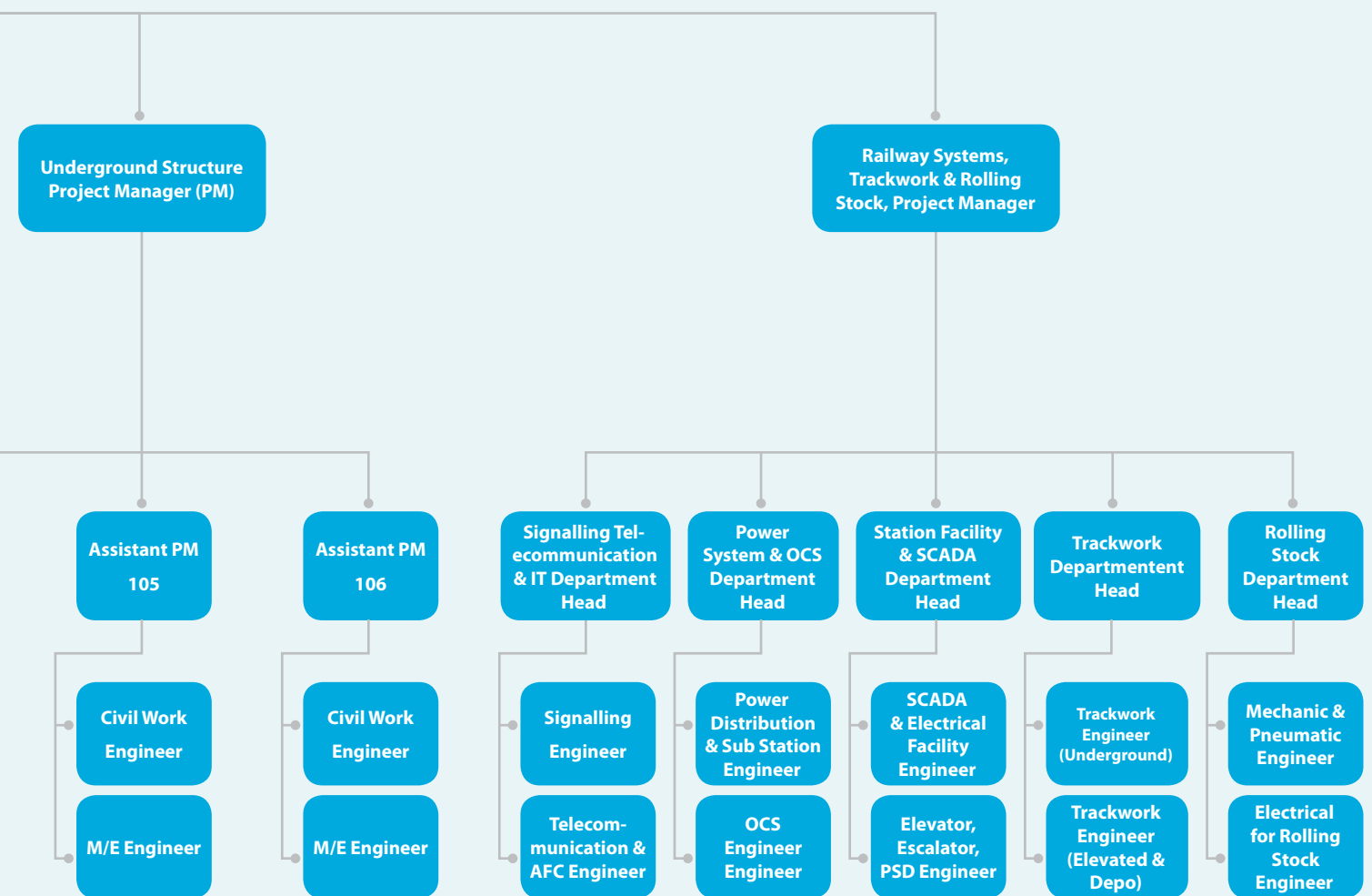




STRUKTUR ORGANISASI PT MRT JAKARTA TAHUN 2015

Organization Structure PT MRT Jakarta 2015





PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officials



AKBAR ANWAR
Division Head of Internal Audit

ARIF RAHMAT
Division Head Project Control & Reporting
Acting Project Manager for Underground Structure.

NOVIADI WIDJAYA
Division Head of Treasury, Finance
& Accounting Management

ERNIE WIDIANTY RAHARDJO
Division Head of Risk Management



HERU NUGROHO ADHY PRASETYO
Project Manager for Elevated Structure
Acting Project Manager for Railway System, Trackwork & Rolling Stock



TUBAGUS HIKMATULLAH
Division Head of Corporate Secretary



DAHLAN
Division Head of Railway Operation & Maintenance

PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officials



MA'SUM ASIM
Department Head of Procurement



KRISNAJAYA
Department Head of General Affair



FAJAR DHARMAWAN
Department Head Accounting &
Budgeting



**MEGA INDAHWATI
NATANGSA TARIGAN**
Department Head Railway System Operation



YANTO YULIANTO
Department Head Signalling,
Telecommunication & IT



MUHAMMAD IRFAN FIRMANSYAH
Department Head Trackwork

PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officials



MOHAMAD DEDDY GAMAWAN
Department Head Rolling Stock



WENI MAULINA
Department Head Technical Design



DEWI SULISTYANINGSIH
Department Head Project Monitoring



ASEP SOLIHIN PERTAMANA
Department Head Power System & OCS



INDRA GUNAWAN
Department Head Station Facility & SCADA

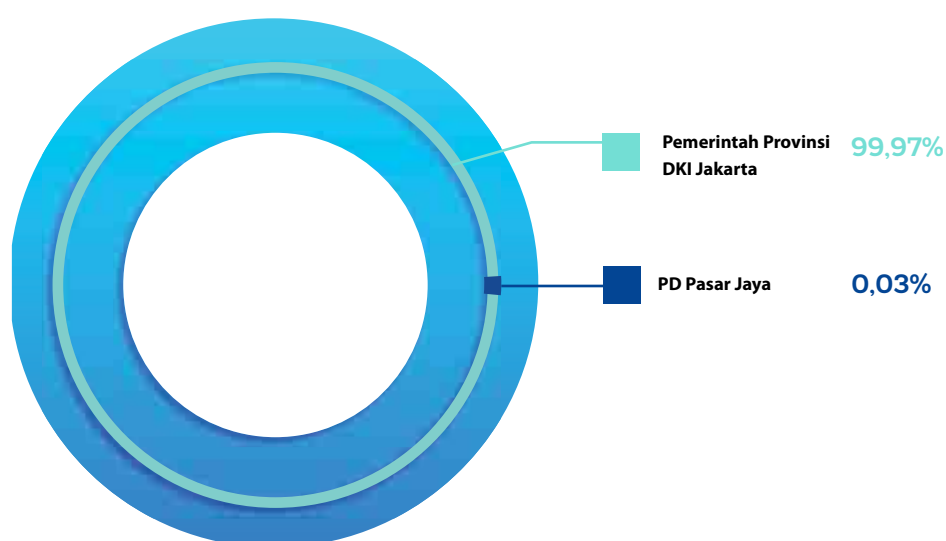
KEPEMILIKAN SAHAM DAN INFORMASI SAHAM

Share Ownership and Share Information

Komposisi Kepemilikan PT MRT Jakarta
per 31 Desember 2015

Composition of PT MRT Jakarta Ownership
per 31 December 2015

Pemegang Saham Shareholders	Nominal (Rp)	Persentase Percentage (%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ Provincial Government of DKI Jakarta	1.943.285.000.000	99,97%
PD Pasar Jaya	500.000.000	0,03%



Hingga 31 Desember 2015, Perusahaan tidak melakukan penawaran umum perdana saham kepada publik maupun penawaran efek dalam bentuk apapun. Perusahaan juga tidak memiliki kebijakan program kepemilikan saham karyawan, atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan program kepemilikan saham karyawan, atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan tabel dan diagram di atas.

As of 31 December 2015, the Company did not exercise initial public offering of shares to public or offering of any other kind of securities. The Company also did not have Employee Stock Option Program (ESOP) nor Management Stock Option Program (MSOP). Share ownership in the Company is as listed in the above table and chart.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Supporting Institution and Profession

Akuntan Publik
Public Accountant

Purwantono, Sungkoro & Surya

(A member of Ernst & Young Global Limited)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 7
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan, Indonesia
Telp: +62 21 5289 5000
Faks: +62 21 5289 4100

Konsultan Hukum
Legal Counsels

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali Lantai 16
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
Telp: +62 21 2555 7800
Faks: +62 21 2555 7899

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II Lantai 21
Sudirman Central Business District
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +62 21 2960 8888
Faks: +62 21 2960 8999

Notaris
Notary

Kantor Notaris Miki Tanumiharja, SH

Jl. Denpasar Raya Blok C4 No. 23,
Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telp: +62 21 520 4989
Faks: +62 21 520 4990

We are **on the right track**





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

78	TINJAUAN UMUM General Overview
82	Tinjauan Operasional Operational Overview
97	Tinjauan Keuangan Financial Review
109	Rencana Pengembangan Usaha Business Development Plan
116	Sumber Daya Manusia Human Resources
130	Teknologi Informasi Information Technology

TINJAUAN UMUM

General Overview

Infrastruktur Sebagai Kebutuhan Mendesak

Pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia pada beberapa tahun belakangan memberikan dampak *multiplier* terhadap berbagai kondisi kehidupan masyarakat. Dengan perekonomian yang meningkat, konsumsi pun meningkat, sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan sektor-sektor penunjang perekonomian. Berbagai sektor strategis meningkat secara signifikan, khususnya sektor yang berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat.

Peningkatan perekonomian kemudian berimbas langsung terhadap kebutuhan transportasi. Pada skala kebutuhan konsumsi rumah tangga, transportasi erat hubungannya dengan kalkulasi biaya dan *benefit* atau kemudahan yang ditawarkan dari model transportasi yang tersedia. Maka tak mengherankan, konsumsi kendaraan bermotor tumbuh begitu pesat, dengan *market size* yang begitu besar, sebangun dengan pertumbuhan kelas menengah dan kebutuhan akan mobilisasi.

Kendaraan bermotor menawarkan berbagai *benefit* yang tak didapatkan masyarakat saat menggunakan transportasi umum. Waktu yang dihabiskan dalam perjalanan menjadi pertimbangan utama dan susahnyanya ketersediaan transportasi umum yang memadai. Secara perlahan, kemacetan menjadi sebuah benang kusut yang tak terhindarkan. Di satu sisi, masyarakat menghindari penggunaan transportasi umum untuk mempersingkat waktu perjalanan; sementara di sisi lain konsumsi kendaraan bermotor dari masyarakat justru semakin memperparah kemacetan.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara merupakan representasi dari kondisi tersebut. Hampir seluruh pelaku usaha industri besar yang beroperasi di Indonesia memiliki perwakilan di Jakarta; demikian pula dengan penempatan pusat pemerintahan dan masyarakat politik yang masih berpusat di Jakarta. Hal ini kemudian menciptakan daya tarik kota Jakarta yang begitu besar bagi laju urbanisasi dari masyarakat luar Jakarta.

Bodetabek, atau Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, menjadi area penyangga dari Jakarta yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat urban perkotaan. Dari area penyangga inilah, sebagian besar konsumsi akan kebutuhan kendaraan bermotor meningkat tinggi. Kendaraan bermotor baru di Jakarta bertambah 1.000 unit setiap harinya; berbanding terbalik dengan volume jalan raya yang hanya mencapai 1% setiap tahunnya. Setiap harinya, diperkirakan lebih dari 4 (empat) juta penglaju dari daerah-daerah penyangga tersebut keluar dan masuk wilayah ibukota. Sementara proyeksi jumlah penduduk Jakarta di tahun 2020 diperkirakan mencapai 10 juta jiwa, dimana pada tahun tersebut diprediksikan akan terjadi kemacetan total jika tak ada upaya mengatasi situasi saat ini.

Infrastructure as an Urgent Need

Indonesia's rapid economic growth in recent years has a multiplier effect on various living conditions of the people. With the economy growing, consumption also increases, in line with the demand of the sectors supporting the economy. Various strategic sectors increased significantly, in particular those directly related to public consumption.

The economic growth has directly impacted on transportation need. On household consumption scale, it is closely related to the calculation of transport costs and benefits or convenience offered from the transport models available. Therefore it is not surprising, the consumption of motor vehicles has been growing so fast, with a sizeable market, congruent with the growth of the middle class and the need for mobilization.

Motor vehicles offers a variety of benefits that cannot be obtained by the society when using public transport. Time spent on the road is a major consideration and difficulties on availability of adequate public transport. Gradually, congestion becomes inevitable tangled thread. On the other hand, people avoid the use of public transport to shorten the travel time; while on the other side, the public consumption of motor vehicles actually exacerbate congestion.

DKI Jakarta as the country's capital city is a representation of the condition. Almost all large industrial businesses operating in Indonesia have their representative offices in Jakarta; moreover, the center of government and political society are also still based in Jakarta. This makes Jakarta become very attractive for the urbanization from the society outside Jakarta.

Bodetabek, or Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, becomes a buffer area of Jakarta mostly populated by the urban society. From this buffer area, most of motor vehicles consumption rises highly. New motor vehicles in Jakarta increased by 1,000 units per day; inversely proportional with the road-building capacity which reaches only 1% annually. Everyday, it is estimated more than 4 million commuters from those buffer areas travelling in and out of the capital city area. While the projected number of Jakarta population in 2020 is estimated to reach 10 million people, which by that year the total congestion is predicted to occur if there is no effort to overcome the current situation.



Kecenderungan perluasan kota Jakarta-Bodetabek yang pesat dan kurang terkontrol secara signifikan meningkatkan biaya transportasi, mengurangi tingkat mobilitas dan menurunkan kualitas hidup.

Perluasan pesat dan tidak terkendali dari kota Jakarta dan Bodetabek ini sebagian besar berwujud pemukiman berlantai rendah—hampir 64% total wilayah Jakarta—dan gedung-gedung berlantai rendah yang nyaris memakan habis persediaan lahan di Jakarta. Sebagai dampak dari fenomena pertumbuhan ini, Jakarta saat ini tidak memiliki cukup ruang untuk pembangunan di masa depan.

Membangun kota Jakarta secara ekstensif horizontal dengan hanya mengandalkan jaringan jalan raya dan kendaraan pribadi hanya mengakibatkan kota berkembang semakin besar, inefisien, boros dan tidak terkendali. Akibat terburuk adalah kelas menengah produktif semakin terpinggirkan ke luar kota sehingga menimbulkan ketimpangan sosial baik di dalam kota maupun di luar kota. Selain itu ruang terbuka semakin hilang dan infrastruktur kota tidak dapat mengejar kecepatan perluasan kota sehingga pelayanan publik kota merosot jauh di bawah standar. Ironisnya, para penghuni dan penglaju terpaksa mengeluarkan biaya hidup yang semakin lama semakin tinggi, tanpa disertai peningkatan layanan publik yang sepatutnya.

Pemerintah telah menyadari hal ini, dan mencoba mengupayakan berbagai perencanaan yang solutif agar Jakarta tidak akan kehilangan masa depannya. Fokus pemerintah—baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah—terhadap infrastruktur di segala bidang diterjemahkan dengan pembangunan secara massif. Di Jakarta sendiri, *Urban Design Guideline* (UDGL) terus dikedepankan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Penataan perumahan vertikal, peruntukan dan pemanfaatan lahan, hutan dan taman kota, sistem pengairan, hingga transportasi dan angkutan umum.

Infrastruktur diperlukan sebagai penyangga aktivitas manusia. Transportasi, bidang dimana MRT Jakarta menjadi bagian di dalamnya, memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan menciptakan transportasi yang layak dan cepat, pola keterhubungan antar wilayah akan terjawab dengan baik, yang tentunya akan menurunkan minat masyarakat pada penggunaan angkutan pribadi.

Tak hanya itu, menciptakan konektivitas antara satu moda transportasi dengan moda transportasi lainnya, tentu akan memberikan konsep lanskap kota yang lebih tertata. Perpindahan

The tendency of rapid and uncontrolled expansion of Jakarta and Bodetabek has significantly increased transportation costs, decreased mobility level and downgraded quality of life.

Rapid and uncontrolled expansion from Jakarta and Bodetabek is largely low-rise residential (almost 64% of total area of Jakarta) and low-rise buildings that nearly consumed the inventory of land in Jakarta. As the consequence of this growing phenomenon, Jakarta currently does not have enough space for future development.

Developing the city of Jakarta extensively horizontal with only relying on highway network and private vehicles will only cause the city to develop bigger, inefficient, extravagant and uncontrollable. The worst consequence is the productive middle class will be more marginalized out of town thus creating social inequality, both in and out of town. In addition, the open space is diminishing and the infrastructure of the city can not meet the increase of motor vehicle additions, causing the city's public services slip far below the standard. Ironically, the residents and commuters are forced to spend increasingly higher life cost, without the increment of proper public services.

The Government has realized this, and tried to mobilize the solutional planning in order that Jakarta will not lose its future. The focus of the government—both central and local to the infrastructure in all areas are translated by massive development. In Jakarta alone, *Urban Design Guideline* (UDGL) continues to put forward in line with the Spatial Planning of Jakarta. Vertical housing arrangement, allotment and land use, forests and city parks, irrigation systems, to transportation and public transit.

Infrastructure is needed as a buffer of human activities. Transport, an area in which MRT Jakarta belongs to, has a strategic function in linking one area to another. By creating a viable and fast transportation, the pattern of connectivity between regions will be answered properly, which will definitely decrease the public interest in the use of private transport.

Not only that creating connectivity between one mode of transport with another mode of transport will certainly give the concept of a well-organized urban landscape. The movement of

manusia, barang dan jasa akan menjadi lebih terukur, yang tentunya akan mendorong daya saing yang lebih tinggi; baik daya saing dalam dunia usaha maupun daya saing antar pribadi manusia.

Pembangunan Berorientasi Transit pada Pengembangan Wilayah Kota

Inisiatif peremajaan kota ini harus dapat secara efektif memadukan tata guna lahan yang cerdas (kompak dan vertikal) dengan pengembangan jaringan transportasi massal. Konsekuensinya, peremajaan kawasan kota yang lebih kompak dan vertikal haruslah berorientasi pada stasiun transit massal secara positif. Saat ini upaya pemadatan kota secara vertikal untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang kota belum diiringi perencanaan terpadu yang menjamin mobilitas dan aksesibilitas pejalan kaki yang baik serta alokasi yang lebih baik untuk ruang terbuka.

Hal ini hanya akan menambah beban jalan raya yang memang minim, sehingga memperparah kemacetan lalu lintas, memperburuk mobilitas orang maupun barang, serta memerosotkan kualitas lingkungan kota secara umum. Satu-satunya *justifikasi* pemadatan ruang kota secara vertikal adalah ketika kawasan yang padat dengan intensitas tinggi tersebut direncanakan secara terpadu melalui pengembangan sistem jaringan angkutan massal di mana MRT sebagai tulang punggung transportasi massal sementara *Light Rail Transit* (LRT), *Bus Rapid Transit* (BRT) dan *Personal Rapid Transit* (PRT) sebagai pelengkap maupun pengumpan. Saat yang sama introduksi sistem angkutan massal tersebut diiringi dengan upaya peremajaan kawasan sekitar stasiun sehingga memiliki alokasi ruang yang sangat baik untuk jalur pejalan kaki, sepeda, sistem utilitas umum, fasilitas ruang publik dan ruang terbuka lainnya. Dengan kata lain, saat Pemerintah kota mengintroduksi sistem transportasi massal seperti MRT sesungguhnya hal tersebut tidak hanya menjadi program sektor transportasi belaka melainkan juga program peremajaan kawasan kota secara umum dan terpadu.

Diharapkan keseluruhan pengembangan tersebut akan lebih berorientasi transit, seiring dengan peningkatan kapasitas maupun kualitas ruang pembangunan dalam kawasan tersebut, atau yang sering disebut sebagai *Transit Oriented Development* (TOD). Saat ini pengembangan kawasan berorientasi transit telah dikenal luas sebagai bentuk pembangunan kota yang paling berkelanjutan, yang telah dipraktekkan di seluruh penjuru kota dunia untuk mereduksi dominasi perjalanan menggunakan kendaraan mobil, dan mempromosikan pola penataan ruang yang kondusif terhadap penggunaan moda transit. Lebih lanjut pengembangan ini merupakan tahapan yang berkelanjutan. Selain itu hal yang terpenting dari perencanaan jangka panjang ini adalah konsistensi dalam mengimplementasiannya.

people, goods and services will become more measurable, which will certainly increase competitiveness, either in the business world or in interpersonal competition.

Transit Oriented Development in Urban Areas Development

The initiative of urban renewal must be able to effectively integrate apt land with the development of mass transportation network. As the consequence, compact and vertical urban regeneration has to be positively oriented to the mass transit station. At the moment, the effort of vertical urban compaction to increase the use of urban space efficiently has not been accompanied by integrated plan that guarantees a decent mobility and accessibility for the pedestrians as well as better allocation for an open space.

This will only add the burden of highway which is minimal, thus exacerbating traffic congestion, deteriorating the mobility of people and goods, as well as degrading the quality of urban environment in general. The only justification for vertical urban compaction is when a dense area with such high intensity is planned integrally through the development of mass transportation system network, in which Jakarta MRT becomes the backbone of mass transportation while Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT) and Personal Rapid Transit (PRT) are as the complement or feeder. At the same time, the introduction of mass transportation system is accompanied by the renewal of the area around station so it has a decent space allocation for pedestrian's lane, bicycle, public utility system, facility of public spaces and other open spaces. In other words, when the city government introduces mass transportation system like MRT, it is not merely a program in transportation sector, but also a general and integrated urban renewal program.

It is expected that the whole development program to be more transit oriented, along with the enhancement of capacity as well as quality of development space in that region, or frequently called Transit Oriented Development (TOD). Currently the development of Transit Oriented Development (TOD) has been widely recognized as a form of development of the most sustainable city, which has been practiced all over the world to reduce the dominance of city travel using automobiles and promoting a conducive spatial pattern to the use of modes of transit. Furthermore, this development is a continuous phase. Additionally, the most important of this long term planning is the consistency in its implementation.

TINJAUAN OPERASIONAL

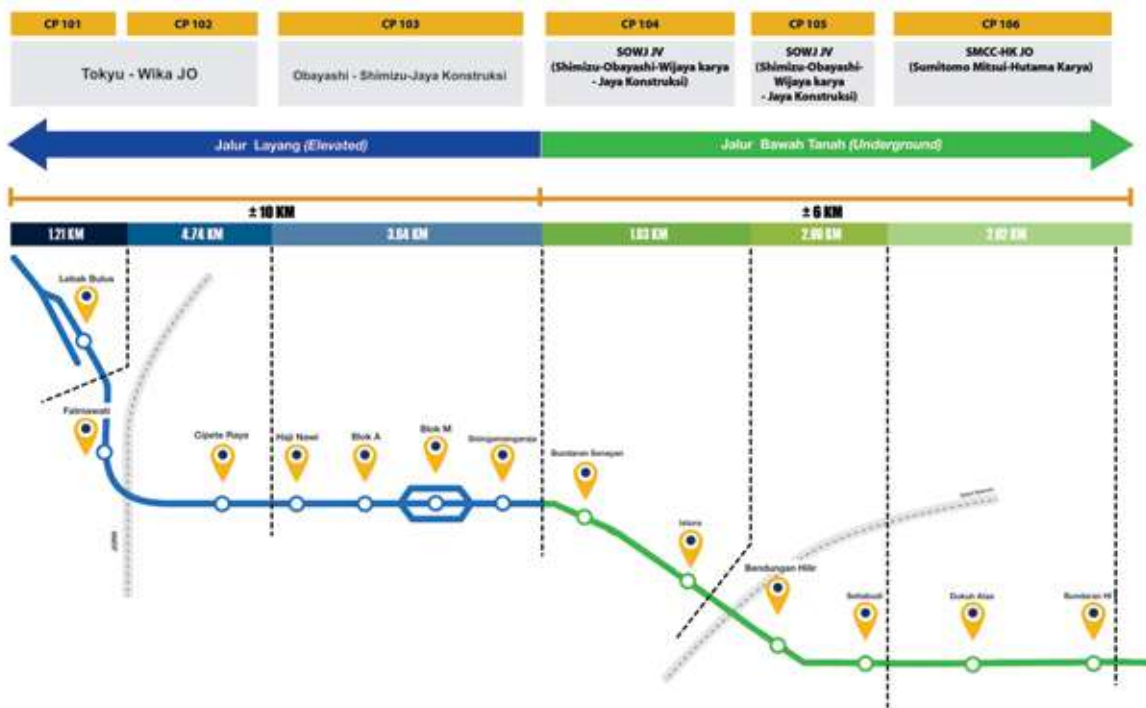
Operational Overview

Pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan per tahap menurut jalur yang dilalui. Saat ini terdapat 2 (dua) fase tahapan dan fase jalur yang sedang dibangun. Fase I yaitu jalur Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang memiliki panjang rute 15,7 kilometer dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2018. Sedangkan Fase II yang menghubungkan jalur Bundaran HI – wilayah Utara Jakarta yang akan ditentukan kemudian dengan panjang rute 8,1 kilometer direncanakan akan memulai pembangunannya pada tahun 2018, sebelum Tahap I pembangunan selesai.

Pembangunan Fase I Lebak Bulus – Bundaran HI terbagi dalam 8 (delapan) paket pekerjaan, yaitu Paket Konstruksi layang (*Elevated Section*) yang terdiri dari paket *Contract Package* (CP) 101, CP 102, dan CP 103 dengan bentang jalur 9,79 km dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja; Paket Konstruksi Bawah Tanah (*Underground Section*) yang terdiri dari paket CP 104, CP 105 dan CP 106 dengan bentang jalur 5,91 km dari Sisingamangaraja hingga Bundaran HI; serta Prasarana dan Sarana berupa Paket *Railway Systems & Trackwork* dan *Rolling Stock* (Kereta) yang terdiri dari paket CP 107 dan CP 108.

The implementation of MRT Jakarta Project is conducted by phase in accordance with the passed lanes. At the moment, there are two phases of lanes will be built. Phase I is Lebak Bulus – Bundaran HI lane with approximately 15.7 km route length and completion target at the end of 2018. While the Phase II will connect Bundaran HI – the northern area of Jakarta which will be determined later with approximately 8,1 km route length and construction commencement target in 2018 after the completion of the Phase I construction.

The Lebak Bulus – Bundaran HI Phase I construction is divided into 8 (eight) work packages. Elevated Section Package consisting of Contract Package (CP) 101, CP 102, and CP 103 with 9.79 km route length from Lebak Bulus to Sisingamangaraja contract package. Underground Section Package that consists of CP 104, CP 105 and CP 106 packages with 5.91 km route length from Sisimangaraja to Bundaran HI and Infrastructure in the form of Railway Package Systems & Trackwork and Rolling Stock (Trains) that consists of CP 107 and CP 108 packages.



Paket Kontrak Konstruksi CP 101 – CP 106

Paket Package	Konstruksi Construction	Jalur Lane	Panjang Length	Kontraktor Contractor
CP 101	Konstruksi	Lebak Bulus - Fatmawati	1,21 km	Tokyu-WIKA Joint Operation
CP 102	Layang Elevated	Fatmawati - Cipete Raya	4,74 km	
CP 103	Section	Cipete Raya - Sisingamangaraja	3,84 km	Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture

CP 101 – CP 106 Construction Contract Packages

Paket Kontrak Konstruksi CP 101 – CP 106

CP 101 – CP 106 Construction Contract Packages

Paket Package	Konstruksi Construction	Jalur Lane	Panjang Length	Kontraktor Contractor
CP 104	Konstruksi	Sisingamangaraja - Senayan	1,83 km	Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya
CP 105	Bawah Tanah	Senayan - Dukuh Atas	2,06 km	Konstruksi <i>Joint Operation</i>
CP 106	Underground Construction	Dukuh Atas - Bundaran Hotel Indonesia	2,02 km	Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya <i>Joint Operation</i>

Paket Kontrak Prasarana dan Sarana CP 107 – CP 108

CP 107 – CP 108 Facilities & Infrastructure Contract Package

Paket Package	Pekerjaan Work	Kontraktor Contractor
CP 107	<i>Railway System</i>	Metro One Consortium
CP 108	<i>Rolling Stock</i>	Sumitomo Corporation

Hingga akhir Desember 2015, Perusahaan telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada CP 101 hingga CP 106, dan telah melakukan penandatanganan kontrak dan memulai pekerjaan untuk CP 107 dan CP 108. Keseluruhan kemajuan proyek MRT Jakarta fase tahapan I telah mencapai 26,59% dari keseluruhan proyek, sedikit di bawah target yang sebesar 35,06%. Beberapa faktor seperti pembebasan lahan dan relokasi utilitas seperti yang akan diuraikan secara lebih rinci di bawah menjadi kendala yang mengakibatkan adanya deviasi antara rencana dan aktualisasi tersebut.

Until the end of December 2015, the Company has completed a number of work at CP 101 to CP 106, and signed contracts and started work for the CP 107 and CP 108. Overall MRT Jakarta Phase I Project progress has reached 26.59% of the entire Project, slightly below the 35.06% target. There are several factors, such as land acquisition and relocation of utilities, causing a deviation between the plans and the actualization. These factors are as detailed below.

Rekapitulasi Penyelesaian Pekerjaan Paket Kontrak Sipil (Konstruksi Layang CP 101 – CP 103 dan Konstruksi Bawah Tanah CP 104 – CP 106)

Recapitulation of Civil Work Contract Package Completion (CP 101 – CP 103 Elevated Construction and CP 104 – CP 106 Underground Construction)

	Akumulasi Kemajuan Konstruksi 2015 <i>Accumulation of the 2015 Construction Progress</i>		
	Rencana Plan	Aktual Actual	Deviasi Deviation
	(%)	(%)	(%)
Kemajuan Konstruksi Layang dan Bawah Tanah Progress of Elevated and Underground Constructions	51,10	38,46	(12,64)

Rekapitulasi Penyelesaian Pekerjaan *Railway System* dan *Rolling Stock* CP 107 dan CP 108

Recapitulation of CP 107 – CP 108 *Railway System* and *Rolling Stock* Work Completion

	Akumulasi Kemajuan Konstruksi 2015 <i>Accumulation of the 2015 Construction Progress</i>		
	Rencana Plan	Aktual Actual	Deviasi Deviation
	(%)	(%)	(%)
Kemajuan <i>Railway System</i> dan <i>Rolling Stock</i> <i>Railway System</i> and <i>Rolling Stock</i> Progress	6,38	5,37	(1,01)

Rekapitulasi Penyelesaian Pekerjaan MRT Jakarta Fase Tahapan I (CP 101 – CP 108)

Recapitulation of Phase I MRT Jakarta Work Completion (CP 101 – CP 108)

	Akumulasi Kemajuan Konstruksi 2015 Accumulation of the 2015 Construction Progress		
	Rencana Plan	Aktual Actual	Deviasi Deviation
	(%)	(%)	(%)
MRT Jakarta Fase I (CP 101 – CP 108) Phase I (CP 101 – CP 108) MRT Jakarta	35,06	26,59	(8,47)

Konstruksi Layang

Sebagian besar dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang (*elevated*) yang membentang di sepanjang 9,79 km; dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 (tujuh) stasiun layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawu, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja. Seluruh stasiun penumpang dan lintasan di bangun dengan struktur layang yang berada di atas permukaan tanah. Sementara depo kereta api yang dibangun di area Lebak Bulus, berdekatan dengan stasiun awal/akhir Lebak Bulus, dibangun di permukaan tanah. Konstruksi layang MRT Jakarta telah memulai pekerjaannya tepat pada 26 November 2013.

Tipe struktur layang yang digunakan adalah tiang tunggal (*single pier*) pada bagian bawah serta gelagar persegi beton pracetak (*precast concrete box girder*) pada bagian atas. Ketinggian gelagar dari permukaan jalan telah memperhitungkan persyaratan minimal jarak bebas vertikal (*vertical clearance*) 5,2 meter sesuai peraturan yang berlaku untuk jalan perkotaan.

Pekerjaan konstruksi layang MRT Jakarta terdiri dari 3 (tiga) paket, yaitu CP 101 untuk jalur Lebak Bulus – Fatmawati sepanjang 1,21 km; CP 102 untuk jalur Fatmawati – Cipete Raya sepanjang 4,74 km; dan CP 103 untuk jalur Cipete Raya – Sisingamangaraja dengan panjang 3,84 km. Untuk paket CP 101 dan CP 102, Konsorsium Tokyu - WIKA menjadi pelaksana kontraktor pembangunan, sedangkan Konsorsium Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi (OSJ) menjadi pelaksana kontraktor pembangunan untuk paket CP 103. Setelah di tahun 2014 proyek MRT Jakarta telah menyelesaikan proses prakonstruksi yang meliputi pekerjaan *soil investigation* dan *test pit (utility investigation)*, tahun 2015 proyek MRT Jakarta memulai pekerjaan konstruksinya.

Pada CP 101 dengan jalur Lebak Bulus – Fatmawati, hingga akhir Desember 2015 proyek MRT Jakarta telah menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:

- Area Stasiun Lebak Bulus
Pekerjaan *bore pile* telah menyelesaikan 66 dari 93 titik dan pekerjaan *pile cap* yang telah menyelesaikan 8 dari 64 titik.
- Area Depo Lebak Bulus
 - » Pekerjaan *embankment* telah mencapai 143.131 m³ dari jumlah keseluruhan 379.400 m³.

Elevated Section

Most of the MRT Jakarta constructions are overpass structure (*elevated*) extends for 9.79 kilometers; from Lebak Bulus to Sisingamangaraja area. The route has seven elevated stations, which are Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawu, Blok A, Blok M and Sisingamangaraja. All passengers' stations and tracks are constructed with elevated structure located above ground level; while the train's depo, located in Lebak Bulus area nearby the Lebak Bulus first/last station, are constructed on the ground level. MRT Jakarta commenced the Elevated Construction work on 26 November 2013.

The type of elevated structure will be used is single pier at the bottom as well as precast concrete box girder at the top. Girder heights from the Road Level has calculated the minimum vertical clearance requirements 5.2 meters according to the regulations for urban roads.

The construction of elevated section of MRT Jakarta consisted of three packages, which are CP 101 for the 1.21 km length Lebak Bulus – Fatmawati lane, CP 102 for the 4.74 km length Fatmawati – Cipete Raya lane, and CP 103 for the 3.84 km length Cipete Raya – Sisingamangaraja lane. The contractor for CP 101 and CP 102 package construction is Tokyu – WIKA consortium, while the consortium of Obayashi – Shimizu – Jaya Konstruksi (OSJ) is the contractor for the CP 103 package construction. After completing pre-construction process covering soil investigation and test pit in 2014, MRT Jakarta Project commenced construction work in 2015.

For CP 101's Lebak Bulus – Fatmawati lane, up to the end of December 2015, MRT Jakarta project has completed the following work:

- Lebak Bulus Station Area
Bore pile work completed 66 out of 93 points and pile cap work completed 8 out of 64 points.
- Depo – Lebak Bulus Area
 - » Embankment work reached 143,131 m³ out of the total 379,400 m³

- » Pekerjaan dinding penahan tanah (*retaining wall*) sedang dilakukan.
- » Pekerjaan struktur *viaduct* area depo sisi barat, dengan penyelesaian bore pile 15 dari jumlah keseluruhan 36 titik.
- » Pekerjaan *Admin Building*, telah menyelesaikan seluruh 23 titik pekerjaan *bore pile*.
- *Shunting Area* (Eks. Perumahan POLRI)
Pekerjaan struktur *viaduct*, dimana telah diselesaikan *bore pile* 56 dari jumlah keseluruhan 64 titik, *pile cap* 7 dari 16 titik, *pier* 3 dari 16 titik, dan pekerjaan *pier head* telah menyelesaikan 2 dari jumlah keseluruhan 16 titik.

Sementara CP 102 dengan jalur Fatmawati - Cipete Raya, proyek MRT Jakarta di tahun 2015 telah memulai pekerjaan konstruksi dengan penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:

- Area Jalan TB. Simatupang
Pekerjaan struktur *viaduct*, dengan penyelesaian *bore pile* 72 dari 164 titik, *pile cap* 7 dari 41 titik, dan pekerjaan pelebaran jalan serta drainase.
- Stasiun Fatmawati dan *Special Bridge*
 - » Pekerjaan Stasiun Fatmawati, dengan penyelesaian *bore pile* 54 dari 83 titik dan *pile cap* 2 dari 57 titik.
 - » Pekerjaan *special bridge*, *bore pile* 28 dari 40 titik dan pekerjaan *pile cap* sedang berlangsung.
- Stasiun Cipete Raya dan Area Jalan Fatmawati
 - » Pekerjaan Stasiun Cipete Raya, *bore pile* 41 dari 79 titik dan *pile cap* 2 dari 53 titik.
 - » Pekerjaan struktur *viaduct* telah menyelesaikan *bore pile* dengan jumlah keseluruhan 112 titik, *pile cap* 20 dari 28 titik, *Pier* 14 dari 28 titik, dan pekerjaan *Pier Head* 10 dari 28 titik.
 - » Pekerjaan pemasangan *gantry crane* telah selesai dilakukan di CP25-CP26.
 - » Pekerjaan fabrikasi *box girder* sedang berlangsung di Wika Kobe, Karawang.

Untuk CP 103 dengan jalur Cipete Raya – Sisingamangaraja, kemajuan proyek MRT Jakarta hingga akhir Desember 2015 adalah:

- Pekerjaan *bore pile viaduct* dari area Transisi hingga Stasiun Blok A telah menyelesaikan 426 dari jumlah keseluruhan 496 titik. Sementara pekerjaan *bore pile viaduct* dari Stasiun Blok A ke Stasiun Haji Nawi menyelesaikan 111 dari 286 titik.
- Pada lokasi Stasiun Blok M, pekerjaan kolom *Line B* telah selesai dan sedang berlangsung pekerjaan kolom di sisi timur.
- Pada lokasi stasiun Blok A, pekerjaan *bore pile* telah selesai di *Line B* dan sisi timur, dengan persiapan pekerjaan *pile cap* di line B.
- Pada lokasi Stasiun Sisingamangaraja, pekerjaan *bore pile* telah selesai, dengan pekerjaan *viaduct substructure* yang sedang berlangsung.
- Pekerjaan pemasangan *gantry crane* telah selesai dilakukan di Sisingamangaraja.

- » Retaining wall work was on progress.
- » Structure work in viaduct of the western area of the Depo, with bore pile work was completed for 15 out of the total 36 points.
- » Admin Building work, all 23 bore pile points work was already completed.
- Shunting Area (ex POLRI Residential Area)
Viaduct structure work: completed 56 out of 64 bore pile points, 7 out of 16 pile cap points, 3 piers out of 16 piers and 2 out of 16 pier head points.

Meanwhile, for CP 102 Fatmawati-Cipete Raya lane, in 2015 MRT Jakarta project commenced the construction work with project completion as follows:

- Jalan TB Simatupang Area
Viaduct Structure work with the completion of 72 out of 164 bore pile points, 7 out of 41 Pile cap points, road widening work and drainage work.
- Fatmawati Station and Special Bridge
 - » Fatmawati Station work with the completion of 54 out of 83 bore pile points and 2 out of 57 Pile Cap points.
 - » Special Bridge Work, with the completion of 28 out of 40 bore pile points and on-going Pile Cap work.
- Cipete Raya Station and Jalan Fatmawati Area
 - » Cipete Raya Station work: 41 out of 79 bore pile points and 2 out of 53 Pile Cap points;
 - » Viaduct Structure work: 112 bore pile points were completed, 20 out of 28 Pile Cap points and 14 out of 28 Pier points and 10 out of 28 Pier Head points.
 - » Gantry Crane installation work was completed in CP25-CP26.
 - » Box Girder fabrication work was still on-going in Wika Kobe, Karawang.

For CP 103's Cipete Raya – Sisingamangaraja lane, MRT Jakarta project progress up to the end of December 2015 is as follows:

- Bore Pile viaduct work from Transition area to the Blok A Station, 426 of the total 496 points were completed. While bore pile viaduct from Blok A Station to Haji Nawi Station, 111 of 286 points were completed.
- At Blok M Station location, Line B column work was completed and the east side column was still on-going.
- At Blok A station location, bore pile work was completed on Line B and the east side, with pile cap preparatory work in line B.
- At Sisingamangaraja Station location, bore pile work was completed, with ongoing work of viaduct substructure.
- Gantry Crane installation work was already done in Sisingamangaraja.

Sampai dengan akhir tahun 2015, proyek MRT Jakarta untuk konstruksi layang telah menyelesaikan 23,51% dari total keseluruhan proyek konstruksi layang, sedikit di bawah target yang sebesar 37,59%. Rekapitulasi penyelesaian pekerjaan Konstruksi layang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

As of the end of 2015, MRT Jakarta project for elevated construction has completed 23.51% of the total elevated construction project, slightly below the 37.59% target. Recapitulation of the elevated construction work completion is presented in the table below.

Rekapitulasi Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Layang

Recapitulation of the Elevated Construction

Paket Kontrak Sipil Civil Contract Package	Akumulasi Kemajuan Konstruksi 2015 The 2015 Construction Progress Accumulation			
	Rencana Plan	Aktual Actual	Deviasi Deviation	
	(%)	(%)	(%)	
Depo dan Struktur Layang Depo and Elevated Structure	CP 101	27,28	15,63	(11,65)
	CP 102	37,19	27,94	(9,25)
	CP 103	53,05	30,63	(22,42)
Kemajuan Struktur Layang Elevated Structure Progress		37,59	23,51	(14,08)

Adanya deviasi antara rencana dan aktualisasi yang sebesar 14,08% disebabkan beberapa kendala sebagai berikut:

The 14.08% deviation between plan and actualization was due to the following obstacles:

CP 101		
Lokasi Location	Keterangan Description	Konsekuensi Keterlambatan Delay Consequence
GOR Lebak Bulus	Pembongkaran kompleks Stadion Lebak Bulus oleh subkontraktor BPKAD telah selesai, namun serah terima lahan belum dilakukan. Proses pembongkaran perlu waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Demolition of Lebak Bulus Stadium Complex by BPKAD subcontractor was already completed, but the land handover was still not done yet. Demolition process take longer than 1 (one) year.	Keterlambatan pekerjaan <i>embankment</i> . Delay of embankment work.
Sisi utara bekas Terminal Lebak Bulus (sisi barat Stasiun Lebak Bulus) The north side of the former Terminal Lebak Bulus (West side of Lebak Bulus Station)	Terdapat beberapa bidang lahan belum terbebaskan. Several land areas were not acquired yet.	Pekerjaan tiang pondasi stasiun belum bisa dilaksanakan karena masih terhalang bangunan. Delay in the execution of Station Underpinnings work due to building obstruction.
Eks. Lahan POLRI Ex-POLRI Land	Alternatif terminal pengganti Lebak Bulus diusulkan di lokasi bekas Lahan POLRI. The proposed alternative for Lebak Bulus Terminal Replacement was on ex-POLRI land.	Terkendalanya pekerjaan konstruksi Stasiun Lebak Bulus dan relokasi Masjid Terminal. Delay of Lebak Bulus Station Construction and Terminal Mosque relocation works.
	Pembersihan debris bekas bangunan eks. lahan POLRI diperlukan segera. The ex-POLRI land's building debris should be cleaned up immediately.	Terkendalanya <i>assembling gantry</i> dan perencanaan terminal dalam kota. Delay in the execution of assembling gantry and city terminal planning.

Area <i>Shunting</i> Shunting area	Lahan simpang Jln. Batan (samping lahan POLRI) menunggu dibebaskan The land on the Jalan Batan intersection (next to POLRI's land) was still need to be acquired.	Pekerjaan tiang pondasi untuk <i>shunting</i> area belum bisa dilaksanakan Underpinning work for shunting area could not be started yet.
	Pipa gas Pertamina belum direlokasi Pertamina gas pipeline was still not yet relocated.	Terkendalanya pekerjaan kolom <i>viaduct</i> <i>Viaduct column work was delayed.</i>
CP 101		
Lokasi Location	Keterangan Description	Konsekuensi Keterlambatan Delay Consequence
Sisi selatan bekas tanah Metropolitan Kencana Southern part of Ex-Metropolitan Kencana land	Terdapat beberapa bidang lahan yang belum dibebaskan Several land areas were not acquired yet.	Pekerjaan <i>embankment</i> belum dapat dilakukan di area depo Embankment work in Depo area could not be started yet.
Pelebaran <i>detour</i> sisi utara Jl. Pasar Jumat Widening the <i>detour</i> on the North Side of Jl. Pasar Jumat	Nomor Bidang Lahan 26 tidak bisa dilakukan pelebaran jalan karena lahan belum terbebaskan The widening on the Land Area No. 26 could not be started as the land was still not acquired yet.	Terkendalanya rekayasa lalu lintas (lalu lintas kurang lancar) Traffic management is hampered (Traffic congestion problem)
Area di depan poin Square Area in front of Point Square	Pipa gas Pertamina belum direlokasi Pertamina pipeline was still not yet relocated.	Terkendalanya pekerjaan kolom <i>viaduct</i> <i>Viaduct column work was delayed</i>

CP 102		
Lokasi Location	Keterangan Description	Konsekuensi Keterlambatan Delay Consequence
Area Jl. TB. Simatupang Jl. TB Simatupang area	Baru 6.279 m ² bidang lahan yang telah dibebaskan dari luas lahan keseluruhan 8.389 m ² Only 6,279 m2 area acquired from the total 8,389 m2 land area to be acquired.	Terkendalanya relokasi pipa gas Pertamina dan rekayasa lalu lintas Pertamina gas pipeline relocation and traffic management were constrained.
	Pipa gas Pertamina perlu diproteksi Pertamina gas pipeline should be protected.	Terkendalanya pelebaran Jl. TB. Simatupang Jalan TB Simatupang road widening was constrained.
Stasiun Fatmawati Fatmawati Station	Lahan belum dibebaskan, pipa gas Pertamina dan pipa air Palyja belum direlokasi Land was still not yet acquired, Pertamina Gas pipeline and Palyja water pipes were still not yet relocated.	Terkendalanya pekerjaan pembuatan tangga stasiun (<i>entrance</i>) dan relokasi pipa gas Pertamina, relokasi pipa air Palyja serta utilitas lainnya Station stairs (<i>entrance</i>) work and Pertamina gas pipeline relocation, Palyja water pipes relocation and relocation of other utilities were constrained.
	Adanya permintaan dari BBPJJN IV untuk mengakomodasi 3 (tiga) lajur jalan nasional di sepanjang Stasiun Fatmawati Request from BBPJJN IV to accommodate three (3) lanes of national road along Fatmawati Station	Terkendalanya pembangunan proyek MRT Jakarta khususnya untuk pembangunan stasiun Fatmawati MRT Jakarta project particularly Fatmawati station construction was constrained.
Jembatan Khusus Special bridge	Lahan belum dibebaskan untuk posisi kolom Jembatan Khusus (<i>Special Bridge</i>) khususnya di Jalan Kartini Land is not yet acquired for Special Bridge column construction particularly in Jalan Kartini	Terkendalanya pekerjaan konstruksi kolom untuk Jembatan Khusus (<i>Special Bridge</i>) <i>Special Bridge column construction was constrained.</i>
Stasiun Cipete Raya Cipete Raya Station	Baru 1.347 m ² bidang lahan yang telah di bebaskan dari luas lahan keseluruhan 3.833 m ² Only 1,347 m2 area acquired from the total 3,833 m2 land area to be acquired.	Terkendalanya pekerjaan kolom stasiun The station column construction was hampered.
	Pipa gas Pertamina serta pipa air Palyja belum direlokasi Pertamina gas pipeline and Palyja water pipes were still not relocated yet.	Terkendalanya pekerjaan kolom stasiun The station column construction was hampered.

CP 103

Lokasi Location	Keterangan Description	Konsekuensi Keterlambatan Delay Consequence
Stasiun Blok A Blok A Station	Lahan belum dibebaskan Land was still not yet acquired. Bangunan yang telah dibayar belum dibongkar oleh pemilik. Demolition of the paid-up building by former owner was still not executed yet.	Pembangunan kolom di lahan di sisi barat Stasiun Blok A tidak bisa dilakukan. Construction of the column in the west side of Blok A Station could not be started yet.
	Pipa gas Pertamina serta pipa air Palyja belum direlokasi. Pertamina gas pipeline and Palyja water pipes were not relocated yet.	Terkendalanya pekerjaan kolom stasiun. Construction of the station column was hampered.
Stasiun Haji Nawi Haji Nawi Station	Lahan belum dibebaskan. Land was still not yet acquired. Bangunan yang telah dibayar belum dibongkar oleh pemilik. Demolition of the paid-up building by former owner was still not executed yet.	Pembangunan kolom di lahan di sisi barat dan timur Stasiun Haji Nawi tidak bisa dilakukan. Construction of the column in the west side and east side of Haji Nawi Station could not be started yet.
	Pipa Gas Pertamina serta pipa air Palyja belum direlokasi. Pertamina gas pipeline and Palyja water pipes were still not relocated yet.	Terkendalanya pekerjaan kolom stasiun. Construction of the station column was hampered.
Stasiun Blok M Blok M Station	Pemilik lahan membutuhkan kepastian KLB untuk penggunaan lahan oleh MRT Jakarta. Land owner required KLB confirmation for the land use by MRT Jakarta.	Pembangunan kolom dan pintu masuk di lahan di sisi barat Stasiun Blok M tidak bisa dilakukan. Construction of the column in the west side of Blok M Station could not be started yet.
	Pipa gas Pertamina belum direlokasi. Pertamina gas pipeline was still not relocated yet.	Terkendalanya pekerjaan kolom stasiun. Construction of the station column was hampered.
Stasiun Sisingamangaraja Sisingamangaraja Station	Lahan belum dibebaskan. Land was still not acquired.	Pembangunan pintu masuk di sisi Barat Stasiun Sisingamangaraja tidak bisa dilakukan. Construction of entrance door in the west side of Sisingamangaraja Station could not be started.

Dari kendala seperti yang telah diuraikan di atas, pembebasan lahan merupakan salah satu hal yang patut menjadi perhatian. Jumlah kebutuhan lahan untuk konstruksi layang MRT Jakarta sebesar 615 bidang tanah, dengan luasan mencapai 138.929 m²; dimana sudah 289 bidang atau 47% yang telah dibebaskan, dengan luasan sebesar 121.050 m² atau 87% dari jumlah luasan yang dibutuhkan. Ini berarti terdapat 326 bidang tanah atau 53% dari jumlah keseluruhan yang dibutuhkan oleh proyek konstruksi layang MRT Jakarta, dengan luasan mencapai 17.878 m² (13%). Proses pembebasan lahan ini bukan menjadi bagian dari kontrak pekerjaan proyek MRT Jakarta, namun sepenuhnya permasalahan pembebasan lahan kepada Pemegang Saham dan Pemerintah.

Di samping itu, rekomendasi dari beberapa kendala di atas dapat ditempuh melalui kejelasan aspek hukum dan pernyataan kesanggupan relokasi dari pemilik utilitas pipa gas. Sebagian besar kendala pekerjaan proyek MRT Jakarta terjadi karena belum direlokasinya utilitas yang ada, baik utilitas pipa gas yang belum memiliki kejelasan aspek hukum; maupun pipa air. Perusahaan berupaya untuk terus melakukan komunikasi kepada regulator dan pemilik utilitas agar relokasi dapat sesegera mungkin dilakukan.

From the constraints described above, land acquisition was one of the matters of importance. Total land requirement for MRT Jakarta's escalated construction consists of 615 sectors with a total of 138,929 m² land area. There were only 289 sectors or 47% out of the 615 sectors that are already acquired, where the acquired land area was 121,050 m² or 87% out of the total area needed. This means that there are 326 sectors or 53% of the total sectors required by MRT Jakarta's escalated construction Project with a 17,878 m² (13%) land area. The process of land acquisition is not part of the MRT Jakarta project contract, it is fully handled by the Shareholders and the Government.

In addition, some of the above constraints may be overcome by seeking the legal aspect clarity and the intention letter from the owners of the utilities gas pipeline to be relocated. Most of the constraints in MRT Jakarta project works occurred due to delayed utilities relocation, either utilities gas pipeline with no legal aspect clarity or water pipes. The Company seeks to continue the communication to regulators and utilities owners that the relocation can be done as soon as possible.

Konstruksi Bawah Tanah

Konstruksi bawah tanah (*underground*) MRT Jakarta membentang sepanjang 5,91 km, dari Sisingamangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Bagian ini terdiri dari 6 (enam) stasiun bawah tanah dan terowongan MRT bawah tanah dengan metode pengerjaan menggunakan *Tunnel Boring Machine* (TBM) tipe *Earth Pressure Balance* (EPB), yang terbagi dalam 3 (tiga) koridor paket pekerjaan: CP 104 untuk jalur Sisingamangaraja–Istora; CP 105 dengan jalur Istora–Setiabudi; dan CP 106 untuk jalur Setiabudi – Bundaran Hotel Indonesia. Konsorsium SOWJ, *Joint Operation* yang terdiri dari Shimizu, Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dinyatakan sebagai pemenang

Underground Section

MRT Jakarta's Underground Construction stretches along 5.91 km from Sisingamangaraja to Bundaran Hotel Indonesia (HI). This section consisted of 6 (six) MRT underground stations and tunnels constructed using Tunnel Boring Machine (TBM) of Earth Pressure Balance (EPB) type, which is divided into 3 (three) corridor work packages: CP 104 for Sisingamangaraja–Istora lane; CP 105 for Istora - Setiabudi lane; and CP 106 for Setiabudi–Bundaran Hotel Indonesia lane. SOWJ Consortium, a Joint Operation consisting of Shimizu, Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk was declared as the winner for the CP 104 and CP 105 of 1.83 km length and 2.06 km



untuk CP 104 dan CP 105 yang masing-masing memiliki panjang 1,83 km dan 2,06 km. Untuk paket *underground* CP 106 dengan panjang 2,02 km dimenangkan oleh SMCC-HK, *Joint Operation* yang terdiri dari Sumitomo Mitsui Construction Company dan PT Hutama Karya (Persero).

Setelah di akhir tahun 2013 proses *groundbreaking* dapat dilaksanakan, tahun 2015 menjadi tahun kesuksesan proyek MRT Jakarta untuk memulai proses *Tunnel Boring Machine* (TBM). CP 104 dengan jalur Transisi–Senayan berhasil melakukan pekerjaan penggalian dengan TBM “Antareja” dan TBM “Antareja II”. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang terbilang mudah, mengingat jenis tanah Jakarta sebagai tanah lempung atau *silty clay*, dimana sebagian besar kereta bawah tanah di beberapa negara lain dibangun dengan jenis tanah keras seperti *limestone*. Penggalian vertikal dan horizontal dengan kedalaman mencapai lebih kurang 20 meter di bawah tanah memerlukan teknik dan perhitungan yang khusus, agar tanah lempung dengan kandungan air yang cukup banyak tidak menimbulkan permasalahan. TBM “Antareja” kemudian berhasil melakukan proses penggalian tersebut.

Beberapa pekerjaan yang telah diselesaikan pada CP 104 adalah:

- Pekerjaan penggalian dengan TBM “Antareja” telah sampai di Stasiun Senayan. Sedangkan TBM “Antareja II” telah melakukan penggalian sepanjang 277,5 m dari lokasi Patung Pemuda (Bundaran Senayan),
- Pada area Stasiun Senayan dilakukan pengecoran *base slab* dan konstruksi kolom stasiun di level *base*.
- Pada area Stasiun Istora, pengecoran *concourse slab* telah selesai seluruhnya dan sedang dilakukan penggalian level *base*.

Untuk CP 105 dengan jalur Bendungan Hilir – Setiabudi, beberapa pekerjaan yang telah dilakukan di tahun 2015 adalah:

- Pada area Stasiun Bendungan Hilir, pengecoran *concourse slab* telah sepenuhnya selesai dan sedang dilakukan pengecoran kolom stasiun di level *concourse* serta penggalian level *base*.
- Pada area Stasiun Setiabudi, penggalian level *base* telah selesai seluruhnya dan sedang dilakukan pengecoran *base slab*.

Sementara CP 106 dengan jalur Dukuh Atas – Bundaran HI, pekerjaan yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2015 adalah:

- Pada area Stasiun Dukuh Atas, pengecoran *second concourse slab* telah sepenuhnya dilakukan; sementara penggalian pada *base slab* sudah mulai berjalan.
- Pada area Stasiun Bundaran HI, pekerjaan konstruksi *concourse slab* hampir selesai dilakukan. Penggalian ke level *base slab* dan pengecoran *base slab* sedang dilakukan.
- Suku cadang TBM ketiga telah selesai dikirim ke lokasi proyek Stasiun Bundaran HI pada tanggal 24 Desember 2015, dan sedang berlangsung pekerjaan instalasi.

length respectively. The winner of the CP 106’s 2.02 km length underground package was SMCC-HK, a Joint Operation consisted of Sumitomo Mitsui Construction Company and PT Hutama Karya (Persero).

After the groundbreaking process execution by the end of 2013, 2015 was the year of success for MRT Jakarta project to commence the Tunnel Boring Machine (TBM) process. CP 104’s Transition-Senayan lane managed to complete the excavation work with TBM “Antareja” and TBM “Antareja II”. This was not an easy job, considering the kind of Jakarta soil Jakarta is silty clay and most of the subway in several other countries built on hard soil such as limestone. Vertical and horizontal excavation with approximately 20 meters depth below the ground requires special techniques and calculations to make the silty clay containing quite a large amount of water will not cause problems. TBM “Antareja” has successfully performed the excavation process.

The works completed on CP 104 are as follows:

- Excavation work with TBM “Antareja” has reached Senayan Station; while TBM “Antareja II” excavation work has covered a 277.5 m length from Patung Pemuda location (Bundaran Senayan).
- Base Slab casting and base level column construction were already done in Senayan Station area.
- Concourse slab casting was fully completed and base level excavation was on-going in Istora Station area.

The works done in 2015 for CP 105’s Bendungan Hilir – Setiabudi lane are as follows:

- In Bendungan Hilir Station area, concourse slab casting was fully completed and concourse column casting level and base level excavation were on-progress.
- In Setiabudi Station area, base level excavation was fully completed and base slab casting were on-progress.

While the works done for CP 106’s Dukuh Atas – Bundaran HI lane throughout 2015 are as follows:

- In Dukuh Atas Station area, the second concourse slab casting was fully completed; while the base slab excavation was underway.
- In Bundaran HI Station area, the concourse slab construction work was almost completed; base slab level excavation and the base slab casting was on-going.
- Delivery of the third TBM’s spare parts have been sent to Bundaran HI Station project site on December 24, 2015; the installation work was on-going.

Hingga akhir tahun 2015, proyek MRT Jakarta untuk Konstruksi Bawah Tanah telah menyelesaikan 53,54% dari total keseluruhan proyek Konstruksi layang, sedikit di bawah target yang sebesar 64,73%. Rekapitulasi penyelesaian pekerjaan Konstruksi layang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

By the end of 2015, the MRT Jakarta project has completed 53.54% of the Underground Construction, slightly below the 64.73% target. Recapitulation of the Underground Construction work completion can be seen in the table below.

Rekapitulasi Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Bawah Tanah

Recapitulation of the Underground Construction Work Completion

Paket Kontrak Sipil Civil Contract Package		Akumulasi Kemajuan Konstruksi 2015 Accumulation of the 2015 Construction Progress		
		Rencana Plan	Aktual Actual	Deviasi Deviation
		(%)	(%)	(%)
Struktur Bawah Tanah Underground Structure	CP 104	72,33	52,80	(19,53)
	CP 105	68,29	47,26	(21,03)
	CP 106	58,11	57,85	(0,26)
Kemajuan Struktur Bawah Tanah Underground Structure Progress		64,73	53,54	(11,19)

Beberapa kendala yang menyebabkan adanya deviasi sebesar 11,19% antara rencana dan aktualisasi adalah sebagai berikut:

There are several constraints contributing to the 11.19% deviation between the plan and its actualization, namely:

CP 104 dan CP 105		
Lokasi Location	Keterangan Description	Kondisi Akhir 2015 Latest Condition in 2015
Stasiun Senayan – Stasiun Setiabudi Senayan Station – Setiabudi Station	CT/VT (Cooling Tower/ Ventilation Tower)	<p>Penempatan lokasi CT/VT yang berada di dalam lahan <i>privat</i>, dimana belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemilik lahan, sehingga saat ini masih sangat beresiko terjadinya perubahan lokasi. Placement of CT/VT in private lands, while there was no cooperation agreement between DKI Jakarta Provincial Government and land owners yet, resulting the potential risk of location change.</p> <p>Pelaksana relokasi utilitas <i>privat</i> yang terkena struktur CT/VT harus segera ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana beberapa pemilik utilitas berkeberatan untuk memindahkan utilitas mereka yang terkena CT/VT tersebut. The executors for the relocation of private utilities affected by CT/VT structure should be determined by the DKI Jakarta Provincial Government, where some of the utilities owners were reluctant to relocate their private utilities.</p>

CP 106

Lokasi Location	Keterangan Description	Kondisi Akhir 2015 Latest Condition in 2015
Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Bundaran HI Dukuh Atas Station – Bundaran HI Station	CT/VT	<p>Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI dan pemilik lahan dimana CT/VT ditempatkan harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum kontraktor pelaksana dapat melakukan kajian lebih lanjut terhadap pelaksanaan konstruksi CT/VT; mengingat pada bulan triwulan ke-2 tahun 2016, kontraktor akan memulai pekerjaan CT/VT.</p> <p>There should be a cooperation agreement between DKI Jakarta Provincial Government and land owners where the CT/VT will be placed prior to further review by the contractor on the CT/VT work execution, considering that they should start the work in the Q2 / 2016.</p> <p>Pelaksana relokasi utilitas privat yang terkena struktur CT/VT harus segera ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana beberapa pemilik utilitas berkeberatan untuk memindahkan utilitas mereka yang terkena CT/VT tersebut.</p> <p>The executors for the relocation of private utilities affected by CT/VT structure should be determined by the DKI Jakarta Provincial Government, where some of the utilities owners were reluctant to relocate their private utilities.</p>
Stasiun Bundaran HI Bundaran HI Station	<p>Pengalihan Kewajiban PT CSMI</p> <p>Obligation Diversion PT CSMI</p>	<p>Diperlukan perubahan kewajiban dari PT CSMI yang sebelumnya diberikan kewajiban penempatan CT/VT menjadi kewajiban membangun <i>entrance</i> MRT Bundaran HI. Posisi CT/VT ini kini berpindah ke lahan PT Panji Ratu Jakarta yang lebih dekat dengan Stasiun Bundaran HI.</p> <p>PT CSMI's obligation should be amended: from the obligation for CT/VT placement to become the obligation to build Bundaran HI MRT entrance. The CT/VT position was moved to the land owned by PT Panji Ratu Jakarta that was nearer to Bundaran HI Station.</p>

Prasarana dan Sarana

Bagian prasarana dan sarana merupakan jantung dari beroperasinya MRT Jakarta di masa depan. Bagian ini terdiri dari 2 (dua) CP, yaitu CP 107 berupa paket pekerjaan *Railway System*, yaitu sistem *signaling* kereta dan *trackwork*; serta CP 108 yang berupa paket pekerjaan *Rolling Stock* atau kereta.

Railway System merupakan prasarana penunjang sistem perkeretaapian yang terdiri dari 10 *subsystem*, antara lain *substation system*, *overhead contact system*, *power distribution system*, *signaling system*, *telecommunication system*, *facility scada*, *automatic fare collection system*, *platform screen doors*, *escalator & elevator*, dan *trackwork*. Sistem perkeretaapian MRT Jakarta akan menggunakan sistem persinyalan terbaru di Indonesia—dan salah satu yang terdepan di dunia—dengan memperkenalkan sistem persinyalan CBTC (*Communication Based Train Control*) dan menerapkan sistem *moving block* untuk pengaturan perjalanan kereta.

Sementara paket pekerjaan *rolling stock* terdiri dari pengadaan 16 rangkaian kereta dimana satu rangkaian terdiri dari enam kereta sehingga total seluruhnya sejumlah 96 kereta. Kereta didesain untuk dapat beroperasi secara otomatis menggunakan sistem *Automatic Train Operation (ATO)*. Dengan sistem tersebut, tugas masinis dapat diminimalisir sehingga dapat menghilangkan faktor *human error*.

Facilities And Infrastructure

Facilities and infrastructure are at the heart of the operation of MRT Jakarta in the future. This section consists of 2 (two) CPs: CP 107 for *Railway System* work package comprising rail signaling system and trackwork; and CP 108 for *Rolling Stock* or train work package.

Railway System is a supporting infrastructure railway system consisting of 10 subsystems, namely: substation system, overhead contact system, power distribution system, signaling system, telecommunication system, facility scada, automatic fare collection system, platform screen doors, escalator & elevator, and trackwork. MRT Jakarta railway system will use the latest signaling system in Indonesia - and one of the leading systems in the world - with the introduction of the CBTC (*Communication Based Train Control*) signaling system and apply the moving block system for train travel arrangements.

While the rolling stock work package consists of the procurement of 16 train sets where one train series consists of six trains, making a total of 96 trains. The train is designed to operate automatically using *Automatic Train Operation (ATO)* system. With this system, the task of the train driver can be minimized so as to eliminate the human error factor.

Lingkup kerja kedua paket ini meliputi *design, manufacture, delivery, testing, commissioning* hingga tahap operasi yang terintegrasi secara keseluruhan antar berbagai sistem. Para kontraktor paket CP 107 dan CP 108 diwajibkan menyelesaikan pekerjaan dengan penjadwalan penyelesaian pada awal 2019.

The scope of work of those two packages includes design, manufacture, delivery, testing, commissioning until the stage of the overall integrated operation between the various systems. The CP 107 and CP 108 contractors are required to complete the work by early 2019.

Setelah pada awal tahun 2014, Perusahaan memulai proses lelang pengadaan CP 107 dan CP 108, tahun 2015 merupakan tahun *milestone*, dimana telah ditetapkan pemenang lelang untuk kedua paket ini. Lelang paket CP 107 sendiri diikuti 4 (empat) perusahaan peserta, yaitu: Kawasaki Itochu PP Consortium; Mitsubishi Corporation-Hitachi-MHI-Jaya Konstruksi JO; Sumitomo Corporation; dan Metro One Consortium.

After commencing the CP 107 and CP 108 procurement process in the beginning of 2014, 2015 was a year of milestones in which winners of the tender for these two packages were determined. The CP 107 package tender was followed by 4 (four) participants, namely: Kawasaki Itochu Consortium PP; Mitsubishi Corporation-Hitachi-MHI-Jaya Konstruksi JO; Sumitomo Corporation; and Metro One Consortium.

Sementara lelang paket CP 108 sendiri dilakukan hampir bersamaan dengan proses lelang CP 107. Lelang paket ini diikuti oleh 4 (empat) perusahaan peserta, yaitu: HITACHI-Mitsui Consortium; Sumitomo Corporation; Mitsubishi Corporation; dan Kawasaki-ITOCU Consortium.

The CP 108 tender was done almost simultaneously with the CP 107 tender. This CP 108 tender was followed by 4 (four) participants, namely: HITACHI-Mitsui Consortium; Sumitomo Corporation; Mitsubishi Corporation; and Kawasaki-ITOCU Consortium.

Di tahun 2015, baik pekerjaan CP 107 yang berupa Instalasi Sistem Kereta dan *Trackwork* maupun CP 108 yang berupa pengadaan *rolling stock* dalam tahap pekerjaan *inception design* dan *review subcontractor approval sheet* (SAS). Di bawah ini tabel rekapitulasi penyelesaian pekerjaan *Railway System* dan *Rolling Stock*.

In 2015, both CP 107's Railway System Installation and Trackwork work and CP 108's Rolling Stock procurement work were in the phase of Inception Design and Subcontractor Approval Sheet (SAS) review. Recapitulation of the Railway System and Rolling Stock works completion is presented in the table below.

Rekapitulasi Penyelesaian Pekerjaan *Railway System* dan *Rolling Stock*

Recapitulation of the Railway System and Rolling Stock Works Completion

Paket Kontrak Sipil Civil Contract Package		Akumulasi Kemajuan Konstruksi 2015 The 2015 Construction Progress Accumulation		
		Rencana Plan (%)	Aktual Actual (%)	Deviasi Deviation (%)
<i>Railway System</i> dan <i>Rolling Stock</i> Railway System and Rolling Stock	CP 107	8,80	7,20	(1,60)
	CP 108	0,95	1,26	0,31
Kemajuan <i>Railway System</i> dan <i>Rolling Stock</i> Progress of Railway System dan Rolling Stock		6,38	5,37	(1,01)

Jasa konsultansi *Operation and Maintenance Consulting Services* (OMCS) untuk fase tahapan I Lebak Bulus – Bundaran HI sendiri telah mulai diinisiasi oleh Perusahaan untuk mempersiapkan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta yang segera dimulai setelah tahap konstruksi selesai. Dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan ini, Perusahaan akan didampingi oleh konsultan yang dibiayai dengan pinjaman ODA oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Operation and Maintenance Consulting Services (OMCS) procurement for the Phase I of Lebak Bulus - Bundaran HI lane was initiated by the Company to prepare the operation and maintenance of MRT Jakarta which will immediately commencing upon completion of the construction phase. In the maintenance and operation process, the Company will be accompanied by consultants financed with the Japan International Cooperation Agency (JICA)'s ODA Loan.

Informasi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi OMCS

General Information on OMCS Consultant Procurement

Periode layanan Service Period	:	42 bulan (atau 3,5 tahun) 42 months (or 3.5 years)
Sumber pendanaan Source of financing	:	JICA ODA Loan IP-554
Target penandatanganan kontrak Contract Signing Date	:	Februari 2016 February 2016
Target dimulainya jasa konsultansi (<i>Commencement Date</i>) Commencement Date	:	April 2016 April 2016

Ruang lingkup jasa konsultansi OMCS meliputi:

1. Menyusun sistem operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta.
2. Mempersiapkan regulasi, manual, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan.
3. Merancang struktur organisasi dan kebutuhan personil untuk operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta dan mendampingi dalam hal perekrutan dan pelatihan.
4. Membuat estimasi biaya operasi dan pemeliharaan.
5. Pendampingan selama 6 (enam) bulan pertama setelah operasi komersial dimulai.

Proses pengadaan jasa konsultansi OMCS ini telah memasuki tahap negosiasi kontrak dengan *Japan International Consultant for Transportation Joint Venture* (JIC-JV). JIC-JV merupakan joint venture antara Japan International Consultant for Transportation Co., Ltd. (JIC), Nippon Koei Co., Ltd. (NK), Oriental Consultant Global Co., Ltd. (OC Global), Padesco Co., Ltd. (PADECO) yang berasosiasi dengan East Japan Railway Company (JRE), Tokyo Metro Co., Ltd. (Tokyo Metro), PT Matra Rekayasa Internasional (Matra), PT Dardela Yasa Guna (Dardela) dan PT Perentjana Djaja (PD). Pada 14 September 2015, PT Metro Transportama Consultant dinyatakan lulus evaluasi prakualifikasi sebagai anggota asosiasi baru dalam JIC-JV. Perusahaan berencana untuk melakukan penandatanganan kontrak pada Februari 2016, setelah seluruh persiapan dokumen kontrak, *printing*, dan jaminan pelaksanaan telah selesai disusun.

Perusahaan juga melakukan upaya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan bertugas mengoperasikan sistem MRT Jakarta. Upaya ini dilakukan dengan merintis beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang nantinya akan dimatangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Beberapa kerjasama tersebut adalah:

Scope of OMCS consulting services includes:

1. Develop MRT Jakarta operation and maintenance system;
2. Prepare regulations, manuals and Standard Operating Procedure (SOP) for operation and maintenance.
3. Design the organizational structure and personnel requirements for the MRT Jakarta operation and maintenance and assist in the recruitment and training.
4. Estimate the operation and maintenance cost.
5. Provide 6 (six) month assistance after commercial operations commencement.

Procurement process for OMCS consultant was in contract negotiation stage with the Japan International Consultants for Transportation Joint Venture (JIC-JV). JIC-JV is a joint venture between Japan International Consultant for Transportation Co., Ltd. (JIC), Nippon Koei Co., Ltd. (NK), Oriental Global Consultant Co., Ltd. (OC Global), Padesco Co., Ltd. (PADECO) associated with East Japan Railway Company (JRE), Tokyo Metro Co., Ltd. (Tokyo Metro), PT Matra Rekayasa Internasional (Matra), PT Dardela Yasa Guna (Dardela) and PT Perentjana Djaja (PD). On September 14, 2015, PT Metro Transportama Consultant passed prequalification evaluation as a new associate member of the JIC-JV. The Company plans to organize the work contract signing in February 2016, upon completion of contract document preparation, printing, and performance bond arrangement.

The Company also made the effort to prepare Human Resources (HR) for MRT Jakarta system operations. This effort was undertaken by pioneering several Memorandums of Understanding (MoUs), which will be finalized in the form of Cooperation Agreement. The cooperation agreement includes:

Kerjasama Pengembangan SDM MRT Jakarta

MRT Jakarta HR Development Cooperation

Kerja Sama Cooperation	Keterangan Description
<p>Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan MoU dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan RI, tanggal 12 Juni 2015. • MoU Signing with BPSDM Perhubungan RI on June 12, 2015. • Rencana akan diadakan ikatan dinas dengan taruna API yang berminat bekerja di MRT Jakarta selama 1 (satu) semester sebelum kelulusan. • Post-Graduation Service Commitment Plan for API cadets interested in working in MRT Jakarta for 1 (one) semester before graduation. • Persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS), target ditandatangani paling lambat akhir 2016. • Preparation for signing of Cooperation Agreement, target to be signed no later than end of 2016. • Dalam rangka mempercepat penyiapan SDM MRT Jakarta, diusulkan penerbitan sertifikat berikut dalam masa pendidikan taruna di API: • In order to accelerate MRT Jakarta HR preparation, there was a proposal to issue the following certification during educational period of API cadets: <ul style="list-style-type: none"> * Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama bagi lulusan program D3 Teknik Mekanika Perkeretaapian. * Railway crew proficiency certificate of level 1 for D3 graduates in Railway Mechanical Engineering program. * Sertifikat kecakapan pengatur dan pengendali perjalanan kereta api tingkat pertama bagi lulusan program D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. * Train Journey arranger and controller certificate of level 1 for D3 graduates in railway transport management program; * Sertifikat kompetensi tenaga perawatan sarana perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana bagi lulusan program D3 Teknik Mekanika Perkeretaapian (PM 94/2010 mensyaratkan minimal 2 (dua) tahun pengalaman kerja). * Electrical railway facility maintenance competency certificate of executor level for D3 graduates in railway mechanical engineering program (PM 94/2010 requires a minimum of two (2) years of work experience). * Sertifikat kompetensi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian tingkat pelaksana bagi lulusan program d3 teknik mekanika, elektro dan bangunan dan jalur perkeretaapian (PM 95/2010 mensyaratkan minimal 2 (dua) tahun pengalaman kerja). * Railway infrastructure maintenance competency certificate of executor level for D3 graduates of Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Railway Building and Line program (PM 95/2010 requires a minimum of two (2) years of work experience).
<p>Indonesian Railways Academy (API) Madiun;</p>	
<p>Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar kerjasama menggunakan MoU yang telah ditandatangani dengan BPSDM Perhubungan tertanggal 12 Juni 2015. • The cooperation is based on the MoU signed with BPSDM Perhubungan dated June 12, 2015 • Persiapan PKS; draf PKS telah dikirim ke STTD pada Desember 2015. • Cooperation Agreement Preparation of which the draft was sent to STTD in December 2015. • Perekrutan lulusan STTD sudah bisa dilakukan pada triwulan ke-3 2016. • Recruitment of STTD graduates can be done in the 3rd quarter of 2016.
<p>School of Land Transport – STTD Bekasi</p>	
<p>PT Kereta Api Indonesia – KA Commuter Jabodetabek (PT KAI-KCJ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dibutuhkan dengan PT KAI-KCJ agar SDM MRT Jakarta dapat melaksanakan praktek lapangan/ magang di Jabodetabek dalam rangka memenuhi persyaratan jam kerja untuk sertifikasi kecakapan. • It is needed to cooperate with PT KAI-KCJ in order to have MRT Jakarta HR undergo apprenticeship/internship in Greater Jakarta area in order to meet the work hours proficiency requirement. • MoU dengan PT KAI telah ditandatangani 17 April 2015. • A MoU with PT KAI was signed on April 17, 2015. • Saat ini dalam tahap persiapan perpanjangan MoU, mengingat masa berlaku MoU hanya sampai April 2016. • Currently on the preparation phase extension of MoU, considering that it is only valid until April 2016. • Target penandatanganan PKS pada kisaran akhir 2016, di samping menunggu masukan dari konsultan OMCS terkait bentuk kerjasama yang sesuai. • The cooperation agreement is targeted for signing at the end of 2016, awaiting inputs from OMCS consultant regarding the most appropriate form of cooperation.
<p>PT Kereta Api Indonesia – KA Commuter Jabodetabek (PT KAI-KCJ)</p>	

Selain mempersiapkan SDM, Perusahaan juga aktif terlibat dalam merumuskan kebijakan yang dapat memberikan nilai tambah dan optimalisasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta. Beberapa kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan di tahun 2015 adalah:

In addition to preparing HR, the Company was also actively involved in formulating policies that could provide added value and optimization in the operation and maintenance of MRT Jakarta. Some of the policies and regulations issued in 2015 are as follows:

Peraturan Regulation	Keterangan Description
Peraturan Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Regulation on the Proficiency Certification for Crews of Railway Facilities	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan No. 155 Tahun 2015 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian telah diterbitkan pada bulan Oktober 2015 sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan No. 23 Tahun 2011 tentang hal yang sama, di mana persyaratan sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian muda yang sebelumnya 4.000 jam kerja telah dikurangi menjadi 2.000 jam kerja. The Minister of Transportation Regulation No. 155 Year 2015 on the Proficiency Certification for Crews of Railway Facilities was issued in October 2015 to amend the Minister of Transportation Regulation No. 23 Year 2011 on the same subject, which provides the reduction of required work hours for proficiency certification for crews of railway facilities from 4,000 work hours to 2,000 work hours. Skema diklat calon masinis MRT Jakarta akan mengacu kepada peraturan tersebut untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. The scheme of MRT Jakarta machinist candidates training will refer to the above regulation to meet certification requirements.
Peraturan Sertifikasi Kecakapan PPKA Regulation on the Proficiency Certification for Train Journey Controller	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mendapatkan sertifikat kecakapan pengendali perjalanan kereta api, Peraturan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api mensyaratkan minimal 5 (lima) tahun bertugas sebagai Pengatur perjalanan kereta api. Draf atas revisi peraturan tersebut telah mengusulkan hal-hal berikut: To get the proficiency certification for train journey controller, the Minister of Transportation Regulation No. 21 Year 2011 on the Proficiency Certification for Train Journey Controller requires 5 (five) years of service as train journey controller. A draft to revise the regulation proposed the following issues: <ul style="list-style-type: none"> * Penyatuan fungsi pengatur dan pengendali perjalanan KA. * To integrate Train Journey Arranger and Controller functions. * Persyaratan sertifikat kecakapan pengatur dan pengendali perjalanan kereta api muda adalah 1 (satu) tahun atau 2.000 jam kerja. * The requirement for the Train Journey Arranger and Controller Proficiency Certification is 1 (one) year or 2,000 work hours.
Peraturan khusus untuk permulaan pengoperasian MRT Jakarta Special Regulation for MRT Jakarta's Initial Operations	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkan agar diterbitkan peraturan khusus untuk permulaan pengoperasian MRT Jakarta agar dapat mengakomodasi aspek-aspek yang belum diatur akibat penggunaan teknologi baru serta mengatur tata cara pembukaan sistem perkeretaapian baru. It is proposed to issue a special regulation for MRT Jakarta's initial operations in order to accommodate the aspects that have not been regulated due to the use of new technologies as well as to set procedures for a new railway system opening. Sebagai referensi, Pemerintah India menerbitkan <i>Opening of Metro Railways for Public Carriage of Passengers Rules</i> di tahun 2013. As a reference, the Government of India published the <i>Opening of Metro Railways for Public Carriage of Passengers Rules</i> in 2013. Konsultan OMCS akan membantu proses pembuatan draf dan pengesahan peraturan yang dimaksud. OMCS Consultants will help the drafting and ratification process of the said regulation.

TINJAUAN KEUANGAN Financial Review

Standar Penyajian Informasi

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan Ernest & Young dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan Laba Rugi

<i>(dalam juta Rupiah) (in million Rupiah)</i>	2015	2014*	Kenaikan (Penurunan) % Increase (Decrease) %
Beban Usaha Operating Expense			
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expense	(63.667)	(55.721)	14,26%
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expense)			
Penghasilan Bunga Interest Income	18.829	16.586	13,52%
Laba (Rugi) Selisih Kurs – Bersih Gain (Loss) on Foreign Exchange – Net	(17.878)	7.417	(341,04)%
Lain-lain-Bersih Other – Net	(42)	(37)	13,51%
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto Other Income (Cost)	909	23.966	(96,21)%
Rugi Tahun Berjalan Loss for the Year	(62.758)	(31.754)	97,63%
Penghasilan (Beban) Komprehensif lain Other Comprehensive Income (Loss)	561	(387)	(244,96)%
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Total Loss for The Year	(62.196)	(32.141)	93,51%

*Disajikan kembali atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)

Information Presentation Standard

The following financial performance analysis and discussion refer to the Financial Statements for the year ended December 31, 2015 and 2014 audited by Purwanto, Sungkoro & Surja and Ernest & Young with unqualified opinion in all material respects. The Company's Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which includes the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAKIAI). The financial statements are prepared in accordance with SFAS 1 (2009), "Presentation of Financial Statements".

Statement Of Profit (Loss)

*) Restated pursuant to SFAS 24 application (2013 Revision)

Beban Usaha

Beban Usaha Perusahaan merupakan Beban Umum dan Administrasi yang terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan; honor tenaga ahli; biaya sewa kantor; pelatihan dan keanggotaan; promosi dan pameran; rapat koordinasi dan RUPS; penyusutan; perlengkapan kantor; keperluan rumah tangga; transportasi dan parkir; komunikasi, energi dan utilitas; biaya sumbangan; amortisasi; serta lain-lain. Secara keseluruhan, Beban Usaha Perusahaan di tahun 2015 meningkat Rp7,95 miliar, atau 14,26%, dari Rp55,72 miliar di tahun 2014 menjadi Rp63,67 miliar. Peningkatan beban usaha ini terutama disebabkan kenaikan pos gaji dan kesejahteraan karyawan 25,65% dari tahun 2014 atau sebesar Rp7,7 miliar, dari Rp30,05 menjadi Rp37,76 miliar.

Operating Expenses

Operating Expenses of the Company comprise of General & Administrative Expense that consisted of employees' salary and compensation benefit; fee of the experts; office rent cost; training and membership; promotion and exhibition; coordination and shareholders meetings; depreciation; office equipment; household utensils; parking and transportation; communication, energy and utility; donation; amortization; etc. Overall, Operating Expense of the Company in 2015 increased by Rp7.95 billion, or 14.26% from Rp55.72 billion in 2014 to become Rp63.67 billion. The increase mainly was due to a 25.65% or Rp7.7 billion hike in employees' salary and compensation benefit from Rp30.05 billion 2014 to Rp37.76 billion. The increase in employees' salary

Adanya kenaikan gaji dan kesejahteraan karyawan disebabkan penambahan jumlah karyawan, dari 54 karyawan di tahun 2014 menjadi 92 karyawan di tahun 2015.

and compensation benefit was due to the increasing number of employees from 54 employees in 2014 to 92 employees in 2015.

Penghasilan Bunga

Penghasilan bunga Perusahaan di tahun 2015 mencapai Rp18,83 miliar, meningkat 13,52% dari tahun 2014 yang sebesar Rp16,58 miliar. Peningkatan ini terjadi karena nominal saldo deposito yang ditempatkan lebih besar dibandingkan tahun 2014, dimana dana yang belum digunakan untuk kegiatan operasional ditempatkan pada rekening deposito.

Interest Income

The Company's interest income in 2015 amounted to Rp18.83 billion, up 13.52% from 2014 which amounted to Rp16.58 billion. This increase was because the nominal balance of time deposits placed in 2015 was higher than in 2014, as the unused fund of operational activities was placed on time deposit accounts.

Rugi Selisih Kurs

Rugi selisih kurs tahun 2015 sebesar Rp17,87 miliar. Adanya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Yen Jepang menjadi penyebab adanya kerugian ini, dimana pencatatan hutang atas *invoice* tagihan konstruksi dalam mata uang Yen Jepang dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah sesuai tanggal *invoice*. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Yen Jepang pada saat tanggal pembayaran (*drawdown loan*) dari JICA kepada kontraktor menyebabkan terjadinya rugi selisih kurs pada pencatatan akuntansi.

Loss on Foreign Exchange

Loss on foreign exchange in 2015 amounted to 17.87 billion. The weakening rupiah exchange rate against the Japanese Yen was the cause of the loss, as recording of the construction billings in Yen currency were converted to Rupiah with the exchange rate at the date of invoice. The weakening of the Rupiah against the Japanese Yen at the date of payment (loan drawdown) from JICA to contractors resulted in loss on the exchange rate on the accounting records.

Rugi Tahun Berjalan dan Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Dengan kinerja keuangan pada Beban Usaha, Penghasilan Bunga dan Rugi Selisih Kurs, hingga akhir 2015 Rugi Tahun Berjalan Perusahaan sebesar Rp62,76 miliar, meningkat 97,64% dibandingkan Rugi Tahun Berjalan di tahun 2014 yang sebesar Rp31,75 miliar.

Loss for the Year and Comprehensive Loss for the Year

Given the financial performance of the Operating Expenses and Loss on Foreign Exchange as described above, up to the 2015 year end the Company's Loss for the Year was Rp62.76 billion, a 97.64% increase compared with the Rp31.75 billion Loss for the Year posted in the previous year.

Sementara untuk Rugi Komprehensif Tahun Berjalan, tercatat terjadi peningkatan 93,51% dari Rp32,14 miliar di tahun 2014 menjadi Rp62,2 miliar di tahun 2015.

Meanwhile, Comprehensive Loss for the Year increased by 93.51% from Rp32.14 billion in 2014 to Rp62.2 billion in 2015.

Posisi Keuangan

Financial Position

<i>(dalam juta Rupiah)</i>	2015	2014*	Kenaikan (Penurunan) % Increase (Decrease) %	<i>(in million Rupiah)</i>
Aset Lancar	395.308	299.642	31,93%	Current Assets
Aset Tidak Lancar	3.768.693	1.970.429	91,26%	Non-Current Assets
Aset	4.164.001	2.270.071	83,43%	Assets
Liabilitas Jangka Pendek	201.743	421.766	(52,17)%	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	201.997	41.055	392,01%	Non-Current Liabilities
Liabilitas	403.740	462.821	(12,77)%	Liabilities
Ekuitas	3.760.260	1.807.250	108,07%	Equity
Liabilitas dan Ekuitas	4.164.001	2.270.071	83,43%	Liability and Equity

*)Disajikan kembali atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)

*)Restated pursuant to SFAS 24 application (2013 Revision)

Aset

Jumlah aset Perusahaan pada 31 Desember 2015 tumbuh 83,43%, dari Rp2,27 triliun di tahun 2014 menjadi Rp4,16 triliun. Peningkatan ini terjadi karena:

- a. Peningkatan Aset Lancar sebesar Rp95,66 miliar atau 31,93%, dari Rp299,64 miliar di tahun 2014 menjadi Rp395,31 miliar. Setoran modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145 miliar pada bulan Desember tahun 2015 menjadi dorongan utama meningkatnya Aset Lancar.
- b. Peningkatan Aset Tidak Lancar Rp1,89 triliun, atau tumbuh 91,26% dari Rp1,97 triliun di tahun 2014 menjadi Rp3,77 triliun. Adanya peningkatan Aset Tidak Lancar diantaranya disebabkan:
 1. Pembayaran uang muka paket pekerjaan CP107 dan CP108, serta adanya pengembalian uang muka dari kontraktor/konsultan yang dilakukan pada tiap termin pembayaran sesuai dengan kontrak.
 2. Peningkatan akun Aset tetap seiring dengan kemajuan konstruksi fisik dilapangan.

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas Perusahaan turun 12,77%, dari Rp462,82 miliar di tahun 2014 menjadi Rp403,74 miliar di akhir tahun 2015. Penurunan ini disebabkan:

- a. Penurunan biaya yang harus dibayar (biaya akrual) sebesar 53,14% atau Rp223,38 miliar, dari Rp420,33 miliar di tahun 2014 menjadi Rp196,95 miliar di tahun 2015. Penurunan ini disebabkan pembayaran kepada kontraktor dan konsultan di tahun 2015 dilakukan sesuai dengan milestone kemajuan pekerjaan konstruksi/konsultan.
- b. Peningkatan nilai hutang retensi sebesar Rp157,54 miliar, dari Rp36,56 miliar di tahun 2014 menjadi Rp194,10 miliar di tahun 2015.

Sementara itu, Ekuitas Perusahaan meningkat 108,07% atau Rp1,95 triliun, dari Rp1,81 triliun di tahun 2014 menjadi Rp3,76 triliun. Di tahun 2015 Peningkatan Ekuitas Perusahaan disebabkan oleh:

- a. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 31,19% atau Rp462,13 miliar, dari Rp1,48 triliun di tahun 2014 menjadi Rp1,94 triliun di tahun 2015. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Peningkatan Modal Disetor lainnya sebesar 336,06% atau Rp1,55 triliun, dari Rp462,14 miliar di tahun 2014 menjadi Rp2,01 triliun di tahun 2015.
- c. Akumulasi rugi perusahaan (defisit) pada tahun 2015 meningkat sebesar 45,77% atau Rp62,76 miliar, dari Rp137,12 miliar di tahun 2014 menjadi Rp199,87 miliar di tahun 2015.

Dengan peningkatan penurunan liabilitas dan peningkatan ekuitas ini, jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan di tahun 2015 meningkat sebesar 83,43% dibandingkan tahun 2014.

Total Asset

The Company's Total Assets on 31 December 2015 grew 83.43%, from Rp2.27 trillion in 2014 to Rp4.16 trillion. This growth was attributable to:

- a. An increase in Current Assets by Rp95.66 billion or 31.93%, from Rp299.64 billion in 2014 to Rp395.31 billion. Capital injection from the DKI Jakarta Provincial Government amounting to Rp145 billion in December 2015 was the main cause of this increase in Current Assets.
- b. An increase in Non-Current Assets by Rp1.89 billion or 91.26% from Rp1.97 trillion in 2014 to Rp3.77trillion. This increase in Non-Current Assets was due to:
 1. Advance payments for CP107 and CP108 work packages as well as the return of advances from contractors/ consultants conducted In each payment term in accordance with the contract.
 2. The increase in fixed asset post in line with the progress of physical construction on site.

Liabilities and Equity

The Company's Liabilities decreased 12.77%, from Rp462,82 billion in 2014 to Rp403,74 billion at the end of 2015. The decrease was due to:

- a. A decrease in the accrued expenses by 53.14% or Rp223.38 billion from Rp420.33 billion in 2014 to Rp196.95 billion in 2015. This decrease was due to payments to contractor and consultants in 2015 were conducted in accordance with the construction/consultant work progress milestones.
- b. An increase in retentions payable by Rp157.54 billion from Rp36.56 billion in 2014 to Rp194.10 billion in 2015.

Meanwhile, Equity increased by 108.07% or Rp1.95 trillion from Rp1.81 trillion in 2014 to Rp3.76 trillion. This Increase in Equity was caused by:

- a. An increase in the Issued and Fully Paid-Up Capital by 31.19% or Rp462.13 billion from Rp1.48 trillion in 2014 to Rp1.94 trillion in 2015. The increase in this Issued and Fully Paid-Up Capital was conducted by DKI Jakarta Provincial Government.
- b. The increase in Other Paid-Up Capital by 336.06% or Rp1.55 trillion from Rp462.14 billion in 2014 to Rp2.01 trillion in 2015.
- c. The Company's deficit in 2015 increased by 45.77% or Rp62.76 billion from Rp137.12 billion in 2014 to Rp199.87 billion in 2015.

With the increase in equity, total liabilities and equity increased by 83.43% compared to 2014.

Arus Kas

Cash Flows

<i>(dinyatakan jutaan Rupiah)</i>	2015	2014	Kenaikan (Penurunan) (%)	<i>(in million Rupiah)</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(38.473)	(39.140)	(1,70%)	Net Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(10.256)	(5.179)	98,03%	Net Cash Flows for Investing Activities
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	145.000	125.000	16,00%	Net Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan bersih Kas dan Setara Kas	96.271	80.680	19,32%	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Periode	295.488	214.808	37,56%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	391.759	295.488	32,58%	Cash and Cash Equivalents at End of Year

Pada Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, terjadi penurunan sebesar 1,70% dibandingkan tahun 2014. Penurunan ini sebagian besar terjadi karena menurunnya pembayaran kepada vendor dan pemasok.

Net Cash Flow from Operating Activities fell by 1.70% compared to 2014. The decrease was mostly due to a decrease in payments to vendors and suppliers.

Demikian pula Arus Kas Bersih untuk aktivitas investasi yang juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 98,03%. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya perolehan aset tetap. Sementara Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yang juga mengalami kenaikan sebesar 16% dari tahun 2014 disebabkan meningkatnya Modal Disetor Lainnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham utama.

Similarly, Net Cash Flow for investing activities increased by 98.03%. This increase was due to increased acquisition of fixed assets (property and equipment). While Net Cash Flow from Financing Activities also increased by 16% compared to 2014 due to increased Other Capital Paid-In by DKI Jakarta Provincial Government as the majority shareholder.

Rasio Keuangan

Financial Ratios

<i>(in million Rupiah)</i>	2015	2014	<i>(in million Rupiah)</i>
Rasio Lancar	195,95%	71,04%	Current Ratio
Rasio Solvabiliti	10,31%	4,90%	Solvability Ratio
Rasio Kas	194,19%	70,06%	Cash Ratio
Quick Ratio	195,95%	71,04%	Quick Ratio
Total Hutang Rasio untuk Ekuitas	10,74%	25,61%	Total Debt to Equity Ratio
Hutang Jangka Pendek untuk Ekuitas	5,37%	23,32%	Short Term Debt To Equity
Hutang Jangka Panjang untuk Ekuitas	5,37%	2,27%	Long Term Debt To Equity
Hutang Aset	9,70%	20,39%	Debt To Asset

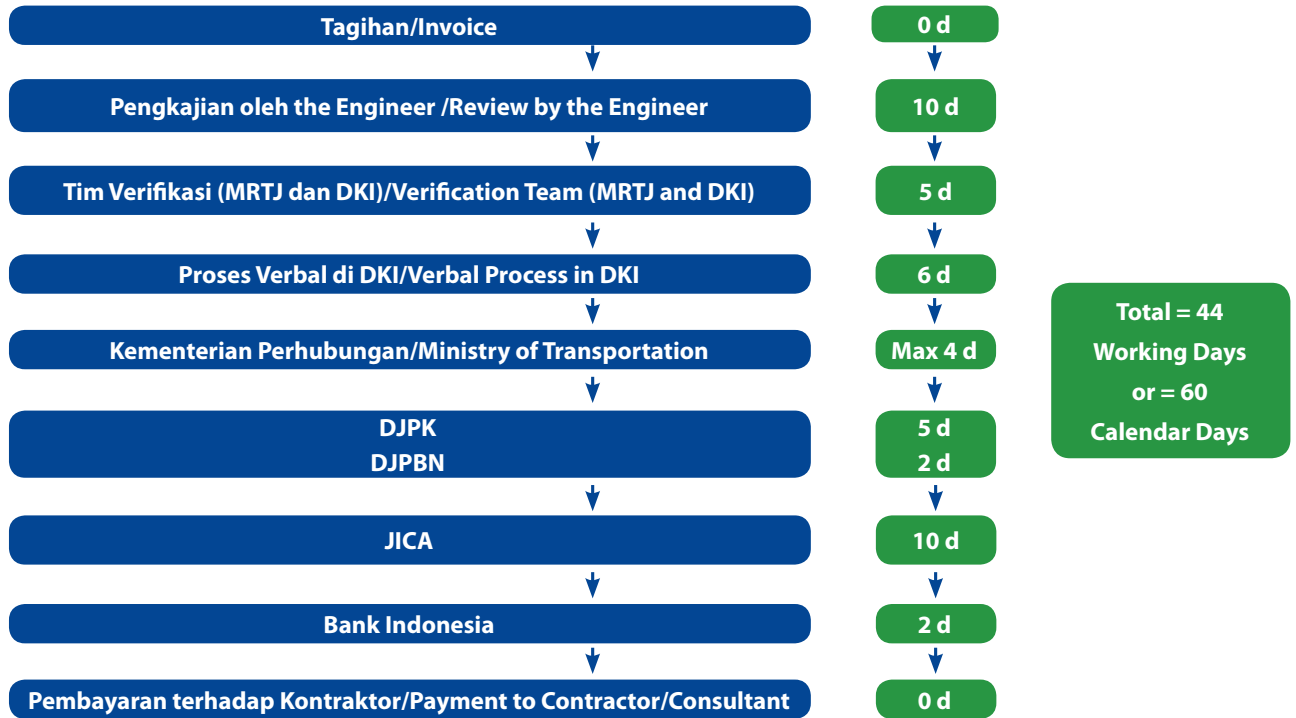
Kemampuan Membayar Utang

Solvency

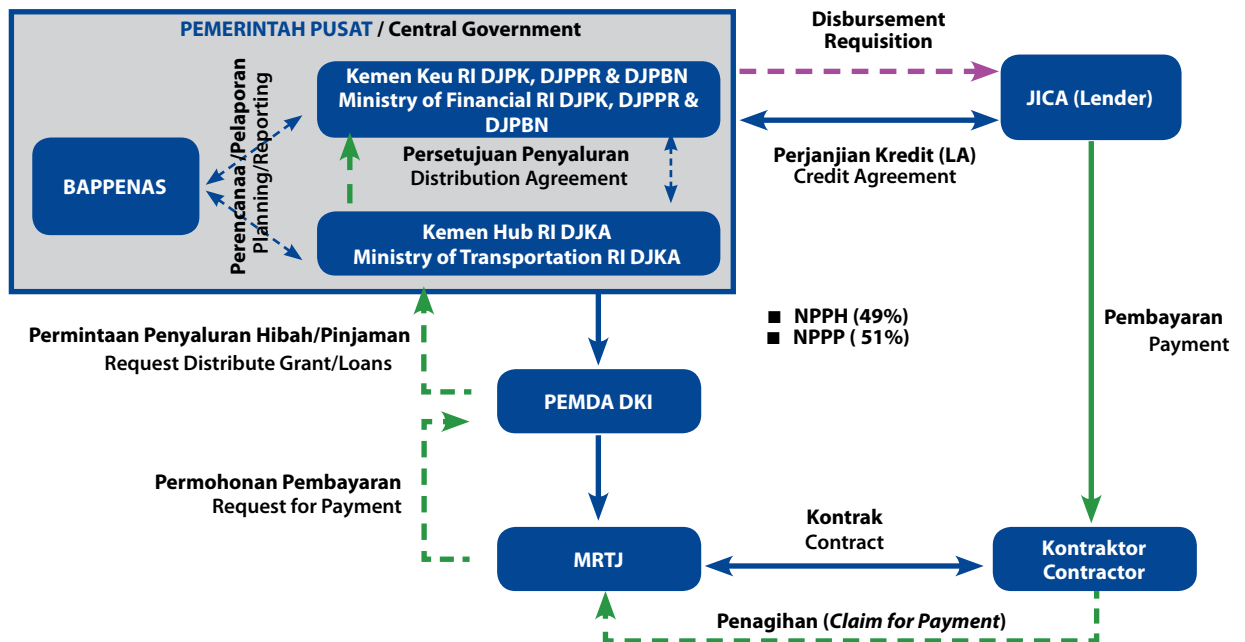
Utang terhadap kontraktor terkait konstruksi penyelesaian proyek dibayar oleh JICA sebagai pemberi pinjaman. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman ke Pemerintah Pusat Indonesia yang kemudian disalurkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui mekanisme hibah.

Payables to contractors related with construction project completion were paid by JICA as the Lender of Loan to the Indonesian Central Government which is subsequently distributed to DKI Jakarta Provincial Government through grant mechanism.

PROSES PEMBAYARAN | PAYMENT PROCESS



SKEMA PEMBIAYAAN | FINANCING SCHEME



Proyek Pertama di Indonesia yang menggunakan skema sub-loan agreement tingkat tiga antara lender (JICA) dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD (PT MRT Jakarta).
The first project in Indonesia using a scheme of sub-loan agreement between lender level three (JICA) with the Central Government, Local Government, and Local Government Owned Enterprise (BUMD) (PT MRT Jakarta)

Tingkat Kolektabilitas Piutang

Perusahaan masih dalam proses pembangunan proyek dan belum melakukan kegiatan usahanya, sehingga tidak memiliki piutang kepada pihak manapun.

Accounts Receivable Collectibility

The Company is still in the project construction phase and has not yet commenced its business activities. Therefore, the Company has no accounts receivable to any party.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Permodalan

Capital Structure and Management's Capital Policy

<i>(dinyatakan dalam jutaan Rupiah) (stated in million Rupiah)</i>	2015	Kontribusi (%) Contribution (in %)	2014	Kontribusi (%) Contribution (in %)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Kenaikan (Penurunan) (%) Increase (Decrease) (%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government	1.943.285	99,97%	1.481.159	99,97%	462.126	31,20%
PD Pasar Jaya PD Pasar Jaya	500	0,03%	500	0,03%	-	-

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 Maret 2015, para pemegang saham telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- Penambahan modal disetor melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp125 miliar.
- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 30 March 2015, the shareholders have approved the following:

- Additional paid-in capital through the Regional Government equity capital investment amounting to Rp125 billion.
- Increase in Issued and Fully Paid Capital amounted Rp1.61 trillion.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Juli 2015, para Pemegang Saham telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- Penambahan Modal Disetor melalui hibah sebesar Rp337,13 miliar.
- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi sebesar Rp1,94 triliun.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 10 July 2015, the shareholders have approved the following:

- Additional Fully Paid Capital through a grant of Rp337.13 billion.
- Increase in Issued and Fully Paid Capital amounted Rp1,94 trillion.

Atas kedua penambahan modal tersebut di atas sebesar Rp462,13 miliar dicatat sebagai bagian dari "Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh" didalam bagian Ekuitas dari laporan posisi keuangan.

The capital increase amounting to Rp462.13 billion mentioned above was recorded as part of the "Issued and Fully Paid" in the Equity section of the statement of financial position.

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145 miliar berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2700 tanggal 8 Desember 2015. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, penambahan modal tersebut belum diaktakan sehingga dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" didalam bagian Ekuitas dari laporan posisi keuangan.

In December 2015, the Company received additional Equity Capital Investment from DKI Jakarta Provincial Government of Rp145 billion based on Governor's Decree No 2700 dated 8 December 2015. Up to 31 December 2015, the capital increase was not yet notarized and thereby recorded as "Other Paid-Up Capital" in the Equity section of the statement of financial position.

Pada tahun 2015 dan 2014, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari hibah masing-masing sebesar Rp1,87 triliun dan Rp337,14 miliar. Hingga 31 Desember 2015, penambahan modal sebesar Rp1,87 triliun belum diaktakan sehingga dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" didalam bagian Ekuitas dari laporan posisi keuangan.

In 2015 and 2014, the Company received additional Equity Capital Investment from DKI Jakarta Provincial Government derived from grants amounting to Rp1.87 trillion and Rp337.14 billion. Up to 31 December 2015, the capital increase amounting to Rp1.87 trillion was not yet notarized and thereby recorded as "Other Paid-Up Capital" in the Equity section of the statement of financial position.

Mutasi modal saham dan modal disetor lainnya adalah sebagai berikut:

The mutation of capital shares and other paid-up capital was as follows:

Modal Disetor Lainnya Other Paid-Up Capital	2015	2014
	(Rp-juta) (Rp million)	(Rp-juta) (Rp million)
Saldo awal tahun Balance of the beginning of the year	462.144	1.251.402
Penambahan tahun berjalan yang berasal dari: Additions for the year derived from:		
APBD dari penerusan hibah APBD (Local Government Revenue and Budget) from Grant	1.870.207	337.143
APBD DKI Jakarta DKI Jakarta's APBD	145.000	125.000
Pengurangan selama tahun berjalan yang disebabkan oleh reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh Reductions during the year due to the reclassification of issued and fully paid capital	(462.126)	(1.251.401)
Saldo akhir tahun Balance at the end of the year	2.015.225	462.144

Realisasi Investasi Barang Modal Tahun 2015

Capital Good Investment Realization 2015

Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	Tujuan Purpose	Nilai (Rp-juta) Value (Rp-million)
Paket Pekerjaan CP 101 CP101 Work Package	Konstruksi Depo dan Struktur Layang MRT Jakarta MRT Jakarta Depo and Escalated Structure Construction	74.913
Paket Pekerjaan CP 102 CP102 Work Package	Konstruksi Struktur Layang MRT Jakarta MRT Jakarta Escalated Structure Construction	70.610
Paket Pekerjaan CP 103 CP103 Work Package	Konstruksi Struktur Layang MRT Jakarta MRT Jakarta Escalated Structure Construction	123.345
Paket Pekerjaan CP 104 CP104 Work Package	Konstruksi Bawah Tanah MRT Jakarta MRT Jakarta Underground Structure Construction	205.615
Paket Pekerjaan CP 105 CP105 Work Package	Konstruksi Bawah Tanah MRT Jakarta MRT Jakarta Underground Structure Construction	219.255
Paket Pekerjaan CP 106 CP106 Work Package	Konstruksi Bawah Tanah MRT Jakarta MRT Jakarta Underground Structure Construction	506.258
Paket Pekerjaan CP 107 CP107 Work Package	Railway System & Trackwork	417.072
Paket Pekerjaan CP 108 CP108 Work Package	Rolling Stock	187.047
Construction Management Consulting Services (CMCS)	Konsultan	54.460
Tender Assistance Services	Konsultan	11.632

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Perusahaan masih dalam proses pembangunan proyek dan belum melakukan kegiatan usahanya, sehingga tidak memiliki laba yang dapat dijadikan dividen untuk dibagikan.

Dividend Policy And Distribution

The Company is still in the project construction phase and has not yet commenced its business activities. Therefore, the Company has no profit to be allocated as dividends.

Perbandingan Realisasi dengan Target Anggaran

Comparison Between Realization and Budget Target

Penyerapan Dana Hibah APBN

Absorption of Grant from APBN

<i>(dalam juta Rupiah)</i> <i>(in million Rupiah)</i>	RKAP 2015 Budget Plan	Realisasi 2015 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Konstruksi Construction			
Paket Pekerjaan CP 101 CP 101 Work Package	139.637	74.913	53,65%
Paket Pekerjaan CP 102 CP 102 Work Package	144.634	70.610	48,82%
Paket Pekerjaan CP 103 CP 103 Work Package	202.356	123.345	60,95%
Konstruksi Bawah Tanah Underground Construction			
Paket Pekerjaan CP 104 CP 104 Work Package	149.255	205.615	137,76%
Paket Pekerjaan CP 105 CP 105 Work Package	203.715	219.255	107,63%
Paket Pekerjaan CP 106 CP 106 Work Package	412.567	506.258	122,71%
Paket Pekerjaan CP 107 CP 107 Work Package	566.000	417.072	73,69%
<i>Rolling Stock</i>			
Paket Pekerjaan CP 108 CP 108 Work Package	267.000	187.047	70,06%
Konsultan Consultant			
<i>Construction Management Consulting Services (CMCS)</i>	94.784	54.460	57,46%
<i>Tender Assistance Services</i>	12.891	11.632	90,23%
<i>Operation Maintenance Consulting Services (OMCS)</i>	20.490	-	-
Jumlah Total	2.213.329	1.870.207	84,50%

Realisasi penggunaan Dana Hibah mencapai 84,50%. Rendahnya realisasi pada paket pekerjaan CP 101, CP 102 dan CP 103 terjadi karena adanya kendala dalam pelaksanaan kemajuan pekerjaan seperti yang telah diuraikan pada tinjauan operasional pada laporan tahunan ini. Untuk CP 107 dan CP 108, realisasi penyerapan anggaran baru digunakan untuk pembayaran uang muka pekerjaan. Sementara untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi CMCS, penyerapan sebesar 57,46% terjadi karena keterlambatan administrasi penagihan pembayaran oleh konsultan dan diperlukan adanya amandemen untuk perubahan personil konsultan. Pada Jasa Konsultan *Tender Assistance Services* -2, terjadi selisih kurs pada saat penyusunan anggaran dengan kurs pada saat pembayaran yang menyebabkan adanya deviasi antara realisasi dan anggaran. Untuk Jasa Konsultan OMCS, paket pekerjaan ini belum terealisasi karena masih dalam tahap evaluasi pengadaan konsultan.

Actual use of Grant reached 84.50%. The low realization in CP 101, CP 102 and CP 103 work packages was due to constraints in the work implementation progress described in the operational review of this annual report. For CP 107 and CP 108, the budget absorption was only realized for advances payment. As for the CMCS Consulting Services Package, the absorption was 57.46% due to a delay in the consultant's billing administration consultants and contract amendment with regard to the change to the consultant's personnel. On the Tender Assistance Services-2, there was a difference between the exchange rate used in budget preparation and the exchange rate at the time of payment which caused a deviation between the realization and budget. Meanwhile, OMCS Consulting Services package was not realized yet as it was still in the evaluation phase of the consultant procurement process.

Penggunaan Dana Pendamping

Use of Matching Funds

(dalam juta Rupiah) (in million Rupiah)	RKAP 2015 Budget Plan 2015	Realisasi 2015 Realization 2015	Pencapaian (%) Achievement (%)
Pengadaan Penunjang Langsung Kegiatan Procurement of Direct Supports	178.076	2.458	1,38%
<i>Capital Expenditure</i>	22.157	8.008	36,14%
Sub-Jumlah <i>Capital Expenditure</i> Sub-Total of <i>Capital Expenditure</i>	200.233	10.466	5,23%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expense	91.310	55.213	60,47%
Beban Pemasaran dan Pengembangan Marketing and Development Expense	14.457	6.665	46,11%
Sub-Jumlah Biaya Operasional Sub-Total of Operational Cost	105.767	61.879	58,50%
Jumlah Penggunaan PMP Total Use of PMP	306.000	72.345	23,64%

Realisasi pengadaan penunjang langsung kegiatan sebesar 1,38% dari RKAP tahun 2015, terutama disebabkan Penyertaan Modal Perusahaan untuk membentuk anak perusahaan belum dilakukan di tahun 2015. Penyerapan pengadaan penunjang langsung kegiatan sebesar Rp2,46 miliar didapatkan dari kegiatan aset dalam pelaksanaan penunjang proyek, yaitu kegiatan verifikasi dokumen tagihan dari kontraktor dan konsultan. Penyerapan aset dalam pelaksanaan penunjang proyek sendiri mencapai 72,31% dari yang dianggarkan di awal tahun 2015, dimana proses verifikasi dapat dilakukan dengan efisien melalui penggabungan beberapa termin tagihan dari kontraktor dan konsultan dalam satu verifikasi. Sementara untuk pengadaan kantor Perusahaan sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 yang sebesar Rp161 miliar, kegiatan ini belum dilakukan di tahun 2015 dengan penganggaran dilakukan kembali untuk tahun 2016.

Pada *Capital Expenditure*, terdapat realisasi sebesar 36,14% dari anggaran tahun 2015. Penyerapan anggaran ini terutama terjadi melalui:

- Aset dalam pelaksanaan. Kegiatan ini adalah Kapitalisasi atas kegiatan yang berhubungan langsung dengan Konstruksi Proyek seperti Gaji & Tunjangan Pegawai Konstruksi serta pembelian peralatan pendukung teknis dan keamanan standar proyek. Kegiatan ini terealisasi 37,76% dari anggaran, yang disebabkan adanya penyesuaian pada realisasi rekrutmen pegawai, efisiensi dari tunjangan tidak langsung pegawai serta efektifitas dalam pembelian APD proyek.
- Inventaris Peralatan & Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini berupa penggantian ataupun penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang masuk klasifikasi sebagai aset tetap. Kegiatan ini terealisasi 38% dari anggaran, terutama

This activity has not been done in 2015 with the realization Direct Procurement Support Event of 1.38% of RKAP 2015, mainly due to Equity Subsidiary company to form yet done in 2015. Absorption of direct procurement support the activities of Rp2,46 billion earned from activities assets supporting the implementation of the project, namely verification activities documents bills of contractors and consultants. absorption assets supporting the project execution alone reached 72.31% than budgeted in early 2015, where the verification process can be done efficiently through the merger of several bill terms of contractors and consultants in the verification. Meanwhile, procurement of the Company's office in accordance with the 2013 Regional Regulation No. 8 amounting to Rp161 billion, was not yet realized in 2015 and was rearranged in the 2016 budget.

The realization of *Capital Expenditure* was 36,14% of the 2015 budget. The budget absorption was for:

- On-going assets. This activity was Capitalization of activities that were directly related to construction project such as salaries and benefits for construction employees as well as the purchase of technical and standard safety ancillary equipment for projects. This activity realization was 37,76% of the budget, which was due to an adjustment to the realization of the recruitment, the efficiency of the indirect benefits of employees and effectiveness in the purchase of project PPE.
- Inventory Equipment & Supplies. This activity consisted of replacement of or addition to office equipment and supplies classified as Property and Equipment. This activity realization was 38% of the budget, mainly due to effective management

karena efektifitas pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor dan efisiensi/selektif terhadap penambahan perlengkapan kantor.

- c. *Information Technology Supports*. Kegiatan ini merupakan pembuatan/pembelian perlengkapan IT baik *software* maupun *hardware* yang masuk kedalam klasifikasi aset tetap. Kegiatan ini terealisasi 26% dari anggaran, yang disebabkan adanya beberapa kegiatan seperti pengembangan sistem *Human Resources Information System* (HRIS), penambahan *user license* sistem akuntansi (Ramco), *renewal license software* yang belum dilakukan di tahun 2015.

Untuk Beban Umum dan Administrasi, realisasi pada akun ini sebesar 60,47%. Gaji dan Tunjangan karyawan merupakan salah satu faktor, dimana akun ini terealisasi 86% dari anggaran yang disebabkan adanya efisiensi dari tunjangan tidak langsung karyawan yang tidak digunakan. Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada Biaya Profesional, Energi & Telekomunikasi, Biaya Perizinan dan Rapat Koordinasi, Transport Lokal, Alat Tulis Kantor & Cetak, serta Perlengkapan Kantor, yang masing-masing terealisasi sebesar 29%, 78%, 12%, 74%, 81% dan 82% dari anggaran tahun 2015.

Demikian pula dengan Beban Pemasaran & Pengembangan. Efisiensi yang dilakukan pada biaya-biaya di akun ini terealisasi 46,11% dari anggaran tahun 2015. Biaya Identitas, Komunikasi & Sosialisasi terealisasi 41% dari anggaran, Training & Pengembangan SDM 50% dari anggaran, serta Biaya Sponsorship sebesar 22% dari anggaran.

Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam aktivitas keuangan Perusahaan, risiko nilai tukar mata uang asing sangat minimal terjadi. Hal ini disebabkan pembayaran atas para kontraktor diberikan langsung dari JICA sebagai pemberi pinjaman kepada pihak kontraktor.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Pada tahun 2015, tidak ada informasi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang/modal.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak terdapat kejadian luar biasa setelah periode berakhirnya laporan keuangan 2015 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.

of equipment and office supplies and efficiency/selective addition of office supplies.

- c. *Information Technology Supports*. This activity consisted of the manufacture/ purchases of IT equipment both software and hardware classified into Property and Equipment. This activity was realized 26% of the budget, which was due to some activities such as the development of systems Human Resources Information System (HRIS), addition to user license of the accounting system (Ramco), software license renewal not yet done in 2015.

For General and Administrative Expenses, the realization of these accounts was 60,47%. Salary & Benefits is one of the factors, realized 86% of the budget due to the efficiency from unused indirect employee benefits. In addition, the efficiency was also done on the costs for Professional fees, Energy & Telecommunications, Coordination Meeting, Local Transports, Office Stationery & Printing, Office Supplies, and General, which were realized 29%, 78%, 12%, 74%, 81% and 82% respectively of the 2015 budget.

Similarly, there was an efficiency effort to reduce Marketing & Development Expense as the realization was only 46.11% of the 2015 budget. Identity, Communication & Dissemination cost was only realized 41% of the budget, Training & Human Resource Development was only 50% of the budget, and sponsorship fee was 22% of the budget.

Impact Of Foreign Currency Exchange Rate

In the Company's financial activities, the risk of foreign currency exchange rate was unlikely to happen. This was because payments to contractors were directly made by JICA as Lender to contractors.

Material Information On Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, And/Or Debt/Capital Restructuring

In 2015, there was no information on the material information related to investment, expansion, divestment, merger, acquisition or debt/capital restructuring.

Information And Material Facts That Occurred After The Date Of The Accountants Reports

There was no extraordinary events occurring after the end of the 2015 financial statements period up to the release of the financial statements by the Public Accountants Firm.

Informasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait.

Pengungkapan Pihak Berelasi

Pihak yang Berelasi The Related Parties	Sifat Hubungan The Nature Of Relationships	Sifat Transaksi The Nature Of Transaction
PT Bank DKI	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama Owned By The Same Controlling Shareholders	Kas dan Setara Kas Cash And Cash Equivalents

Pada tahun 2015, terdapat 2 (dua) jenis transaksi dengan Pihak Berelasi, PT Bank DKI, dengan jenis dan masing-masing besaran transaksi adalah: Giro sebesar Rp2,82 miliar, dan penempatan Deposito Berjangka sebesar Rp320 miliar.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Selama tahun 2015, tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi khususnya yang berpengaruh sebagai informasi keuangan bagi Perusahaan.

Perubahan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Di tahun 2015, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

Kebijakan Akuntansi dan Perubahannya

Berikut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya sejak 1 Januari 2015 yang berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan:

1. PSAK 1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan Standar revisi ini mengharuskan entitas untuk memisahkan penyajian pos-pos Penghasilan Komprehensif Lain (*Other Comprehensive Income*/OCI) ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan apakah akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba

Information on Transactions with Related Parties

The Company has applied PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures", that requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the financial statements. The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements

Disclosure of Related Parties

In 2015, there were two (2) types of transactions with the Related Parties, PT Bank DKI, with the type and amount of each transaction as follow: Giro in the amount of Rp2.82 billion, and the placement of time Deposit in the amount of Rp320 billion.

Financial Information on Extraordinary and Rare Events

Throughout 2015, there was no occurrence of extraordinary and rare events particularly those affecting the Company's financial information.

Changes to the Legislation with Significant Effect to the Company

In 2015, there was no changes to legislation significantly affecting the Company.

Accounting Policy and its Changes

The following is the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which must be applied for the first time since January 1, 2015 which affect the Company's financial statements:

1. PSAK 1 (2013 Revision), Presentation of Financial Statements. The revised standard requires an entity to separate presentation of items of Other Comprehensive Income (OCI) into 2 (two) groups based on whether will be further reclassified to profit or loss in the future. OCI items which

rugi di masa yang akan datang. Pos-pos OCI yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi harus disajikan terpisah dengan pos-pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi di masa yang akan datang.

Perusahaan telah menyajikan OCI berdasarkan apakah akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi di masa yang akan datang, seperti yang tercermin di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"
Perubahan - perubahan oleh karena standar revisi ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Keuntungan dan kerugian aktuarial langsung diakui sebagai OCI. Pendekatan koridor tidak lagi diperbolehkan.
 - b. Biaya jasa lalu diakui pada periode terjadinya perubahan program. Manfaat yang belum *vested* sudah tidak boleh lagi diakui sepanjang periode jasa di masa depan.
 - c. Dalam menentukan jumlah yang diakui di laba rugi, biaya bunga dan pengembalian yang diharapkan dari aset program diganti dengan jumlah bunga bersih yang dihitung menggunakan tingkat diskonto terhadap jumlah bersih dari liabilitas/aset imbalan pasti.
 - d. Persyaratan penambahan pengungkapan terkait:
 - Karakteristik dan risiko yang terkait dengan program imbalan pasti.
 - Jumlah pada laporan keuangan entitas yang timbul dari program imbalan pasti.
 - Pengaruh dari program imbalan pasti terhadap arus kas entitas dimasa depan terkait dengan waktu, jumlah dan ketidakpastian.

Manajemen telah menelaah bahwa penerapan restrospektif standar revisi ini berdampak material pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya perlu dilakukan.

shall not be further reclassified to profit or loss should be presented separately to items that may be reclassified to profit or loss in the future.

The company has presented OCI based on whether will be reclassified further to profit or loss in the future, as reflected in the income statement and the consolidated other comprehensive income.

2. PSAK 24 (2013 Revision) , "Employee Benefits"
Changes due to this revised standard is as follows:
 - a. Actuarial gains and losses are recognized immediately as OCI. Corridor approach is no longer permitted.
 - b. Earlier service costs are recognized in the period of program change. The unvested benefits may no longer be recognized during the future service period.
 - c. To determine the amount recognized in the income, interest expense and the expected return on plan assets replaced by the amount of net interest which is calculated using a discount rate to the net amount of liabilities/assets of the defined benefit.
 - d. Requirements of the related additional disclosures :
 - Characteristics and risks which associated with the defined benefit plans.
 - The number of the entity's financial statements arising from the defined benefit plans.
 - The effect of a defined benefit plan to the entity's future cash flows in relation to the time, amount and uncertainty

Management has considered that the retrospective application of this revised standard has material effect on the financial statements of the previous year. Therefore, the restatement of the financial statements of the prior year is necessary.

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA Business Development Plan

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit telah dikenal luas sebagai bentuk pembangunan kota yang telah dipraktekkan di seluruh penjuru kota dunia untuk mereduksi penggunaan kendaraan mobil dan mempromosikan pola penataan ruang yang kondusif terhadap penggunaan moda transit. Konsep rancangan TOD memiliki prinsip 3D, yaitu *Density* (Kepadatan), *Diversity* (Keragaman) dan *Design* (Perancangan); yang kemudian dipertajam lagi menjadi prinsip 5D dengan penambahan prinsip *Distance to Transit* (jarak ke transit) dan *Destination Accessibility* (aksesibilitas ke tujuan)

Density atau **kepadatan**, berarti meningkatkan kepadatan penghuni, pekerja, pedagang dan pembelanjaan yang cukup tinggi dalam suatu area sejauh jangkauan pejalan kaki yang wajar menuju stasiun massal. Seberapa jauh jangkauannya tentu bervariasi bergantung karakter masyarakatnya dan seberapa nyaman fasilitas pejalan kakinya. Namun secara umum menurut berbagai referensi berkisar 500 meter.

Diversity atau **keberagaman**, berarti tata guna lahan campuran, model bangunan hingga pola jalur jalan yang mengitari kawasan. Hal ini dimaksudkan agar keragaman fasilitas dan pusat aktivitas publik maupun komersial bisa didapatkan dalam jangkauan jalan kaki tanpa harus mengandalkan kendaraan bermotor.

Design atau **Perancangan**, yaitu suatu kesadaran perancangan tata letak dan desain perkotaan yang memudahkan dan memprioritaskan pejalan kaki, pengguna sepeda, pengguna transportasi massal dan memungkinkan interaksi sosial antar penggunanya dengan lebih baik.

Distance to Transit atau **Jarak ke Transit**, yaitu suatu faktor penting dari TOD didasari atas pengamatan bahwa *ridership* atau tingkat penggunaan transportasi massal secara eksponensial sangat dipengaruhi oleh kedekatannya dengan stasiun transportasi massal tersebut. Secara umum pengamatan beberapa ahli di kota-kota dunia yang memiliki sarana transportasi massal mengatakan bahwa penghuni yang tinggal di kawasan transit secara umum menggunakan sarana transportasi massal 5 kali lebih tinggi daripada para penglaju.

Destination accessibility atau **aksesibilitas ke tujuan**, merupakan suatu parameter untuk menilai tingkat kualitas suatu TOD terkoneksi dengan pusat-pusat aktivitas publik, komersial, dan tujuan-tujuan populer lain dalam suatu kawasan transit. Dalam hal ini ukurannya adalah seberapa tinggi derajat suatu sarana transportasi publik secara efisien dapat menghubungkan suatu kawasan transit dengan pusat-pusat aktivitas yang tersebar dalam wilayah yang lebih luas. Di sini peranan *feeder system* atau sistem transportasi pengumpan menjadi esensial disamping pengembangan kawasan transisinya sendiri.

Transit Oriented Development

Transit Oriented Development (TOD) has been widely known as an urban development that has been practiced throughout the cities in the world to reduce the domination of private vehicle's usage, particularly cars, and promote a conducive spatial pattern to the use of transit mode. The concept design of TOD has to meet the 3D principles, which are Density, Diversity and Design; which have been narrowed down to be 5D principles with the additions of Distance to Transit and Destination Accessibility principles.

Density means to improve the density of residents, workers, merchant and quite high expenditure in an area as far and reasonable as possible to the scope of pedestrian towards mass stations. How far the scope could be, surely is varied depending on the character of the community and how convenient the facility for the pedestrians. However, according to various references in general, it is about 500 meters.

Diversity means the mixture of land usage, building models and route pattern around the region. It is intended that the diversity of facility and public as well as commercial activity centre can be reached by feet without having to rely on motor vehicles.

Design is an awareness of layout and urban design which simplify and prioritize pedestrians, cyclists, mass transportation users, and enable better social interactions between all the users.

Distance to Transit, is an important factor of TOD based on the observation that ridership or the usage level of mass transportation's exponentially is highly influenced by the proximity with the station of such mass transportation. General observation from several experts from around the world, concluded that the residents who live in the transit region will use mass transportation 5 times higher than the commuters.

Destination accessibility is a parameter to assess the quality level of TOD connected with the public and commercial activity centres, as well as other popular destinations in a transit region. In this case, the measurement is how high the degree of an efficient public transportation in connecting a transit region with activity centres that are spreaded in a wider region. This is where the feeder system role becomes essential in addition to the development of transit region it self.

Pada konteks pembangunan MRT Jakarta, target utama sistem MRT Jakarta adalah memberikan alternatif transportasi publik kepada pengguna kendaraan pribadi, dan reformasi transportasi publik bagi pengguna kendaraan umum yang sudah ada. Untuk itu, sistem MRT harus memberikan solusi transportasi dari area pemukiman hingga tujuan. Jaringan MRT dalam kota harus diupayakan dapat menjangkau setiap sudut kota secara efektif yang dilengkapi dengan fasilitas sistem pengumpan yang tak kalah baiknya dengan MRT seperti LRT, PRT dan *shuttle bus*; disamping adanya *park & ride* di stasiun MRT Jakarta awal dan fasilitas *kiss & ride* yang baik di setiap stasiun serta penerapan TOD di setiap area stasiun untuk menjamin aksesibilitas pejalan kaki yang baik ke tempat tujuan.

In the context of MRT Jakarta, the main target of MRT Jakarta system is to provide decent alternative public transportation for the private vehicle users and a reformation of public transportation for the public transportation users. To that end, the MRT system should provide transportation solutions, from residential area to destination area. Inner city MRT network is sought to reach every corner of the city effectively, equipped with feeder system facility as decent as MRT, i.e. LRT, PRT, and the modest facility like shuttle bus, along with the presence of park & ride in the initial MRT station, and decent kiss & ride facility in every station, as well as the implementation of TOD in every station's area to guarantee the accessibility of pedestrian to the destination.



Tantangan utama Perusahaan dalam menerapkan pendekatan TOD pada kawasan transit sepanjang koridor MRT Jakarta adalah tantangan peremajaan kota terpadu (*Integrated Urban Renewal*) di kawasan yang telah terbangun dan akan diproyeksikan menjadi kawasan transit, bukan sekedar pembangunan kawasan transit di atas lahan kosong biasa. Untuk menjawab tantangan peremajaan kota secara efektif, Pemerintah DKI Jakarta harus memiliki

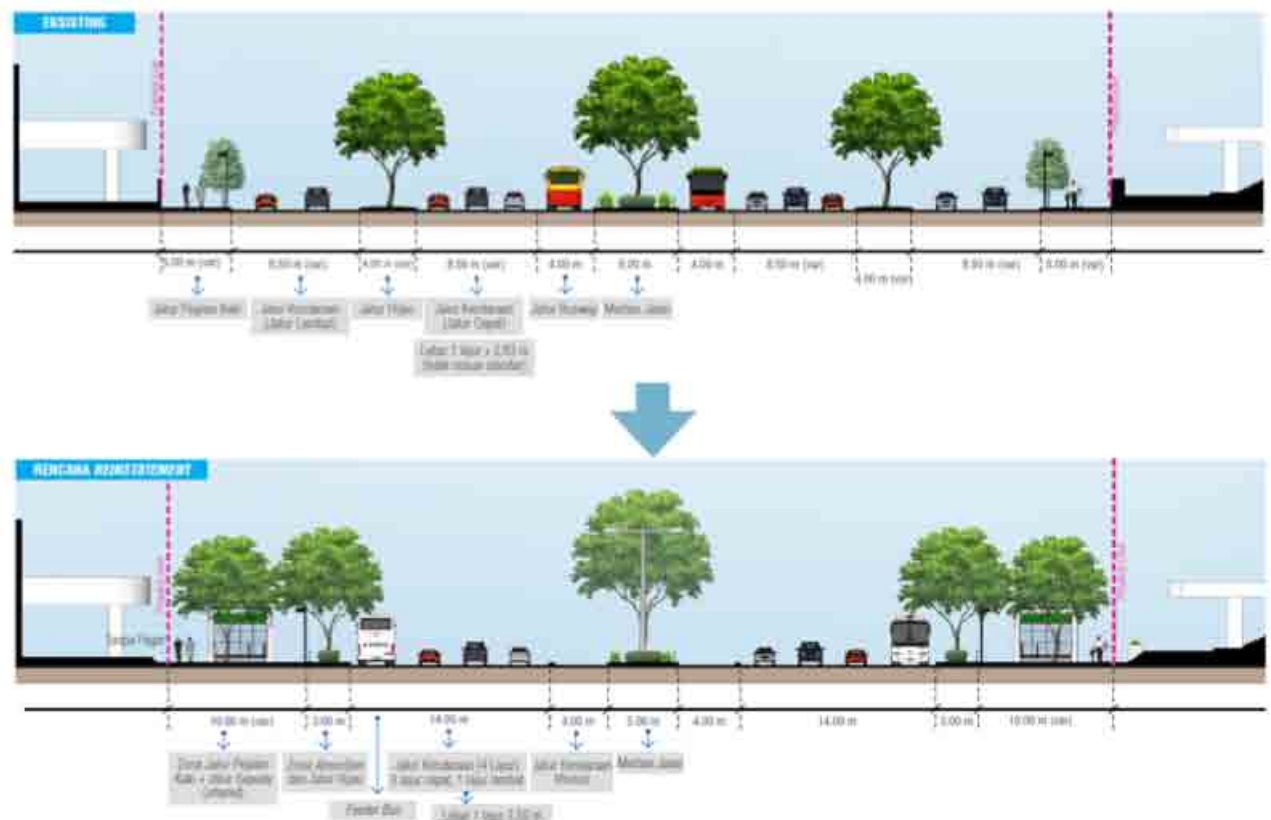
The Company's main challenge in introducing TOD approach to transit area along MRT Jakarta's corridor is an integrated urban renewal in an already constructed region and will be projected as transit area, not only the development of transit area in a vacant land. To respond the urban renewal challenge effectively, the main instrument that should be owned by the City Government is land consolidation instrument, in addition to the general

instrumen konsolidasi lahan (*Land consolidation*) disamping instrumen penataan kota yang biasa semacam Panduan Rancang Kota (*Urban Design Guidelines*). Pendekatan ini mendorong peremajaan Kota Terpadu dan membuka peluang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi banyak kawasan penting sepanjang koridor MRT Jakarta.

urban design instrument, such as Urban Design Guidelines. TOD approach which encourages integrated urban renewal with the implementation of this MRT system, opens the opportunity for the Government of DKI Jakarta Province to renew and revitalize many important areas along the MRT corridor.

Rencana Koridor Sudirman Setelah Proses *Reinstatement*

Sudirman Corridor Plan after Reinstatement Process



Gambar 1.1 Potongan penampang rencana RUMIJA Koridor Sudirman setelah proses *reinstatement*.

Rencana Bisnis Non Farebox dan Properti

Non-Farebox and Property Business Plan

Untuk menjaga pelayanan MRT Jakarta yang berkelanjutan dan berkesinambungan, pendapatan penyelenggara layanan MRT Jakarta selain bersumber dari pendapatan tiket perlu diperkuat dengan pendapatan non tiket melalui pendayagunaan aset sistem operasi MRT Jakarta seperti pendapatan dari penyediaan media iklan, pengelolaan ritel dalam kawasan stasiun, serta pendapatan lain di luar pemanfaatan aset operasi, yaitu pendapatan properti dalam kawasan transit baik yang dimiliki maupun dikelola oleh Perusahaan.

To maintain the sustainability of MRT Jakarta services, the MRT Jakarta’s service providers should also be strengthened with non-farebox revenues in addition to the farebox revenues by utilizing the assets of MRT Jakarta’s operating system, such as revenue from the provision of advertising media, the management of retail in the station area and other revenues outside the operating asset utilization, i.e. property revenues in the transit area either owned or managed by the Company.

Untuk itu, Perusahaan memerlukan suatu dokumen perencanaan bisnis yang komprehensif dan representatif sebagai basis dan panduan untuk menindaklanjuti peninjauan bisnis non tiket dan bisnis properti. Adapun cakupan dari perencanaan bisnis ini antara lain:

To that end, the Company requires a comprehensive and representative business planning document as the basic and guidelines to follow-up exploration of non-farebox and property businesses. The business plan coverage includes:

- Mengkaji dan mendata pasar iklan, ritel dan properti serta pemahamannya khususnya untuk konteks DKI Jakarta; serta menentukan memahami target pasar bisnis non tiket/*non farebox*; dan bisnis properti kawasan transit MRT Jakarta.
- Memberi masukan yang kuat dan mendasar mengenai nilai yang akan ditawarkan organisasi kepada target pelanggan/pasarnya serta strategi yang diperlukan guna mengkomunikasikan dan melakukan pelayanan bisnis secara efektif dan efisien.
- Melakukan studi banding khususnya dalam hal model bisnis, strategi penetapan harga dan interdependensinya dengan bisnis inti (bisnis tiket/*farebox*) dengan pelaku usaha sejenis (*transit agency*) yang relevan baik di dalam maupun di luar negeri.
- Mengidentifikasi mitra potensial dan memberi acuan dan arahan, dalam penyusunan model kerjasama dengan mitra potensial tersebut.
- Menentukan secara lebih rinci sumberdaya kunci yang dibutuhkan dan investasi yang diperlukan di masa akan datang.
- Menyusun struktur biaya, jenis pendapatan, strategi penetapan harga, serta analisis, simulasi dan proyeksi finansial dari bisnis non tiket/*non farebox* dan bisnis properti.
- Menjelaskan tahapan pengembangan bisnis masing-masing portofolio, rinciannya serta interdependensinya satu sama lain.
- Mengusulkan model kelembagaan dan ekuitas yang dibutuhkan.
- To review and record the advertising market, retail and property and the understanding particularly in the context of DKI Jakarta; and determine the target market of non-farebox business and business property in MRT Jakarta Transit area.
- To provide strong and fundamental feedback on the values to be offered by the organization to targeted customers/markets and the strategies to communicate and conduct the business services effectively and efficiently.
- To conduct comparative studies, especially in terms of business models, pricing strategies and interdependency with core business (non-farebox business) with similar businesses (transit agency) that are relevant both at home and abroad.
- To identify potential partners and provide references and referrals in the preparation of the cooperation model with the potential partners.
- To specify in more detail the key resources and necessary investment required in the future.
- To develop cost structure, revenue types, pricing strategies, as well as financial analysis, simulation and projections from non-farebox business and property business.
- To describe the business development phase of each portfolio and their interdependencies.
- To propose institutional and equity model required.

Transit Property Business

Pilihan utama Perusahaan dalam mengembangkan *Transit Property Business* adalah dengan:

1. Mengembangkan & memiliki *Transit Oriented Property*: Perusahaan berusaha untuk memiliki *real estate* di atas dan sekitar stasiun dengan:
 - Mengembangkan area yang dikuasai MRT Jakarta; dan
 - Bekerjasama dengan Pemerintah atas kelebihan tanah untuk diberikan/diakusisi oleh MRT Jakarta dan penyampaian *transit oriented development*.
2. Menegosiasikan akses interkoneksi dengan pemilik properti dalam kawasan transit terutama yang bersebelahan dengan stasiun/depo MRT Jakarta: Memaksimalkan interkoneksi/integrasi dengan stasiun/depo MRT Jakarta untuk menciptakan kesempatan bisnis properti seperti jalur interkoneksi yang dapat disewakan, dan/atau melalui partisipasi bersama dalam pengembangan properti milik pihak ketiga.

Kesempatan *direct value capture* lainnya terbatas untuk Perusahaan karena keterbatasan kepemilikan lahan dalam kuasa Perusahaan. Perusahaan akan bekerja dengan pemilik properti yang berbatasan untuk mengidentifikasi kesempatan untuk property berorientasi *Transit*.

Transit Property Business

The Company's main options in developing the *Transit Property Business* are:

1. To develop and own *Transit Oriented Property*: The Company seeks to own real estate on and around the station by:
 - Developing the area owned by MRT Jakarta; and
 - Cooperating with the Government on the excess land to be given to/acquired by MRT Jakarta and transit oriented development delivery.
2. To negotiate interconnection access with property owners in the transit area, especially those adjacent to the MRT Jakarta station/depo: Maximizing interconnection/ integration with the MRT Jakarta stations/ depots to create property business opportunities such as to lease interconnection lanes, and / or through joint participation in development of the property owned by third parties.

Other *direct value capture* for the Company is limited due to the Company's land ownership. The company will work with the owners of the adjacent property to identify transit-oriented property opportunities.

Fitur utama dari pengaturan ini dapat berupa:

- fasilitasi akses langsung antara stasiun MRT Jakarta dan properti yang berdekatan;
- negosiasi terhadap *access rights* atau persetujuan penyewaan dengan penyewa yang dinegosiasikan antara MRT Jakarta dan pihak ketiga; dan,
- kewajiban pemeliharaan bisa saja diberikan kepada pihak ketiga.

MRT Jakarta juga akan mengusulkan dan membuat mekanisme yang dapat memberikan properti kepada Perusahaan. Sebagai contoh, hak atas bagian dari pembangunan komersial. Hal ini tidak selalu berarti Perusahaan menyediakan ekuitas atau dukungan keuangan (e.g. jaminan) kepada proyek-proyek yang dimaksud, namun Perusahaan dapat menegosiasikan hasil akhir ini dengan kombinasi bersama *transferable density bonus rights* dan kesepakatan untuk akses.

Sebagai tambahan dari mekanisme di atas, Perusahaan akan bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk menetapkan sebuah sistem atas *density bonus rights* di daerah sekitar stasiun MRT Jakarta. Hak tersebut akan memperbolehkan pemilik tanah untuk meningkatkan pembangunan ruang lantai di atas batas skema perencanaan.

Selain itu Perusahaan juga akan mengupayakan untuk diberikan hak *transferrable density bonus right* dan akan mentransaksikan hak ini dengan komponen dari hasil pembangunan properti berorientasi *transit* dari pihak ketiga. Nilai *Transferrable density bonus rights* akan ditentukan oleh usulan formula kompensasi atas kontribusi dalam pembangunan infrastruktur pendukung sistem MRT maupun sistem kawasan transit serta oleh pembatasan pembangunan pada daerah kawasan transit stasiun MRT Jakarta.

Perusahaan akan secara proaktif memberi masukan dalam bentuk merekomendasikan *master plan* khusus kawasan transit pada setiap area *transit* dengan prioritas pada kawasan transit utama seperti Dukuh Atas dan Blok M. *Master plan* tersebut akan menentukan kapasitas kepadatan pembangunan pada setiap pengembangan properti di dalam cakupan area *transit* MRT Jakarta sebelum persetujuan diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui otoritas Dinas Penataan Kota DKI Jakarta.

Anak perusahaan *Non Fare Box* dan Transit Properti MRT Jakarta

Perusahaan akan mendirikan anak Perusahaan yang mengelola *non fare box* yang terdiri dari iklan, retail dan telekomunikasi serta melakukan kegiatan bisnis usaha *Transit Oriented Development*. Entitas ini akan bertanggung jawab untuk:

- Identifikasi, analisis dan membuat rekomendasi untuk memperoleh dan mengembangkan area TOD;
- Mengambil alih perencanaan untuk mendukung

The main feature of this arrangement can be in the following form:

- facilitation of direct access to the MRT station and the adjacent property.
- negotiation on the access rights or rental agreement between MRT Jakarta and third parties; and
- maintenance obligations could be given to third parties.

MRT Jakarta will also propose and create a mechanism to give the property to the Company. For example, the right on the part of commercial development. This does not always mean that the Company provides equity or financial support (e.g. guarantee) to the said projects; the Company may negotiate the result by combining with transferable density bonus rights and access agreements.

In addition to the above mechanisms, the Company will cooperate with the DKI Jakarta Provincial Government to establish a system for density bonus rights in the surrounding areas of MRT Jakarta stations. These rights will allow land owners to increase the construction of floor space above the planning scheme.

In addition, the Company will also seek the transferrable density bonus right and will transact this right with the components of transit-oriented property development results from third parties. Transferrable density bonus rights value will be determined by proposed compensation formula for the contribution in the development of supporting infrastructure of the MRT Jakarta and the transit areas system as well as restrictions for developments in the transit areas of MRT Jakarta stations.

The Company will proactively provide input by recommending a master plan specifically for transit region of each transit area with priority to main transit regions such as Dukuh Atas and Blok M. The master plan will determine capacity density of any property development in the coverage of MRT Jakarta transit areas before issuance of a consent by the DKI Jakarta Governor through the Planning Department of DKI Jakarta Province.

Subsidiary Company for *Non-Fare Box* and MRT Jakarta Property Transit

The Company will set up a subsidiary that manages non-fare box consisting of advertising, retail and telecommunications as well as conducting business venture of Transit Oriented Development. This entity will be responsible for:

- Identifying, analyzing and making recommendations to acquire and develop TOD area;
- Taking over the planning to support the development of

- pengembangan area TOD;
- Penyediaan dan penegosiasian syarat dengan mitra pengembang; dan
- Mengelola investasi Perusahaan dalam TOD *real estate*.

Hal ini bertujuan agar investasi Perusahaan dalam TOD akan dibatasi dalam lahan dan perencanaan. Mekanisme pengaturan dengan pengembang pihak ketiga akan disepakati di mana para pihak bertanggung jawab untuk pengelolaan proses pengembangan (mengeluarkan kontrak konstruksi, penyewaan dan penjualan, pengaturan pendanaan hutang dan kontribusi ekuitas, dan lainnya). Perusahaan akan mempertahankan hak atas persetujuan untuk semua keputusan kunci.

Keputusan atas anak perusahaan properti akan berada dalam *framework governance* yang mempertahankan akuntabilitas dan pengawasan dengan Perusahaan. Untuk mendukung penerapan insiatif ini, Perusahaan akan merekrut profesional *real estate* yang memiliki pengalaman pemilihan lahan, analisis pengembangan, pengelolaan pengembangan dan negosiasi atas persetujuan *joint venture*.

Tindakan Strategi

Tindakan utama yang dibutuhkan untuk mendukung penyampaian strategi ini dirangkum di bawah ini:

- *Stakeholder engagement* – Perusahaan akan melakukan komunikasi secara reguler dengan *stakeholder* pemerintah untuk mengadvokasi kekuatan untuk mendorong pembaharuan perkotaan dan *value capture* di sekitar stasiun MRT Jakarta. Hal ini mencakup:
 - » Kontribusi lahan Pemerintah;
 - » Akusisi lahan oleh Perusahaan atas haknya;
 - » Mendefinisikan peran Perusahaan dalam perencanaan penggunaan lahan di sekitar stasiun MRT Jakarta;
 - » Menetapkan skema *transferrable density bonus rights*; dan
 - » Mengeplorasi pilihan untuk *value capture* termasuk *value capture* dan *benefitted area levies*.
- *Capability building* – Perusahaan akan membangun kemampuan dalam pengembangan *real estate* untuk mendukung identifikasi dan analisis, serta negosiasi atas pengaturan komersial, untuk peluang *transit oriented development*.
- *Governance frameworks* – Perusahaan akan menganalisis proyek yang sesuai dan persetujuan internal atas proses yang berlaku untuk setiap tahap siklus hidup proyek *transit oriented development*.
- *Develop commercial frameworks and negotiate outcomes* – Perusahaan akan menetapkan prinsip komersial pilihan untuk menghubungkan stasiun MRT Jakarta dengan pemilik lahan yang bersinggungan serta menegosiasikan kesepakatan untuk akses untuk mendukung strategi TOD Perusahaan.
- *Identify and acquire transit oriented development opportunities*

- TOD area;
- Providing and negotiating terms and conditions with developer partners; and
- Managing the Company's investment in TOD real estate.

The objective is to assure that the Company's investment in TOD will be limited in land and planning. The mechanism with the third party will be agreed where the parties are responsible for the management of the development process (issuing construction contracts, leasing and sales, debt financing arrangements and equity contribution, and others). The Company will retain the right to approval for all key decisions.

A decision on the property subsidiary development will be in the governance framework that maintains the Company's accountability and supervision. To support the implementation of these initiatives, the Company will hire a real estate professional who has experience in land selection and development analysis, the development management and negotiations over the joint venture agreements.

Strategic Action

The major action needed to support the delivery of this strategy is summarized below:

- *Stakeholder engagement* – The Company will communicate regularly with government stakeholders to advocate the authority to encourage urban renewal and value capture around MRT Jakarta stations. This includes:
 - » Contribution of government land;
 - » Land acquisition by the Company on its rights;
 - » Defining the Company's role in planning the use of lands surrounding MRT Jakarta stations;
 - » Establishing transferrable density bonus rights scheme; and
 - » Exploring options for value capture including value capture and benefitted levies area.
- *Capability building* – The Company will build the capacity in real estate development to support the identification, analysis and negotiation on commercial arrangements, for transit oriented development opportunities.
- *Governance frameworks* - The Company will analyze the appropriate project and internal approval process applied in every stage of the life cycle of transit oriented development project
- *Developing commercial frameworks and negotiating outcomes* – The Company will establish the commercial options principle to link MRT stations with land owners that intersects, also negotiate access agreements to support the Company's TOD strategy.
- *Identifying and acquiring transit oriented development*

- Perusahaan akan mengeksplorasi peluang untuk *Transit Oriented Development* di sepanjang koridor MRT Jakarta (Tahap 1 dan jalur *East West*). Hal ini termasuk mengidentifikasi kelebihan kepemilikan lahan oleh Pemerintah dan kurangnya pemanfaatan bidang lahan yang dapat diperoleh Perusahaan untuk penyampaian *Transit Oriented Development*.
- *Maximize revenue for advertising and adjacent-station retail*
 - Perusahaan akan memaksimalkan pendapatan *retail* dan *advertising* pada area transisi dan interkoneksi yang memungkinkan.

Menata Ulang Kawasan Transit Terpadu Dukuh Atas, Blok M dan Cipete

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan dengan konsep TOD, perlu dibuat perencanaan jangka panjang di level kawasan yang dituangkan dalam *masterplan* kawasan yang kemudian dijadikan acuan bagi pembuatan Panduan Rancang Kota atau *Urban Design Guideline* (UDGL). Adapun kawasan-kawasan yang dipilih mewakili 2 (dua) level kawasan TOD, yaitu kawasan transit level regional dengan ciri intermodanya yang diwakili oleh Stasiun Dukuh Atas dan Stasiun Blok M yang memiliki karakteristik aktivitas sebagai stasiun *interchange* dengan kompleksitas integrasi pengembangan infrastruktur moda transportasi umum yang tinggi; serta kawasan transit level kota yang diwakili oleh Stasiun Cipete yang diarahkan sebagai kawasan koridor perdagangan aktif di selatan Jakarta.

Pentingnya *masterplan* tersebut dilakukan di tahap-tahap awal agar dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik itu bagi pemerintah sebagai regulator dalam penentuan infrastruktur kawasan maupun pihak swasta agar dapat memperhitungkan investasinya dalam kawasan.

Masterplan tersebut telah mencakup antara lain:

- Rekomendasi jenis kegiatan dengan ragam aktivitasnya yang mendukung dan mengoptimalkan keberadaan MRT Jakarta dan Kawasan Transit Terpadu setiap stasiun.
- Evaluasi dan identifikasi keterhubungan pola pergerakan dan fasilitas jalur *pedestrian* dengan level berlapis/berganda (*multiple level*) dan integrasinya dengan moda transport lainnya.
- Kajian sinergis interaksi ruang terbuka hijau (*green system*), strategi lansekap ruang kota, wajah jalan (*streetscape*) dan *green corridor* dengan koridor pejalan kaki yang memberikan dampak optimum pada pola dan karakteristik pergerakan pada masing-masing kawasan transit terpadu, termasuk kualitas pelayanan dan kenyamanannya.
- Studi integrasi dan optimalisasi sistem MRT Jakarta dengan moda-moda transportasi lainnya (*multi-moda*) yang berada di dalam area stasiun.
- Perencanaan sistem dan tipologi parkir dan peluang penyediaan fasilitas *park and ride* yang kontekstual dengan tipe stasiun.
- Rekomendasi kebutuhan ruang dan intensitas pembangunan yang optimum.

opportunities - The Company will explore all opportunities for Transit Oriented Development along the MRT Jakarta corridors (Phase 1 and East West lanes). This includes identifying excess land ownership by the Government and the lack of land utilization that can be obtained by the Company for the delivery of Transit Oriented Development.

- Maximizing revenues from advertising and adjacent-station retail – The Company will maximize retail and advertising revenues at the possible transition and interconnection areas.

Redesigning Dukuh Atas, Blok M and Cipete Integrated Transit Areas

In the quest of area development with the TOD concept, there is need to make a long-term planning for the areas outlined in the master plan which will be used as reference for the preparation of Urban Design Guideline (UDGL). The areas chosen represent two (2) levels of TOD, namely: the transit area at regional level which the intermodes characteristics are represented by Dukuh Atas Station and Blok M Station with the activity characteristics as interchange station and integration complexity of development of infrastructure for high modes of public transportation; and the city level transit area represented by Cipete Station which is directed as an active trade corridor in South Jakarta.

It is important to prepare the masterplan in the initial stages in order to become a reference for all parties concerned, both the government as a regulator in determining the of regional infrastructure and private sectors to calculate their investments in the areas.

The Masterplan covers, among others:

- Recommendation on the types and variety of activities to support and optimize the presence of MRT Jakarta and the Integrated Transit Area of each station.
- Evaluation and identification of connectivity patterns of movement and pedestrian lane facilities with multiple levels and the integration with other modes of transport.
- Review of the synergistic interaction of green open space (*green system*), urban space landscape strategy, streetscape and green corridors with pedestrian corridors to provide optimum effects on the patterns and characteristics of the movement in each integrated transit area, including service quality and convenience.
- Study of MRT Jakarta system integration and optimization with other modes of transport (*multi-modes*) situated in the station areas.
- Planning the parking system and typology and the opportunity to provide park and ride facilities that are contextual to the type of station.
- Recommendation on the space requirements and optimum development intensity.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources



Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis organisasi, sejak awal pendiriannya Perusahaan telah ditetapkan menjadi BUMD dengan mandat membangun, mengoperasikan dan mengelola Sistem Perkeretaapian Perkotaan dan mengembangkan kawasan di seputar stasiun, depo, dan sekitarnya. Organisasi Perusahaan membutuhkan setidaknya 3 (tiga) kapabilitas organisasi, yaitu membangun dan mengembangkan Perusahaan dari *start-up organization* menjadi perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable corporation*); mengelola proyek pembangunan infrastruktur (*project management*); dan mewujudkan pengelolaan sistem operasi perkeretaapian yang berkelanjutan (*sustainable operation*).

Menyadari pentingnya peran personel yang kompeten untuk mewujudkan tujuan strategis organisasi melalui peningkatan kapabilitas organisasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia harus dikelola dalam sebuah *platform* yang terintegrasi. Hal tersebut yang mendasari manajemen Perusahaan bertekad membangun Sistem Manajemen SDM yang terintegrasi sebagai *platform* organisasi Perusahaan di masa depan dalam mewujudkan *Operation Readiness*.

Based on the organizational strategic analysis, since its establishment PT MRT Jakarta has been defined as Regional SOE (BUMD) with the mandate to build, operate and manage the Urban Railway System as well as develop the areas surrounding and nearby the stations and depo. The organization of PT MRT Jakarta requires at least 3 (three) organization capability, namely to build and develop the Company from a start-up organization to a sustainable corporation, to manage infrastructure development projects (project management) and to establish a sustainable railway operations system (sustainable operation).

Realizing the significant roles of competent personnel to realize the organization's strategic objectives, human resources should be managed in an integrated platform. This underlies the determination of the Company's management in developing an integrated HR Management System as the Company's future organization platform to realize its Operation Readiness.

Pengembangan organisasi secara bertahap terus dilakukan untuk dapat mewartakan kebutuhan Perusahaan. Perkembangan aktivitas operasional yang sejalan dengan kemajuan proyek pembangunan MRT Jakarta terus diimbangi dengan pertumbuhan organisasi, baik pertumbuhan vertikal promotif maupun pertumbuhan horisontal ekspansif. Beberapa keputusan manajemen terkait pengelolaan organisasi di sepanjang tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Organizational development is conducted gradually in order to accommodate the Company's needs. Operational activities are developed inline with MRT Jakarta construction project progress and continuously hand-in-hand with the Company's organizational growth, either promotive vertical or expansive horizontal. The management decisions related to organizational management throughout 2015 are shown in the table below:

No	Nama SK Subject of Decision Letter	Nomor SK Decision Letter No	Tanggal Date
1	Insentif Kinerja Tahunan Annual Performance Incentives	SK/015/BOD-MRT/III/2015	12 Maret 2015 March 12, 2015
2	Insentif Kinerja Tahunan Tahun 2014 The 2014 Annual Performance Incentives	SK/016/BOD-MRT/III/2015	12 Maret 2015 March 12, 2015
3	Kebijakan Cuti Besar Grand Leave Policy	SK/017/BOD-MRT/III/2015	12 Maret 2015 March 12, 2015
4	Penyesuaian Remunerasi Karyawan Employee Remuneration Adjustment	SK/035/BOD-MRT/III/2015	26 Mei 2015 May 26, 2015
5	Perubahan Struktur Organisasi Changes to Organization Structure	SK/035/BOD-MRT/VI/2015	16 Juni 2015 June 15, 2015
6	Perubahan Formula Perhitungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Karyawan Changes to BPJS Ketenagakerjaan Calculation Formula for Employees	SK/046/BOD-MRT/VI/2015	1 Juli 2015 July 1, 2015
7	Perubahan Formula Perhitungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Karyawan Changes to BPJS Kesehatan Calculation Formula for Employees	SK/047/BOD-MRT/VI/2015	1 Juli 2015 July 1, 2015
8	Penetapan Kebijakan Fasilitas Kesehatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan Sistem <i>Administration Service Only (ASO)</i> Policy Determination on the Health Facility for the Board of Directors and the Board of Commissioners with Administration Service Only System.	SK/073/BOD-MRT/IX/2015	25 September 2015 September 25, 2015
9	Standar Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris Official Business Trip Standards for the Board of Directors and the Board of Commissioners	SK/074/BOD-MRT/IX/2015	25 September 2015 September 25, 2015
10	<i>Standar Operasional Prosedur Divisi Human Resource & General Affairs Management</i> <i>Standard Operational Procedures for Human Resources and General Affairs Management Division</i>	SK/079/BOD-MRT/X/2015	6 Oktober 2015 October 6, 2015
11	Perubahan Penetapan <i>Person Grade</i> <i>Changes to Person Grade Determination</i>	SK/090/BOD-MRT/XII/2015	1 Desember 2015 December 1, 2015
12	Perubahan Penetapan <i>Job Grade</i> <i>Changes to Job Grade Determination</i>	SK/091/BOD-MRT/XII/2015	1 Desember 2015 December 1, 2015
13	Perubahan Penempatan Personil dalam Struktur Organisasi Changes to Placement of Personnel in the Organization Structure	SK/092/BOD-MRT/XII/2015	1 Desember 2015 December 1, 2015

Struktur Organisasi

Struktur organisasi berkembang seiring dengan kebutuhan Perusahaan. Pada tahun 2015, organisasi Perusahaan mengalami perubahan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/042/BOD-MRT/VI/2015. Berikut terlampir perbandingan perubahan struktur organisasi pada tahun 2014 dan 2015.

Organization Structure

The organization structure evolves within the needs of the Company. In 2015, there was a change in the Company's organization as stipulated in SK/042/BOD-MRT/VI/2015. The following is the comparison between organization levels in the 2014 and 2015.

Demografi Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2015 mencapai 92 orang, meningkat 17 orang dibandingkan jumlah karyawan di tahun 2014 yang sebesar 54 orang. Penambahan terbesar berada di level Spesialis, mencapai 15 orang. Sementara jumlah karyawan yang mengundurkan diri di tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) orang, atau setara dengan *turnover ratio* sebesar 3,26%. Rasio ini menurun jauh dibandingkan tahun 2014, dimana *turnover ratio* pada tahun tersebut mencapai 6,67%.

Di bawah ini disajikan jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jabatan manajer senior hingga karyawan kontrak.

Employee Demographics

The number of the Company's employees as of December 31, 2015 was 92, an increase by 17 persons compared to the number of employees in 2014 amounting to 54 persons. The highest increase was the addition of 15 persons in the level of specialist. While the number of employees who resigned in 2015 was three (3) persons, or equivalent to 3.26% turnover ratio. This ratio declined considerably compared with 6.67% turnover ratio in 2014.

The following are the number and composition of employees according to their position from senior manager to contract employees.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	2014	2015	Organization Level
Kepala Divisi	9	8	Division Head
Kepala Departemen	1	8	Department Head
Spesialis	57	72	Specialist
Staf	5	4	Staff
Jumlah	75	92	Total

Employee Composition by Organization Level

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Gender	2014	2015	Gender
Pria	55	67	Male
Wanita	20	25	Female
Jumlah	75	92	Total

Employee Composition by Gender

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2014	2015	Education Level
S3	1	1	Doctorate
S2	17	19	Master
S1	50	65	Bachelor
D3	4	4	D3
SMA / SMK	3	3	High School
Jumlah	75	92	Total

Employee Composition by Education Level

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2014	2015	Employment Status
Tetap	58	85	Permanent
Kontrak	17	7	Contract
Sub Jumlah Sub Total	75	92	Sub Total
<i>Outsourcing</i>	9	15	Outsourcing
Jumlah	84	107	Total

Employee Composition by Employment Status

Sistem Manajemen SDM yang Terintegrasi

Sistem Manajemen SDM yang Terintegrasi, atau *Human Resource (HR) Integrated System* terdiri dari 5 (lima) pilar proses utama pengembangan SDM, yaitu *foundation, acquisition, development, maintenance, dan separation*; dimana *HR Enabling System* menjadi pengikat dari kelima pilar tersebut.

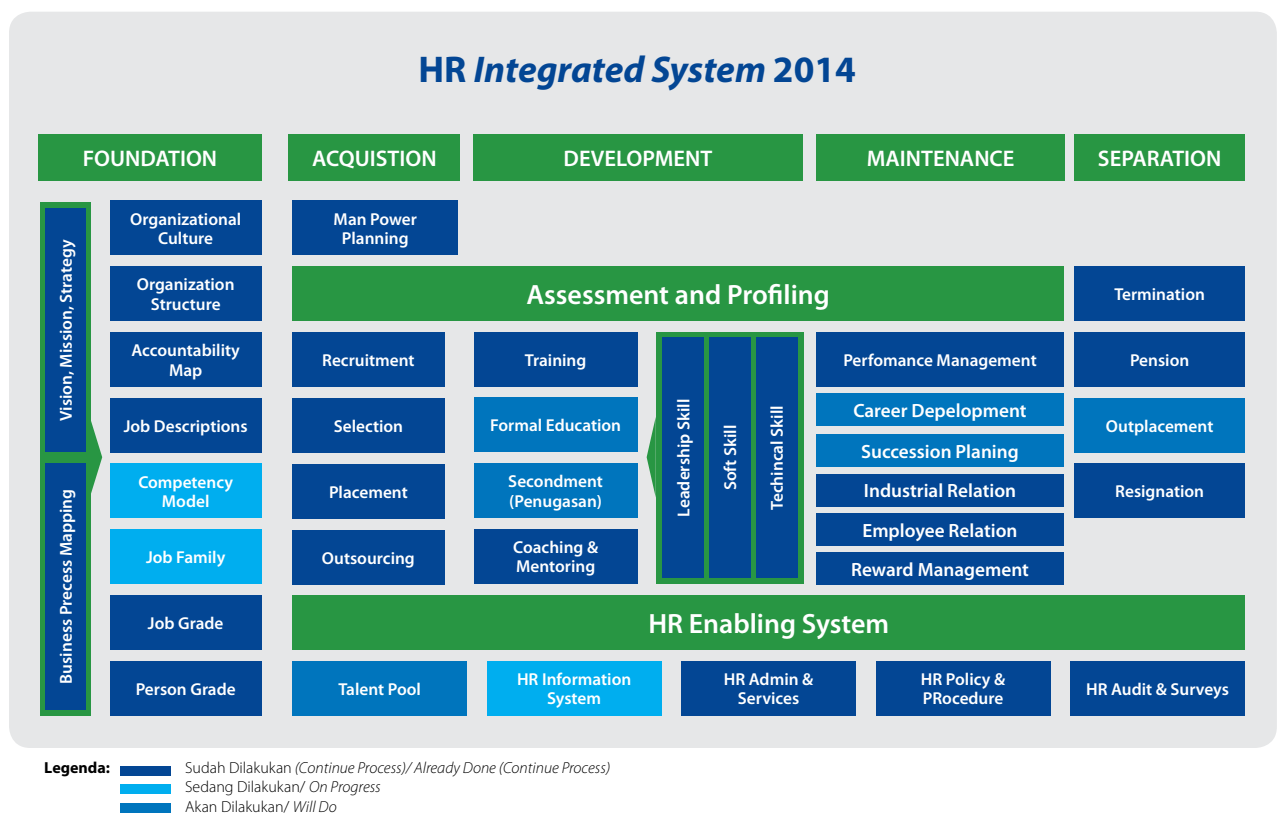
HR Integrated System mengalami perkembangan seiring dengan berkembang organisasi Perusahaan. *HR Integrated System* yang telah dikembangkan di tahun 2015 dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Integrated HR Management System

Integrated HR Management System consists of five (5) main pillars of the HR development process, namely: Foundation, Acquisition, Development, Maintenance, and Separation; the five pillars are bonded with the HR Enabling System.

HR Integrated System has evolved along with the Company's organizational development. HR Integrated System developed in 2015 was presented in the chart below.

HR Integrated System PT MRT Jakarta



Standard Operational Procedure (SOP) SDM

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan sebagai penunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas di Perusahaan, dibutuhkan sebuah acuan baku yang memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan serta menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat sasaran, menjamin kemudahan dan kelancaran secara prosedural. Untuk itu, disusun beberapa *Standard Operational Procedure (SOP)* yaitu:

1. SOP Perjalanan Dinas;
2. SOP Fasilitas Kesehatan;
3. SOP *Performance Management System (PMS)*;

HR Standard Operational Procedure (SOP)

In order to achieve effective and efficient performance and to support a smooth implementation of duties in the Company, there is a need of a standard reference that provides certainty and uniformity in the implementation of activities and ensures work completion in accordance with the predetermined time and on target, and also to ensure procedural smoothness. To that end, the Company has arranged several Standard Operating Procedure (SOP), namely:

1. SOP for Official Travel;
2. SOP for Health Facilities;
3. SOP for Performance Management System (PMS);

4. SOP Rekrutmen;
5. SOP *Selection & Placement*;
6. SOP *Training*.

Rekrutmen

Perencanaan SDM, atau *Man Power Planning* (MPP) dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap jabatan pada struktur organisasi, beban kerja pada jabatan yang bersangkutan, *turnover* tenaga kerja, dan/atau produktivitas organisasi. Penyusunan MPP dilakukan untuk menjadwalkan rencana program perekrutan.

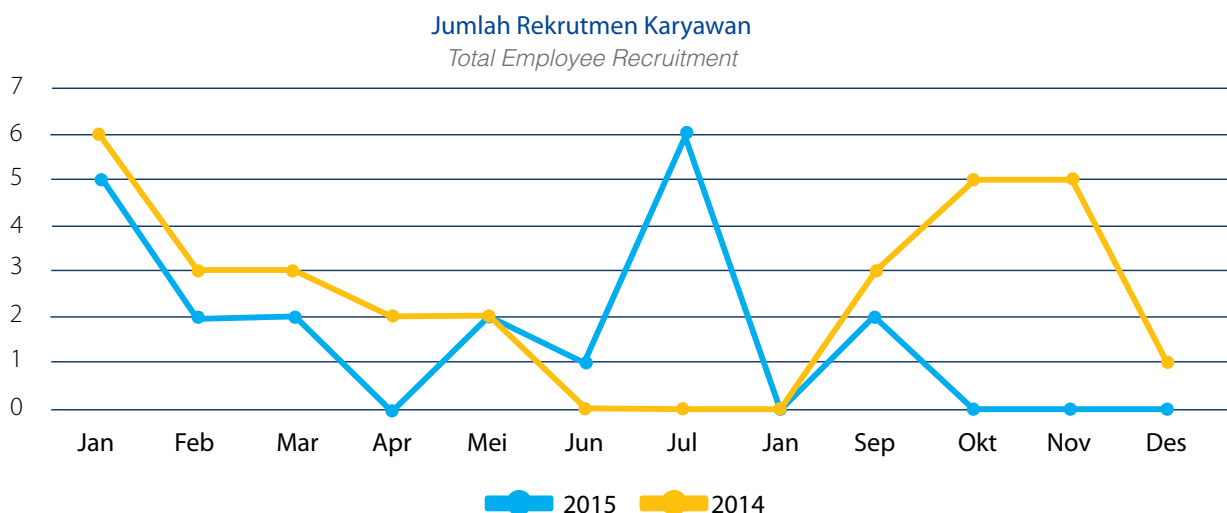
Di tahun 2015, Perusahaan melakukan rekrutmen karyawan baru sebanyak 17 orang, turun dibandingkan rekrutmen karyawan baru tahun 2014 yang mencapai 30 orang. Rekapitulasi rekrutmen karyawan baru di sepanjang tahun 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

4. SOP for Recruitment;
5. SOP for Selection & Placement;
6. SOP for Training.

Recruitment

Manpower Planning (MPP) is based on positional consideration in the organization structure, the workload, employee turnover, and/or organizational productivity. The MPP is prepared to schedule the recruitment program plan.

In 2015, the Company recruited 17 new employees, a decrease compared with 30 new employees recruited in 2014. Recapitulation of the new employee recruitment throughout 2015 is presented in the chart below.



Pola penjarangan karyawan baru dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar yang kemudian tersaring melalui proses rekrutmen dalam sistem penerimaan karyawan Perusahaan. Perusahaan menggunakan kegiatan *job fair* maupun *job ads* dan media sosial sebagai alat untuk melakukan penjarangan calon karyawan baru. Proses psikotest, baik perorangan maupun massal juga dilakukan Perusahaan untuk dapat menjangkau potensi SDM terbaik.

The hunting for prospective employees is carried out in cooperation with external parties followed by the recruitment process in the Company's recruitment system. The Company uses the job fair or job ads and social media as tools to search prospective employees. Psychological tests, both individual and in groups, are also performed for the Company to attract the best human resource potential.

Pelatihan Karyawan dan Program Peningkatan Kompetensi

Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Sesuai standar kompetensi yang menjadi bagian dari *HR Integrated System*, Perusahaan membagi jenis pelatihan ke dalam 3 (tiga) kategori besar, yaitu *hard/technical skill*, *soft skill* dan *leadership* atau kepemimpinan.

Employee Training and Competency Improvement Program

Training is one of the efforts to improve the quality of human resources in performing their work. Employees, whether new or current, need to attend training because of work demands that may change due to changes of work environment, strategies, and other factors. In line with the standart of competencies which is a part of HR Integrated System the Company divides training into 3 major types: hard/technical skill, soft skill and leadership.

Jumlah pelatihan di tahun 2015 meningkat, dari 63 pelatihan di tahun 2014 menjadi 85 pelatihan. Peningkatan ini terutama dilakukan pada *hard/technical skill* dengan peningkatan mencapai 18 pelatihan, sementara jenis pelatihan *soft skill* meningkat 6 pelatihan.

The number of trainings in 2015 increased from 63 trainings in 2014 to 85 trainings in 2015. This was due to an increase by 18 trainings on hard/technical trainings and 6 trainings on soft skills.

Jumlah Pelatihan

Total Trainings

Jenis Pelatihan Type of Training	2014		2015	
	Jumlah Pelatihan Total Training	%	Jumlah Pelatihan Total Training	%
Technical Skill	53	84%	84	96%
Soft Skill	8	13%	2	2%
Kepemimpinan Leadership	2	3%	2	2%
Jumlah Total	63	100%	88	100%

Jumlah Training per Bulan dan Komposisi Berdasarkan Lokasi Dalam dan Luar Negeri Selama Tahun 2015

Monthly Total Trainings and Training Composition based on Location (at Home / Overseas) throughout 2015

Bulan Month	Dalam Negeri At Home	Luar Negeri Overseas	Jumlah Pelatihan Total Training	Jumlah Peserta Total Participants
Januari	4	1	5	9
Februari	9	0	9	12
Maret	5	2	7	17
April	10	1	11	19
Mei	6	4	10	12
Juni	7	0	7	11
Juli	2	1	3	6
Agustus	7	2	9	14
September	4	1	5	7
Oktober	6	3	9	26
November	6	4	10	14
Desember	3	0	3	26
Jumlah	69	19	88	173

MRT Development Program (MDP)

MRT *Development Program* (MDP) adalah salah satu program pengembangan dari Perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang perkeretaapian serta membentuk rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemampuan bekerja dalam kelompok serta terpimpin kepada SDM penyelenggara perkeretaapian. Target peserta dalam program ini mencakup seluruh karyawan mulai dari level staf, spesialis hingga kepala divisi; termasuk kepada karyawan baru maupun karyawan lama yang belum mengetahui tentang perkeretaapian.

MRT Development Program (MDP)

MRT Development Program (MDP) is one of the Company's development program which aims to provide basic knowledge of railways and to establish a sense of responsibility, discipline and ability to work in groups and guided in the HR of railways organizer. Target participants in this program covers all employees from the staff level, the specialist to head of the division; including new employees and current employees lacking the knowledge of the railways.

Program MDP ini dilaksanakan di Madiun, bekerja sama dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) yang berlokasi di Jl Tirtayasa Madiun. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dengan setiap *batch* atau angkatan berjumlah 22 karyawan selama 1 (satu) minggu dengan 50 jam pelajaran, dengan Mata Pelajaran sebagai berikut:

MDP program is held at Madiun, in cooperation with the Indonesian Railways Academy (IRA) located on Jl Tirtayasa Madiun. The program is conducted in batches, each batch consists of 22 employees and held for 1 (one) week with 50 hours of lessons, with Subjects as follows:

No.	Mata Pelajaran	Teori Theory	Praktek Practice	Subject
A.	Kelompok Inti			Core Group
1.	Peraturan Perundang-Undangan Perkeretaapian	3		Railways Legislation
2.	Pengetahuan Dasar Prasarana Perkeretaapian	4	2	Basic Knowledge of Railways Infrastructure
3.	Pengetahuan Dasar Sarana Perkeretaapian	5	2	Basic Knowledge of Railways Facilities
4.	Keselamatan Perkeretaapian	3		Railways Safety
5.	Pengetahuan Dasar Operasi Perkeretaapian	5	2	Basic Knowledge of Railways Operations
B.	Kelompok Penunjang			Supporting Group
1.	Pengembangan Karakter Karyawan	2	2	Employee Character Development
2.	Dinamika Kelompok		4	Group Dynamics
3.	Pembentukan Karakter		16	Character Building
	SUB TOTAL	22	28	SUB TOTAL
	TOTAL		50	TOTAL

Berikut ini penjelasan Mata Pelajaran serta Kompetensi Dasar yang akan dicapai:

Subjects of Study and Basic Competencies to be achieved are as follows:

No.	MATA DIKLAT TRAINING'S MATERIAL	KOMPETENSI DASAR BASIC COMPETENCY	ALOKASI WAKTU TIME ALLOCATION		KEGIATAN PEMBELAJARAN TRAINING ACTIVITY	INDIKATOR HASIL BELAJAR INDICATOR of TRAINING OUTCOME	MATERI/ POKOK/MATERI PEMBELAJARAN TRAINING MATERIAL	METODE AJAR TRAINING METHOD	ALAT AJAR, REFERENSI DAN PUSTAKA TOOLS, REFERENCE
			T	P					
A. KELOMPOK INTI/ CORE GROUP									
1.	Peraturan Perundang-Undangan Perkeretaapian / Regulation in Railway System	Mengetahui dan memahami peraturan perundangan terkait perkeretaapian/ Knowing and understanding regulation in railway system	3		1. Mengurangi tujuan pembelajaran mata diklat 2. Menjelaskan tentang Peraturan Perundangan di bidang perkeretaapian 3. Tanya jawab 1. Reduce objective of the training 2. Explain the regulation in railway system 3. Ask and answer	Peserta mampu menerapkan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian terhadap permasalahan yang dihadapi Participant can implement the railway system regulation	a. Undang-Undang No. 23 tahun 2007 b. PP No. 56 Tahun 2009 c. PP No. 72 Tahun 2009 d. Peraturan Menteri Perhubungan a. law No. 23 of 2007 b. PP No. 56 Year 2009 c. Government Regulation No. 72 Year 2009 d. Regulation of the Minister of Transportation	Ceramah Tanya jawab Latihan dan diskusi Lecture Ask & Answer Drill & discussion	Proyektor Komputer Projector Computer
2.	Pengetahuan Dasar Prasarana Perkeretaapian Basic knowledge of railway infrastructure	Mengetahui, memahami dan mampu menyebutkan jenis-jenis serta fungsi prasarana perkeretaapian Know, understand and can mention types and functions of railway infrastructure	4	2	1. Menguraikan tujuan pembelajaran mata diklat 2. Menjelaskan tentang jenis-jenis Prasarana beserta fungsinya 1. Describe the training objectives 2. Describe type of infrastructure and its functions	Peserta mampu menyebutkan jenis-jenis prasarana dan fungsinya Participant can describe type of infrastructure and its functions	1. Jalan Rel 2. Jembatan 3. Terowongan 4. Stasiun 1. Railway track 2. Bridge 3. Tunnel 4. Station	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Latihan dan diskusi 1. Lecture 2. Ask & Answer 3. Drill & Discussion	1. Proyektor 2. Komputer 3. Prasarana KA 4. Alat Ukur Prasarana KA 1. Projector 2. Computer 3. Train Infrastructure 4. Measurement of Rain infrastructure

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

3.	Pengetahuan Dasar sarana Perkeretaapian Basic knowledge of railway infrastructure	Mengetahui, memahami dan mampu menyebutkan jenis-jenis dan fungsi prasarana perkeretaapian Understand and can mention type and function of railway infrastructure	5	2	1. Menguraikan tujuan pembelajaran mata diklat 2. Menjelaskan tentang jenis-jenis Prasarana beserta fungsinya 3. Tanya jawab 1. Describe the training's objective 2. Describe type of infrastructure and its function 3. Ask and answer	Peserta mampu menyebutkan jenis-jenis prasarana dan fungsinya Participant can mention type of infrastructure and its function	1. Sarana Perkeretaapian Berpenggerak 2. Sarana perkeretaapian 3. Non Berpenggerak Mobile Railway infrastructure Non-mobile railway infrastructure	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Latihan dan diskusi 1. Lecture 2. Answer Drill & discussion	1. Proyektor 2. Komputer 3. Sarana KA 4. Alat Ukur Sarana KA 1. Projector 2. Computer 3. Train infrastructure 4. Measurement of train infrastructure
4.	Keselamatan perkeretaapian Railway safety	Memahami mampu menjelaskan aspek dibidang perkeretaapian Understand and can describe aspect of railway system	3		1. Menguraikan tujuan pembelajaran mata diklat 2. Mengetahui aspek keselamatan perkeretaapian 3. Tanya jawab 1. Describe the training's objective 2. Understand aspect of railway safety 3. Ask and answer	Peserta mampu menyebutkan dan menjelaskan aspek-aspek keselamatan perkeretaapian Participant can mention & explain aspect of railway safety	Manajemen Resiko Risk Management	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Latihan dan diskusi 1. 1 Lecture 2. 2. Ask & Answer 3. drill & discussion	1. Proyektor 2. Komputer 1. Projector 2. Computer
5.	Pengetahuan dasar Operasi Perkeretaapian Basic knowledge of railway operation	Mengetahui, memahami seerta mampu menjelaskan pola operasi perkeretaapian beserta unsur-unsur penunjang Understand and can describe railway operation pattern and its infrastructure elements	5	2	1. Menguraikan tujuan pembelajaran mata diklat 2. Mengetahui Dasar Operasi 3. Tanya jawab 1. Describe the training's objective 2. Understand basic operation 3. Ask and answer	Peserta mampu menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur pengoperasian perkeretaapian serta sistem operasinya Participant can mention & explain operational elements of railway & its operation	1. Persinyalan 2. Telekomunikasi 3. Kelistrikan 4. GAPEKA 5. Pola Operasi 1. Signal 2. Telecommunication 3. Electricity 4. GAPEKA 5. Operational Pattern	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Latihan dan diskusi 1. Lecture 2. Ask & Answer 3. Drill & discussion	1. Proyektor 2. Komputer 3. Komponen Operasi KA 1. Projector 2. Computer 3. Operational components of a train
A. Kelompok Penunjang/ Supporting Group									
1.	Pengembangan Karakter Karyawan Character Building of the employee	Terbentuknya SDM perkeretaapian yang memiliki sikap kedisiplinan, profesional, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan jujur Formation of railway human resources who are discipline, professional, dedicated, responsible and honest	2	2	1. Menguraikan tujuan pembelajaran mata diklat 2. Melakukan permainan pengembangan karakter 1. Describe the training objectives 2. Conduct a character development game	Peserta mampu terbentuk menjadi pribadi yang berdisiplin dan bertanggung jawab Participant transform into disciplined and responsible individual	Profesionalisme. Leadership Professionalism Leadership	1. Ceramah 2. Permainan-permainan 1. Lecture 2. Games	1. Proyektor 2. Komputer 3. Peralatan permainan 1. Projector 2. Computer 3. Games equipments and tools
2.	Dinamika Kelompok Group dynamic	Terbentuknya SDM Perkeretaapian yang mampu bekerja dalam kelompok dan berkomunikasi dengan baik serta mampu bekerja secara terpinpin Formation of Railways HR who are capable to work in a group with good communicate skill and are able to work in a guided formation		4	1. Menguraikan tujuan pembelajaran mata diklat 2. Melakukan permainan Dinamika Kelompok 1. Describe the training objectives 2. Conduct a group dynamic game	Peserta mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan efisien Participant can work together with good and efficient communication skill	Struktur, komunikasi, teamwork dan kualitas Structure, communication, team work and quality	1. Ceramah 2. Permainan-permainan 1. Lecture 2. Games	Peralatan permainan Game's equipments

	Terbentuknya SDM perkeretaapian berintegrasi tinggi dan loyal terhadap instansi guna mencapai perbaikan kualitas secara berkelanjutan		Outbond PBB	Peserta mampu bekerjasama, tangguh dan berkomunikasi dengan baik	Leadership, service, excellent	1. Program Harian 2. Pembinaan Kegiatan Baris-berbaris 3. Outbond 4. Lintas Medan	1. Peralatan Outbond 2. Perlengkapan Lapangan Peserta	
3.	Pembinaan Karakter		16	Outbond PBB	Participant can work together, tough, with a good communication skill	Leadership, service, excellent	1. Daily Development Program 2. Marching activity 3. Outbound 4. Cross-Terrain	1. Outbound's equipments 2. The participants equipment
	Character Building							

Pelaksanaan MDP di tahun 2015 dilakukan dalam 2 (dua) *batch* atau angkatan, yaitu *Batch* 1 yang dilaksanakan pada 24 - 31 Oktober 2015 dan *Batch* 2 pada 12 - 19 Desember 2015, dengan jumlah peserta 22 orang di setiap *batch*-nya.

In 2015 MDP was conducted in 2 batches: Batch 1 on 24-31 October 2015 and Batch 2 on 12-19 December 2015, each batch was attended by 22 persons.

Management Trainee

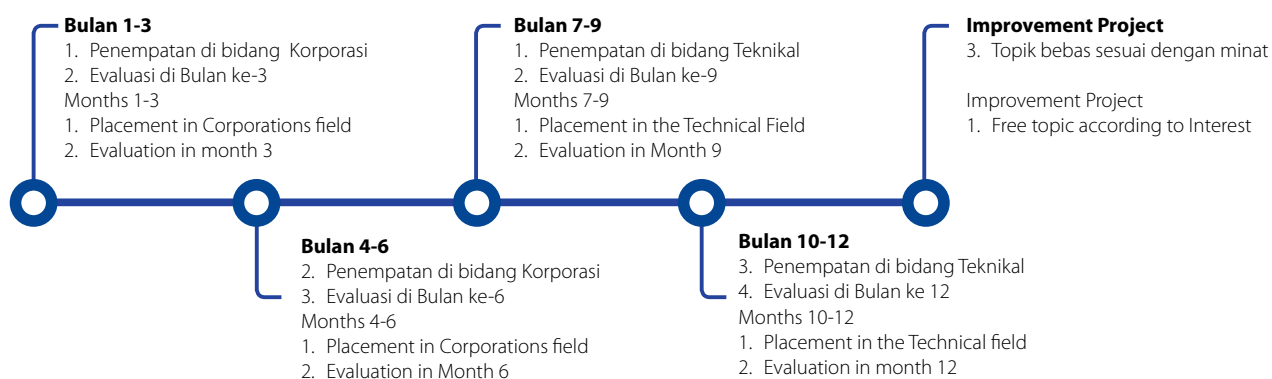
Perusahaan juga mengembangkan Program *Management Trainee* (MT) sebagai salah satu upaya persiapan dan pengembangan organisasi untuk memasuki fase ke-2 dari proyek pembangunan MRT Jakarta.

Management Trainee

The Company also developed Management Trainee (MT) Program as one of the preparatory efforts and organization development to enter the 2nd phase of MRT Jakarta project construction.

Pelatihan ini merupakan pelatihan manajerial, dengan sasaran meningkatnya pemahaman peserta program akan organisasi Perusahaan secara makro, baik pemahaman korporasi maupun teknis. Berikut ini adalah *timeline* Program MT yang dikembangkan Perusahaan.

This training is a managerial training with the goal to increase the understanding of program participants on the Company's organizational in macro, both corporate and technical understandings. The timeline of MT program developed by the Company is as follows:



Investasi di Bidang Pengembangan SDM

Di bawah ini disajikan investasi Perusahaan pada tahun 2015 dan perbandingnya dengan tahun 2014 untuk pengembangan kompetensi SDM.

HR Development Investment

The following is the Company's HR Development Investment in 2015 compared to 2014.

Investasi dalam Pengembangan Kompetensi SDM

Investment in HR Development

	2015 (Rp)	2014 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (%) Increase (Decrease) (%)
Pengembangan Kompetensi SDM HR Competency Development	1.406.515.790	1.099.934.563	27,87%

Adanya peningkatan sebesar 27,87% untuk investasi bidang pengembangan kompetensi SDM di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 menunjukkan komitmen Perusahaan dalam mengupayakan peningkatan SDM, khususnya terkait persiapan SDM untuk tahapan pengoperasian dan pemeliharaan saat MRT Jakarta beroperasi.

The 27.87% increase in HR competence development investment in 2015 compared to 2014 demonstrated the Company's commitment to pursuing human resource development, particularly related to the preparation of human resources for the operation and maintenance phases upon the operations of MRT Jakarta.

Performance Management System

Performance Management System

Perusahaan terus mengembangkan pertumbuhan organisasi untuk dapat menjawab tantangan yang dihadapi baik disaat ini maupun di masa depan. Penciptaan *high performing organization* membutuhkan sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi sebagai kerangka dasar pengelolaan sumber daya manusia di Perusahaan, yang mendukung terciptanya budaya kinerja dari para pegawai. Salah satu elemen dalam sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi tersebut adalah *Performance Management System* (Sistem Pengelolaan Kinerja). Tujuan dibangunnya Sistem Manajemen Kinerja meliputi:

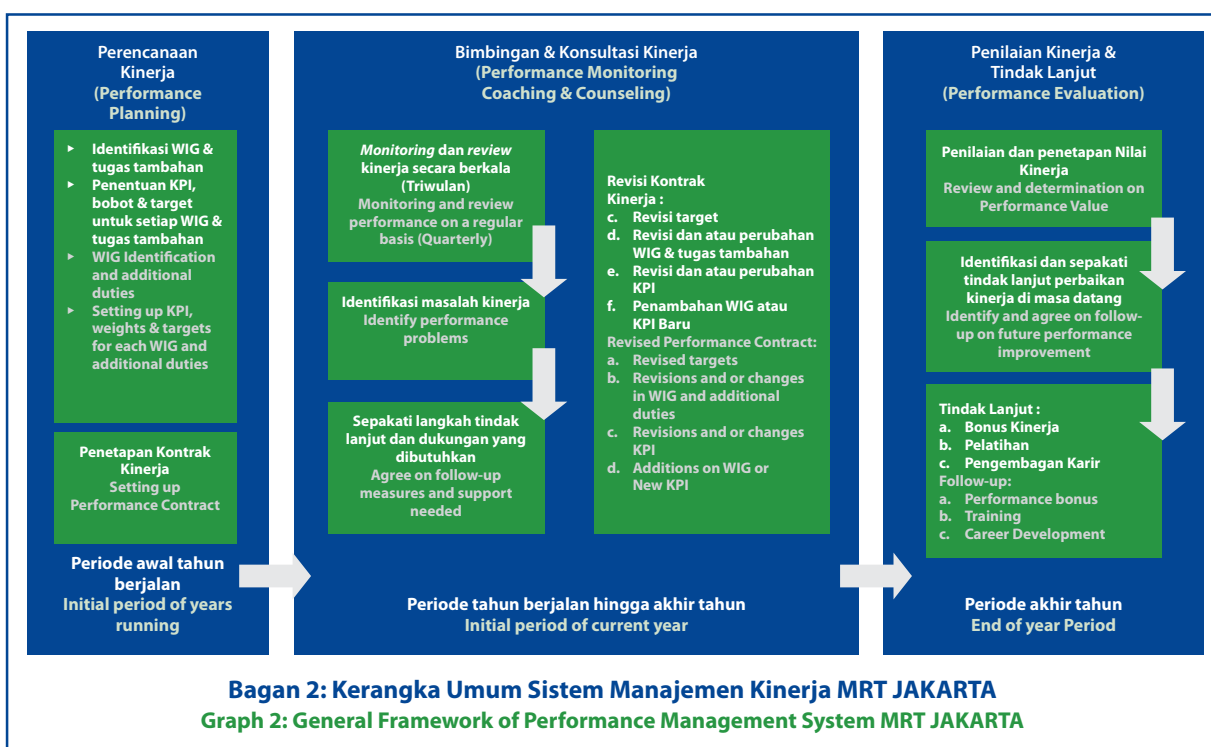
The Company continuously develops the growth of the organization to be able to answer the challenges both in present and in the future. To establish high-performing organization requires an integrated HR management system as the basic framework of human resource management in the Company, which supports the creation of employees performance culture. One of the element in an integrated HR management system is the Performance Management System. The objectives of Performance Management System establishment are as follows:

- Untuk mendukung tercapainya strategi bisnis MRT Jakarta melalui *high performing organization*.
- Untuk mendukung filosofi imbal jasa yang didasarkan kepada hasil kinerja dengan cara membantu manajemen untuk membedakan antara pegawai yang sangat baik kinerjanya (*high performers*) dengan pegawai lainnya (*low performers*).
- Untuk menciptakan kejelasan tentang apa yang diharapkan dari manajemen dan bagaimana setiap individu dapat memberikan kontribusi untuk mendukung pencapaian korporasi.
- Sebagai alat bagi manajemen dalam mengembangkan kompetensi dan karir pegawai.
- Untuk menciptakan bentuk komunikasi yang lebih baik antara atasan dan pegawai, serta menekankan peran penting atasan dalam pengembangan karir bawahan.

- To support the achievement of MRT Jakarta's business strategy through high performing organization.
- To support performance-based reward philosophy by helping the management to classify between high performers and low performers.
- To establish clarity on management's expectation and how should individuals contribute to support the Company's achievement.
- As a tool for the management in developing employee competency and career.
- To establish better communication between supervisors and employees as well as underlines the important roles of supervisors in their subordinates career development.

Mengacu kepada kaidah umum pengelolaan kinerja, siklus *performance management* yang berlaku di MRT terdiri dari 4 tahapan, yaitu: perencanaan kinerja (*performance planning*), monitor pencapaian kinerja (*performance monitoring*), bimbingan & konsultasi kinerja (*performance coaching & counselling*) dan penilaian kinerja (*performance evaluation*).

Referring to the general rules of performance management, the performance management cycle in MRT consists of 4 stages: performance planning; performance monitoring; performance coaching & counselling and performance evaluation.



Penilaian melalui sistem manajemen kinerja Perusahaan dilakukan dengan indikator *Wildly Important Goals* (WIG) dan *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2015 yang dapat disampaikan sebagai berikut:
 A. WIG Korporasi

Assessment through the Company's performance management system is carried out by using the 2015 Wildly Important Goals (WIG) and Key Performance Indicator (KPI) as follows:
 A. Corporate WIG

No	WIG Korporasi Corporate WIG	KPI
1	Progres Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Fase 1 Phase 1 Construction Work Completion Progress	Persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi Struktur Layang (Paket 101, 102 dan 103) Percentage of Escalated Structure Construction Work Completion (101, 102 and 103 packages)
		Persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi Struktur Bawah Tanah (Paket 104, 105 dan 106) Percentage of Underground Structure Construction Work Completion (104, 105 and 106 packages)
		Persentase kesesuaian kegiatan konstruksi dengan standar <i>Health Safety & Environment</i> (HSE) Percentage of Construction Activity Compliance with Occupational Health, Safety and Environment Standards
2	Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Perusahaan Effectiveness and Efficiency in Corporate Fund Management	Persentase realisasi penyerapan dana pinjaman Percentage of loan fund absorption realization
		Persentase efisiensi biaya Percentage of cost efficiency

No	WIG Korporasi Corporate WIG	KPI
3	Implementasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation	Opini Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 Opinion of the 2015 Financial Statements Jumlah SOP dan kebijakan Perusahaan yang ditandatangani Direksi Total SOP and Company SOP signed by the Board of Directors
B.	WIG Generik WIG Generik hanya diberikan kepada Kepala Divisi dan Kepala Departemen.	B. Generic WIG Generic WIG is only provided to Division Heads and Departments Heads.

No	Tanggung Jawab Generik Generic Responsibility	Bobot WIG WIG Weight	KPI
1		100%	Persentase kesesuaian peruntukan anggaran dengan realisasi Percentage of the compliance of budget purpose and the realization
	Pelaksanaan Tanggung Jawab Umum Kepala Unit Kerja Execution of Work Unit's General Responsibility		Indeks Iklim Kerja Working climate index Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index Persentase kelengkapan update peta risiko Percentage of Risk Mapping Update Completeness
C.	WIG Risk Officer WIG Risk Officer hanya diberikan kepada Risk Officer yang ada di setiap divisi.		C. Risk Officer WIG Risk Officer's WIG is only provided to the Risk Officer in each Division.

No	WIG Divisi Division WIG	Target	KPI
1	Implementasi Risk Management di setiap unit kerja Risk Management Implementation in each work unit	100%	Pelaksanaan <i>updating Risk Register</i> dan <i>Monitoring</i> Rencana Mitigasi oleh Risk Officer Implementation of Risk Register Updating and Risk Monitoring Plan by Risk Officer
		100%	Pelaksanaan <i>Critical/Incidental Risk</i> dan Rencana mitigasinya oleh Kepala Divisi/Departemen Implementation of Critical /Incidental Risk and Mitigation Plan by Division/Department Head

Hingga akhir Desember 2015, Sistem Manajemen Kinerja Perusahaan telah menyelesaikan penilaian kinerja akhir seluruh divisi/departemen dan telah melakukan perhitungan kinerja akhir sebagai dasar pelaporan kepada manajemen terkait *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2015.

Remunerasi

Sebagai kelanjutan dari hasil *Job Grade* dan *Person Grade* maka disusunlah sistem remunerasi, dimana setiap karyawan tetap dalam periode 1 (satu) tahun akan menerima:

- Gaji pokok diberikan setiap bulannya, selama 12 bulan.
- Tunjangan Pendidikan 1 (satu) kali Gaji Pokok.
- Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Gaji Pokok.
- Tunjangan Akhir Tahun 1 (satu) kali Gaji Pokok.
- Tunjangan Cuti 1 (satu) kali Gaji Pokok.

By end of December 2015, the Company's Performance Management System has completed final assessment of the performance of all divisions/departments and carried out the final performance calculation as a basis for reporting to the management on the 2015 Key Performance Indicator (KPI).

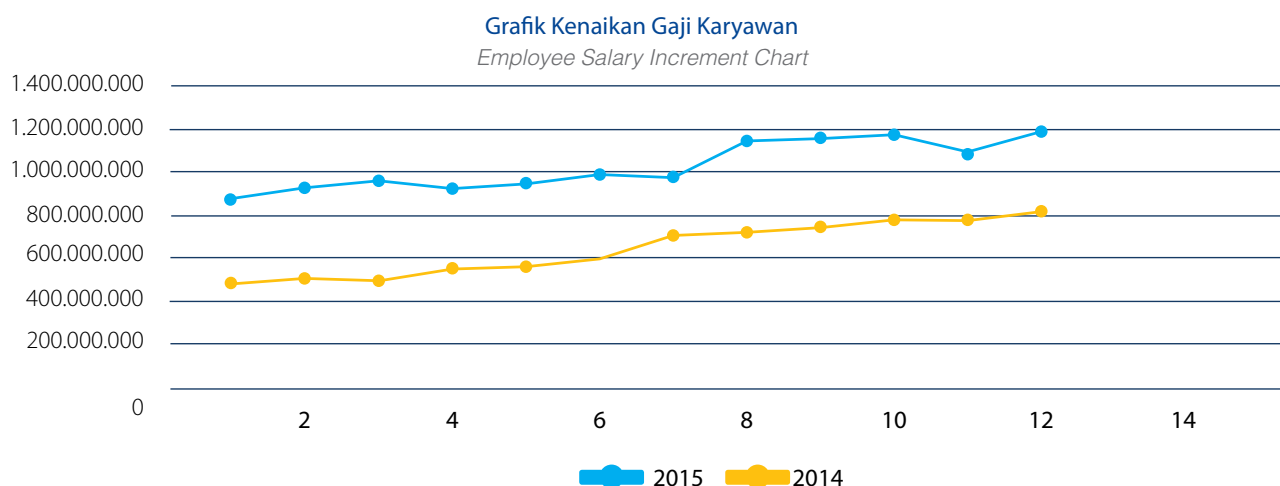
Remuneration

The remuneration system was established as a follow up of the Job Grade and Person Grade process, providing that within one year, permanent employees will receive:

- 12 Months basic salary
- Education Allowance 1x Salary
- Religious Festive Allowance 1x Salary
- End of Year Allowance 1x Salary
- Leave Allowances 1x Salary

Di tahun 2015 terdapat kenaikan penyerapan anggaran untuk gaji karyawan yang terjadi karena adanya perbaikan sistem remunerasi tahap II dan penambahan jumlah karyawan dengan total persentase kenaikan sebesar 38% dari total tahun 2014 ke tahun 2015. Berikut terlampir grafik kenaikan gaji karyawan dari 2014 sampai 2015.

In 2015, there was an increase budget absorption for employee salaries due to improvement of remuneration system phase II and that was additional employees with a total increase of 38% compared to 2014. Following is the chart that describes the employees salary increment from 2014 to 2015.



Jumlah Gaji Karyawan dalam 1 (Satu) Tahun

Total Employee Salaries in 1 (One) Year

Tahun Year	2014	2015
Jumlah Karyawan (<i>orang</i>) <i>Total Employees (persons)</i>	75	92
Jumlah Gaji (<i>Rp</i>) <i>Total Salaries (Rp)</i>	7.608.945.406	12.390.590.774

Fasilitas Kesehatan

Di samping gaji, Perusahaan memiliki kebijakan pemberian fasilitas kesehatan kepada karyawan, yaitu:

- Fasilitas kesehatan berkala meliputi fasilitas *Medical Check Up*.
- Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kaca mata, alat bantu dengar, pemeriksaan lab dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap.

Health Facilities

In addition to the salary, the Company has a policy to provide health facilities to the employees, namely:

- Periodic health facilities including *Medical Check Up*.
- Medication facilities that guarantee the reimbursement of costs for inpatient care in hospitals, outpatient care after discharge from the hospital, maternity, prescription glasses, hearing aids, laboratory tests and other medical treatment recommended by the doctor after hospitalization.

Program asuransi kesehatan yang diberikan kepada karyawan dilakukan melalui program BPJS Kesehatan. Kepada setiap karyawan, Perusahaan memfasilitasi program kesehatan mencakup karyawan sendiri dan keluarga dari karyawan, dimana fasilitas kesehatan tersebut meliputi perawatan gigi, kacamata, rawat jalan, persalinan, dan rawat inap.

Health insurance program provided to the employees is conducted through the BPJS health program. To each employee, Company facilitates health program including the employees and the employees' family, whereas the health facilities including dental care, eyeglasses, outpatient care, childbirth and hospitalization.

Terdapat peningkatan jumlah peserta (karyawan dan keluarga) sebesar 23%, dari 159 peserta di tahun 2014 menjadi 207 peserta di tahun 2015. Peningkatan total klaim kesehatan sebesar 53% dari tahun 2014, serta utilisasi terbesar di pengobatan Rawat Inap (masing-masing 31,51%) dari total klaim karyawan lebih condong menggunakan Rumah Sakit *Provider* (67%) dibandingkan dengan *Non Provider* atau *reimbursement* (23%).

There was a 23% increase in total number of employees (and their families) from 159 participants in 2014 to 207 participants in 2015. total medical claims increased by 53% compared to 2014 and the largest portion was the Inpatient treatment (31.51%) of the total claims; employees were more inclined to use the *Provider* Hospital (67%) than non-*Provider* or reimbursement (23%).

Realisasi Program Asuransi Karyawan

Employee Insurance Program Realization

Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Klaim Yang Disetujui (Rp) Agreed Claims (Rp)	
	2014	2015
Jumlah Klaim yang Disetujui (Rp) Total Agreed Claims (Rp)	295.011.562	641.007.162
Jumlah Klaim Total Claims	355	509
Jumlah Karyawan yang Klaim (orang) Total Employees claiming (persons)	89	114
Persentase Kenaikan Percentage of Increase		53%

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology



Sebagai entitas usaha dengan jumlah unit kerja yang besar, Perusahaan membutuhkan jaringan kerja optimal yang didukung dengan aplikasi jaringan sistem Teknologi Informasi (TI) atau *Information Technology* (IT) yang handal dan terpadu. Pengembangan sistem TI Perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang efisien, terintegrasi, akuntabel, transparan, serta dapat diandalkan.

Sistem TI Perusahaan bertugas untuk menyediakan sistem informasi yang optimal untuk mendukung bisnis Perusahaan. Layanan TI diharapkan mampu mendorong level produktifitas dan efisiensi. Selain itu, implementasi TI mendukung penerapan *paperless working area*, sehingga dapat meminimalisir risiko operasional usaha, dan menghadirkan sistem keamanan yang maksimal.

As a business entity with many working units, the Company needs to optimize its working network supported by the application of a reliable and integrated Information Technology system. The Company's IT system development is carried out to develop efficient, integrated, accountable, transparent and reliable work place.

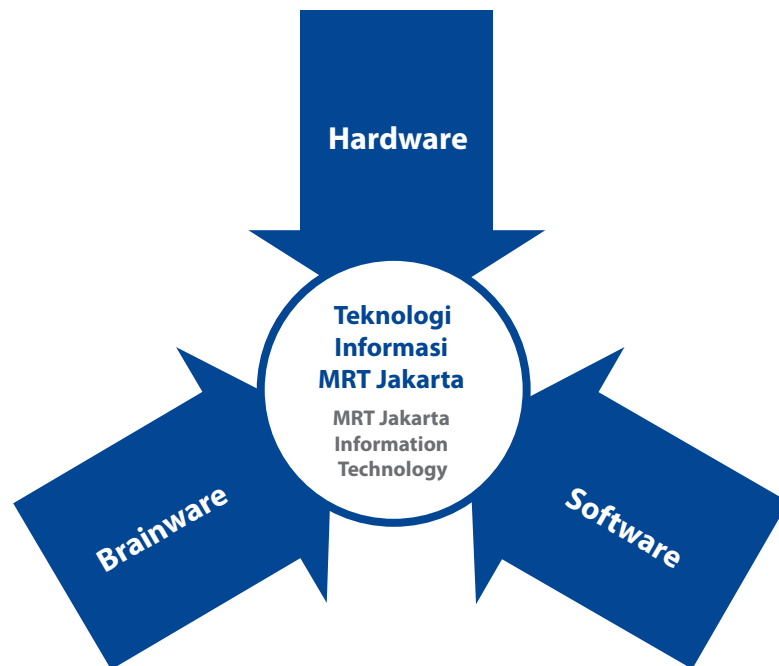
The Company's IT System should be able to provide an optimal information system to support the Company's business. IT service is expected to increase the level of productivity and efficiency. Additionally, IT implementation shall support paperless working area in order to minimize the business operational risks and provide a maximum security.

Pondasi Dasar Teknologi Informasi

Perusahaan memandang pondasi dasar sistem TI ke dalam 3 (tiga) pilar utama: perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan *people* (*brainware*).

Information Technology Basic Platform

The Company classifies its IT system basic platform in 3 (three) main pillars: hardware, software and people (brainware).



- a. Perangkat keras (*hardware*)
Perangkat keras TI seperti notebook/PC, Server, Printer, *network switch*, *access point*, *firewall*, *cabling*, alat *security*, jaringan dan telekomunikasi lainnya. Penyediaan perangkat keras harus memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan agar dapat menunjang produktifitas kerja.
- b. Perangkat lunak (*software*)
Perangkat lunak atau software harus menjadikan keseluruhan sistem TI di Perusahaan berjalan sesuai dengan kebutuhan, diantaranya:
 - Penyediaan aplikasi *custom/software* berbasis *web-based*, aplikasi *enterprise*, *online dashboard*, sistem penyimpanan data, *file sharing*, dan *back up data*.
 - Penyediaan perlengkapan lisensi *software* seperti lisensi sistem operasi, lisensi *database*, lisensi *antivirus*, lisensi *Microsoft Office*, aplikasi surat elektronik, lisensi *networking*, dan lisensi *cloud* atau aplikasi lainnya yang menunjang kegiatan operasional karyawan.
 - Konfigurasi *software* pada *networking hardware* untuk *setting up network* dan jaringan internal/internet, WAN, LAN, koneksi VPN/interkoneksi kantor pusat dengan kantor cabang.

- a. Hardware
Hardware such as notebook/PC, Server, Printer, network switch, access point, firewall, cabling, security devices, networking and other telecommunications. Provision of hardware should meet the specifications required in order to support work productivity.
- b. Software
Software should enable the Company's IT system to run according to the requirements, among others:
 - Provision of customized application/webbased software, enterprise application, online dashboard, storage data/ file sharing system, and back up data.
 - Provision of software licenses, such as operating system, database, antivirus, Microsoft office, email application, networking, and cloud or other desktop applications that support employees' operational activities.
 - Configuration of software on networking hardware for setting up network & intranet/internet, WAN, LAN, VPN connection/ interconnection between head office and branch offices.

- c. *People (brainware)*
Sumber daya manusia yang memadai dari level teknis hingga manajemen.

- c. Brainware,
Sufficient human resources (people) from technical up to management level.

Kebijakan Paperless

Salah satu kebijakan paling mendasar dalam penerapan TI di Perusahaan adalah penerapan *paperless*. Kebijakan *paperless* memberikan nilai tambah berupa efisien waktu, biaya dan administrasi yang terkelola dengan dokumentasi yang akuntabel. Di samping itu, kebijakan *paperless* merupakan langkah penting dalam membentuk citra korporasi Perusahaan di tengah pengelolaan organisasi yang modern hari ini.

Seperti penggunaan sistem *e-office* oleh karyawan. Sistem ini memiliki aspek yang sangat luas, yang terdiri dari berbagai sub-sistem yang dimiliki oleh setiap departemen/divisi yang memiliki tautan administratif dengan setiap karyawan. Departemen IT bertanggung jawab membantu melakukan tahapan proses mulai dari tahap analisis, implementasi hingga tahap pengembangan pada sistem, seperti:

- Sistem *e-Procurement* yang dimiliki oleh Departemen *Procurement* dalam memberikan layanan kepada karyawan perihal permintaan pengadaan barang/jasa atau pengadaan lain.
- System *Inventory & Aset Management* yang dimiliki oleh Departemen *General Affair* dalam memberikan layanan permintaan inventarisasi, *booking driver* atau ruangan.
- System *interoffice/e-memo/e-disposisi* yang dimiliki oleh Divisi *Corporate Secretary* dalam memberikan solusi layanan surat menyurat.
- Sistem HRIS yang dimiliki oleh Divisi SDM memberikan layanan *employee self service* terhadap karyawan.
- Sistem *Risk Register* yang dimiliki oleh Divisi *Risk Management* dalam memberikan layanan sistem pengisian *risk register* bagi setiap *risk officer*.

Selain memberikan layanan secara elektronik yang diberikan untuk setiap karyawan, sistem ini juga menjadi alat untuk membantu manajemen pada setiap departemen/divisi dalam melakukan komunikasi yang efektif dan mendukung aktivitas operasional sehingga proses pengambilan keputusan (*decision support system*) lebih cepat dan efisien.

Infrastruktur Sistem ERP (Enterprise Resource Planning) Operasional

Untuk dapat menunjang kinerja operasional, Perusahaan secara bertahap mengembangkan infrastruktur sistem TI berbasis *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang berfungsi sebagai

Paperless Policy

One of the most fundamental policies in the application of IT in the Company is a paperless application. Paperless policy provides added value in the form of time, cost and administration efficiencies managed with accountable documentation. In addition, paperless policy is an important step in shaping the Company's corporate image in today's management of modern organizations.

The example is the use of e-Office system by employees. This system has a very broad aspect, which consists of various sub-systems owned by each department/division administratively linked to each employee. The IT Department is responsible for helping the implementation of each process stage starting from the analysis stage, implementation to development stage on the system, such as:

- e-Procurement system owned by the Procurement Department in providing services to employees regarding the requests for goods/ services or tenders.
- Inventory & Assets Management System, which is owned by the General Affairs Department in providing Inventory request services, driver or room bookings.
- Interoffice/e-memo/e-disposition owned by Corporate Secretary Division in providing the correspondence service solution.
- HRIS system owned by the Human Resources Division provides employee self-service for employees.
- Risk Register System which is owned by the Risk Management Division to deliver risk register filling service for all risk officers.

In addition to providing electronic services to each employee, the system is also a tool to assist management in each department/division to effectively communicate and support operational activities to enable faster and more efficient process of decision-making (decision support system).

ERP (Enterprise Resource Planning) Operational System Infrastructure

To support its operational performance, the Company has gradually developed Enterprise Resource Planning (ERP)-based IT System infrastructure functioning as an information system. By the

sistem informasi. Hingga akhir tahun 2015, Perusahaan memiliki modul sistem *e-Procurement* untuk proses pengadaan, sistem Administrasi & Keuangan, serta sistem *Inventory Assets*. Selain itu, modul *Human Resources Information System* sedang dalam tahap pengembangan, dimana keempat sistem ini akan diintegrasikan ke dalam sistem ERP operasional yang dimiliki Perusahaan.

Integrasi Sistem ICT Perkeretaapian (*Industrial System*) dengan Sistem ERP Operasional (*Information System*)

Untuk mendukung pengelolaan sistem *Information Communication Technology* (ICT) perkeretaapian—atau *industrial system*, Perusahaan mengintegrasikan sistem ICT perkeretaapian ke dalam operasional manajemen—atau sistem informasi—berbasis ERP. Perancangan, implementasi dan integrasi pada sistem tersebut dilakukan sebelum masa beroperasi MRT Jakarta agar output saat MRT Jakarta beroperasi dapat berjalan secara optimal. Integrasi antara *industrial system* dengan sistem informasi dilakukan agar data dan informasi yang berada di lapangan akan memberikan laporan berupa *dashboard* yang akurat kepada top level management untuk dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Di tahun 2015, Departemen IT bekerjasama dengan Departemen *Signalling Telecommunication & IT* telah memulai perancangan dalam pembuatan *grand design* sistem ICT perkeretaapian. Berikut adalah integrasi antara *industrial system* dengan sistem informasi tersebut:

- Sistem *fare collection (ticketing)* terhubung dan terintegrasi dengan sistem keuangan berbasis ERP di Perusahaan yang memberikan laporan berupa *dashboard* secara *real time online*.
- Sistem Inventarisir Suku Cadang Kereta terhubung dan terintegrasi dengan sistem *General Affair* sehingga dapat dilakukan respon cepat terkait kebutuhan suku cadang kereta dan menghindari *buffer stock* suku cadang.

Investasi di Bidang Teknologi Informasi

Di bawah ini disajikan investasi Perusahaan pada tahun 2015 dan perbandingnya dengan tahun 2014 untuk pengembangan bidang TI.

Investasi Teknologi Informasi PT MRT Jakarta

Investasi Teknologi Informasi IT Investment	PT MRT Jakarta's IT Investment		
	2015	2014	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	601.055.407	1.741.000.000	(65,48)%

end of 2015, the Company'has developed e-Procurement system modules for procurement process, Administration and Finance system as well as Inventory and Assets system. While the Human Resources Information System Module was under development. These four systems will be integrated into the Company's ERP operational system.

Integration of ICT Railways System (*Industrial System*) with ERP Operational System (*Information System*)

To support the management of Information Communication Technology (ICT) system for Railways (industrial system), the Company integrates the ICT system into ERP-based management operations or (information system). The design, implementation and integration on the system were conducted before MRT Jakarta's operational commencement in order to enable optimum operations of the MRT Jakarta. This integration between industrial system with information system aims to have the field data and information provide accurate reports in the form of dashboards to top level management to be used as a tool for effective and efficient decision making.

In 2015, IT Department in cooperation with Signalling Telecommunications & IT Department started the grand designing for Railways ICT system development. Integration between the industrial system with the information system is as follows:

- Fare collection (ticketing) system is connected and integrated with the Company's ERP-based financial system to provide dashboard reports in real time online.
- Train Parts Inventory System is connected and integrated with General Affairs System to enable a faster response related to train spare parts requirements and avoid buffer stock of spare parts.

IT Investment

The Company's 2015 IT investment compared with the 2014 IT investment is as follows:

Terjadi penurunan sebesar 65,48% untuk investasi TI di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Penurunan ini terjadi karena belum dilakukannya beberapa kegiatan seperti pengembangan sistem *Human Resources Information System* (HRIS), penambahan *user license* sistem akuntansi (Ramco), dan *renewal license software*. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan di tahun 2016.

Proyeksi dan Visi ke Depan

Kapabilitas TI sangat menentukan pada kelangsungan proses bisnis Perusahaan; terutama dalam membangun sistem atau alat pada *knowledge management* yang meliputi pengelolaan SDM untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengetahuan bersama dari SDM, peningkatan kemampuan kerja, mampu berkompetisi, meningkatkan tingkat inovasi; inilah beberapa hal terkait pengelolaan SDM sehingga dapat menjadikan organisasi Perusahaan yang semakin baik.

Oleh karena itu, Departemen IT bertanggung jawab dalam membangun *knowledge management system/tool* yang akan menjadi tempat sumber informasi digital dan pertukaran informasi; dimana hal ini akan menjadi sebuah pedoman dan aset yang berharga bagi Perusahaan.

There was a 65.48% decrease in the 2015 IT investment compared to 2014. This decrease was due the incompleteness of several activities such as Human Resources Information System (HRIS) development, additional user licenses for accounting system (Ramco), and software license renewal. These activities are planned to be conducted in 2016.

Future Projection and Vision

IT capability strongly determines the Company's business process continuity, most notably in building the system or tool in knowledge management that includes the management of human resources to achieve the desired results. Shared knowledge of human resources, work capability improvement, competitive advantages, innovation level improvement are several things related to human resources management in order to make the Company a better organization.

There are for, the IT Department is responsible for building knowledge management system / tool which will be a source of digital information and information exchange, in the making of guidelines and valuable assets for the Company.



We are **on the right track**





TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- 138 **Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan**
Basic Principles of Good Corporate Governance
- 142 **Struktur Tata Kelola Perusahaan**
Good Corporate Governance Structure
- 192 **Sistem Pengendalian internal**
Internal Control System
- 195 **Tata Kelola keterbukaan Informasi**
The Governance of Information Transparency
- 205 **Kode Etik dan Penerapannya**
Code of Conduct and its Implementation
- 210 **Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Whistleblowing System
- 211 **Perkara Penting dan Permasalahan Hukum**
Important Case and Legal Issues
- 212 **Transparansi Informasi yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya**
Transparency Information which has Not Disclosed in other Reports
- 215 **Penilaian Tata Kelola Perusahaan**
Corporate Governance

PRINSIP DASAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Basic Principles of Good Corporate Governance



Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang Baik dalam organisasi akan menciptakan perusahaan yang transparan dan terpercaya serta memiliki manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implementation of Good Corporate Governance principles within the organization will create a transparent and trustworthy company with an accountable business management.



Perusahaan menilai bahwa salah satu yang terpenting dalam pengembangan sebuah perusahaan menjadi lebih baik adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* (GCG)). Hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktek bisnis demi mewujudkan kelangsungan usaha.

Kesadaran untuk mengimplementasikan sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah hal yang paling mendasar dalam rangka melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan segenap insan Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berlandaskan pada nilai-nilai pokok yang tertuang pada budaya kerja Perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam organisasi akan menciptakan perusahaan yang transparan dan terpercaya serta memiliki manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga akan memperkokoh kepercayaan serta meningkatkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mewujudkannya, Perusahaan menerapkan tata kelola yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Langkah ini ditempuh agar perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelola *Governance, Risk and Compliance* (GRC) yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan organisasi mencapai kelangsungan hidup Perusahaan.

Dalam mengembangkan infrastruktur dan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan telah bekerjasama dan membuat Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola yang tertanam dalam tubuh dan budaya Perusahaan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance*.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

The Company considers that one of the most important things in developing a better company is Good Corporate Governance (GCG). This becomes an inseparable part of business practices for the purpose of pursuing business sustainability.

The awareness to implement Good Corporate Governance system is fundamental in order to protect the Company and stakeholders' interest. The Company through the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees has the commitment to upholding the Good Corporate Governance principles based on basic values as stipulated in the Company's work culture.

Implementation of Good Corporate Governance principles within the organization will create a transparent and trustworthy company with an accountable business management. Proper implementation of Good Corporate Governance will also strengthen the Company's credibility and also increase the Company's value to the shareholders and other stakeholders.

To that end, the Company implements Good Corporate Governance that is integrated with the compliance management, risk management and internal control. This is undertaken in order for the Company to have knowledge and capability to manage Governance, Risk and Compliance (GRC) aligned to the business performance management and enable the organization to achieve the Company's going concern.

In order to develop Good Corporate Governance infrastructure and implement Good Corporate Governance principles, PT MRT Jakarta has entered into a Memorandum of Understanding with BPKP. As a Local Government-Owned Enterprise (BUMD) under the DKI Jakarta Provincial Government, the Company ensures that the governance principles embedded within the Company's organization and culture referring to the Governor of DKI Jakarta Province's Decree Number 96 Year 2004 about the implementation of Good Corporate Governance practices.

The Company's GCG implementation also refers to the 2008 DKI Jakarta Government's Regulation No. 3 on the Establishment of the Local Government-Owned Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta as amended by the 2013 Local Government Regulation No. 7 on the Amendment to the 2008 Local Government Regulation No. 3 on the Establishment of Regional Owned Enterprises (BUMD) PT MRT Jakarta and the 2008 Local Government Regulation No. 4 on the Local Government's Equity Capital Investment on PTMRT Jakarta as amended by the 2013 Local Government Regulation No. 8 on the Amendment of the 2008 Local Government Regulation No. 4 on the Local Government Equity Capital Investment in PT MRT Jakarta.

Adapun tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perusahaan adalah untuk:

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan;
- Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan;
- Mengelola sumber daya secara lebih baik;
- Mengelola risiko secara lebih baik;
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan;
- Meningkatkan citra Perusahaan menjadi lebih baik.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan perusahaan dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur keberadaan BUMD;
- Keputusan Gubernur No. 88 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
- Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada BUMD DKI Jakarta.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan menyadari bahwa praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu sumber penggerak penting yang mendorong Perusahaan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan membangun kepercayaan dari para pemegang saham dan Pemangku Kepentingan. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong kinerja perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar.

The purposes of Good Corporate Governance implementation in the Company's environment are:

- To control and direct the relationship between Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, employees, clients, partners, also community and environment;
- To encourage and support the Company's management;
- To enhance resources management;
- To enhance risk management;
- To increase accountability to the stakeholders;
- To prevent deviation in the Company management;
- To enhance the Company's good image.

Legal Basis

The Company implements Good Corporate Governance by referreing to the following legal basis:

- The 2007 Law No. 40 regarding Limited Liability Company;
- The 2014 Law No. 23 on Local Governments that also provides the existence of the Local Government Owned Enterprises.
- The 2003 DKI Jakarta Governor's Decree No. 88 regarding Guidance and Development of BUMDs in the DKI Jakarta Provincial Government.
- The 2008 DKI Jakarta Provincial Regulation No. 3 on the Establishment of BUMD PT MRT Jakarta as amended by the 2013 Regional Regulation No. 7 on the Amendment to the 2008 Regional Regulation No. 3 on the Establishment of BUMD PT MRT Jakarta.
- The 2008 DKI Jakarta Provincial Regulation No. 4 on Local Government's Equity Capital Investment In PT MRT Jakarta as amended by the 2013 Regional Regulation No. 8 on the Amendment to the 2008 Regional Regulation No 4 on the Local Government's Equity Capital Investment in PT MRT Jakarta.
- The 2004 DKI Jakarta Governor's Decree No. 96 on Implementation of Corporate Governance in DKI Jakarta's BUMD.

Good Corporate Governance Implementation

The Company realizes that Good Corporate Governance practice is one of the main important driving forces to encourage the Company in pursuing sustainable business growth and building the trust of the shareholders and stakeholders. Implementation of good corporate governance will encourage the Company's performance to function efficiently in order to create a sustainable long term economical values for both the shareholders and local communities.

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan melalui penetapan *Code of Corporate Governance* Perusahaan yang mengatur organ-organ Perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik.

Perusahaan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu: *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independence* (independen), dan *Fairness* (kesetaraan) dalam setiap aktivitas unit dan lini bisnis agar selalu tumbuh berkembang dalam menghadapi berbagai perubahan. Berikut penjelasannya:

1. **Transparansi**
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan.
2. **Akuntabilitas**
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Tanggung jawab**
Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Independensi**
Pengelolaan Perusahaan secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Keadilan**
Perlakuan yang sama dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kelima prinsip di atas, Perusahaan juga memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berbagai pedoman atau kebijakan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*);
- Kode Etik (*Code of Conduct*);
- Panduan Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*);
- Pedoman Pemeriksaan Intern;
- Panduan Manajemen Risiko;
- Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi;
- Kebijakan dan Pedoman terkait lainnya.

The Company's commitment to Good Corporate Governance implementation is applied through the establishment of the Company's Code of Corporate Governance which governs the Company's organs, such as the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors in Good Corporate Governance implementation.

The Company implements Good Corporate Governance principles also known as TARIF; i.e.: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness in all activities of the Company's business units and business lines to always grow in the face of various changes. These principles are as follows:

1. **Transparency**
Transparency in decision making process and in describing materials and relevant information regarding the Company.
2. **Accountability**
Clarity of the organization's functions, implementation and accountability which enables effective management of the Company.
3. **Responsibility**
Compliance of the Company's management with the principles of a sound company and the prevailing legislation.
4. **Independency**
The Company's professional management without conflict of interest and influence/pressure from any party which are in contrary to the principles of a sound company and the prevailing legislation.
5. **Fairness**
Equal treatment in the fulfillment of the stakeholders' rights based on the prevailing legislation.

Other than the above five principles, the Company also strengthens its Good Corporate Governance implementation using various guidelines and policies, such as:

- The Company's Article of Association;
- Good Corporate Governance Code;
- Code of Conduct;
- Board Manual;
- Internal Audit Guidelines;
- Risk Management Manual;
- Information Technology Governance Guidelines;
- Policy and Other Related Guidelines.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance Structure

HUBUNGAN ANTAR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki perangkat-perangkat penting sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam struktur dan mekanisme Tata Kelola, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Kepengurusan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia menganut sistem *two board* atau dua badan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan Perusahaan dalam mengaplikasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik membawa hasil yang positif dengan perkembangan kegiatan usaha yang progresif dan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan, dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komposisi Kepemilikan PT MRT Jakarta

per 31 Desember 2015

Pemegang Saham Shareholders	Nominal Amount (Rp)	Persentase Percentage (%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Provincial Government of DKI Jakarta	1.943.285.000.000	99,97%
PD Pasar Jaya	500.000.000	0,03%

RELATIONSHIP AMONG THE COMPANY'S GOVERNANCE ORGAN

The Company has in place the organs for its Good Corporate Governance implementation. As mandated by the Governance Structure and Mechanism, which is based on the 2007 Law of No. 40 on Limited Liability Companies and the 2014 Law No. 23 on Local Government, the Company's Organ consisted of General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Board of Directors.

The management of the Limited Liability Company (PT) in Indonesia adopts two boards system or two bodies, namely Board of Commissioners and Board of Directors, with clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in the Article of Association and applicable laws and regulations.

The Company's ability in applying Good Corporate Governance brings positive results to the progressive development of business activities and increase the confidence of the shareholders and stakeholders of the Company.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

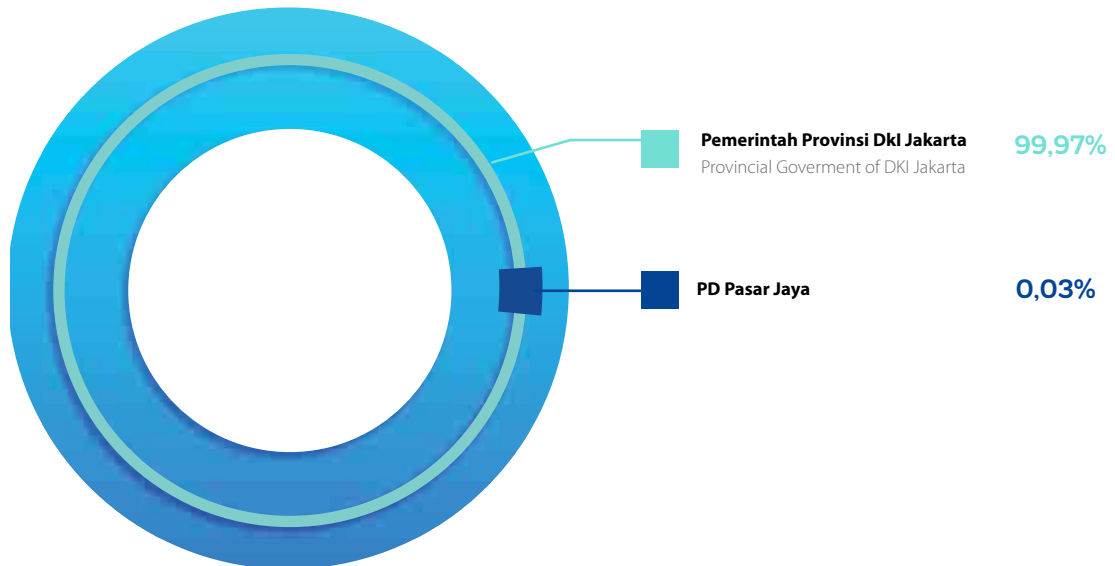
Shareholders

Share is the value unit or bookkeeping in several financial instruments refers an ownership of a company. The 2007 Law No. 40 regarding Limited Liability Company has provided a clear definition of the roles, functions, rights and obligations of shareholders as the party that becomes part of company ownership regulated by the General Meeting of Shareholders (GMS).

The Company is the DKI Jakarta Regional Owned Enterprise (BUMD), meaning that its Controlling Shareholder is the DKI Jakarta Provincial Government.

Shareholding Composition in PT MRT Jakarta

as of 31 December 2015



Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) merupakan hak dan wewenang pemegang saham dalam mengendalikan kinerja Perusahaan dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Keputusan yang diambil dalam RUPS dan RUPS LB dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Perusahaan.

RUPS merupakan organ perusahaan yang berfungsi sebagai wadah para pemegang saham dalam mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam pada Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS Tahunan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RUPS diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha di mana pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan atau diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya, dengan risalah rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh pemegang saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

General Meeting of Shareholders

General Meeting of Shareholders (GMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) are the right and authority of shareholders in controlling the performance of Company within the set limit stipulated by prevailing legislation or the Articles of Association. The decision made in the GMS and EGMS is made transparently by considering the Company's business interests.

GMS is the Company's organ which functions as shareholders' forum in making important decision in relation to the equity capital invested in the Company, with consideration to the provisions of Articles of Association and legislation. In accordance to the Company's Articles of Association, Annual GMS is routinely conducted every year and Extraordinary GMS may be conducted at any time based on needs and in accordance to the prevailing regulations.

GMS is conducted in the Company's domicile or where the Company conducts business activity with the calling for a meeting is conducted using registered letter or using advertisement in newspaper at the latest 14 days prior to the GMS date or using teleconference media, video conference, or using other electronic media facilities, with the minutes made in written and circulated to all Shareholders attending the meeting for approval and signature. GMS is chaired by President Commissioner.

Adapun wewenang RUPS, meliputi:

- Menetapkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menetapkan komposisi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;
- Menetapkan target dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi Perusahaan yang perlu mendapat persetujuan RUPS;
- Menetapkan auditor eksternal;
- Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- Menetapkan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (bila saldo laba positif).

Makna dan fungsi RUPS bagi Perusahaan

RUPS Tahunan berfungsi untuk:

- Menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
- Menetapkan penggunaan laba, jika Perusahaan mempunyai saldo laba positif;
- Memutuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya.

Sementara RUPS Luar Biasa berfungsi untuk membicarakan dan memutuskan kebutuhan Perusahaan dalam mata acara rapat, kecuali mata acara rapat penyampaian laporan tahunan dan penetapan penggunaan laba.

The GMS has the authority including to:

- Establish and implement appointment and dismissal of Board of Commissioners and Board of Directors according to the applicable legislation;
- Determine the Board of Commissioners and Directors composition;
- Establish regulations regarding the concurrent positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- Establish segregation of duties and authorities among the Board of Directors' members;
- Establish target and performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as provide assessment to the Board of Commissioners and the Board of Directors' performance;
- Establish the salary/honorarium, benefits, facilities and incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors' performance;
- Conduct assessment for the Board of Commissioners and the Board of Directors candidates;
- Approve or reject the Long Term Plan and Budget Plan of the Company;
- Approve the Company proposed corporate actions requiring GMS approval;
- Appoint external auditor;
- Approve annual report including financial statements and the Board of Commissioners' supervisory duty implementation;
- Establish the use of net profit including the allowance for reserve (if the retained earnings is positive).

GMS Purpose and Function for the Company

The Annual GMS' functions are as follows:

- To present annual report reviewed by the Board of Commissioners for GMS approval, and financial statements to get the GMS's ratification.
- Establish the use of profit, if the Company has positive profit balance;
- Decide other GMS agenda as properly proposed.

In addition, EGMS has the purpose of discussing and deciding the Company's needs in the meeting agenda, except the agenda to present annual report and use of profit.

RUPS Tahun 2014 dan Realisasinya

The 2014 GMS Implementation and Results Realization

Tanggal Date	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi Realization
2 Mei 2014 May 2, 2014	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013</p> <p>Approval for the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Report of Supervisory Duty Implementation for the 2013 Financial Year;</p> <p>Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013</p> <p>Ratification of Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2013</p> <p><i>Acquit et de charge</i> kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013</p> <p>Acquit et de charge for all members of the Board of Directors and Board of the Board of Commissioners during the 2013 Financial Year</p> <p>Menyetujui Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja (Ernst & Young untuk melaksanakan audit Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014).</p> <p>Approval of Public Accounting Office Purwanto, Suherman dan Surja (Ernst & Young to conduct Fiscal Year ended on December 31st 2014 audit).</p>	RUPS telah menyetujui dan mengesahkan.
27 Maret 2014 March 27, 2014	<p>Menyetujui Pengangkatan Freddy Rikson Saragih selaku Komisaris, terhitung 27 Maret 2013 hingga 26 Maret 2017</p> <p>Approval for Appointment of Freddy Rikson Saragih as Commissioner, starting from 27 March 2013 to 26 March 2017</p>	GMS has approved and ratified.
24 Juni 2014 June 24, 2014	<p>Menyetujui peningkatan modal dasar semula Rp920 miliar menjadi Rp5,5 triliun</p> <p>Approval for the increase of capital base from the previous Rp920 Billions to Rp5.5 Trillions</p>	
12 Agustus 2014 August 12, 2014	<p>Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tundjung Inderawan dengan memberikan <i>acquit et decharge</i> atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya;</p> <p>Approval to dismiss with honor Mr. Tundjung Inderawan by giving acquit et decharge for the management activities conducted during his service period;</p> <p>Mengangkat Hermanto Dwiatmoko selaku Komisaris, dengan masa jabatan 12 Agustus 2014 hingga 11 Agustus 2017;</p> <p>Appointment of Mr. Hermanto Dwiatmoko as the Commissioner of Company with service period from 12 August 2014 to 11 August 2017.</p> <p>Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Fransiscus Trisbiantara dengan memberikan <i>acquit et decharge</i> atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya.</p> <p>Approval to dismiss with honor Mr. Fransiscus Trisbiantara by giving acquit et decharge for management activities conducted during his service period.</p>	

RUPS Tahun 2015 Beserta Keputusannya

GMS 2015 and the Resolutions

Tanggal Date	Agenda Agenda	Pelebagaan Hukum Legalized by Virtue of
30 Maret 2015 March 30, 2015	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 Approval of the Company's Annual Report 2014 on the condition and activities in the 2014 Financial Year including the Board of Commissioners' Assignment Report for 2014 Fiscal Year Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2014 Legalization of Financial Report for 2014 Fiscal Year Penunjukan KAP untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 Appointment of Public Accountants Firm to audit the financial statements for the 2015 financial year Penetapan Remunerasi dan Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 Determination of Remuneration and Performance incentives for BoC and BoD in 2015 	<p>Akta No. 70 Tahun 2015 tentang Risalah RUPS Tahunan</p> <p>Deed No 70 year 2015 on AGMS Minutes of Meeting</p>

Tanggal Date	Agenda Agenda	Pelebagaan Hukum Legalized by Virtue of
30 Maret 2015 March 30, 2015	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Pengesahan perubahan RKAP Tahun Buku 2015 Perubahan lama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Addition in paid and fully paid up capital 	Akta No. 72 Tahun 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Deed No. 72 year 2015 on GMS's resolutions
30 Maret 2015 March 30, 2015	<ul style="list-style-type: none"> Validation of the change of RKAP 2015 Fiscal Year Change of service period of the Board of Director and the Board of Commissioners 	Akta No. 71 Tahun 2015 Risalah RUPS Luar Biasa Deed No. 72 year 2015 on GMS's resolutions
10 Juli 2015 July 10, 2015	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Persetujuan perubahan RKAP Tahun Buku 2015 Addition in paid capital and allocated capital Validation of the change of RKAP of the 2015 Financial Year 	Akta No. 1 Tahun 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Deed No 1 year 2015 on GMS's resolutions
19 Agustus 2015 August 19, 2015	<ul style="list-style-type: none"> Pemberhentian dengan hormat Freddy Rikson Saragih sebagai Komisaris Pengangkatan Rukijo sebagai Komisaris Dismiss with honor Mr. Freddy Rikson as a Commissioner Appointment of Mr. Rukijo as a Commissioner 	
30 November 2015 November 30, 2015	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan & Pengesahan RKAP tahun 2016 Persetujuan & Penetapan PT MRT Jakarta sebagai pemimpin Perusahaan Induk BUMD Prov. DKI Jakarta di bidang transportasi Approval and Ratification of RKAP Year 2016 Approval and Establishment of PT MRT Jakarta as the leader of Regional Owned Enterprise DKI Jakarta Province in the field of transportation 	Akta No. 1 Tahun 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Deed No 1 year 2015 on GMS's resolutions

DEWAN KOMISARIS

Prinsip *two board* dalam badan usaha di Indonesia juga dilakukan Perusahaan melalui organ Dewan Komisaris yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kelangsungan usaha, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan perannya, Dewan Komisaris mengacu pada Panduan Dewan Komisaris dan Direksi, atau *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan. *Board Manual* ini mengatur prinsip dasar hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Masa Jabatan Dewan Komisaris, Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas, Tanggung Jawab, Tugas dan Kewajiban, Wewenang, Hak, Etika Jabatan, Rapat, Laporan Tugas Pengawasan, dan Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perusahaan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain dimaksudkan agar tercipta kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan

BOARD OF COMMISSIONERS

Principle of *two boards* in companies in Indonesia is also applied by the Company through the organ of the Board of Commissioners that is in charge to oversee the business continuity, which includes to conduct monitoring to the execution of the Board of Directors' duties and responsibility and provide advice to the Board of Directors, to guide, monitor, and evaluate implementation of the Company's strategic policies.

Board Of Commissioners Board Manual

In performing their duties, the Board of Commissioners refers to the Board Manual regulating the basic principles of relations between the Board of Commissioners and Board of Directors; Board Of Commissioners service period; Introduction and Capability Improvement Program; Responsibility; Duties; and Authority; Right; Work Ethics; Meeting; Supervisory Report; and Committees under the Board of Commissioners

Board Of Commissioners Function, Duty and Authority

Board of Commissioners has the obligation to conduct monitoring and advice provision to the Board of Directors regarding management of the Company. Monitoring conducted by the Board of Directors is meant to create harmony and consistency in the implementation of the Company's business activities to the Company's Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/RKAP), the Company's Long

yang baik dan manajemen risiko pada seluruh unit organisasi dapat berjalan dengan baik. Pengawasan bertujuan juga untuk mengetahui secara berkala atas pencapaian kinerja, sebagai sarana *early warning system*, dan memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah mendukung pencapaian kinerja Perusahaan.

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan cara:

- a. Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
- b. Menyetujui Kerangka Acuan Kerja dan lingkup audit yang akan dilakukan Kantor Akuntan Publik;

Pembagian tugas tersebut dimaksudkan agar seluruh tugas yang dilakukan oleh Direksi dapat diawasi secara lebih baik dan fokus oleh Dewan Komisaris. Meski demikian, dalam memutuskan dan membahas suatu masalah, Dewan Komisaris senantiasa secara bersama-sama membicarakan dan mendiskusikannya dengan komprehensif dalam suatu rapat Dewan Komisaris.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kualifikasi dan kriteria, yaitu:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
- Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Dalam peraturan yang dimiliki Perusahaan, anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta/Milik Negara/Milik Daerah lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan melarang adanya hubungan darah keluarga antara sesama anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi atau antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi.

Kriteria dan Independensi Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris harus efektif sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif, tepat, cepat dan independen. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pedoman Umum GCG 2006 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi

Term Plan (RJPP), implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and risk management for all organizational unit to be properly executed. The said monitoring also has the purpose of periodically understand performance achievement, as an early warning system facility, and to ensure that the internal control system has supported the Company's performance achievements.

Supervision by Board of Commissioners is conducted by means of:

- a. Conduct visits to the work unit/branch office/specific project, either with (or without) prior notification to the Board of Directors.
- b. Approve Frame of Work Reference and audit scope which are going to be conducted by the Public Accountant Office.

The segregation of duties is in order to have more focused and proper supervision on the duties to be performed by the Board of Directors by the Board of Commissioners. However, in deciding and discussing issues, the Board of Commissioners always talk and discuss an issue comprehensively in the Board of Commissioners meeting.

Board of Commissioners Qualification and Criteria

All members of the Board of Commissioners should meet the following qualification and criteria:

- Possess adequate integrity, competency and financial reputation.
- Never been avowed for bankruptcy and/or never been found guilty of causing a Company avowed for bankruptcy.
- Never conduct any despicable action and never been sentenced for felony.

In Company's regulation, members of Board of Commissioners are not allowed to have concurrent position in private/stateowned/regional-owned/other-region-owned enterprise which may cause conflict of interest either directly or indirectly with the Company's interests. The Company also forbid any family relationships among fellow Board of Commissioners' members and fellow Board of Directors' members and fellow members Board of Commissioners and board of Directors.

Criteria and Independency of Independent Commissioner

Board of Commissioners' composition must be effective thus enabling decision making to be done effectively, appropriately, quickly and independently. In Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company and 2006 GCG Principle issued by National Committee of Governance Policy (Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG), Independent Commissioner is appointed based on GMS's resolutions from a party that is not affiliated with major shareholders, members of Board of Directors and/or other

dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya; baik terafiliasi dalam hubungan bisnis maupun hubungan keluarga. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen, salah satu Komisaris Independen harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Perusahaan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya; dan memiliki latar belakang keuangan.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 1 (satu) kali periode. Jika sebelum masa jabatan berakhir terdapat penggantian, maka anggota Dewan Komisaris yang baru memiliki jabatan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan, meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Komisaris, maka pengisian jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan lain yang kuat.

Berdasarkan RUPS Tahun 2015 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2015 dan telah disahkan melalui Akta No. 72 Tahun 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 5 (lima) tahun sejak diangkat, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Keanggotaan dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 3 (tiga) orang Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang dikuasai. RUPS Tahun 2015 yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2015 telah mengeluarkan keputusan memberhentikan dengan hormat Freddy Saragih sebagai anggota Dewan Komisaris, dan mengangkat Rukijo sebagai anggota Dewan Komisaris.

fellow members of Commissioners; either in business or family relation. If there is more than 1 (one) Independent Commissioner, one Independent Commissioner should have an accounting or finance background.

Company has 1 (one) Independent Commissioner, who is not affiliated with major shareholders, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners; and has a financial background.

Duration of Service of Board of Commissioners

Board of Commissioners' members are appointed by the GMS for the service period of 4 (four) years and may be re-appointed for 1 (one) time. If in the case of replacement to members of Commissioners prior to their end of service period, the new Commissioners member will serve in that position for the remaining period of previous Commissioners that been replaced.

The Board of Commissioners' member title terminated when the of service period ends, resign, no longer appropriate according to the legislation requirements, deceased or dismissed based on the decision of GMS. In the situation should there be absence of Commissioner title, then the appointment of title shall be conducted in accordance to the Company's Article of Association policy.

Member of Board of Commissioners may be temporarily suspended by GMS if conducting activities in conflict to the Article of Association or neglecting duty, or should there is any strong reason.

Based on the 2015 GMS held on March 30, 2015 and ratified by Deed No. 72 year 2015 regarding the GMS's resolution, the service period of Board of Directors and Board of Commissioners changed to 5 (five) years since their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Membership and Appointment of the Board of Commissioners

Board of Commissioners consists of 4 (four) members, which are 1 (one) President Commissioner and three (3) Commissioners who have duties and responsibilities in accordance to their suitable fields. 2015 GMS held on August 10, 2015 has issued a decision to dismiss with respect Mr. Freddy Saragih as a member of the Board of Commissioners, and appointed Mr. Rukijo as members of the Board of Commissioners.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris
periode 1 Januari – 10 Agustus 2015Composition of Board of Commissioners' Members
Period of Januari 1 – August 10, 2015

Jabatan Title	Nama Name	Dasar Pengangkatan Legal Reference	Awal Jabatan Start	Masa Akhir Jabatan End
Komisaris Utama/Komisaris Independen Commissioner/ Independent Commissioner	Erry Riyana Hardjapamekas	RUPS Tahun 2013 GMS 2013	25 April 2013 April 25, 2013	24 April 2018 April 24, 2018
Komisaris Commissioner	Sarwo Handhayani	RUPS Tahun 2013 GMS 2013	25 April 2013 April 25, 2013	24 April 2018 April 24, 2018
Komisaris Commissioner	Freddy Saragih	RUPS Tahun 2014 GMS 2014	12 Agustus 2014 August 12, 2014	11 Agustus 2019 August 11, 2019
Komisaris Commissioner	Hermanto Dwiatmoko	RUPS Tahun 2014 GMS 2014	12 Agustus 2014 August 12, 2014	11 Agustus 2019 August 11, 2019

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris
10 Agustus – 31 Desember 2015Composition of Board of Commissioners' Members
August 10 – December 31, 2015

Jabatan Title	Nama Name	Dasar Pengangkatan Legal Reference	Awal Jabatan Start	Masa Akhir Jabatan End
Komisaris Utama/Komisaris Independen Commissioner/ Independent Commissioner	Erry Riyana Hardjapamekas	RUPS Tahun 2013 GMS 2013	25 April 2013 April 25, 2013	24 April 2018 April 24, 2018
Komisaris Commissioner	Sarwo Handhayani	RUPS Tahun 2013 GMS 2013	25 April 2013 April 25, 2013	24 April 2018 April 24, 2018
Komisaris Commissioner	Hermanto Dwiatmoko	RUPS Tahun 2014 GMS 2014	12 Agustus 2014 August 12, 2014	11 Agustus 2019 August 11, 2019
Komisaris Commissioner	Rukijo	RUPS Tahun 2015 GMS 2015	10 Agustus 2015 August 12, 2014	9 Agustus 2020 August 9, 2020

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Dewan Komisaris.

*Short profile of each member of Board of Commissioners can be seen at Board of Commissioners' report in Profile of Board of Commissioners section.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif dan optimal. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh Dewan Komisaris, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perusahaan. Hal ini sekaligus mendorong praktik non diskriminasi yang telah diterapkan oleh Perusahaan.

Di bawah ini tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris yang dimiliki Perusahaan,

Diverse Composition of the Board of Commissioners

Diverse composition of the Board of Commissioners is part of the Company's efforts to encourage the decision-making process in a more objective, comprehensive and optimal way. This diversity is expected to enrich the perspectives and interests in the decision making process in the Board of Commissioners, therefore it can provide added value to the Good Corporate Governance implementation in the Company. This diversity also encourages the practice of non-discrimination that has been implemented by the Company.

The following is the table of diverse composition of the Company's Board of Commissioners,

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) (President Commissioner/ Independent Commissioner)	Indonesia	Sarjana Ekonomi dan <i>Financial Management Course</i> BA in Economic and Financial Management Course	Manajemen keuangan, manajerial organisasi, birokrasi, dan penegakan hukum Financial Management, Managerial, Organization, bureaucracy, and Law enforcement	66	Laki-laki Male
Sarwo Handhayani (Komisaris) Commissioner	Indonesia	Sarjana Teknik Arsitektur dan Magister Administrasi Bachelor in Architectural and Magister in Administration	Perencanaan dan pembangunan daerah Region Development and Planning	61	Perempuan Female
Freddy Saragih (Komisaris) Commissioner	Indonesia	Sarjana Ekonomi Akuntansi dan <i>Master in Professional Accounting</i> Bachelor in Accountancy and Master in Professional Accounting	Fiskal Fiscal	56	Laki-laki Male
Hermanto Dwiatmoko (Komisaris) Commissioner	Indonesia	Sarjana Teknik Mesin S2 Transportasi, dan S3 Doktoral Ekonomi Terapan. Bachelor in mechanical engineering, Master degree in Transportation and Doctor degree in Applied Economy	Perkeretaapian Rail road System	59	Laki-laki Male
Rukijo (Komisaris) Commissioner	Indonesia	Sarjana Ekonomi dan Ilmu Pembangunan, dan Magister Manajemen Bachelor in Economy and Development and Master Degree in Management	Keuangan Negara, Pajak dan Retribusi Daerah State Finance, Taxes and Regional Levies	49	Laki-laki Male

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain dan/atau institusi lain di luar Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan periode tahun 2015 sebagai berikut:

Transparency of Double Position of Board of Commissioner

Management relation of members of the Board of Commissioners in other companies and/or institutions that may cause conflict of interest, directly or indirectly with the Company's interest in 2015 are as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kepengurusan pada Perusahaan Lain Management relation with other Company	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a member of Board of Commissioner	Sebagai Anggota Direksi As a member of Board of Directors
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) President Commissioner/Independent Commissioner	v	x
Sarwo Handhayani (Komisaris) Commissioner	x	x
Freddy Saragih (Komisaris) Commissioner	x	x

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kepengurusan pada Perusahaan Lain Management relation with other Company	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a member of Board of Commissioner	Sebagai Anggota Direksi As a member of Board of Directors
Hermanto Dwiatmoko (Komisaris) Commissioner	x	x
Rukijo (Komisaris) Commissioner	x	x

v = ada / x = tidak ada
V= yes/x = no

Penjelasan detail tentang adanya rangkap jabatan pada perusahaan lain di luar Perusahaan:

Detailed explanation regarding doubled positions at other Company:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Title
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) President Commissioner/Independent Commissioner	Presiden Komisaris Pasifik Satelit Nusantara Komisaris PT Trakindo Utama Komisaris PT Weda Bay Nickel Komisaris Independen PT Tirta Investama/Danone Aqua Komisaris PT Hero Supermarket Tbk

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, dan Perusahaan bukan merupakan perusahaan publik. Kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya, seperti yang telah tertuang dalam bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Untuk menunjang transparansi atas potensi benturan kepentingan, di bawah ini disajikan kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris di perusahaan publik lain.

Share Ownership of the Board of Commissioners

The Company does not have a Share Ownership Program by the Management, and the Company is not a public company. Shareholding fully owned by the Provincial Government of DKI Jakarta and PD Pasar Jaya, as stated in this Annual Report Company Profile section.

For the transparency on the potential of conflict of interest, below are the share ownership by the Board of Commissioners in other public companies.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Saham BUMD Lain/BUMN Share in other BUMD or BUMN		Saham Perusahaan Publik Lain Share in other Public Company		Ket: Domestik/ Luar Negeri Domestic/Overseas
	Nilai	Persen	Nilai	Persen	
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) President Commissioner/Independent Commissioner					Nihil/None
Sarwo Handhayani (Komisaris) Commissioner					Nihil/None
Freddy Saragih (Komisaris) Commissioner					Nihil/None
Hermanto Dwiatmoko (Komisaris) Commissioner					Nihil/None
Rukijo (Komisaris) Commissioner					Nihil/None

Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antar Sesama Direksi dan Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan

Di bawah ini disajikan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antar sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan. Bentuk hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dan sebagainya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa.

Business and Affiliation Relationship Amongst Members of Board of Directors and Board of Commissioners, or Controlling Shareholders of the Company

Below is the business and affiliation relationship amongst members of Board of Directors and Board of Commissioners, or Controlling Shareholders of the Company. Business relationship including debts, business relation, etc; while affiliation relationship including special relationship

	Hubungan Afiliasi dengan Affiliation relation with			Hubungan Usaha Dengan Business relation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Director	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Director	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) President Commissioner/ Independent Commissioner	x	x	x	x	x	x
Sarwo Handhayani (Komisaris) Commissioner	x	x	v	x	x	x
Freddy Saragih (Komisaris) Commissioner	x	x	v	x	x	x
Hermanto Dwiatmoko (Komisaris) Commissioner	x	x	v	x	x	x
Rukijo (Komisaris) Commissioner	x	x	v	x	x	x

v = ada / x = tidak ada

v=yes/x = no

Dewan Komisaris Board of Commissioner	Jabatan di Institusi Lain Position in other Institution
Sarwo Handhayani (Komisaris) Commissioner	Mantan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Former Governor Team Leader for the Accelerated Development of DKI Jakarta
Freddy Saragih (Komisaris) Commissioner	Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Head of Fiscal Risk Management, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance
Hermanto Dwiatmoko (Komisaris) Commissioner	Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Director General of Railways, Ministry of Transportation
Rukijo (Komisaris) Commissioner	Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Director of Balance Fund Director, Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance

Jabatan anggota Dewan Komisaris pada institusi lain seperti yang tertera pada tabel di atas merupakan bagian dari representasi Pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai representasi dari Pemerintahan Pusat. Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Keuangan RI menjadi representasi dari hubungan dalam Pemegang Saham Pengendali, khususnya terkait aspek pendanaan dan persiapan MRT Jakarta dalam hal regulasi dan keselamatan.

Program Pengenalan Perusahaan

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan. Program pengenalan meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan atau ke proyek, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut dilakukan oleh Komisaris Utama.

Di tahun 2015, Program Pengenalan Perusahaan dilaksanakan kepada Rukijo yang telah diangkat sebagai Dewan Komisaris berdasarkan RUPS tanggal 10 Agustus 2015.

Hubungan Kerja dengan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan dan jalannya pengerusan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan mengenai tiap keputusan dan kebijakan Direksi yang diambil dalam rangka pengurusan Perusahaan.

Position of member of Board of Commissioners's position in other institutions as shown in the above table is part of the Government representation as the Controlling Shareholder. In this case the Provincial Government of DKI Jakarta as a representative of the Central Government. Ministry of Transportation RI and Ministry of Finance RI as the representation of Controlling Shareholders particularly related to the financing, regulation and safety of MRT Project.

Company Introduction Program

For Members of the Board of Commissioners appointed for the first Time shall be given Company's introduction program. The introduction program includes the implementation of the Good Corporate Governance principles; an overview of the Company related to the objectives, nature, and scope of activities, financial performance and operations, strategy, long-term business plan, risks and other strategic issues; internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee. The Program is in a form of presentations, meetings, visits to the Company or to projects, and reviewing documents or other programs as deemed appropriate with the Company and where the program was implemented. The person in charge for this program is the President Commissioner.

In 2015, the Introduction Program was given to Mr Rukijo who was elected as member of Board of Commissioners based on the Annual General Meeting on August 10, 2015.

Relationship with Board of Director

Working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the following principles:

1. Board of Commissioners respects the responsibilities and authority of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the regulation and the Company's Articles of Association.
2. The Board of Directors respects the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners for overseeing and providing advice on policy and the course of management of the Company.
3. Every working relationship between the Board of Commissioners, and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in a sense that it is always base on a standard mechanism or correspondence that could be accounted for.
4. The Board of Commissioners is entitled to obtain the Company's information in accurate, complete and timely manners.
5. The Board of Commissioners is entitled to get every report on Board of Directors' decisions and policies in managing the Company.

6. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:

- a. tercapainya *Value of the Firm* sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham;
- b. terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen risiko;
- c. terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;
- d. terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran Organisasi Perusahaan;
- e. terpenuhinya pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta strategi Perusahaan:

- a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
- c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unit-unit dalam organisasi Perusahaan dan personalianya;
- d. Struktur organisasi Perusahaan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan, Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikan

6. The Board of Directors is accounted for the accuracy, completeness and punctuality of information submission to the Company's Board of Commissioners.

The working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is a check and balance relationship in order to achieve the Company's objectives. In connection with this matter, in accordance with their respective functions, the Board of Commissioners and Board of Directors have a strong joint commitment as follows:

To realize the Company's goal of achieving a continuity of a long term business, reflected in:

- a. to achieve the Value of the Firm as expected by Shareholders;
- b. to achievement effective and efficient implementation of internal control and risk management;
- c. c. to Protect the interests of stakeholders in fairly manner;
- d. A proper succession and management continuity is carried out within the Company's Organization;
- e. Good Corporate Governance is fully implemented.

In order support the achievement of the Vision and Mission and strategy of the Company:

- a. Target businesses, strategy, long-term and work plan and annual budget;
- b. Policies to comply with regulation and and the Company's Articles of Association;
- c. Policy and the Company's performance assessment methods, units in the Company's organization and its personnels;
- d. The organizational structure of the Company at the executive level that supports the achievement of the Company's business objectives.

Board of Commissioners Meeting

In comply with the Company's Board Manual, the Board of Commissioners' meetings consisted of Internal Meeting of the Board of Commissioners attended only by the members of Board of Commissioners and Board of Commissioners Meeting by inviting the Board of Directors. If no agreement is reached, the decision is taken by ballot, the affirmative vote of at least more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes cast at the meeting. Minutes of Meeting is made and administered by the Secretary of the Board of Commissioners or other officials appointed by the Board of Commissioners and provide a copy to all meeting participants. If there is a

salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

different opinions on the decisions made, the opinion must be included in the minutes of meeting as a form of dissenting opinion.

Di tahun 2015, Dewan Komisaris melakukan 5 (lima) kali rapat dimana seluruh rapat tersebut merupakan rapat gabungan dengan Direksi. Risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat disajikan di bawah ini.

In 2015, Board of Commissioner held 5 (five) meetings where all these meetings a joint meeting with the Board of Directors. Minutes of Meeting and attendance rate of Board of Commissioner in the meetings are as follows:

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of BoC and BoD's Minutes

Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
16 Januari January 16	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan terkait pembebasan lahan. • Keselamatan (<i>safety</i>) dan antisipasi terhadap bencana banjir dalam proses konstruksi MRT Jakarta. • Penyelesaian Perjanjian Penyelenggaraan Perkeretaapian. • Persiapan RUPS untuk bulan Maret 2015. • Persiapan pembentukan Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, dan Nominasi Komite Remunerasi. • Pembahasan tindak lanjut pendirian entitas anak Perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Progress related to land acquisition. • Safety and anticipation of floods during Jakarta MRT construction process. • Completion of Railway Operation Agreement • Preparation of General Meeting of Shareholders in March 2015 • Preparation of the establishment of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination of Remuneration Committee. • Discussion on follow-up of the establishment of subsidiaries of the Company.
15 Juni June 15	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan proyek MRT Jakarta Fase 1. • Persiapan pembentukan komite-komite dengan pembagian tugas komite di antara Dewan Komisaris. • Persiapan dan koordinasi untuk pelaksanaan pembangunan proyek MRT jalur Timur-Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> • The development of Jakarta MRT project Phase 1. • Preparation of formation of committees with the division of committee duties between the Board of Commissioners. • Preparation and coordination of the implementation of development projects of East-West MRT lines.
27 Juli July 27	Perkembangan proyek MRT Jakarta dan laporan keuangan.	The development of Jakarta MRT project and financial reports.
27 September September 27	Perkembangan proyek MRT Jakarta dan laporan keuangan.	Development of MRT Project and Financial Report
10 November November 10	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan proyek MRT Jakarta dan laporan keuangan. • Persiapan Pra RUPSLB tahun 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • The development of Jakarta MRT project and financial reports. • Preparation of Pre EGMS in 2015

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat di atas adalah sebagai berikut:

Recapitulation of Board of Commissioners attendance in the above meetings is as follows:

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat

Board of Commissioners attendance in the meetings

Tanggal Date	Anggota Dewan Komisaris BoC Members					Alasan Ketidakhadiran Reason for not attending
	Erry Riyana Hardjapamekas	Sarwo Handhayani	Freddy Saragih	Hermanto Dwiatmoko	Rukijo	
16 Januari January 16	v	v	x	x		Komisaris Freddy Saragih melakukan kunjungan lapangan ke PLTU Mulut Tambang, Sumatera Selatan. Komisaris Hermanto Dwiatmoko melakukan tugas dinas bersama Kementerian Perhubungan The Commissioner Freddy Saragih conducted a field visit to PLTU Mulut Tambang, South Sumatera. The Commissioner Hermanto Dwiatmoko conducted an official duty with the Ministry of Transportation
15 Juni June 15	v	v	v	v		
27 Juli July 27	v	v	v	x		Komisaris Hermanto Dwiatmoko menghadiri penandatanganan kontrak <i>Infrastructure Maintenance Operation (IMO)</i> PT Kereta Api Indonesia. Commissioner Herman Dwiatmoko attends the contract signing Infrastructure Maintenance Operation (IMO) PT Kereta Api Indonesia (Indonesian Railway Co)
27 September September 27	v	v		v	v	-
10 November November 10	v	v		x	x	Komisaris Rukijo menghadiri sosialisasi Dana Desa di Kab. Barito Kuala, Kalimantan. Komisaris Hermanto Dwiatmoko membuka Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Commissioner Rukijo attends the socialization on the Village Fund in the Barito Kuala district, Kalimantan. Commissioner Hermanto Dwiatmoko opens the coordination meeting on railways safety, ministry of transportation

v = hadir / x = berhalangan hadir

* Pada tanggal 10 Agustus 2015, Freddy Saragih digantikan oleh Rukijo.

v= attended/x = not attended

*on August 10, 2015, Mr. Freddy Saragih was replaced with Mr. Rukijo.

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Summary of Attendance of Boc Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	% Kehadiran % Attendance
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) President Commissioner/Independent Commissioner		5	100%
Sarwo Handhayani (Komisaris) (Commissioner)	5	5	100%
Hermanto Dwiatmoko (Komisaris) (Commissioner)		2	40%
Freddy Saragih (Komisaris) (Commissioner)	3	2	66,67%
Rukijo (Komisaris) (Commissioner)	2	1	50%

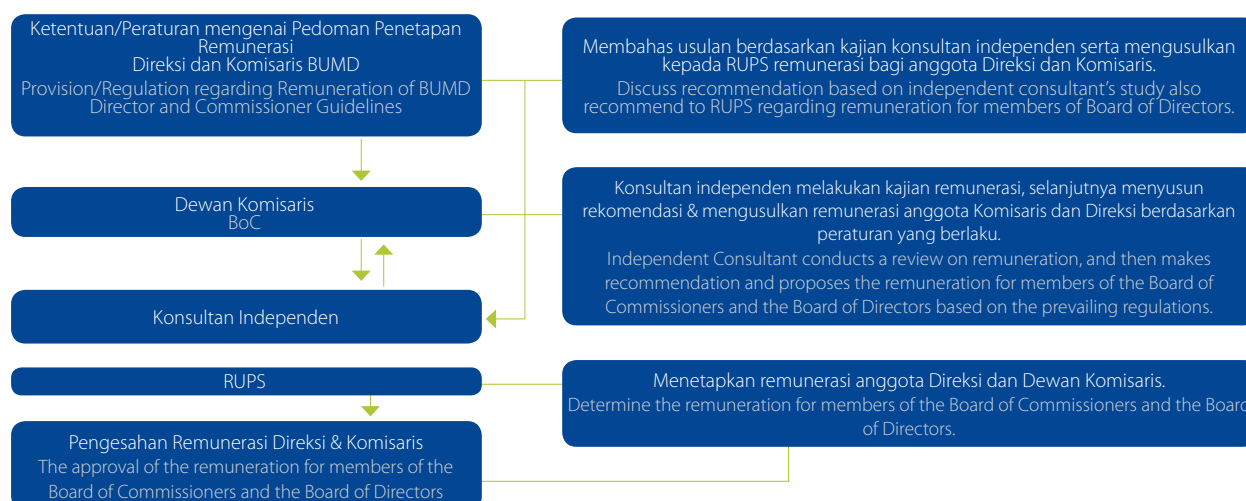
* Pada tanggal 10 Agustus 2015, Freddy Saragih digantikan oleh Rukijo.

* On August 10, 2015, Mr. Freddy Saragih was replaced by Mr. Rukijo.

Remunerasi Dewan Komisaris

Mekanisme remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, termasuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

Skema remunerasi dapat dilihat di bawah ini:



Besaran remunerasi Dewan Komisaris di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Remunerasi Remuneration	Tunjangan Tahunan Annual Allowance	Jumlah Total
(Jabatan) / (Title)	(Jumlah Orang) / Total	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Komisaris Utama President Commissioner	1	492.723.072	157.397.648	650.120.720
Komisaris Commissioner	3	431.132.688	137.722.942	1.706.566.890
Jumlah				2.356.687.610

*perhitungan disajikan dalam 1 (satu) tahun penuh
* Freddy Saragih digantikan oleh Rukijo pada 10 Agustus 2015

Remuneration of Board of Commissioners

Remuneration mechanism for the Board of Commissioners determined by the GMS, including the provision of services fee and retirement benefits in accordance with DKI Jakarta Governor Regulation No. 189 Year 2014 concerning Guideline on Determination of Income for Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of the Regional Owned Enterprises (BUMD).

Remuneration scheme are as follows:

Remuneration for Board of Commissioners in 2015 are as follows:

Package/Remuneration Policy and other facilities for Board of Commissioners

* Calculation presented in one full year
*Mr Freddy Saragih was replaced by Mr Rukijo on August 10, 2015

Program Peningkatan Kompetensi

Untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris, Perusahaan memiliki kebijakan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program eksternal maupun internal terkait pengembangan kompetensi. Beberapa kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di tahun 2015 adalah:

Competency Development Program

To improve the competency of the Board of Commissioners, the Company has a policy to provide an opportunity for members of the Board of Commissioners to participate an external and internal programs for competencies development. The competency development activities attended by the Board of Commissioners in 2015 are the following:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kegiatan Activity
Sarwo Handhayani (Komisaris) Commissioner	<i>Tunnel Boring Machine Factory Inspection 2; Jepang, 28 - 31 Januari 2015.</i>
Freddy Saragih (Komisaris) Commissioner	<i>Tunnel Boring Machine Factory Inspection 2; Jepang, 28 - 31 Januari 2015.</i>

DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berperan dalam menjalankan aktivitas operasional secara keseluruhan. Visi dan Misi Perusahaan yang telah dicanangkan, yang kemudian tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) menjadi kewajiban tujuan utama Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan Perusahaan. Komposisi Direksi ditentukan dan diangkat dalam RUPS.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi mengacu pada Panduan Dewan Komisaris dan Direksi, atau *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan. *Board Manual* ini mengatur prinsip dasar hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, masa jabatan direksi, program pengenalan dan peningkatan kapabilitas, tanggung jawab, tugas dan kewajiban, wewenang, hak, etika jabatan, pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi Perusahaan, pembidangan tugas Direksi, Komite dan tim yang berada di bawah Direksi, rapat, dan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa Laporan Tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada RUPS.
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is a Company's organ that plays a role in managing the whole operational activities. Company's Vision and Mission that has been declared then written in the Company's Long Term Plan (RJPP) become an obligation and main objectives of Board of Directors in managing the Company. Composition of the Board of Directors is determined and appointed in the GMS.

Board of Director's Charter

In performing its duties, the Board of Directors refers to the Company's Board Manual. Board manual regulates the basic principles of work relations between Board of Commissioners and Board of Directors; service period of directors; introduction and capability development program; responsibility; duties and obligations; authority; right; work ethics; delegation of authority among the Board of Directors; job descriptions of the Board of Directors; Committees and teams under the Board of Directors; meeting; and the functions of the Corporate Secretary.

Duties, Authorities and Obligation of Board of Directors

In general, duties and responsibilities of the Board of Directors' are the following:

- Board of Directors has the obligation to implement all activities related to the management of the Company properly and in the best interest of the Company and aligned to the Company's purpose and objectives also as representations for the Company either internal and external of the Court with regards to every aspect and every event with limitations as regulated in the regulation, Article of Association and/or Decision from general meeting of shareholders.
- Prepare in due time the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company's Budget, and its changes also deliver it to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain the GMS' validation.
- Make Annual Report as a form of the Company's management accountability, also the Company's financial documents, including annual finance report and management report to the GMS.
- Make Financial Report based on Financial Accounting Standard and internal controlling principles, especially

pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. Laporan keuangan tersebut wajib diserahkan kepada auditor publik untuk diaudit.

- Menyiapkan susunan organisasi pengurusan perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.
- Dalam hal penyelenggaraan RUPS, Direksi harus menyiapkan mekanisme RUPS yang memungkinkan Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus menjamin agar Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Rincian tugas, wewenang dan kewajiban Direksi tercakup dalam tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi Direksi.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Direksi

Perusahaan mewajibkan anggota Direksi untuk berdomisili di Indonesia. Di samping itu, anggota Direksi yang dinominasikan diharuskan untuk tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Perusahaan melarang adanya rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan sejenis dan/atau lembaga lain. Untuk menghindari benturan kepentingan, Perusahaan tidak mengizinkan anggota Direksi yang dinominasikan yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Perusahaan.

Independensi Direktur Utama

Direktur Utama adalah pihak yang independen dari Pemegang Saham Pengendali. Independensi Direktur Utama dinilai berdasarkan keterkaitan yang bersangkutan pada kepemimpinan, hubungan keuangan serta hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

management, recording, storing, and supervising function. This financial report shall be submitted to public accountant for audit purposes.

- Make a management organization scheme complete with their duties.
- In organizing GMS, the Board of Directors should set up a mechanism that allows the Shareholders to attend the GMS in accordance with the prevailing rules and regulations. Board of Directors should guarantee that the Shareholders get their rights in accordance with the Articles of Association, all decisions legally taken in the GMS and the prevailing rule and regulations.
- During their activities, members of Board of Directors must adhere to the Company's Article of Association and regulation also must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.

Details of the duties, authorities and obligations of the Board of Directors is included in the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors function.

The Qualification and Criteria of Board of Directors members

Company obligates the members of the Board of Directors to reside in Indonesia. Moreover, the nominated members of the Board of Directors has never been declared for bankruptcy or found guilty of causing a company to be declared for bankruptcy; and has never been conducted a felony and has never been convicted for a felony.

Company forbids member of Board of Directors to have a concurrent positions as Board of Commissioners, Board of Directors or executive officers in similar company, and/or other institution. To avoid conflict of interest, the Company did not allow the nominated members of the Board of Directors to have any financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/ or the Company's Shareholders.

The Majority of Board of Directors' members have more than 5 (five) years of experience in the field of operations as the Company's Executive Officers.

Independency of President Director

President Director is an independent part of Controlling Shareholder. The President Director's independence is assessed based on his/her relationship to the management, financial and family relationship with the Controlling Shareholder.

Selain itu, Direktur Utama juga tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan RUPS Tahun 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2015 dan telah disahkan melalui Akta No. 72 Tahun 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Direksi menjadi 5 (lima) tahun sejak diangkat, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Direksi Perusahaan terdiri dari 4 (empat) jabatan fungsional yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi, Direktur Kontruksi, serta Direktur Operasi dan Pemeliharaan.

Susunan Direksi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan Title	Nama Name	Dasar Pengangkatan Legal Basis of the Appointment	Awal Jabatan Start	Masa Akhir Jabatan End
Direktur Utama President Director	Dono Boestami	RUPS 2013 / 2013 GMS	22 Maret 2013 March 22, 2013	21 Maret 2018 March 21, 2018
Direktur Konstruksi Construction Director	M. Nasyir	RUPS 2013/ 2013 GMS	22 Maret 2013 March 22, 2013	21 Maret 2018 March 21, 2018
Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operational and Maintenance Director	Alberth Tarra	RUPS 2013/ 2013 GMS	22 Maret 2013 March 22, 2013	21 Maret 2018 March 21, 2018
Direktur Keuangan dan Administrasi Finance and Administration Director	Tuhyat	RUPS 2013/ 2013 GMS	22 Maret 2013 March 22, 2013	21 Maret 2018 March 21, 2018

*Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam Laporan Direksi

More over, the President Director does not have any family relationship up to the second level, including in-laws relationship to the members of the Board of Commissioners and other Board of Directors' members.

Regulation of Service Period

According to 2015 GMS held on March 30, 2015 and has been ratified by Deed No. 72 of 2015 on GMS's resolutions, Board of Directors' service period stated 5 (five) years since appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time. Member of the Board of Directors can be reappointed by the GMS for 1 (one) more period.

Composition and Legal Basis of Board of Directors' Appointment

The Company's Board of Directors consists of four (4) functional position namely President Director, Finance and Administration Director, Contruction Director, and Operations and Maintenance Director.

Composition of Board of Directors as per 31 December 2015 is as follows,

*Brief Profile of each member of BoD can be seen in BoD report, BoD profile section

Pembagian Lingkup Kerja dan Tanggung Jawab Antar Direksi

Berdasarkan jabatan dan kompetensi khusus masing-masing anggota Direksi, setiap anggota Direksi Perusahaan memiliki perincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Dono Boestami (Direktur Utama) (*President Director*)

1. Berperan sebagai Wakil Perusahaan dalam berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan;
2. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan di seluruh Direktorat;
3. Menetapkan kebijakan korporat yang mencakup seluruh aktifitas Perusahaan;
4. Memberikan persetujuan rencana audit tahunan;
5. Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi pelaksanaannya;
6. Menetapkan toleransi risiko perusahaan, termasuk seberapa besar risiko yang sanggup ditanggung oleh Perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
7. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksudkan telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;
8. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perusahaan
9. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pelaksanaan audit;
10. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pengawasan manajemen mutu;
11. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kinerja Perusahaan;
12. Memastikan pencapaian kinerja Perusahaan sesuai dengan target;
13. Menyampaikan Laporan Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan.

Division of Scope of Work and Responsibility among members of Board of Directors

Based on the title and competency particular for each of the Board of Directors members, each of the members of the Company's Board of Directors has these following job descriptions and responsibilities:

1. Acts as representation of the Company in coordinating with stakeholders;
2. Lead, control and coordinate all activities with in the entire Directorate;
3. Establish corporate policy encompassing all of the Company's activities;
4. Provide approval for annual audit plan;
5. Policies, strategies, and risk management framework and evaluate its implementation;
6. Establish risk tolerance of the Company, including how much risk could be borne by Company both quantitatively and qualitatively;
7. Ensure that all material risks and impact risks posed by the intended have been followed and submit accountability reports to the Board of Commissioner on a regular basis;
8. Ensure adequate implementation Risk Management according to the characteristics, complexity and risk profile Company
9. Responsible to supervise follow up of the audit result implementation;
10. Responsible to supervise follow up of the Quality Management control result;
11. Conduct overall supervision to the Company's performance implementation;
12. Ensure the Company's performance achievement is in line to the target;
13. Deliver Company Report to Stakeholders.

M. Nasyir (Direktur Konstruksi) (*Construction Director*)

- TUGAS POKOK:
 1. Bertanggung jawab atas pembangunan prasarana dan sarana sistem MRT Jakarta;
 2. Pengendalian biaya, waktu, maupun kualitas dalam kegiatan pembangunan sistem MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan Direksi;
 3. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pelaksanaan proyek yang berada dalam kewenangannya.
- ASPEK TEKNIS:
 1. Pengendalian atas aspek-aspek strategis dari setiap kegiatan besar dan pelaksanaan *construction risk management*;
 2. Menjamin terlaksananya secara efektif, baik pada tahap persiapan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, maupun pada tahap persiapan operasi prasarana dan sarana MRT atas aspek berikut:
 - a. Rencana pengelolaan proyek;
 - b. Sistem kontrol dan pengendalian kualitas;
 - c. Manajemen risiko dan pengelolaan keselamatan;
 3. Pelaksanaan kajian terhadap produk atau *output* pekerjaan;
 4. Ketersediaan jadwal induk dari tahap perencanaan sampai selesainya pembangunan;
 5. Mengkoordinasikan konsultan yang terlibat pada masa konstruksi;
 6. Berkoordinasi dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan, menyiapkan dan mengkomunikasikan pedoman perancangan dan garis besar spesifikasi teknis;
 7. Mengarahkan dan mengkoordinasikan Manajer Proyek dalam rangka memastikan seluruh aktifitas telah berjalan dalam arah pencapaian tujuan pekerjaan serta dapat diselesaikan dalam batasan-batasan waktu dan pendanaan;
 8. Menyusun prosedur operasional untuk pelaksanaan proyek atau program dan memastikan bahwa prosedur telah memenuhi atau selaras dengan kebutuhan pencapaian sasaran proyek atau program;
 9. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kerapian administrasi kontrak konstruksi, termasuk kelengkapan perizinan dan lisensi terkait yang harus diperoleh;
 10. Bertanggungjawab untuk meminta izin pembangunan seluruh prasarana dan sarana MRT Jakarta;
 11. Mengembangkan rencana jangka panjang organisasi dalam kaitan sasaran pertumbuhan kapasitas atau kemampuan melaksanakan pekerjaan pembangunan.
- MAIN TASKS:
 1. Responsible on facilities and infrastructure construction of MRT Jakarta's system;
 2. Control the financial, timing and quality of MRT Jakarta developing activities align with strategy that has been decided by the Board of Directors;
 3. Coordinate and monitor all project implementation under his authority.
- TECHNICAL ASPECT:
 1. Control on strategic aspects in each major activities and construction risk management implementation.
 2. Ensure effective implementation, in all stages including preparation, implementation and preparation of MRT's facilities and infrastructure, for following aspect:
 - a. Project management plan;
 - b. Quality assurance and quality control system;
 - c. Risk and safety management.
 3. Implement review on product or work output;
 4. Master schedule availability from planning stage until construction completion;
 5. Coordinate involved consultants during construction stage;
 6. Coordinate with Director of Operation and Maintenance, prepare and communicate the planning guidance and technical specification outlines;
 7. Direct and coordinate Project Manager in order to ensure the whole activities are going as planned to achieve the work objective more over able to finish within time limit and funding;
 8. Arrange operational procedures for project or program implementation and ensure that the procedures has fulfilled or aligned with achieving target requirement project or program;
 9. Responsible in the order and fidelity of the administrative of construction contract, including permit completion and related mandatory licenses;
 10. Responsible in proposing all permits regarding MRT Jakarta facilities and infrastructure;
 11. Develop long-term organizational plan related with capacity grow target or capability to implement construction activities.

M. Nasyir (Direktur Konstruksi) (Construction Director)

- TANGGUNG JAWAB PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI:
 1. Perencanaan Proyek
 - a. Memfinalisasi rencana kerja dengan instansi pemerintah;
 - b. Berkoordinasi dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan, khususnya dalam bidang *engineering* (keteknisan), untuk penyiapan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan strategi pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan proyek;
 - d. Membuat rencana biaya proyek secara keseluruhan;
 - e. Membuat *master schedule* proyek secara keseluruhan;
 - f. Mengembangkan sistem atau prosedur komunikasi dan persetujuan;
 - g. Mempersiapkan perencanaan tentang aspek kesehatan dan keselamatan.
 2. *Design Review*
 - a. Melakukan *review* terhadap spesifikasi, dan gambar baik perencanaan maupun gambar kerja pelaksanaan.
 - b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan *as build drawing*;
 - c. Menganalisis perkiraan biaya dari rencana;
 - d. Mengidentifikasi pekerjaan utama, pekerjaan kritis, dan kesesuaian jadwal;
 - e. Sebagai representatif dari pemegang saham dan memberikan persetujuan terhadap seluruh dokumen konstruksi;
 - f. Mengkoordinasikan arsitek dan konsultan;
 - g. Melakukan dan mendokumentasikan rapat koordinasi proyek;
 - h. Membantu dalam pemenuhan aspek hukum;
 - i. Mengaudit performa fasilitas pengelolaan limbah;
 - j. Memperoleh persetujuan mengenai pengelolaan limbah.
- RESPONSIBILITY DURING PRE-CONSTRUCTION STAGE
 1. Project Planning
 - a. Finalize working plan with government institution.
 - b. Coordinate with Director of Operation and Maintenance, especially in engineering aspect, to prepare procurement documentation;
 - c. Decide procurement strategy related with project implementation;
 - d. Plan overall budget for the project;
 - e. Develop overall master schedule;
 - f. Develop system or communication and approval procedure;
 - g. Prepare planning on safety and health issues;
 2. Design Review
 - a. Review on specifications and designs both planning and work drawing implementation;
 - b. Responsible on implementation as build drawing;
 - c. Analyze budget estimation from the planner;
 - d. Identify main and critical works, and timing punctuality;
 - e. Act as representatives from the shareholder and approve all construction documents;
 - f. Coordinate the architects and consultants;
 - g. Conduct and documenting the coordination meeting of the project;
 - h. Support in fulfilling legal aspects;
 - i. Implement audit on waste management facility performance;
 - j. Obtain approval regarding with waste management.

M. Nasyir (Direktur Konstruksi) (*Construction Director*)

- 3. Pengadaan
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan yang berkaitan dengan proyek;
 - b. Menyediakan daftar rekanan;
 - c. Menentukan persyaratan jaminan atau asuransi.
 - TANGGUNG JAWAB PADA TAHAP KONSTRUKSI
 - 1. Persiapan Proyek
 - a. Mengembangkan dan mengaplikasikan sistem pengendalian proyek;
 - b. Membantu dalam pemilihan dan pelaksanaan sistem manajemen proyek;
 - c. Mempersiapkan arus kas proyek;
 - d. Menetapkan prosedur informasi dan komunikasi proyek.
 - 2. Pembangunan
 - a. Mengawasi aktivitas konstruksi lapangan dan menjamin kesesuaian terhadap kontrak dan peraturan;
 - b. Memberikan laporan kepada pemberi tugas mengenai aktivitas dan interaksi dengan pihak lain mencakup kontraktor, konsultan, sub-konsultan, dan *supplier*;
 - c. Mengembangkan dan menjalankan rencana pengendalian dan jaminan kualitas;
 - d. Melakukan *review* dan mempersiapkan rekomendasi pembayaran atas seluruh tagihan;
 - e. Melakukan negosiasi terhadap jumlah pembayaran untuk *change order*;
 - f. Mengembangkan strategi penyesuaian jadwal;
 - g. Melakukan dan mendokumentasikan rapat koordinasi proyek;
 - h. Memberikan solusi atas perselisihan dalam aspek waktu, kepraktisan, maupun biaya;
 - i. Mendistribusikan laporan kemajuan bulanan;
 - j. Menjaga dokumentasi proyek.
 - 3. Penyelesaian Proyek
 - a. Melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Mempersiapkan dan mengawasi pekerjaan yang perlu diperbaiki;
 - c. Melakukan kajian terhadap kebutuhan dokumen yang diberikan oleh kontraktor maupun rekanan;
 - d. Melakukan penjadwalan dan membantu dalam penyelesaian proyek;
 - e. Melakukan inspeksi ulang terhadap seluruh konstruksi sebelum serah terima maupun habisnya masa jaminan kontraktor.
 - RESPONSIBILITY DURING CONSTRUCTION STAGE
 - 3. Procurement
 - a. Determine general procurement planning related with project.
 - b. Provide vendor list.
 - c. Determine guarantee or insurance conditions.
 - 1. Project Preparation
 - a. Develop and apply project controlling system;
 - b. Assist in selecting and implementing project management system;
 - c. Prepare project cash flow;
 - d. Determine project information and communication procedures.
 - 2. Construction
 - a. Monitor field construction activities and ensure its alignment with contract and regulation;
 - b. Report to employer regarding with activities and interaction with other party including contractor, consultant, sub-consultant, and supplier;
 - c. Develop and apply quality control planning;
 - d. Conduct review and prepare payment recommendation for all invoices;
 - e. Negotiate numbers of payment for change order.
 - f. Develop punctuality strategy;
 - g. Conduct and documenting the project coordination meetings;
 - h. Give solution on argumentation in terms of timing, practicality and costs;
 - i. Distribute monthly progress report;
 - j. Maintain project documentation.
 - 3. Project Finishing
 - a. Inspect working implementation;
 - b. Prepare and monitor the works that need improvement;
 - c. Review all necessary documents provided by contractors or vendors;
 - d. Schedule and assists project finishing;
 - e. Conduct re-inspection to all construction prior hand over or expiration of contractor guaranty.
-

Alberth Tarra (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) (Director of Operation and Maintenance)

1. Tugas Pokok
 - a. Merumuskan dan menyusun ketetapan kebijakan tahapan pembangunan, survey, dan standarisasi desain kelayakan operasi sarana dan prasarana serta program pemeliharannya;
 - b. Merumuskan dan mengusulkan penetapan standar pelayanan minimum operasional (*service level*) MRT di Jakarta;
 - c. Turut bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan, dari tahap *basic design* sampai serah terima pekerjaan sebelum dioperasikan;
 - d. Merumuskan dan menyusun ketetapan kebijakan tentang pengelolaan investasi Perusahaan yang bersifat pengembangan usaha dan pembinaan kerjasama usaha yang berkaitan dengan bidang usaha Perusahaan;
 - e. Bertanggungjawab atas pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana dan sarana sistem MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan oleh Direksi dan standar pelayanan minimum;
 - f. Kajian sistem dan struktur kelembagaan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan;
 - g. Formulasi TOD, untuk dapat menjamin kesinambungan (*sustainability*) operasi MRT Jakarta (*potential future direction of system, recommend service and capital improvements*).
 2. Aspek Teknis
 - a. Dalam posisi dan bertindak sebagai ahli dalam bidang keteknisan dan kerekayasaan baik di lingkungan internal (tim) maupun dengan *technology provider*;
 - b. Memberikan dukungan teknis pada kegiatan pelaksanaan proyek guna memenuhi standar desain yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - c. Memberikan solusi alternatif dalam rangka tercapainya kebutuhan (persyaratan) proyek secara lebih efisien.
 3. Pengendalian Aspek Teknis
 - a. Mengkoordinasikan setiap upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis dalam organisasi;
 - b. Menentukan, menginformasikan mensosialisasikan, dan menetapkan pelaksanaan standar atau ketentuan teknis;
 - c. Memonitor dan merekomendasikan perubahan-perubahan atas solusi atau hasil desain dalam hubungannya terhadap lingkup, kemampuan atau kinerja teknis, efektifitas biaya, ketahanan atau umur layanan, dan kemudahan pemeliharaan.
1. Main Task
 - a. Formulate and compile construction of stages policy, survey and standardization of facilities and infrastructure operational design, and also maintenance program;
 - b. Formulate and propose minimum operational service standards of MRT in Jakarta;
 - c. Participate in responsibility of construction implementation, from Basic Design stage to handover prior it is operated;
 - d. Formulate and compile policies in Company investment management which are business development and business cooperation related with Company business field;
 - e. Responsible in operate, maintain and provide MRT Jakarta facilities and determined by Directors and minimum service standard;
 - f. System and organizational structure review for operation and maintenance activities;
 - g. Transit Oriented Development formulation, to ensure continuity (*sustainability*) of MRT Jakarta operation (*potential future direction of system, recommend service and capital improvements*).
 2. Technical Aspects
 - a. In position and act as expert in technical and engineering either internal environment (team) and technology provider;
 - b. Give technical support to project implementation activities in order to fulfill design standards that has been determined before;
 - c. Give alternative solution to achieve project requirement with more efficiency.
 3. Technical Aspect Control
 - a. Coordinate each effort in order to increase technical knowledge within organization;
 - b. Determine, inform (socialize), and decide standard application or technical requirement;
 - c. Monitor and recommend changes of solution or design results in relation with coverage, capability or technical performance, cost effectivity, endurance or service age, and convenient maintenance.

4. Persiapan Operasi MRT Jakarta

- a. Pengembangan kebijakan dalam rangka keselamatan kerja dan keselarasan dengan standar keselamatan kerja yang ada, termasuk keselamatan pengguna MRT Jakarta;
- b. Menyiapkan ketentuan dan panduan operasi dan pemeliharaan sistem angkutan kereta perkotaan MRT Jakarta, yang berbasis pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang;
- c. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam rangka penentuan standar pengujian prasarana atau sarana sebelum pengoperasian;
- d. Memberi masukan unit kerja SDM dalam rangka organisasi karyawan operasional dan sertifikasi bagi karyawan sesuai ketentuan;
- e. Koordinasi dalam kesiapan data *base asset* terkait infrastruktur dan fasilitas kereta api, beserta sistem jadwal dan pengendalian pemeliharaan;
- f. Menyusun usulan kebijakan investasi dan *outsourcing* perlengkapan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas sistem angkutan kereta perkotaan MRT Jakarta;
- g. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi penumpang kereta dalam melakukan perjalanan;
- h. Memberi masukan bagi unit kerja *public relation* dalam rangka menyiapkan konsep sosialisasi atau pengenalan sistem angkutan kereta api perkotaan MRT Jakarta kepada masyarakat sebelum dan selama masa permulaan pengoperasian kereta api.

5. Aspek Perencanaan

- a. Menetapkan dan terus mengembangkan standar teknis yang diperlukan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas MRT Jakarta;
- b. Mempersiapkan tim yang berkemampuan dalam peningkatan kebutuhan perancangan terkait dengan operasi MRT Jakarta;
- c. Berkoordinasi dengan Direktur Konstruksi, khususnya dalam bidang *engineering* (keteknisan), untuk penyiapan dokumen pengadaan;
- d. Turut serta memberi masukan atas perencanaan pembuatan paket pekerjaan konstruksi dalam kaitan dengan pelaksanaan desain dan pekerjaan konstruksi;
- e. Mencari peluang usaha sesuai dengan perencanaan jangka panjang Perusahaan dengan persetujuan Direksi;
- f. Membangun, mengorganisir, dan mengkoordinasikan perencanaan dan strategi pengembangan usaha;

4. MRT Jakarta Operation Preparation

- a. Develop policies related with work safety and alignment with available work safety standards, including safety of MRT Jakarta passengers;
- b. Prepare regulation and guidance of MRT Jakarta City Train Railway System Operation and Maintenance, based on regulations issued by authorized institutions;
- c. Coordinate with authorized institution in order to determine facilities and infrastructure test standards prior to the operation;
- d. Deliver feedback for HR unit in terms of operational employees organization and certification according by rules;
- e. Coordination in terms of database assets readiness related with train facilities and infrastructure, along with scheduling system and maintenance controlling;
- f. Arrange investment policy proposals and outsourcing for MRT Jakarta City Train Railway System facilities and infrastructure's maintenance equipment;
- g. Coordinate with Central Government or Regional Government and related organization or institutions to prepare sustain facility and service system for train passengers taking the trip;
- h. Give feedback for public relation working unit to prepare socialization concepts or introduction to MRT Jakarta City Train Railway system to community pre-and post train operating formulation.

5. Planning Aspect

- a. Determine and continue the development of required technical standard in MRT Jakarta facility operations and maintenance;
 - b. Prepare capable team to increase planning design related with MRT Jakarta operation;
 - c. Coordinate with Construction Director particularly in engineering for preparing procurement documents;
 - d. Participate by giving feedback on construction work model planning related with design application and construction work;
 - e. Seek business opportunity according to Company long term plan with Directors approval;
 - f. Develop, organize and coordinate business development plan and strategy;
-

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> g. Berkoordinasi dengan Direktur Keuangan dan Administrasi dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan pengembangan usaha, khususnya penggunaan ruang dalam stasiun dan fasilitas kereta api, sampai tersusunnya model bisnis, perkiraan, dan validasi asumsi untuk kebutuhan pengembangan usaha; h. Mengembangkan dan mengkomunikasikan pemahaman strategi bisnis bagi kepentingan Perusahaan; i. Mengupayakan jalur pengembangan usaha yang menguntungkan dan tetap berada pada kondisi realistis dan sehat, selaras dengan bisnis utama Perusahaan; j. Mengawasi atas biaya pengembangan usaha dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka perubahan rencana maupun implementasi pengembangan usaha; k. Membantu Direktorat Konstruksi dalam mereview spesifikasi, dan gambar baik perencanaan maupun gambar kerja pelaksanaan; l. Mengembangkan rencana jangka panjang organisasi dalam kaitan sasaran pertumbuhan kapasitas atau kemampuan penyelenggaraan operasi sistem angkutan kereta api MRT Jakarta; m. Menyusun dan mengkaji rancangan teknis; n. Memonitor dan merekomendasikan perubahan-perubahan hasil rancangan dalam kaitan dengan lingkup pembangunan, kinerja teknis, efektifitas biaya, usia ayanan, dan aspek pemeliharaan; o. Memimpin dan melakukan koordinasi antar bidang disiplin dalam rangka kesuksesan pencapaian hasil proyek; p. Bertanggung jawab dalam mempersiapkan seluruh perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas operasional MRT Jakarta di atas. | <ul style="list-style-type: none"> g. Coordinate with Finance and Administration Director in terms of strategy planning and business Development implementation especially the use of space on the station and railway facility until business model completion, estimation and assumption validation for business development purposes; h. Develop and communicate business strategy understanding for Company interest; i. Working profitable business development path and stay in realistic and healthy condition, align with business key of the Company; j. Monitor business development cost and give necessary efforts in terms of plan changing or business development implementation; k. Support the Direktorat of Construction in reviewing the specifications and drawing both planning and implementation work drawing; l. Develop organizational long term plan related with capacity grow target or capability of MRT train railway operational system implementation; m. Create and review technical design; n. Monitor and recommend design results changes related with construction field, technical performance, cost effectivity, service age, and maintenance aspect; o. Lead and coordinate multi disciplinary field in order for successful project achievement; p. Responsible in preparing all required permits for above MRT Jakarta operational tasks implementation. |
|---|--|

Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) (Director of Finance and Administration)

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan Direksi menetapkan kebijakan keuangan, akuntansi, dan kemitraan strategis; 2. Menetapkan perencanaan investasi jangka panjang; 3. Bersama dengan Direksi menyetujui pelaksanaan dan pelaporan kemitraan strategis; 4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap aktualisasi anggaran korporat; 5. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi dari Direktorat Keuangan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alongside the Board of Directors, establish financial, accounting, and strategic partnership policies; 2. Establish long term investment planning; 3. Alongside the Board of Directors approve the strategic partnership implementation and report; 4. Conduct supervision and evaluation to the corporate budget actualization; 5. Supervise and evaluate all activities related to the Directorate of Finance's function; |
|---|--|

Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) (Director of Finance and Administration)

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Bersama Direksi menetapkan kebijakan pelaksanaan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum; 7. Menetapkan perencanaan pelatihan pegawai dan hubungan antar pegawai Perusahaan; 8. Memberikan persetujuan akhir pada proses rekrutmen pegawai dalam bentuk surat keputusan pengangkatan pegawai; 9. Memberikan persetujuan akhir menyangkut alokasi SDM perusahaan yang meliputi promosi, mutasi dan demosi; 10. Bersama-sama dengan Direksi melaksanakan dan menyetujui proses penilaian kinerja pegawai Perusahaan, memberikan persetujuan untuk proses pelaksanaan hubungan kepegawaian di kantor pusat, bersama Direksi menetapkan perencanaan pengadaan barang dan jasa, mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi SDM dan Umum. | <ol style="list-style-type: none"> 6. Alongside the Board of Directors establish entire activities' implementation policy in relation to the Human Resources and General Affair Division function; 7. Establish the Company's employee training plan and employee affairs; 8. Provide final approval to the employee recruitment process in the form of Employee Assignment Letter; 9. Provide final approval in relation to the Company's human resources allocations which consist of promotion, transfer and demotion; 10. Alongside Board of Directors implement and approve the Company's performance assessment process, provide approval for headquarters' employee affairs implementation processes, alongside Board of Directors establish the procurement of materials and services planning, supervise and evaluate all activities related to the function of Human Resources and General Affair Division. |
|---|--|

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman komposisi Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif dan optimal. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Hal ini sekaligus mendorong praktik non diskriminasi yang telah diterapkan oleh Perusahaan.

Di bawah ini tabel keberagaman komposisi Direksi yang dimiliki Perusahaan:

Diverse Composition of Board of Directors

The diverse composition of the Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage the decision-making process to be more objective, comprehensive and optimal. This diversity is expected to enrich the perspectives and interests in the decision making process in the Board of Directors, thus it provides an added value to the the entire management of the Company. It also encourages the practice of non-discrimination that has been applied by the Company.

Below is the table diverse composition of Board of Directors of the Company:

Direksi BoD	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Competency	Usia Age	Gender
Dono Boestami (Direktur Utama) President Director	Indonesia	Bachelor of Science Civil Engineering dan Master of Science Project & Construction Management	Teknik Sipil, Manajemen Proyek, Keuangan dan Pasar Modal Civil Engineering, Project Management, Finance and Stock Market	53	Laki-laki Male
M. Nasyir (Direktur Konstruksi) Construction Director	Indonesia	Insinyur Teknik Engineer	Perkeretaapian Railway System	51	Laki-laki Male
Alberth Tarra (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) Operation and Maintenance Director	Indonesia	Sarjana Elektro Electrical Engineer	Perkeretaapian Railway System	57	Laki-laki Male
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) Finance and Administration Director	Indonesia	Sarjana Akuntansi dan Magister Manajemen Bachelor in Accounting and Magister in Management	Audit, Pengawasan Keuangan, Pajak Audit, Financial Control, Tax	50	Laki-laki Male

Transparansi Rangkap Jabatan Direksi

Hubungan kepengurusan anggota Direksi pada perusahaan lain dan/atau institusi lain di luar Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan periode tahun 2015 adalah sebagai berikut,

Transparency of Double Position of Board of Directors

Management relationship of Board of Directors members in other companies and/or other institution outside the Company that may cause a conflict of interest, directly or indirectly to the Company's interest in 2015 are as follows,

Direksi BoD	Kepengurusan pada Perusahaan Lain Part of Management in other Company	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As member of BoC	Sebagai Anggota Direksi As member of BoD
Dono Boestami (Direktur Utama)/ President Director	x	x
M. Nasyir (Direktur Konstruksi)/ Construction Director	x	x
Alberth Tarra (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)/ Operation and Maintenance Director	x	x
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi)/ Finance and Administration Director	x	x

v = ada/yes, / x = tidak ada/no

Kepemilikan Saham Direksi

Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, dan Perusahaan bukan merupakan perusahaan publik. Kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya, seperti yang telah tertuang dalam bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Untuk menunjang transparansi atas potensi benturan kepentingan, di bawah ini disajikan kepemilikan saham oleh Direksi di perusahaan publik lain:

Share Ownership by Board of Directors

Company does not have Management Stock Ownership Program, and the Company is not a public company. Stock ownership is fully owned by DKI Jakarta Government and PD Pasar Jaya, as stated in this Annual Report on Company Profile section.

For the transparency on the potential of conflict of interest, below are share ownership by the Board of Directors in other public companies.

	Saham di BUMN Lain Share in other BUMN		Saham Perusahaan Publik Lain Share in other Public Company		Ket: Domestik/Luar Negeri Domestic/ Overseas
	Nilai Value	Persen Percentage	Nilai Value	Persen Percentage	
Dono Boestami			Nihil/None		
M. Nasyir			Nihil/None		
Alberth Tarra			Nihil/None		
Tuhyat			Nihil/None		

Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan ada tidaknya kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri. Perusahaan juga telah mengadministrasikan daftar khusus yang berisi informasi mengenai kepemilikan saham Direksi maupun Dewan Komisaris sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui setiap semester

All members of the Board of Directors have declared that they have/don't have any ownership of shares in other company located in the country or overseas. The Company has also administered special list that containing information regarding the Board of Directors' and the Board of Commissioners' ownership of shares as mandated by Law No. 40 of 2007 on Limited Company which is being updated every semester.

Program Pengenalan Perusahaan

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perusahaan. Program Pengenalan meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal. Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan atau ke proyek, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada di Sekretaris Perusahaan.

Di tahun 2015, Perusahaan tidak melakukan pergantian Direksi dan tidak melakukan program pengenalan Perusahaan kepada Direksi baru.

Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris

Melalui prinsip *two board*, hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris memberikan arahan/informasi kepada Direksi mengenai cakupan eksternal dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada kinerja Perusahaan mencakup antara lain kondisi perekonomian dan regulasi/peraturan terbaru terkait kemajuan proyek dan/atau Perusahaan.

Direksi bertanggung-jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antar Sesama Direksi dan Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Pengendali

Di bawah ini disajikan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antar sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Bentuk hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dan sebagainya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa.

Company Introduction Program

For members of the Board of Directors appointed for the first time a Company's Introduction Program shall be given. The Introduction Program includes the implementation of the Good Corporate Governance Principles; an overview of the Company related to the objectives, nature, and scope of activities, financial performance and operations, strategy, long-term business plan, risks and other strategic issues; internal and external audits, internal control systems and policies. The Program is in a form of presentations, meetings, visits to the Company or to projects, and reviewing documents or other programs as deemed appropriate with the Company and where the program was implemented. The person in charge for this program is the Corporate Secretary

In 2015, there is no replacement for Board of Directors member therefore there is no introduction programs for new member of Board of Directors.

Working Relationship with Board of Commissioners

Through two board principle, working relation between the Board of Commissioners and Board of Directors based on transparency principle and respect. Through joint meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors, Board of Commissioners give direction/information to Board of Directors on external scope and issue that expected to have impact on the Company's performance including among others are economy condition and new regulation connected with the project's progress and/or the Company.

Board of Directors is obliged to deliver reports required by the Board of Commissioners on a regular basis in accordance with applicable regulations.

Business and Affiliation Relationships Between fellow member of Directors and Board of Commissioners, or Controlling Shareholder

Business and affiliation relationship among fellow Board of Directors, the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders is presented below. Forms of business relationships including debts, business cooperation, etc; while the form of affiliation relationship includes a special relationship.

	Saham di BUMN Lain Share in other BUMN			Saham di Perusahaan Publik Lain Share in other Public Company		
	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders
Dono Boestami (Direktur Utama) President Director	x	x	x	x	x	x
M. Nasyir (Direktur Konstruksi) Construction Director	x	x	x	x	x	x
Alberth Tarra (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) Operational and Maintenance Director	x	x	x	x	x	x
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) Finance and Administration Director	x	x	x	x	x	x

v = ada/yes, / x = tidak ada/no

Rapat Direksi

Setiap keputusan dan kebijakan strategis yang ditetapkan melalui rapat Direksi, dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan dengan baik termasuk *dissenting opinion* apabila ada. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan yang mana keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tata tertib kerja.

Di sepanjang tahun 2015, Direksi telah melakukan rapat internal sebanyak 16 kali. Di samping itu, Direksi juga berhubungan dengan Dewan Komisaris dalam rapat gabungan yang dilakukan 3 (tiga) kali pada tahun 2015. Risalah rapat internal dan persentase kehadiran Direksi disajikan di bawah ini, sementara untuk risalah rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Dewan Komisaris.

Board of Directors Meeting

All strategic decisions and policies are established through Board of Directors' Meeting, decision making is conducted based on consensus. Results of the Board of Directors' meeting is recorded in Minutes of Meeting and well administered including any dissenting opinion, if any. Every meeting decisions made by the Board of Directors are implemented and the decisions made are not in conflict to the prevailing regulations and work regulations.

Throughout 2015, the Board of Directors has conducted 16 internal meeting. In addition, the Board of Directors has conducted 3 joint meeting with the Board of Commissioners in 2015. The minutes of internal meetings and the attendance percentage of Board of Directors are presented below, while the minutes of a joint meeting with the Board of Commissioners is at the Board of Directors Meeting section.

Risalah Rapat Direksi

Meeting Minute of Internal Meeting

Agenda Rapat	Tanggal Date	Meeting Agenda
Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.	16 Januari January 16	Joint meeting of the Board of Commissioners
<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan <i>Performance Management System</i> (PMS) oleh Tenaga Ahli PMS, termasuk KPI 2015. Informasi RUPST yang akan dilaksanakan setelah bulan Maret 2015. Pembahasan rencana relokasi utilitas pihak ketiga. 	19 Januari January 19	<ul style="list-style-type: none"> Exposure of Performance Management System (PMS) by PMS expertise including 2015 KPI Information of Annual GMS which will be conducted in March 2015 Discussion of a third-party utility relocation plan.

Agenda Rapat	Tanggal Date	Meeting Agenda
<ul style="list-style-type: none"> Rencana rapat evaluasi kinerja divisi/departemen. Persiapan <i>launching Tunnel Boring Machine</i> (TBM) yang akan datang pada Juni 2015. Kemajuan proyek MRT Jakarta Fase I dan Fase II. Pembahasan kerjasama dengan PT PLN (Persero). 	9 Februari February 19	<ul style="list-style-type: none"> Meeting plan of division/department performance evaluation Preparation of launching Tunnel Boring Machine (TBM) that will be conducted in June 2015 Project progress of MRT Jakarta Project Phase I and Phase II Discussion on cooperation with PT. PLN
<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan Direksi untuk Pra RUPS pada 6 Maret 2015, dan RUPS pada 16 Maret 2015. Pelaksanaan sosialisasi pengisian LHKPN bersama dengan Direktorat LHKPN KPK RI. Penempatan aplikasi <i>Whistleblower System</i> pada situs web internal. Kemajuan proyek MRT Jakarta. 	23 Februari February 23	<ul style="list-style-type: none"> Board of Directors agreement for Pre-GMS on March 6, 2015 and GMS on March 16, 2015 Socialization of LHKPN fill out together with Directorate of LHKPN, KPK RI Adding Whistleblower System application on internal website. Progress on MRT Jakarta Project
<ul style="list-style-type: none"> Pendokumentasian seluruh dokumen anggaran serta Perda terkait. Pembahasan fokus pekerjaan lapangan, yaitu aspek hukum, aspek keuangan dan aspek teknis. Kemajuan proyek MRT Jakarta. 	16 Maret March 16	<ul style="list-style-type: none"> Documentation of all budgeting documents and relevant local regulations Discussion on field work focus, namely legal, financial and technical aspects. Progress of MRT Jakarta Project
<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika di Jakarta. Persiapan Konferensi Pers di Stadion Lebak Bulus yang akan dipimpin Direktur Konstruksi. 	23 Maret March 23	<ul style="list-style-type: none"> Preparation of Asia Africa Summit in Jakarta Preparation of Press Conference in the lebak bulus stadium to be led by Director Construction
<ul style="list-style-type: none"> Persiapan <i>concurance</i> JICA atas pekerjaan proyek CP 107 dan CP 108. Persiapan koordinasi dengan JICA untuk pembayaran uang muka CP 102 dan CP 103. Perkembangan pekerjaan konsultan OMCS. 	4 Mei May 4	<ul style="list-style-type: none"> Preparation of JICA concurrence on Project work CP 107 and CP 108 Preparation of coordination with JICA on Advance Payment for CP 102 & CP 103 at Lebak Bulus Stadium which will be led by Construction Director Progress of OMCS consultant's work.
Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris	15 Juni June 15	Joint meeting with Board of Commissioners
<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan terkait struktur organisasi dan SDM Kerjasama dengan instansi lain. Persiapan pekerjaan TBM untuk Konstruksi Bawah Tanah. 	22 Juni June 22	<ul style="list-style-type: none"> Discussion on organization and HR structures Cooperation with other institution Preparation of TBM work for Underground Construction
Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris	27 Juli July 27	Joint meeting with Board of Commissioner
<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan proyek MRT Jakarta. Persiapan acara pengoperasian perdana TBM. Pembahasan keuangan dengan Perjanjian Pinjaman IP-571. Rencana pembentukan <i>holding</i> dan entitas anak Perusahaan. Persiapan <i>Employee Gathering</i>. 	7 September September 7	<ul style="list-style-type: none"> Progress of MRT Jakarta Project Preparation of the first operation of TBM Financial discussion with Loan agreement IP-571 Planning of establishment of holding and subsidiary of the Company Preparation of Employee Gathering
Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris	27 September September 27	Joint meeting with Board of Commissioners
<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan proyek MRT Jakarta untuk konstruksi (CP101 - 107, Stasiun Blok A) Pembahasan keuangan dengan Perjanjian Pinjaman IP-571 dan keuangan CP101 & CP102. Persiapan Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Pembahasan rencana bisnis terkait <i>ticketing</i>. Pembahasan RKAP 2016. Persiapan RUPS LB Pembahasan rencana gedung kantor Perusahaan, Pusat Informasi MRT Jakarta dan pengadaan. Rencana pembentukan <i>holding</i> dan entitas anak Perusahaan. Pembahasan SDM 	12 Oktober October 12	<ul style="list-style-type: none"> Progress of MRT Jakarta Project for construction (CP101 – 107, Blok A Station) Financial discussion with loan agreement IP – 571 and Financial CP 101 & CP 102 Preparation of operation and maintenance of MRT Jakarta Discussion on business plan on ticketing Discussion RKAP 2016 Preparation of EGMS Discussion on planned Company's office building, MRT Jakarta Information Center and procurement Planning of establishment of holding and subsidiaries of the Company Discussion on HR

Agenda Rapat	Tanggal Date	Meeting Agenda
<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan proyek MRT Jakarta untuk konstruksi CP107. Pembahasan rencana pengadaan. Pembahasan penamaan TBM. 	2 November November 2	<ul style="list-style-type: none"> Progress of MRT Jakarta Project for construction CP 107 Discussion on procurement plan Discussion on naming TBM
Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris	10 November November 10	Joint meeting with Board of Commissioners
<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan pembiayaan MRT Jakarta Fase II. Penyerapan anggaran. Pembahasan penggunaan teknologi untuk konstruksi proyek MRT Jakarta. Pembahasan Peraturan terkait. 	30 November November 30	<ul style="list-style-type: none"> Discussion on financing MRT Jakarta Phase II Budget spending Discussion on technology use for construction of MRT Jakarta Project Discussion on relevant regulations

Absensi Rapat Anggota Direksi

Attendance of Board of Directors Meeting

Tanggal/ Date	Anggota Direksi Member of BOD				Alasan Ketidakhadiran Reason for not attending
	Dono Boestami	M. Naszir	Alberth Tarra	Tuhyat	
16 Januari January 16	v	v	x	v	Alberth Tarra (Direktur), absen karena sakit Alberth Tarra (Director), absent due to illness
19 Januari January 19	v	v	v	v	-
9 Februari February 9	v	v	v	v	-
23 Februari February 23	v	v	v	v	-
16 Maret March 16	v	v	v	v	-
23 Maret March 23	v	v	v	v	-
4 Mei May 4	v	v	v	v	-
15 Juni June 15	v	v	v	v	-
22 Juni June 22	v	v	v	v	-
27 Juli July 27	v	v	v	v	-
7 September September 7	v	v	v	v	-
27 September September 27	v	v	v	v	-
12 Oktober October 12	v	v	v	v	-
2 November November 2	v	v	v	v	-
10 November November 10	v	v	v	v	-
30 November November 30	v	v	v	v	-

v = hadir / x = berhalangan hadir

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Anggota Direksi

Summary Attendance of Board of Directors Meeting

Nama Name	Jumlah Rapat Total of Meeting	Jumlah Kehadiran Total of Attendance	% Kehadiran % attendance
Dono Boestami (Direktur Utama)	16	16	100%
M. Nasyir (Direktur Konstruksi)		16	100%
Alberth Tarra (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)		15	93,75%
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi)		16	100%

Remunerasi Direksi

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian Remunerasi Dewan Komisaris, remunerasi Direksi ditetapkan dan disahkan oleh RUPS setelah melalui pertimbangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah; usulan Dewan Komisaris dan masukan konsultan independen. Sesuai peraturan yang dimiliki Perusahaan, rasio besaran honorarium Direktur sebesar 90% dari remunerasi yang diterima oleh Direktur Utama.

Besaran remunerasi Direksi di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi

Direksi Board of Directors		Gaji Salary	Tunjangan Tahunan Annual Allowance	Jumlah Total
(jabatan) Title	(jumlah orang) Number of Person	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Direktur Utama President Director	1	1.764.454.320	521.807.420	2.286.261.740
Direktur Director	3	1.578.408.888	469.626.678	6.144.106.698
Jumlah				8.430.368.438

*perhitungan disajikan dalam 1 (satu) tahun penuh

Fasilitas lain yang diperoleh Direksi selain kepemilikan mobil (*Car Ownership Program (COP)*) antara lain adalah; tunjangan pulsa telepon genggam, voucher internet, fasilitas pengobatan rawat jalan yang bersangkutan dan suami/istri serta anak, dan fasilitas asuransi rawat inap untuk yang bersangkutan dan suami/istri serta anak.

Program Peningkatan Kompetensi

Untuk meningkatkan kompetensi Direksi, Perusahaan memiliki kebijakan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi untuk mengikuti program eksternal maupun internal terkait pengembangan kompetensi. Beberapa kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi di tahun 2015 adalah:

Board of Director Remuneration

As described in the Board of Commissioners Remuneration section, the remuneration of Board of Directors determined and approved by the GMS after considering DKI Jakarta Governor's Regulation No. 189 of 2014 on Remuneration of BUMD Director, Supervising Board and Board of Commissioner Guidelines; Board of Commissioners proposals and an independent consultant feedback. According to the Company regulation, the ratio of the Director honorarium is 90% of the received remuneration by the President Director.

Board of Director Remuneration in 2015 as follows:

Remuneration Package/Policy and Other Facilities for Board of Directors:

Other facilities received by the Board of Directors other than Car Ownership Program (COP) are; cellular phone credit benefit, internet voucher, outpatient treatment benefit for the concerned and husband/wife and children, inpatient treatment benefit for the concerned and husband/ wife and children.

Competence Enhancement Program

To improve the competency of the Board of Directors, the Company has a policy that provide opportunity for members of the Board of Directors to follow external and internal programs related to the development of competency. Some of competency development activities followed by the Board of Directors in 2015 were:

Direksi Board of Directors	Kegiatan	Activity
Dono Boestami	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat <i>Public Rail Operation</i>; Australia, 14 - 18 Februari 2015 • Undangan "<i>UL's Exclusive Annual Dinner Party on 22 April 2015 During Cards & Payments Asia</i>"; Singapura, 22 - 23 April 2015. • Undangan "<i>The UIC Asia-Pacific Workshop on How to Improve Interchange in Cross Border Traffic and UIC 19th Asia-Pacific Regional Assembly</i>"; Mongolia, 9 - 14 Mei 2015. • <i>Courtesy LTA Singapore</i> oleh LTA; Singapura, 28 - 29 Mei 2015. • Undangan penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT API; Madiun, 11 - 12 Juni 2015. • <i>Workshop "Skema Pendanaan Jalan Tol Lintas Sumatera"</i> oleh Sheraton; Bandung, 16 Juni 2015. • Undangan <i>Business Meeting at Alstom Transport Head Quarters</i> oleh Alstom; Perancis, 30 Juni - 8 Juli 2015. • Undangan oleh Malaysia Berhad; Malaysia, 2 - 4 September 2015. • Undangan <i>FIABCI's Asia Pacific Real Estate Congress</i> oleh FIABCI; Honolulu, 10 - 14 September 2015. • <i>Update From The Region</i> oleh LTA; Singapura, 19 - 21 Oktober 2015. • <i>McKinsey Innovation Forum</i> oleh McKinsey; Singapura, 22 Oktober 2015. • Seminar Nasional oleh Universitas Brawijaya; Malang, 4 November 2015. • Seminar ASEAN IRSE oleh IRSE; Bandung, 25 - 26 November 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Public Rail Operation Meeting; Australia, February 14-18, 2015 • Invitation to "UL's Exclusive Annual Dinner Party on 22 April 2015 During Cards & Payments Asia"; Singapore, April 22-23, 2015 • Invitation to "The UIC Asia-Pacific Workshop on How to Improve Interchange in Cross Border Traffic and UIC 19th Asia-Pacific Regional Assembly"; Mongolia, May 9-14, 2015 • <i>Courtesy LTA Singapore</i> by LTA; Singapore, May 28-29, 2015. • Invitation to joint agreement signatories with PT API; Madiun, June 11-12, 2015 • "Funding Scheme of Trans-Sumatera Highway" workshop by Sheraton; Bandung, June 16, 2015 • Invitation to Business Meeting at Alstom Transport Head Quarters by Alstom; France, June 30-July 8, 2015 • Invitation by Malaysia Berhad, September 2-4, 2015 • Invitation to FIABCI'S Asia Pacific Real Estate Congress by FIABCI; Honolulu, September 10-14, 2015 • Update From The Region by LTA; Singapore, October 19-21, 2015 • McKinsey Innovation Forum by McKinsey; Singapore, October 22, 2015. • National Seminar by Universitas Brawijaya; Malang, November 4, 2014. • ASEAN IRSE Seminar by IRSE; Bandung, November 25-26, 2015.
M. Nasyir	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tunnel Boring Machine Factory Inspection 2</i>; Jepang, 28 - 31 Januari 2015. • Undangan kunjungan lapangan proyek kandidat sub kontraktor CP104/105; Taiwan, 31 Maret - 3 April 2015. • <i>The Indonesian-Sweden Infrastructure Forum 2015</i>; Jakarta, 6 Mei 2015. • Narasumber dalam seminar di Universitas Katholik Soegijapranata; Semarang, 11 - 12 Mei 2015. • Undangan kunjungan lapangan proyek kandidat sub Kontraktor CP104/105; Singapura, 27 - 29 Mei 2015. • <i>Trackwork and Railway Track Engineering</i> oleh LTA; Singapura, 28 - 31 Oktober 2015. • AUSRAIL Plus 2015 oleh ACONEX; Australia, 22 - 27 November 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunnel Boring Machine Factory Inspection 2; Japan, January 28-31, 2015. • Invitation to site visit of sub contractor CP104/105 candidate project; Taiwan, March 31-April 3, 2015. • The Indonesian-Sweden Infrastructure Forum 2015; Jakarta, May 6, 2015. • Speaker in Seminar at Universitas Katholik Soegijapranata; Semarang, May 11-12, 2015 • Invitation to site visit of sub contractor CP104/105 candidate project; Singapore, May 27-29, 2015. • Trackwork and Railway Track Engineering by LTA; Singapore, October 28-31, 2015 • AUSRAIL Plus 2015 by ACONEX; Australia, November 22-27, 2015.
Alberth Tarra	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kunjungan dan penawaran kerjasama dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun; Madiun, 26 - 28 Maret 2015, • <i>Forum Group Discussion (FGD) "Percepatan Peran Serta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun dalam Menyediakan SDM"</i> oleh PT API; Surabaya, 17 - 22 Mei 2015. • "<i>The Inter-Discliplinary Rail Engineering Workshop</i>" oleh Informa Corporate Learning; Australia, 25 - 29 Mei 2015. • <i>Factory Testing of Tunnel Boring Machine I</i> oleh SOWJ; Jepang, 10 - 12 Juni 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visit and cooperation proposal with Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun; Madiun, March 26-28, 2015. • Forum Group Discussion (FGD) "Acceleration of Participation in Indonesia Madiun Railroad System Academy in Providing Human Resources" by PT API; Surabaya, May 17-22, 2015. • "The Inter-Discliplinary Rail Engineering Workshop"by informa Corporate Learning; Australia, May 25-29, 2015. • Factory Testing of Tunnel Boring Machine I by SOWJ; Japan, June 10-12, 2015.

Direksi Board of Directors	Kegiatan	Activity
Tuhiyat	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kunjungan dan penawaran kerjasama dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun; Madiun, 26 - 28 Maret 2015. • Seminar "Menghindari <i>Fraud</i> dalam Rangka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa" oleh BPKP; Jakarta, 6 Mei 2015. • FGD "Percepatan Peran Serta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun dalam Menyediakan SDM" oleh PT API; Surabaya, 17 - 22 Mei 2015. • CFO Indonesia "<i>Transforming Finance: Fuelling Business Innovation with Effective Business Strategies</i>" oleh CFO; Jakarta, 20 - 21 Mei 2015. • "<i>The Inter-Discliplinary Rail Engineering Workshop</i>" oleh Informa Corporate Learning; Australia, 25 - 29 Mei 2015. • Penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT API; Madiun, 11 - 12 Juni 2015. • <i>Workshop "Skema Pendanaan Jalan Tol Lintas Sumatera"</i> oleh Sheraton; Bandung, 16 Juni 2015. • <i>Factory Testing of Tunnel Boring Machine</i> oleh SOWJ; Jepang, 29 Juli - 2 Agustus 2015. • <i>Update From The Region</i> oleh LTA; Singapura, 19 - 21 Oktober 2015. • AUSRAIL Plus 2015 oleh ACONEX; Australia, 22 - 27 November 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visit and cooperation proposal with Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun; Madiun, March 26-28, 2015. • Seminar on "Avoiding Fraud in terms of Accountability on Financial Management of Procurement of Goods and Services. • FGD "Acceleration of Participation in Indonesia Madiun Railroad System Academy in Providing Human Resources" by PT API; Surabaya, May 17-22, 2015. • CFO Indonesia "Transforming Finance: Fuelling Business Innovation with Effective Business Strategies" by CFO; Jakarta, May 20-21, 2015. • "The Inter-Discliplinary Rail Engineering Workshop"by Informa Corporate Learning; Australia, May 25-29, 2015. • Joint Agreement Signing with PT API; Madiun, June 11-12, 2015. • Workshop "Funding Scheme of Trans-Sumatera Highway" by Sheraton; Bandung, June 16, 2015. • Factory Testing of Tunnel Boring Machine by SOWJ; Japan, July 29-August 2, 2015. • Update From The Region by LTA, Singapore, October 19-21, 2015. • AUSRAIL Plus 2015 by ACONEX; Australia, November 22-27, 2015.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun 2015, Perusahaan belum memiliki fungsi Sekretaris Dewan Komisaris. Hasil *Self Assessment* yang dilakukan pada tahun 2015 merekomendasikan pembentukan fungsi ini secara definitif.

KOMITE AUDIT

Untuk dapat menunjang kinerja Dewan Komisaris, di tahun 2015 Perusahaan telah mempersiapkan pembentukan Komite Audit dan mengesahkan pembentukan komite ini melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Audit di Lingkungan PT MRT Jakarta.

Adapun keanggotan Komite Audit Perusahaan adalah:

- Ketua : Rukijo (Komisaris)
 Anggota : 1. Mohamad Hassan
 2. Ina Susanti, ST.

Komite ini baru efektif bekerja pada tahun 2016 dan akan menyampaikan laporan kerjanya pada tahun buku 2016

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

By the end of 2015, the Company had not had the function of Secretary of the Board of Commissioners. Results of Self Assessment conducted in 2015 recommended the establishment of this function definitively.

AUDIT COMMITTEE

To support the Board of Commissioners performance, the formation of the Company's Audit Committee was prepared in 2015 and approved with the Board of Commissioners Decision Letter No.003 Year 2016 on the Establishment of Audit Committee of PT MRT Jakarta.

The Company's Audit Committee membership is as follows:

- Chairman: Rukijo (Commissioner)
 Member : 1. Mohamad Hassan
 2. Ina Susanti, ST.

The Committee started to work effectively in 2016 and will submit its performance report in the annual report of financial year 2016.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan risiko di lingkup Perusahaan. Pembentukan komite ini telah dipersiapkan sejak tahun 2015, dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko di Lingkungan PT MRT Jakarta.

Adapun keanggotan Komite Pemantau Risiko Perusahaan adalah:
Ketua : Hermanto Dwiatmoko (Komisaris)
Anggota : 1. Dr. Achmad Kemal Hidayat, SE, Msc.
2. Arief Bustaman, SE, MIB, MEC.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Untuk tahun 2015, Perusahaan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Proses penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS, seperti yang telah dijelaskan pada bagan remunerasi Dewan Komisaris. Komite ini baru dibentuk di awal tahun 2016 dengan fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Salah satu elemen dalam struktur dan proses Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah pemastian bahwa penggunaan wewenang (*exercise of power*) dan hubungan dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) berjalan dengan baik untuk kepentingan Perusahaan. Untuk mendukung fungsi pembentukan citra positif Perusahaan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap Pemangku Kepentingan, manajemen Perusahaan didukung oleh Sekretaris Perusahaan. Selain fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk membantu tugas Direksi, yaitu merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman, perencanaan, evaluasi dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal, *socio marketing*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), protokol, *legal*, administrasi dan komunikasi internal perusahaan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam lingkup PT MRT Jakarta diatur dalam *Board Manual*. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 092 Tahun 2015 tentang Perubahan Penempatan Personil, Direksi telah menunjuk Tubagus Hikmatullah untuk dipercaya menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Company's Risk Monitoring Committee is established to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory and risk management duties in the Company. The formation of this Committee has been prepared since 2015, and is approved by the Board of Commissioners Decision Letter No. 001 Year 2016 on the Establishment of the Risk Monitoring Committee in PT MRT Jakarta.

The Company's Risk Monitoring Committee membership is as follows:
Chairman : Herman Dwiatmoko (Commissioner)
Member : 1. Dr. Kemal Achmad Hidayat, SE, MSc.
2. Arief Bustaman, SE, MIB, MEC.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In 2015, the Company not had a Nomination and Remuneration Committee. The process for determining the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners was conducted through GMS, as described in the chart of the remuneration of the Board of Commissioners. This Committee is newly formed in early 2016 with functions and powers in accordance with the rules and legislation in force.

CORPORATE SECRETARY

One of the elements in the structure and process of Corporate Governance is ensuring that exercise of power and relationships with stakeholders moving smoothly for the interests of the Company. In order to support the creation of the Company's positive image by managing effective communication program to all stakeholders, the Company's management is supported by Corporate Secretary. In addition to the function, the Corporate Secretary also has duties to assist the Board of Directors, namely to formulate and develop policies and guidelines, planning, evaluating and performing activities of external relations, socio marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), Protocol, legal, administration and internal communications of the company in accordance with policies, guidelines and planning that have been stipulated.

The Corporate Secretary function within the scope of PT MRT Jakarta is regulated in the Board Manual. Based on the Decree of the Board of Directors No. 082 Year 2014, the Board of Directors has appointed Tubagus Hikmatullah entrusted to perform the function of Corporate Secretary.

Sebelum dipercaya menjadi Sekretaris Perusahaan sejak September 2014, latar belakang beliau adalah Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Islam Bandung. Beliau juga berhasil menyelesaikan studi *Master of Commerce jurusan Finance* dari University of Wollongong, Australia, dan profesi akuntan dari Program Profesi Akuntansi Universitas Indonesia. Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau berkarir selama hampir 14 tahun sebagai abdi negara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). Beberapa jabatan yang pernah diduduki selama berkarir di KPPU RI seperti Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Bagian Pengawas Internal, serta terakhir sempat menjadi Plt. Sekretaris Jenderal KPPU merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Beliau juga pernah mengajar sebagai dosen pada Magister Manajemen Keuangan Sektor Publik pada Perbanas Institute Jakarta.

Before entrusted to be the Corporate Secretary since September 2014, he has a Bachelor degree in Economics, majoring in Accounting at Universitas Islam Bandung. He also successfully completed his Master of Commerce, majoring in Finance at the University of Wollongong, Australia, and accounting profession at Program Profesi Akuntansi, Universitas Indonesia. Prior to joining the Company, he had a career for almost 14 years as a civil servant in the The Commission for the Supervision of Business Competition of the Republic of Indonesia (KPPU RI). Some of the positions that he had been held during his career at the KPPU RI were as Bureau Chief of Organization and Human Resources, Bureau Chief of Planning and Finance, Head Department of Internal Supervisor, and as Acting Secretary General of KPPU doubled as Budget Authority. He also taught as a lecturer at the Masters in Financial Management in the Public Sector at Perbanas Institute Jakarta.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara umum, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi *Corporate Secretary*;
- Merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman hubungan masyarakat, *socio-marketing*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), protokoler, *legal*, administrasi dan komunikasi internal Perusahaan;
- Merumuskan pesan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal dan bertindak sebagai juru bicara untuk mewakili Perusahaan;
- Melaksanakan tata persuratan dan kearsipan;
- Berkonsultasi dengan Direktur Utama mengenai perencanaan CSR, pemeliharaan hubungan dengan pihak eksternal. Aspek legal, pelaksanaan keprotokoleran dan pembuatan dan penyebaran media internal;
- Menyetujui dan melaksanakan prosedur keprotokoleran bagi jajaran Perusahaan;
- Menyetujui dan melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan administrasi Perusahaan termasuk di dalamnya pengumpulan kebijakan, penyimpanan risalah rapat Direksi dan kebijakan penting lainnya yang terkait dengan organisasi Perusahaan;
- Bertindak sebagai pembentuk citra bagi Perusahaan dan memitigasi risiko-risiko yang dapat mengurangi citra Perusahaan di masyarakat;
- Menyetujui dan melaksanakan perluasan hubungan dengan pihak eksternal;
- Menyetujui dan melaksanakan program CSR dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Secara spesifik, Sekretaris Perusahaan juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan internal dan eksternal Perusahaan di bidang Administrasi Perusahaan, hubungan masyarakat dan hukum.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

In general, Corporate Secretary has a duty and responsibility as follows:

- Preparing materials for the Annual Work Plan and Budget of Corporate Secretary Unit;
- Formulating and establishing policies and guidelines for public relations, socio-marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), protocoler, legal, administration and internal communications of the Company;
- Formulating messages to be delivered to external parties and act as a spokesperson to represent the Company;
- Implementing correspondence and archival system;
- Consulting with the President Director concerning CSR planning, maintenance of relationships with external parties, legal aspects, implementation of precedence and creation and dissemination of internal media;
- Approving and implementing protocol procedures with in the Company;
- Approving and implementing the Company's records and administration management including collecting policies, keeping minutes of meetings of the Board of Directors and other important policies related to the organizations of the Company;
- Acting as an image representation for the Company and mitigating any such risk which could reduce the Company's image in the community;
- Approving and implementing the expansion of relations with external parties.
- Approving and implementing CSR programs in coordination with the relevant parties.

Specifically, Corporate Secretary also has duties and responsibilities relating to the Company's internal and external activities in the field of Corporate Administration, public relations and law.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2015

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2015 diantaranya:

1. Persiapan pusat informasi MRT Jakarta, dimana proses evaluasi dan seleksi lokasi gedung pusat informasi telah mulai dilakukan;
2. Hubungan media, baik melalui kunjungan ke kantor media, konferensi pers, maupun siaran pers untuk menyampaikan perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta;
3. Penyelenggaraan seminar "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PU-XI/2013 Terhadap Badan Usaha Milik Daerah" Januari 2015 dalam rangka memberikan pemahaman kepada stakeholders bahwa dengan pemisahan kekayaan Negara dengan BUMD tidak membuat BUMD terlepas dari pemeriksaan/audit BPK.
4. Penyelenggaraan seminar "Underground MRT Jakarta" pada pertengahan Juni 2015 dalam rangka memberikan penjelasan kepada stakeholders mengenai hal-hal spesifik penggunaan peralatan teknis dengan teknologi tinggi serta potensi dampak pada wilayah disekitar proyek pembangunan MRT Jakarta.
5. Partisipasi sponsorship dan bantuan, seperti *sponsorship* buku Institut Teknologi Bandung (ITB) *Research Output & Spin off*, Turnamen Futsal Piala Gubernur, agenda Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan peringatan HUT armada TNI Angkatan Laut.
6. Kunjungan lapangan proyek MRT Jakarta kepada kalangan umum; baik dari regulator, pemerintah daerah, konsultan kontraktor dan prasarana publik, maupun mahasiswa.
7. Dalam rangka membina hubungan baik dengan stakeholder dan membangun reputasi perusahaan di mata publik, telah dilakukan beberapa pekerjaan diantaranya ucapan Tahun Baru 2016 melalui produksi kalender, souvenir USB, kartu ucapan, dan pemasangan banner Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Bundaran HI.
8. Penyusunan Profil Perusahaan dalam versi Bahasa Inggris sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan corporate image.
9. Pembuatan film dokumenter dan video tentang MRT Jakarta.
10. Pengadaan vendor penyusunan *Annual Report* tahun 2015.
11. Pengadaan vendor penyusunan *Coffee Table Book* tahun 2015.
12. Annual Report 2015 disusun sebagai dokumentasi informasi capaian Perusahaan di tahun 2015 serta juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab PT MRT Jakarta kepada stakeholders kinerja Perusahaan.
13. Penyusunan *Coffee Table Book* tahun 2015 dalam bentuk dokumentasi yang dicetak secara eksklusif mengenai perkembangan proyek MRT Jakarta sejak *groundbreaking* di tahun 2013.

Execution of Duties in 2015

Some of the work programs which has been executed by the Corporate Secretary in 2015 include:

1. Preparation of MRT information center Jakarta, where evaluation process and site selections for information center building had begun.
2. Media relations, whetherby visiting media offices, press conferences and press releases to convey the development progress of the Jakarta MRT project.
3. The seminar on the "Impact of the Constitutional Court Decision No. 62/PU-XI/2013 on Local Government-Owned Enterprise (BUMD)" in January 2015 for the purpose of providing an understanding to stakeholders that the separation of the Wealth of State with Local Government-Owned Enterprise does not make BUMD is out of BPK's audit.
4. The seminar on "Underground MRT Jakarta" in mid-June 2015 for the purpose of providing an explanation to stakeholders on the specific matters of the use of high technology technical equipment and the potential impact on the areas surrounding MRT Jakarta construction project.
5. Participation on sponsorship and assistance, such as the book sponsorship Bandung Institute of Technology (ITB) *Research Output & Spin off*, Governor Cup Futsal Tournament, the agenda of Surabaya Institute of Technology (ITS), and the anniversary of the military fleet of the Marine Force (Navy) of Indonesia.
6. Jakarta MRT project field visit to the public; both from regulators, local authorities, contractors consultants and public infrastructure, as well as university students.
7. In order to maintain good relations with stakeholders and enhance the Company's reputation in the eyes of the public, several activities have been done including the New Year 2016 Greetings with the production of calendars, USB souvenirs, greeting cards and hanging banner in the pedestrian crossing bridge of Bundaran Indonesia.
8. Preparation of Company Profile in English version as an effort to build the Company's corporate image.
9. Production of a documentary movie and video about the Jakarta MRT.
10. Procurement of vendor of the preparation of Annual Report 2015.
11. Procurement of vendor of drafter of Coffee Table Book 2015.
12. The 2015 Annual Report is prepared as a document containing information regarding the Company's achievement in 2015 and a form of the accountability of PT MRT Jakarta to the stakeholders on the Company's performance.
13. Preparation of the 2015 Coffee Table in the form of exclusively printed documentation on the development of MRT Jakarta project since the 2013 groundbreaking.

14. Untuk mendapatkan tolak ukur tingkat pemahaman masyarakat atas pembangunan proyek MRT Jakarta, telah dilakukan Penyusunan *Index Public Awareness* MRT Jakarta. Hasil dari indeks tersebut dapat digunakan sebagai *feedback* untuk perbaikan ke depan.

AUDIT INTERNAL

Untuk memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan peraturan serta Perundang-Undangan yang berlaku, diperlukan sebuah proses audit internal mencakup audit atas operasional proyek dan keuangan Perusahaan. Perusahaan menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko berdasarkan Standar Prosedur Operasi Audit Internal yang disusun dengan mengacu kepada Piagam *Audit Intern (Audit Charter)*, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 001 Tahun 2015 tentang Internal Audit Manual PT MRT Jakarta.

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Audit Internal ini ditandatangani tanggal 19 November 2011 dan telah diperbaharui di awal tahun 2016.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Piagam Audit yang dimiliki Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Memelihara profesionalisme pemeriksaan *intern* dan kualitas pemeriksaan sesuai Standar Audit Pemerintahan dan Standar Profesi Audit Internal serta Kode Etik Perusahaan dan/atau Kode Etik Audit Intern;
- Menyusun rencana pemeriksaan tahunan dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko, termasuk risiko dan pertimbangan pengendalian yang diidentifikasi oleh manajemen;
- Mengkomunikasikan dan membahas hasil pemeriksaan kepada unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan, serta menyampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai aktivitas pelaksanaan fungsi internal audit kepada Direktur Utama;
- Melaksanakan investigasi atas indikasi pelanggaran dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama.

Organisasi Audit Internal

Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung terhadap Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 092 Tahun 2015 tentang Perubahan Penempatan Personil, Perusahaan telah menunjuk Akbar Anwar untuk memegang posisi Kepala Audit Internal.

14. To obtain a benchmark for public understanding level of the MRT Jakarta construction project, Index of Public Awareness on MRT Jakarta was arranged. Results of the index can be used as feedback for future improvement.

INTERNAL AUDIT

To ensure optimal management of the Company and in accordance with the rules and regulations in force, an internal audit process is required which includes audit of the Company's project operations and finance. The Company applies risk-based monitoring system and internal control based on the Standard of Internal Audit Operating Procedures prepared with reference to the Audit Charter, stipulated based on the Decree of the President Director No. 001 Year 2015 regarding the Internal Audit Manual of PT MRT Jakarta.

Internal Audit Charter

In performing its duties, Audit Internal Unit is guided by the Audit Charter stipulated by the Board of Commissioners and Board of Directors. The Internal Audit Charter was signed on November 19, 2011 and has been updated in early 2016.

Duties and Responsibilities

In the Audit Charter of the Company, the duties and responsibilities of the Internal Audit Division can be described as follows:

- Maintain professionalism of internal audit and audit quality in accordance with Government Audit Standards and Internal Audit Professional Standards as well as the Company's Code of Conduct and/or Internal Audit's Code of Conduct.
- Develop the annual audit plan using a risk-based audit approach, including risk and control considerations identified by management.
- Communicate and discuss the audit results to the work units related to audit implementation, and submit a summary of the audit results to the President Director.
- Deliver periodic reports on the implementation of activities of audit internal function to the President Director.
- Carry out investigation on the indication of violations and report the results to the President Director.

Internal Audit Organization

The Internal Audit Unit is directly responsible to the Board of Directors. Based on the Decree of the Board of the Directors No. 092 Year 2015, the Board of Directors has appointed Anwar's Akbar Anwar entrusted to hold the position of Chairman of the Internal Audit.

Akbar Anwar
Kepala Divisi Audit Internal

Akbar Anwar, MM., Ak., CA., QIA., CRMP, kelahiran Jakarta, 7 April 1959. Memiliki latar belakang pendidikan Akuntan-Diploma IV dari STAN dan S2 Magister Manajemen dari IPWIJA. Sepanjang karirnya, beliau telah mengantongi berbagai sertifikasi keahlian diantaranya; Chartered Accountant-IFAC & IIA (International), Akuntan-Register Negara D-8100, Certified Risk Management Professional-Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen risiko, Qualified Internal Auditor-Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor, Ahli Pengadaan Nasional-Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, Auditor Ahli Madya-Sertifikat BPKP, dan Manajemen Risiko-Sertifikat BPKP.

Akbar Anwar
Chairman of the Internal Audit

Akbar Anwar, MM., Ak., CA., QIA., CRMP, born in Jakarta, April 7, 1959. He has a Diploma IV majoring in Accounting from STAN and Master of Management degree from IPWIJA. Throughout his career, he has won various qualified certifications among others: Chartered Accountant-IFAC and IIA (International). State Registered Accountant D-8100, Certified Risk Management Professional - Risk Management Professional Certification Agency, Internal Auditor - Qualified Internal Auditor Certification Board, Expert of National Procurement - the Government Procurement Policy Agency, Middle Expert Auditor - BPKP certification and risk management-BPKP Certificate.

Untuk mendukung pelaksanaan Audit Internal di Perusahaan, kepala dan anggota Divisi Audit Internal telah dilengkapi oleh sertifikasi/kualifikasi audit internal. Pada tahun 2015 jumlah karyawan Audit Internal Perusahaan sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari kepala Unit Audit Internal, 2 (dua) orang auditor *specialist* dan 1 (satu) tenaga auditor.

To support the implementation of Internal Audit in the Company, the head and members of the work unit of Internal Audit have been equipped with certification / qualification of internal audit. By 2015, the number of employees of the Company's Internal Audit consist of 4 (four) people, consisted of Head of Audit Internal Unit, 2 (two) auditor and specialist and 1 (one) auditor.

Laporan Kegiatan Audit Internal dan Rencana Tindak Lanjut

Rencana audit tahun 2015 yang telah selesai direalisasikan terdiri dari:

1. Kegiatan Asuransi, meliputi proses audit internal pada 5 (lima) divisi, yaitu Divisi *Corporate Secretary*, Divisi *General Affair*, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Keuangan & Akuntansi, dan Divisi *Project Manager*.
2. Kegiatan Non-Asuransi/Audit (Konsultasi), meliputi:
 - Pendampingan tim BPKP dalam riviw pelaksanaan pengadaan proyek CP 107 dan CP 108;
 - Pendampingan tim audit Kantor Akuntan Publik;
 - Pendampingan tim audit *Japan International Cooperation Agency (JICA)*;
 - Pendampingan unit-unit kerja dalam penguatan pengendalian internal dan integrasi manajemen risiko;
 - Audit atas penugasan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Pelatihan, pendidikan dan sertifikasi.
3. Penugasan di luar Rencana Audit Tahunan, meliputi:
 - Pelaksana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - Opname fisik atas peralatan dan perlengkapan impor sementara untuk keperluan proyek MRT Jakarta;
 - Penyusunan pedoman *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - Pelaksanaan *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

Internal Audit Activity Report and Follow-up Plan

Audit planning 2015 that have been realized are:

1. Insurance activities, including internal audit process in 5 (five) divisions, namely Corporate Secretary Division, General Affairs Division, Risk Management Division, Finance & Accounting Division and Project Manager Division.
2. Activities of Non-Assurance / Audit (Consultation), include:
 - Mentoring BPKP team in the review of implementation of project CP 107 and CP 108 procurements .
 - Mentoring audit team of public accounting firm.
 - Mentoring audit team of Japan International Cooperation Agency (JICA).
 - Mentoring Work Units in strengthening of internal control and risk management integration.
 - Audit on assignment from the Board of Directors and / or Board of Commissioners.
 - Training, educating and certification.
3. Assignments outside Annual Audit Plan, include:
 - Implementing Wealth State Report (LHKPN).
 - Physical inspection on equipment and supplies imported temporarily for the purpose of MRT Jakarta project.
 - Preparation of guidelines for Good Corporate Governance self-assessment .
 - Implementation of Good Corporate Governance self-assessment.

- Evaluasi dokumen penunjukan langsung pengadaan sewa ruang kantor;
- Asistensi penyusunan Prosedur Tetap Keuangan dan Akuntansi;
- Asistensi penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.

Khusus untuk hasil pelaksanaan *self assessment* Tata Kelola Perusahaan dapat dilihat pada bagian Penilaian Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

AUDIT EKSTERNAL

Auditor Eksternal atau Akuntan Perusahaan ditunjuk untuk melakukan audit finansial serta untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaat-asasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntan Perusahaan ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor Eksternal yang ditunjuk independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan.

Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik sehingga memungkinkan Kantor Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-asasan dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia.

Kantor Akuntan Publik wajib memberitahu Perusahaan bila ada kejadian dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Auditor Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Laporan Keuangan Perusahaan periode 31 Desember 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja ditunjuk menjadi auditor Perusahaan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Audit Laporan Keuangan Perusahaan 5 (lima) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2012 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- Evaluation of documentation of direct appointment for rental of office space.
- Assistance preparation of SOPs of Finance and Accounting.
- Assistance preparation of Financial Statements for Fiscal Year 2015.

Particularly for the results of the implementation of Corporate Governance self-assessment can be seen on the Assessment of Corporate Governance in this Annual Report.

EXTERNAL AUDIT

The Company's External Auditor or Accountant is appointed to conduct the financial audit as well as provide an independent and objective opinion on the fairness, consistency and suitability of the Company's financial statements according to the Indonesia Financial Accounting Standards and regulations in force.

The Company's accountant is appointed by the GMS from the candidates nominated by the Board of Commissioners. The appointed External Auditor is independent from the Board of Directors, Board of Commissioners and interested parties in the Company.

The Company must provide all accounting records and supporting data needed for the External Auditor / Public Accountant Office so as to allow Public Accounting Firm to provide an opinion on the fairness, consistency and suitability of the Company's financial statements with the Indonesia Financial Accounting Standards (FAC) .

Public Accounting Office shall notify the Company if there are events in which the Company does not comply with the rules and regulations in force.

Based on Government Regulation No. 20 Year 2015 concerning Public Accountant Practice, Public Auditor shall be restricted for the maximum of 5 (five) fiscal years in a row, in which the Public Auditor could give back the audit service after 2 (two) consecutive fiscal years of not providing audit services to the same company.

The Company's Financial Statements for period of December as of 31 December 2015 audited by Public Accountants Firm Purwantono, Suherman & Surja that has been appointed as the Company's auditor and approved by the Board of Commissioners. The Audit of the Company's Financial Statements for 5 (five) consecutive years from the financial years 2012 to 2015 can be seen in the table below:

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit Audit Service Cost	Audit Lainnya Other Audits
2015	E. Batara Manurung, CPA	Purwanto, Sungkoro & Surja	Wajar tanpa pengecualian Proper Without Exception	Rp400 juta Rp400 million	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Compliance with Rules and Regulations Internal Control
2014	E. Batara Manurung, CPA	Purwanto, Suherman & Surja	Wajar tanpa pengecualian Proper Without Exception	Rp335 juta Rp355 million	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Compliance with Rules and Regulations Internal Control
2013	Drs. David Sungkoro, CPA	Purwanto, Suherman & Surja	Wajar tanpa pengecualian Proper Without Exception	Rp288 juta Rp288 million	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Compliance with Rules and Regulations
2012	E. Batara Manurung, CPA	Purwanto, Suherman & Surja	Wajar tanpa pengecualian Proper Without Exception	Rp255 juta Rp255 million	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Compliance with Rules and Regulations

SISTEM MANAJEMEN RESIKO

Manajemen Risiko merupakan upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan terhadap risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan penerapan Manajemen Risiko, diharapkan potensi kerugian dapat ditekan serendah mungkin atau apabila memungkinkan pemanfaatan risiko menjadi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.

Saat ini, proses pengembangan Sistem Manajemen Risiko Korporasi secara terstruktur di Perusahaan telah menginjak tahun kedua. Tekad Perusahaan untuk membangun budaya sadar risiko di seluruh lapisan Perusahaan dipicu oleh makin berkembangnya proses implementasi konstruksi yang meng-ekspos Perusahaan pada banyak hal-hal yang bersifat tidak pasti (*uncertainties*) maupun membuka peluang-peluang baru (*opportunities*) yang dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen sepenuhnya, bahwa Manajemen Risiko dilakukan dengan landasan berpikir yang termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) berdasarkan pada tata nilai, sasaran dan strategi dengan prinsip Manajemen Risiko korporat yang bersifat melindungi, menciptakan nilai (*value*), transparan dan inklusif. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Perusahaan. Di samping itu, Manajemen Risiko dapat menjadi alat strategi utama dalam penentuan perencanaan strategis Perusahaan, bukan hanya menjadi alat ukur kinerja operasional harian semata.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk Management is a coordinated effort to direct and control the Company against risks faced in carrying out business activities. With the implementation of Risk Management, potential losses are expected to be reduced as low as possible or if it is possible, use the risks into opportunities to increase corporate profits.

Currently, the structurally development process of Corporate Risk Management System in the Company is in its second year. Determination of the Company to build a culture of risk awareness at all levels of the Company is triggered by the growing process of implementation of construction that exposes the Company on many uncertain things as well as opening up new opportunities that can have a positive impact for the Company's progress.

The Company is fully committed that Risk Management is done with a foundation of thought contained in the Company's Long Term Plan (RJPP) based on the values, targets and strategies with corporate Risk Management principles that protect, create value, transparent and inclusive. Risk Management is an integral part of business processes and decision-makings done in a systematic, structured and timely manner based on the best available information that is tailored to the Company's internal and external conditions. In addition, the Risk Management can be a major strategic tool in determining the Company's strategic planning, not just merely be the daily operating performance measurement.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Strategi penerapan Manajemen Risiko adalah cara yang ditempuh Perusahaan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko, yaitu:

1. Membangun komitmen Direksi untuk memberikan dukungan penuh terhadap penerapan Manajemen Risiko Perusahaan;
2. Menyusun dan menetapkan struktur tata kelola risiko (*risk governance structure*) dan menetapkan struktur akuntabilitas hingga level yang terendah;
3. Melakukan gabungan pendekatan *top-down* dan *bottom up* dalam penerapan Manajemen Risiko;
4. Penunjukan *Risk Officers* yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko secara meluas ke seluruh organisasi;
5. Penyusunan infrastruktur organisasi sebagai unit untuk mendorong penerapan Manajemen Risiko ke seluruh organisasi, termasuk di dalamnya akuntabilitas penerapan tersebut pada setiap tingkatan dalam organisasi;
6. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memadai dalam arti tenaga ahli, pelatihan, dana, sarana fisik, peralatan, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Manajemen Risiko dengan baik;
7. Memastikan keselarasan program Manajemen Risiko dengan strategi Perusahaan, sekaligus menentukan ukuran kinerja pencapaian sasaran Manajemen Risiko;
8. Menerapkan seluruh kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses manajemen Perusahaan;
9. Melakukan pengembangan kompetensi dan proses pembelajaran Manajemen Risiko Perusahaan secara berkesinambungan;
10. Membangun budaya peduli risiko di seluruh proses manajemen Perusahaan melalui antara lain komunikasi kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko Perusahaan secara berkesinambungan.

Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 sesuai dengan SNI ISO 31000:2011, yang dimana komponen-komponen yang terkandung di dalamnya meliputi:

1. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko
 - Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai yang dinyatakan dalam obyektif organisasi;
 - Pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam organisasi dan menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen;
 - Pengelolaan risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan melalui peranannya dalam memberikan opsi kepada pengambil keputusan;

Risk Management Implementation Strategy

Risk Management implementation strategy is the way for the Company to implement the Risk Management policy, as follows:

1. Build Board of Directors' commitment to provide full support to the Company's Risk Management implementation;
2. Develop and establish risk governance structure and assign accountability structure until the lowest level;
3. Perform a combined top-down and bottom up in the application of Risk Management;
4. Appointment of Risk Officer who's responsible to drive Risk Management implementation extensively throughout the organization;
5. Develop organization infrastructure as a unit to drive the Risk Management implementation throughout the organization, including implementation accountability at all levels within the organization;
6. Provide necessary and adequate resources in terms of expertise, training, funding, physical facilities, equipment, and time required to implement Risk Management properly;
7. Ensure alignment of Risk Management program with the Company's strategy, and at the same time determine the achievement indicator of Risk Management objectives;
8. Implement Company's Risk Management policies consistently and continuously to become an integrated part of the Company's management process;
9. Develop competencies and learning processes of the Company's Risk Management continuously;
10. Build a culture of risk awareness in the whole management process of the Company through communication between policy and implementation of The Company's Risk Management continuously.

Risk Management System

Company is committed to implement a Risk Management System based on ISO 31000 in accordance with ISO 31000: 2011, where the components including the following:

1. Risk Management Principles
 - Risk Management creates and protects values stated in the organization's objectives
 - Risk management is an integrated part of the whole process in the organization and become part of the management responsibility;
 - Risk management is part of the decision-making process through its role in providing options to decision makers;

- Pengelolaan risiko secara eksplisit seharusnya memperhitungkan ketidakpastian dan secara sadar harus berusaha mengurangi ketidakpastian dalam setiap aktivitasnya dalam memastikan pencapaian obyektif organisasi;
 - Pengelolaan risiko seharusnya dibangun melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan tepat waktu agar dapat berkontribusi secara efisien dan secara konsisten menghasilkan keluaran yang dapat diperbandingkan dan diandalkan;
 - Pengelolaan risiko membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai seperti data historis, pengalaman Perusahaan, umpan balik dari Pemangku Kepentingan, observasi, dan penilaian para ahli sehingga para pengambil keputusan dapat meyakini bahwa keputusannya telah memperhitungkan semua informasi yang tersedia pada waktu keputusan tersebut dibuat;
 - Pengelolaan risiko membutuhkan kustomisasi sesuai dengan konteks—baik internal maupun eksternal—dan profil risiko inheren dengan organisasi tersebut;
 - Pengelolaan risiko seharusnya memperhitungkan faktor manusia dan budaya yang merupakan bentuk kapabilitas dari suatu organisasi dalam mencapai obyektifnya;
 - Pengelolaan risiko seharusnya transparan dan inklusif melibatkan semua Pemangku Kepentingan dalam menentukan kriteria risiko;
 - Pengelolaan risiko seharusnya dinamis, berulang, dan respon terhadap perubahan kejadian baik internal maupun eksternal;
 - Pengelolaan risiko seharusnya dapat memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dari sebuah organisasi diukur dari tingkat maturitasnya.
- Risk management should explicitly take into account the uncertainty and should try intentionally to reduce the uncertainty in every activity to ensure the achievement of the organization objectives;
 - Risk management should be established through a systematic, structured and timely approach, in order to contribute in an efficient and consistent manner and produce an output that is comparable and reliable;
 - Risk management requires the availability of adequate information such as historical data, company experience, feedback from stakeholders, observation and expert assessment so that the decision makers is confident that the decision taken according to all information available at the time the decision is made;
 - Risk management requires customization according to the context—both internal and external—and the risk profile inherent with the organizations;
 - Risk management should considers the human and cultural factors which is a form capability of an organization in achieving objectives;
 - Risk management should be transparent and inclusive and involve all Stakeholders in determining risk criteria;
 - Risk management should be dynamic, repetitive, and response to changes in both internal and external matters;
 - Risk management should be able to facilitate the sustainable development of an organization which is measured from the level of its maturity.

Perusahaan mengadopsi prinsip tersebut dengan menuangkannya dalam traktat Manajemen Risiko yang telah disepakati oleh Direksi pada awal tahun 2015.

2. *Framework* Manajemen Risiko

Framework Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000 terdiri dari:

- Mandat dan Komitmen.
- Desain Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
- Penerapan Manajemen Risiko.
- Monitoring dan Reviu Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
- Perbaikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko secara berlanjut.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2015 untuk melaksanakan *Framework* Manajemen Risiko meliputi:

The Company adopted these principles and contained in Risk Management treaties that approved by the Board of Directors in early 2015.

2. Risk Management Framework

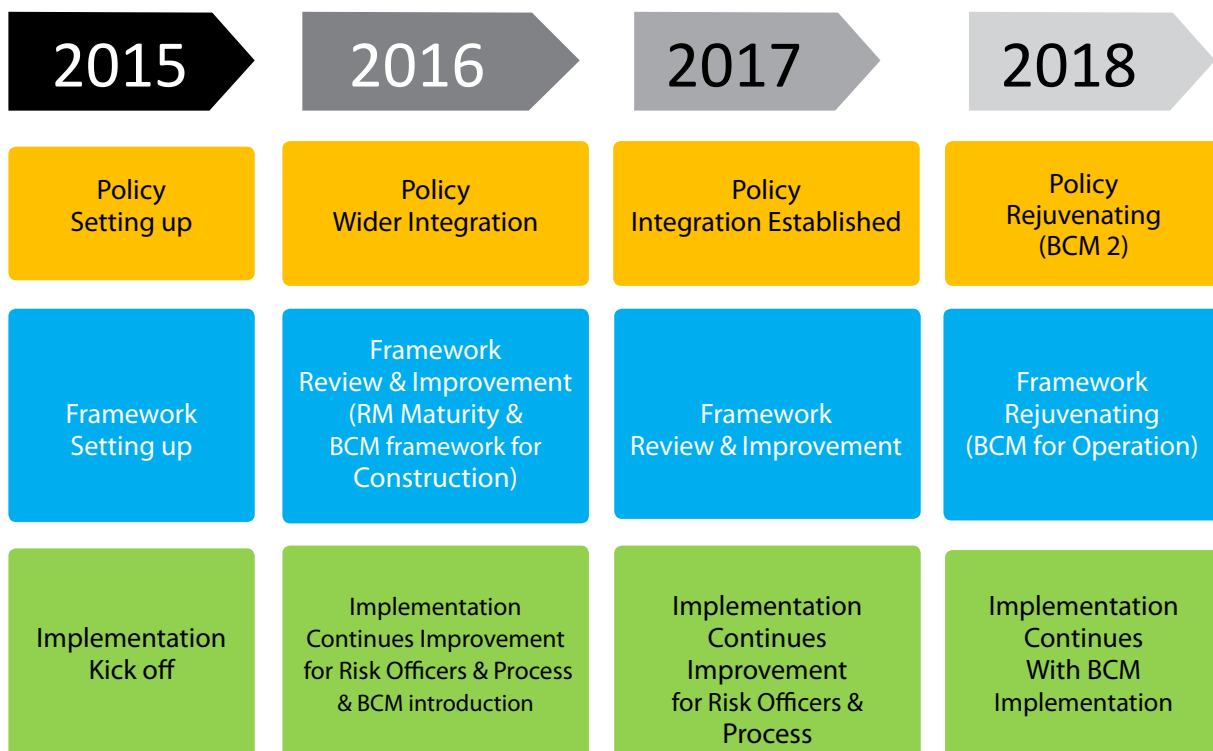
Risk Management Framework in comply with ISO 31000, consist of:

- Mandate and Commitment.
- Work Frame Design of Risk Management.
- Risk Management Implementation.
- Monitoring and review of Work Frame of Risk Management
- Sustainable Improvement of Work Frame of Risk Management

To implement the Risk Management Framework, in 2015, the Company has conducted the following:

- Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/014/BOD-MRT/III/2015 tentang Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan PT MRT Jakarta;
- Penetapan Komite Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/019/BOD-MRT/III/2015 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko di Lingkungan PT MRT Jakarta;
- Penetapan *Risk Officers* melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/003/BOD-MRT/I/2016;
- Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko ditingkat Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/001/BOC-MRT/IV/2015;
- Penetapan Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/001/BOC-MRT/I/2016;
- Penyusunan *Roadmap* Manajemen Risiko untuk 2014-2017 dan implementasinya melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan setiap tahunnya.
- Determination of Risk Management Policy through Board of Directors' Decree No. SK / 014 / BOD-MRT / III / 2015 concerning Risk Management Policy in PT MRT Jakarta;
- Determination of the Risk Management Committee through Board of Directors' Decree No. SK / 019 / BOD-MRT / III / 2015 concerning the Establishment of the Risk Management Committee in PT MRT Jakarta;
- Determination of Risk Officers through Board of Directors' Decree No. SK / 003 / BOD-MRT / I / 2016;
- Determination of Risk Oversight Committee Charter at the Commissioner level through Board of Commissioners' decree No. / 001 / BOC-MRT / IV / 2015;
- Determination of Risk Oversight Committee through the Board of Commissioners Decree No. SK / 001 / BOC-MRT / I / 2016;
- Preparation of Risk management Roadmap for 2014-2017 and its implementation through the yearly Work Plan and Budget.

Roadmap Manajemen Risiko PT MRT Jakarta



Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko, hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah:

- Penetapan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko;
- Penetapan kriteria risiko;
- Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
- Penetapan mekanisme pelaporan dan *monitoring*;

As outlined in the Risk Management Policy, the major concern are the following:

- Determination of accountability in risk management;
- Determination of risk criteria;
- Determination of risk appetite and risk tolerance.
- Determination of report and monitoring mechanism

- Penetapan integrasi manajemen risiko kedalam hal-hal sebagai berikut:
 - » Proses perencanaan strategis bisnis perusahaan.
 - » Proses Perencanaan dan penganggaran.
 - » Proses manajemen proyek.
 - » Proses manajemen kinerja.
 - » Proses audit internal.

Inisiatif Pembentukan Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris yang dilakukan di penghujung tahun, melengkapi *Framework* Manajemen Risiko yang dibangun di sepanjang tahun 2015. Dengan telah disusunnya Piagam Komite Pemantau Risiko dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *Executive Briefing* bagi Direksi dan Dewan Komisaris beserta anggota Komite Pemantau Risiko, serta penetapan anggota Komite Pemantau Risiko, maka keseluruhan perangkat inti untuk penerapan Sistem Manajemen Risiko telah dibangun dalam kurun waktu 1(satu) tahun.

3. Implementasi Manajemen Risiko

Implementasi Manajemen Risiko terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut:

- Penyusunan konteks;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Perlakuan risiko;
- Pemantauan dan kaji ulang risiko.

Salah satu bentuk implementasi Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan adalah pelaksanaan proses *risk assessment*, *risk evaluation*, *risk treatment* dan pelaporannya yang dilakukan setiap triwulan.

Keluaran dari proses ini adalah *Risk Register* yang berisi antara lain:

- Peristiwa risiko;
- Penyebab risiko;
- Dampak risiko;
- Rating risiko;
- Rencana Mitigasi.

Hasil dari proses implementasi ditingkat divisi/departemen kemudian dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan hasil pertemuan tersebut didokumentasikan dalam profil risiko korporasi (*corporate risk profile*).

Penetapan Model Risiko Berdasarkan Proses Bisnis

Penggolongan risiko yang diterapkan di Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Determination of the integration of risk management into the following:
 - » Process of Company Business Strategic Plan
 - » Process of Planning and Budgetting
 - » Process of Project Management
 - » Process of Performance Management
 - » Process of internal audit

Initiative to establish Risk Oversight Committee at the Board of Commissioners level at the end of the year, complement the Risk Management Framework established throughout 2015. With the existence of Risk Oversight Committee Charter and followed by with the implementation of Executive Briefing for Board of Directors and Board of Commissioners and members of the Risk Monitoring Committee, thus determination of Risk Monitoring Committee, therefore the whole core devices for the implementation of Risk Management System has been established within one (1) year period.

3. Risk Management Implementation

Steps to implement Risk Management are the following:

- Context preparation;
- Risk identification;
- Risk analysis;
- Risk evaluation;
- Risk treatment;
- Monitoring and risk reviewing.

One form of implementation of the Risk Management that has been implemented by the Company is the implementation of the process of risk assessment, risk evaluation, risk treatment and its reporting conducted quarterly.

The output of this process is the Risk Register which contains among others:

- Risk event;
- Risk Cause;
- Risk Impact;
- Risk Rating;
- Mitigation Plan;

The results of this implementation process conducted at division/ department level and then reported to the Risk Management Committee and the results of the meeting are documented in the corporate risk profile

Determination of Risk Model based on Business Process

Risk classification applied at the Company is as follows:

1. **Risiko Strategis** adalah risiko yang berhubungan dengan strategi jangka panjang dan masa depan Perusahaan. Termasuk didalamnya risiko proyek, reputasi, pengembangan usaha, investasi, model bisnis dan lain sebagainya. Pada fase konstruksi risiko strategis dapat berupa pula risiko-risiko yang berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan MRT Jakarta.
2. **Risiko Operasional** adalah risiko yang berhubungan dengan operasional tahunan Perusahaan. Umumnya risiko operasional menyebabkan Perusahaan tidak dapat melakukan atau melanjutkan kegiatan operasional secara normal atau terganggunya sistem penyelenggaraan organisasi Perusahaan, termasuk kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian terhadap ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian internal, prosedur yang tidak memadai, ataupun karena gangguan pada sistem informasi manajemen dan komunikasi, serta bencana alam, kebakaran. Termasuk di dalamnya adalah risiko sumber daya manusia, hukum, teknologi informasi, koordinasi, dan komunikasi.
3. **Risiko Keuangan** adalah risiko-risiko yang berhubungan dengan aspek keuangan Perusahaan. Secara umum risiko keuangan mencakup:
 - Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang dapat merugikan Perusahaan, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, *tax rate*, *shipping rate*.
 - Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul jika Perusahaan tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat dikonversi dengan segera untuk memenuhi kewajiban. Risiko ini terjadi akibat kegagalan pengelolaan sumber dana dan investasi dana (*mismatch*) atau kekurangan likuiditas (*shortage*) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban keuangan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
 - Risiko ketidakefisienan biaya antara lain segala macam bentuk denda, biaya perbaikan maupun biaya-biaya yang seharusnya dapat dihindarkan.
 - Risiko hilangnya potensi pendapatan (*business interruption*) sebagai akibat dari skema bisnis yang tidak tepat.
 - Risiko harga adalah risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian harga jual layanan yang ditetapkan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mencapai tingkat keekonomian bisnis.
4. **Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja** adalah risiko-risiko yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya. Secara umum, namun tidak terbatas contoh dari risiko ini

1. **Strategic Risk** is a risk associated with the Company's long-term strategy and the future of the Company. It is including project risk, reputation, business development, investment, business models, and so forth. In the construction phase the strategic risk may also be in the form of risks which potentially delay the completion of the MRT Jakarta construction project.
2. **Operational Risk** is a risk associated with annual operations of the Company. Generally, operational risks can cause the Company unable to undertake or continue normal operations or disrupt the operation of the Company organization, including errors and abuse of authority, the uncertainty of stipulations or weakness of the internal control structure, inadequate procedures, or because of interference in management information systems and communication, natural disasters, fires. Included are the risks of human resources, legal, IT, coordination, and communication.
3. **Financial risks** are the risks associated with the financial aspects of the Company, such as:
 - Market risk is a risk arising from movements in market variables (*adverse movement*) that could harm the Company, such as: interest rates, currency exchange rates, tax rates, shipping rate.
 - Liquidity risk is a risk that arises if the Company does not have any cash or short-term assets that can be converted immediately to meet the obligation. This risk is due to a failure in managing source of funds and investment funds (*mismatch*) or liquidity shortage resulting in non fulfillment of financial obligations within a predetermined time.
 - The risk of cost inefficiency among others are all kinds of fines, cost of repairs and other costs that could have been avoided;
 - The risk of potential income loss (*business interruption*) resulting from improper business scheme.
 - Price risk is a risk arising from the mismatch between the service selling price set and the needs required in order to achieve the level of business economics.
4. **Safety and Health Risks** are risks associated with health and safety of employees, customers and other Stakeholders. In general, but not limited examples of these risks include: workplace accidents caused by mechanical hazards

antara lain: kecelakaan kerja yang disebabkan oleh bahaya mekanis (pengoperasian peralatan dan benda mekanika otomatis dan manual), bahaya listrik (energi listrik seperti kebakaran, hubungan arus pendek, atau sengatan arus listrik), bahaya kimia (senyawa unsur bahan kimia seperti keracunan, ledakan, dan pencemaran lingkungan), bahaya fisik (bising, tekanan, getaran, suhu panas/dingin, radiasi sinar ultraviolet), bahaya ergonomi (desain/penataan tempat kerja yang menyebabkan kelelahan yang berlebihan) dan bahaya psikologis (jam kerja yang panjang, *shift* kerja yang tidak menentu, hubungan antar pekerja yang kurang baik), dan sebagainya.

5. **Risiko Kepatuhan** adalah risiko yang berkaitan dengan aspek yuridis dan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Risiko Eksternal** adalah risiko-risiko yang berhubungan dengan aspek eksternal Perusahaan (di luar kendali Perusahaan) termasuk di dalamnya adalah politik dan ekonomi nasional, regulasi, kondisi pasar global, dan *Act of God*.

Setelah selesainya proses identifikasi sampai dengan *assessment* risiko, disusunlah usulan tindak lanjut penanganan risiko; dimana usulan tindak lanjut risiko yang tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rencana mitigasi risiko (bila memungkinkan untuk melakukan mitigasi) yang meliputi: biaya yang dibutuhkan, waktu, dan perkiraan tingkat sisa risiko (dengan menyertakan perkiraan akibat dan kemungkinan sisa risiko setelah mitigasi dilakukan).
- Rencana perlakuan untuk mempertahankan tingkat risiko (agar tidak berkembang menjadi lebih tinggi), bila risiko tidak dapat dimitigasi.
- Rekomendasi apakah risiko sebaiknya diterima, dihindari atau dimitigasi dengan:
 - » Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;
 - » Mengurangi akibat yang ditimbulkan bila risiko terjadi; dan
 - » Memindahkan (transfer) risiko ke pihak lain.

Menghindari atau meninggalkan risiko dapat dilakukan dengan menghindari atau mengubah kegiatan serta tujuan, strategi, sasaran dan atau rencana hasil kegiatan tersebut. Tindak-lanjut risiko harus dicatat di dalam rencana tindak lanjut risiko.

Pada proses penyusunan RJPP, Manajemen Perusahaan berkesempatan untuk meninjau kembali lingkungan strategis sekaligus melakukan analisis risiko di tingkat korporat. Melalui proses tersebut teridentifikasi 10 risiko utama yaitu sebagai berikut:

(operation of automatic and manual mechanical equipment and objects), electrical hazards (electrical energy such as fire, short circuiting, electric shock), chemical hazards (compounds of chemical elements such as poisoning, explosion, environmental pollution), physical hazards (noise, pressure, vibration, heat/cold, UV radiation), ergonomics hazards (design/ arrangement of the workplace that causes excessive fatigue) and psychological hazards (long working hours, erratic work shift, poor relationship between workers), and others.

5. **Compliance Risk** is a risk associated with the legal aspects and the Company's compliance with prevailing regulations.
6. **External Risks** are risks associated with the external aspects of the Company (beyond the control of the Company) including: political and national economic, regulatory, global market conditions, Act of God.

After the identification process to risk assessment is completed, follow-up proposal is made to handle the risk, in the proposed follow-up be included, namely:

- Risk mitigation plan (if possible to mitigate) including: the required costs, time, and estimated level of residual risk (including the estimated effects and the possibility of residual risk after mitigation is performed);
- Treatment plan to maintain risk level (to prevent the risk to develop further), if the risk cannot be mitigated;
- Recommendation whether the risk should be accepted, avoided or mitigated by:
 - » Reduce the likelihood of risk occurrence,
 - » Reduce the impact if risk occurs and
 - » Transfer risks to another party;

Avoiding or abandoning risk can be done by avoiding or changing the activities, goals, strategies, objectives and or target plan of the activities. Follow-up risks must be recorded in the risks follow-up plan.

In the process of preparing RJPP, the Company's management had the opportunity to review the strategic environment and conduct risk analysis at the corporate level. Through the process 10 major risks identified as follows:

10 Risiko Utama PT MRT Jakarta

10 Major Risks of PT MRT Jakarta

Risiko-risiko Utama/ Primary Risks	
Risiko/ Risk	Kontrol Mitigasi/ Mitigation Control
<p>Kurangnya pemahaman yang jelas mengenai status hukum MRT Jakarta di bawah hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Lack of understanding on the legal status of MRTJ under the prevailing law and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menilai dan finalisasi implikasi <i>legal</i> dari posisi strategi MRT Jakarta (termasuk Izin Usaha Sarana). Setelah difinalisasi, Perusahaan perlu untuk mengkomunikasikan status hukum MRT Jakarta kepada Pemangku Kepentingan terkait. Assess and finalize legal implications of MRTJ strategic position (Including Facilities' Business Permit). After finalization, MRTJ need to communicate MRTJ's legal status to related stakeholders.
<p>Keterlambatan di proses pencairan pinjaman yang dikarenakan oleh proses penagihan yang kompleks.</p> <p>Delay in the loan disbursement process caused by complex billing process.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berkordinasi dengan Pemangku Kepentingan terkait untuk memastikan pencairan pinjaman yang tepat waktu untuk memfasilitasi pembayaran terhadap pihak eksternal. Coordination with related stakeholder to ensure on time loan disbursement process in order to facilitate payments to external parties.
<p><i>Bankruptcy Risk</i> dikarenakan ekuitas yang tidak mencukupi. Ini bisa disebabkan oleh guncangan di kondisi politik dan ekonomi dan/atau kurangnya koordinasi untuk menganggarkan modal Perusahaan ke dalam anggaran Pemerintah Daerah.</p> <p>Bankruptcy Risk caused by insufficient equity. It may be caused by instability in political and economical condition and/or lack of coordination to budget the Company's Capital into the Local Government's Budget.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga agar jumlah ekuitas Perusahaan lebih dari 25% dari total ekuitas. Maintain the Company's equity of more than 25% from total equity.
<p>Risiko pengembangan di Dukuh Atas <i>Interchange</i>.</p> <p>Development Risk at Dukuh Atas Interchange.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong tercapainya koordinasi di mana PT MRT Jakarta dapat memegang peranan sentral, yaitu melalui rencana pembentukan Tim Kecil Dukuh Atas. Menyiapkan visi awal pengembangan Dukuh Atas yang utuh dan padu serta atraktif untuk menggalang kebersamaan antar para Pemangku Kepentingan. Encourage achievement of coordination where PT MRT Jakarta may hold central part i.e. through the formation plan of Dukuh Atas Small Team. Prepare a complete and integrated also attractive initial vision of Dukuh Atas development in order to rally togetherness between the Stakeholders.
<p>Kurangnya aspek <i>safety</i> dan <i>security</i> dalam dokumen lelang.</p> <p>Lack of safety and security aspects in the tender document.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ditekankannya pentingnya aspek <i>safety</i> dan <i>security</i> kepada kontraktor. Emphasize the importance of safety and security aspects to the contractor.
<p>Penundaan dalam proses pembebasan lahan, khususnya Stasiun Lebak Bulus.</p> <p>Delay in land acquisition process, especially at Lebak Bulus Station.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dan memperoleh surat rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Menyiapkan surat penjualan aset. Coordinate and monitor alongside the utilities' owner. Survey has been conducted for relocation of utilities alongside the utilities' owner.
<p>Keterlambatan relokasi utilitas.</p> <p>Delay in utilities relocation</p>	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan <i>monitoring</i> dengan pihak pemilik utilitas. Telah dilakukan survei untuk relokasi utilitas dengan pihak pemilik utilitas. Coordinate and monitor alongside the utilities' owner. Survey has been conducted for relocation of utilities alongside the utilities' owner.
<p>Penyelesaian paket sistem dan sarana perkeretaapian yang terlambat (CP 107 & CP 108).</p> <p>Completion of the delayed railroad system and facilities package (CP 107 & CP 108).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan implementasi dari paket pekerjaan, terutama untuk depo dan stasiun <i>elevated</i> untuk tujuan percobaan kereta pertama. Menambah jumlah sub-kontraktor untuk pekerjaan sipil dengan sistem kerja paralel. Coordinate and implement the work package, especially for depo and elevated station for the purpose of the first train. Add the number of sub-contractors for civil work with parallel work system.
<p>Kegagalan dalam pencapaian target profil <i>ramp-up</i>.</p> <p>Failure of ramp-up profile target achievement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam kampanye iklan untuk mendidik basis target pelanggan tentang keuntungan dari MRT Jakarta, konektivitas yang ditawarkan dan sarana perjalanan (mendidik tentang perjalanan bawah tanah). Involvement in advertisement campaign in order to educate customer base target regarding benefits of MRT, connectivity offered and travel facilities (e.g. education regarding underground travel).

Risiko-risiko Utama/ Primary Risks

Risiko/ Risk	Kontrol Mitigasi/ Mitigation Control
Pendapatan yang tidak berkelanjutan dan ketersediaan subsidi.	<ul style="list-style-type: none"> Menilai kembali pengaturan tarif dalam berbagai kondisi. Analisis ulang atas model operasi organisasi. Re-assess tariffs setting in various conditions. Re-analyze organization operation model.
Non-continuous income & availability of subsidy.	

Pengembangan Personil untuk Manajemen Risiko

Komitmen Perusahaan dalam membangun sistem Manajemen Risiko terutama ditekankan kepada pengembangan personil sehingga kapasitas individu kunci untuk mengelola risiko sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesi. Standar profesi yang diadopsi oleh Perusahaan mengacu pada tingkat regional maupun nasional. Hal ini membawa konsekuensi personil yang ditugaskan di Divisi Manajemen Risiko maupun Kepala Unit (Divisi/Departemen) mengikuti pelatihan untuk pengelolaan risiko dan tersertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesi.

Pelatihan yang telah diberikan bagi personil Divisi Manajemen Risiko khususnya yaitu:

1. *Enterprise Risk Management Fundamental* (ISO 31000 series).
2. *Enterprise Risk Management Implementation* (ISO 31000 series).
3. *Auditing Risk Management* (ISO 31000 series).
4. *Legal Risk Management*.
5. *Enterprise Risk Governance*.

Pada tahun 2015 Divisi Manajemen Risiko telah berhasil mensertifikasikan 3 (tiga) orang personilnya sesuai dengan standar profesi Manajemen Risiko.

Untuk menjamin keberlangsungan implementasi proses Manajemen Risiko, Perusahaan juga menyadari pentingnya peran *risk officer* serta kepala divisi/departemen sebagai fasilitator proses implementasi Manajemen Risiko. Oleh sebab itu Perusahaan melaksanakan *in house training* pada akhir tahun 2015 yang diikuti oleh *Risk Officers* dan Kepala Divisi/Departemen. Sebanyak 13 (tiga belas) orang *Risk Officers* telah mengikuti pelatihan sertifikasi tingkat internasional yaitu *Enterprise Risk Management Academy, Singapore*.

Pengembangan kapasitas personil juga dilakukan pada tingkat eksekutif melalui keikutsertaan Direksi dalam *International Risk Management Event* di bulan Desember tahun 2014 dan pelaksanaan *Executive Briefing* oleh narasumber yang sangat berpengalaman dalam bidang Manajemen Risiko pada bulan Desember tahun 2015 bagi Direksi, Komisaris dan Komite Pemantau Risiko.

Risk Management's Personnel Development

The Company's commitment in building a Risk Management system is mainly focused on the development of the personnel so that the capacity of key personnel to manage risk in accordance with the standards established by the profession. Professional standards adopted by the Company refers to the regional and national level. Therefore the personnel assigned to the Risk Management Division and the Head Unit (Division / Department) participated in risk management training and certified according to the standards established by the profession.

Training for Risk Management's Division personnel in particularly are:

1. *Enterprise Risk Management Fundamental* (ISO 31000 series).
2. *Enterprise Risk Management Implementation* (ISO 31000 series).
3. *Auditing Risk Management* (ISO 31000 series).
4. *Legal Risk Management*.
5. *Enterprise Risk Governance*.

In 2015, the Risk Management Division has successfully certifying 3 (three) personnel in accordance with Risk Management professional standards.

To ensure the sustainability of the implementation of the Risk Management process, the Company also realized the importance role risk officer and division/department heads as a facilitator for the implementation process of Risk Management. Therefore the Company is conducted *in house training* at the end of 2015, attended by Risk Officers and Heads of the Division / Department. A total of 13 (thirteen) Risk Officers have participated in an international accredited training, namely *Enterprise Risk Management Academy, Singapore*.

Capacity development personnel also carried out at the executive level through participation of Director in the *International Risk Management Event* in December 2014 and the *Executive Briefing* was conducted by a speakers who are highly experienced in the field of Risk Management in December 2015 for the Board of Directors, Commissioners and Risk Oversight Committee.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System



Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Direksi BUMD diwajibkan untuk menetapkan sebuah Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal ini mencakup antara lain: lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, pengukuran risiko, rencana mitigasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta monitoring atau pemantauan.

In accordance with Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Act No. 23 of 2014 on Local Government and the Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No 96 Year 2004 on Implementation of Good Corporate Governance Practices at the Regional Owned Enterprises (BUMD) at Jakarta Regional Government, the BUMD's Board of Directors are required to establish an effective Internal Control System to secure investments and assets of the Company. Internal Control Systems include among others: the control environment, risk identification, risk assessment, risk mitigation plans, control activities, information and communication, and monitoring.

Direksi Perusahaan telah merancang Sistem Pengendalian Internal dengan acuan *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) Framework*. COSO Internal Control-Integrated Framework (1992) mendefinisikan pengendalian intern sebagai, *A process, effected by an entity's board of directors, management, and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of subjectives in the following categories:*

- *Effectiveness and efficiency of operations.*
- *Reliability of financial reporting.*
- *Compliance with applicable laws and regulations.*

Definisi di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh Direksi, manajemen dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai guna menjamin pencapaian tujuan Perusahaan yang efektifitas dan efisiensi, dengan didukung keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan telah menyesuaikan dengan COSO Framework tersebut. 5 (lima) unsur yang diperhatikan Perusahaan dalam pengembangan pengendalian internal adalah:

1. Lingkungan Pengendalian Perusahaan
Perusahaan telah mengembangkan dan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui pembangunan budaya perusahaan, seperti adanya kesepakatan seluruh Insan Perusahaan akan nilai-nilai Perusahaan dan aturan perilaku (*Code of Conduct*) serta adanya penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan pendelegasian kewenangan dan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan strategi Perusahaan, kebijakan SDM yang berbasis kepada kompetensi, dan pengembangan GCG secara terus menerus.
2. Penilaian Risiko
Guna menjamin adanya sadar risiko pada setiap insan Perusahaan, Perusahaan telah membangun budaya risiko di setiap unsur dan proses utama. Perusahaan telah menetapkan Divisi Manajemen Risiko sebagai *leader* dalam pengembangan manajemen risiko, baik itu pada risiko *level* korporasi maupun unit kerja sehingga tersedia *Risk Register* di masing-masing unit kerja. *Risk Register* ini selalu dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
3. Aktivitas Pengendalian
Untuk menjamin bahwa seluruh proses utama Perusahaan telah dilakukan secara baik, memenuhi unsur efektifitas, efisiensi, dan dilengkapi dengan *accountability* serta pertanggungjawaban yang baik, Perusahaan telah melakukan identifikasi proses-proses yang diperlukan dalam

Company's Board of Director has designed Internal Control System with reference to the Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) Framework. COSO Internal Control-Integrated Framework (1992) defines internal control as "a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of subjectives in the following categories:

- Effectiveness and efficiency of operations.
- Reliability of financial reporting.
- Compliance with applicable laws and regulations.

The above definition can be interpreted that internal control is a process that is influenced by the Directors, management and other parties that are designed to provide reasonable assurance to ensure the achievement of the Company's objectives in effective and efficient manner, and supported by the reliability of financial statements and compliance with laws and regulations.

Development of Internal Control System in the Company has to adjust to the COSO Framework. The 5 (five) elements to consider in the development of the Company's internal control are:

1. The Company's Control Environment
The Company has developed and created a control environment through the development of corporate culture, such as the agreement of all the Company's personnel on the Company's values and Code of Conduct as well as the organizational structure development that reflects the delegation of authority and a clear segregation of tasks in accordance with the Company's strategy, competency-based HR policies and continuously development of Good Corporate Governance.
2. Risk Assessment
In order to ensure the existence of risk awareness in every individual of the Company, the Company has built risk culture in each element and the main process. The Company has established the Risk Management Division as a leader in the development of risk management, both in enterprise level and work unit level in order to make available Risk Register in each work unit. Risk Register is always evaluated every 3 (three) months.
3. Control Activities
To ensure that all major processes in the Company are performed properly, meets the elements of effectiveness, efficiency, and come with accountability and responsibility, the Company has identified the processes required in the Company's management, at the technical divisions

pengelolaan Perusahaan, baik itu pada divisi yang berifat teknis maupun pada divisi pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan telah dilengkapi standar operasi dan prosedur. Standar operasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi ini merupakan bagian dari mitigasi risiko dari masing-masing *risk register* unit kerja yang bersangkutan.

Dalam penyusunan SOP untuk operasi, pemeliharaan dan perawatan MRT Jakarta, Perusahaan dibantu oleh Konsultan Internasional.

4. Komunikasi dan informasi
Sebagai Perusahaan yang sedang mengerjakan proyek besar, proyek untuk kepentingan publik, manajemen sangat menyadari arti penting komunikasi dan informasi, khususnya komunikasi dan informasi tentang dan jalannya pekerjaan proyek, progress proyek dan dampaknya terhadap pelayanan publik lainnya. Fungsi komunikasi dan informasi dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Secretary*. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain adalah membangun, memantau dan evaluasi situs web. Di samping itu, kegiatan lain dilakukan melalui sosialisasi kegiatan proyek baik dengan cara tinjauan langsung kepada masyarakat sekitar jalur proyek maupun melakukan seminar dan konferensi pers.
5. Pengawasan
Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah berjalan dengan baik, manajemen dan unit-unit kerja terkait diwajibkan melakukan pengawasan dan perbaikan secara terus menerus atas penerapan Sistem Pengendalian Internal. Selain itu, *Internal Audit & Compliance* secara terpisah juga melakukan monitoring terhadap implementasi Sistem Pengendalian Internal. Fungsi monitoring juga dilakukan Komite Audit—yang baru terbentuk di awal tahun 2016—dan Auditor Publik, dimana proses audit eksternal yang telah melakukan monitoring atas implementasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di tahun 2015 adalah Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young).

Audit Internal

Audit Internal melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan asuransi Perusahaan, serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya dan memberikan saran-saran perbaikan. Di samping itu, Audit Internal menilai kelayakan pengendalian intern pada unit kerja dan fungsi bisnis Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan dan memberikan nasihat agar Direksi dapat menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif.

and supporting division. This is done to ensure that every process management has been equipped with a standard operating procedure. Operational standards and procedures established by the Board of Directors are part of the risk mitigation of the Risk Register in the respective work unit.

In the preparation of SOPs for operation, maintenance and services MRT Jakarta, is the Company assisted by International Consulting Companies.

4. Communication and information
As the Company currently working on a large project, a project for the public interest, the management is very aware of the importance of communication and information, particularly information and communication about and the course of the project work, the progress of the project and its impact on other public services. Communication and information functions are coordinated by the Corporate Secretary Division. The things that have been done are building, monitoring and evaluation of web sites. In addition, other activities are also carried out through the dissemination of project activities either by way of reviews directly to the public about the project path as well as conducting seminars and press conferences.
5. Monitoring
To ensure that the Company's Internal Control System has been running well, the management and related work units are required to conduct monitoring and continual improvements on the application of Internal Control System. In addition, Internal Audit & Compliance also separately conduct monitoring the Internal Control System implementation. Monitoring function is also conducted by Audit Committee -newly formed in early 2016- and Public Auditor. The external auditor process monitoring the implementation of the Company's Internal Control System in 2015 was Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).

Internal Audit

The Company conducted internal audit on internal finance and Company's assurance, and also assessed the Company's control, management and implementation and provide suggestions for improvement. In addition, the Internal Audit assess the feasibility of internal controls on the Company work units and business functions. In doing so, the Board of Commissioners through the Audit Committee supervise and provide advice so that the board of Directors could implement an effective internal control system.

TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI The Governance of Information Transparency



Dalam praktik pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tata kelola keterbukaan informasi merupakan salah satu bagian dari prinsip transparansi yang tercerminkan dari komitmen sebuah perusahaan dalam mendelegasikan informasi kepada seluruh elemen yang berkepentingan dalam proses pengelolaan dan manfaat Perusahaan. Sebagai pelaksana pembangunan MRT Jakarta, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang proporsional dan komprehensif kepada seluruh elemen yang berkepentingan, baik itu publik, pemegang saham maupun Pemangku Kepentingan.

Perusahaan menyediakan berbagai saluran informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang saham dan Pemangku Kepentingan. Untuk memperoleh laporan tahunan dan informasi lainnya dari Perusahaan, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat PT MRT Jakarta, dengan alamat sebagai berikut:

In the Good Corporate Governance practices, corporate governance of information transparency is one part of the principle of transparency, reflected in the commitment of a Company in delegating information to all elements with any interest in the management process and the benefits of the Company. As the operator of MRT Jakarta construction, the Company has an obligation to provide a proportional and comprehensive information to all elements of interests; general public, shareholders, or Stakeholders.

The Company provides a variety of information channels are accessible to all shareholders and Stakeholders. To receive the annual report and other information of the Company, please contact the Corporate Secretary at the Headquarter Office of PT MRT Jakarta, at the following address:

Wisma Nusantara, Lantai 21
 Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350 - INDONESIA
 Telp. (62)21 3906454
 Faks. (62) 21 3155846
 Email: info@jakartamrt.com
 Twitter: @mrtjakarta
 Instagram: @mrtjkt
 Facebook: www.facebook.com/jakarta mrt

Wisma Nusantara, 21st, Floor
 Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350 - INDONESIA
 Ph. (62) 21 3906454
 Facs. (62) 21 3155846
 E-mail: info@jakartamrt.com
 Twitter: @mrtjakarta
 Instagram: @mrtjkt
 Facebook: www.facebook.com/jakarta mrt

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, Pemangku Kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan.

Di bawah ini disajikan korespondensi Perusahaan selama tahun 2015.

Correspondencies and Periodic Reports

Financial and non financial information of the Company have been prepared and reported in a transparent manner to shareholders, Stakeholders and other agencies as required. Information reported within time, it is presented with a complete and accurate, current, and adequate in accordance to the procedures, type and scope as stipulated in the provisions of the Transparency of the Company Financial Condition.

Below is the Company's correspondencies during 2015.

No Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Dated	Kepada To	Perihal Subject
018	7 Januari 2015 January 7, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan Perkembangan Proyek MRT Jakarta periode sampai dengan 31 Desember 2014 Progress Report of Jakarta MRT Project, for the period of up until December 31, 2014
146	23 Januari 2015 January 23, 2015	Kepala BPMP Head of BPMP	Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 Financial Statements per December 31, 2014
157	27 Januari 2015 January 27, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Barat Head of KLH of West Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 4 Tahun 2014 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 4th quarter of 2014 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
158	27 Januari 2015 January 27, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Utara Head of KLH of North Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 4 Tahun 2014 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 4th quarter of 2014 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
159	27 Januari 2015 January 27, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Pusat Head of KLH of Central Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 4 Tahun 2014 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 4th quarter of 2014 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
159	27 Januari 2015 January 27, 2015	Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Head of BPLHD of DKI Jakarta	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 4 Tahun 2014 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 4th quarter of 2014 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
166	27 Januari 2015 January 27, 2015	Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Deputy Governor of DKI Jakarta	Progress pembangunan MRT Jakarta pada bulan Agustus 2018 Progress Report of Jakarta MRT construction on August 2014

No Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Dated	Kepada To	Perihal Subject
176	30 Januari 2015 January 30, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Permohonan waktu untuk penandatanganan CP 108 MRT Jakarta Permission for the signing up of the CP 108 Jakarta MRT
203	11 Februari 2015 February 11, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan Perkembangan Proyek MRT Jakarta periode sampai dengan 31 Januari 2015 Progress Report of Jakarta MRT Project, to the period of December 31, 2015
214-2	16 Februari 2015 February 16, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Permohonan pemaparan Transit Terpadu Dukuh Atas Permission on the exposure of Dukuh Atas Integrated Transit
228	27 Februari 2015 February 27, 2015	Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Deputy Governor of DKI Jakarta	Rencana Pembiayaan proyek MRT Jakarta fase II (Bundaran HI - wilayah Utara Jakarta yang akan ditentukan kemudian.) The financing plan of Jakarta MRT project Phase II (Bundaran HI - Kampung Bandan)
230	27 Februari 2015 February 27, 2015	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Secretary	Estimasi kebutuhan pendanaan tahunan (annual fund requirements) The annual fund requirements estimation
237	3 Maret 2015 March 3, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan kemajuan proses tender CP-107 Progress reports on CP-107 tender process
259	6 Maret 2015 March 6, 2015	BPK RI The Audit Board of Republic of Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan Hasil Audit Internal • Penyampaian Hasil RUPS, Struktur Organisasi Riwayat Hidup Komisaris dan Direksi • Submission of Internal Audit Reports • Submission of AGM Results, Organizational Structure CV of Commissioners and Board of Directors
313	23 Maret 2015 March 23, 2015	Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta Head of BPMP of DKI Jakarta	Penyampaian anggaran dasar dan risalah persetujuan laporan keuangan tahun 2013 The submission of statutes and minutes of approval of the financial statements in 2013
341	26 Maret 2015 March 26, 2015	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Secretary	Permohonan penetapan lokasi penempatan tanah galian proyek MRT Jakarta The request of determination on dugouts locations placement of Jakarta MRT project
344	26 Maret 2015 March 26, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Pembiayaan proyek MRT Jakarta fase II (Bundaran HI - wilayah Utara Jakarta yang akan ditentukan kemudian) The financing on Jakarta MRT project Phase II (Bundaran HI - Kampung Bandan)
348	31 Maret 2015 March 31, 2015	BPK RI The Audit Board of Republic of Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan 2014 • Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan • Laporan Auditor Independen atas Pengendalian Internal • Independent Auditor's Report on the Financial Statements 2014 • Independent Auditor's Report on Compliance • Independent Auditor's Report on Internal Control
352	1 April 2015 April 1, 2015	Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Head of BPLHD of DKI Jakarta	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 1 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 1st quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
353	1 April 2015 April 1, 2015	Kepala KLH kota Administrasi Jakarta Barat Head of KLH of West Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 1 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 1st quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)

No Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Dated	Kepada To	Perihal Subject
354	1 April 2015 April 1, 2015	Kepala KLH kota Administrasi Jakarta Pusat Head of KLH of Central Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 1 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 1st quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
355	1 April 2015 April 1, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Utara Head of KLH of North Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 1 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 1st quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
359	2 April 2015 April 2, 2015	Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta Head of BPKAD of DKI Jakarta	Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 (<i>audited</i>) Financial Statements per December 31, 2014 (audited)
360	2 April 2015 April 2, 2015	Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta Head of BPKAD of DKI Jakarta	Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 (<i>audited</i>) Financial Statements per December 31, 2014 (audited)
388	15 April 2015 April 15, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan perkembangan proyek MRT Jakarta periode sampai dengan 31 Maret 2015 Progress Report of Jakarta MRT Project, to the period of March 31, 2015
472	7 Mei 2015 May 7, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	<i>Engineering Services</i> untuk pembangunan proyek MRT Jakarta fase II koridor Bundaran HI - wilayah Utara Jakarta yang akan ditentukan kemudian Engineering Services for Jakarta MRT project development phase Bundaran HI corridor II-Kampung Bandan
620	25 Mei 2015 May 25, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan perkembangan proyek MRT Jakarta periode sampai dengan 31 April 2015 Progress Report of Jakarta MRT Project, to the period of April 31, 2015
682	3 Juni 2015 June 3, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Permintaan penetapan jenis mata uang oleh Direktur SMI dan surat pernyataan kesiapan dan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta oleh Direktur pinjaman dan hibah Kemenkeu RI dalam rangka penerusan pinjaman untuk proyek MRT Jakarta The request on the determination of currency type by the Director of SMI and the Statement Letter (SK) of readiness and responsibility of the Government of DKI Jakarta by the Director of Loans and Grants of the Ministry of Finance Republic of Indonesia on loan agreement for Jakarta MRT project
696	8 Juni 2015 June 8, 2015	Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Head of BPLHD of DKI Jakarta	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 1 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) The 1st quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)
697	8 Juni 2015 June 8, 2015	Kepala KLH kota Administrasi Jakarta Selatan Head of KLH of South Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 1 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) The 1st quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)
698	8 Juni 2015 June 8, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Pusat Head of KLH of Central Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 1 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) The 1st quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)
711-1	10 Juni 2015 June 10, 2015	Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta Head of BPKAD of DKI Jakarta	Monitoring penggunaan dana PMP The monitoring of the use of PMP funds

No Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Dated	Kepada To	Perihal Subject
873	14 Juli 2015 June 14, 2015	Kepala KLH kota Administrasi Jakarta Barat Head of KLH of West Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 2 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 2nd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
874	14 Juli 2015 June 14, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Utara Head of KLH of North Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 2 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 2nd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
875	14 Juli 2015 June 14, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Pusat Head of KLH of Central Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 2 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 2nd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
876	14 Juli 2015 June 14, 2015	Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Head of BPLHD of DKI Jakarta	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 2 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 2nd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
885	15 Juli 2015 June 15, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. IP-571 The signing of Loan Agreement No. IP-571
898	27 Juli 2015 July 27, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Permohonan waktu untuk penurunan cutter head ke launching shaft di titik transisi Request for time to lower the cutter head to the launching shaft at the point of transition
908	29 Juli 2015 July 29, 2015	Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta Head of BPMP of DKI Jakarta	Laporan kegiatan penanaman modal triwulan II The report of second quarter investment activity
929	31 Juli 2015 July 31, 2015	Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia	Laporan perkembangan proyek MRT Jakarta periode 30 Juni 2015 Progress Report of Jakarta MRT Project, to the period of June 30, 2015
1051	8 September 2015 September 8, 2015	Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Head of BPLHD of DKI Jakarta	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 2 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 1 (Lebak bulus - Bundaran HI) The 2nd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 1 (Lebak Bululs - Bundaran HI)
1052	8 September 2015 September 8, 2015	Kepala KLH kota Administrasi Jakarta Selatan Head of KLH of South Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 2 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 1 (Lebak bulus - Bundaran HI) The 2nd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 1 (Lebak Bululs - Bundaran HI)
1053	8 September 2015 September 8, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Pusat Head of KLH of Central Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 2 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 1 (Lebak bulus - Bundaran HI) The 2nd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 1 (Lebak Bululs - Bundaran HI)
1081	17 September 2015 September 17, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan bulanan dan rekomendasi jadwal implementasi pembangunan MRT Jakarta tahap I (lebak bulus - Bundaran HI) The monthly report and implementation schedule recommendation for the Jakarta MRT construction Phase I (Lebak Bulus - Bundaran HI)

No Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Dated	Kepada To	Perihal Subject
1093	18 September 2015 September 18, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Pengantar surat percepatan proyek MRT Jakarta fase II dan koridor Timur Barat The introduction to acceleration letter of the Jakarta MRT phase II project and the East West corridor
1106	25 September 2015 September 25, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Pengantar bahan paparan laporan penyusunan rapergub pengelolaan The introduction to exposed material of the rapergub management reports
1181	6 Oktober 2015 October 6, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Permohonan penugasan SKPD pendamping untuk menerima staf kedutaan besar inggris The request on SKPD assistance assignment to receive British embassy staff
1199	12 Oktober 2015 October 12, 2015	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta The Assistant for Development and Environment of DKI Jakarta	Masukan untuk pembebasan lahan Input on land acquisition
1202	12 Oktober 2015 October 12, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan bulanan dan rekomendasi jadwal implementasi pembangunan MRT Jakarta tahap I (lebak bulus - Bundaran HI) The monthly report and implementation schedule recommendation for the Jakarta MRT construction Phase I (Lebak Bulus - Bundaran HI)
1213	15 Oktober 2015 October 15, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Masukan untuk pembebasan lahan koridor layang Input on land acquisition for flyover corridors
1221	15 Oktober 2015 October 15, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan penggunaan anggaran (PMP),MPP dan perkembangan TOD di MRT Jakarta Report on the use of the budget (PMP), MPP and TOD progress in Jakarta MRT
1257	27 Oktober 2015 October 27, 2015	Kepala KLH kota Administrasi Jakarta Barat Head of KLH of West Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 3 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 3rd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
1258	27 Oktober 2015 October 27, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Utara Head of KLH of North Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 3 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 3rd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
1259	27 Oktober 2015 October 27, 2015	Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Pusat Head of KLH of Central Jakarta City Administration	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 3 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 3rd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)
1260	27 Oktober 2015 October 27, 2015	Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Head of BPLHD of DKI Jakarta	Laporan Implementasi RKL & RPL kuartal 3 Tahun 2015 kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan) The 3rd quarter of 2015 RKL & RPL implementation report on the activity of Jakarta MRT construction Phase 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)

No Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Dated	Kepada To	Perihal Subject
1338	16 November 2015 November 16, 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan bulanan dan rekomendasi jadwal implementasi pembangunan MRT Jakarta tahap I (lebak bulus - Bundaran HI) The monthly report and implementation schedule recommendation for the Jakarta MRT construction Phase I (Lebak Bulus - Bundaran HI)
1400	4 Desember 2015	Gubernur Provinsi DKI Jakarta The Governor of DKI Jakarta	Laporan kemajuan pembangunan proyek MRTJ sampai dengan November 2015 Progress Report of Jakarta MRT Project, to the period of November, 2015

Situs Web dan Teknologi Informasi

Perusahaan memiliki situs *web* resmi dengan alamat *www.jakartamrt.com* sebagai portal digital yang dapat membantu Perusahaan menyebarkan informasi yang diperlukan oleh publik secara luas. Situs web ini berisi informasi terkait profil, perkembangan proyek, berita dan acara, hingga informasi karir dan informasi pengadaan. Untuk pengelolaan data dan informasi Perusahaan terkait pengelolaan operasional yang dapat diakses karyawan, Perusahaan memiliki *data center* dengan mekanisme internal berjenjang. Lebih lengkap tentang Teknologi Informasi Perusahaan dapat dilihat pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam laporan tahunan ini.

Hubungan Media

Dalam menjangkau publik yang lebih luas, penyebaran informasi yang dilakukan Perusahaan ditempuh melalui media massa. Fungsi hubungan media Perusahaan lebih difokuskan pada upaya mengelola dan membangun hubungan baik dan mutual dengan pihak media massa. Tugas pokok hubungan media Perusahaan meliputi penyediaan informasi yang akurat lewat beragam aktivitas pemberitaan, seperti siaran pers, konferensi pers, maupun melalui program pertemuan wartawan.

Di sepanjang tahun 2015, Perusahaan telah melakukan 3 (tiga) kali konferensi pers dan 3 (tiga) kali kunjungan ke kantor media. Selain itu, Perusahaan juga memberikan siaran pers sebanyak 19 kali dengan uraian sebagai berikut:

Website and Information Technology

The Company owns an official website *www.jakartamrt.com* as a digital portal that can support The Company disseminate information required by the public at large. This website contains information related to the profile, the development of projects, news and events, to career and procurement information. For Company data and information management related to the operational management which can be accessed by the employees, the Company has data centers with tiered internal mechanism. More details about the Company's Information Technology can be found in Management's Analysis and Discussion section in this annual report.

Media Relations

To reach a wider public, the Company disseminates information through the mass media. The function of corporate media relations is more focused on managing and building a good, mutual relationship with the mass media. The key task of the Company's media relations covers the provision of accurate information through a variety of reporting activities, such as press releases, press conferences, as well as through programs journalists gathering programs.

Throughout 2015, the Company has made three (3) times press conferences and three (3) visits to media outlets. In addition, the Company also has provided press releases 19 times with the following description:

Tanggal/ Date	Judul/ Title
10 Februari 2015 February 10, 2015	<p>Pembahasan: Proyek Pembangunan Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta Masuki Pekerjaan Pembuatan Kolom Stasiun Siaran pers tentang kemajuan pekerjaan pembuatan D-Wall atau pembangunan dinding stasiun di setiap titik konstruksi stasiun bawah tanah MRT yang telah hampir rampung dikerjakan; pekerjaan pembuatan kolom stasiun (Kingpost) pada sisi selatan Stasiun Bundaran HI dan juga dinding stasiun (D-Wall) pada sisi Timur (koridor Mechanical & Electrical); perubahan area kerja yang mengakibatkan pengalihan lalu lintas Busway di Jalan Sudirman pada titik Setiabudi; dan area kerja tambahan di badan jalan yang memberi dampak diberlakukannya rekayasa lalu lintas pada area Transisi (Jalan Sisingamangaraja).</p> <p>Discussion: Jakarta MRT Underground Station Construction Project Entering the Development of Columns Station Press release on the progress of the work of D-Wall construction or the construction of the station wall at every point of Jakarta MRT underground station which has almost been completed; the construction of coloumns station (Kingpost) on the south side of Bundaran HI Station and also the walls of the station (D-Wall) on the East side (Mechanical & Electrical corridor); changes in work area resulting Busway traffic diversion on Jalan Sudirman in Setiabudi point; and additional work areas on the road that impact the implementation of traffic engineering at the Transition area (Sisingamangaraja street).</p>
3 Maret 2015 March 3, 2015	<p>Pembahasan: Kontrak Rolling Stock Proyek MRT Jakarta Ditandatangani Pengumuman pemenang tender CP -108 berupa Rolling Stock MRT Jakarta setelah diselesaikannya proses lelang yang dilakukan sejak Februari 2014; dan penandatanganan kontrak manajemen Perusahaan dengan kontraktor Sumitomo Corporation bertempat di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Discussion: Rolling Stock Contract on Jakarta MRT Project has been Signed The announcement of CP-108 bidding winner in the form of the Rolling Stock of Jakarta MRT after the completion of the auction process conducted since February 2014; and the signing of a Company management contract with a contractor, Sumitomo Corporation, that was held at Balai Agung of City Hall of the Provincial Government of DKI Jakarta.</p>
16 Maret 2015 March 16, 2015	<p>Pembahasan: Pengalihan Lalu Lintas di Jl MH Thamrin dan Pembongkaran JPO Setiabudi Pengalihan lalu lintas karena adanya pekerjaan pembuatan kolom (Kingpost) stasiun dan pekerjaan dinding stasiun (D-wall) koridor ventilasi di sisi timur pada titik Bundaran HI; pergeseran area kerja untuk pembuatan D-wall koridor ventilasi pada sisi barat stasiun Bundaran HI yang mengakibatkan adanya pergeseran lajur kendaraan di sebagian Jl MH Thamrin; dan pengalihan lalu lintas kendaraan pada area konstruksi di titik Setiabudi akibat pekerjaan pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).</p> <p>Discussion: Redirects Traffic on MH Thamrin street and Demolition of Setiabudi Pedestrian Crossing Bridge Traffic diversion due to column (Kingpost) stations and wall station (D-wall) construction work on the east side ventilation corridors at the point of Bundaran HI; working shift area for the construction of D-wall ventilation corridor on the west side of the Bundaran HI station resulting on lanes shift of vehicles in most of MH Thamrin street; and diversion of vehicular traffic in the construction area in Setiabudi point due to demolition work of Pedestrian Crossing Bridge (Jembatan Penyeberangan Orang/ JPO).</p>
23 Maret 2015 March 23, 2015	<p>Pembahasan: Dimulainya Tahapan Konstruksi Skala Besar Proyek MRT Jakarta di Wilayah Fatmawati Hingga Blok M Pekerjaan konstruksi skala besar akan dimulai di wilayah Jl. Fatmawati, Jl. Panglima Polim (pembuatan pondasi bore pile) dan Blok M. Selama pekerjaan berlangsung, akan diberlakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk meminimalisir dampak lalu lintas akibat pekerjaan proyek MRT Jakarta.</p> <p>Discussion: The Commencement of Construction Stage of Jakarta MRT Large Scale Projects in Fatmawati to Blok M Area Large-scale construction work will commence in the area of Fatmawati street, Panglima Polim street (the construction of bore pile foundation) and Blok M. As the work progresses, Traffic Engineering Management (MRLL) will be enforced to minimize the impact of traffic caused by the work of Jakarta MRT project.</p>
10 April 2015 April 10, 2015	<p>Pembahasan: Lebak Bulus Masuki Tahapan Konstruksi Skala Besar Proyek MRT Jakarta Setelah dimulainya pekerjaan konstruksi skala besar untuk koridor MRT jalur layang (elevated) di wilayah Jl. Fatmawati hingga Jl. Panglima Polim sejak bulan Maret 2015, pekerjaan konstruksi skala besar segera memasuki wilayah Lebak Bulus, tepatnya Jl. Pasar Jumat. Selama pekerjaan berlangsung, akan diberlakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk meminimalisir dampak lalu lintas akibat pekerjaan proyek MRT Jakarta.</p> <p>Discussion: Lebak Bulus Entering the Stage of Large Scale Construction on Jakarta MRT Project After the commencement of large-scale construction work for the MRT elevated lane corridor in the area of Fatmawati street to Panglima Polim street since March 2015, large-scale construction work will immediately enter Lebak Bulus area, to be precise in Pasar Jumat street. During the work progressing, Traffic Engineering Management (MRLL) will be enforced to minimize the impact of traffic caused by the work of Jakarta MRT project.</p>

<p>24 April 2015 April 24, 2015</p>	<p>Pembahasan: Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta di Titik Bundaran HI, Dukuh Atas dan Istora Pergeseran jalur pedestrian di depan Hotel All Seasons karena pergeseran area kerja di sisi Timur ke median untuk pekerjaan pembuatan Kingpost dan dimulainya pekerjaan secant pile di Sisi Barat Stasiun Dukuh Atas; serta pekerjaan grouting atau injeksi tanah untuk proteksi kabel PLN tegangan tinggi 150 kV pada titik konstruksi di Istora.</p> <p>Discussion: Traffic Engineering on Jakarta MRT Underground Station Work in Bundaran HI, Dukuh Atas and Istora Points Pedestrian path shift in front of All Seasons Hotel due to a work area shift in the East side to the median for construction work of Kingpost and the commencement of secant pile work on the West Side Dukuh Atas Station; as well as the work of grouting or soil injection for PLN 150 kV high voltage cable protection at the Istora construction point.</p>
<p>30 April 2015 April 30, 2015</p>	<p>Pembahasan: Kontrak Railway Systems and Trackwork Proyek MRT Jakarta Ditandatangani. Pengumuman pemenang tender CP-107 berupa pengadaan Railway Systems and Trackwork untuk MRT Jakarta setelah diselesaikannya proses lelang yang dilakukan sejak Februari 2014; dan penandatanganan kontrak manajemen Perusahaan dengan kontraktor Metro One Consortium bertempat di Hotel Pullman Jakarta.</p> <p>Discussion: Contract Signing of Jakarta MRT project Railway Systems and Trackwork. Announcement of CP-107 bidding winner on the procurement of Railway Systems and trackwork for Jakarta MRT after the completion of the auction process conducted since February 2014; and the signing of a management contract with a contractor, Metro One Consortium, held at Hotel Pullman, Jakarta.</p>
<p>22 Mei 2015 May 22, 2015</p>	<p>Pembahasan: Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Stasiun Bawah Tanah di Titik Bundaran HI dan Setiabudi Dialihkannya lajur Bus Transjakarta koridor 1 arah Blok M dengan menggunakan lajur regular (lajur cepat) pada malam hari karena telah selesainya pekerjaan road decking pada Sisi Barat, yang kemudian kembali ke median Jalan MH Thamrin untuk melanjutkan pekerjaan road decking dan pekerjaan struktur utama Stasiun Bundaran HI. Pada titik Setiabudi akan dimulai pekerjaan pengecoran atap stasiun bawah tanah tahap 2 sampai 5.</p> <p>Discussion: Traffic Engineering on Underground Station Works in Bundaran HI and Setiabudi Points Transjakarta corridor 1 lanes to Blok M transferred to regular lane on the evening due to the completion of road decking work on the West Side, which is then returned to MH Thamrin street median to continue the work of road decking and the work of the main structure Stations of Bundaran HI. At Setiabudi point there will be commenced stage 2 to stage 5 of foundry roof work of the underground station.</p>
<p>19 Juni 2015 June 19, 2015</p>	<p>Pembahasan: Dimulainya Pekerjaan Pengecoran Atap Stasiun Istora Proyek MRT Jakarta Kemajuan pekerjaan pembangunan Stasiun Istora memasuki tahapan pengecoran atap stasiun (roof slab).</p> <p>Discussion: The Commencement of Foundry Roof Work of Jakarta MRT Istora Station Project The work progress of Istora Station construction is entering the roof slab stage.</p>
<p>26 Juni 2016 June 26, 2016</p>	<p>Pembahasan: Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Di Area Proyek MRT Jakarta Dalam Rangka Perbaikan Jalur Bus Transjakarta Diberlakukannya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) di area Senayan, Istora dan Bendungan Hilir berupa pengalihan Jalur Transjakarta akan berlangsung mulai 29 Juni hingga 12 Juli 2015 di sisi Barat dan Timur Proyek MRT Jakarta.</p> <p>Discussion: Traffic Engineering Management (MRL) In Jakarta MRT Project Area in the Context of Transjakarta Buses Lanes Repairment Enactment of Traffic Engineering Management (MRL) in Senayan, Istora and Bendungan Hilir areas in the form of Transjakarta lanes shift will take place from June 29 until July 12, 2015 in the West and East Jakarta MRT project.</p>
<p>30 Juli 2015 July 30, 2015</p>	<p>Pembahasan: Perkembangan Konstruksi Stasiun Bundaran HI Proyek MRT Jakarta Konstruksi stasiun Bundaran HI akan memasuki tahap pemasangan road decking di Sisi Timur. Sementara pada lokasi proyek MRT Jakarta untuk Stasiun Dukuh Atas, sedang berlangsung pekerjaan pengecoran roof slab (atap stasiun bawah tanah) untuk area atap stasiun.</p> <p>Discussion: The Construction Development of Bundaran HI Station on Jakarta MRT Project The construction of Bundaran HI station will commence the stage of installation of road decking on the East Side. While on the Jakarta MRT project location for Dukuh Atas station, the work of casting slab roof (the roof of the underground station) for the roof area of the station is ongoing.</p>
<p>12 Agustus 2015 August 12, 2015</p>	<p>Pembahasan: Penurunan Mata Bor Mesin Bor Bawah Tanah Proyek MRT Jakarta Perkembangan perakitan Tunnel Boring Machine (TBM) pertama di Patung Pemuda Membangun. Sehari sebelumnya, telah diturunkan salah satu komponen penting dalam rangkaian TBM, yaitu komponen mata bor (cutterhead). Proses penurunan cutterhead yang berbobot ± 34 ton ini disaksikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.</p> <p>Discussion: Unloaded the Cutterhead of Tunnel Boring Machine on Jakarta MRT Underground Project The developments on the first Tunnel Boring Machine (TBM) assembly process in Patung Pemuda Membangun. A day earlier, had been unloaded one of the important components in the TBM circuit, which is the Cutterhead. The process of unloaded this cutterhead with the weight of ± 34 tons was witnessed by the Board of Commissioners and the Directors of the Company.</p>

21 September 2015 September 21, 2015	<p>Pembahasan: Dimulainya Pengoperasian Mesin Bor Bawah Tanah Proyek MRT Jakarta Pekerjaan konstruksi bawah tanah proyek MRT Jakarta akan menggunakan salah satu mesin bor yang biasa disebut dengan Tunnel Boring Machine (TBM). TBM yang pertama, mulai beroperasi dari titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan dan akan melakukan pekerjaan penggalian serta konstruksi terowongan jalur bawah tanah MRT ke arah Utara menuju titik Setiabudi. Mesin bor bawah tanah pertama proyek MRT Jakarta yang bernama "Antareja" mulai beroperasi dari titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan. Acara pengoperasian perdana mesin bor bawah tanah ini dihadiri dan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.</p> <p>Discussion: The Commencement of the Tunnel Boring Machine Operation of Jakarta MRT Project Underground The underground construction work of Jakarta MRT project will use one of the tunnel boring machine commonly called the Tunnel Boring Machine (TBM). The first TBM started to operating from Patung Pemuda Senayan MRT project and will do the excavation work and construction of the MRT underground tunnel line to the north towards the Setiabudi point. The first Jakarta MRT underground project tunnel boring machine named "Antareja", started its operation from Patung Pemuda Senayan MRT project. The launching of its first operating was attended and inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo.</p>
11 November 2015 November 11, 2015	<p>Pembahasan: Mesin Bor Bawah Tanah "Antareja II" Mulai Beroperasi Hari Ini Mesin bor bawah tanah kedua yang diberi nama "Antareja II" mulai beroperasi dari titik yang sama dengan titik dimulainya pengoperasian mesin bor pertama sebelumnya, yaitu di Patung Pemuda Senayan. Kedua mesin bor ini akan bergerak melakukan penggalian untuk membuat terowongan jalur bawah tanah ke arah Utara hingga titik Setiabudi.</p> <p>Discussion: The Tunnel Boring Machine "Antareja II" Began Its Operation Today The second tunnel boring machine named "Antareja II" began operating from the same point as the start point of the operation of the first tunnel boring machine before, that was in Patung Pemuda Senayan. Both the tunnel boring machine will move to dig and build underground tunnels lines to the north up toward Setiabudi.</p>
23 Desember 2015 December 23, 2015	<p>Pembahasan: Bor Antareja Tiba di Stasiun MRT Senayan Hari Ini Mesin bor bawah tanah pertama yang bernama "Antareja" telah sampai di titik Stasiun Senayan.</p> <p>Discussion: Antareja Drill Arrived at Senayan MRT Station Today The first tunnel boring machine named "Antareja" arrived at Senayan Station point.</p>

Kunjungan Lapangan

Site visit, atau kunjungan lapangan, juga diberikan Perusahaan kepada berbagai kalangan sebagai bagian dari edukasi moda transportasi MRT Jakarta kepada masyarakat. Kunjungan lapangan saat pembangunan proyek diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif tentang MRT Jakarta, baik dalam pendekatan studi, pembangunan tata kota, maupun pembentukan perilaku masyarakat akan penggunaan layanan publik.

Di tahun 2015, Perusahaan memberikan 34 kali kunjungan lapangan kepada beragam Pemangku Kepentingan; mulai dari DPRD DKI Jakarta, BAPPENAS, delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa-Bali, konsultan di bidang kontraktor dan pasarana publik, hingga mahasiswa yang memiliki program studi searah dengan proyek MRT Jakarta.

Site Trip

Site visits or field trips, is given by the Company to various parties as well as part of the education of Jakarta MRT transport mode to the public. The site visits during the construction of the project is expected to provide a comprehensive perspective on the MRT Jakarta, either in the study approach, the development of urban planning, or the establishment of society behavior as the user of public services.

In 2015, the Company conducted 34 field trips to various Stakeholders; ranging from the City Council, National Development Planning Agency, the delegation of the Java-Bali Development Planning Meeting, consultants in the field of public infrastructure and construction, to the college students who have in-line courses with the Jakarta MRT project.

KODE ETIK DAN PENERAPANNYA Code of Conduct and its Implementation

Kode Etik

Kode Etik atau *Code of Conduct*, merupakan pijakan paling mendasar baik bagi Perusahaan sendiri, Manajemen, Pemangku Kepentingan maupun Pemegang Saham dalam menjalin hubungan yang sesuai dengan tujuan Perusahaan dan asas kepatutan. Kode Etik berperan penting sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan etika kerja antar elemen dalam Perusahaan, khususnya terkait hubungan yang dilandasi atas profesionalitas yang diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah bagi proses pengelolaan Perusahaan.

Landasan utama Kode Etik Perusahaan adalah Visi dan Misi, dimana menjadi proyeksi pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan.

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi

Untuk menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan dan pengembangan sistem transit perkotaan.

To become the leading provider of public transportation, committed to encourage economic growth through mobility improvement, traffic reduction and the development of urban transit systems.

Misi

Untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua hal yang kami lakukan melalui:

- Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya dan nyaman;
- Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama; dan,
- Membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan, menginspirasi dan memotivasi tenaga kerja kami.

To strive for excellence in sustainable way in all our undertakings through the following:

- Development and operation of safe, trusted and comfortable public transportation network;
- Rejuvenation of urban environment through prominent urban transit development; and,
- Building reputation as the preferable company by involving, inspiring and motivating our manpower.

Visi dan Misi tersebut kemudian diturunkan dalam nilai-nilai luhur dan budaya kerja yang disebut sebagai Nilai-nilai Perusahaan. Tata nilai ini menjadi acuan bagi seluruh elemen dalam Perusahaan untuk menciptakan kerjasama yang dapat mendorong pertumbuhan Perusahaan ke depan.

Nilai-nilai Perusahaan terdiri dari 7 (tujuh) Nilai yang disebut sebagai PRIDE AT, dengan penjabarannya sebagai berikut:

1. **Perserverance**, atau
Insan Perusahaan harus ulet dan mempertahankan fokus jangka panjang dalam mewujudkan tujuan strategis Perusahaan—menciptakan sistem Mass Rapid Transit bukan pekerjaan yang bisa segera terlihat hasilnya—harus selalu berjuang keras merealisasinya.
2. **Respect**, atau Saling Menghormati
Perusahaan menghormati dan menghargai keragaman dan keunikan setiap Insan Perusahaan di dalam memberikan kontribusi pada perusahaan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya dengan berdasarkan pada kompetensinya.

Code of Conduct

Code of Conduct, is the most fundamental basis for the Company itself, management, Stakeholders and shareholders in a relationship that is in accordance with the objectives and principles of propriety. Code of Conduct plays an important role as a code in governing relations between elements in the work ethic of the Company, particularly related to the relationship that is based on professionalism that is expected to continue to provide added value to the process of management of the Company.

The main foundation of the Code of conducts is Vision and Mission, in which the Vision and Mission become the projected growth of the Company on an ongoing basis.

Vision, Mission and Values of the Company

The Vision and Mission is derived into the noble values and work culture known as Corporate Values. These values has become reference for all elements of the Company to create a collaboration that could encourage the growth of the Company in the future.

These values consisted of 7 (seven) as referred to "PRIDE AT", described as follows:

1. **Perserverance**, or
The Company's individual must be tenacious and maintain a long-term focus in realizing the strategic objectives of the Company--creating the Mass Rapid Transit system is not a job that can be visible in immediate results--it should always strive hard to realize.
2. **Respect**, or Mutual Respect
The Company respects and values diversity and uniqueness of each Company's individual in their contributing by providing equal opportunities in working based on competence.

3. **Integrity**, atau Integritas
Insan Perusahaan harus memiliki kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang sama dan konsisten, bersih dan jujur dan menunjukkan profesionalisme dalam melakukan kewajiban hariannya.
4. **Dignity and Ownership**, Kebanggaan dan Rasa Memiliki
Setiap insan akan memiliki kebanggaan dengan bekerja di Perusahaan. Dengan rasa kepemilikan yang tinggi ini, Perusahaan akan dapat terus berkembang dan menjadi acuan bagi Provinsi dan Pemerintah daerah lain dalam mengimplementasikan standar pelayanan kelas dunia.
5. **Excellence**, Terbaik
Perusahaan akan mendukung lingkungan yang berorientasikan hasil yang memberdayakan insan di dalam Perusahaan dan memotivasi setiap insan dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.
6. **Accountability**, Akuntabilitas
Insan Perusahaan akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diberikan kepada mereka, memiliki akuntabilitas dan kebanggaan tersendiri terhadap hasil pekerjaan mereka.
7. **Teamwork**, Kerjasama Tim
Insan Perusahaan akan bekerja secara bersama-sama dan bersatu untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan yang didasarkan kepada komitmen bersama.

Kode Etik Perusahaan

Perusahaan memiliki Kode Etik, yang tertuang dalam bentuk pernyataan secara tertulis tentang nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan Perusahaan dan menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh insan Perusahaan. Kode Etik Perusahaan mengatur beberapa perilaku yang ideal yang wajib dijalankan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini sesuai dengan budaya Perusahaan, diantaranya:

1. **Aktivitas Politik**
 - Perusahaan tidak terlibat dan tidak mendukung partai politik manapun.
 - Perusahaan tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik.
 - Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan politik meliputi menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, menggunakan dana atau sumber daya Perusahaan untuk menyumbang kandidat partai dan non-partai politik atau membuat kontribusi politik Perusahaan dan menghimpun kontribusi politik, menggunakan fasilitas atau sumber daya Perusahaan untuk kampanye, penggalangan dana atau tujuan partisipasi politik, secara pribadi melakukan pelayanan sukarela selama jam kerja atas nama kampanye kandidat untuk kantor publik, komite partai politik atau komite politik.

3. **Integrity**,
The Company's individual must have unity of thought, word and action, and consistent, clean and honest and demonstrate professionalism in performing their daily obligations.
4. **Dignity and Ownership**, Pride and Belonging
Every individual will have the pride to work at the Company. With this high sense of ownership, the Company will be able to continue growing and becoming a reference for other provincial and local governments in implementing world-class service standards.
5. **Excellence**, Best
The Company will support the result-oriented environment that empowers the individual in the Company and motivate each of them in realizing the Company's Vision and Mission.
6. **Accountability**,
The Company's individual will take full responsibility for the work given to them, possess accountability and pride on the results of their work.
7. **Teamwork**,
The Company's individual will work together and unite to achieve the Vision and Mission of the Company which is based on a shared commitment.

The Company's Code of Conduct

The Company has a Code of Conduct which is contained in the written statement on the values of ethics within the Company and become the policies and standards of conduct required of all Company's individual. The Company's Code of Conducts regulate some ideal behavior that must be conducted based on noble values that is believed to be in accordance with Company corporate culture, including:

1. **Political Activities**
 - The Company is not involved and does not support any political parties.
 - The Company has never provided funds in any form for political purposes.
 - The Company's individual is prohibited to involve in political activities such as becoming a member or an official of any political party, using the Company funds or resources to contribute to the candidate of the party and non-political parties or make political contributions of the Company and to collect political contributions, using the facilities or the Company's resources to campaign, fund raising or aiming political participation, personally performing volunteer service during business hours in the name of the candidate campaign for public office, political party committee or political committee.

- Perusahaan tidak melarang dan tidak mencegah insan Perusahaan untuk melaksanakan haknya memberikan suara dalam pemilihan umum.
 - Perusahaan tidak menghalangi setiap insan Perusahaan untuk melakukan aktivitas politik sebagai simpatisan dengan syarat tertentu.
 - Insan Perusahaan dapat diperkenankan sebagai calon legislatif hanya dari wakil independen atau DPD, dan setelah penetapannya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan.
2. Aset
- Aset Perusahaan digunakan semata-mata untuk operasi Perusahaan.
 - Penggunaan aset yang melekat pada jabatan harus dikembalikan kepada Perusahaan dalam keadaan baik, kecuali ditetapkan lain oleh kebijakan Perusahaan.
3. Benturan Kepentingan
- Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan. Perusahaan mewajibkan seluruh insan Perusahaan untuk menjaga integritas bisnis dan mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan menetapkan situasi-situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada insan Perusahaan.
 - Perusahaan mengatur tindakan yang harus dilakukan apabila ada pemasok/kontraktor/konsultan/pemberi jasa yang sedang/akan melakukan hubungan kerja dengan Perusahaan terdapat hubungan keluarga atau mengalami (potensi) benturan kepentingan.
 - Apabila terdapat potensi benturan kepentingan oleh pejabat pemutus, maka unit kerja pemrakarsa mengikutsertakan unit kerja yang independen untuk melakukan pembahasan bersama sehingga transaksi yang merugikan dapat dihindari.
4. Minuman Keras, Narkoba, Rokok dan Judi
- Perusahaan dan seluruh insan Perusahaan berkewajiban menjaga lingkungan kerja maupun area kegiatan Perusahaan lainnya bebas dari pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
 - Perusahaan menyarankan kepada seluruh insan Perusahaan untuk tidak merokok, karena tidak baik untuk kesehatan dirinya dan karyawan di sekitarnya.
- The Company does not prohibit and prevent its individual to exercise its rights to vote in general elections.
 - The Company does not preclude every individual to conduct political activities as a sympathizer with certain conditions.
 - The Company's individual can be allowed to become candidates only of independent representatives or DPD, and after its commencement the person should resign from the Company.
2. Assets
- The Company assets are used solely for the operation of the Company.
 - The use of the assets attached to the office must be returned to the Company in good condition, unless otherwise determined by Company policy.
3. Conflict of Interest
- Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the economic interests of the Company and the personal economic interests of shareholders, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the employees. The Company requires that all individual to maintain the integrity of the business and support the principles of fair competition in accordance with the regulations and legislation.
- The Company establishes situations that may pose a conflict of interest to the Company's individual.
 - The Company arranges the necessary actions if there are suppliers / contractors / consultants / providers who are / will conduct a working relationship to the Company with any family relationship or experience (potential) conflict of interest.
 - If there is any potential conflict of interest by official, therefore the initiator work units include independent work units to conduct multi-party discussions to avoid any harmful transactions.
4. Liquor, drugs, cigarettes and gambling
- The Company and all the individual are obliged to maintain working environment or other Company activity area free from the influence of alcohol and drug abuse and illicit drugs.
 - The Company recommends to all individual to not smoking, since it is not good for their health and the employees in their surrounding.

5. Hadiah, Jamuan dan Donasi

- Insan Perusahaan tidak diperkenankan memberikan, menjanjikan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan dari pemasok, kontraktor, konsultan, mitra kerja, Pejabat Pemerintah atau pihak ketiga lainnya.
- Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau entertainment tidak boleh diterima insan Perusahaan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
- Pemberian hadiah adalah wajar apabila Perusahaan bermaksud memberikan sesuatu kepada pihak ketiga berupa barang tertentu dan dalam kondisi tertentu.
- Donasi untuk tujuan amal, dalam batas kepatutan dapat dibenarkan, sedangkan untuk tujuan lain boleh dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Setiap bentuk penyuluhan baik dari maupun kepada pihak ketiga atau insan Perusahaan merupakan sesuatu perbuatan yang tidak diperkenankan.

6. Pernyataan Kepatuhan dan Pelanggaran

- Setiap insan Perusahaan akan menandatangani surat pernyataan kepatuhan atas pemberlakuan Kode Etik yang merupakan komitmen bahwa insan Perusahaan secara sungguh-sungguh dan sepakat menerapkan Kode Etik.
- Setiap pelanggaran atas Kode Etik merupakan suatu tindakan yang akan dikenakan sanksi yang ditetapkan Direksi.

Etika Penyebaran Informasi Non-Publik

Untuk meminimalisir benturan kepentingan, Perusahaan menekankan pentingnya etika penyebaran informasi non-publik oleh insan Perusahaan. Segenap insan perusahaan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi non-publik mengenai Perusahaan serta yang berkaitan dengan pelanggan, *provider*, maupun pihak lainnya yang diperoleh selama bekerja di Perusahaan. Pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang dilakukan baik pada masa bakti sebagai pegawai maupun masa purna bakti.

Kebijakan Anti Korupsi

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong kebijakan anti korupsi. Bentuk praktik paling mendasar dari komitmen ini adalah larangan suap dan penerimaan hadiah oleh insan Perusahaan dalam bentuk apapun.

5. Gifts, Banquets and Donations

- The Company's individual are not allowed to give, promise or accept, directly or indirectly, anything valuable to and from the suppliers, contractors, consultants, partners, government officials or other third parties.
- An appreciation signs in business activities, such as a gift, contribution or entertainment should not be received by the Company's individual at any situation that can be considered as inappropriate.
- Giving presents is acceptable if the Company intends to give something to a third party in the form of certain items and under certain conditions.
- Donations for charitable purposes, within the limits of propriety can be justified, whereas for other purposes may be carried out in accordance to the regulation.
- Any form of bribery, either from or to a third party or the Company's individual is a deed that is prohibited.

6. Statement of Compliance and Violation

- Every Company's individual will sign a declaration of compliance on the application of the Code of Conduct which is a commitment that the Company's individual is seriously and agreed to implement the Code of Conduct.
- Any violation of the Code of Conduct is subjected to sanctions stipulated by the Board of Directors.

Ethics of Non-Public Information Dissemination

To minimize conflicts of interest, the Company emphasized the importance of ethical dissemination of non-public information by the Company's individual. All the Company's individual are required to maintain the confidentiality of non-public information regarding the Company and in relating to customers, providers, and other parties that has been gathered while working in the Company. The disclosure of the confidential information to parties who are not related is prohibited either during working period as employees or full-time service.

Anti-Corruption Policy

The Company has a strong commitment to regulate anti-corruption policy. The most basic form of the practice of this commitment is the prohibition of bribery and acceptance of gifts by the Company's individual in any form.

Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain dengan cara menerima sejumlah imbalan yang bersifat material. Perusahaan melarang Pejabat Perusahaan untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja, konsultan, kontraktor, dan/atau mitra kerja/ pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan maupun barang berharga lainnya.

Pejabat Perusahaan juga dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

Sosialisasi dan Penegakan Kode Etik Perusahaan kepada Karyawan

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan kepada seluruh insan Perusahaan dilakukan dengan membagikan buku Pedoman Kode Etik. Sosialisasi dilakukan oleh Direksi dan Pejabat Struktural dan merupakan salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan dasar Perusahaan. Sebagai tanda telah dibaca dan dipahami, setiap insan Perusahaan menandatangani Kode Etik Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penegakan Kode Etik di seluruh lini Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku dikenakan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin Perusahaan yang berlaku.

Mekanisme penegakan Kode Etik diatur sebagai berikut:

1. Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etik baik melalui media surat atau email kepada atasan langsung pegawai dan Audit Internal & Kepatuhan.
2. Setiap pelaporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Pelaksanaan proses pemeriksaan.
4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik.

The Board of Directors, Board of Commissioners and all Company employees are prohibited the abuse of office for personal, family relatives and others interest or gain, by accepting a number of material rewards. The Company prohibits its Officials to accept gifts from subordinates, peers, consultants, contractors, and / or business partners / entrepreneurs in any form, either in the form of flower wreaths, food parcels and other valuables.

The Company Officials also are prohibited from giving or promising anything to anyone in order to expect something in return in order to receive special treatment.

Socialization and Enforcement of Code of Ethics for Employees

The socialization of Code of Ethics to all individual is done by distributing the Company's Code of Ethics books. Socialization is conducting by the Board of Directors and its Structural Officials, and becoming one of the materials provided in the Company's basic training. As a token of being read and understood, every Company's personnel signed the Code of Ethics.

The Company is committed to enforcing the Code of Ethics throughout its line. Any violation of the Code of Ethics and Code of Conducts is subject to the provisions of the Company disciplinary violations applied.

The mechanism of Code of Ethics enforcement is as follows:

1. Presence report of Code of Ethics violations either in the form of a letter or email to the direct superior officers and Internal Audit & Compliance.
2. Each report received will be taken seriously and will be followed according to the procedure.
3. Implementation of the inspection process.
4. Determination of sanctions if the investigation results expressed an employee breach the Code of Conduct.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), adalah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap *fraud* atau tindakan penyimpangan atau pembiaran yang disengaja. Manajemen Perusahaan memiliki komitmen yang kuat, bersikap independen, serta bebas intervensi dalam melaksanakan WBS. Kecukupan dan efektivitas pelaksanaan WBS diawasi oleh Dewan Komisaris.

Agar *fraud* dapat terdeteksi lebih dini, Perusahaan mewajibkan setiap insan Perusahaan membuat pernyataan komitmen akan kesediaannya untuk melaksanakan WBS dan berpartisipasi aktif melaporkan pelanggaran. Kepada Pemangku Kepentingan eksternal, sistem WBS Perusahaan disosialisasikan untuk memberikan pemahaman eksistensi dan mekanisme WBS.

Prosedur Sistem Pelanggaran Pelaporan

Unit pengelolaan WBS Perusahaan merupakan fungsi atau unit yang independen dari operasi Perusahaan, atau dapat juga diserahkan kepada Audit Internal dengan dibantu oleh fungsi Hukum dan SDM yang memiliki akses kepada Direktur Utama. Prosedur penyampaian pelaporan dilakukan melalui saluran khusus berupa sistem komunikasi yang cepat, menjamin kerahasiaan, aman dan mudah diakses semua orang, serta ditinjau secara berkala keandalan dan keamanannya.

Perlindungan Pelapor

Kebijakan Perlindungan Pelaporan yang dimiliki Perusahaan mengatur secara tegas dan jelas bahwa Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelaporan pelanggaran yang beritikad baik, patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan, serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

Setiap pelaporan pelanggaran diinvestigasi lebih lanjut untuk memperoleh bukti dalam rangka pengambilan kesimpulan yang tepat, yang diatur dengan prosedur operasional standar. Mekanisme pelaporan internal WBS dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa:

- a. Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik.
- b. Pelanggaran yang berulang dan sistematis telah dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

Whistleblowing System (WBS), is a system of prevention and identification of fraud or irregularities act or omission that is intentional. The Company's Management has a strong commitment, independent, and free from intervention in implementing the WBS. The adequacy and effectiveness of the implementation of the WBS is overseen by the Board of Commissioners.

To be able to detect any fraud in early stage, the Company requires every individual to make a declaration of commitment and willingness to implement WBS and actively participate in reporting violations. To external Stakeholders, the Company WBS system is socialized to provide insight into the mechanisms and the existence of WBS.

Whistleblower System Procedure

The Company's Whistleblowing System (WBS) unit is an independent unit from the Company operation, or it can be transferred to Internal Audit with the help of Legal Unit and HR that has access to the President Director. The procedure for submitted the reports is through special channels with fast communication systems, ensuring confidentiality, secure and easy access for everyone, and it is reviewed periodically for its reliability and security.

Whistleblower Protection

The Company's Whistleblower Protection Policy regulates firmly and clearly that the Company is committed to protect the whistleblower with a good faith, adhere to all the rules and regulations, and best practices applicable in the implementation of WBS.

Every report of violation is investigated further to get evidence in order to get the right conclusion, which is governed by standard operating procedures. WBS internal reporting mechanism is designed in such ways that it can ensure that:

- a. All the violations that have been reported and verified has been handled properly.
- b. Repeated and systematic violations should be reported to the relevant officials who have the authority to make improvements.

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM Important Case and Legal Issues

PENGUNGKAPAN PENYIMPANGAN INTERNAL

Hingga akhir tahun 2015, Perusahaan tidak menemukan adanya penyimpangan dan kecurangan internal dalam bentuk apapun, baik yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris maupun Karyawan.

DISCLOSURE OF INTERNAL DEVIATIONS

By the end of 2015, the Company did not find any irregularities and internal fraud in any form, whether from the Board of Directors, the Board of Commissioners, or from the employees.

SANKSI ADMINISTRATIF

Di sepanjang tahun 2015, Perusahaan tidak mendapatkan adanya sanksi administratif dari pihak regulator. Seluruh pengelolaan kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2015, the Company did not receive any administrative sanctions from regulators. The entire management of the Company's business and operations is conducted under the rules and regulations and procedures applicable.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Perusahaan tidak menemukan adanya laporan dari pihak manapun terkait aktivitas operasional Perusahaan yang memiliki dampak pencemaran lingkungan. Seperti yang dipaparkan dalam bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang lingkungan hidup dalam laporan tahunan ini, Perusahaan telah memenuhi seluruh perizinan terkait pengelolaan lingkungan dan dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan. Perusahaan mewajibkan seluruh kontraktor—yang tertuang dalam kontrak kerja—untuk melakukan pengukuran dan pemantauan dampak lingkungan atas kegiatan pembangunan proyek MRT Jakarta.

REPORT ON ACTIVITIES OF THE COMPANY THAT POLLUTING ENVIRONMENT

The Company did not find any reports of any party related to the operational activities of the Company which has the effect of environmental pollution. As described in the Corporate Social Responsibility section in the field of environment in this annual report, the Company has fulfilled all the formalities and permits related to environmental management and the impact of operational activities on the environment. The Company requires all contractors-as stipulated in the contract-to make the measurement and monitoring of the environmental impact of the construction activities of MRT Jakarta project.

PERMASALAHAN HUKUM

Hingga 31 Desember 2015, Perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum dan kasus hukum dalam bentuk apapun, baik kasus yang menyangkut Perusahaan maupun kasus yang menyangkut Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan.

LEGAL ISSUES

Until December 31, 2015, the Company has no legal issues and case law in any form, either in the case against the Company as well as cases involving the Board of Directors, the Board of Commissioners and the employees.

TRANSPARANSI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Transparency of Information which has not Disclosed in other Reports

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kuasa untuk menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Manajemen Perusahaan diwajibkan untuk melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 ayat 7 beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk terlaksananya kewajiban LHKPN tersebut di atas, telah diterbitkan SK Direksi No. 021 Tahun 2015, tentang Pengelolaan LHKPN di PT MRT Jakarta, dimana Direktur Keuangan dan Administrasi bertindak sebagai Koordinator dan Kepala Internal Audit sebagai Pelaksana.

Di bawah ini disampaikan transparansi LHKPN yang telah dilakukan manajemen Perusahaan di tahun 2015.

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT

As a Regional-Owned Enterprises (BUMD) which has the power to use the Regional Budget and Revenue Expenditure (APBD), Management of the Company is required to report the State Officials' Wealth. (LHKPN). This is in accordance with Regulation No. 30 of 2002 on the Commission of Corruption Eradication (KPK), which confirms the Commission's authority to implement measures or efforts to prevent corruption, among others through the registration and inspection of LHKPN. In addition, Regulation No. 28 of 1999 on State Official that Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism, mandates that every officials shall report and announce their wealth before and after their service period and willing to be inspected before and after the service. In Regulation No. 28, 1999 article 2, paragraph 7 along with its description, it is elaborated that other officials who have a strategic function in relation to state officials, including the Board of Commissioners, Board of Directors and Structural Officials of other structural State-Owned Enterprises (BUMN) and the Regional-Owned Enterprises (BUMD).

For the implementation of LHKPN obligations mentioned above, the Board of Directors has issued Decree No. 021 in 2015, on the Management LHKPN in PT MRT Jakarta, where the Director of Finance and Administration acted as the Coordinator and Head of Internal Audit as an Implementer.

Below is the delivered LHKPN transparency that has been made by the Company's management in 2015.

Pejabat Officials	Jumlah Wajib Laporan Total of Compulsory Reporting	Jumlah yang Telah Melaporkan Total of Reporting	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	4	4	100%
Direksi The Board of Directors	4	4	100%
Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Sekretaris Perusahaan Board of Commissioners/Corporate Secretary Support Organ	1	1	100%
Pejabat 1 (satu) Tingkat di Bawah Direksi/Kepala Divisi Officials in one-level below Directors/Head of Division	10	10	100%
Jumlah Total	19	19	100%

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN ATAU MANAJEMEN (ESOP/ MSOP) DAN OPSI SAHAM

Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan atau Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, dan Perusahaan bukan merupakan perusahaan publik. Kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya, seperti yang telah tertuang dalam bagian Profil Perusahaan dan uraian Organ Tata Kelola Perusahaan Direksi serta Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

EMPLOYEES SHARE OWNERSHIP PROGRAM OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP (ESOP / MSOP) AND STOCK OPTION

The Company does not have a Management Share Ownership Program or Employees Share Ownership Program, and the Company is not a public company. The shareholding is fully owned by Provincial Government of DKI Jakarta and PD Pasar Jaya, as stated in the Company Profile section and the description of corporate governance organs of Directors and the Board of Commissioners in this Annual Report.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja/kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah per bulan yang dapat disampaikan:

Rasio Ratio	Skala Perbandingan Scale of Comparison
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest salaries of the employees	9,18 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest salaries of the Directors	1,12 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest salaries of BOC	1,14 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan karyawan tertinggi The ratio the highest salaries of the Directors and the highest salaries of the employee	5,16 : 1

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah level Kepala Divisi. Sementara karyawan terendah berada pada level staf.

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

Salary is the right of employees that is received and expressed in terms of money as a reward from the Company, determined, and paid according to employment agreement, including allowances for employees and their families for a job and / or services that have been performed.

Here is the Highest and Lowest Salary Ratio per month that can be delivered:

The definition of the highest employee in the above table is in the level of Head of Division. While the lowest employee is in the staff level.

INSENTIF JANGKA PANJANG BAGI KARYAWAN

Perusahaan belum memiliki kebijakan terkait insentif jangka panjang bagi karyawan. Selain gaji, pemenuhan hak bagi karyawan diberikan dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan.

LONG-TERM INCENTIVES FOR EMPLOYEES

The Companies do not have any policy related to long-term incentives for employees yet. In addition to salary, the fulfillment of the rights granted to employees in the form of BPJS Employment Program.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban pajak dan telah menyusunnya dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja.

KETIDAKSESUAIAN DENGAN PSAK

Analisis dan pembahasan Laporan Tahunan yang terkait dengan kinerja keuangan mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009), yakni "Penyajian Laporan Keuangan".

KESESUAIAN DENGAN ROADMAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE REGULATOR

Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh izin terkait pengelolaan dan dampak lingkungan telah dipenuhi, termasuk skema dan mekanisme penentuan kontraktor di setiap *Contract Package* (CP) yang telah memenuhi prosedur yang berlaku.

Pembenahan internal organisasi juga dilakukan dengan pembentukan beberapa komite yang akan berfungsi di bawah Dewan Komisaris. Dengan demikian, Perusahaan telah meningkatkan aspek pengawasan internal, di samping tentunya melibatkan pihak ketiga untuk dapat melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh manajemen.

MEETING THE TAX LIABILITY

As Regional-Owned Enterprises (BUMD), the Company has an obligation to implement the entire compliance with regulations and legislation, including tax laws in the DKI Jakarta region. The Company has fulfilled all tax liabilities and arranged it on Financial Statements for December 31, 2014 and December 31, 2015 that audited by Independent Accounting Firm.

NON-COMPLIANCE WITH IAS

The analysis and discussion of the Annual Report relating to the financial performance refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2015 and December 31, 2014 audited by the independent accounting firm Purwanto, Suherman & Surja. The Company's financial statements have been prepared in accordance to the Financial Accounting Standards in Indonesia covering the Statement of Financial Accounting Standards (IAS) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Accountants Association (DSAKIAI). The Financial Statement is prepared in accordance with IAS 1 (2009), "Presentation of Financial Statements".

COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE REGULATOR ROADMAP

The Company is the Regional-Owned Enterprises (BUMD) which has an obligation to implement compliance with all regulations and legislation. All the license or permit related to the management and environmental impact have been fulfilled, including the schemes and mechanisms for the contractor in each Contract Package (CP) determination that have met the applicable procedures.

The revamping of internal organization is also done with the formation of several committees that will function under the Board of Commissioners. Accordingly, the Company has increased the aspect of internal control, in addition involving a third party to evaluate and monitor the governance of the Company by the management.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance



Agar implementasi Tata Kelola Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, *assesment* atau penilaian dapat menjadi alat pengukur sejauh mana keberhasilan Tata Kelola Perusahaan dijalankan. Penilaian ini berguna untuk mendapatkan *Area of Improvement* dan Rencana Tindak Lanjut yang dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan Tata Kelola Perusahaan di masa mendatang.

Di akhir tahun 2015, Perusahaan telah melaksanakan *self assesment* yang dilakukan oleh tim internal, dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. 182/BOD-MRT/ST/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang *Self Assesment* Tata Kelola Perusahaan pada PT MRT Jakarta yang memberikan penugasan kepada Divisi Audit Internal untuk melakukan penilaian terhadap implementasi tata kelola di lingkup Perusahaan.

Tujuan dilakukannya *self assesment* adalah:

- Mendapatkan gambaran seberapa baik proses pengelolaan korporasi di Perusahaan dilihat dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

To ensure the implementation of Corporate Governance as expected, assessment can be a measurement tool to exercise the success of the execution of Good Corporate Governance. This assessment is useful for getting Areas of Improvement and Action Plan to be a recommendation for the improvement of corporate governance in the future.

At the end of 2015, the Company has conducted a self-assessment carried out by the internal team, with the Decree of the President Director no. 182 / BOD-MRT / ST/ IX / 2015 dated on September 30, 2015 on Self Assessment on Good Corporate Governance at PT Jakarta MRT which assigned to the Internal Auditor Unit to conduct an assessment of the implementation of governance in the scope of the Company.

The purpose of the self-assessment are:

- To get an idea of how well the process of corporate management in the Company viewed from the principles of Good Corporate Governance.

- Identifikasi proses dan struktur yang membutuhkan perbaikan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi.
- Menempatkan pengelolaan Perusahaan dengan perusahaan lain yang telah mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, baik perusahaan skala nasional maupun internasional.

Metode Penilaian *Self Assessment*

Metode *self assessment* dilakukan dengan menggunakan alat ukur *Scorecard* yang digunakan Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penilaian, yang terdiri dari:

1. 6 Aspek.
2. 40 Indikator.
3. 133 Parameter.
4. 474 Faktor Uji Kesesuaian (FUK).

- To identify the processes and structures that need improvement.
- To provide recommendations for improvement and action plans.
- To place the management of the Company with other companies that have implemented Corporate Governance, both national and international-scale enterprise.

Self Assessment Methods

The methods of self assessment is done with a measuring instrument "Scorecard" used by the Ministry of State-Owned Enterprises and Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to conduct an assessment, which consists of:

1. 6 aspects.
2. 40 indicators.
3. 133 parameters.
4. 474 Compliance Test Factors (FUK).

Rincian *Scorecard*

Scorecard Detail

No	Aspek Penilaian Assessment Aspects	Bobot Quality	Indikator Indicator	Parameter Parameter	FUK FUK
1	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan Commitment on the Implementation of Sustainable Corporate Governance	7	6	15	46
2	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	9	6	20	50
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	10	33	125
4	Direksi Board of Directors	35	13	49	184
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	3	14	62
6	Aspek Lainnya* Other Aspects	+/- 5 *	2	2	7
	Jumlah Total	95	40	133	474

Dalam melakukan penilaian menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data, yakni:

1. Reviu dokumen;
2. Kuesioner; dan
3. Wawancara.

In conducting the assessment there are three (3) data collection methods used, namely:

1. Documents review;
2. Questionnaire; and
3. Interview.

Hasil Penilaian *Self Assessment*

Berdasarkan proses *self assessment* yang telah dilakukan di bulan September 2015, Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup PT MRT Jakarta mencapai skor 65,79 dari standar bobot 95,00, dengan penggolongan "Cukup Baik". Beberapa aspek penilaian seperti Pemegang Saham dan Rapat Umum

Self Assessment Result

Based on the self assessment process that has been conducted in September 2015, the implementation of Good Corporate Governance in the scope of PT MRT Jakarta achieved a score of 65,79 out of a standard weight of 95,00 with the classification of "Good Enough". Some aspects of the assessment i.e. Shareholders

Pemegang Saham mampu mencapai 100%, sementara beberapa *Area of Improvement* menjadi rujukan bagi rencana tindak lanjut pengembangan GCG Perusahaan.

Di akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016, Perusahaan melakukan beberapa kebijakan terkait rencana tindak lanjut tersebut, seperti penguatan manajemen risiko melalui pembentukan Komite, serta pembentukan beberapa kelengkapan organ lainnya.

USULAN RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa usulan sebagai *Area of Improvement* yang dapat menjadi Rencana Tindak Lanjut adalah:

1. Menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai penanggung jawab monitoring dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Penugasan Tim *Assessment* Tata Kelola Perusahaan menjadi Tim Pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang akan melakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:
 - Revisi Piagam Direksi dan Dewan Komisaris, atau *Board Manual*.
 - Penyusunan Pakta Integritas.
 - Penyusunan Pedoman dan Mekanisme Gratifikasi.
 - Peninjauan dan pemutakhiran Kode Etik atau *Code of Conduct*, termasuk mekanisme *reward* dan *punishment*-nya.
 - Pengidentifikasian untuk kemudian melengkapi Prosedur Tetap *Business Process* dan *Job Description*.
 - Penyusunan dan pembentukan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS).
 - Peninjauan dan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan, atau *Code of Corporate Governance*.
 - Pembentukan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.
 - Penempatan Pejabat pada level jabatan yang kosong dalam Organisasi Perusahaan.
 - Memasukkan skor hasil *Self Assessment* dalam Laporan Tahunan 2015 sebagai bagian dari komitmen Perusahaan akan keterbukaan.

Beberapa kebijakan seperti revisi *Board Manual*, Pakta Integritas, Mekanisme Gratifikasi dan Mekanisme *conflict of interest* yang diatur dalam *Board Manual* dan Prosedur Tetap Pengadaan Barang dan Jasa dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Realisasi keempat kebijakan ini dapat meningkatkan skor hasil *self assessment*. Di samping itu, beberapa kebijakan lain seperti yang telah dijabarkan dalam rencana tindak lanjut dapat direalisasikan dalam tahun 2016 agar dapat memberikan landasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan.

and General Meeting of Shareholders was manage to reach 100%, while some Areas of Improvement became a reference for the further follow-up development plan of the company's GCG.

In late 2015 and early 2016, the Company made several policies related to the follow up plan, such as strengthening risk management through the establishment of the Committee, as well as the establishment of several other complementary organs.

FOLLOW-UP PLAN PROPOSAL

Some suggestions as areas of improvement can be a follow up plan are:

1. Appointed one of the Board of Directors member to in charge of monitoring and developing the Corporate Governance.
2. Assignment of Good Corporate Governance Assessment Team becoming The Good Corporate Governance Development Team that will conduct follow-up improvements, included:
 - Drafting The Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners or Board Manual.
 - Preparation of the Integrity Pact.
 - Development of Gratuity Guidelines and Mechanisms.
 - Reviewing and updating of the Code of Ethics or Code of Conducts, including the mechanisms of reward and punishment.
 - Identification and then completion of the Business Process Fix Procedure and Job Description.
 - Preparation and establishment of Violation Reporting System, or Wistleblowing System (WBS).
 - Reviewing and Updating the Code of Corporate Governance.
 - Establishment of Audit Committee and Risk Management Committee.
 - Placement of Officer at the vacant positions level in the Company organization.
 - Incorporating the results of self assessment scores in the Annual Report 2015 as part of the Company's commitment to transparency.

Some policies such as the preparation of Board Manual, the Integrity Pact, Gratuities Mechanism and Conflict of Interest Mechanism that is regulated in Board Manual and Fix Procedure of Material and Service Procurement can be realized in the near future. The fourth realization of this policy may increase the score results of self assessment. In addition, several other policies as laid out in the action plan can be realized in 2016 in order to provide a foundation of Good Corporate Governance for the Company.

We are **on the right track**





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 220 **Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Basic Principles Of Corporate Social Responsibility
- 223 **Komitmen Untuk Lingkungan Hidup Yang Harmoni**
Commitment To Harmonious Environment
- 240 **Tanggung Jawab Sosial Atas Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja**
Social Responsibility In Employment, Occupational Health And Safety
- 247 **Pengembangan Sosial Kemasyarakatan**
Social Community Development
- 248 **Komitmen Atas Produk, Layanan Dan Pelanggan**
Commitment To Product, Service And Customers

PRINSIP DASAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Basic Principles of Corporate Social Responsibility





Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3).

Earth and water and natural resources contained therein shall be controlled by the State and used for the greatest welfare of the people. (Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebuah visi pengembangan dari entitas usaha yang mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan. Makna kata “berkelanjutan” erat kaitannya dengan bagaimana entitas usaha dapat menciptakan pola keseimbangan antara profit yang diambil dari hasil aktivitas bisnisnya dengan dampak lingkungan dan dampak sosial yang terjadi. Munculnya ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan hidup merupakan fenomena dari bagaimana hilangnya pola keseimbangan tersebut.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selalu bergandengan tangan dengan visi Pemerintah, Perusahaan memiliki peran untuk mewujudkan tanggung jawab sosial tersebut ke dalam seluruh lapisan. Kepada karyawan dan/atau pekerja sebagai Pemangku Kepentingan internal, Perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. Kepada masyarakat sebagai Pemangku Kepentingan eksternal, Perusahaan melakukan berbagai aktivitas pengembangan sosial kemasyarakatan. Demikian pula kepada warga kota Jakarta pengguna jalan dimana proyek MRT Jakarta sedang berjalan, Perusahaan memiliki kewajiban untuk tetap menyelenggarakan pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan hak-hak pengguna jalan.

Aspek lingkungan hidup juga menjadi bagian dari proses menciptakan keseimbangan di atas. Aktivitas penggalian secara masif yang dilakukan Perusahaan melalui kontraktor yang ditunjuk harus melalui serangkaian observasi dan prosedur perijinan dari regulator yang mengatur lingkungan hidup. Relokasi pepohonan dan taman juga menjadi bagian dari tanggung jawab Perusahaan untuk dapat menciptakan keseimbangan yang sesuai antara kepentingan usaha dan kelestarian lingkungan hidup.

Aspek lain dari Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perusahaan adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha kepada Pemegang Saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan regulator sebagai Pemangku Kepentingan. Sebagai BUMD yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran Negara/Provinsi, Perusahaan wajib untuk berkomitmen atas pengelolaan operasional yang akuntabel, transparan, berlandaskan pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan bebas dari praktik kecurangan. Perusahaan telah berkomitmen untuk mewujudkan praktik Tata Kelola Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) is a vision of the development of business entities that promote sustainable growth. The meaning of the word “sustainable” is closely related to how the business entities can create a pattern of the balance between profits resulted from their business activities with environmental and social impacts that occur. The emergence of social inequality and environmental damage is a phenomenon of non-existence of the equilibrium.

As a Regional Government Owned Enterprises (BUMD) that always goes hand in hand with the Government’s vision, the Company has a role to realize social responsibility in all layers. To employees and/or workers as internal Stakeholders, the Company is obliged to consider their welfare and working environment that can provide the foundation for self-development of each employee. To the community as external stakeholders, the Company undertakes various social development activities. Similarly, to the citizens of Jakarta as users of the roads where Jakarta MRT project is under going, the Company has an obligation to keep organizing the project development with due regard to the rights of road users.

Environmental aspects are also part of the process of creating the balance. Massive excavation activities conducted by the Company through the appointed contractors must go through a series of observations and licensing procedures set by the environmental regulators. Relocation of trees and parks are also part of the Company’s responsibility to be able to create an appropriate balance between the interests of business and environmental sustainability.

Other aspect of the Company’s CSR is the management accountability to the Shareholder DKI Jakarta Provincial Government and regulators as Stakeholders. Being a Regional Owned Enterprise with an authority to use State/Provincial Budget, the Company is required to commit to the operational management that is accountable, transparent, based on good corporate governance, and free from fraudulent practices. The Company has been committed to the GCG practice as more detailed in the Good Corporate Governance section here of - and

yang sehat—seperti yang dapat dilihat lebih rinci pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini—dan terus mengupayakan perbaikan pada area pengelolaan organisasi yang masih membutuhkan peningkatan.

Pondasi penting yang melandasi komitmen Perusahaan dalam menjalani kegiatan Tanggung Jawab Sosial meliputi:

- Tanggung Jawab Sosial merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Tuntutan global terhadap penerapan Tanggung Jawab Sosial yang baik dan merata.
- Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis.
- Harapan bahwa Perusahaan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

DASAR HUKUM

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan memiliki kewajiban menjalankan aspek Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan beberapa perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
8. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
9. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
10. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.
11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha.
12. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan.
13. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
14. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Kriteria Kualitas Udara Ambien di Wilayah DKI Jakarta.

continues to seek improvements in organizational management areas that still need improvement.

The following are key elements that inspire the Company's commitment to implementing CSR activities:

- CSR is part of Good Corporate Governance.
- Global demand towards a good and equal CSR implementation.
- Increased public awareness towards business ethics and accountability.
- Expectation that the Company and its surrounding environment shall be able to grow together side by side.

LEGAL FRAMEWORK

In its capacity as a BUMD, the Company has an obligation to conduct the CSR aspects according to a number of laws and regulations, namely:

1. The 1970 Law No. 1 on Occupational Safety.
2. The 2003 Law No. 13 on Manpower.
3. The 2007 Law No. 40 regarding Limited Liability Company.
4. The 2009 Law No. 32 regarding the Environmental Protection and Management;
5. The 2011 Law No. 24 on Social Security Agency.
6. The 2008 Government Regulation No. 38 regarding amendments to the 2006 Government Regulation No. 6 regarding Management of State/Regional Government property;
7. The 2012 Government Regulation No. 27 on Environmental Permit;
8. The 2012 Government Regulation No. 47 on CSR in the Limited Liability Companies.
9. The 2012 Government Regulation No. 50 on the Implementation of Occupational Safety and Health Management System.
10. The 2005 DKI Jakarta Governor Regulation No. 122 on Domestic Waste Water Management in Jakarta;
11. The 2013 DKI Jakarta Governor Regulation No. 112 regarding Corporate Social Responsibility and Business Environment;
12. The 2013 DKI Jakarta Governor Regulation No. 157 on Environmental Permit.
13. The 1996 State Minister of Environment Decree No. 49 of 1996 on Vibration Level Standards;
14. The 2001 DKI Jakarta Governor Decree No. 551 on the Establishment of Quality Criteria of Air Ambiance in the DKI Jakarta area;

KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI Commitment to Harmonious Environment

Undang-undang dan beberapa peraturan seperti yang telah disebutkan di atas mengatur secara tegas dan definitif atas kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Kegiatan utama Perusahaan sejak *groundbreaking* pada konstruksi bawah tanah di penghujung tahun 2013 berkaitan langsung dengan proses penggalian tanah, yang secara langsung memiliki dampak terhadap lingkungan alam. Untuk itu, Perusahaan wajib menjalankan kebijakan yang berhubungan langsung dengan Tanggung Jawab Sosial di bidang lingkungan.

The aforementioned laws and regulations firmly and definitively provide the business activities that are directly related to natural resources. The Company's main activity since the groundbreaking of its underground construction at the end of 2013 is directly related to the process of excavation, which directly have an impact on the natural environment. To that end, the Company is obliged to carry out policies that are directly related to Corporate Social Responsibility in the environmental field.

PROSES SELANG PENGADAAN CONTRACT PACKAGE DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Komitmen terhadap lingkungan hidup telah dilakukan Perusahaan sejak tahapan awal pada perencanaan. Proses lelang atau *tender Contract Package* (CP) mempersyaratkan para peserta lelang, khususnya pihak pemenang lelang untuk memperhatikan dampak pengerjaan proyek terhadap lingkungan. Kontrak lelang juga mencakup relokasi lingkungan dan tata ruang-tata kota dimana proyek MRT Jakarta dibangun. Walaupun bersifat artifisial, relokasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang serasi, antara aktivitas pengguna moda transportasi dan lingkungan alam yang berada di sekitarnya.

CONTRACT PACKAGE BID PROCESS AND ENVIRONMENTAL MONITORING

The commitment to environment has been done by the Company at an earlier stage in the planning. The Contract Package (CP) tender process requires tenderers, especially the winning tenderer, to pay attention to the impact of the project on the environment. Tender contract also includes environmental relocation and spatial-urban planning on the areas where Jakarta MRT project is built. Although artificial, the relocation is expected to create a harmonious environment between the activities of the transport modes users and the natural environment in the surrounding areas.

Selain relokasi, proses lelang proyek MRT Jakarta mempersyaratkan pihak kontraktor untuk melakukan pemantauan secara berkala atas dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan proyek MRT Jakarta. Pemantauan meliputi pengukuran kualitas udara ambien, pengukuran kebisingan, pengukuran getaran, pengukuran kualitas air bersih, dan pengukuran kualitas air limbah domestik; yang kemudian dilaporkan kepada Perusahaan sebagai alat untuk mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan proyek MRT Jakarta.

In addition to the relocation, the tender process of MRT Jakarta project requires contractors to carry out regular monitoring of the environmental impacts arising from the construction of MRT Jakarta project. Monitoring includes the measurement of air ambience quality, noise measurement, vibration measurement, measurement of potable water and domestic waste water quality; which is then reported to the Company as a tool to measure the environmental impact of the construction of MRT Jakarta project.

PEMENUHAN PERIZINAN DAN SERTIFIKASI

Sebagai BUMD, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait izin usaha dan pengelolaan lingkungan; sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan. Termasuk—dan yang terpenting—Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memberikan dasar bagi Perusahaan untuk dapat melakukan seluruh proses pembangunan proyek MRT Jakarta, khususnya terkait konstruksi bawah tanah.

FULFILLMENT OF LICENSING AND CERTIFICATION

As a ROE, the Company has an obligation to comply with all regulations and laws related to business licenses and environmental management; in accordance with the 2009 Law No. 32 on the Protection and Management of the Environment, the 2012 Government Regulation No. 27 on Environmental Permit, and the 2013 DKI Jakarta Governor Regulation No. 157 on Environmental Permit including and, most important, the Environmental Impact Assessment (EIA), which provides the basis for the Company to be able to execute the whole processes of MRT Jakarta project development, particularly related to underground construction.

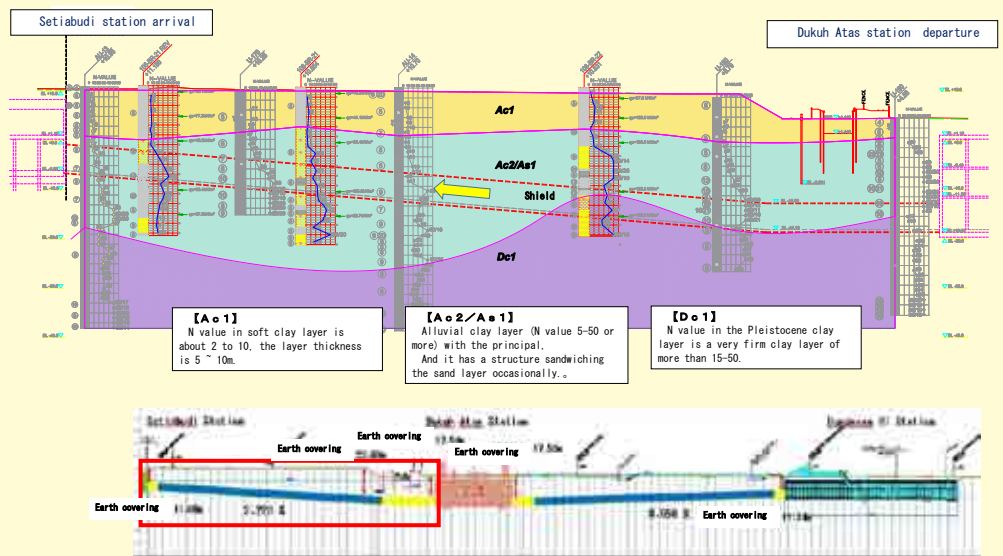
SOIL INVESTIGATION DAN TEST PIT

Proses perencanaan diawali dengan tahapan *soil investigation* dan *test pit*, yaitu kegiatan tes atas karakteristik dan kualitas lapisan kandungan tanah dimana proyek MRT Jakarta akan dibangun, serta investigasi utilitas yang tertanam di bawah tanah. Proses ini menjadi dasar, baik bagi desain dan pembangunan konstruksi maupun pemantauan dampak lingkungan dari pembangunan proyek.

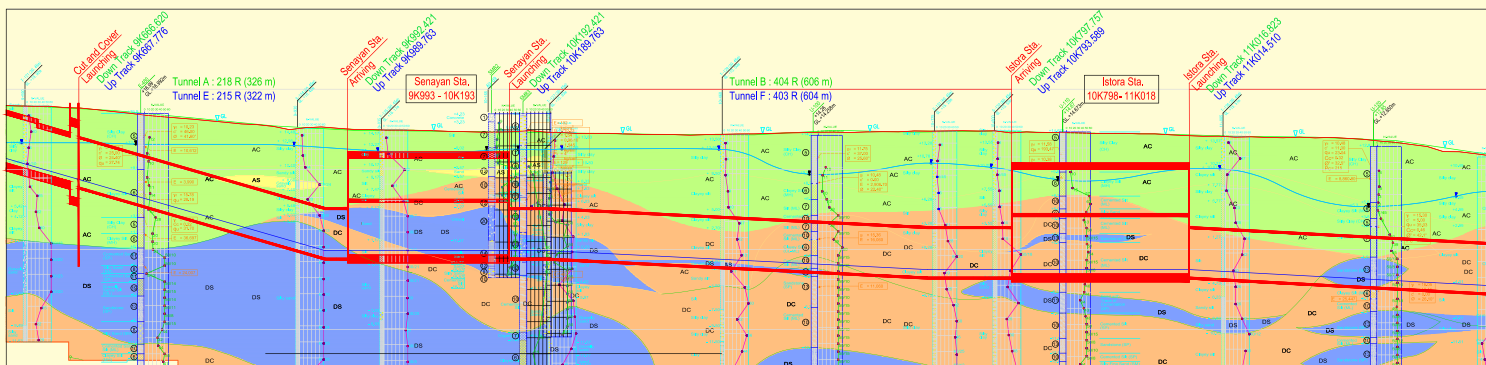
Tahapan *soil investigation* dan *test pit* masuk dalam tahap prakonstruksi yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2014, dengan hasil investigasi yang digunakan untuk melanjutkan proses pembangunan fondasi bangunan, *viaduct* (jembatan penyangga) dan konstruksi bawah tanah.

Soil Investigation Jalur Setiabudi – Dukuh Atas

Soil longitudinal view② (Dukuh Atas~Setiabudi)



Soil Investigation Jalur Sisingamangaraja– Setiabudi



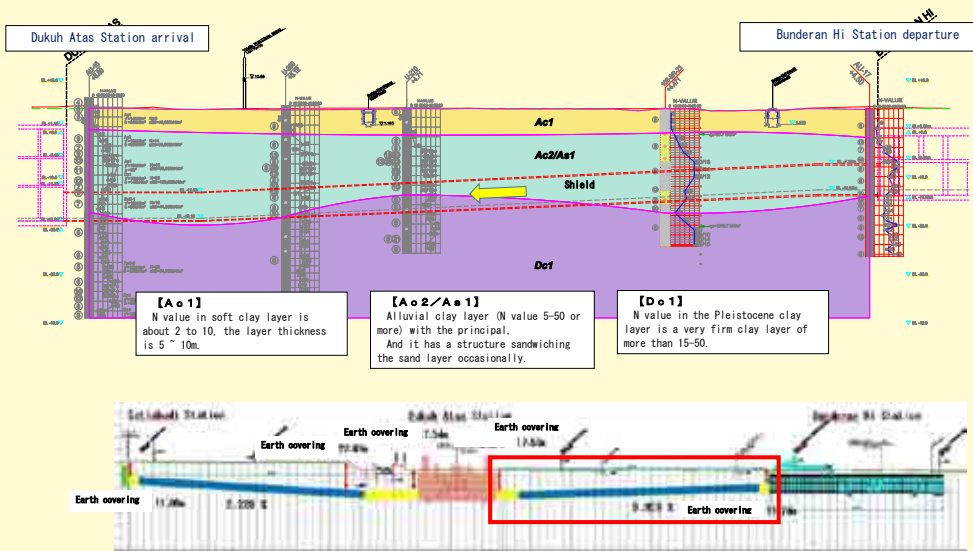
Change	Tunnel A : 218 R (326 m)										Senayan Station										Tunnel B : 404 R (606 m)										Istora Station									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Location
Distance
Time
Method
Remark

Change	Tunnel E : 215 R (322 m)										Senayan Station										Tunnel F : 403 R (604 m)										Istora Station									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Location
Distance
Time
Method
Remark

SOIL INVESTIGATION AND TEST PIT

Soil Investigation Jalur Dukuh Atas – Bundaran Hotel Indonesia

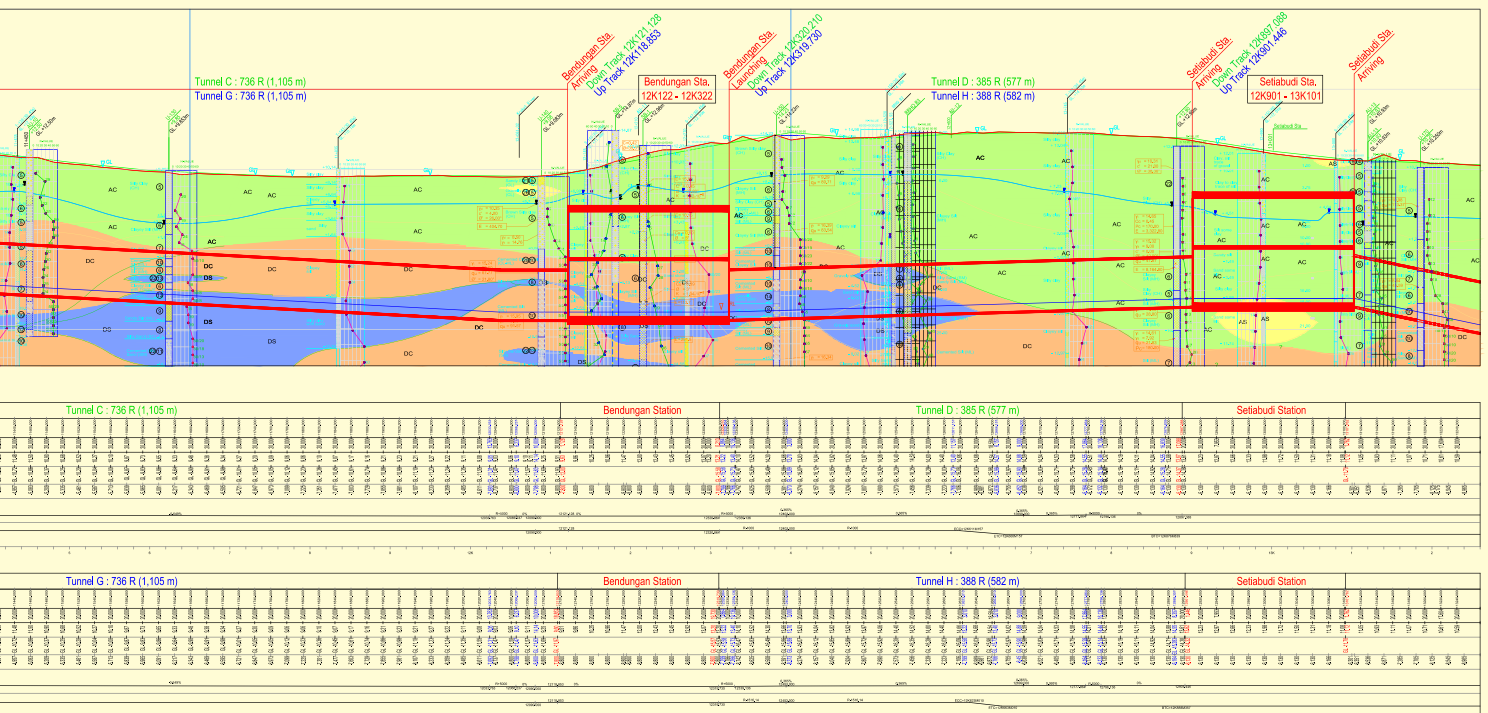
Soil longitudinal view① (Bunderan Hi ~Dukuh Atas)



The planning process begins with soil investigation and test pit, i.e. the testing on the soil characteristics and quality of the lands where Jakarta MRT project will be built, and the investigation of the utilities buried under the ground. This process is the basis for the construction design and development as well as the monitoring of project development's environmental impacts.

The soil investigation and test pit have passed the pre-construction phase conducted throughout 2014, where results of the investigation are used to continue the development of building foundations, viaduct (buffer bridge) and underground construction.

Soil investigation in Sisingamangaraja – Setiabudi Lane.



RELOKASI PEPOHONAN

Salah satu komitmen Perusahaan dalam mengembalikan fungsi lingkungan hidup saat pembangunan proyek adalah relokasi pepohonan pada jalur dimana proyek MRT Jakarta digelar. Sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menyebutkan bahwa penebangan pohon berdiameter 10 sentimeter atau lebih harus diganti dengan penanaman 10 pohon baru, Perusahaan menerapkan penggantian 10 pohon baru untuk setiap 1 (satu) pohon yang ditebang.

Prioritas kegiatan penanaman pohon dilakukan secara konsisten di area resapan air di sekitar wilayah Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memperluas area resapan air untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Adapun pohon yang ditanam berjenis pohon pelindung, seperti Mahoni, Flamboyan, Bungur, Trembesi, serta lainnya. Jenis pohon yang ditanam juga disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Di kemudian hari saat proses konstruksi selesai, Perusahaan juga berkomitmen untuk membentuk jalur hijau pada koridor dimana MRT Jakarta akan beroperasi.

Proses relokasi pepohonan masuk dalam tahapan prakonstruksi yang telah dilakukan pada tahun 2014. Hingga akhir tahun 2015, Perusahaan telah melakukan penanaman kembali pepohonan sebanyak

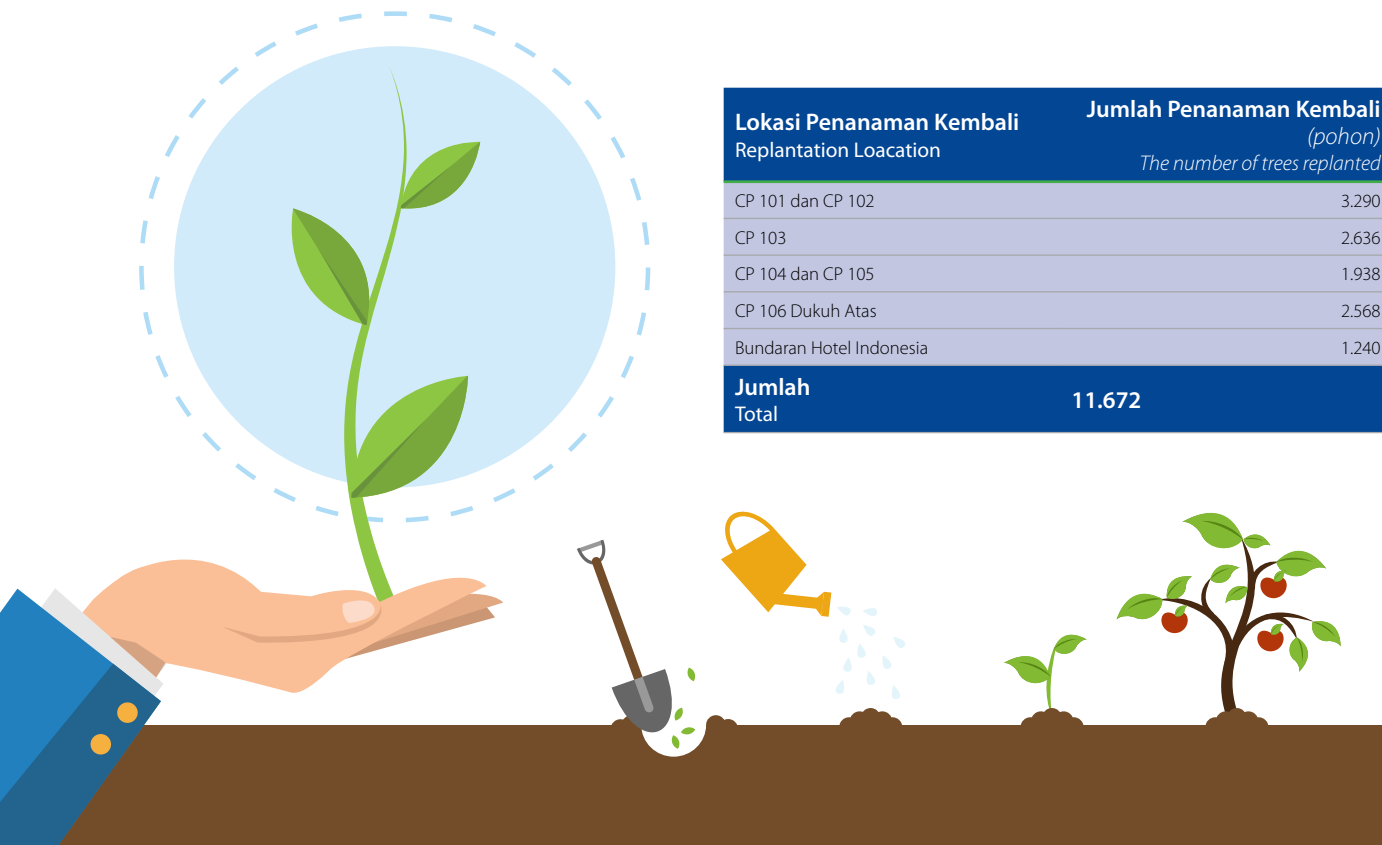
RELOCATION OF TREES

One of the Company's commitment to restoring the environmental functions during the project construction is the relocation of the trees on the paths where the MRT Jakarta project is carried out. Pursuant to the 2007 Regional Regulation No. 8 on Public Order which states that the felling trees with the diameter of 10 centimeter or more must be replaced by planting 10 trees, the Company adopted the plantation of 10 trees for every 1 (one) of felled tree.

The tree planting activity priority is consistently carried out in the water catchment area around Jakarta. This aims to expand the water catchment area to reduce the risk of flooding in Jakarta. The trees planted are the shade trees such as Mahogany, Flamboyant, Bungur, Tamarind, and others. The tree species planted are also adapted to regional circumstances. At a later date when the construction is completed, the Company is also committed to establishing green lines on corridors where MRT Jakarta operates.

The tree relocation was included in the preconstruction phase done in 2014. The number of trees replanted by the Company at the end of 2015 was as follows:

Lokasi Penanaman Kembali Replantation Location	Jumlah Penanaman Kembali (pohon) The number of trees replanted
CP 101 dan CP 102	3.290
CP 103	2.636
CP 104 dan CP 105	1.938
CP 106 Duku Atas	2.568
Bundaran Hotel Indonesia	1.240
Jumlah Total	11.672



PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN

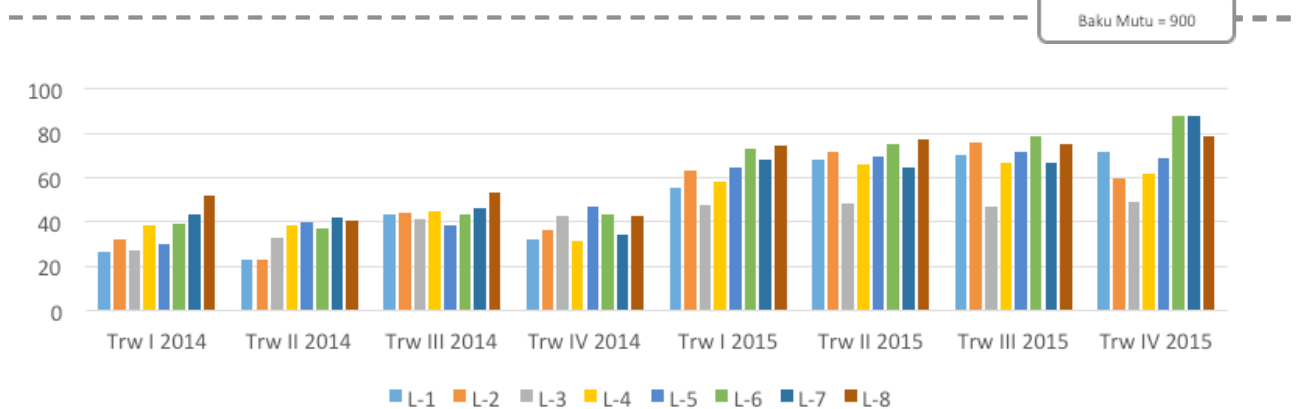
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan pemantauan dampak lingkungan dari keberadaan pembangunan proyek MRT Jakarta; baik sebelum adanya pembangunan proyek maupun saat proyek berjalan. Perusahaan mewajibkan seluruh kontraktor untuk melakukan pemantauan dan pengukuran dampak lingkungan yang mencakup pengukuran kualitas udara ambien, pengukuran kebisingan, pengukuran getaran, pengukuran kualitas air bersih, dan pengukuran kualitas air limbah domestik. Pemantauan dan pengukuran dilakukan secara berkala, yaitu:

- Pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien di setiap bulannya.
- Pemantauan dan pengukuran kebisingan, getaran, kualitas air bersih dan pengukuran kualitas air limbah domestik dilakukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.
- Pemantauan air limbah proyek dilakukan setiap bulan.

Hasil pemantauan dapat dilihat di bawah ini.

Tren Kualitas Udara Ambien Hasil Pengukuran Tahun 2014 dan 2015

Tren Sulfur Dioksida (SO₂)



MONITORING OF ENVIRONMENTAL IMPACT

In accordance with the laws and regulations in force, the Company is committed to monitoring the environmental impact of MRT Jakarta project development either before the project construction commencement and when the project is on going. The Company requires all contractors to do the monitoring and measurement of environmental impacts including the measurement of air ambience quality, noise measurement, vibration measurement, measurement of potable water quality and domestic waste water quality. The monitoring and measurement done on a regular basis are as follows:

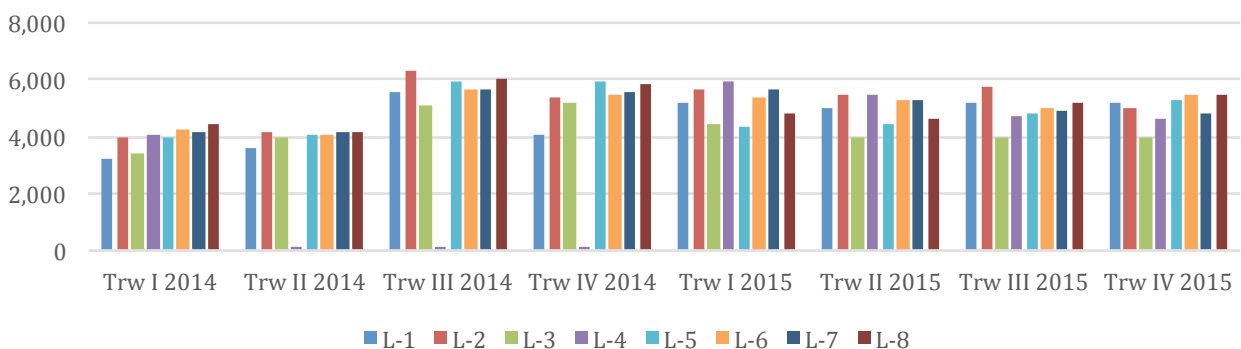
- Monthly monitoring and measurement of air ambience quality;
- Monitoring and measurement of noise, vibration, water quality and domestic waste water quality are conducted quarterly.
- Monitoring of project waste water is conducted every month.

The monitoring results are as below:

The Trend of Air Ambience Quality based on 2014 and 2015 Measurement

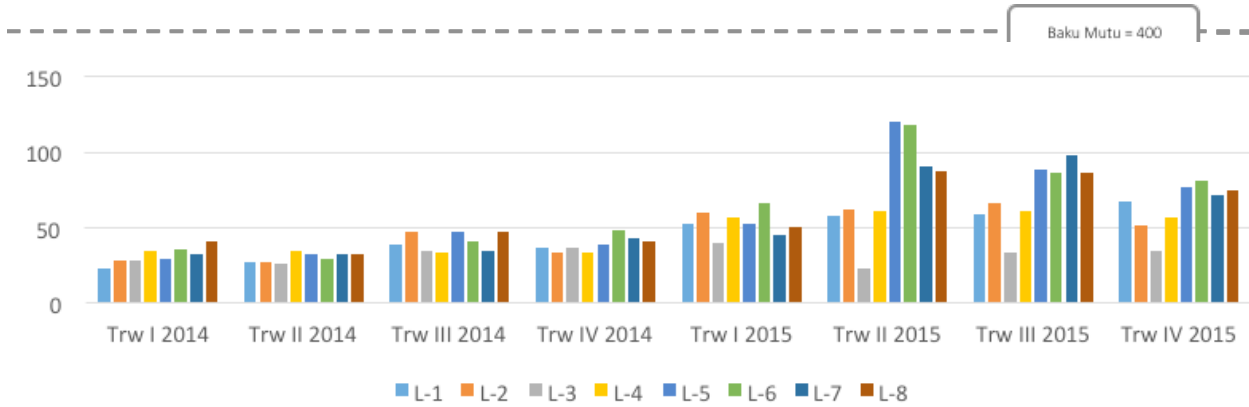
Sulfur Dioxide (SO₂) Trend

Tren Karbon Monoksida (CO)



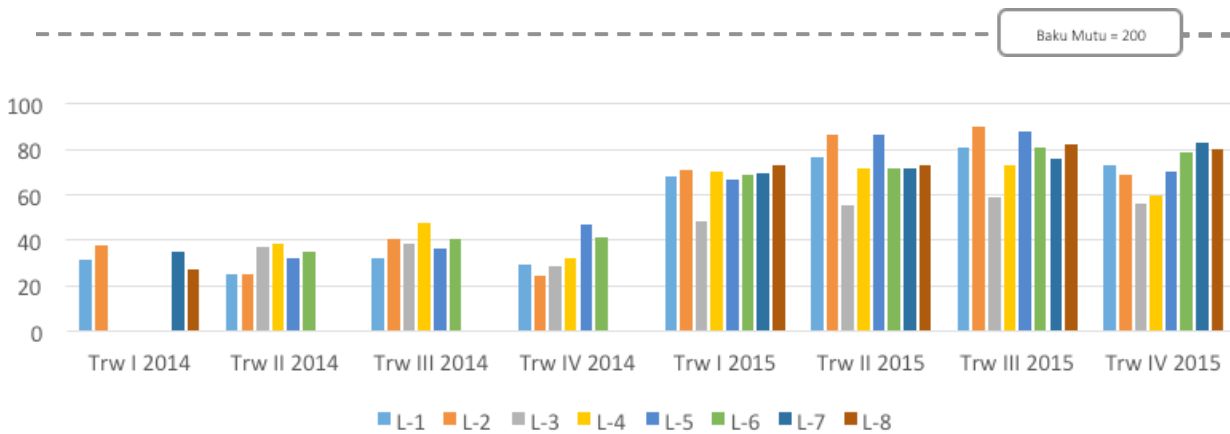
Tren Nitrogen Dioksida (NO2)

Nitrogen Dioxide (NO2) Trend



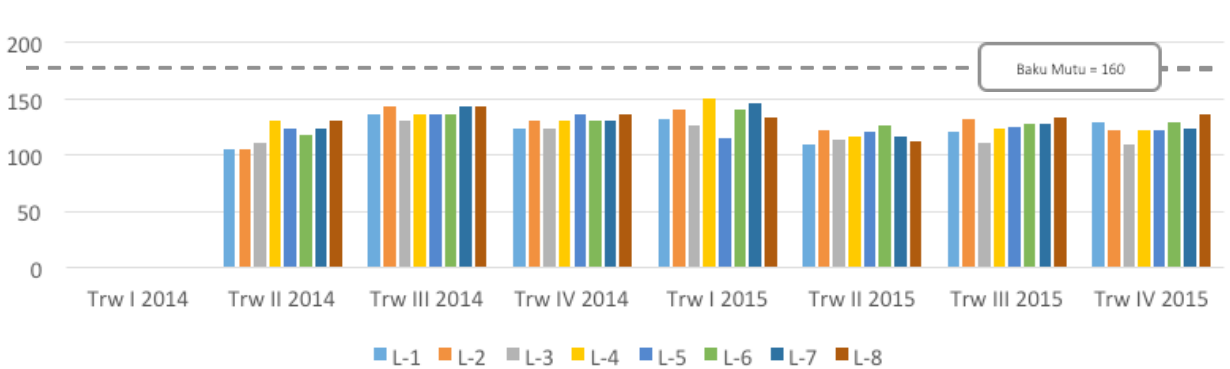
Tren Oksidan (O3)

Oxidants (O3) Trend



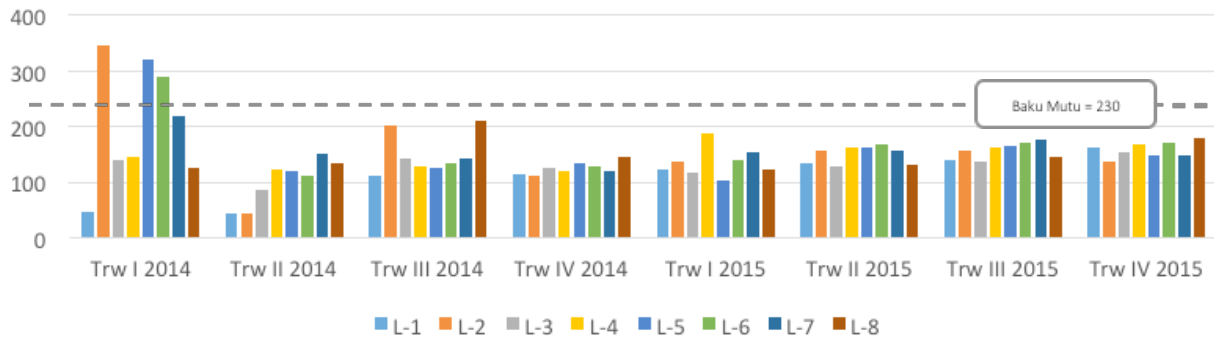
Tren Hidrokarbon (HC)

Hydrocarbon (HC) Trend



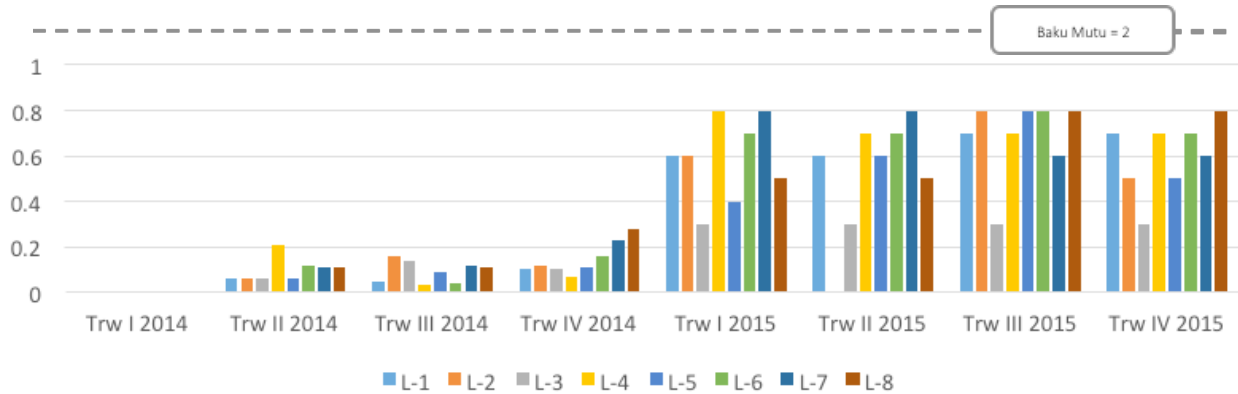
Tren Debu (TSP)

Dust (TSP) Trend



Tren Timbal (Pb)

Lead (Pb) Trend



Sumber: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.

Source: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.

Keterangan:

Description:

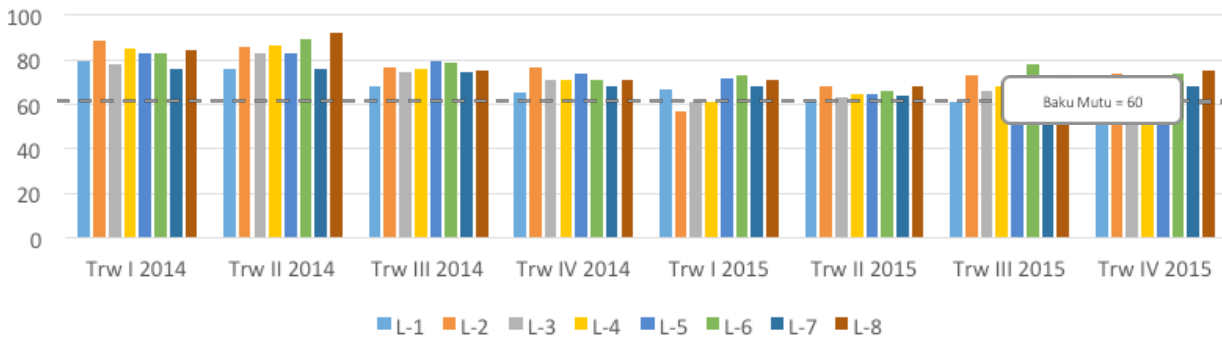
*)	Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.551 tahun 2001 tentang Penetapan Kriteria Kualitas Udara Ambien di Wilayah DKI Jakarta.	The 2001 DKI Jakarta Provincial Governor Decree No 551 on the Application of Air Ambiance Quality Criteria in DKI Jakarta Area
L-1	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Lebak Bulus.	<i>Sampling Location</i> : Lebak Bulus Station
L-2	Lokasi <i>sampling</i> Jl. Raya Fatmawati (depan Honda Fatmawati).	<i>Sampling Location</i> : Jl. Raya Fatmawati (in front of Honda Fatmawati)
L-3	Lokasi <i>sampling</i> Taman PKK Panglima Polim.	<i>Sampling Location</i> : Taman PKK Panglima Polim
L-4	Lokasi <i>sampling</i> Area Al-Azhar.	<i>Sampling Location</i> : Al-Azhar Area
L-5	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Senayan.	<i>Sampling Location</i> : Senayan Station
L-6	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bendungan Hilir.	<i>Sampling Location</i> : Bendungan Hilir Station.
L-7	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Dukuh Atas.	<i>Sampling Location</i> : Dukuh Atas Station
L-8	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bundaran Hotel Indonesia.	<i>Sampling Location</i> : Bundaran Hotel Indonesia Station

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan di 8 (delapan) area dimana proyek MRT Jakarta berjalan, dapat dilihat bahwa seluruh nilai untuk semua parameter masih dibawah baku mutu udara ambien sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Kriteria Kualitas Udara Ambien di Wilayah DKI Jakarta. Beberapa peningkatan yang terjadi lebih disebabkan aktivitas kendaraan umum dan kemacetan lalu lintas yang terjadi di sekitar lokasi pembangunan proyek MRT Jakarta.

Results of the air quality measurements performed in 8 (eight) MRT Jakarta areas where the project is running show that all values for all parameters are still below the air ambience quality standard in accordance with the 2001 DKI Jakarta Governor's Decree No. 551 on the Establishment of Air Ambiance Quality Criteria in the Jakarta Area. Some of the increased levels are more due to public transportation activities and traffic jams occurring in the vicinity of MRT Jakarta construction project.

TREN KUALITAS KEBISINGAN HASIL PENGUKURAN TAHUN 2014 DAN 2015

THE TREND OF NOISE QUALITY BASED ON 2014 AND 2015 MEASUREMENT



Sumber: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.
 Keterangan: *) Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.551 tahun 2001 tentang Penetapan Kriteria Kualitas Udara Ambien di Wilayah DKI Jakarta, Lampiran II.

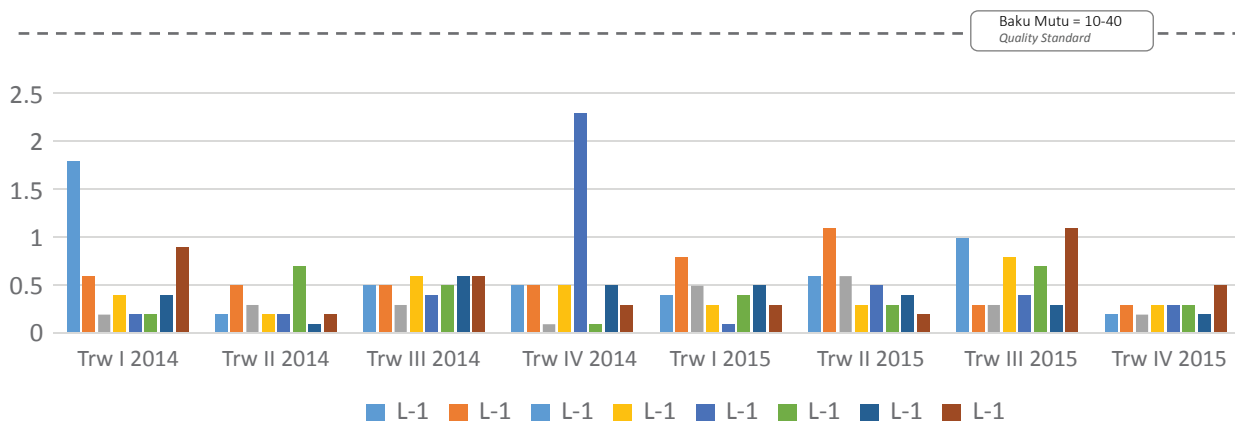
Source: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.
 Description:*) The 2001 DKI Jakarta Provincial Governor Decree No 551 on the Application of Air Ambiance Quality Criteria in DKI Jakarta Area, Annex II.

Jika dibandingkan dengan Baku Mutu sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 dimana Baku Mutu sebesar 60 dBA untuk Fasilitas Umum dan Pemerintahan, hasil pengukuran menunjukkan seluruh lokasi memiliki nilai kebisingan di atas Baku Mutu. Tingginya nilai kebisingan ini aktivitas kendaraan umum dan kemacetan lalu lintas yang berada di sekitar lokasi proyek pembangunan MRT Jakarta.

Compared with the Quality Standards set in the 2001 DKI Jakarta Governor's Decree No. 551 which requiring 60 dBA Quality Standard for Public and Government Facilities, the measurement results shows that the noise levels in all locations are above the Quality Standards. This high level of noise is due public transport activities and traffic jams in the vicinity of MRT Jakarta construction project.

TREN KUALITAS GETARAN HASIL PENGUKURAN TAHUN 2014 DAN 2015

TREND OF VIBRATION QUALITY BASED ON THE 2014 AND 2015 MEASUREMENT



Sumber: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.
 Keterangan: *) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 49 Th 1996 tentang Baku Tingkat Getaran, Lampiran IV tentang Baku Mutu Tingkat Kejut.

Source: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.
 Description:*) The 1996 Minister of Environment Decree No. 49 on the Level of Vibration Quality Standard, Annex IV on the Shock Level Quality Standard.

Berdasarkan hasil pengukuran getaran pada 8 (delapan) lokasi *sampling*, menunjukan nilai masih di bawah Baku Mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran, Lampiran IV tentang Baku Mutu Tingkat Kejut.

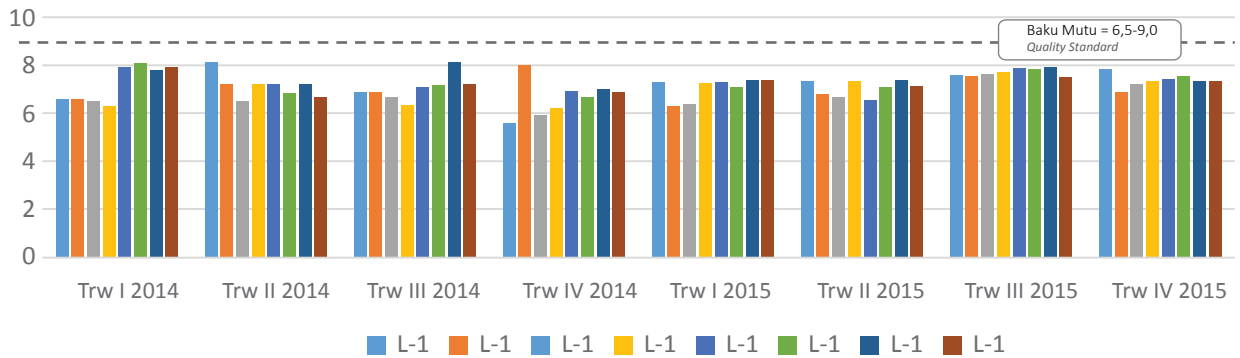
Results of the vibration measurement in 8 (eight) sampling locations show that the levels are still below the Quality Standard based on The 1996 Minister of Environment Decree No. 49 on the Level of Vibration Quality Standard, Annex IV on the Shock Level Quality Standard.

TREN KUALITAS KUALITAS AIR BERSIH HASIL PENGUKURAN TAHUN 2014 DAN 2015

TREND OF POTABLE WATER QUALITY BASED ON THE 2014-2015 MEASUREMENT

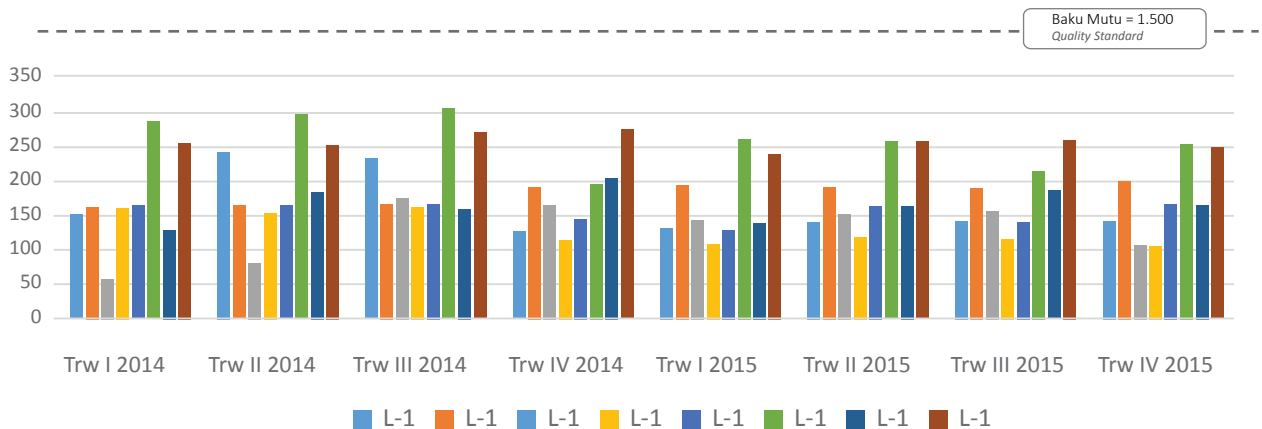
Tren pH (Insitu)

pH Trend (In-Situ)



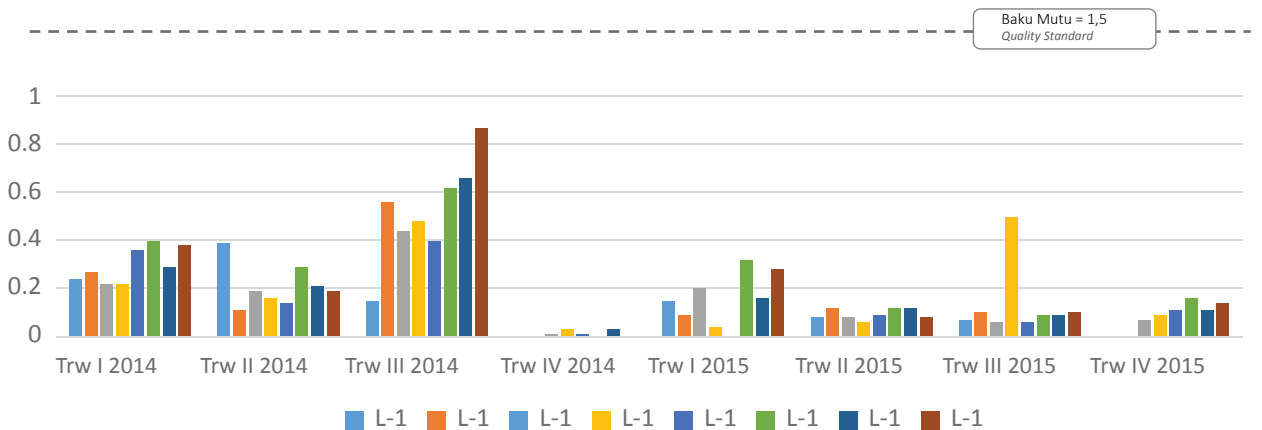
Tren Zat Padat Terlarut (TDS)

Trend of Dissolved Solids



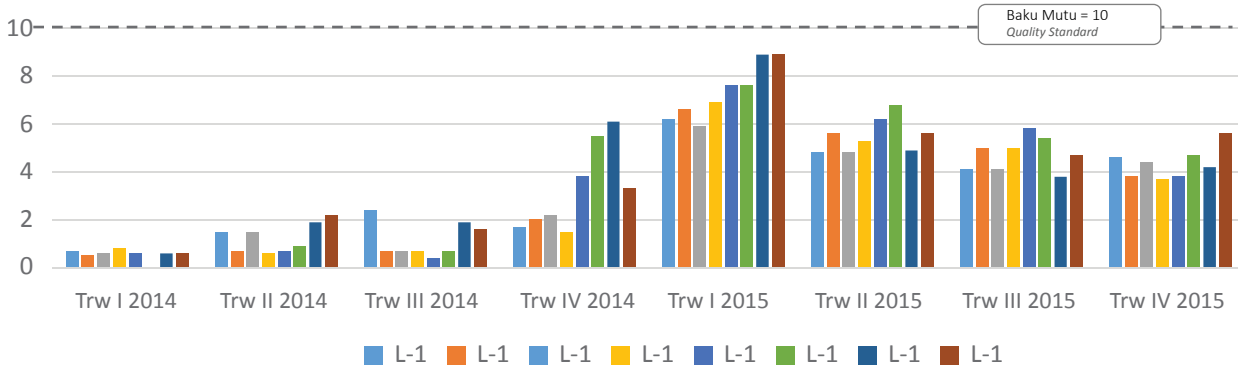
Tren Fluorida (F)

Fluoride of Trend



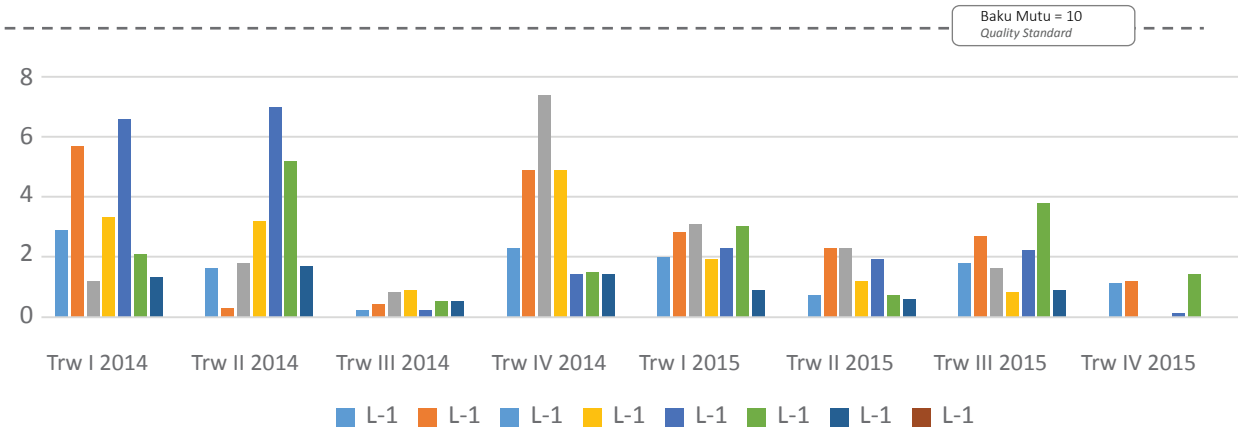
Tren Nilai Pemangas (KmnO4)

Trend of Permanganate (KMnO4) Value



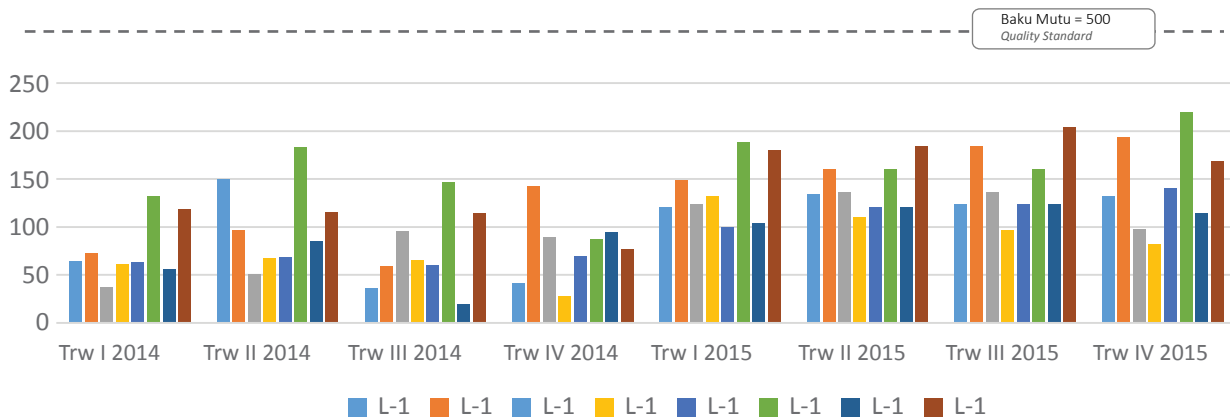
Tren Nitrat (NO3-N)

Nitrate of Trend (NO3-N)



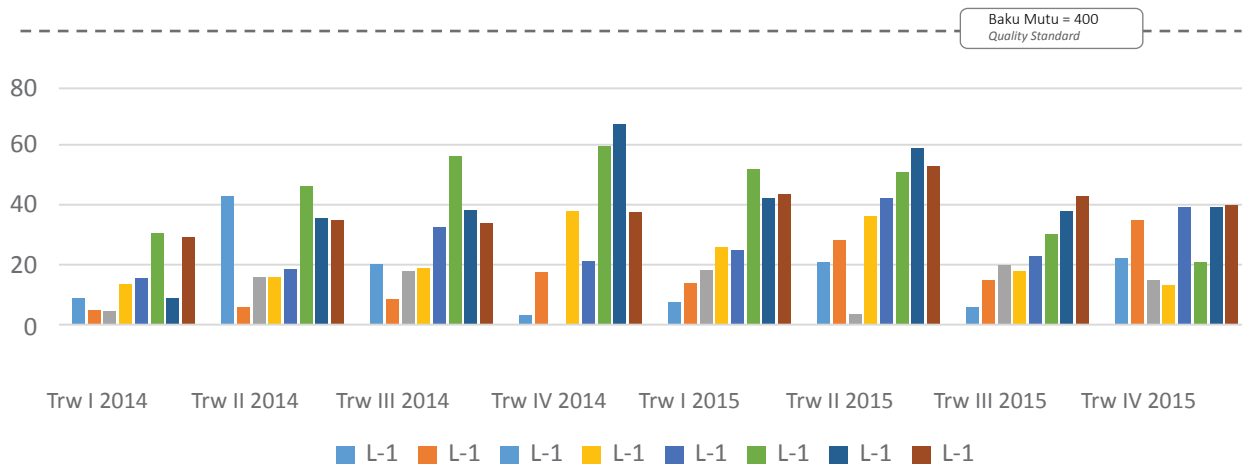
Tren Kasadahan Total (CaCO3)

Trend of Total Hardness (CaCO3)



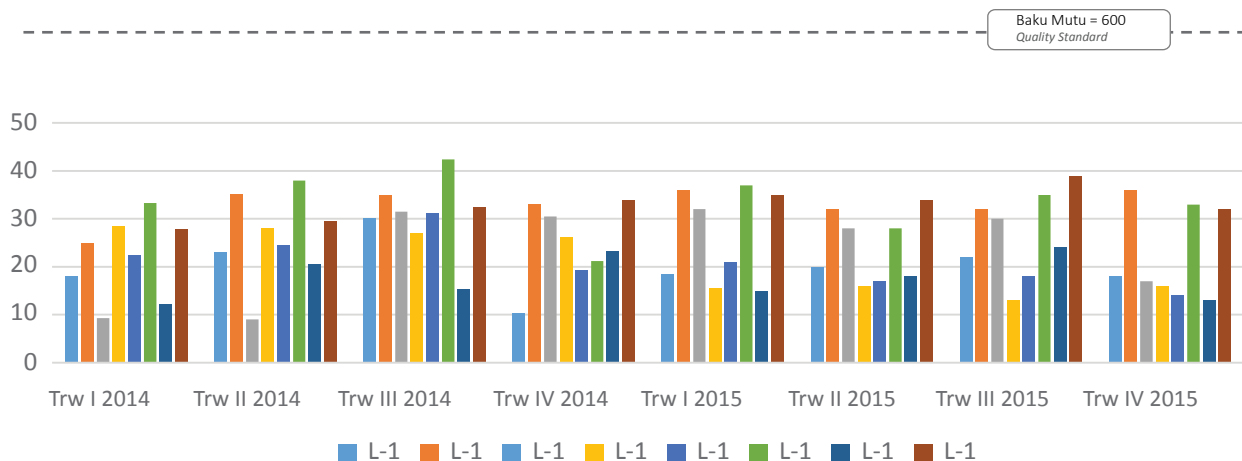
Tren Sulfat (SO4)

Sulfate of Trend (SO4)



Tren Klorida (Cl)

Chloride of Trend (Cl)



Sumber: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.

Source: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.

Keterangan:

Description

*)	Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.	The 1990 Health Minister Regulation on the Water Quality Requirements and Supervision
L-1	Lokasi <i>sampling</i> sumur penduduk <i>Bamboo Area</i> (Stasiun Lebak Bulus).	<i>Sampling location</i> : community wells of <i>Bamboo Area</i> (Lebak Bulus station).
L-2	Lokasi <i>sampling</i> pemukiman penduduk Jl. BDN Raya Rt 10/11 Kel. Cilandak Barat (belakang Honda Fatmawati).	<i>Sampling Location</i> : residential area in Jl. BDN Raya Rt 10/11 Ex. Cilandak Barat (behind Honda Fatmawati).
L-3	Lokasi <i>sampling</i> toilet area Taman PKK Panglima Polim.	<i>Sampling location</i> : toilet area in Taman PKK Panglima Polim
L-4	Lokasi <i>sampling</i> Area Al-Azhar.	<i>Sampling Location</i> : Al-Azhar area
L-5	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Senayan.	<i>Sampling Location</i> : Senayan Station
L-6	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bendungan Hilir.	<i>Sampling Location</i> : Bendungan Hilir Station.
L-7	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Dukuh Atas.	<i>Sampling Location</i> : Dukuh Atas Station
L-8	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bundaran Hotel Indonesia.	<i>Sampling Location</i> : Bundaran Hotel Indonesia Station

Hasil analisis laboratorium kualitas air bersih pada 8 (delapan) lokasi *sampling* di pembangunan proyek MRT Jakarta menunjukkan nilai seluruh parameter yang diuji berada di bawah Baku Mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.416

Results of the water quality laboratory analysis in 8 (eight) *sampling* locations in MRT Jakarta construction project shows that the rates of all parameters tested are under Quality Standards required under the 1990 Ministry of Health Regulation 416 on the

Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air, dimana hasil analisis ini memberikan kelayakan penggunaan air bersih khususnya untuk sanitasi penduduk.

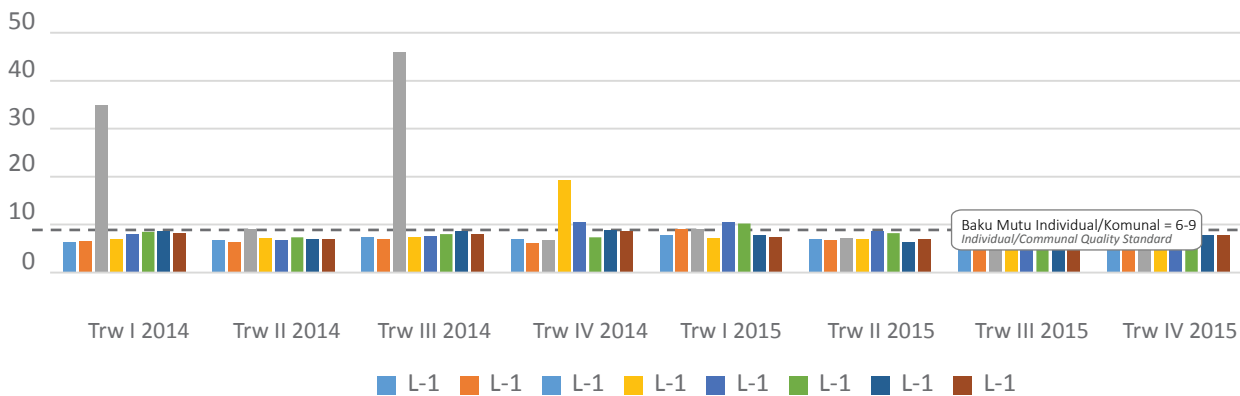
Water Quality Requirements and Supervision, where the results of this analysis provide the feasibility of the use of clean water, especially for the population's sanitation.

TREN KUALITAS AIR LIMBAH DI DALAM PROYEK HASIL PENGUKURAN TAHUN 2014 DAN 2015

THE TREND OF WASTE WATER QUALITY BASED ON THE 2014 AND 2015 MEASUREMENT

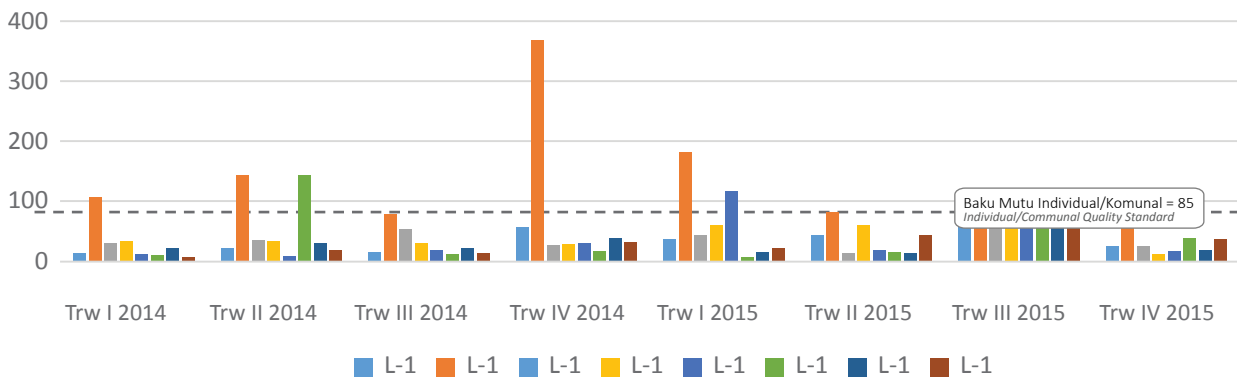
Tren pH

pH Trend



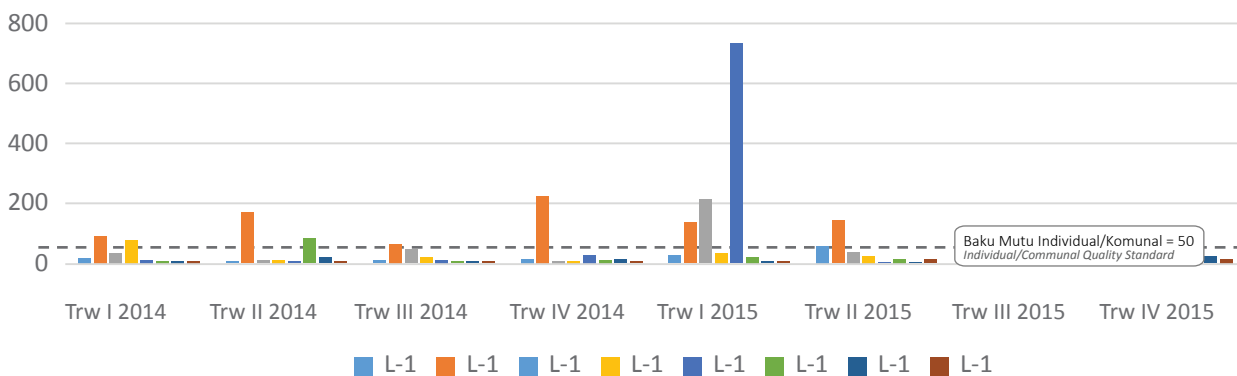
Tren KMnO4

KMnO4 Trend



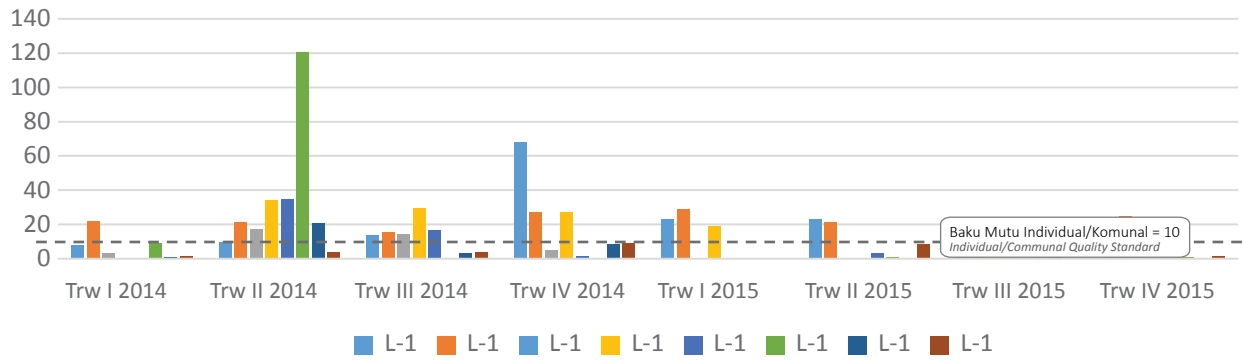
Tren TSS

TSS Trend



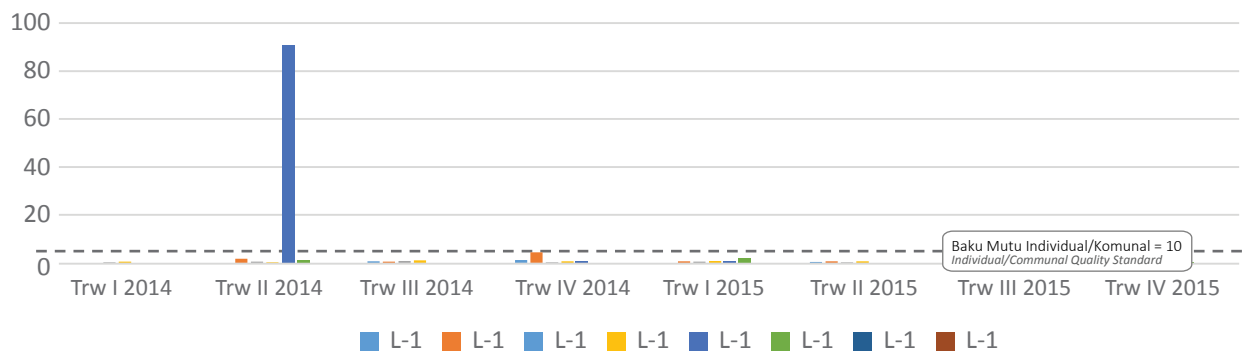
Tren NH3-N

NH3-N Trend



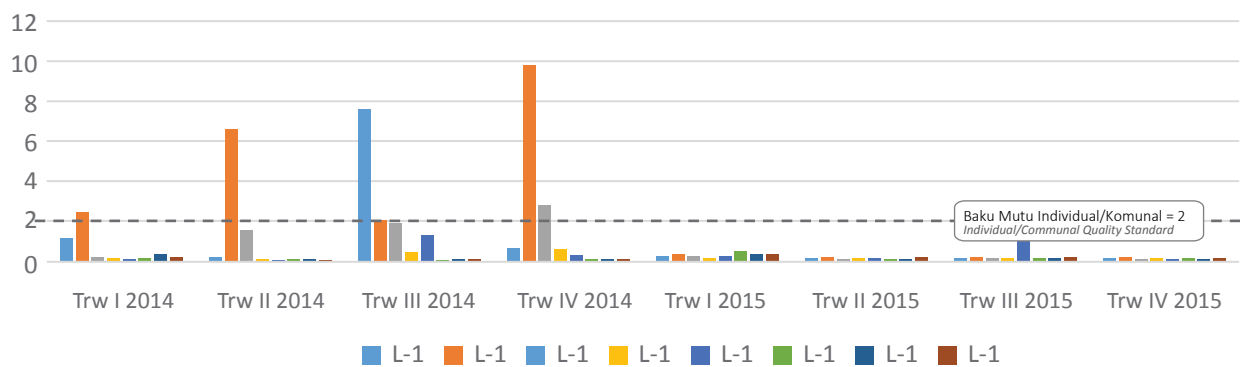
Tren Minyak dan Lemak

Oil and Fat Trend



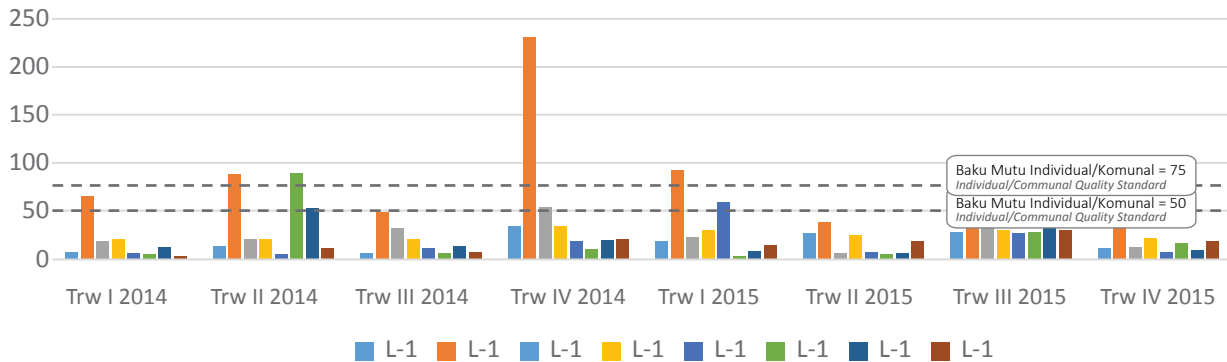
Tren MBAS

MBAS Trend



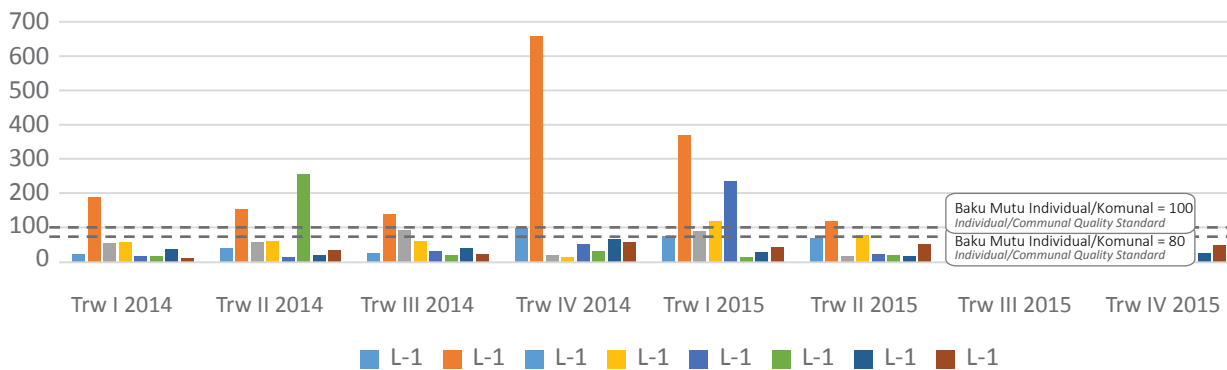
Tren BOD5

BOD5 Tren



Tren COD

COD Trend



Sumber: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.

Source: PT Kehatilah Indonesia, Desember 2015.

Keterangan:

Description:

*)	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.	The 2005 DKI Jakarta Governor Regulation No 122 on the Domestic Waste Water Management in the DKI Jakarta Province.
L-1	Lokasi <i>sampling</i> air limbah <i>Bamboo Area</i> (Stasiun Lebak Bulus).	<i>Sampling Location</i> : waste water in Bamboo Area (Lebak Bulus Station).
L-2	Lokasi <i>sampling</i> Jl. Raya Fatmawati (depan Honda Fatmawati).	<i>Sampling Location</i> : Jl Raya Fatmawati (in front of Honda Fatmawati).
L-3	Lokasi <i>sampling</i> di dalam area Taman PKK Panglima Polim.	<i>Sampling Location</i> : in the area of Taman PKK Panglima Polim.
L-4	Lokasi <i>sampling</i> Area Al-Azhar.	Lokasi <i>sampling</i> Area Al-Azhar.
L-5	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Senayan.	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Senayan.
L-6	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bendungan Hilir.	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bendungan Hilir.
L-7	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Dukuh Atas.	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Dukuh Atas.
L-8	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bundaran Hotel Indonesia.	Lokasi <i>sampling</i> Stasiun Bundaran Hotel Indonesia.

Pengukuran kualitas air limbah domestik yang berada di dalam lokasi proyek di 8 (delapan) lokasi *sampling* proyek MRT Jakarta menunjukkan nilai yang cukup bervariasi. Sebagian besar hasil penilaian menunjukkan pemenuhan standar Baku Mutu yang mengacu kepada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta; walau beberapa di antaranya berada di atas Baku Mutu yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama dari tingginya

Results of the domestic waste water quality measurement within the project sites in 8 (eight) sampling locations of MRT Jakarta project demonstrates varied values. Most of the measurement results indicate compliance to Quality Standards as referred to the 2005 DKI Jakarta Governor's Regulation No. 122 on Domestic Waste Water Management in Jakarta, although some of them are above the predetermined Quality Standards. These above Quality Standard values are due to the infiltration of domestic waste

nilai di atas Baku Mutu disebabkan adanya infiltrasi dari limbah domestik kegiatan di sekitar lokasi proyek MRT Jakarta. Seperti dapat dilihat pada hasil pengukuran air limbah domestik di L-2 (Jl. Raya Fatmawati, depan Honda Fatmawati) menunjukkan hampir seluruh parameter telah melewati Baku Mutu, dimana tingginya parameter-parameter tersebut menunjukkan penurunan kandungan oksigen terlarut dalam air. Demikian pula pada beberapa lokasi lain yang menunjukkan penilaian berada di atas parameter, dimana tingginya kadar parameter dipengaruhi oleh infiltrasi limbah bahan buangan organik ke dalam badan penerima (saluran).

Selain penilaian di atas, pemantauan terhadap *Greenhouse Gas* (GHG) Emissions, atau Emisi Gas Rumah Kaca juga dilakukan pada proyek pembangunan MRT Jakarta. Pemantauan terhadap GHG dilakukan di seluruh CP pembangunan proyek, dan diterapkan sepanjang tahun untuk melihat tingkat pembuangan emisi dari aktivitas pembangunan konstruksi.

activities in the vicinity of MRT Jakarta project, as can be seen in the measurement results of domestic waste water in the L-2 (Jl. Raya Fatmawati, front of Honda Fatmawati) showing that almost all the parameters are above the Quality Standards, indicating a decrease in dissolved oxygen content in the water. Similarly, several other locations also show that the results are above the parameters, which are affected by high levels of run off infiltration of organic waste materials into the drainage (recipient body).

In addition to the above assessment, monitoring of Greenhouse Gas (GHG) Emissions is also carried out in the MRT Jakarta construction. This GHG monitoring is conducted throughout the project development Contract Packages throughout the year to see the level of exhaust emissions from the construction activities.

Emisi Gas Rumah Kaca Pembangunan MRT Jakarta di Sepanjang Tahun 2015

Lokasi Location	Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas (GHG) Emissions	Jumlah Total
CP 101 dan CP 102	Electricity (tCO ₂ -e)	4.721,28
	LPG(tCO ₂ -e)	9.957,816
	Diesel (tCO ₂ -e)	8.896,119
	Petrol (tCO ₂ -e)	360
CP 103	Electricity (kg)	141.771
	Diesel (kg)	648.867
	Gasoline (kg)	72.613
CP 104 dan CP 105	Diesel (Gg CO ₂)	0,7682670
	Premium (Gg CO ₂)	0,1372389
CP 106	Electricity (tCO ₂ -e)	135,1180864
	Diesel (tCO ₂ -e)	955,0008

Greenhouse Gas (GHG) Emissions of MRT Jakarta Construction Throughout 2015

Penilaian atas pemantauan dampak lingkungan di atas berguna bagi evaluasi kinerja pembangunan proyek MRT Jakarta dan dampaknya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Pemantauan ini dapat memberikan masukan bagi Perusahaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk dapat melakukan penanganan khusus agar proyek MRT Jakarta tidak menimbulkan dampak lingkungan hidup yang negatif.

The above assessment of the environmental impact monitoring is useful to evaluate the performance of MRT Jakarta project and its impact on the surrounding environment. This monitoring can provide input for the Company to take the necessary measures to be able to perform special handling in order to avoid negative impact of MRT Jakarta project to the environment.

Pengolahan Limbah

Perusahaan secara khusus menekankan kepada seluruh pihak kontraktor pentingnya pengolahan limbah dalam proses pembangunan MRT Jakarta. Seperti pengelolaan air limbah dengan pengukuran yang telah disebutkan di atas, pembuangan air limbah ke dalam *drainase* umum harus melewati serangkaian pengukuran dan pengolahan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), agar air limbah proyek MRT Jakarta tidak

Waste Treatment

The Company specifically emphasizes to all parties the importance of waste management contractor in the MRT Jakarta development process; i.e, waste water management with the above-mentioned measurements, disposal of waste water into public drainage must pass a series of measurements and Waste water Treatment Plant (WWTP) processing technology, in order to prevent negative environmental impacts of the waste water from MRT Jakarta

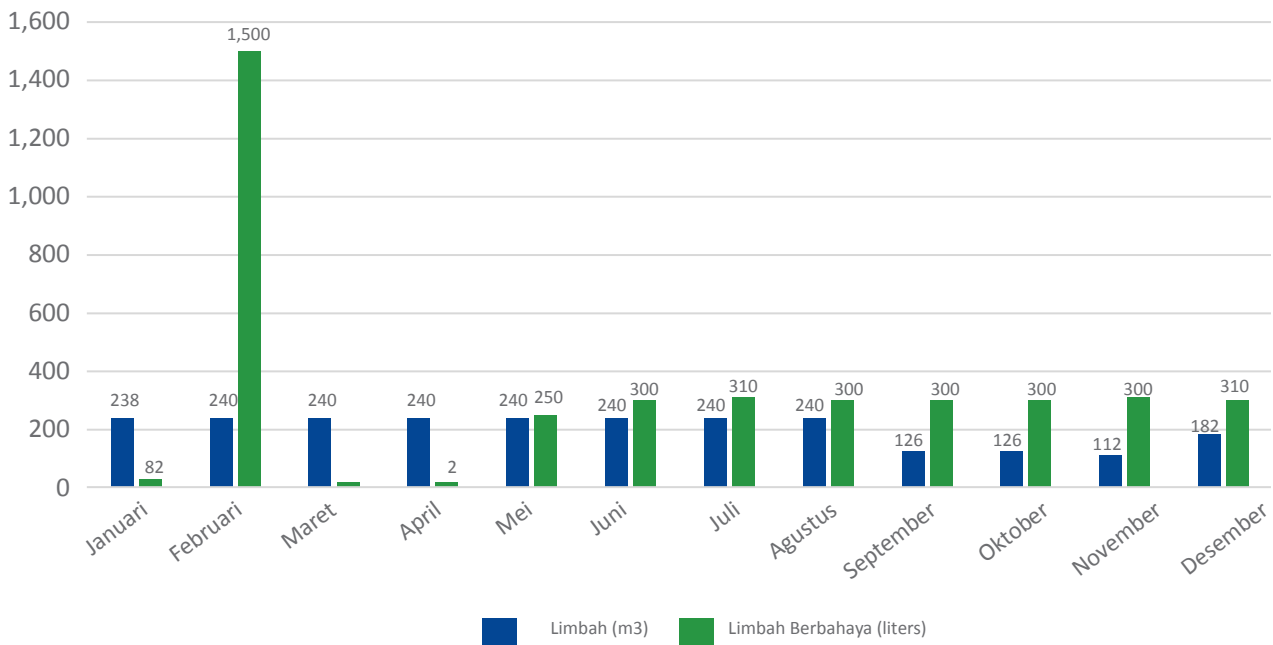
menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Tahapan seperti pengendapan air limbah ke dalam tangki sedimentasi menjadi salah satu proses dalam IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga.

Untuk pengelolaan sampah dan air limbah kontraktor, Perusahaan melakukan pemantauan secara berkala agar sampah kontraktor tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup maupun kerusakan pada jalur dimana proyek MRT Jakarta dibangun.

project. Waste water deposition into the sedimentation tank is one of the processes in a WWTP managed by third parties.

For the purpose of the contractors' waste and waste water management, the Company conducts regular monitoring on the contractors' waste and waste water to avoid negative impacts/damages resulted from the contractor's waste to the environment and the lanes where the Jakarta MRT project is built.

Pemantauan Sampah dan Limbah Kontraktor di Sepanjang Tahun 2015



Contractors' Garbages and Waste Monitoring Throughout 2015

Masalah Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup

Perusahaan telah melaksanakan seluruh kepatuhan terkait pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan proyek MRT Jakarta. Di sepanjang tahun 2015, Perusahaan tidak menemukan adanya pengaduan dari pihak manapun terkait proyek MRT Jakarta yang berakibat negatif pada lingkungan hidup.

Complaints Related to Environmental Issues

The Company has been performing all compliances related to the management of environmental impacts arising from MRT Jakarta project construction. Throughout 2015, the Company did not receive any complaints from any party related to MRT Jakarta that adversely impact the environment.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan operasional usaha adalah Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Aspek ini didasari pada pandangan Perusahaan akan karyawan sebagai bagian dari Pemangku Kepentingan, dimana laju pertumbuhan Perusahaan akan memiliki imbas yang positif terhadap perkembangan setiap karyawan. Pada aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perusahaan memandang aspek ini sebagai pengelolaan operasional proyek dengan mengupayakan risiko yang rendah, terutama adanya risiko kecelakaan kerja dari tenaga kerja di lapangan. Selain berdampak positif terhadap citra korporasi Perusahaan, upaya menekan risiko kecelakaan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh Pemangku Kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan MRT Jakarta.

KETENAGAKERJAAN

Aspek ketenagakerjaan, seperti yang telah diuraikan secara rinci pada bagian Sumber Daya Manusia dalam Analisis dan Pembahasan Manajemen pada laporan tahunan ini, memegang peran penting dalam operasional Perusahaan. Sebagai salah satu pilar utama dalam Pemangku Kepentingan, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilandasi pada jaminan kesejahteraan karyawan dengan tetap memperhitungkan kondisi Perusahaan. Selain gaji dan honorarium, lingkungan sosial yang baik akan menentukan kualitas dan perkembangan kepribadian karyawan, yang tentunya akan berdampak pada produktifitas kerja.

Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Dan Kesempatan Kerja

Perusahaan merupakan BUMD yang menjunjung tinggi falsafah negara Republik Indonesia dan peraturan serta perundang-undangan sebagai produk hukumnya. Sesuai visi dan misinya, Perusahaan tidak memiliki afiliasi terhadap salah satu golongan maupun paham tertentu yang dapat menciptakan pandangan diskriminatif terhadap sebuah hal. Hak asasi manusia—dalam hal ini adalah hak individu yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku—menjadi bagian dari terbangunnya hubungan Perusahaan dengan manajemen dan seluruh karyawan.

Perusahaan selalu menghargai hak asasi karyawan dan menghargai segala bentuk perbedaan tanpa melihat budaya, kebangsaan, agama, suku, jenis kelamin, usia maupun kategori yang dilindungi lainnya. Perusahaan menghargai martabat dan nilai setiap individu dalam mengembangkan kemitraan yang setara sebagai bagian dari tim.

Perusahaan tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap perilaku menyimpang antar rekan kerja maupun di luar rekan kerja. Dalam kesehariannya, insan Perusahaan tidak boleh menggunakan kata-kata atau perilaku yang menghina, mendiskriminasi atau melanggar hak asasi manusia atau merendahkan nilai spiritual seseorang.

One important aspect in the management of business operations is Employment, Occupational Health and Safety (K3). These aspects are based on the Company's view that employees are part of Stakeholders, where the Company's growth will positively impact the development of each employee. In the aspect of Occupational Health and Safety (K3), the Company views this aspect as the operational project management by seeking low risk, particularly the risk of occupational accidents on site. Other than to build the Company's positive corporate image, the efforts to reduce occupational accident risk will create a working environment that is safe and comfortable for all Stakeholders and parties involved in the construction of MRT Jakarta project.

EMPLOYMENT

Employment aspect, as described in the HR Section of this Annual Report's Management Discussion and Analysis, plays an important role in the Company's operations. As one of the main pillars of the stakeholders, HR management must be based on the welfare of employees while taking into account of the Company's condition. In addition to salaries and honorariums, a decent social environment will determine the quality and personality development of employees, which will certainly have an impact on work productivity.

Human Rights, Equality and Work Opportunities

The Company is a ROE that upholds the philosophy of Republic of Indonesia and the country's laws and regulations. In accordance with its vision and mission, the Company has no affiliation to any group or specificism that creates discriminatory views on an issue. Human rights—in this case is an individual right that is stipulated in the prevailing regulations and legislation to be part of the establishment of the Company's relationship with the management and all employees.

The Company always appreciates employee's rights and recognizes all kinds of differences regardless of culture, nationality, religion, race, gender, age or other protected criteria. The Company appreciates individual dignity and values in developing equal partnership as part of the team.

The Company does not tolerate any deviant behaviors among or outside work colleagues. In their daily jobs, the Company's individual shall not use insulting words or behaviors, discriminate or violate human rights or look down at individual's spiritual values.



Perusahaan berkomitmen untuk mengakomodir segala bentuk perbedaan dan menyatukan kemampuan karyawan, individualitas dan nilai pandang yang beragam ke dalam kekuatan kolektif Perusahaan. Perusahaan memberikan penilaian kepada masing-masing individu secara adil, sesuai dengan peran, tugas, dan kinerjanya dalam mengembangkan karirnya sehingga mereka dapat menghadapi serta mengatasi semua bentuk kesulitan secara pro aktif.

Perusahaan bukan hanya terus berupaya untuk menjaga tempat kerja yang aman, bersih, nyaman dan higienis atas dasar kerjasama antara Perusahaan dan karyawannya, namun juga berupaya memberikan keseimbangan yang sehat antara kinerja pekerjaan dan kesejahteraan karyawan.

Jika terjadi diskriminasi atau pelecehan, Perusahaan telah memiliki standar baku yang tepat dan cepat, dengan melakukan tindakan sesuai norma dan perundangan yang berlaku, serta membuat skema preventif agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jika terjadi kasus pelecehan, Perusahaan berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan semua pihak, termasuk korban, terduga pelaku, dan pemberi informasi.

The Company commits to accommodating all forms of differences and unifying the diverse capability, individuality, and perspective of employees as the Company's collective strength. The Company presents fair evaluation to each individual according to their respective role, duty, and performance in developing their careers, so that they can face and manage all difficulties proactively.

Not only the Company continues to maintain a safe, clean, convenient and hygienic workplace based on the partnership between the Company and its employees, but also strives to provide a healthy balance between the work performance and welfare of its employees.

For any discrimination or harassment, the Company has the standard, which is precise and quick, by acting according to the prevailing rules and regulations and preparing preventive scheme so it will never happen again. In the event of harassment, the Company commits to protect the confidentiality of all parties, including the victim, suspected perpetrator, and informant.

Perusahaan juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur atau memaksa karyawan bekerja dengan upah minim yang membahayakan perkembangan fisik, mental, moral karyawan.

Dalam program rekrutmen, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi karyawan. Demikian pula dengan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan promosi atau penghargaan. Perusahaan selalu mengedepankan hasil dan produktifitas yang ditunjukkan karyawan, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang positif juga kepada lingkungan kerja di sekitarnya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan usaha dan jangkauan operasi yang berkembang cepat, Perusahaan menerapkan beberapa strategi pemenuhan SDM yang tepat, akurat dan cepat namun dengan tetap memperhatikan kualitas ataupun kompetensi dasar para kandidat. Strategi Pemenuhan SDM yang diterapkan Perusahaan mencakup 2 (dua) fokus, yaitu :

1. Mempertahankan karyawan yang masuk dalam *talent pool* agar terus menjadi bagian dari organisasi, dan memberi kontribusi penuh sesuai dengan potensi maksimalnya.
2. Menarik minat para talenta baru yang terdapat di dalam industri segmen Perusahaan ataupun talenta baru yang tertarik masuk ke dunia infrastruktur transportasi.

Hubungan Industrial

Dalam rangka menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan dan karyawan, Kebijakan Hubungan Industrial yang sehat dilakukan melalui:

- Penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara berakhirnya hubungan kerja dan sistem pensiun yang baik termasuk pembuatan ketentuan mengenai *exit policy strategy* yang menarik untuk mengoptimalkan dan menata komposisi dan kompetensi karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan.
- Melaksanakan *survey engagement*.
- Hubungan antar karyawan yang baik melalui berbagai media seperti majalah budaya perusahaan.

Kesejahteraan dan Program Peningkatan Kompetensi

Seperti yang telah diuraikan secara rinci dalam bagian Sumber Daya Manusia dalam Analisis dan Pembahasan Manajemen pada laporan tahunan ini, Perusahaan memiliki komitmen yang kuat bagi pemberdayaan karyawan; termasuk diantaranya kesejahteraan dan program peningkatan kompetensi.

The Company also commits not to employ underage workers or force employees to work with minimum wages that endanger their physical, mental and moral development.

In the recruitment program, the Company provides equal opportunities for all people, both men and women, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition, to participate in employee recruitment program. The appointment of candidates is based on the results of selection, evaluation results on probation and employee orientation. Similarly, the Company also gives the same opportunity for employees to get a promotion or award. The Company always prioritizes employees' results and productivity, which in turn will provide positive results to the surrounding working environment.

In order to anticipate the rapid development of business and operational coverage, the Company undertakes several strategies of HR fulfillment that is accurate and fast with due regard to the quality or basic competence of the candidates. The Company's HR Fulfillment Strategy covers two (2) focus, namely:

1. To maintain employees included in the talent pool in order to continuously become part of the organization and give full contributions in accordance with the potential.
2. To attract new talents in the Company's industry segments or new talents who are interested in involving in transport infrastructure sector.

Industrial Relations

In order to create and maintain a harmonious working relationship with its employees, the Company undertakes a healthy industrial relations policy through the following:

- Improved procedures for employment termination and a good pension system including the making of exit policy strategy to optimize and organize employee composition and competence in order to improve the Company's performance.
- Implementing Engagement survey.
- Establishment of a good relationship between employees through various media such as corporate culture magazine.

Welfare and Competency Enhancement Program

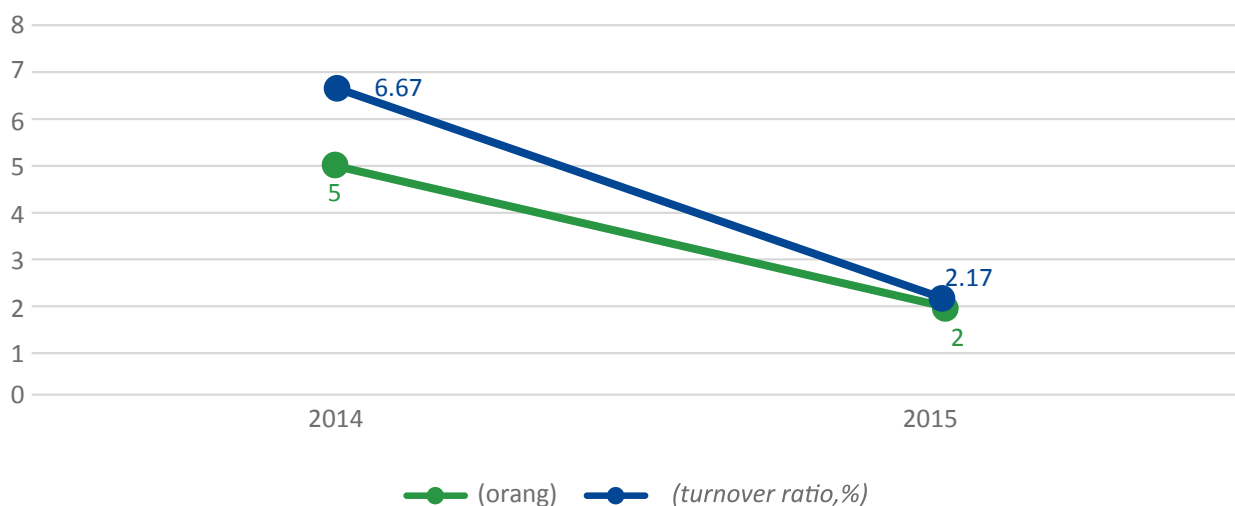
As previously elaborated in the HR section in this Annual Report's Management Discussion and Analysis, the Company has a strong commitment to employee empowerment; including welfare and competency enhancement program.

gaji dan honorarium sebagai hak karyawan atas imbalan kerja diberikan dengan perhitungan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta pertimbangan kelayakan harga di pasar tenaga kerja DKI Jakarta. Tahun 2015 Perusahaan melakukan perbaikan sistem remunerasi tahap II, yang kemudian berimbas pada kenaikan penyerapan anggaran untuk gaji karyawan. Hingga akhir tahun 2015, besaran biaya yang diberikan Perusahaan untuk gaji karyawan mencapai Rp12,39 miliar untuk 92 karyawan, meningkat 38% dari tahun 2014 yang sebesar Rp7,61 miliar untuk 54 karyawan.

Salary and honorarium as the right of employees in respect of their works is granted under a calculation in accordance with the legislation and consideration of price feasibility in the labor market in Jakarta. In 2015, the Company enhanced its remuneration system phase II, which then increased in budget absorption for employee salaries. By the end of 2015, total employee salaries paid by the Company amounted to Rp12.39 billion for 92 employees, a 38% increase from 2014 which amounted to Rp7.61 billion for 54 employees.

Program peningkatan kompetensi juga dilakukan Perusahaan dengan Sistem Manajemen SDM yang Terintegrasi, atau *HR Integrated System*, yang mampu menerapkan secara sistemik terkait penilaian dan kebutuhan pengembangan kompetensi dari setiap individu karyawan. Perusahaan memiliki pelatihan dengan 3 (tiga) jenis pelatihan yang berlandaskan pada peningkatan standar kompetensi. Di samping itu, Perusahaan juga memiliki *MRT Development Program (MDP)* sebagai program pendidikan bekerja sama dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang perkeretaapian serta membentuk rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemampuan bekerja dalam kelompok serta terpimpin. Program *Management Trainee*, atau pelatihan manajerial juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan pilihan untuk dapat memahami organisasi Perusahaan dalam perspektif makro.

The Company also carries out competency enhancement program under HR Integrated System, which was able to apply systemically the assessment and competency development needed for each employee. The Company sets 3 types of trainings based on the competency improvement standards. In addition, the Company also has MRT Development Program (MDP) as an educational program in collaboration with the Academy of Indonesian Railways (IRA) Madiun, which aims to provide basic knowledge of railways and to establish a sense of responsibility, discipline and ability to work in groups and guided. Management Trainee Program is also undertaken to provide the opportunity for the selected employees to understand the Company's organization in a macro perspective.



KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kesehatan

Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan Perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing. Fasilitas kesehatan yang diselenggarakan Perusahaan adalah:

1. Fasilitas kesehatan berkala meliputi fasilitas *medical check up*.
2. Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kaca mata, alat bantu dengar, pemeriksaan lab dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap.

Selain itu Perusahaan juga menyediakan fasilitas poliklinik dan tenaga dokter guna memberikan pelayanan jasa medis atau kedokteran kepada karyawan dan keluarganya.

Di samping fasilitas di atas, Perusahaan mengikutsertakan karyawan dan keluarganya dengan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan proteksi dan biaya pertanggungans asuransi saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau perawatan di rumah sakit termasuk jaminan bagi karyawati dan istri karyawan yang menjalani persalinan.

	2014	2015
Jumlah Klaim yang Disetujui (Rp) <i>Total claims approved (Rp)</i>	295.011.562	641.007.162
Jumlah Klaim <i>Total Claims</i>	355	509
Jumlah Karyawan yang Klaim (orang) <i>Total employees claiming (persons)</i>	89	114
Persentase Kenaikan <i>Increase in %</i>		53%

Kepada para kontraktor, Perusahaan memiliki kebijakan untuk mewajibkan setiap kontraktor mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau yang sekarang telah dialihkan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Program dari pemerintah pusat ini memberikan asuransi keselamatan kerja mencakup jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Health

The health of employees is one of the key to achieving the performance of individual employees and the Company as a whole. The Company facilitates employees with several activities that are expected to generate awareness and motivation in maintaining their health. Health facilities provided by the Company are as follows:

1. Periodic health facilities include medical check-up facility.
2. Medication facility, which is the reimbursement of the cost for inpatient care in hospitals, outpatient care after discharge from the hospital, maternity cost, dental care cost, replacement of prescription glasses, hearing aids, laboratory tests and other medical treatment recommended by the doctor post hospitalization.

In addition, the Company also provides clinic and doctors to provide medical services to employees and their families.

In addition to the above facilities, the Company registers the employees and their families in health insurance held by BPJS Kesehatan which is gradually implemented. This facility aims to provide protection and insurance coverage while undergoing medical examination or treatment in hospital including the insurance for female employees and employees' wives giving birth.

With regard to contractors, the Company has a policy to require all contractors to register their workers in "Jamsostek" Social Security Program for Workers which is now transferred into BPJS Ketenagakerjaan. This central government's program provides occupational safety insurance covering occupational safety insurance and life insurance.

Tanggung Jawab Sosial Atas Ketenagakerjaan, Kesehatan dan keselamatan Kerja
Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety

Jumlah Pekerja Proyek Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Total Project Employees registered in BPJS Ketenagakerjaan

Paket Package	Proyek Project	Kontraktor Contractor	Jumlah Pekerja Total Employees
CP 101	Konstruksi Layang Lebak Bulus - Fatmawati Layang Lebak Bulus – Fatmawati Escalated Construction	Tokyu-Wika JO	875
CP 102	Konstruksi Layang Fatmawati - Cipete Raya Fatmawati-Cipete Raya Escalated Construction		875
CP 103	Konstruksi Layang Cipete Raya - Sisingamangaraja Cipete Raya-Sisingamangaraja Escalated Construction	Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV	1.000
CP 104	Konstruksi Bawah Tanah Sisingamangaraja - Senayan Sisingamangaraja-Senayan Underground Construction	Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JO	1.000
CP 105	Konstruksi Bawah Tanah Senayan - Dukuh Atas Senayan-Dukuh Atas Underground Construction		
CP 106	Konstruksi Bawah Tanah Dukuh Atas - Bundaran Hotel Indonesia Dukuh Atas-Bundaran Hotel Indonesia Underground Construction	Sumitomo Mitsui-Hutama Karya JO	514
Jumlah Total			4.264

* Program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja proyek didaftarkan oleh masing-masing kontraktor.

*BPJS Ketenagakerjaan registration of the project workers is organized by the respective contractor.

Keselamatan Kerja

Salah satu risiko dalam proyek pembangunan infrastruktur adalah kecelakaan kerja. Perusahaan menekankan pentingnya pengelolaan Keselamatan Kerja kepada seluruh kontraktor yang melakukan pekerjaan proyek pembangunan MRT Jakarta; tidak terkecuali kepada tamu yang kebetulan melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kemajuan proyek. Penggunaan sarana alat keamanan dan keselamatan kerja seperti helm, *safety booth* dan sarung tangan maupun pakaian pelindung kerja diwajibkan tanpa pengecualian.

Perusahaan juga mewajibkan seluruh kontraktor untuk terus meningkatkan kesadaran para pekerja proyek akan pentingnya keselamatan kerja. Faktor pengetahuan umum dan pengetahuan teknis akan beroperasinya alat-alat di lapangan harus disosialisasikan kepada seluruh proyek. Hal ini penting, agar setiap pekerja memahami proses beroperasinya alat saat bekerja, dan dapat menghindari risiko kecelakaan secara lebih dini. Selain itu, Perusahaan mewajibkan untuk peralatan yang modern dari kontraktor harus diikuti dengan standarisasi internasional terkait pengetahuan tentang keselamatan kerja dan pencegahannya bagi seluruh pekerja.

Occupational Safety

One of the risks in infrastructure development projects is accidents. The Company emphasizes the importance of Occupational Safety management to all contractors handling MRT Jakarta construction project site with no exception to the guests visiting to inspect project site. The use of means of security and safety as helmets, safety booth and gloves and protective clothing are required with no exception.

The Company also requires all contractors to continue to raise their workers' awareness of the importance of occupational safety. The general knowledge and technical know-how in operating equipment on site should be disseminated to the entire project. It is important that every employee understands the process of tool operation to avoid the risk of accidents at an earlier stage. In addition, the Company requires the Contractors to complete their modern equipment with relevant international standardization of knowledge about occupational safety and prevention for all workers.

Angka Kecelakaan Kerja Tahun 2014 dan 2015

Occupational Injury Rate 2014-2015

Type of Incident/Accident	2014				2015			
	CP 101 & 102	CP 103	CP 104 & 105	CP 106	CP 101 & 102	CP 103	CP 104 & 105	CP 106
Lost Time Injuries								
Fatality	0	0	0	0	0	0	0	0
Lost Work Day Case(s)	0	1	0	1	4	2	1	1
Restricted Work Day Case(s)	0	0	0	0	0	0	0	0

Type of Incident/Accident	2014				2015			
	CP 101 & 102	CP 103	CP 104 & 105	CP 106	CP 101 & 102	CP 103	CP 104 & 105	CP 106
Medical treatment Case	0	1	2	0	0	1	1	0
Sub Total	0	2	2	1	4	3	2	1
Non-Lost Time Injuries								
First Aid Case	0	0	1	0	1	0	0	0
Near Misses Incident	0	0	0	0	1	5	2	0
Fire Incident	0	0	0	0	0	0	0	0
Spillage	0	0	0	0	1	1	0	0
Hazard Identification Report	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	1	0	3	6	2	0
Non-Injurious Accident								
Motor Vehicle Crashes	0	0	0	4	0	0	0	1
Equipment Incident (EI)	0	0	0	0	0	0	1	0
Property Damage	1	3	15	0	1	1	1	0
Sub Total	1	3	15	4	1	1	2	1
Total	1	5	18	5	8	10	6	2

Pada area kantor pusat dimana Perusahaan dan seluruh karyawan melakukan aktivitas, Perusahaan telah melengkapi seluruh kantor operasional (kantor pusat dan kantor proyek) dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti: Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), *Smoke Detector*, *Diesel Pump*, tangga darurat, dan alat penunjang keselamatan kerja lainnya. Fasilitas keselamatan dalam gedung dimana Perusahaan berkantor telah sesuai dengan standar alat keselamatan kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Inspeksi keselamatan kebakaran dilakukan secara periodik terhadap alat-alat kebakaran sebagaimana tersebut di atas. Perusahaan juga telah memiliki rencana situasi kebakaran, peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran berada di ruang karyawan dan setiap lantai gedung sehingga seluruh karyawan teredukasi dengan baik. Simulasi serupa juga dilakukan di area proyek dengan standar prosedur masing-masing, sesuai dengan karakter situasi dan kondisi di lapangan.

In the Head Office area where the Company and all employees carry out their activities, the Company has completed all operational offices (both headquarter and project offices) with a variety of safety devices such as Lightweight Fire extinguisher (APAR), *Smoke Detector*, *Diesel Pump*, emergency stairs and other supporting safety equipment. Safety facilities in the Company's head office building are already in accordance with the standards of fire safety equipment based on the Minister of Public Works Regulation No. 20/PRT/M/2009 on the Technical Management Guidelines for Fire Protection in Urban Areas, The Minister of Public Works Regulation No. 29/PRT/M/2006 on Guidelines for Technical Requirements of Building Structure.

Fire safety inspection is conducted periodically on the fire equipment described above. The Company also has in place a plan for fire situation, fire safety operational procedures are displayed in the employee rooms and every floor of the building so that all employees are well educated. Similar simulation is also conducted in the project area with standard procedures according to the field situations and conditions.

PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT



Pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Perusahaan belum mengarah kepada aspek ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi operasional. Selain bahwa proyek MRT Jakarta masih dalam tahap pembangunan, pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan seiring dengan tahapan pengoperasian dan komersialisasi dari MRT Jakarta.

Pada tahap konstruksi, pengembangan sosial kemasyarakatan difokuskan pada aspek pendidikan dan berbagi pengetahuan. Kegiatan ini dilakukan melalui *site visit*, atau kunjungan lapangan yang diberikan Perusahaan kepada kalangan umum, khususnya kepada regulator, konsultan dan *civitas akademika* yang memiliki hasrat terhadap proyek transportasi kota, pembangunan konstruksi skala besar, serta pengetahuan tentang tata ruang dan tata kota khususnya DKI Jakarta. Di tahun 2015, Perusahaan memberikan 34 kali kunjungan lapangan kepada beragam Pemangku Kepentingan; mulai dari DPRD DKI Jakarta, BAPPENAS, delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa-Bali, konsultan di bidang kontraktor dan prasarana publik, hingga mahasiswa yang memiliki program studi searah dengan proyek MRT Jakarta.

Kunjungan lapangan saat pembangunan proyek diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif tentang MRT Jakarta, baik dalam pendekatan studi, pembangunan tata kota, maupun pembentukan perilaku masyarakat akan penggunaan layanan publik khususnya saat MRT Jakarta mulai beroperasi.

The Company's social community development is not yet directed to the economic aspect and living standard and welfare of the communities surrounding the Company's operational area. In addition to the fact that MRT Jakarta project is still in construction phase, the economic development and community prosperity will go hand in hand with the operation and commercialization stages of MRT Jakarta.

At this construction phase, community social development is focused on the aspects of education and knowledge sharing. This activity is conducted through site visits provided by the Company to the public, especially to regulators, consultants and academicians who have a passion for urban transport project, the construction of large-scale construction, as well as knowledge about the spatial and cities, especially DKI Jakarta. In 2015, the Company held 34 site visits to various Stakeholders; ranging from the City Council (DPRD DKI Jakarta), National Development Planning Agency (BAPPENAS), the delegation of the Java-Bali Development Planning Assembly, contractors and consultants in the field of public infrastructure, and students in the study programs related to the MRT Jakarta project.

The site visits during the project construction is expected to provide a comprehensive perspective on MRT Jakarta, both in the study approach, urban development planning, as well as the establishment of people's behavior in the use of public services, especially when the MRT Jakarta commences its operations.

KOMITMEN ATAS PRODUK, LAYANAN DAN PELANGGAN

Commitment to Product, Service and Customers



Perusahaan memandang warga kota Jakarta, khususnya pengguna jalur koridor dimana proyek MRT Jakarta berjalan, sebagai salah satu Pemangku Kepentingan yang dapat diasosiasikan sebagai konsumen infrastruktur transportasi kota. Salah satu permasalahan dalam perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta adalah melakukan inovasi pengerjaan proyek di tengah jantung lalu-lintas Jakarta yang padat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek, Perusahaan memperhitungkan infrastruktur pipa dan kabel bawah tanah perkotaan yang telah ada selama ini. Di samping itu, Perusahaan menempatkan hak pengguna lalu-lintas jalur dimana proyek berjalan—baik pengguna jalan raya maupun pejalan kaki di trotoar—dapat terus terpenuhi dengan tetap memperhitungkan kemajuan proyek.

Salah satu inisiasi yang dilakukan Perusahaan adalah mempersiapkan (prakonstruksi) meliputi pekerjaan *soil investigation* dan *test pit (utility investigation)* yang telah dikerjakan sejak tahun 2014 dan terus dilakukan seiring dengan perkembangan tahapan proyek pembangunan. *Test pit* adalah aktifitas pekerjaan untuk mengidentifikasi saluran/*ducting* utilitas

The Company considers Jakarta residents, particularly those using the corridor lanes where MRT Jakarta project is carried out, as one of the Stakeholders that can be associated as consumers of the city transport infrastructure. One of the problems in MRT Jakarta project construction is how to make innovation in doing a project in the heart of Jakarta's traffic density. As the party responsible for the project development, the Company takes into account of pipelines and cables infrastructure that have been existed in the city's underground. In addition, the Company prioritizes to fulfill the rights of users of the traffic lanes – both traffic users and pedestrians - where the project is carried out with due regard to the project progress.

One of the Company's initiatives is by conducting pre-construction preparations includes Soil Investigation and Test Pit (Utility Investigation) that have been conducted since 2014 and continue to be done in line with the project development phase. Test Pit is an activity to identify pipes or wires ducting located under the ground along the the project. This activity is

pipa atau kabel yang berada di bawah tanah sepanjang bentangan proyek. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan yang berarti ketika proses pembangunan pondasi bangunan dan *viaduct* (jembatan penyangga) jalur MRT. Relokasi atas infrastruktur pipa dan kabel diserahkan kepada masing-masing pemilik utilitas tersebut. Relokasi terhadap fasilitas umum juga dilakukan Perusahaan untuk tetap mengedepankan hak warga kota Jakarta, seperti relokasi utilitas berupa halte angkutan umum di Sisingamangaraja.

Inisiasi lain ditempuh Perusahaan melalui kerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Dinas Perhubungan & Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang koridor dimana pembangunan proyek MRT Jakarta berjalan. Inovasi ini dilakukan mengingat pembangunan proyek di beberapa titik menambah kemacetan lalu-lintas. Perusahaan juga terus melakukan berbagai bentuk kampanye kepada publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya infrastruktur MRT Jakarta untuk menopang arus lalu-lintas di ibukota. Beroperasinya MRT Jakarta akan memberikan solusi tambahan bagi masalah kemacetan Jakarta di masa mendatang.

Keselamatan pengguna jalan di sepanjang koridor pembangunan proyek MRT Jakarta juga menjadi perhatian. Berbagai rambu keselamatan dan pagar pembatas dibangun untuk memberikan penanda kepada pengguna jalan. Hal ini menjadi penting mengingat jalur lalu-lintas pada koridor pembangunan proyek MRT Jakarta merupakan salah satu jalur terpadat.

Ke depan, Perusahaan berencana untuk membangun model kawasan yang ramah terhadap pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda. Selain menciptakan lingkungan yang sehat, model kawasan semacam ini akan menarik minat warga kota Jakarta untuk meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke moda transportasi MRT Jakarta dan/atau moda transportasi kota lainnya yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mendapatkan masukan, evaluasi maupun keluhan, Perusahaan membuka jalur komunikasi kepada masyarakat luas melalui akses situs web resmi www.jakartamrt.com pada halaman kontak/*feedback* serta beberapa media sosial yang dimiliki Perusahaan. Selain itu, publik dapat membuka komunikasi kepada Perusahaan melalui:

important to ensure that there is no significant interference when during the construction of building foundations and viaduct (bridge buffer) of MRT lanes. Relocation of the pipes and wires infrastructure is handed over to the respective owners. Relocation of public facilities is also carried out by the Company to keep promoting the rights of the citizens, such as the relocation of public transportation stops in Sisingamangaraja.

Another initiative is taken by the Company in cooperation with the Regional Police (Polda) Metro Jaya and Jakarta's Traffic and Roadway Department (DLLAJR) to perform traffic management along corridors where the construction of MRT Jakarta project is running. This innovation is undertaken considering the project construction works at some points contributed to traffic congestion. The Company also continues to conduct various forms of public campaigns to raise awareness of the importance of MRT Jakarta infrastructure to sustain the traffic flow in the capital city. The operation of MRT Jakarta will provide an additional solution to the Jakarta's traffic congestion problem in the future.

The safety of road users along the corridors of MRT Jakarta project development is also the Company's concern. Various safety signs and guardrail are constructed to provide markers to road users. This is important considering the traffic lane along the corridors of MRT Jakarta project is one of the densest lanes.

In the future, the Company plans to build a model of pedestrian and bicycle users- friendly area. In addition to creating a healthy environment, this model will attract the citizens of Jakarta to minimize the use of motor vehicles and switch to MRT Jakarta and/or other modes of transport provided DKI Jakarta Provincial Government.

To get feedback, evaluation and complaint, the Company opens lines of communication for public through the official web site access www.jakartamrt.com on the contact/*feedback* page and also some of the social media that they have. In addition, public may communicate with the Company through the following address:



PT MRT Jakarta

Wisma Nusantara, Lantai 21
Jl. M.H. Thamrin No. 59
Jakarta 10350 - Indonesia
Telp: (62) 21 3906454
Faks: (62) 21 3142273 / 3155846

Email: info@jakartamrt.com
Twitter: @mrtjakarta
Instagram: @mrtjkt
Facebook: www.facebook.com/jakartamrt

We are **on the right track**



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2015 PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mass Rapid Transit Jakarta tahun 2015 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2016



Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Utama
President Commissioner



Sarwo Handhayani
Komisaris
Commissioner



Hermanto Dwiatmoko
Komisaris
Commissioner



Rukijo
Komisaris
Commissioner

STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT 2015 OF PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA

We, the undersigned, state that all information in the Annual Report of PT Mass Rapid Transit Jakarta for the year 2015 are presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the annual report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, March 2016




Dono Boestami
Direktur Utama
President Director



M. Naszir
Direktur Konstruksi
Director of Construction



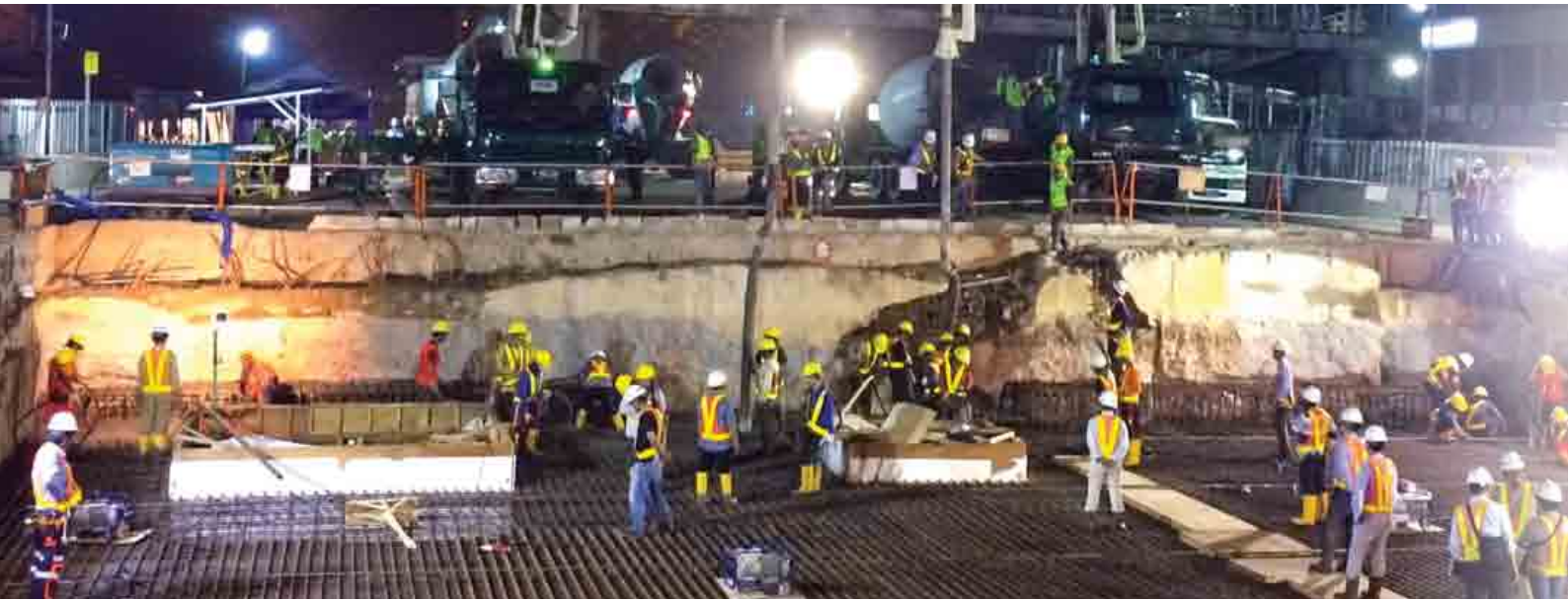
Tuhiyat
Direktur Keuangan dan Administrasi
Director of Finance and Administration



Alberth Tarra
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Director of Operation and Maintenance



We are **on the right track**





LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

PT Mass Rapid Transit Jakarta

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2015 and for the year then ended with independent auditors' report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2015
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER
31, 2015 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Dono Boestami |
| Alamat Kantor/Office address | : | Gedung Wisma Nusantara Lantai 21
Jl. MH. Thamrin No.59
Jakarta Pusat |
| Alamat domisili sesuai KTP
/Domicile as stated on ID Card | : | Jl. Kebun Angrek No.16 Unit 7
RT.001 RW.005 Cipete Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan |
| Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position | : | 021-7512803
Direktur Utama |
| 2. Nama/Name | : | Tuhiyat |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Gedung Wisma Nusantara Lantai 21,
Jl. MH. Thamrin No.59
Jakarta Pusat |
| Alamat domisili sesuai KTP
/Domicile as stated on ID Card | : | Jl. Emerald 6 Blok L No.02, Bintaro Jaya
RT.002 RW.010 Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan |
| Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position | : | 0811-8602-220
Direktur Keuangan dan Administrasi |

We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Dono Boestami |
| Alamat Kantor/Office address | : | Gedung Wisma Nusantara Lantai 21
Jl. MH. Thamrin No.59
Jakarta Pusat |
| Alamat domisili sesuai KTP
/Domicile as stated on ID Card | : | Jl. Kebun Angrek No.16 Unit 7
RT.001 RW.005 Cipete Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan |
| Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position | : | 021-7512803
Direktur Utama |
| 2. Nama/Name | : | Tuhiyat |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Gedung Wisma Nusantara Lantai 21,
Jl. MH. Thamrin No.59
Jakarta Pusat |
| Alamat domisili sesuai KTP
/Domicile as stated on ID Card | : | Jl. Emerald 6 Blok L No.02, Bintaro Jaya
RT.002 RW.010 Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan |
| Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position | : | 0811-8602-220
Direktur Keuangan dan Administrasi |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Financial statements as of December 31, 2015 and for the year then ended;*
2. *The financial statements of the Company has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*
- b. *The financial statements of the Company do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. We are responsible for the Company's internal control system,

The above statement is made truthfully.

Jakarta, 15 Maret 2016/March 15, 2016


Dono Boestami
Direktur Utama/President Director




Tuhiyat
Direktur Keuangan dan Administrasi/
Finance and Administration Director

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	3	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-48	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-428/PSS/2016

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Mass Rapid Transit Jakarta**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-428/PSS/2016

***The Stockholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Mass Rapid Transit Jakarta***

We have audited the accompanying financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2015, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-428/PSS/2016 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-428/PSS/2016 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mass Rapid Transit Jakarta as of December 31, 2015, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-428/PSS/2016 (lanjutan)

Report No. RPC-428/PSS/2016 (continued)

Penekanan suatu hal

Emphasis of matter

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

As disclosed in Note 4 to the accompanying financial statements, the Company restated the financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended, and the statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 as required by Indonesian Financial Accounting Standards. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Purwanto, Sungkoro & Surja



E. Batara Manurung, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0693/*Public Accountant Registration No. AP.0693*

15 Maret 2016/*March 15, 2016*

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam rupiah)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2015
(Expressed in rupiah)

		(Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4)			
	Catatan/ Notes	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c,2j,5,17	391.759.198.534	295.488.289.978	214.807.982.785	Cash and cash equivalents
Piutang bunga	2j,6,17	204.684.922	323.282.610	391.975.796	Interest receivable
Biaya dibayar dimuka dan uang muka - neto	7	3.325.520.298	3.824.803.384	4.083.345.522	Prepaid expenses and advances - net
Piutang lain-lain - neto	2j,17	18.123.660	5.973.728	-	Other receivables - net
Total Aset Lancar		395.307.527.414	299.642.349.700	219.283.304.103	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Biaya tangguhan - neto	2h	-	15.697.673	90.697.673	Deferred charges - net
Uang muka kontraktor	16i, 16j, 16k, 16l, 16m, 16n, 2d, 2k, 8, 16j, 16k	1.433.695.084.011	1.121.648.008.923	1.123.790.635.484	Contractors' advances
Aset tetap - neto	16l, 16m, 16n	2.333.821.661.851	847.609.134.353	181.076.644.088	Property and equipment - net
Uang jaminan	2j,17	1.176.314.927	1.156.314.926	808.433.126	Guarantee deposits
Total Aset Tidak Lancar		3.768.693.060.789	1.970.429.155.875	1.305.766.410.371	Total Non-current Assets
TOTAL ASET		4.164.000.588.203	2.270.071.505.575	1.525.049.714.474	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga	2j,9,16j, 16k, 16l, 17	3.984.494.466	679.018.310	51.421.786.617	Payables to contractors and consultants - third parties
Biaya yang masih harus dibayar	2j,10,17	196.950.890.106	420.332.022.040	80.295.141.568	Accrued expenses
Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek		140.706.531	42.807.037	21.568.956	Short-term employee benefits liability
Utang pajak	2g,11a	667.044.258	712.306.461	260.837.944	Taxes payable
Total Liabilitas Jangka Pendek		201.743.135.361	421.766.153.848	131.999.335.085	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang retensi	2j,16l,17	194.100.964.647	36.559.775.563	13.170.001.231	Retentions payable
Liabilitas imbalan karyawan	2f,15	7.895.596.418	4.495.333.417	2.631.945.628	Liability for employee benefits
Total Liabilitas Jangka Panjang		201.996.561.065	41.055.108.980	15.801.946.859	Total Non-current Liabilities
Total Liabilitas		403.739.696.426	462.821.262.828	147.801.281.944	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham					Share capital - par value of Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 5.500.000 saham pada tahun 2015 dan 2014 serta 920.000 saham pada tahun 2013					Authorized - 5,500,000 shares in 2015 and 2014 and 920,000 shares in 2013
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.943.785 saham pada tahun 2015, 1.481.659 saham pada tahun 2014 dan 230.258 saham pada tahun 2013	12,16h	1.943.785.000.000	1.481.659.000.000	230.258.000.000	Issued and fully paid - 1,943,785 shares in 2015, 1,481,659 shares in 2014 and 230,258 shares in 2013
Modal disetor lainnya	12,16c,16i, 16j, 16k, 16l, 16m, 16n	2.015.224.949.914	462.143.937.182	1.251.401.795.995	Other paid-up capital
Defisit		(199.874.822.947)	(137.117.235.573)	(105.362.973.725)	Deficit
Penghasilan komprehensif lain	2f,15	1.125.764.810	564.541.138	951.610.260	Other comprehensive income
Ekuitas Neto		3.760.260.891.777	1.807.250.242.747	1.377.248.432.530	Net Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		4.164.000.588.203	2.270.071.505.575	1.525.049.714.474	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam rupiah)

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended December 31, 2015
(Expressed in rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/Year ended December 31,

	2015	Catatan/ Notes	2014 (Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4)	
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	(63.667.033.988)	2e,13	(55.720.785.610)	General and administrative expenses
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSE)
Penghasilan bunga	18.829.277.974	14	16.586.174.390	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(17.878.063.949)		7.417.055.867	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	(41.767.411)		(36.706.495)	Others - net
Penghasilan lain-lain - neto	909.446.614		23.966.523.762	Other income - net
RUGI TAHUN BERJALAN	(62.757.587.374)		(31.754.261.848)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	561.223.672	2f,15	(387.069.122)	Actuarial gain (loss) on long-term employee benefits liability
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	561.223.672		(387.069.122)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(62.196.363.702)		(32.141.330.970)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2015
(Expressed in rupiah)**

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Modal disetor lainnya/ Other paid-up capital	Defisit/ Deficit	Penghasilan komprehensif lainnya/ Other comprehensive income	Ekuitas neto/ Net equity	
Saldo tanggal 1 Januari 2014, setelah penyajian kembali		230.258.000.000	1.251.401.795.995	(105.362.973.725)	951.610.260	1.377.248.432.530	Balance, January 1, 2014, as restated
12,16c,16i,16j 16k							
Modal disetor lainnya	16i,16m,16n	-	462.143.141.187	-	-	462.143.141.187	Other paid-up capital
Reklasifikasi atas modal disetor lainnya	12	1.251.401.000.000	(1.251.401.000.000)	-	-	-	Reclassification of other paid-up capital
Rugi tahun berjalan		-	-	(31.754.261.848)	-	(31.754.261.848)	Loss for the year
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	16	-	-	-	(387.069.122)	(387.069.122)	Remeasurement of employee benefits obligations
Saldo tanggal 31 Desember 2014, setelah penyajian kembali		1.481.659.000.000	462.143.937.182	(137.117.235.573)	564.541.138	1.807.250.242.747	Balance, December 31, 2014, as restated
12,16c,16i,16j 16k							
Modal disetor lainnya	16i,16m,16n	-	2.015.207.012.732	-	-	2.015.207.012.732	Other paid-up capital
Reklasifikasi atas modal disetor lainnya	12	462.126.000.000	(462.126.000.000)	-	-	-	Reclassification of other paid-up capital
Rugi tahun berjalan		-	-	(62.757.587.374)	-	(62.757.587.374)	Loss for the year
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	15	-	-	-	561.223.672	561.223.672	Remeasurement of employee benefits obligations
Saldo tanggal 31 Desember 2015		1.943.785.000.000	2.015.224.949.914	(199.874.822.947)	1.125.764.810	3.760.260.891.777	Balance, December 31, 2015

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2015
 (Disajikan dalam rupiah)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF CASH FLOWS
 For the year ended December 31, 2015
 (Expressed in rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,			
	2015	Catatan/ Notes	2014	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	18.947.875.662		16.654.867.576	Cash receipts from interest income
Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan	(38.103.921.879)		(31.069.911.232)	Payments to commissioners, directors and employees
Pembayaran kepada vendor dan pemasok	(19.317.431.584)		(24.725.308.702)	Payment to vendors and suppliers
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(38.473.477.801)		(39.140.352.358)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITY
Perolehan aset tetap	(10.255.613.643)	8	(5.179.340.449)	Acquisitions of property and equipment
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY
Modal disetor lainnya	145.000.000.000	12	125.000.000.000	Paid-up capital contribution
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	96.270.908.556		80.680.307.193	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	295.488.289.978	5	214.807.982.785	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	391.759.198.534	5	295.488.289.978	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Pengungkapan informasi tambahan arus kas disajikan pada Catatan 21.

Supplemental disclosure of cash flow information is presented in Note 21.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perusahaan") adalah Badan Usaha Milik Daerah didirikan di Republik Indonesia berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn No. 140 tanggal 17 Juni 2008 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 ("Perda No. 3"). Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008.

Anggaran Dasar ("AD") Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 19 Agustus 2015 sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan. Perubahan terakhir termuat dalam akta notaris Miki Tanumiharja, S.H., No. 1 tanggal 19 Agustus 2015 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0961272 Tahun 2015 tanggal 1 September 2015.

Berdasarkan pasal 3 dari AD Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan mencakup:

- a. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana.
- b. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana.
- c. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.

Berdasarkan Perda No. 3, Perusahaan didirikan untuk membangun dan mengoperasikan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta yang didanai oleh pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) (Catatan 16a).

Sampai dengan tanggal 15 Maret 2016, belum terdapat perjanjian konsesi jasa antara Perusahaan dengan pemberi hak.

Perusahaan berlokasi di Wisma Nusantara, lantai 21, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. Sampai dengan tanggal 15 Maret 2016, Perusahaan masih dalam tahap pengembangan.

1. GENERAL

PT Mass Rapid Transit Jakarta (the "Company") is a regional-owned company established in the Republic of Indonesia by virtue of notarial deed No. 140 dated June 17, 2008 of Sutjipto, S.H., M.Kn and Local Government Regulation No. 3 Year 2008 dated June 17, 2008 ("Perda No. 3"). Its establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-36355.AH.01.01 Year 2008 dated June 27, 2008.

The Company's Articles of Association ("AoA") has been amended several times, the latest of which was made on August 19, 2015, in relation to the changes in the Company's Boards of Commissioners. The latest amendment was notarized under deed No. 1 dated August 19, 2015 of Miki Tanumiharja, S.H. and had been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0961272 Year 2015 dated September 1, 2015.

Based on article 3 of its AoA, the Company's scope of activities covers the following:

- a. *Infrastructure management for public train in an urban area that includes infrastructure development, operation of infrastructure, infrastructure maintenance and management of the infrastructure.*
- b. *Facilities management for public train in an urban area that includes facility development, operation of facilities, maintenance and management of the facilities.*
- c. *Development and management of property or business on the station area and areas around the station.*

Based on Perda No. 3, the Company was established to build and operate the Mass Rapid Transit Jakarta Project which is funded by the loan between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan through the Japan International Cooperation Agency (JICA) (Note 16a).

As of March 15, 2016, there is no available service concession agreement between the Company and the grantor.

The Company is located in Wisma Nusantara, 21st floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. As of March 15, 2016, the Company is still under the development stage.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan mempunyai 92 karyawan tetap (2014: 58 karyawan tetap).

Berdasarkan akta notaris Miki Tanumiharja, S.H., No. 1 tanggal 19 Agustus 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Erry Riyana Hardjapamekas
Sarwo Handayani
Hermanto Dwiatmoko
Rukijo

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioners

Direksi
Direktur Utama
Direksi

Dono Boestami
Mohamad Naszir
Albert Tarra
Tuhiyat

Board of Directors
President Director
Directors

Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp11.271.757.971 (2014: Rp9.901.403.896).

The Company had a total of 92 permanent employees as of December 31, 2015 (2014: 58 permanent employees).

Based on the notarial deed No. 1 dated August 19, 2015 of Miki Tanumiharja, S.H., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2015 was as follows:

The compensation and other benefits of the Company's Boards of Commissioners and Directors for the year ended December 31, 2015 amounted to Rp11,271,757,971 (2014: Rp9,901,403,896).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk instrumen keuangan yang dinyatakan dengan nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK").

The financial statements are prepared in accordance with PSAK 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements are prepared using the historical cost basis of accounting, except for financial instruments which are stated at fair value.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang fungsional yang digunakan Perusahaan adalah rupiah, yang juga merupakan mata uang penyajian dalam laporan keuangan.

b. Transaksi dalam mata uang asing

Perusahaan melakukan pencatatan akuntansi dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang selain rupiah dicatat dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan tahun tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
1 Dolar Amerika Serikat	13.795	12.440
100 Yen Jepang	11.452	10.425

c. Setara kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

The statement of cash flows presents the receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The functional currency of the Company is rupiah, which is also the presentation currency used in the financial statements.

b. Foreign currency transactions and balances

The Company maintains its accounting records in rupiah. Transactions in currencies other than rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to rupiah based on the middle rates published by Bank Indonesia at the last banking transaction date for the year. The resulting gains or losses are credited or charged to current year operations.

The rates of exchange used were as follows:

c. Cash equivalents

Time deposits with maturities of three months or less at the time of placement and not pledged as collateral are considered as "Cash Equivalents".

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset tetap

Perusahaan telah menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap".

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan atas setiap aset tetap dimulai ketika aset tetap siap untuk digunakan sesuai peruntukannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/Year
Kendaraan	4
Peralatan dan perabotan kantor	4-8

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak terdapat manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan atas aset tetap ditelaah, dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Property and equipment

The Company has applied PSAK 16 (Revised 2011), "Fixed Assets".

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as they are incurred.

Depreciation of each item of property and equipment starts when it is available for its intended use and is calculated on the straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Year
Vehicles	4
Furniture, fixtures and office equipment	4-8

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of property and equipment are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan mesin dan peralatan dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan tersebut selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam tahun tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

e. Pengakuan pendapatan dan biaya

Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan masih dalam tahap konstruksi. Beban diakui pada saat terjadinya, kecuali biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan konstruksi proyek MRT Jakarta dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

f. Imbalan karyawan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menggantikan PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Beban pensiun Perusahaan, ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Property and equipment (continued)

The accumulated costs of the construction of buildings and machinery and equipment and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to the appropriate property and equipment accounts when the related construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets become ready for their intended use.

The Company has applied PSAK 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the year, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

e. Revenue and expense recognition

As of the financial position date, the Company is still in the construction stage. Expenses are recognized when incurred, except for the costs incurred in connection with the construction of MRT Jakarta's project which are capitalized as construction in progress.

f. Employee benefits

Effective January 1, 2015, the Company applied PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", which superseded PSAK 24 (Revised 2010), "Employee Benefits". The Company's pension costs are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Imbalan karyawan (lanjutan)

PSAK 24 (Revisi 2013), antara lain, menghapuskan "pendekatan koridor" yang diperbolehkan dalam versi sebelumnya dan memberikan perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja.

Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan. Perusahaan menggunakan kebijakan yang baru untuk mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial, yaitu langsung seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 disajikan kembali (Catatan 4).

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan di saldo laba.

Perusahaan mengakui kewajiban tanpa pendanaan atas imbalan karyawan terkait dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.

g. Perpajakan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang mensyaratkan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Employee benefits (continued)

PSAK 24 (Revised 2013), among others, eliminate the "corridor approach" permitted under the previous version and significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits.

The adoption of PSAK 24 (Revised 2013) has a significant impact on the financial statements. The Company applied the revised policy for recognizing actuarial gains or losses, which are directly recognized in other comprehensive income. Therefore, the financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended and the statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 were restated (Note 4).

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income. Accumulated actuarial gains and losses are reported in retained earnings.

The Company recognizes its unfunded liability for employee benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

g. Taxation

Effective dated January 1, 2015, the Group has adopted PSAK 46 (Revised 2014), "Income Tax", which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position, and transactions and other events of the current year that are recognized in the financial statements. This PSAK also prescribes an entity to present the underpayment of income tax, as part of "Tax Expense - Current" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presents interest/penalty on tax, if any, as part of "Tax Expense - Current".

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada tahun saat nilai aset direalisasikan atau nilai liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal laporan posisi keuangan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

h. Biaya tangguhan

Biaya yang dikeluarkan dalam jumlah signifikan yang diperkirakan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

i. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Taxation (continued)

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carryover of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable. The tax effects for the year are allocated to current operations, except for the tax effects from transactions which are directly charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

h. Deferred charges

Significant expenditures incurred which are considered to have a benefit of more than one year, are deferred and amortized applying the straight-line method over the period expected to benefit from such expenditures.

i. Transactions with related parties

The Company has applied PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures", that requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the financial statements. The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait.

j. Instrumen keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang bunga, piutang lain-lain - neto dan uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2015.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Transactions with related parties (continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

j. Financial instruments

The Company has adopted PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures".

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each reporting date.

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

The Company's financial assets include cash and cash equivalents, interest receivable, other receivables - net and guarantee deposits as of December 31, 2015.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Perusahaan telah menentukan bahwa semua aset keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau derivatif yang ditetapkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Initial recognition (continued)

The Company has determined that all of these financial assets are categorized as loans and receivables. As of December 31, 2015, the Company did not have any financial assets at fair value through profit or loss, available for-sale financial assets and held-to-maturity investments or derivatives designated as hedging investment in an effective hedge.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga, biaya yang masih harus dibayar dan utang retensi.

Perusahaan telah menentukan bahwa semua liabilitas keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman dan utang. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau derivatif yang ditempatkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat kewajiban tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

The Company's financial liabilities as of December 31, 2015 included payables to contractors and consultants - third parties, accrued expenses and retentions payable.

The Company has determined that all off these financial liabilities are categorized as loans and borrowings. As of December 31, 2015, the Company did not have any financial liabilities at fair value through profit or loss, or derivatives designated as hedging investment in an effective hedge.

Subsequent measurement

After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit *counterparty* antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

5. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti obyektif secara individual atas penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Financial instruments (continued)

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

Credit risk adjustment

The Company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

5. Impairment of financial assets

The Company assesses at the end of each reporting year whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company assesses the impairment based on the individual objective evidence of impairment.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

**5. Penurunan nilai dari aset keuangan
(lanjutan)**

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Financial instruments (continued)

**5. Impairment of financial assets
(continued)**

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a "loans and receivables" asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

**6. Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian *pass-through* dan baik (a) Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu kewajiban yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Financial instruments (continued)

**6. Derecognition of financial assets and
liabilities**

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada akhir tahun, Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset-aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai penghasilan pada tahun dimana pemulihan tersebut terjadi.

l. Provisi

Perusahaan menerapkan PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". PSAK ini menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini yang terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Impairment of non-financial assets

At the end of the year, the Company undertakes a review to determine whether there is any indication of asset impairment.

Property and equipment and other non-current assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which an asset's carrying amount exceeds its recoverable amount which is the higher of the asset's net selling price or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Reversal of an impairment provision is recorded as income in the year when the reversal occurs.

l. Provisions

The Company adopted PSAK 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". This PSAK provides that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statements to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.

A provision is recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

• Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Perusahaan adalah mata uang masing-masing dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha, dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan.

• Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*.

Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menentankan nilai wajar

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

The following judgments, estimates and assumptions were made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

• Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

• Determination of fair values of financial assets and financial liabilities

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair values are determined using valuation techniques including the discounted cash flow model.

The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

- Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

- Estimasi masa manfaat aset tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Perusahaan akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

- Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap tahun pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

- *Determination of fair values of financial assets and financial liabilities (continued)*

The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair values of financial instruments.

- *Estimating useful lives of property and equipment*

The Company estimates the useful lives of its property and equipment based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of property and equipment is based on the Company's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Company's property and equipment will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

- *Impairment of non-financial assets*

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash-generating unit is evaluated every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash-generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

- Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi operasi dan volume pendapatan, harga tiket, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi, dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Realisasi dari aset pajak tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

- Estimasi beban imbalan karyawan

Imbalan karyawan ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, antara lain, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

- *Impairment of non-financial assets (continued)*

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected operations and revenue volumes, ticket prices, operating costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced, with the impact recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

- *Realization of deferred tax assets*

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Company's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Company's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred tax assets to be utilized.

- *Estimation of employee benefits*

Employee benefits are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among others, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

- Estimasi beban imbalan kerja (lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan karyawan dan beban imbalan karyawan neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp7.895.596.418 dan Rp4.495.333.417 (Catatan 15).

Perusahaan percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

- Ketidakpastian kewajiban perpajakan

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (Revisi 2009). Perusahaan membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

- *Estimation of employee benefits (continued)*

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Company are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated employee benefits liability as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp7,895,596,418 and Rp4,495,333,417, respectively (Note 15).

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

- *Uncertain tax exposure*

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57 (Revised 2009). The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2014 DAN 2013**

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 sehubungan dengan:

- (i) Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan telah menerapkan secara retrospektif PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

PSAK ini menetapkan antara lain, (i) menghapuskan "corridor approach" yang digunakan dalam PSAK sebelumnya dan (ii) perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca-kerja yang antara lain sebagai berikut:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial saat ini diharuskan untuk diakui dalam penghasilan komprehensif lain (OCI) dan dikeluarkan secara permanen dari laba atau rugi.
- Keuntungan yang diharapkan atas *plan assets* tidak lagi diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas program manfaat pasti bersih (atau liabilitas) dalam laba atau rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun.
- Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait.

Perubahan tersebut dibuat supaya aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam posisi laporan keuangan untuk menggambarkan nilai penuh dari defisit atau surplus program.

- (ii) Penyajian kembali pengakuan pajak tangguhan terkait penerapan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Penyesuaian penyajian kembali tersebut berdampak material atas beberapa akun; oleh karena itu, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

4. RESTATEMENT OF 2014 AND 2013 FINANCIAL STATEMENTS

The Company restated its financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended, and the statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 due to:

- (i) Application of PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

Effective January 1, 2015, the Company has retrospectively adopted PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the "corridor approach" permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:

- Actuarial gains and losses are now required to be recognized in other comprehensive income (OCI) and excluded permanently from profit or loss.
- Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss. Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined benefit asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.
- Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the Company recognizes the related restructuring or termination costs.

Such changes are made in order that the net pension assets or liabilities are recognized in the statements of financial position to reflect the full value of the plan deficit or surplus.

- (ii) Restatement of recognition for deferred tax due to the implementation of PSAK 46 (Revised 2014), "Pajak Penghasilan".

These restatement adjustments materially impacted several accounts; therefore, the Company restated its financial statements as of December 31, 2014 and January 1, 2014/December 31, 2013, and for the year ended December 31, 2014.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2014 DAN 2013 (lanjutan)**

Akun-akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali diikhtisarkan sebagai berikut:

**4. RESTATEMENT OF 2014 AND 2013
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

The accounts affected by the restatement are summarized as follows:

	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Penyesuaian atas penyajian kembali/ Restatement adjustments	Setelah penyajian kembali/ After restatement	
Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014				Statement of financial position as of December 31, 2014
Aset				Assets
Aset pajak tangguhan	1.526.976.973	(1.526.976.973)	-	Deferred tax assets
Liabilitas dan ekuitas				Liabilities and equity
Liabilitas imbalan karyawan	4.993.959.167	(498.625.750)	4.495.333.417	Liability for employee benefits
Defisit	(135.524.343.224)	(1.592.892.349)	(137.117.235.573)	Deficit
Penghasilan komprehensif lain	-	564.541.138	564.541.138	Other comprehensive income
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014				Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2014
Beban umum dan administrasi	55.674.443.372	46.342.238	55.720.785.610	General and administrative expenses
Manfaat pajak tangguhan	469.803.401	(469.803.401)	-	Deferred income tax benefit
Penghasilan (beban) komprehensif lain	-	(387.069.122)	(387.069.122)	Other comprehensive income (loss)
Rugi tahun berjalan	(31.238.116.210)	(516.145.638)	(31.754.261.848)	Loss for the year
Laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013				Statement of financial position as of January 1, 2014/ December 31, 2013
Aset				Assets
Aset pajak tangguhan	1.057.173.572	(1.057.173.572)	-	Deferred tax assets
Liabilitas dan ekuitas				Liabilities and equity
Liabilitas imbalan karyawan	3.563.982.737	(932.037.109)	2.631.945.628	Liability for employee benefits
Defisit	(104.286.227.009)	(1.076.746.716)	(105.362.973.725)	Deficit
Penghasilan komprehensif lain	-	951.610.260	951.610.260	Other comprehensive income

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Kas	15.192.650	10.000.000	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak ketiga:			Third party:
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.703.088.898	2.911.147.123	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$15.955 pada tahun 2015 dan US\$34.306 pada tahun 2014)	220.105.019	426.768.682	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$15,955 in 2015 and US\$34,306 in 2014)
Pihak berelasi - rupiah:			Related party - rupiah:
PT Bank Daerah Khusus Ibukota	2.820.811.967	7.140.374.173	PT Bank Daerah Khusus Ibukota
	6.759.198.534	10.488.289.978	
Deposito berjangka - rupiah			Time deposits - rupiah
Pihak berelasi:			Related party:
PT Bank Daerah Khusus Ibukota	320.000.000.000	175.000.000.000	PT Bank Daerah Khusus Ibukota
Pihak ketiga:			Third party:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.000.000.000	110.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	385.000.000.000	285.000.000.000	
Total	391.759.198.534	295.488.289.978	Total

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tahun 2015 dan 2014, kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka masing-masing antara 7,75% sampai dengan 10,75% dan 9,75% sampai dengan 10%.

Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan akrual pendapatan bunga atas deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp204.684.922 dan Rp323.282.610.

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA - NETO

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Biaya dibayar dimuka - neto	3.120.086.294	3.619.863.618
Uang muka karyawan	205.434.004	204.939.766
Neto	3.325.520.298	3.824.803.384

Prepayments - net
Employee advances

Net

8. ASET TETAP - NETO

Aset tetap terdiri dari:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/
Year ended December 31, 2015

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance
<u>Biaya perolehan:</u> Kendaraan	3.415.200.000	-	-	3.415.200.000
Peralatan dan perabotan kantor	5.748.944.992	702.502.080	-	6.451.447.072
Sub-total	9.164.144.992	702.502.080	-	9.866.647.072
Aset dalam penyelesaian	842.990.768.803	1.487.282.785.826	-	2.330.273.554.629
Total biaya perolehan	852.154.913.795	1.487.985.287.906	-	2.340.140.201.701
<u>Akumulasi penyusutan:</u> Kendaraan	1.189.451.044	850.062.497	-	2.039.513.541
Peralatan dan perabotan kantor	3.356.328.398	922.697.911	-	4.279.026.309
Total akumulasi penyusutan	4.545.779.442	1.772.760.408	-	6.318.539.850
Nilai buku	847.609.134.353			2.333.821.661.851

Cost:
Vehicles
Furniture, fixtures and
office equipment

Sub-total
Construction in progress

Total cost

Accumulated depreciation:
Vehicles
Furniture, fixtures and
office equipment

Total accumulated depreciation

Net book value

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

In 2015 and 2014, the range of annual interest rates of time deposits between 7.75% to 10% and from 9.75% to 10.75%, respectively.

The interest rates of the related-party bank are comparable to those offered by third-party banks.

6. INTEREST RECEIVABLE

This account represents accrued interest income on the time deposits amounting to Rp204,684,922 and Rp323,282,610 as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

7. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES - NET

8. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET

Property and equipment consist of:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Aset tetap terdiri dari: (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/ Year ended December 31, 2014			Saldo Akhir/ Ending Balance
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	
<u>Biaya perolehan:</u>				
Kendaraan	2.674.350.000	740.850.000	-	3.415.200.000
Peralatan dan perabotan kantor	5.298.898.438	2.390.084.064	1.940.037.510	5.748.944.992
Sub-total	7.973.248.438	3.130.934.064	1.940.037.510	9.164.144.992
Aset dalam penyelesaian	177.638.007.366	665.352.761.437	-	842.990.768.803
Total biaya perolehan	185.611.255.804	668.483.695.501	1.940.037.510	852.154.913.795
<u>Akumulasi penyusutan:</u>				
Kendaraan	403.466.667	785.984.377	-	1.189.451.044
Peralatan dan perabotan kantor	4.131.145.049	1.081.052.011	1.855.868.662	3.356.328.398
Total akumulasi penyusutan	4.534.611.716	1.867.036.388	1.855.868.662	4.545.779.442
Nilai buku	181.076.644.088			847.609.134.353

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset dalam penyelesaian Perusahaan terutama merupakan biaya atas pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi keuangan dan pengadaan, serta biaya karyawan yang terkait langsung dengan penyelesaian pembangunan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Beban/biaya tersebut terjadi sejak tahap awal sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rata-rata persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi sipil yang tercatat sebagai aset dalam penyelesaian adalah sebesar 26,6% yang diestimasikan akan selesai pada tahun 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2015, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

8. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

Property and equipment consist of: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/ Year ended December 31, 2014			Saldo Akhir/ Ending Balance
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	
<u>Cost:</u>				
Vehicles	2.674.350.000	740.850.000	-	3.415.200.000
Furniture, fixtures and office equipment	5.298.898.438	2.390.084.064	1.940.037.510	5.748.944.992
Sub-total	7.973.248.438	3.130.934.064	1.940.037.510	9.164.144.992
Construction in progress	177.638.007.366	665.352.761.437	-	842.990.768.803
Total cost	185.611.255.804	668.483.695.501	1.940.037.510	852.154.913.795
<u>Accumulated depreciation:</u>				
Vehicles	403.466.667	785.984.377	-	1.189.451.044
Furniture, fixtures and office equipment	4.131.145.049	1.081.052.011	1.855.868.662	3.356.328.398
Total accumulated depreciation	4.534.611.716	1.867.036.388	1.855.868.662	4.545.779.442
Net book value	181.076.644.088			847.609.134.353

As of December 31, 2015, the Company's construction in progress mainly represents costs of construction, financial and procurement consultancy services, and employee expenses that are directly related to the completion of the construction of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. The costs/expenses were incurred from the initial phase up to December 31, 2015.

As of December 31, 2015, the average percentage of completion on the civil construction work, which was recorded as construction in progress is 26.6% which is estimated to be completed in 2018.

As of December 31, 2015, the management believes that there was no indication of impairment of property and equipment.

9. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN - PIHAK KETIGA

Utang kontraktor dan konsultan terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Pihak ketiga:		
Obayashi-Shimizu, Jaya Konstruksi JV	3.799.715.445	-
Oriental Consultant Co., Ltd.	-	496.287.392
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	184.779.021	182.730.918
Total	3.984.494.466	679.018.310

9. PAYABLES TO CONTRACTORS AND CONSULTANTS - THIRD PARTIES

Payables to contractors and consultants consist of:

31 Desember/December 31,	
2015	2014
Third parties:	
Obayashi-Shimizu, Jaya Konstruksi JV	-
Oriental Consultant Co., Ltd.	496.287.392
Others (each below Rp100,000,000)	182.730.918
Total	679.018.310

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**9. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN -
PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Utang kontraktor dan konsultan berdasarkan mata uang terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Yen Jepang	3.799.715.445	445.237.242
Rupiah	184.779.021	233.781.068
Total	3.984.494.466	679.018.310

Japanese yen
Rupiah

Total

**9. PAYABLES TO CONTRACTORS AND
CONSULTANTS - THIRD PARTIES (continued)**

Payables to contractors and consultants based on currency consist of:

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Jasa kontraktor dan konsultan	195.871.156.304	419.089.812.443
Operasional kantor	1.079.733.802	1.242.209.597
Total	196.950.890.106	420.332.022.040

Contractors and consultants services
Office operations

Total

10. ACCRUED EXPENSES

11. PERPAJAKAN

a. Utang pajak:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Pajak penghasilan:		
Pasal 4(2)	-	19.583.637
Pasal 21	665.239.885	666.013.804
Pasal 23/26	1.804.373	26.709.020
Total	667.044.258	712.306.461

Income taxes:
Article 4(2)
Article 21
Article 23/26

Total

11. TAXATION

a. Taxes payable:

b. Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

b. The reconciliation between loss before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss for the years ended December 31, 2015 and 2014 is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2015	2014 ^{*)}
Rugi sebelum pajak penghasilan	(62.757.587.374)	(31.754.261.848)
Beda waktu:		
Liabilitas imbalan karyawan	3.400.263.001	1.863.387.789
Penyusutan aset tetap	425.031.250	385.275.000

Loss before income tax
Temporary differences:
Liability for employee benefits
Depreciation of tire assets

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

- b. Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

- b. The reconciliation between loss before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss for the years ended December 31, 2015 and 2014 is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2015	2014^{*)}	
Beda tetap:			Permanent differences:
Biaya tunjangan kesehatan	1.765.643.374	741.813.232	Medical benefits
Biaya keperluan rumah tangga	873.087.028	618.089.265	Household appliances
Biaya representasi	326.614.589	191.114.978	Representation
Biaya sumbangan	141.000.000	236.702.500	Donation
Iuran keanggotaan	64.486.112	-	Membership fee
Gaji dan kesejahteraan karyawan	-	513.858.076	Salaries and employee benefits
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	-	(323.106.953)	Remeasurement of employee benefits obligations
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(18.449.688.901)	(16.586.174.390)	Interest income subject to final tax
Estimasi rugi fiskal	(74.211.150.921)	(44.113.302.351)	Estimated tax loss
Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal awal tahun:			Estimated tax losses carry-forward at beginning of year:
2009	-	(14.420.407.967)	2009
2010	(18.926.520.752)	(18.926.520.752)	2010
2011	(22.282.964.976)	(22.282.964.976)	2011
2012	(24.717.999.013)	(24.717.999.012)	2012
Habis pada akhir tahun 2015	18.926.520.752	-	Expired at the end of year 2015
Habis pada akhir tahun 2014	-	14.420.407.967	Expired at the end of year 2014
Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal akhir tahun	(121.212.114.910)	(110.040.787.091)	Estimated tax losses carry-forward at end of year

^{*)} Disajikan kembali - Catatan 4

^{*)} As restated - Note 4

Perusahaan akan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2015 ke Kantor Pajak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

The Company will submit its Annual Corporate Income Tax Return for 2015 to the Tax Office based on information reported in these financial statements.

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer karena adanya ketidakpastian dalam pemulihannya selama periode 5 tahun mendatang

The Company decided not to recognize the deferred tax asset on the temporary differences due to the uncertainty in their recovery during the prospective period of 5 years.

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Otoritas pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend the tax within 5 years after the date when the tax became due.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

12. MODAL SAHAM

12. SHARE CAPITAL

31 Desember 2015/December 31, 2015

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total/ Total	Stockholders
Pemerintah Daerah DKI Jakarta	1.943.285	99,97%	1.943.285.000.000	Local Government of DKI Jakarta
PD Pasar Jaya	500	0,03%	500.000.000	PD Pasar Jaya
Total	1.943.785	100%	1.943.785.000.000	Total

31 Desember 2014/December 31, 2014

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total/ Total	Stockholders
Pemerintah Daerah DKI Jakarta	1.481.159	99,97%	1.481.159.000.000	Local Government of DKI Jakarta
PD Pasar Jaya	500	0,03%	500.000.000	PD Pasar Jaya
Total	1.481.659	100%	1.481.659.000.000	Total

Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 30 Maret 2015, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Miki Tanumiharja, S.H., No. 72, para pemegang saham telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- penambahan modal disetor melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp125.000.000.000.
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp1.606.659.000.000.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0928035 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 10 Juli 2015, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Miki Tanumiharja, S.H., No. 1, para pemegang saham telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- penambahan modal disetor melalui hibah sebesar Rp337.126.000.000.
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp1.943.785.000.000.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0952217 Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015.

Based on the minutes of the extraordinary general meeting of stockholders held on March 30, 2015 which were notarized under deed No. 72 of Miki Tanumiharja, S.H., the stockholders approved the following:

- increase in the paid-up capital from the contribution of Local Government of DKI Jakarta by Rp125,000,000,000.
- increase in the issued and fully paid share capital to become Rp1,606,659,000,000.

The above changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0928035 Year 2015 dated April 28, 2015.

Based on the minutes of the extraordinary general meeting of stockholders held on July 10, 2015 which were notarized under deed No. 1 of Miki Tanumiharja, S.H., the stockholders approved the following:

- increase in the paid-up capital from the Local Government of DKI Jakarta by Rp337,126,000,000.
- increase in the issued and fully paid share capital to become Rp1,943,785,000,000.

The above changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0952217 Year 2015 dated July 27, 2015.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

12. MODAL SAHAM (lanjutan)

Atas kedua penambahan modal tersebut di atas sebesar Rp462.126.000.000 dicatat sebagai bagian dari "Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh" didalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan. Penambahan modal sebesar Rp17.937.182 belum diaktakan sehingga disajikan sebagai "Modal Disetor Lainnya" didalam bagian dari Ekuitas dari laporan posisi keuangan.

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2700 tanggal 8 Desember 2015. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, penambahan modal tersebut belum diaktakan sehingga dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" didalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan.

Pada tahun 2015 dan 2014, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari hibah masing-masing sebesar Rp1.870.207.012.732 (Catatan 16i, 16j, 16k dan 16l) dan Rp337.143.141.187 (Catatan 16j). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, penambahan modal sebesar Rp1.870.207.012.732 belum diaktakan sehingga dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" didalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan.

Mutasi modal disetor dan modal disetor lainnya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2015	2014	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			Issued and fully paid share capital
Saldo awal tahun	1.481.659.000.000	230.258.000.000	Balance at beginning of year
Penambahan tahun berjalan yang berasal dari reklasifikasi modal disetor lainnya	462.126.000.000	1.251.401.000.000	Addition during the year from reclassification of other paid-up capital
Saldo akhir tahun	1.943.785.000.000	1.481.659.000.000	Balance at end of year
Modal disetor lainnya			Other paid-up capital
Saldo awal tahun	462.143.937.182	1.251.401.795.995	Balance at beginning of year
Penambahan tahun berjalan yang berasal dari:			Addition during the year from:
APBD dari penerusan hibah	1.870.207.012.732	337.143.141.187	APBD from grant mechanism
APBD DKI Jakarta	145.000.000.000	125.000.000.000	APBD DKI Jakarta
Pengurangan selama tahun berjalan yang disebabkan oleh reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	(462.126.000.000)	(1.251.401.000.000)	Deduction during the year from reclassification to issued and fully paid share capital
Saldo akhir tahun	2.015.224.949.914	462.143.937.182	Balance at end of year

12. SHARE CAPITAL (continued)

As the above both mentioned capital increase amounting to Rp462,126,000,000 recorded as part of the "Issued and Fully Paid" in the equity section of the statement of financial position. Paid-up capital amounting to Rp17,937,182 has not been notarized and, accordingly, was presented as "Other paid-up Capital" in the Equity section of the statement of financial position.

In December 2015, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp145,000,000,000 based on Governor Decree No. 2700 dated December 8, 2015. As of December 31, 2015, the paid-up capital has not been notarized and, accordingly, was presented as "Other Paid-up Capital" in the Equity section of the statement of financial position.

In 2015 and 2014, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta which was funded from grant mechanism amounting to Rp1,870,207,012,732 (Notes 16i, 16j, 16k and 16l) and Rp337,143,141,187 (Note 16j), respectively. As of December 31, 2015, the paid-up capital amounting to Rp1,870,207,012,732 has not been notarized and, accordingly, was presented as "Other Paid-up Capital" in the Equity section of the statement of financial position.

Movements of the share capital and other paid-up capital are as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

13. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

13. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2015	2014 ^{*)}	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	37.757.789.859	30.051.445.910	Salaries and employee benefits
Honor tenaga ahli	5.682.658.196	6.859.760.894	Professional fee
Biaya sewa kantor	5.264.483.757	4.134.391.348	Office rent expenses
Pelatihan dan keanggotaan	3.998.198.027	3.111.738.186	Training and membership
Transportasi dan parkir	1.897.339.797	1.066.385.224	Transportation and parking
Keperluan rumah tangga	1.803.632.091	1.381.776.086	Household appliances
Penyusutan (Catatan 8)	1.772.760.408	1.867.036.388	Depreciation (Note 8)
Promosi dan pameran	1.750.610.798	2.771.141.866	Promotion and exhibition
Rapat koordinasi dan rapat umum pemegang saham	1.536.409.338	2.410.674.213	Coordination and stockholders' meetings
Perlengkapan kantor	1.429.182.157	1.275.285.726	Office supplies
Komunikasi, energi dan utilitas	590.714.315	423.004.769	Communication, energy and utility
Biaya sumbangan	141.000.000	236.702.500	Donation
Amortisasi	15.697.674	75.000.000	Amortization
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp25.000.000)	26.557.571	56.442.500	Others (each below Rp25,000,000)
Total	63.667.033.988	55.720.785.610	Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

14. PENGHASILAN BUNGA

14. INTEREST INCOME

Pada tahun 2015, penghasilan bunga sebesar Rp18.829.277.974 (2014: Rp16.586.174.390) diperoleh dari rekening koran dan deposito berjangka (Catatan 5).

In 2015, interest income amounting to Rp18,829,277,974 (2014: Rp16,586,174,390) was derived from bank accounts and time deposits (Note 5).

15. LIABILITAS IMBALAN KARYAWAN

15. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS

Akrual atas liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaris yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuarial, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016 dan 3 Februari 2015.

The Company's outstanding liability for employee benefits as of December 31, 2015 and 2014 was determined based on the actuarial valuation performed by PT Sentra Jasa Aktuarial, independent actuaries, based on their reports dated March 11, 2016 and February 3, 2015, respectively.

Penilaian aktuaris dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

The actuarial valuation was performed using the *projected-unit-credit* method which considered the following assumptions:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Tingkat diskonto	9%	8%	Discount rate
Kenaikan gaji dan upah	7%	7%	Wage and salary increase
Usia pensiun normal	58 tahun/58 years	58 tahun/58 years	Retirement age
Tabel mortalitas	TMI III (2011)	TMI III (2011)	Mortality table
Tingkat cacat	10% dari TMI 2011 /10% of TMI 2011	10% dari TMI 2011 /10% of TMI 2011	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Voluntary resignation for ages:
15-29	6%	6%	15-29
30-34	3%	3%	30-34
35-39	1,8%	1,8%	35-39
40-51	1,2%	1,2%	40-51
52-53	0,6%	0,6%	52-53
lebih dari 53	0,0%	0,0%	more than 53

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS IMBALAN KARYAWAN (lanjutan)

Perusahaan membukukan liabilitas imbalan karyawan sesuai PSAK 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015. Berdasarkan "Ketentuan Transisi (Par 173)" maka Perusahaan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. Oleh karena itu, perhitungan pada tanggal 31 Desember 2014 disajikan kembali sesuai dengan ketentuan yang baru.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014^{*)}	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	4.495.333.417	2.631.945.628	<i>Present value liability - beginning of Year</i>
Biaya bunga	359.626.671	236.875.106	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa kini	2.285.146.808	1.175.959.333	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	1.540.918.726	27.780.114	<i>Past service cost</i>
Pembayaran imbalan	(226.114.080)	(38.882.368)	<i>Benefits paid</i>
	<u>8.454.911.542</u>	<u>4.033.677.813</u>	
(Keuntungan)/kerugian aktuarial:			<i>Actuarial (gain)/loss:</i>
- Dari perubahan asumsi keuangan	(478.529.612)	268.882.649	<i>From changes in financial assumptions -</i>
- Penyesuaian atas pengalaman	(80.785.512)	192.772.955	<i>Experience adjustments -</i>
Nilai kini liabilitas - akhir periode	<u>7.895.596.418</u>	<u>4.495.333.417</u>	<i>Present value liability - end of period</i>

Penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2015	2014^{*)}	
Biaya jasa kini	2.285.146.808	1.175.959.333	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	359.626.671	236.875.106	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	1.540.918.726	27.780.114	<i>Past service cost</i>
Total	<u>4.185.692.205</u>	<u>1.440.614.553</u>	<i>Total</i>

Pada tahun 2015, Perusahaan mengkapitalisasi penyisihan imbalan kerja pada tahun berjalan kedalam aset dalam penyelesaian sebesar Rp819.824.031.

The provision for employee benefits recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income consisted of the following:

In 2015, the Company capitalized provision for employee benefits for the current year to construction in progress amounting to Rp819,824,031.

^{*)} Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

^{*)} After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS IMBALAN KARYAWAN (lanjutan)

**15. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS
(continued)**

Rincian keuntungan (kerugian) aktuarial dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The details of of actuarial gain (loss) in the statements of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014 ¹⁾	
Penghasilan komprehensif lain (Keuntungan) kerugian aktuarial			Other comprehensive income Actuarial (gain) and loss
- Perubahan asumsi keuangan	(381.673.492)	254.984.326	Changes in financial assumptions -
- Penyesuaian atas pengalaman	(179.550.180)	132.084.796	Experience adjustments -
(Penghasilan)/beban komprehensif lain	(561.223.672)	387.069.122	Other comprehensive (income)/expense

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in the liabilities in the statements of financial position are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014 ¹⁾	
Liabilitas neto awal tahun	4.495.333.417	2.631.945.628	Net liability - beginning of year
Beban periode berjalan	4.187.600.753	1.515.201.035	Recognized expenses
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	(561.223.672)	387.069.122	Recognized in other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(226.114.080)	(38.882.368)	Benefits paid
Liabilitas neto akhir periode	7.895.596.418	4.495.333.417	Net liability - end of period

Rincian nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

The details of the present value of the defined benefit obligation as of December 31, 2015, 2014, 2013, 2012 and 2011 are as follows:

	2015	2014 ¹⁾	2013 ¹⁾	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	7.895.596.418	4.495.333.417	2.631.945.628	2.369.167.445	1.513.220.051	Present value of defined benefit obligation
Penyesuaian pada liabilitas program	80.785.512	(192.772.955)	6.534.963	340.574.458	-	Experience adjustment on liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2015, jika tingkat diskonto tahunan dinaikkan/ diturunkan sebesar 1% dengan semua variabel lain dianggap konstan, liabilitas imbalan pasca kerja akan lebih rendah/tinggi menjadi sebesar Rp7.284.091.373/Rp8.616.420.113.

As of December 31, 2015, had the annual discount rate appreciated/ depreciated by 1% with all other variables held constant, post-employee benefits liability would have been lower/ higher to become Rp7,284,091,373/Rp8,616,420,113.

¹⁾ Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

¹⁾ After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

- a. Pada tanggal 28 November 2006, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-536 dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") terkait dengan jasa tehnik untuk Proyek Mass Rapid Transit Jakarta ("Proyek").

JBIC setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY1.869.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan jasa teknik untuk Proyek. Pinjaman akan digunakan untuk pengadaan jasa konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JBIC dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2012, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Closing Date* Perjanjian Utang No. IP-536 yang semula tanggal 22 Maret 2012 diubah sehingga menjadi tanggal 22 Desember 2014.

Pada tanggal 27 Februari 2013, berdasarkan *Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission* yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari JICA, Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Perusahaan dimana para pihak telah menyepakati nilai keseluruhan pembangunan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta adalah sebesar JPY137.695.000.000.

- b. Pada tanggal 17 Juni 2008, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan sebesar Rp49.500.000.000, setara dengan 99% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perusahaan.
- c. Pada tanggal 25 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

- a. On November 28, 2006, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-536 with the Japanese Government through the *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") in relation to the *Jakarta Mass Rapid Transit Project* (the "Project").

JBIC agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY1,869,000,000 for the engineering services for the Project. The loan would be used for the purchase of eligible services from consultants necessary for the implementation of the Project.

The final disbursement under the Loan Agreement would be made not later than the same day and month five years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JBIC and the Government of the Republic of Indonesia.

On June 19, 2012, based on a letter from the Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Closing Date of Loan Agreement No. IP-536 which was originally on March 22, 2012 had been extended to become December 22, 2014.

On February 27, 2013, based on the *Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission* which were signed by representatives of JICA, the Government of the Republic of Indonesia as represented by the National Development Planning Agency, the Directorate General of Railways, DKI Jakarta Provincial Government and the Company agreed that the total project cost for the construction of the Mass Rapid Transit Jakarta Project amounted to JPY137,695,000,000.

- b. On June 17, 2008, the Governor of DKI Jakarta issued Local Government Regulation No. 4 Year 2008 regarding the capital investment in the Company amounting to Rp49,500,000,000, which was equivalent to 99% of the issued and fully paid share capital of the Company.
- c. On March 25, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 with the Local Government of DKI Jakarta.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY758.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi pengadaan.

Dana hibah yang tidak melebihi dari JPY191.000.000 akan diteruskan seluruhnya kepada Perusahaan sebagai penyertaan modal daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan jasa konsultasi pengadaan oleh Perusahaan.

Tata cara penyaluran hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan hibah sebesar Rp21.057.493.845 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- d. Pada tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-554 dengan JICA terkait dengan Proyek.

JICA setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY48.150.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek. Pinjaman akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum sepuluh tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia.

- e. Pada tanggal 15 Juni 2009, Perusahaan menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mengenai penyediaan tenaga listrik untuk pembangunan dan pengoperasian kereta api Perusahaan.

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Under the Grant Agreement, the Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant fund amounting to JPY758,000,000, which was to be obtained from a loan from another country, to the Local Government of DKI Jakarta in order to implement management consultancy services and tender assistance consultancy.

Grant fund not exceeding JPY191,000,000 would be granted to the Company as equity of the Local Government of DKI Jakarta for the implementation of the Company's consulting services.

The procedures to distribute the grant are covered by Regulations No. 188/PMK.07/2012 dated November 26, 2012, of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

As of December 31, 2015, the Government of the Republic of Indonesia has provided Rp21,057,493,845 grant to the Local Government of DKI Jakarta.

- d. *On March 31, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-554 with JICA in relation to the Project.*

JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY48,150,000,000 for the implementation of the Project. The loan will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Project.

The final disbursement under the Loan Agreement shall be made not later than the same day and month ten years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JICA and the Government of the Republic of Indonesia.

- e. *On June 15, 2009, the Company entered into a Memorandum of Understanding with PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Distribution related to electricity supply for the construction and operation of the Company's railways.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- f. Pada tanggal 24 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY48.150.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan sipil dan peralatan, jasa konsultasi dan alokasi cadangan kontinjensi oleh Perusahaan bagi pelaksanaan kegiatan Proyek.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan hibah sebesar Rp3.336.952.456.069 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Catatan 16c dan 16h).

- g. Pada tanggal 14 Juni 2010, Perusahaan mengadakan nota kesepahaman dengan PD Pasar Jaya dan PT Pembangunan Jaya untuk mendirikan perusahaan untuk mendukung pelaksanaan Proyek. Sampai dengan tanggal 15 Maret 2016, perusahaan *joint venture* belum didirikan.
- h. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1517/2011, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.179.480.000 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp30.000.000.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.179.480.000, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 16c).

Pada tanggal 2 Oktober 2012, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1525/2012, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp968.509.699.990 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp65.000.000.000, hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.041.116.650, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 16c) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp889.468.583.340, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 16f).

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- f. On July 24, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 with the Local Government of DKI Jakarta.

Under the Grant Agreement, the Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant fund amounting to JPY48,150,000,000, which would be obtained from a loan from another country, to the Local Government of DKI Jakarta in order to implement equipment and civil works, consultation services and allocation for contingency reserves by the Company for implementation of development activities of the Project.

As of December 31, 2015, the Government of the Republic of Indonesia has provided Rp3,336,952,456,069 grant to the Local Government of DKI Jakarta (Notes 16c and 16h).

- g. On June 14, 2010, the Company entered into a memorandum of understanding with PD Pasar Jaya and PT Pembangunan Jaya to establish a company to support the implementation of the Project. As of March 15, 2016, the joint venture company has not been established.
- h. On October 27, 2011, the Company received Governor Decree No. 1517/2011, whereby additional paid-in capital would be made by the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp44,179,480,000, which would be funded from the APBD amounting to Rp30,000,000,000 and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,179,480,000 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 16c).

On October 2, 2012, the Company received Governor Decree No. 1525/2012, whereby additional paid-in capital would be made by the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp968,509,699,990, which would be funded from the APBD amounting to Rp65,000,000,000, grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,041,116,650 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 16c) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp889,468,583,340 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 16f).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada bulan November dan Desember 2013, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp111.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 704 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp31.000.000.000 dan Keputusan Gubernur No. 1923 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp80.000.000.000 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1924/2013, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.720.529.427.822 yang alokasinya bersumber dari hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp12.088.062.892, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 16c) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.708.441.364.930, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 16f).

Pada bulan Juli 2014, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp125.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1123 tanggal 8 Juli 2014 yang alokasinya bersumber dari APBD (Catatan 12).

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2700 tanggal 8 Desember 2015 yang alokasinya bersumber dari APBD (Catatan 12).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah menerima pencairan modal yang berasal dari APBD dan hibah masing-masing sebesar Rp600.500.000.000 dan Rp3.358.009.949.914 (Catatan 16b, 16c dan 16f).

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

In November and December 2013, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta totaling Rp111,000,000,000 based on Governor Decree No. 704 dated May 1, 2013 amounting to Rp31,000,000,000 and Governor Decree No. 1923 dated December 11, 2013 amounting to Rp80,000,000,000 which were funded from the APBD.

On December 11, 2013, the Company received Governor Decree No. 1924/2013, whereby additional paid-in capital would be made by the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp1,720,529,427,822, which would be funded from a grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp12,088,062,892 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 16c) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,708,441,364,930 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 16f).

In July 2014, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta totaling Rp125,000,000,000 based on Governor Decree No. 1123 dated July 8, 2014 which were funded from the APBD (Note 12).

In December 2015, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta totaling Rp145,000,000,000 based on Governor Decree No. 2700 dated December 8, 2015 which were funded from the APBD (Note 12).

As of December 31, 2015, the Company has received additional paid-up capital that was funded from the APBD and grant mechanism amounting to Rp600,500,000,000 and Rp3,358,009,949,914 (Notes 16b, 16c and 16f), respectively.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- i. Pada tanggal 10 Juni 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Construction Management Consulting Services* dengan Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., dan Pacific Consultants, Co. Ltd. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2018. Total nilai keseluruhan kontrak (sebelum PPN) adalah sebesar JPY1.214.922.000 dan Rp92.542.106.200.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan uang muka kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY182.238.300 (setara Rp21.014.982.835) dan Rp13.881.315.930.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan nilai pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY292.152.123 (setara dengan Rp32.804.834.413) dan Rp21.655.104.567.

- j. Pada tanggal 11 Juni 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:
- (i) Perjanjian *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-104) dengan jumlah nilai pekerjaan (sebelum PPN) sebesar JPY1.581.793.643 dan Rp771.682.701.298. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.
- (ii) Perjanjian *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-105) dengan jumlah nilai pekerjaan (sebelum PPN) sebesar JPY1.296.550.429 dan Rp863.984.194.696. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.
- (iii) Perjanjian *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123* dengan SMCC and HK JO (CP-106), dengan jumlah nilai pekerjaan (sebelum PPN) sebesar JPY5.470.810.000 dan Rp1.014.327.835.000. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- i. On June 10, 2013, the Company entered into a *Construction Management Consulting Services* agreement with Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., and Pacific Consultants, Co. Ltd. The agreement is valid until March 19, 2018. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY1,214,922,000 and Rp92,542,106,200.

As of December 31, 2015, total contractors' advances paid related to the above agreement amounted to JPY182,238,300 (equivalent to Rp21,014,982,835) and Rp13,881,315,930.

As of December 31, 2015, total payment of consultant which has been paid related to the above agreements amounted to JPY292,152,123 (equivalent to Rp32,804,834,413) and Rp21,655,104,567.

- j. On June 11, 2013, the Company entered into several agreements as follows:
- (i) *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043* agreement with Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Jaya Konstruksi JV (CP-104), with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY1,581,793,643 and Rp771,682,701,298. The contract is valid until May 21, 2018.
- (ii) *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102* agreement with Shimizu, Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & Jaya Konstruksi JV (CP-105), with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY1,296,550,429 and Rp863,984,194,696. The contract is valid until May 21, 2018.
- (iii) *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123* agreement with SMCC and HK JO (CP-106), with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY5,470,810,000 and Rp1,014,327,835,000. The contract is valid until May 21, 2018.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan uang muka kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY1.252.373.110 (setara dengan Rp144.418.595.027) dan Rp397.499.209.649.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY3.948.335.270 (setara dengan Rp440.802.164.680) dan Rp675.462.120.028.

- k. Pada tanggal 4 Juli 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Tender Assistance Services (2) For Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project* dengan Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT Lapi ITB dan PT Inti Daya Kreasicitra. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2015. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (sebelum PPN) adalah sebesar JPY100.200.255 dan Rp4.869.088.046.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan uang muka kontraktor terkait perjanjian diatas yang telah dibayar adalah sebesar JPY15.030.000 (setara dengan Rp1.689.738.732) dan Rp730.363.200.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan nilai pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY66.582.190 (setara dengan Rp7.472.838.243) dan Rp4.159.605.827.

- l. Pada tanggal 16 Oktober 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:
- (i) Perjanjian *Depot, Elevated Structure and Station OK+580 TO OK+630* dengan Tokyu-Wika JO (CP-101) dengan jumlah nilai pekerjaan (sebelum PPN) sebesar JPY5.953.456.676 dan Rp861.711.119.720. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

As of December 31, 2015, total contractors' advances paid related to the above agreements amounted to JPY1,252,373,110 (equivalent to Rp144,418,595,027) and Rp397,499,209,649.

As of December 31, 2015, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted to JPY3,948,335,270 (equivalent to Rp440,802,164,680) and Rp675,462,120,028.

- k. On July 4, 2013, the Company entered into a *Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project* agreement with Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT Lapi ITB and PT Inti Daya Kreasicitra. The agreement is valid until January 9, 2015. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY100,200,255 and Rp4,869,088,046.

As of December 31, 2015, total contractors' advances which have been paid related to the above agreement amounted to JPY15,030,000 (equivalent to Rp1,689,738,732) and Rp730,363,200.

As of December 31, 2015, total payment of consultant which has been paid related to the above agreements amounted to JPY66,582,190 (equivalent to Rp7,472,838,243) and Rp4,159,605,827.

- l. On October 16, 2013, the Company entered into several agreements as follows:
- (i) *Depot, Elevated Structure and Station OK+580 TO OK+630* agreement with Tokyu-Wika JO (CP-101), with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY5,953,456,676 and Rp861,711,119,720. The contract is valid until July 24, 2018.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

(ii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations* dengan Tokyu-Wika JO (CP 102) dengan jumlah nilai pekerjaan (sebelum PPN) sebesar JPY2.238.196.089 dan Rp792.960.333.463. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.

(iii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211* dengan Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103) dengan jumlah nilai pekerjaan (sebelum PPN) sebesar JPY1.808.674.667 dan Rp852.126.240.102. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan uang muka kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY1.500.049.117 (setara dengan Rp176.768.544.716) dan Rp376.019.653.994.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY2.035.470.851 (setara dengan Rp226.923.829.520) dan Rp191.531.289.929.

m. Pada tanggal 3 Maret 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock* dengan Sumitomo Corporation. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2018. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (sebelum PPN) adalah sebesar JPY10.835.357.676 dan Rp21.960.355.914.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan uang muka kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY1.625.303.651 (setara dengan Rp182.687.299.715) dan Rp3.294.053.387.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY9.407.790 (setara dengan Rp1.066.031.964).

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

(ii) *Elevated Structures and Stations agreement with Tokyu-Wika JO (CP 102), with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY2,238,196,089 and Rp792,960,333,463. The contract is valid until July 24, 2018.*

(iii) *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211 agreement with Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103), with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY1,808,674,667 and Rp852,126,240,102. The contract is valid until July 24, 2018.*

As of December 31, 2015, total contractors' advances paid related to the above agreements amounted to JPY1,500,049,117 (equivalent to Rp176,768,544,716) and Rp376,019,653,994.

As of December 31, 2015, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted to JPY2,035,470,851 (equivalent to Rp226,923,829,520) and Rp191,531,289,929.

m. *On March 3, 2015, the Company entered into a Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock with Sumitomo Corporation. The agreement is valid until November 3, 2018. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY10,835,357,676 and Rp21,960,355,914.*

As of December 31, 2015, total contractors' advances paid related to the above agreements amounted to JPY1,625,303,651 (equivalent to Rp182,687,299,715) and Rp3,294,053,387.

As of December 31, 2015, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted to JPY9,407,790 (equivalent to Rp1,066,031,964).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- n. Pada tanggal 30 April 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107* dengan Mitsui & Co, Ltd., Toyo engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation dan PT Inti Karya Persada Tehnik. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (sebelum PPN) adalah sebesar JPY15.762.000.007 dan Rp1.010.217.668.955.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, keseluruhan uang muka kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY2.364.300.001 (setara dengan Rp265.539.025.282) dan Rp151.532.650.343.

- o. Berdasarkan *General Conditions of Contract, FIDIC Yellow Book* edisi tahun 1999, pada klausul 20.1 *Contractor's Claim*, kontraktor dapat mengajukan notifikasi bila mereka merasa berhak atas hal tersebut dengan memberikan pemberitahuan kepada *Engineer* dalam waktu tidak lebih dari 28 hari setelah kontraktor mengetahui atau, seharusnya mengetahui, terhadap keadaan atau kejadian yang mengakibatkan notifikasi tersebut.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah mendapatkan notifikasi dari pihak kontraktor paket pekerjaan CP101 sampai dengan CP106 terkait dengan *Variances* dan *Adjustments*. Selain itu, Perusahaan juga menerima notifikasi denda keterlambatan pembayaran kepada kontraktor dimana denda keterlambatan pembayaran tersebut terutama disebabkan oleh karena proses verifikasi dari instansi terkait.

Pada bulan November 2015, kontraktor paket pekerjaan CP104 dan CP105 (Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JV) telah mengajukan permintaan keputusan kepada *Dispute Adjudication Board (DAB)* terkait dengan *Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims for the system wide works and equipment dan Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations* sebesar JPY148.653.624 (setara dengan Rp17.024.437.366) dan Rp218.394.527.449.

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- n. On April 30, 2015, the Company entered into a *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107* with Mitsui & Co, Ltd., Toyo engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation and PT Inti Karya Persada Tehnik. The agreement is valid until October 30, 2018. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY15,762,000,007 and Rp1,010,217,668,955.

As of December 31, 2015, total contractors' advances paid related to the above agreements amounted to JPY2,364,300,001 (equivalent to Rp265,539,025,282) and Rp151,532,650,343.

- o. Based on the contract clause 20.1 on the *FIDIC General Conditions of Contract, Yellow Book Year 2009*, the contractor shall give notice if the contractor considers himself to be entitled of claim, describing the event or circumstance giving rise to the claim, the notice shall be given as soon as practicable, and not later than 28 days to *Engineer* after the contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance.

As of December 31, 2015, the Company received several notification from its contractors of contract package CP101 to CP106 related to the *Variances and Adjustments*. In addition, the Company also received notification of delayed payment charges to the contractor where the delayed payment charges where mainly due to the verification process of the related institutions.

In November, 2015, the contractor of CP104 and CP105 (Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JV) has requested the decision from *Dispute Adjudication Board (DAB)* relating to *Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims for the system wide works and equipment also Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations* amounting to JPY148,653,624 (equivalent to Rp17,024,437,366) and Rp218,394,527,449.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan berkeyakinan bahwa hal - hal yang telah diajukan oleh kontraktor tidak sesuai dengan kontrak yaitu terdapat kegagalan kontraktor dalam menyampaikan dokumen pendukung kepada *Engineer*, kontraktor belum mendapatkan persetujuan dari *Engineer* dan *Engineer* tidak menerbitkan *Interim Payment Certificate* (IPC) dan kegagalan kontraktor dalam menyampaikan dokumen pendukung secara tepat waktu (Catatan 20a). Selain itu, manajemen Perusahaan juga berkeyakinan bahwa jumlah denda keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kontraktor kepada DAB.

- p. Untuk memenuhi kebutuhan proyek, Perusahaan melakukan impor atas material, peralatan dan mesin tertentu yang akan digunakan dalam pekerjaan konstruksi Mass Rapid Transit Jakarta. Terdapat kewajiban Perusahaan untuk melakukan re-ekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor. Terkait atas kewajiban tersebut, Perusahaan telah mengeluarkan surat jaminan atas bea masuk kepada Kantor Bea dan Cukai, yang akan menjadi kewajiban sesungguhnya, apabila Perusahaan tidak melakukan re-ekspor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, surat jaminan bea masuk yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp61.461.254.000.
- q. Pada tanggal 4 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-571 dengan JICA terkait dengan Proyek. JICA setuju untuk memberikan pinjaman sebesar JPY75.218.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Pinjaman akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, belum terdapat penarikan pinjaman atas IP-571.

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The Company believed that the matters which has been submitted by the contractors is not meet the contract's requirements, in which the contractors failure to submitted its supporting documents to Engineer, the Contractor has not received the approval from Engineer and the Engineer was not issued the Interim Payment Certificate (IPC) and the Contractors failure to submit its supporting documents in proper period (Note 20a). Furthermore, the Company's management believed that the amount of delayed payment as of December 31, 2015 is difference with the amount has been submitted by the contractors to DAB.

- p. *In order to fulfill the project needs, the Company imported the material, equipment and machine that would be used for construction of Mass Rapid Transit Jakarta. There is a liability for the Company to re-export the equipment and machine which has been imported. Related to its liability, the Company has issued its guarantee letter to cover the custom import duty to "Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai", in which, the liability will be recognized if the Company failed to re-export. As of December 31, 2015, the Company has issued its guarantee letter amounted to Rp61,461,254,000.*
- q. *On December 4, 2015, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-571 with JICA in relation to the Project. JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount JPY75,218,000,000 for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. The loan will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. As of December 31, 2015, there is no loan drawdown from the IP-571.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai tercatat, yang juga merupakan taksiran nilai wajar, dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31,	
2015	2014
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan setara kas	391.759.198.534
Piutang bunga	204.684.922
Piutang lain-lain - neto	18.123.660
Total aset keuangan lancar	391.982.007.116
Aset Keuangan Tidak Lancar	
Uang jaminan	1.176.314.927
Total Aset Keuangan	393.158.322.043
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga	3.984.494.466
Biaya yang masih harus dibayar	196.950.890.106
Total liabilitas keuangan jangka pendek	200.935.384.572
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Retensi	194.100.964.647
Total Liabilitas Keuangan	395.036.349.219

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan berdasarkan jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*) dan bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

Hirarki nilai wajar

Perusahaan menggunakan hirarki teknik penilaian berikut dalam menentukan dan mengungkapkan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan:

Tingkat 1: harga yang beredar di pasar aktif (tidak disesuaikan) untuk aset atau liabilitas yang identik.

Tingkat 2: teknik-teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tingkat 3: teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

17. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The carrying values, which are also the estimated fair values, of the Company's financial instruments that are carried in the statement of financial position are as follows:

31 Desember/December 31,	
2015	2014
Current Financial Assets	
Cash and cash equivalents	391.759.198.534
Interest receivable	204.684.922
Other receivables - net	18.123.660
Total current financial assets	391.982.007.116
Non-current Financial Assets	
Guarantee deposits	1.176.314.927
Total Financial Assets	393.158.322.043
Current Financial Liabilities	
Payables to contractors and consultants - third parties	3.984.494.466
Accrued expenses	196.950.890.106
Total current financial liabilities	200.935.384.572
Non-current Financial Liabilities	
Retentions payable	194.100.964.647
Total Financial Liabilities	395.036.349.219

The fair values of the financial assets and liabilities are determined based on the amount at which the instruments could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

Fair value hierarchy

The Company uses the following hierarchy of valuation techniques in determining and disclosing the fair value of financial assets and liabilities:

Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly.

Level 3: techniques which use inputs that have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak ada nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang ditentukan dengan menggunakan salah satu dari teknik penilaian tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 karena Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset lancar dan liabilitas jangka pendek non-derivatif

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang terdiri dari kas dan setara kas, piutang bunga, piutang lain-lain - neto, utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga, biaya yang masih harus dibayar dan utang retensi.

Nilai wajar aset lancar dan liabilitas jangka pendek non-derivatif diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena akan jatuh tempo dalam waktu singkat.

Aset keuangan tidak lancar jangka panjang non-derivatif

Aset keuangan tidak lancar yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal (uang jaminan) diukur pada biaya perolehan.

Risiko suku bunga

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

	Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Biaya transaksi atas utang/ Debt issuance cost	Nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2015/ Carrying value as of December 31, 2015	
2015					
Suku bunga mengambang - Bank dan deposito berjangka	391.759.198.534	-	-	391.759.198.534	Floating rate - Cash in banks and time deposits
2014					
Suku bunga mengambang - Bank dan deposito berjangka	295.488.289.978	-	-	295.488.289.978	Floating rate - Cash in banks and time deposits

17. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

As of December 31, 2015 and 2014, no fair value of assets and liabilities was determined using either level 1, level 2 or level 3 valuation technique since the Company does not have financial assets at fair value through profit or loss.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to estimate such value:

Short-term non-derivative financial assets and liabilities

Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less consist of cash and cash equivalents, interest receivable, other receivables - net, payables to contractors and consultants - third parties, accrued expenses and retentions payable.

The fair values of short-term non-derivative financial assets and liabilities are assumed to be the same as their carrying amounts due to their short-term maturities.

Non-current non-derivative financial assets

Long-term financial assets which do not have quoted prices in active markets and their fair value cannot be measured reliably (guarantee deposits) are measured at cost.

Interest rate risk

The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Company's financial instruments that are exposed to interest rate risk:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

18. PENGELOLAAN MODAL

Dalam mengelola permodalannya, Perusahaan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan (a) efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi serta (b) pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

19. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan dibawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- a. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK 1, antara lain, mengklasifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- b. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 dan PSAK 19 Aset Takberwujud bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

18. CAPITAL MANAGEMENT

In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern and to maximize benefits to the stockholders and other stakeholders.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the (a) efficiency of capital use based on operating cash flow and (b) capital expenditures and future capital needs.

19. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below. The Company intend to adopt these standards, if applicable, when they become effective

- a. *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements on Disclosures initiative. This amendments clarify, rather than significantly change, existing PSAK 1 requirements, among others, to clarify the materiality, flexibility as to financial statements and identification of significant accounting policies*
- b. *Amendments to PSAK 16: Property, Plant and Equipment on Clarification of the accepted method for depreciation and amortization. The amendments clarify the principle in PSAK 16 and PSAK 19 Intangible Asset that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue based method cannot be used to depreciate the Property, Plant and Equipment.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**19. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

- c. Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. PSAK 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.
- d. PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.
- e. PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- f. PSAK 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- g. PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27.

**19. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- c. *Amendment to PSAK 24: Employee Benefits on Defined benefit plans: Employee Contributions. PSAK 24 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of years of service, an entity is permitted to recognise such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.*
- d. *PSAK 7 (2015 Improvement): Related Party Disclosures. The improvement clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. Entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.*
- e. *PSAK 16 (2015 Improvement): Property, Plant and Equipment. The improvement clarifies that in PSAK 16 and PSAK 19 that the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortisation is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalued amounts.*
- f. *PSAK 19 (2015 Improvement): Intangible Assets. The improvement clarifies that in PSAK 16 and PSAK 19 that the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortisation is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalued amounts.*
- g. *PSAK 25 (2015 Improvement): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The improvement provides editorial correction for paragraph 27 of PSAK 25.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**19. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

- h. PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK 68 dapat diterapkan tidak hanya kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK 55.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**20. PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN**

- a. Pada tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan telah mengirimkan tanggapan kepada DAB atas permintaan keputusan oleh kontraktor kepada DAB tentang *Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims for the system wide works and equipment dan Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations* dimana Perusahaan berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah diajukan oleh kontraktor tidak sesuai dengan kontrak (Catatan 16o).
- b. Pada tanggal 4 Februari 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1263/DSMI/2016 dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk meneruskan sebagian dana yang bersumber dari perjanjian pinjaman luar negeri kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar JPY63.871.000.000 dalam rangka membiayai Proyek Mass Rapid Transit Jakarta.

**19. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- h. *PSAK 68 (2015 Improvement): Fair Value Measurement. The improvement clarifies that the portfolio exception in PSAK 68 can be applied not only to financial assets and financial liabilities, but also to other contracts within the scope of PSAK 55.*

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

20. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. *On January 14, 2016, The Company has submitted their respons to DAB relating to the request of decision from contractors to DAB regarding Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims or the system wide works and equipment also Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations whereas the Company believed that the matters which has been submitted by the contractors is not meet the contract (Note 16o).*
- b. *On February 4, 2016, the Government of the Republic of Indonesia signed Agreement No. SLA-1263/DSMI/2016 with the Local Government of DKI Jakarta. Under the Subsidiary Loan Agreement, The Government of the Republic of Indonesia agrees to disburse funds partially from the foreign loan agreements to Jakarta Provincial Government of JPY63,871,000,000 for the Mass Rapid Transit Jakarta Project.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PENGUNGKAPAN INFORMASI TAMBAHAN
ARUS KAS**

Transaksi non-kas:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2015	2014
a. Perolehan/penambahan aset tetap dikreditkan ke:		
a. Modal disetor lainnya	1.267.153.984.005	337.143.141.187
b. Uang muka kontraktor	291.005.953.639	2.142.626.561
c. Utang retensi	157.541.189.084	23.389.774.332
d. Gaji dan kesejahteraan karyawan	6.112.862.901	2.071.270.590
e. Utang kontraktor dan konsultan	3.305.476.156	(50.742.768.306)
f. Liabilitas imbalan karyawan	819.824.028	423.513.399
g. Biaya masih harus dibayar	(248.209.615.550)	348.876.797.289
b. Penambahan uang muka kontraktor dikreditkan ke modal disetor lainnya	(603.053.028.726)	-

**21. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE OF CASH
FLOW INFORMATION**

Non-cash transactions:

a. Acquisition of/addition to property and equipment credited to:
a. Other paid-up capital
b. Contractors' advances
c. Retentions payable
d. Salaries and employee benefits
e. Payables to contractors and consultants
f. Liability for employee benefit
g. Accrued expenses
b. Contractors' advances credited to other paid-up capital

22. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang selesai disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2016.

**22. COMPLETION OF THE FINANCIAL
STATEMENTS**

The management of the Company is responsible for the preparation of the financial statements that were completed and authorized for issued by the Board of Directors on March 15, 2016.



INDEKS BAPEPAM LK X.K.6 DAN ARA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page	
Umum General			
1.	<p>Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris</p> <p>Annual report is presented in proper Bahasa Indonesia. English version of the report is recommended.</p>	✓	
2.	<p>Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca</p> <p>Annual report is printed on good quality paper grade, using readable typography</p>	✓	
3.	<p>Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas</p> <p>Annual report clearly states corporate identity</p>	<p>1. Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 2. Sampul muka; 3. Samping; 4. Sampul belakang; dan 5. Setiap halaman.</p> <p>1. Company name and year of annual report 2. are displayed on the: 3. Cover; 4. Side; 5. Back cover; and 6. Each page</p>	✓
4.	<p>Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan</p> <p>Annual report is uploaded to company's website</p>	<p>Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 (empat) tahun terakhir.</p> <p>Covers the last report and at least reports of last 4 (four) years</p>	✓

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Financial Highlights

1.	<p>Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>Information on company's operating results in the form of three (3) years comparison or since business commences - if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi memuat antara lain: 2. Penjualan/pendapatan usaha; 3. Laba (rugi): 4. Laba bruto 5. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan 6. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 7. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: 8. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan 9. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 10. Laba (rugi) per saham. <p>Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Information includes, among others: 2. Sales / revenue 3. Income (loss): 4. Gross profit 5. Income attributable to owner of parent company; and 6. Income attributable to noncontrolling interests; 7. Total comprehensive income (loss) 8. Income attributable to owner of parent company; 9. Income attributable to noncontrolling interests; and 10. Earnings (loss) per share <p>Note: Companies without subsidiaries need to present income (loss) and income (loss) and other comprehensive income as total.</p>	4
2.	<p>Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>Information on Company's financial position in the form of three (3) years comparison or since business commences - if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi memuat antara lain: 2. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 3. Jumlah aset; 4. Jumlah liabilitas; dan 5. Jumlah ekuitas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Information includes, among others: 2. Total investments in associates; 3. Total assets; 4. Total liabilities; and 5. Total equity 	4-5
3.	<p>Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>Financial ratio in the form of three (3) years financial year comparison or since business commences - if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi memuat 6 (enam) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan, yaitu: 2. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 3. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 4. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan; 5. Rasio lancar; 6. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 7. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 8. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Information includes 6 (six) financial ratios that are general and relevant to the industry where the company is engaged: 2. Return on asset; 3. Return on equity; 4. Income (loss) statement ratio; 5. Current ratio; 6. Debt to equity ratio; 7. Debt to asset ratio; and 8. Other financial informatio and ratio that are relevant to the company and industry type 	4

4.	<p>Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*</p> <p>Stock price information in tables and charts</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: 2. Jumlah saham yang beredar; 3. Kapitalisasi pasar; 4. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan 5. Volume perdagangan. 6. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. 7. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. 8. Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (suspension) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut. Jika penghentian sementara tersebut masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Information in tables include: 2. Total outstanding shares; 3. Market Capitalization; 4. Highest, lowest, and closing price of stock; and 5. Trade volume 6. Information in charts include closing price of stock and trade volume 7. Quarterly trading volume for the last 2 (two) financial years. 8. Where the company's stock trade is under suspension during the financial year, annual report must provide explanation regarding the suspension. If the suspension is still effective on the date of report issuance, the Listed or Public Company must also state measures taken to address the matter. 	N/A*
5.	<p>Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir*</p> <p>Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the last two (2) financial years</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi memuat: 2. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 3. Tingkat bunga/imbalan; 4. Tanggal jatuh tempo; dan 5. Peringkat obligasi/sukuk. <ol style="list-style-type: none"> 1. Information includes: 2. Total outstanding bonds/sukuk convertible bonds 3. Interest rate/Return 4. Maturity date 5. Bonds/sukuk rating 	N/A*
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Report of the Board of Commissioners and Board of Directors			
1.	<p>Laporan Dewan Komisaris</p> <p>Report of the Board of Commissioners</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat hal-hal sebagai berikut: 2. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 3. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan 5. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Report includes the following: 2. Assessment on BoD performance in terms of company management and basis of assessment 3. View on business prospects formulated by the BoD and basis of considerations 4. Assessment on the performance of committees under BoC 5. Changes in the BoC's composition and its reasons (where applicable) 	12-17

2.	Laporan Direksi Report of the Board of Directors	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat hal-hal sebagai berikut: 2. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 3. Analisis tentang prospek usaha; 4. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 5. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 6. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Includes the following: 2. Company's performance analysis that include strategic policy, achieved results to target ratio, and business challenges 3. Business prospect analysis 4. Implementation of good corporate governance; and 5. Assessment on the performance of committees under Bod (where applicable); and 6. Changes in the Board of Directors' composition and its reasons (where applicable) 	22-35
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <p>Include the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Signatures are placed on a separate page 2. Statement that the BoD and BoC are fully responsible for the accuracy of the annual report's content. 3. Signed by all members of the BoC and the BoD, with name and title; and 4. Written explanation in a separate letter by any member of the BoC or BoD who does not sign the annual report, or, written explanation in a separate letter by the other members should the written explanation is not available. 	252-253
IV. Profil Perusahaan Company Profile			
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Company's name and full address	<p>Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan situs web.</p> <p>Information includes, among others: name and address, zip code, telephone & fax number, email, and website</p>	42
2.	Riwayat singkat perusahaan A brief history of the Company	<p>Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.</p> <p>Information includes, among others: date/year of incorporation, name, and change(s) to the Company's name (where applicable). Note: disclose if change has never been made to company's name.</p>	44-53

3.	Bidang usaha Business Fields	<p>Uraian mengenai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. <p>Description on, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Company's business activities according to the latest Articles of Association; and 2. Description of business activities; and 3. Products and/or services generated 	56-58
4.	Struktur Organisasi Organizational structure	<p>Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.</p> <p>Presented in chart, including names and positions of at least up to one level below the BoD</p>	60-73
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Company's Vision, Mission and Corporate Culture	<p>Mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan. <p>Includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Company's vision; 2. Company's mission; 3. A statement declaring that the vision and mission have been endorsed by the BoD/BoC; and 4. Statement of corporate culture 	54-55
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Brief background information on members of BoC	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan. <p>Information includes, among others:</p> <p>Name;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Position (including position(s) in other companies or institutions); 2. Age; 3. Domicile; 4. Education (field of study and education institution attended); 5. Working experience (position, institution, and tenure period) 6. Brief appointment chronology as member of company's BoC 	18-21

7.	<p>Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi</p> <p>Brief background information on members of BoD</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name; 2. Position (including position(s) in other companies or institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (field of study and education institution attended); 6. Working experience (position, institution, and tenure period) 7. Brief appointment chronology as member of company's BoD 	36-39
8.	<p>Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)</p> <p>Number of employees (2 year-comparison) and a description of competence development (e.g. employee education and training)</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of employees for each level of the organization 2. Number of employees for each level of education 3. Number of employees by employment status; 4. Description and data of employee development programs, reflecting equal opportunities for all employee levels 5. Costs incurred for development programs 	116-129
9.	<p>Komposisi Pemegang saham</p> <p>Composition of Shareholders</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: 3. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; 4. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan 5. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Detailed names of 20 largest shareholders and percent of ownership 2. Details of shareholder names and percent of ownership cover: 3. Shareholders with 5% of more ownership; 4. Names of Directors and Commissioners who own shares; and 5. Groups of public shareholders, each with less than 5% ownership 	74

10.	<p>Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi</p> <p>List of Subsidiaries and/or Associates</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of Subsidiaries and/or Associates 2. Percent of share ownership 3. Description of the Subsidiaries and/or Associates' business fields 4. Information on Subsidiaries and/or Associates operational status (in operation or otherwise) 	N/A
11.	<p>Struktur grup perusahaan</p> <p>Company's group structure</p>	<p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan Special Purpose Vehicle (SPV).</p> <p>Company's group structure in chart that describes the structure of subsidiaries, associates, joint ventures and Special Purpose Vehicle (SPV)</p>	N/A
12.	<p>Kronologis pencatatan saham*</p> <p>Share listing chronology</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Share listing chronology 2. Types of corporate actions that prompt changes in the number of shares 3. Changes to number of shares from the beginning of listing to the end of financial year 4. Name(s) of stock exchange where the shares are listed 	N/A*
13.	<p>Kronologis pencatatan efek lainnya*</p> <p>Listing chronology of other securities</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek. <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Listing chronology of other securities 2. Types of corporate actions that prompt changes in the number of other securities 3. Changes to number of shares from the beginning of listing to the end of financial year 4. Name(s) of stock markets where the the securities are listed 5. Securities rating 	N/A*

14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal* Name and address of capital market institutions and/or capital market supporting professions	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. Information includes: 1. Name and address of the Securities Administration Agency 2. Name and address of the Public Accounting Firm 3. Name and address of rating agency	75
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards and/or certification received during last financial year and/or certification effective during last financial year, both national and international	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). Information includes: 1. Name of awards and/or certificates 2. Year received 3. Award and/or certification issuer 4. Validity period (for certification)	9
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiaries and/or branches or representative (if any)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. 3. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. Name and address of subsidiary; and 2. Name and address of branch/representative office 3. Note: Disclose if company does not own subsidiary/branch office/representative office	N/A
17.	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information available on company website	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. Information includes, at least: 1. Shareholder information up to ultimate individual owner; 2. Company group structure (where applicable); 3. Financial performance analysis; 4. Annual financial statements (last 5 years); and 5. BoC and BoD profiles	✓

V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Management Discussion and Analysis on Company Performance

1.	<p>Tinjauan operasi per segmen usaha</p> <p>Operational review per business segment</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: 3. Produksi; 4. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 5. Penjualan/pendapatan usaha; dan 6. Profitabilitas. <p>Contains a description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Each business segment; 2. Performance per segment, including: 3. Production/operations; 4. Increase/decrease in production capacity; 5. Sales / revenue; 6. Profitability 	82-96
2.	<p>Uraian atas kinerja keuangan perusahaan</p> <p>Description of Company's financial performance</p>	<p>Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas. <p>Financial performance analysis that includes a comparison between the financial performance of the year and with previous years (both in narrative and tables), which covers among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities 3. Equity 4. Sales/revenues, expenses, and net income (loss), other comprehensive income, and total Comprehensive Income (loss); and 5. Cash flows 	97-100
3.	<p>Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan</p> <p>Discussion and analysis on Company's solvency and collectability, presenting the calculation of ratios relevant to company's type of industry</p>	<p>Penjelasan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. <p>Decription on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Short and long term solvency 2. Receivables collectability Level 	101-102

4.	<p>Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)</p> <p>Discussion on capital structure and capital structure policy</p>	<p>Penjelasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut. <p>Description on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capital structure consisting of interest bearing liabilities and equity; and 2. Capital structure policies and basis of policy formulation 	102-103
5.	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir</p> <p>Discussion on material commitment for capital goods investment during last financial year</p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>Description on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Purpose of commitment 2. Expected fund source to fulfil the respective commitments 3. Currency of denomination 4. Steps taken by the company to protect the risk against related foreign currency position. <p>Note: Disclose if company has no material commitment for investments in capital goods</p>	N/A
6.	<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir</p> <p>Discussion on capital goods investment realized during last financial year</p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. <p>Description on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of capital goods investment 2. Purpose of investment; and 3. Value of capital goods investment realized during last financial year 4. Note: Disclose if there is no realization of capital goods investments 	103
7.	<p>Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan</p> <p>Comparative information between target at the beginning of financial year with realization, and target or projection for next one year regarding revenue, income, and other aspects considered significant for the Company</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang, 3. mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur permodalan, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comparison between target at the beginning of financial year with achievement (realization) 2. Target or projection for next 1 (one) year, 3. in terms of revenues, profit (loss), capital structure, dividend policy, and other aspects considered significant for the company. 	104-106

8.	<p>Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan</p> <p>Material Information and facts subsequent to the accountant's reporting date</p>	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.</p> <p>Description on significant events subsequent to the accountant's reporting date including their impacts on future business performance and risks. Note: Disclose if there is no significant event subsequent to accountant's reporting date.</p>	106
9.	<p>Uraian tentang prospek usaha perusahaan</p> <p>Description on company's business prospect</p>	<p>Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p> <p>Description on company's business prospect based that takes into account general industry and economic view supported by quantitative data from valid data sources.</p>	78-81
10.	<p>Uraian tentang aspek pemasaran</p> <p>Marketing aspect description</p>	<p>Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p> <p>Description on marketing aspects of the company's products and services, namely marketing and market share strategy</p>	N/A
11.	<p>Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir</p> <p>Description regarding dividend policy as well as date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p> <p>Description includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividend payout policy; 2. Amount of dividend; 3. Amount of dividend per share; 4. Pay-out ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividend for each year. <p>Note: Disclose reasons where dividend payout is not exercised</p>	103
12.	<p>Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)</p> <p>Exercise of employee and/or management stock option program (ESOP/MSOP)</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Description includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amount of stock in ESOP/MSOP and realization; 2. Period 3. Requirements of employee and/or management eligibility; and 4. Exercise price <p>Note: disclose if ESOP/MSOP is not available</p>	213

13.	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*</p> <p>Use of proceeds from Initial Public Offering (where the company is still required to report proceeds realization)*</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total proceeds generated; 2. Plan of proceeds use; 3. Details of utilization; 4. Proceeds balance; and 5. Date of GMS/EGMS approval to proceeds use amendment (if any). 	N/A*
14.	<p>Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi*</p> <p>Information on material transactions with conflict of interests and/or transactions with affiliated parties*</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of parties and nature of affiliation; 2. Statement on the fairness of transaction; 3. Reasons of transactions; 4. Realization of transactions during last financial year; 5. Company policy concerning review mechanism on transactions; and 6. Fulfillment of relevant rules and regulations. <p>Note: disclose if no such transaction occurs</p>	107
15.	<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan</p> <p>Description on regulatory changes that hold significant impact to the company</p>	<p>Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan.</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.</p> <p>Description contains, among others: any changes in regulations and their impacts to the Company</p> <p>Note: disclose if there is no regulatory change that holds significant impact to the company</p>	107
16.	<p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>Description on changes in accounting policies applied by the Company in last financial year</p>	<p>Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.</p> <p>Description contains, among others: changes of accounting policies, reasons, and impacts to financial statements.</p> <p>Note: disclose if there is no change to accounting policies</p>	107-108

17.	Informasi kelangsungan usaha Information on business continuity	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.</p> <p>Information contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspects that hold potentially significant impacts to business continuity in last financial year; Management assessment on aspects intended in point 1 Assessment assumptions used by the management <p>Note: disclose if there is no aspect that holds potentially significant impacts to business continuity during last financial year; disclose assumptions used by the management that inform the confidence that there is no significant aspects that hold potentially significant impacts to the company's business during financial year</p>	109-115
VI. Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance			
1.	Uraian Dewan Komisaris Board of Commissioners description	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). <p>Description includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> Description of BoC duties; Training program to enhance BoC's competency or induction program for new BoC member; and Disclosure on the Board Charter (Board of Commissioners Manual) 	146-158
2.	Informasi mengenai Komisaris Independen Information on Independent Commissioner	<p>Meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> Criteria to appoint independent commissioner; and Statement of independency of each Independent Commissioner. 	147-148
3.	Uraian Direksi Board of Directors description	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). <p>Description includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scope and responsibility of each BoD member; Training program to enhance BoD's competency or induction program for new BoC member; and Disclosure on the Board Charter (Board of Directors Manual) 	158-177

4.	<p>Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan assessment. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment procedure on BoC and BoD performance; 2. Criteria used to assess the performance of BoC and BoD. 3. Assessor 	157
5.	<p>Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Board of Commissioners and Board of Directors remuneration policy</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BoC Remuneration policy disclosure 2. BoD remuneration policy disclosure 3. Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoC 4. Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoD 5. Disclosure of indicators to determine BoD remuneration 	157, 174
6.	<p>Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi</p> <p>Frequency and attendance in Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, and joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. 4. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Date of meeting 2. Meeting participants; and 3. Meeting agenda 4. For each BoC, BoD, and joint meeting 	154-156, 171-174
7.	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu</p> <p>Information on majority and controlling shareholder(s), direct and indirect, up to ultimate individual owner(s)</p>	<p>Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.</p> <p>Presented in schematics or diagram except for SOEs fully owned by the government</p>	74, 142-143

8.	<p>Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali</p> <p>Disclosure of affiliated relationship between members Board of Directors, members of Board of Commissioners and/or Majority/Controlling Shareholders</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Affiliated relationship between members of BoD; 2. Affiliated relationship between members of BoD and members of BoC; 3. Affiliated relationship between members of BoD with Majority and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliated relationship between members of BoC; 5. Affiliated relationship between members of BoC with Majority and/or Controlling Shareholders <p>Note: disclose if relationship specified above is not present</p>	152-153, 170-171
9.	<p>Komite Audit</p> <p>Audit Committee</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and position of Audit Committee members. 2. Educational qualification and professional experience of Audit Committee members 3. Audit committee members independency 4. Duties and responsibilities description 5. Brief report of Audit Committee activities 6. Audit committee meeting frequency and attendance level 	176

10.	<p>Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi</p> <p>Remuneration and/or Nomination Committee</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, position, and brief profile of Nomination and/or Remuneration Committee members 2. Nomination and/or remuneration committee members' independency 3. Description of duties and responsibilities 4. Nomination and/or remuneration committee duties implementation report 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level 6. Statement of nomination and/or remuneration committee guideline availability; and 7. BoD succession policy 	177
11.	<p>Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan</p> <p>Other committees company's BoC</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, title, and brief profile of the members of the committees 2. Independency of the committee; 3. Duties and responsibilities description 4. Other committees' duties implementation report 5. Other committees' meeting frequency and attendance level 	177
12.	<p>Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan</p> <p>Corporate Secretary duties and function description</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and brief profile of Corporate Secretary officer; 2. Corporate Secretary duties implementation report; and 3. Training program to enhance competency of Corporate Secretary 	177-180
13.	<p>Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya</p> <p>Description of the previous year's General Meeting of Shareholders (GMS)</p>	<p>Dalam bentuk tabel mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. <p>Presented in table and includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Previous year's GMS resolutions; 2. Realization of previous year's GMS resolutions during financial year; 3. Reasons for any pending implementation of GMS resolutions 	143-146

14.	<p>Uraian mengenai unit audit internal</p> <p>Internal audit description</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of internal audit unit head; 2. Number of internal auditors under internal audit unit; 3. Internal audit certification as an internal audit professional 4. Organizational structure or position of the internal audit unit 5. Brief report of duty implementation 6. Party that appoints or dismisses the Head of Internal Audit Unit 	180-182
15.	<p>Akuntan Publik</p> <p>Public accountant</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and year of the last 5 years where the public accountant conducts financial statements audit; 2. Name and year of the last 5 years where the Public Accounting Firm conducts financial statements audit; 3. The amount offees for each type of service provided by public accountant during last financial year; and 4. Services other than financial statements audit provided by accountant during last financial year <p>Notes: Disclose if other services is not provided</p>	182-183
16.	<p>Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan</p> <p>Description on company's risk management</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explanation on risk management system implemented by the company; 2. Explanation on risk management system evaluation; 3. Explanation on risks faced by the company; and 4. Efforts to manage those risks 	183-191

17.	<p>Uraian mengenai sistem pengendalian intern</p> <p>Description on company's internal control system</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brief explanation on internal audit system, including operational and financial control; 2. Explanation of internal audit system conformity with internationally recognized framework (COSO – internal control framework); and 3. Explanation regarding evaluation on internal audit system effectiveness 	192-194
18.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup</p> <p>Description regarding Corporate Social Responsibility on environment</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan 3. terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain; dan 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policies implemented by the management 2. Activities performed 3. in terms of environmental programs relating to company's operations, e.g. use of eco-friendly and renewable material and energy, company waste management; environmental considerations in customer credit criteria, etc. 4. Environmental certification 	223-238
19.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja</p> <p>Description regarding corporate social responsibility in employment and health and safety at the workplace</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. 3. terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policies implemented by the management 2. Activities conducted 3. Regarding employment practice, occupational health and safety such as gender equality and job opportunity, occupational infrastructure and safety, employee turnover rate, occupational accident rate and so forth 	240-246

20.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan</p> <p>Description on corporate social responsibility in social and community development</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan, 4. terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policies implemented by the management; 2. Activities conducted; and 3. Costs incurred, 4. regarding social and community empowerment activities such as employment of locals, surrounding community empowerment, social infrastructure improvement, donations and so forth 	247
21.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen</p> <p>Description regarding corporate social responsibility on customer</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan, 3. terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policies implemented by the management; 2. Activities conducted 3. regarding product responsibility, such as customer health and safety, product information, facilities, number and ways to address grievances, and so forth. 	248-249
22.	<p>Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan</p> <p>Litigation or legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/ or Board of Commissioners serving on the Annual Report period</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). <p>Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan.</p> <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Description of case/litigation; 2. Case/litigation settlement status; 3. Impacts on company's financial condition; and 4. Administrative sanctions imposed on the company, BoC members, and BoD members by relevant authorities (in capital market, banking, or others) in the last financial year (or statement where sanctions are not imposed) <p>Note: Disclose if no litigations occur</p>	211
23.	<p>Akses informasi dan data perusahaan</p> <p>Information access and corporate data</p>	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p> <p>Description on publicly available access to corporate information and data, for example through website (in Bahasa Indonesia and in English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, and so forth</p>	130-134, 195-204

24.	<p>Bahasan mengenai kode etik</p> <p>Discussion on Company's Code of Conduct</p>	<p>Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Code of Conduct content 2. Disclosure that the Code of Conduct's is applicable for all organizational level 3. Code of conduct dissemination 4. Type of sanction for each breach of Code of Conduct 5. Number of code of conduct breach and imposed sanction in last financial year <p>Note: Disclouse if no code of conduct breach occurs in last financial year</p>	205-209
25.	<p>Pengungkapan mengenai whistleblowing system</p> <p>Disclosure on whistleblowing system</p>	<p>Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p>Description of whistleblowing system mechanism that includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grievance procedure 2. Protection for the whistleblower 3. Report handling 4. Report management unit; and 5. Number of reports filed and processed in last financial year as well as information on their follow-up <p>Note: Disclose if not reports filed in last financial year</p>	210
26.	<p>Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Heterogeneity policy in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors</p>	<p>Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya</p> <p>Description on company's heterogeneity policy in the composition of BoC and BoD in terms of education background (field of study), professional experience, age, and gender.</p> <p>Note: where such policy is not present, disclose the reasons and considerations</p>	149-150, 168

VII. Informasi Keuangan Financial Information			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan* Board of Directors and/or Board of Commissioners' statement on Financial Statements Accountability	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with relevant regulations concerning Financial Statements Accountability.	257-258
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on the financial statements		260-262
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini Description on the opinion of Independent auditor's opinion	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. The description should contain: 1. Name and signature 2. Audit Report Date 3. Public Accountant Office and Individual Public Accountant license number.	262
4.	Laporan keuangan yang lengkap Comprehensive financial statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Comprehensively discloses all elements in financial statements: 1. Financial position statement 2. Other Comprehensive income and loss statement 3. Equity change statement 4. Cash flows statement 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information about the earlier period 7. Financial position statement at the beginning of period when an entity applies certain accounting policies retrospectively or restates certain financial statement accounts, or when an entity reclassifies certain financial statement accounts (where relevant).	263-266, 285-286
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability ratio comparison	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of current year's profit/loss with previous year.	264

6.	Laporan Arus Kas Cash flow report	<p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. <p>Report has to meet the following rules:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Categorization of three activities: operating, investing, and financing activities. 2. Using direct method to present cash flow from operating activities 3. Separating the presentation between cash received and or cash expenses for operating, investing and financing activities during the year 4. Non-cash activity disclosure has to be presented in financial statement notes 	266, 310
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting policy highlights	<p>Meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. <p>Information includes, at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compliance with FAS. 2. Basis of financial statement measurement and preparation 3. Income tax 4. Employment benefits; and 5. Financial Instrument 	268-281
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Related party transaction disclosure	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of the related parties, as well as the nature and relationship therewith 2. Value of the transaction and the percentage on total related income or expenses. 3. Total outstanding and the percentage to total asset or liabilities 	107, 273-274, 286-287

9.	<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan</p> <p>Disclosure on any aspects related with Taxes</p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. 2. Statement on the relation between Tax expense (income) and accounting income. 3. Statement that Taxable Profit as calculated through reconciliation is used as the basis to fill Tax Return statement. 4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the balance sheet in each period of presentation, and amount of deferred tax expense (income) recognized in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax recognized in the financial position report. 5. Tax dispute disclosure 	272-273, 289-290
10.	<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap</p> <p>Disclosure on fixed assets</p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Method of depreciation 2. Description on adopted accounting policy – revaluation or cost model 3. Method and significant assumptions used to estimate fair value of fixed asset (for revaluation model) or disclosures on fair value of fixed assets (for cost model); and 4. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and at the end of the period by indicating: addition, reduction, and reclassification 	270-271, 287-288

11.	<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*</p> <p>Disclosure related to operating segments</p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. <p>Disclosures must include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General information which includes the factors used to identify the reported segments; 2. Information on profit and loss, assets, and the liabilities of the reported segments; 3. Reconciliation of the segments' total revenues, reported segments' profit and loss, assets, liabilities, and other material elements of the segment to the relevant amount within the entity; and 4. Disclosure at entity level, which covers information on product and/or services, geographical location, and major customers. 	N/A
12.	<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan</p> <p>Disclosure regarding Financial Instruments</p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. <p>Disclosure must include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Details of financial instruments and their classification; 2. Fair value and hierarchy for each financial instrument category; 3. Risk Management policy; 4. Explanation on financial instrument inherent risks: market risk, credit risk, and liquidity risk; and 5. Quantitative analysis on each financial instrument inherent risk 	274-284
13.	<p>Penerbitan laporan keuangan</p> <p>Issuance of Financial Statements</p>	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. <p>Information includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Date of financial statements issuance authorization; and 2. Parties responsible to authorize financial statements. 	257-258, 262

N/A* = PT MRT Jakarta belum beroperasi secara komersial, dan belum melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
N/A* = PT MRT Jakarta belum beroperasi secara komersial, dan belum melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.



PT. MRT JAKARTA

Wisma Nusantara, 21th Floor,
Jl. M.H. Thamrin 59,
Jakarta 10350 - INDONESIA

T. (62)21 3906454
F. (62) 21 315846
E. info@jakartamrt.com



www.jakartamrt.com